PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021-2026

WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);

32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

6. Pemerintah Pusat, yang disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
9. Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan yang diberikan kepada kementerian/lembaga/dinas/PD untuk setiap program kegiatan.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:

a. visi, misi, dan program Wali Kota sebagai Kepala Daerah;

b. berisikan arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan daerah, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;dan

c. berisikan program yang menggambarkan keterlibatan dunia usaha, masyarakat dan juga Pemerintah yang mendukung perwujudan visi, misi dan program Wali Kota.

(2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD dan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	:	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	:	PENUTUP

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.

(2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Badan Pengusahaan serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan

c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

(3) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan

fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD tahun 2021-2026 dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.

(2) Dalam rangka efektivitas perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun;

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) RPJMD tahun 2021-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan RPJMD Tahun 2026-2031 yang memuat visi dan misi Wali Kota terpilih periode selanjutnya.

(2) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 Desember 2021

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (7,44/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum

DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, perlu di susun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurun waktu 5 Tahun mendatang.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 121

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
DAFTAR GAMBAR IV
DAFTAR TABEL X
KATA PENGANTAR XXII
DAFTAR SINGKATAN XXIV
BAB I PENDAHULUAN I-2
1.1 Latar Belakang I-2
1.1.1 Latar Belakang Penyusunan RPJMD 2021-2026 ..... I-2
1.1.2 Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) Terhadap Penyusunan RPJMD Kota Batam 2021-2026 ..... I-6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-9
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-16
1.4 Maksud dan Tujuan RPJMD I-22
1.5 Sistematika Penulisan I-22
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-2
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-2
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-2
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-15
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-20
2.1.4 Demografi II-24
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-32
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial II-32
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-48
2.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga II-70
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-72
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Layanan Wajib II-72

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-238
2.3.3 Fokus Fungsi Penunjang II-257
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-269
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-269
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-271
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-276
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-277
BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH III-2
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-3
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-5
3.1.2 Neraca Daerah III-25
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-34
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-34
3.2.2 Analisis Pembiayaan III-37
3.3 Kerangka Pendanaan III-41
3.3.1 Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah III-41
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-54
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV-2
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah IV-2
4.2 Isu Strategis IV-34
4.2.1 Adaptasi Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19 ..... IV-42
4.2.2 Mengembangkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing IV-46
4.2.3 Reformasi Birokrasi IV-48
4.2.4 Mewujudkan Batam sebagai Bandar Madani Berstandar Internasional IV-50
4.2.5 Menciptakan Batam sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional IV-51
4.2.6 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar IV-52

4.2.7 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan IV-54
4.2.8 Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD IV-55
4.2.9 Pembangunan Berbasis Gender (Perempuan, Anak, Disabilitas dan Lansia) IV-57
4.2.10 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim IV-59
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-2
5.1 Visi V-2
5.2 Misi V-3
5.3 Tujuan dan Sasaran V-7
5.4 Hubungan Antara Isu Strategis dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026 ..... V-29
5.5 Keselarasan Visi dan Misi Pembangunan Kota Batam 2021-2026 dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kota Batam 2005-2025 ..... V-31
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-2
6.1 Strategi Pembangunan Daerah VI-2
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah VI-24
6.3 Program Pembangunan Daerah VI-32
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-2
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan VII-2
7.2 Program Perangkat Daerah VII-5
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-2
BAB IX PENUTUP IX-2
9.1 Pedoman Transisi IX-2
9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendekatan Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ..... I-4
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-19
Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan Perencanaan A-Spasial I-21
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Batam II-2
Gambar 2.2 Luas Wilayah Administratif Kecamatan di Kota Batam (%) II-6
Gambar 2.3 Peta Topografi Kota Batam II-7
Gambar 2.4 Peta Morfologi Kota Batam II-8
Gambar 2.5 Peta Hidrologi Kota Batam II-10
Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kota Batam 2020-2040 ..... II-11
Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah II-15
Gambar 2.8 Peta Struktur Ruang Wilayah Kota Batam II-18
Gambar 2.9 Peta Pola Ruang Wilayah Kota Batam II-20
Gambar 2.10 Potensi Kerugian Ekonomi Dampak Perubahan Iklim Sektor Prioritas (Rp Triliun) II-24
Gambar 2.11 Piramida Penduduk Kota Batam Tahun 2020 ..... II-27
Gambar 2.12 Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-38
Gambar 2.13 Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-43
Gambar 2.14 Perbandingan IPM Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020 ..... II-50
Gambar 2.15 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 ..... II-51

Gambar 2.16 Angka Melek Huruf (dalam persen) Kota Batam 2016-2020 ..... II-56
Gambar 2.17 Angka Harapan Hidup (dalam tahun) Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-57
Gambar 2.18 Angka Kematian Ibu (jiwa per 100.000 kelahiran hidup) di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-58
Gambar 2.19 Angka Kematian Bayi (jiwa per 1000 kelahiran hidup) Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-60
Gambar 2.20 Nilai Target dan Realisasi Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) pada Anak Balita (dalam persen) Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-61
Gambar 2.21 Perkembangan Prevalensi Pendek dan Sangat Pendek (*Stunting*) pada Anak Balita (dalam persen) Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-62
Gambar 2.22 Perkembangan Persentase Kurus dan Sangat Kurus (*Wasting*) pada Anak Balita (dalam persen) Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-63
Gambar 2.23 Prevalensi TBC (dalam persen) Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-65
Gambar 2.24 *Case Notification Rate* (CNR) per 100.000 di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-66
Gambar 2.25 Jumlah Angkatan Kerja Kota Batam Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020 ..... II-68
Gambar 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-70
Gambar 2.27 Indikator Makro Kinerja Seni dan Budaya Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-71
Gambar 2.28 Kualifikasi Pendidik dan Pendidik Tersertifikasi Tahun 2017-2020 ..... II-86

Gambar 2.29 Skor Indeks Parameter Mutu Pendidikan Tahun 2018 ..... II-88
Gambar 2.30 Distribusi Sepuluh Penyakit Terbesar Kunjungan Pasien Puskesmas Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-99
Gambar 2.31 Prevalensi HIV di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-101
Gambar 2.32 Persentase Pengobatan Pada Penderita HIV di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-102
Gambar 2.33 Distribusi Proporsi Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016-2020 ..... II-103
Gambar 2.34 Distribusi Jumlah Kematian AIDS dan CFR AIDS 2010-2020 ..... II-104
Gambar 2.35 *Incident Rate* DBD Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-105
Gambar 2.36 *Case Fatality Rate* (Dalam persen) DBD Kota Batam II-106
Gambar 2.37 Pola Kejadian DBD Per Bulan di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-107
Gambar 2.38 Case Notification Rate (CNR) di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-109
Gambar 2.39 Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-110
Gambar 2.40 Temuan Kasus Hipertensi Tekanan Darah Tinggi di Fasilitas Kesehatan Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-112
Gambar 2.41 Kejadian Obesitas Berdasarkan Jenis Kelamin II-113
Gambar 2.42 Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-119
Gambar 2.43 Realisasi Persentase Pertolongan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-120
Gambar 2.44 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020 ..... II-121
Gambar 2.45 Persentase Cakupan ASI Eksklusif di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-123

Gambar 2.46 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-123
Gambar 2.47 Persentase Imunisasi Lengkap pada Bayi di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-125
Gambar 2.48 Distribusi Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Tahun 2016-2020 ..... II-126
Gambar 2.49 Proporsi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-127
Gambar 2.50 Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-128
Gambar 2.51 Cakupan Rawat Jalan Puskesmas di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-129
Gambar 2.52 Cakupan Rawat Jalan Puskesmas Tahun 2020 ..... II-130
Gambar 2.53 Cakupan Rawat Jalan Rumah Sakit di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-130
Gambar 2.54 Cakupan Rawat Jalan Setiap Rumah Sakit Tahun 2020 ..... II-131
Gambar 2.55 Cakupan Rawat Inap Penerima Manfaat Jamkesda Kota Batam Tahun 2017-2020 ..... II-132
Gambar 2.56 Cakupan Rawat Inap Puskesmas Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-133
Gambar 2.57 Cakupan Rawat Inap Puskesmas Tahun 2020 ..... II-133
Gambar 2.58 Cakupan Rawat Inap Rumah Sakit di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-135
Gambar 2.59 Cakupan Rawat Inap Rumah Sakit Tahun 2020 ..... II-135
Gambar 2.60 Jumlah Desa/Kelurahan STBM Tahun 2016-2020 ..... II-137
Gambar 2.61 Jumlah Desa/Kelurahan SBS dan STBM Tahun 2017-2020 ..... II-138
Gambar 2.62 Pembinaan Tempat Pengelola Makanan Tahun 2016-2020 ..... II-139

Gambar 2.63 Distribusi Hotel yang Memenuhi Syarat Kesehatan di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-140
Gambar 2.64 Infografis Kondisi Air Bersih Kota Batam II-156
Gambar 2.65 Peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Batam II-178
Gambar 2.66 Peta Koridor Bus Trans Batam, Rute Bus Sekolah Batam, Trayek Angkutan Laut Perintis dan Rencana Trayek Angkutan Feeder Bus Trans Batam II-207
Gambar 2.67 Indeks SPBE Kota Batam Tahun 2020 ..... II-216
Gambar 2.68 Piramida Usaha Mikro Kecil dan Menengah II-219
Gambar 2.69 *The House Model Small Enterprise* II-222
Gambar 2.70 Model Bangunan Olahraga Nasional II-230
Gambar 2.71 Peta Wisata Kota Batam II-244
Gambar 2.72 Rasio Pengeluaran Non Makanan Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-271
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... III-6
Gambar 3.2 Efektivitas Pendapatan Daerah (REV), Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Batam Tahun 2016-200 ..... III-8
Gambar 3.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... III-14
Gambar 3.4 Kinerja Belanja Daerah Kota Batam Selama Tahun 2016-2020 ..... III-19
Gambar 3.5 Proporsi Belanja Daerah Kota Batam tahun 2016-2020 ..... III-21
Gambar 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III-23

Gambar 3.7 Persentase Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total pengeluaran Kota Batam Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III-35
Gambar 3.8 Persentase Realisasi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Kota Batam Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III-37
Gambar 3.9 Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Total Penerimaan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III-46
Gambar 3.10 Proyeksi Anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021-2026 ..... III-50
Gambar 4.1 Komponen Pembentuk Isu Strategis Kota Batam IV-35
Gambar 4.2 Pembobotan Isu Strategis Kota Batam Tahun 2021-2026 ..... IV-41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD I-5
Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administratif Kota Batam II-5
Tabel 2.2 Luas Kawasan Batam pada Tiap Kelas Kemiringan Lereng II-7
Tabel 2.3 Luas dan Persentase Jenis Geologi di Kawasan Batam II-9
Tabel 2.4 Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Batam II-12
Tabel 2.5 Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Batam II-13
Tabel 2.6 Jenis, Risiko dan Potensi Bencana di Kota Batam Berdasarkan Kasus II-21
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk Kota Batam II-25
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Umur Tahun 2016-2020 ..... II-28
Tabel 2.9 Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2016-2020 ..... II-29
Tabel 2.10 Rasio Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020 ..... II-30
Tabel 2.11 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2021-2027 ..... II-31
Tabel 2.12 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2028-2034 ..... II-31
Tabel 2.13 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2035-2037 ..... II-32
Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Batam Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha II-33
Tabel 2.15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Batam Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha II-35
Tabel 2.16 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Batam Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha II-39

Tabel 2.17 Laju Inflasi Kota Batam, Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-40
Tabel 2.18 PDRB Per Kapita Harga Konstan (Tahun Dasar=2010) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-42
Tabel 2.19 Garis Kemiskinan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 ..... II-44
Tabel 2.20 Indeks Gini Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-46
Tabel 2.21 Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-47
Tabel 2.22 Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2020 ..... II-48
Tabel 2.23 Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-49
Tabel 2.24 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-52
Tabel 2.25 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-53
Tabel 2.26 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 ..... II-54
Tabel 2.27 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 ..... II-55
Tabel 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-69
Tabel 2.29 Indikator Makro di Bidang Olah Raga Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-72

Tabel 2.30 Kinerja Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2020 ..... II-73
Tabel 2.31 Kinerja Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD dan SMP Tahun 2016-2020..... II-75
Tabel 2.32 Kinerja Indikator Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah PAUD, SD/MI, SMP/MTs Tahun 2016-2020 ..... II-76
Tabel 2.33 Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SD, SMP Tahun 2016-2020 ..... II-77
Tabel 2.34 Kinerja Indikator Rasio Rombel dan Jumlah Perpustakaan Jenjang SD dan SMP Tahun 2016-2020 ..... II-78
Tabel 2.35 Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah Jenjang SD dan SMP Tahun 2016-2020..... II-80
Tabel 2.36 Kinerja Indikator Persentase Tingkat Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Tahun 2016-2020 ..... II-80
Tabel 2.37 Kinerja Indikator Bangunan Sekolah SD dan SMP Kondisi Baik Tahun 2016-2020..... II-81
Tabel 2.38 Kinerja Indikator Sekolah PAUD, SD dan SMP Memiliki Kondisi Sarpras Baik Tahun 2016-2020..... II-82
Tabel 2.39 Akreditasi Sekolah TK, SD/SDLB dan SMP/SMPLB Tahun 2016-2020 ..... II-84
Tabel 2.40 Kinerja Indikator Persentase Guru yang Mampu Mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) Nasional Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2020 ..... II-85
Tabel 2.41 Kinerja Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan PAUD Tahun 2016-2020 ..... II-90
Tabel 2.42 Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020..... II-93

Tabel 2.43 Realisasi Indikator Kinerja Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tahun 2016-2020 ..... II-94
Tabel 2.44 Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Target Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2014, 2019 dan 2024 ..... II-96
Tabel 2.45 Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk Tahun 2017-2020 ..... II-97
Tabel 2.46 Target Rasio Tenaga Kesehatan dalam Pemenuhan HAM Aspek Kesehatan Tahun 2020 ..... II-98
Tabel 2.47 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2016 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 ..... II-113
Tabel 2.48 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2017-2018 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 ..... II-115
Tabel 2.49 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2019-2020 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 ..... II-115
Tabel 2.50 Capaian SDGs Urusan Kesehatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-117
Tabel 2.51 Realisasi Indikator Kinerja Bina Marga Tahun 2016-2020 ..... II-143
Tabel 2.52 Lokasi Genangan di Kota Batam II-145
Tabel 2.53 Realisasi Indikator Kinerja Sumber Daya Air Tahun 2016-2020 ..... II-147
Tabel 2.54 Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah *Mainland* dan *Hinterland* Kota Batam Tahun 2020 ..... II-149

Tabel 2.55 Sambungan Rumah Air Bersih Kota Batam Tahun 2020 ..... II-154
Tabel 2.56 Indikator Cipta Karya Tahun 2016-2020 ..... II-155
Tabel 2.57 Indikator Kinerja Tata Ruang Tahun 2016-2020 ..... II-159
Tabel 2.58 Rekapitulasi Pengawasan Bangunan dan Menara Tahun 2020 ..... II-160
Tabel 2.59 Realisasi Kinerja Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020 ..... II-161
Tabel 2.60 Jumlah Rusun di Kota Batam s.d. Tahun 2020..... II-163
Tabel 2.61 Data Hunian Kota Batam..... II-164
Tabel 2.62 Kebutuhan Hunian di Kota Batam II-164
Tabel 2.63 Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam II-167
Tabel 2.64 Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Batam Hingga Tahun 2020 ..... II-167
Tabel 2.65 Taman Aktif Kota Batam II-169
Tabel 2.66 Ruang Terbuka Hijau Kota Batam, Taman Kota dan Taman Ruas Jalan Utama II-171
Tabel 2.67 Ruang Terbuka Hijau Kota Batam, Taman ROW Jalan Lokal II-174
Tabel 2.68 Realisasi Kinerja Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2020 ..... II-180
Tabel 2.69 Realisasi Kinerja Indikator Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2020 ..... II-182
Tabel 2.70 Realisasi Kinerja Indikator Pemadam kebakaran Tahun 2015-2020 ..... II-184
Tabel 2.71 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-185
Tabel 2.72 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Sosial Tahun 2016-2020 ..... II-187
Tabel 2.73 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam..... II-188

Tabel 2.74 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020 ..... II-194
Tabel 2.75 Realisasi Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020..... II-196
Tabel 2.76 Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016-2019 ..... II-197
Tabel 2.77 Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020..... II-199
Tabel 2.78 Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-200
Tabel 2.79 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020..... II-202
Tabel 2.80 Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2016-2020 ..... II-204
Tabel 2.81 Capaian Jumlah Penumpang, Jumlah Armada dan Jumlah Koridor Trans Batam Tahun 2016-2020..... II-205
Tabel 2.82 Rencana Rute Angkutan Orang Trayek Pengumpan (*Feeder*)..... II-206
Tabel 2.83 Rasio Ijin Trayek di Kota Batam Tahun 2016-2020..... II-208
Tabel 2.84 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Batam Tahun 2016-2020..... II-209
Tabel 2.85 Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020..... II-211
Tabel 2.86 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2019..... II-214
Tabel 2.87 Kondisi Koperasi di Kota Batam Hingga Tahun 2016 - 2020..... II-216
Tabel 2.88 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2020..... II-218
Tabel 2.89 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2019..... II-224

Tabel 2.90 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2019 ..... II-228
Tabel 2.91 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020 ..... II-232
Tabel 2.92 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016-2020 ..... II-234
Tabel 2.93 Pencapaian Elemen Persandian II-235
Tabel 2.94 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020 ..... II-236
Tabel 2.95 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020 ..... II-237
Tabel 2.96 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020 ..... II-238
Tabel 2.97 Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan II-239
Tabel 2.98 Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-240
Tabel 2.99 Rincian Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-240
Tabel 2.100 Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020 ..... II-242
Tabel 2.101 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020 ..... II-248
Tabel 2.102 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kota Batam Tahun 2019 ..... II-249
Tabel 2.103 Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020 ..... II-250
Tabel 2.104 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020 ..... II-253
Tabel 2.105 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020 ..... II-254

Tabel 2.106 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020 ..... II-255
Tabel 2.107 Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Tahun 2016-2020 ..... II-255
Tabel 2.108 Data Perkembangan IKM per tahun di Kota Batam Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2016-2020 ..... II-256
Tabel 2.109 Jumlah Pembinaan IKM di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-257
Tabel 2.110 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2016-2020 ..... II-259
Tabel 2.111 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Litbang Tahun 2016-2020 ..... II-261
Tabel 2.112 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2016-2020 ..... II-261
Tabel 2.113 Penyaluran Pokok dan Pendapatan Bunga II-262
Tabel 2.114 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020 ..... II-263
Tabel 2.115 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2016-2020 ..... II-264
Tabel 2.116 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2016-2020 ..... II-266
Tabel 2.117 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2016-2020 ..... II-268
Tabel 2.118 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-270
Tabel 2.119 Bank Umum Pemerintah II-272
Tabel 2.120 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) II-272
Tabel 2.121 Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kota Batam Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2020 ..... II-273
Tabel 2.122 Jumlah Hotel di Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-274

Tabel 2.123 Rasio Ketersediaan Daya Listrik II-276
Tabel 2.124 Angka Kriminalitas (Tindak Pidana) dan Jumlah Demonstrasi Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-277
Tabel 2.125 Kualitas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-278
Tabel 2.126 Rasio Ketergantungan Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... II-278
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... III-6
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... III-7
Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... III-13
Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Total Penerimaan Daerah Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... III-16
Tabel 3.5 Kinerja Belanja Daerah Kota Batam Selama Tahun 2016-2020 ..... III-18
Tabel 3.6 Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... III-20
Tabel 3.7 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016 – 2020 ..... III-22
Tabel 3.8 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Batam Tahun Anggaran 2016 – 2020 ..... III-25
Tabel 3.9 Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2016-2020 dan Rata-rata Pertumbuhannya III-27
Tabel 3.10 Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... III-31
Tabel 3.11 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Batam Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III-35

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Modal untuk Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III-36
Tabel 3.13 Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... III-38
Tabel 3.14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Batam Tahun 2016-2020..... III-40
Tabel 3.15 Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Total Penerimaan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 ..... III-44
Tabel 3.16 Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2026 ..... III-47
Tabel 3.17 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2026..... III-49
Tabel 3.18 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Batam Tahun 2021-2026 ..... III-51
Tabel 3.19 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026..... III-56
Tabel 3.20 Rencana Penggunaan Penerimaan/ Kemampuan Keuangan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 ..... III-58
Tabel 4.1 Rangkuman Permasalahan Makro Daerah..... IV-7
Tabel 4.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah IV-13
Tabel 4.3 Abstraksi Isu-isu Strategis..... IV-61
Tabel 4.4 Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Kota Batam 2021-2026 dengan Isu Strategis Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau IV-63
Tabel 5.1 Penjelasan Pokok Visi dan Kaitannya dengan Misi Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026 ..... V-6

Tabel 5.2 Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (Indikator Kinerja Utama/IKU) Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026 beserta Target Capaiannya V-15
Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Daerah) beserta Target Capaiannya Setiap Misi Pembangunan Kota Batam 2021-2026 .....V-18
Tabel 5.4 Hubungan Isu Strategis Pembangunan Kota Batam, Nasional dan Internasional dengan Pokok Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026 .....V-29
Tabel 5.5 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025 Tahap IV V-32
Tabel 5.6 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 .....V-33
Tabel 5.7 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan Agenda Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 .....V-36
Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.....VI-6
Tabel 6.2 Program Prioritas Janji Walikota dan Wakil Walikota yang Disinkronkan dengan Program Pembangunan Daerah.....VI-11
Tabel 6.3 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah.....VI-23
Tabel 6.4 Rencana Kawasan Strategis Kota Batam VI-25
Tabel 6.5 Arah Kebijakan Pembangunan.....VI-26
Tabel 6.6 Program Prioritas Pembangunan Pencapaian Tujuan PembangunanBerkelanjutan/*Sustainable Development Goal* (TPB/SDG's) di Dalam RPJMD Tahun 2021-2026.....VI-27

Tabel 6.7 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Batam VI-34
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 ..... VII-3
Tabel 7.2 Indikator Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Batam Tahun 2021-2026 ..... VII-6
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Batam Tahun 2021-2026..... VIII-6
Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Indikator Sasaran Strategis RPJMD Pemerintahan Kota Batam Tahun 2021-2026..... VIII-7

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa atas selesainya penulisan Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021−2026. Dokumen ini merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah yang bertumpu pada pendekatan saintifik untuk menghasilkan isu-isu strategis.

Penyusunan RPJMD Kota Batam yang dimulai awal tahun 2020 ini memiliki perbedaan dengan penyusunan periode−periode sebelumnya, dimana pada awal tahun 2020 negara-negara di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*) akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 ini telah mengganggu kehidupan manusia terutama pada aspek kesehatan sehingga mengakibatkan resesi ekonomi global. Saat ini resesi ekonomi dampak pandemi Covid-19 lebih parah dibandingkan krisis keuangan global tahun 2008−2009, pada tahun 2020 diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia berada pada angka minus 3,0 persen, 195 juta orang kehilangan pekerjaan dan 420-580 juta orang menjadi miskin.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan berada pada minus 0,4−2,3 persen, tingkat kemiskinan naik 9,7−10,2 persen dan pengangguran terbuka naik 7,8−8,5 persen serta kunjungan wisatawan mancanegara berada pada minus 3 juta orang (3,6-4 juta US$). Perlambatan ekonomi global dan nasional tersebut tentu berdampak sistemik terhadap kondisi pembangunan di Kota Batam, laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2019 sebesar 5,92 persen, yang merupakan nilai tertinggi dari capaian selama tiga tahun terkahir, dengan adanya pandemi Covid-19 dipastikan akan mengkoreksi secara siginifikan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan tahun 2021 yang sebesar 5,07 persen menjadi -2,19 persen di tahun 2020 dan diperkirakan pada tahun 2021 tidak lebih dari 3,00 persen.

Kecepatan penularan virus Covid 19 yang tinggi dan pelaksanaan vaksinasi yang kurang masif di Indonesia menyebabkan pandemi belum juga berakhir. Keterbatasan penyediaan vaksin akibat kurangnya pasokan vaksin menyebabkan masih banyak penduduk yang belum mendapatkan vaksinasi. Hal ini dapat mengakibatkan para perumus dan pengambil kebijakan, pelaku ekonomi serta masyarakat secara umum menghadapi situasi yang sulit diprediksi (*unpredictable*) dan penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Namun demikian Pemerintah Kota Batam beserta seluruh *stakeholder* pembangunan harus tetap optimis dan berkolaborasi dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 sehingga dapat bergerak bersama untuk menciptakan pembangunan Kota Batam yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Pandemi Covid-19 perlu dipandang sebagai titik tolak dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Batam yang lebih baik melalui pendekatan *Build Back Better* dengan berorientasi pada peningkatan ketahanan (*resilience*) untuk seluruh sektor pembangunan, dan perlahan mulai meninggalkan pendekatan *Bussines as Usual* yang tidak responsif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan saat ini. Dukungan dan peran serta masyarakat serta seluruh *stakeholder* di Kota Batam sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dari pandemi Covid-19 dan mewujudkan tujuan pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2024.

Dokumen RPJMD ini telah melalui proses pembahasan bersama DPRD Kota Batam dan dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Akhir kata, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran hingga selesainya Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ini.

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

dto

Wan Darussalam

DAFTAR SINGKATAN

APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	=	Adaptasi Perubahan Iklim
BAPPEDA	=	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BP Batam	=	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Covid-19	=	Corona Virus Desease 2019
DBD	=	Demam Berdarah *Dengue*
DPRD	=	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IKU	=	Indikator Kinerja Utama
IKK	=	Indikator Kinerja Kunci
KD	=	Kepala Daerah
KLB	=	Kejadian Luar Biasa
KLHS RPJMD	=	Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
PDB	=	Produk Domestik Bruto
PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto
Permendagri	=	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	=	Peraturan Presiden
Pilkada	=	Pemilihan Kepala Daerah
PUPR	=	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAPBD	=	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RAPBN	=	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
RDTR	=	Rencana Detil Tata Ruang
Renja PD	=	Rencana Kerja Perangkat Daerah
Renja K/L	=	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Renstra PD	=	Rencana Strategis Perangkat Daerah
Renstra K/L	=	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
RKPD	=	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKP	=	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMD	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	=	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
SDA	=	Sumber Daya Air
SDG'S	=	*Sustainable Development Goals*
SIPD	=	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
SPM	=	Standar Pelayanan Minimum
THIS	=	Tematik Holistik Integratif Spasial
UUD 1945	=	Undang - Undang Dasar 1945

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Latar Belakang Penyusunan RPJMD 2021-2026

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (Dwiputri et al, 2019). Dalam perspektif pembangunan daerah, Kota Batam yang berbentuk kepulauan berada di jalur pelayaran internasional dan terletak di Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis sebagai daerah otonomi sekaligus sebagai kawasan berikat, perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dalam konteks ini Pemerintah Kota Batam memiliki keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kota Batam, dengan memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Kota Batam, yang pada akhirnya Kota Batam dapat berperan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2020 yang mana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dalam menetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2021-2024. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Batam perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun mendatang.

Terkait dengan periodesasi RPJMD, berdasarkan diktum nomor (3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ bahwa Periodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Diktum tersebut sesuai dengan amanat ayat (7) Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, periode RPJMD Kota Batam adalah dari tahun 2021 s.d 2026 meskipun masa jabatan wali kota hanya sampai dengan 2024.

Dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Sesuai dengan Pasal 7 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, berdasarkan prosesnya RPJMD Kota Batam disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Lebih lanjut, sesuai amanah RPJMN 2020-2024, berdasarkan substansinya RPJMD Kota Batam perlu disusun dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis *money follow program* dan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1. 1 Pendekatan Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; PP Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 18 Tahun 2020 (diolah)

Adapun rangkaian tahapan penyusunan meliputi: (1) Tahap perumusan Rancangan Teknokratik, (2) penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, (3) perumusan rancangan awal RPJMD, (4) penyusunan rancangan RPJMD; (5) pelaksanaan musrenbang RPJMD; (6) perumusan Ranperda RPJMD; dan (7) penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD

Tahapan	Keterangan
Rancangan Teknokratik RPJMD	Proses teknokratik memuat evaluasi indikator kinerja pembangunan pada seluruh urusan konkuren kewenangan daerah kota dan evaluasi kinerja keuangan periode lalu melalui pendekatan ilmiah, serta merumuskan isu strategis daerah. Penyusunan teknokratik berisi Bab 1 hingga Bab 4.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	Pararel dengan penyusunan Teknokratik RPJMD, proses penyusunan KLHS RPJMD bertujuan memetakan kondisi kinerja indikator-indikator yang terkait dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Indikator yang belum baik menjadi landasan penyusunan isu strategis pembangunan berkelanjutan. Dengan terintegrasinya kajian lingkungan dengan RPJMD diharapkan pembangunan yang dilaksanakan telah mempertimbangkan aspek lingkungan.
Rancangan Awal RPJMD	Tahap ini memuat Pengintegrasian proses teknokratik dan proses politik. Permasalahan yang dipetakan dalam teknokratik kemudian diintegrasikan dengan visi-misi-janji Kepala daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih tajam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan. Selanjutnya tahap ini juga sudah memetakan program-program serta indikator program dan keuangan indikatif per program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD berisi Bab 1 hingga Bab 9. Konsultasi publik dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah rancangan awal RPJMD disusun. Rancangan Awal perlu di ajukan ke DPRD, paling lambat 40 hari setelah kepala daerah dilantik. Rancangan Awal perlu di ajukan ke Provinsi paling lambat 50 hari setelah kepala daerah dilantik.
Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah	Tahap ini dilaksanakan pararel dengan Rancangan awal RPJMD. Tahap ini melakukan identifikasi permasalahan sebagai landasan penyusunan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah, sehingga penyusunan program dan kegiatan tidak berlandaskan kepada keinginan, melainkan berlandaskan pada analisa permasalahan yang

Tahapan	Keterangan
	perlu diselesaikan. Apa yang dihasilkan dalam Rancangan awal Renstra menjadi masukan Rancangan Awal RPJMD, sehingga yang termuat dalam RPJMD benar-benar merupakan masukan dari Renstra Perangkat daerah. Rancangan awal Renstra berisi Bab 1 hingga Bab 7.
Rancangan RPJMD	Tahap ini dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD yang telah mengakomodir masukan-masukan dari proses konsultasi publik-proses pembahasan di DPRD-proses pembahasan di Provinsi. Setelah tahap penyusunan rancangan RPJMD diselenggarakan musrenbang, atau paling lambat musrenbang RPJMD dilaksanakan 75 hari setelah kepala daerah dilantik.
Ranperda RPJMD	Perumusan Ranperda RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi Ranperda RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD

Sumber: Permendagri No 86/2017; Permendagri No 7/2018 (diolah)

Berdasarkan rangkaian tahapan penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah pada tabel di atas, penyusunan dokumen Ranperda RPJMD Kota Batam 2021-2026 ini merupakan tahap keenam, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

1.1.2 Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) Terhadap Penyusunan RPJMD Kota Batam 2021-2026

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam Tahun 2021-2026 ini memiliki perbedaan dengan penyusunan periode-periode sebelumnya, yang mana pada awal tahun 2020 negara-negara di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*) akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 ini telah mengganggu kehidupan manusia terutama pada aspek kesehatan sehingga mengakibatkan resesi ekonomi global. Perkembangan dan penyebaran Covid-19 di dunia meningkat drastis pada awal tahun 2020 ketika Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, yakni sebesar 336,88 persen dalam waktu 15 hari, sedangkan di Indonesia peningkatan kasus Covid-19 sebesar 405,11 persen dalam waktu 15 hari, sementara itu di Kota Batam peningkatan kasus sebesar 331,25 persen dalam waktu 44 hari.

Para ahli telah melakukan analisis bahwa resesi ekonomi dampak pandemi Covid-19 lebih parah dibandingkan krisis keuangan global tahun 2008-2009. Dengan adanya kebijakan *physical distancing/social distancing* penerimaan masyarakat mengalami penurunan, sehingga daya beli masyarakat juga mengalami penurunan mengakibatkan sisi permintaan menurun. Kebijakan *physical distancing/social distancing* juga telah menyebabkan kegiatan produksi terganggu sehingga sisi penawaran juga mengalami penurunan. Turunnya sisi penawaran dan permintaan sekaligus menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif pada wilayah terdampak pandemi Covid-19.

Pandemi Covid 19 sangat berdampak pada perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 adalah negatif yaitu berada pada minus -2,07 persen, yang mana pada tahun 2020 triwulan satu pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 2,97 persen, triwulan dua (-5,32 persen), triwulan tiga (-3,49 persen), dan triwulan empat (-2,19 persen). Sedangkan tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan dibandingkan tahun 2019. Indeks gini tahun 2019 Indonesia adalah 0,380. Selanjutnya pada tahun 2020 indeks gini meningkat menjadi 0,381 di semester 1 tahun 2020 dan menjadi 0,385 pada semester 2 tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Batam tidak berbeda signifikan antara dua tahun terakhir, hanya meningkat 0,005 poin.

Sementara itu, dampak pandemi Covid 19 terhadap perekonomian Kota Batam dapat terlihat melalui beberapa indikator yang menunjukkan *trend* penurunan. Ekonomi Kota Batam tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,55 persen. Namun, tingkat ketimpangan berkurang menjadi 0,323 pada tahun 2020 dari 0,331 pada tahun 2019.

Resesi ekonomi dampak Covid-19 tentu berdampak pada peningkatan kemiskinan di Kota Batam. Berdasarkan Data BPS Kota Batam, jumlah penduduk miskin Kota Batam tahun 2019 mencapai 66.210 penduduk. Namun, akibat

adanya pandemi jumlah penduduk miskin Kota Batam tahun 2020 meningkat menjadi 67.060 orang. Namun demikian persentase penduduk miskin Kota Batam mengalami penurunan, yaitu 4,85 pada tahun 2019 menjadi 4,75 persen pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi akibat persentase pertambahan penduduk Kota Batam lebih tinggi dibandingkan persentase penambahan jumlah penduduk. Berdasarkan perhitungan kebutuhan untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, terdapat 284.223 kepala keluarga yang perlu mendapatkan *social safety net* (bantuan jaring pengaman sosial), meskipun tidak masuk kateogri miskin dalam Data Terpadu Kementerian Sosial RI, fakta riil di lapangan ditemukan adanya penurunan status dari masyarakat menengah menjadi masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19 ini.

Kecepatan penularan virus Covid 19 yang tinggi dan pelaksanaan vaksinasi yang kurang masif di Indonesia menyebabkan pandemi belum juga berakhir. Keterbatasan penyediaan vaksin akibat kurangnya pasokan vaksin menyebabkan masih banyak penduduk yang belum mendapatkan vaksinasi. Hal ini dapat mengakibatkan para perumus dan pengambil kebijakan, pelaku ekonomi serta masyarakat secara umum menghadapi situasi yang sulit diprediksi (*unpredictable*) dan penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Namun demikian Pemerintah Kota Batam beserta seluruh *stakeholder* pembangunan harus tetap optimis dan berkolaborasi dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 sehingga dapat bergerak bersama untuk menciptakan pembangunan Kota Batam yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Batam memandang pandemi Covid-19 sebagai titik tolak dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Batam yang lebih baik melalui pendekatan *Build Back Better* dengan berorientasi pada peningkatan ketahanan (*resilience*) untuk seluruh sektor pembangunan, dan perlahan mulai meninggalkan pendekatan *Bussines as Usual* yang tidak responsif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan saat ini. Yang dimaksud dengan pendekatan "*build back better*" dimaksudkan sebagai upaya mitigasi

bencana karena tidak hanya sekadar membangun kembali rumah atau bangunan yang hancur dengan risiko yang sama, tetapi membangun masyarakat yang tangguh bencana agar risiko bencana berkurang secara signifikan. Kebijakan pembangunan jangka menengah harus benar-benar di desain untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, menjamin kesehatan dalam jangka panjang, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik (*green jobs*), menanggulangi perubahan iklim (kelangkaan air bersih, kekeringan, kelangkaan pangan, dst) sekaligus membangun masyarakat yang tangguh di masa mendatang. Dengan demikian Kota Batam dapat berkontribusi secara optimal bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam kerangka *Sustainable Development Goals*.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang

membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MenLHK/Setjen/Set.1//9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1958);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lebih lanjut, uraian secara umum disampaikan di bawah ini.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan RPJMD memperhatikan pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah nasional dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Batam.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan RPJMD memperhatikan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Batam.

C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap Keempat dari Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang periode Tahun 2020-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD.

D. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kota.

E. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan Tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

F. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

G. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 Tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

Secara diagramatis alur hubungan antar dokumen dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3.

Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Kemudian, dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat A-Spasial perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial yakni dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR, serta RTR Kawasan Strategis Daerah, selanjutnya perlu juga diselaraskan dengan dokumen-dokumen RTR dari daerah tetangga.

Dalam konteks penyusunan dokumen RPJMD, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, maka kebijakan terkait spasial yang termuat dalam RPJMD perlu berpedoman pada RTRW Daerah. Selanjutnya dokumen Renstra PD yang merupakan penjabaran teknis dari RPJMD perlu berpedoman pada RTRW Daerah dalam menentukan lokasi penyelenggaraan program kegiatan. Secara skematik uraian keselarasan dokumen spasial dan a-spasial dijabarkan pada Gambar 1.3.

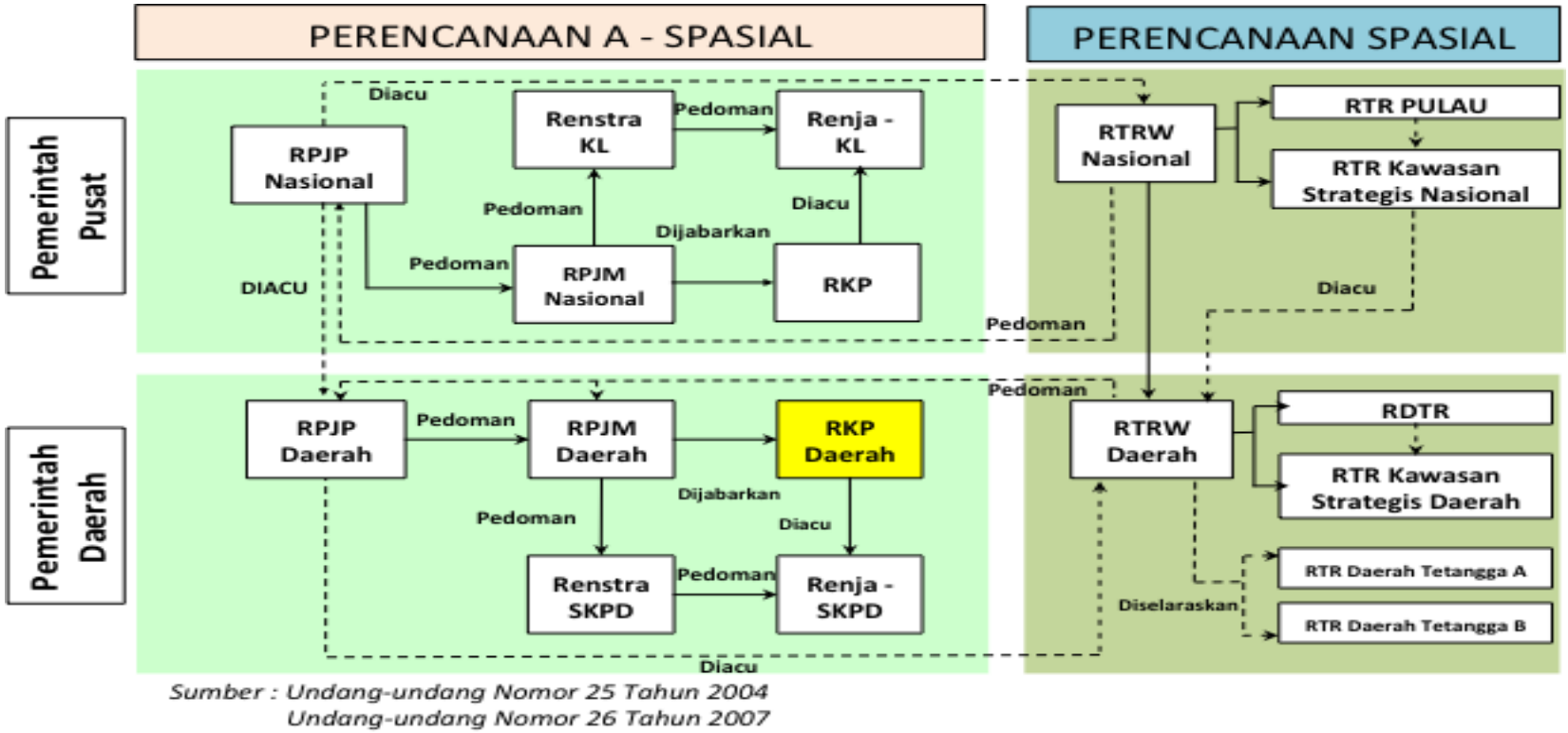

Gambar 1. 3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan Perencanaan A-Spasial

1.4 Maksud dan Tujuan RPJMD

RPJMD ini dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Batam tahun 2021-2026 serta menjadi acuan bagi *stakeholders* Kota Batam dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ini telah disusun dan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan, serta telah memuat substansi pendahuluan; gambaran umum kondisi Daerah; gambaran keuangan Daerah; permasalahan dan isu srategis Daerah; visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan penutup.

Tujuan disusunnya RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ini antara lain:

1. Memenuhi ketentuan tahapan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dengan menyempurnakan hasil kajian teknokratik RPJMD yang berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
2. Merumuskan perencanaan daerah melalui tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026;

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyajian dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. Pada latar belakang dijelaskan pengertian RPJMD, pendekatan dalam penyusunan RPJMD dan tahapan dalam penyusunan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah terkini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam periode tahun 2021-2026.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan terkini yang pada akhirnya menjadi pertimbangan dalam kemampuan pendanaan program-program pembangunan. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan dan untuk mendanai pembangunan daerah serta alokasi anggaran dalam prioritas pembangunan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan, strategi dan skala prioritas.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang berisi program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif sesuai periodesasi RPJMD.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah transisi, dimana RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2026 dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan pedoman bagi setiap Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD dan RKPD, serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku kepentingan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak Dan Kondisi Geografis

A. Posisi Astronomis

Secara *astronomis*, wilayah administrasi Kota Batam dengan koordinat geografis 0°25’29” sampai dengan 1°15’00” Lintang Utara dan 103°34’35” sampai dengan 104°26’04” Bujur Timur.

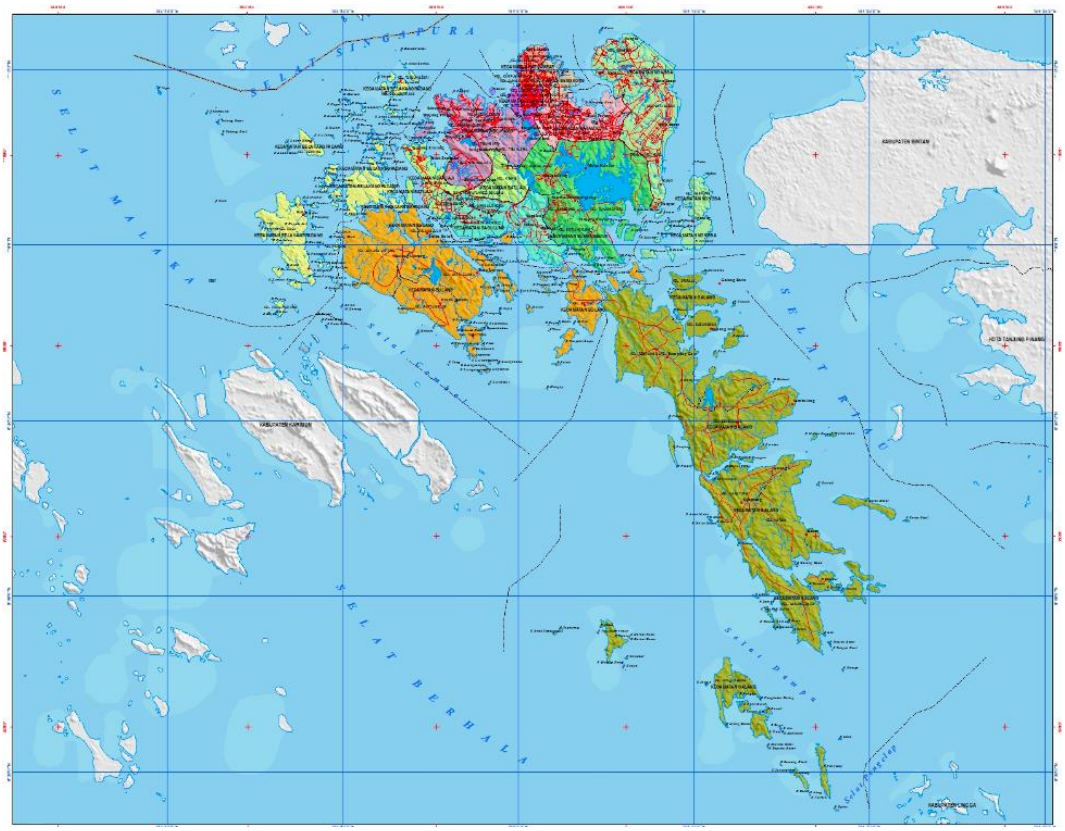

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Batam
Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

Lebih lanjut, mengacu pada peta di atas, dapat diketahui bahwa secara *geografis* mempunyai letak yang strategis, yaitu berada di jalur pelayaran dunia internasional, di sebelah Utara wilayah Kota Batam berbatasan dengan selat

Singapura, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun, kemudian di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bintan. Letaknya yang sangat strategis menjadikan daerah ini selanjutnya ditetapkan sebagai daerah khusus yang dikembangkan sebagai daerah industri, perdagangan dan pariwisata. Waktu tempuh dari Kota Batam menuju Singapura dengan menggunakan transportasi laut hanya 40 menit dengan jarak sekitar 25 Km. Sedangkan waktu tempuh dari Kota Batam ke Pelabuhan Johor Malaysia melalui transportasi laut hanya 1 jam 45 menit dengan jarak sekitar 50 Km. Kondisi tersebut menjadi keunggulan kompetitif yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Kota Batam.

B. Posisi Geostrategik

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa letak Kota Batam berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, Wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa. Hal ini dikarenakan ketersediaan sumber daya lahan dan tenaga kerja yang cukup serta adanya kemudahan investasi yang diberikan.

Lebih jauh lagi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kota Batam ditetapkan untuk pengembangan prioritas nasional sektor industri dan pariwisata, yakni pengembangan Integrasi Kawasan Industri Batam-Bintan, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) TWA Muka Kuning, Nongsa - Pulau Abang dan sekitarnya. Adapun diversikasi jenis pariwisata yang akan ditingkatkan mencakup: (1) wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan); (2) wisata budaya (*heritage tourism*, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada *Cultural Heritage Regeneration*, dan wisata desa); (3) wisata buatan (*meeting-incentive-convention-exhibition*/MICE,

yacht and cruise, wisata kebugaran/*wellness tourism*, wisata kesehatan/*medical tourism*, dan wisata olah raga).

Dalam perspektif keamanan dan pertahanan Nasional, Kota Batam sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga, sekaligus sebagai pintu masuk kunjungan wisatawan mancanegara terbesar setelah Jakarta dan Bali memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara. Konsekuensi logis dari hal tersebut, segala aspek yang berpotensi mengganggu keamanan dan pertahanan di Wilayah Batam menjadi prioritas di tingkat nasional. Hal ini semakin memantapkan Kota Batam sebagai kota yang kondusif, aman dan nyaman.

C. Kondisi Kawasan

Wilayah Kota Batam secara geografis berada di perairan laut dangkal, dengan luas wilayah adalah 458.024 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 103.480 Ha (23%) dan luas wilayah perairan/laut 354.544 Ha (77%) (sumber: Bapelitbangda Kota Batam). Terdapat 370 buah pulau besar dan kecil (sumber: hasil verifikasi BIG tahun 2012). Pulau-pulau tersebut pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Moro, Kundur, serta Karimun di bagian selatan. Adapun urutan beberapa pulau dari yang besar sampai terkecil antara lain di Kecamatan Bulang terdapat Pulau Buluh, di Kecamatan Galang terdapat Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Rempang, Pulau Air Raja, Pulau Subang Mas dan Pulau Abang.

Karakteristik kepulauan di Kota Batam memiliki keunikan tersendiri, dengan hamparan pulau-pulau yang banyak dan bentangan pantai yang cukup panjang. Sehingga dalam perspektif ke depan, Kota Batam dapat mengembangkan sumber daya kelautan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pesisir dan wilayah perairan laut.

2.1.1.2 Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dengan 9 (sembilan) kecamatan berada di daerah perkotaan (Pulau Batam) sedangkan 3 (tiga) kecamatan berada di daerah pesisir. Jumlah kelurahan di seluruh kecamatan mencapai 64 (enam puluh empat) kelurahan.

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administratif Kota Batam

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)		
			Darat	Laut	Total
1.	Belakang Padang	6	6.855	66.490	73.345
2.	Bulang	6	15.893	26.550	42.443
3.	Galang	8	35.331	211.816	247.147
4.	Sungai Beduk	4	10.597	1.484	12.081
5.	Nongsa	4	10.837	28.011	38.848
6.	Sekupang	7	6.853	3.863	10.716
7.	Lubuk Baja	5	1.116	3.714	4.830
8.	Batu Ampar	4	1.096	8.276	9.372
9.	Batam Kota	6	3.854	789	4.643
10.	Segulung	6	5.495	925	6.420
11.	Batu Aji	4	4.182	2.037	6.219
12.	Bengkong	4	1.371	589	1.960
Jumlah		64	103.480	354.544	458.024

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Dari data tersebut di atas, maka diketahui bahwa Kecamatan Galang memiliki luasan wilayah yang paling luas dibandingkan wilayah kecamatan lainnya, yaitu mencapai 53,96%. Sedangkan Kecamatan Bengkong merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan daerah lainnya, yaitu hanya sebesar 0,43%. Lebih lanjut, luas wilayah administratif kecamatan berdasarkan persentase disampaikan pada diagram di bawah ini.

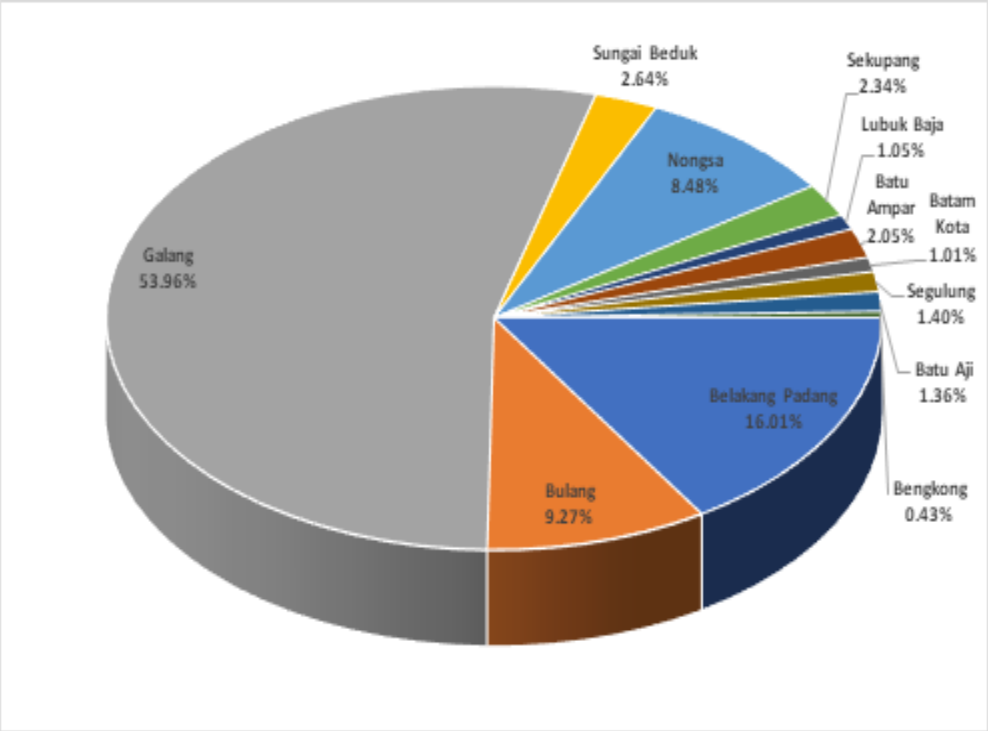

Gambar 2. 2 Luas Wilayah Administratif Kecamatan di Kota Batam (%)

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam (diolah)

2.1.1.3 Kondisi Topografi dan Morfologi

Wilayah Kota Batam memiliki kontur permukaan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau, ketinggian antara 7 mdpl hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru.

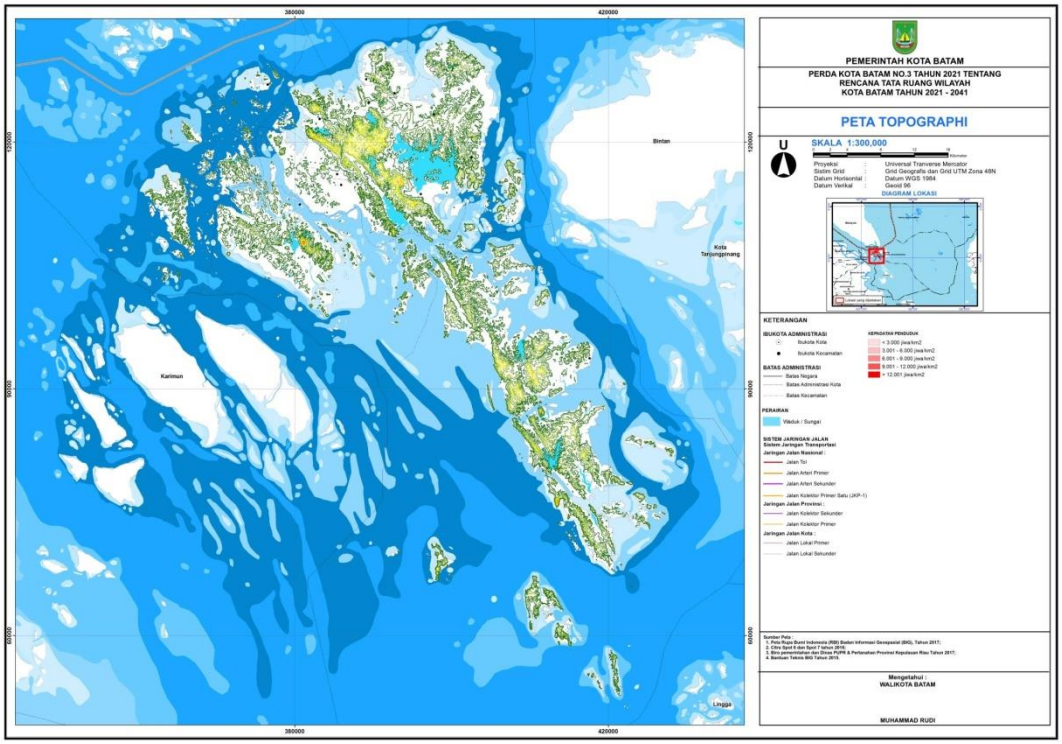

Gambar 2. 3 Peta Topografi Kota Batam

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017

Berdasarkan hasil interpretasi peta topografi skala 1:50.000, informasi kemiringan lereng di Kota Batam diklasifikasikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Luas Kawasan Batam pada Tiap Kelas Kemiringan Lereng

No	Kemiringan	Luas Kemiringan Lereng (km^2)
1	16 – 25 %	7,816
2	25 – 27 %	41,80
3	>27 %	53,72
4	8 – 16 %	322,0
5	3 – 8 %	282,5
6	<3 %	319,4

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017

Morfologi wilayah pada dasarnya merupakan gambaran bentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng secara umum, dan ketinggiannya. Terkait dengan morfologi ini, di kawasan Batam, terdapat satuan morfologi daratan dan perbukitan. Adapun satuan morfologi daratan di sini merujuk pada bentuk

bentang alam yang didominasi oleh daratan yang relatif datar atau sedikit bergelombang. Di kawasan Batam, morfologi daratan yang ada adalah dataran rendah dan dataran bergelombang. Adapun untuk satuan morfologi perbukitan merujuk pada bentang alam yang memperlihatkan relief baik halus maupun kasar, membentuk bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Di kawasan Batam morfologi daratan yang ada adalah perbukitan rendah dan perbukitan tinggi. Peta Morfologi Kota Batam dapat dilihat pada Gambar 2.4.

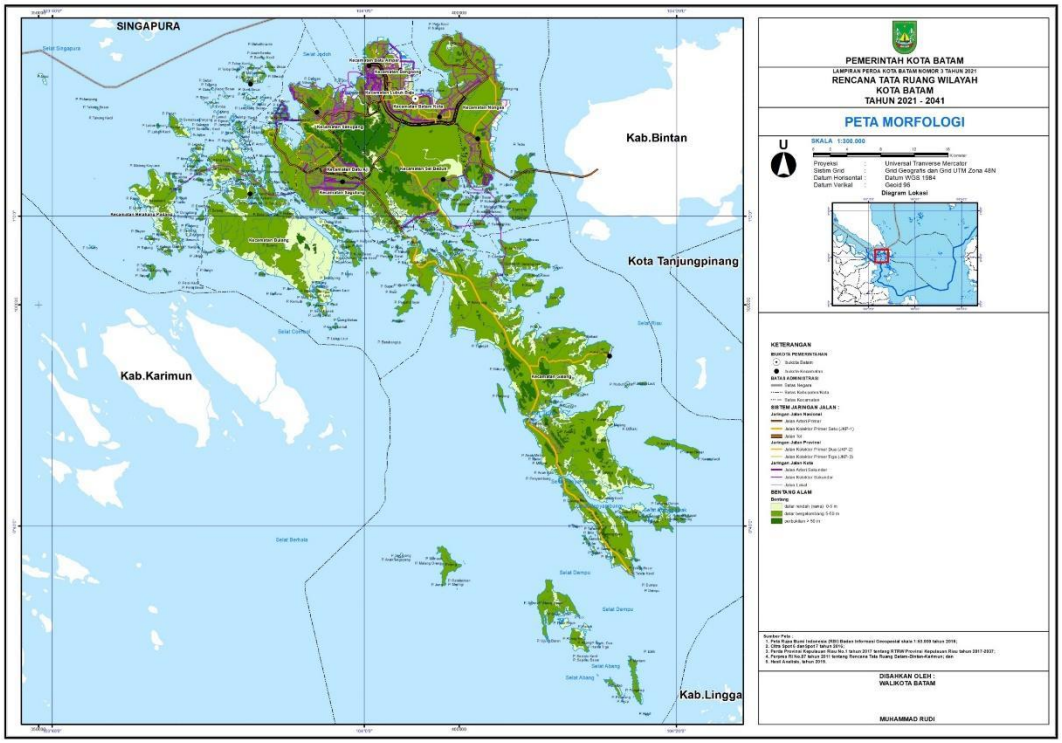

Gambar 2. 4 Peta Morfologi Kota Batam

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017

2.1.1.4 Kondisi Geologi

Wilayah Kota Batam merupakan bagian dari daerah Paparan Sunda yang secara stratigrafi merupakan daerah yang berpotensi endapan plases bawah laut. Berdasarkan interpretasi rekaman seismik, dinyatakan bahwa struktur bentang geologi yang terdapat di dasar laut perairan Kepulauan Riau merupakan patahan dengan pola Barat Laut-Tenggara di bagian Barat perairan dan pola Barat-Timur di bagian Timur perairan hingga semuanya berkembang mengikuti tingkat kesuburan perairan yang tinggi, sehingga menjadikan perairan Kota Batam

sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya perikanan besar (baik jumlah maupun keragaman). Di samping itu, perairan Kota Batam juga kaya akan kelimpahan tutupan atau spesies terumbu karang (*coral reef*) dan berbagai jenis ikan karang (*demersal*) maupun ikan hias (*ornamental fish*).

Pembentukan struktur geologi di Pulau Batam terdiri dari kelurusan berarah timur laut- barat daya yang oleh Katili (1977) dimasukkan ke dalam Laut Karimata yang berada di sebelah timur lajur timur. Selain itu terbentuk sesar normal (Kusnama, dkk., 1994). Seperti pulau-pulau kecil yang berada di garis khatulistiwa, kepulauan Kota Batam dan sekitar mempunyai kekhasan/karakteristik hidrogeologi dengan air permukaan melimpah dan air tanah dangkal. Adapun informasi mengenai luas dan persentase jenis geologi di Kawasan Batam disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3 Luas dan Persentase Jenis Geologi di Kawasan Batam

No	Jenis Geologi	Luas (Km^2)	Persentase
1.	Granit	82,05	7,9%
2.	Garis Tepi Pantai / Pulau	7,865	0,8%
3.	Formasi Tanjung Kerotang	274,5	26,4%
4.	Formasi Pancur	109,9	10,6%
5.	Formasi Goungon	495,6	47,7%
6.	Formasi Duriangkang	28,77	2,8%
7.	Aluvium	39,52	3,8%
Total		1038,21	100 %

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017

Oleh karena merupakan gugusan kepulauan yang secara geografis keberadaannya di perairan laut dangkal, maka wilayah Kota Batam yang sangat potensial untuk tumbuh kembang terumbu karang. Namun karena aktivitas antropogenik yang intensif, menjadikan kehidupan terumbu karang di wilayah Indonesia Barat hanya 5% luasan yang baik. Dalam perspektif ke depan, kiranya perlu dilakukan upaya pelestarian terhadap sumber daya alam bawah laut di wilayah Batam.

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kota Batam dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air bawah tanah/air tanah dan air permukaan. Untuk jenis air tanah tersebar di 2 wilayah, yaitu:

1. Perbukitan lipatan yang terdapat hampir di sebagian wilayah. Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun berupa batu pasir, batu lempung, fillit, dan kuarsit yang bersifat padu. Umumnya, air tanah tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau secah, serta pada material rombakan hasil lapukan batuan padu tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal;
2. Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku. Jenis air tanah ini terdapat di bagian timur Pulau Batam yang tersusun oleh granit dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah Kota Batam terdapat di Pulau Buluh, Pulau Bulang Lintang, Pulau Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Mekawa, Pulau Dendang, dan Pulau Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada daerah batuan beku berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap air.

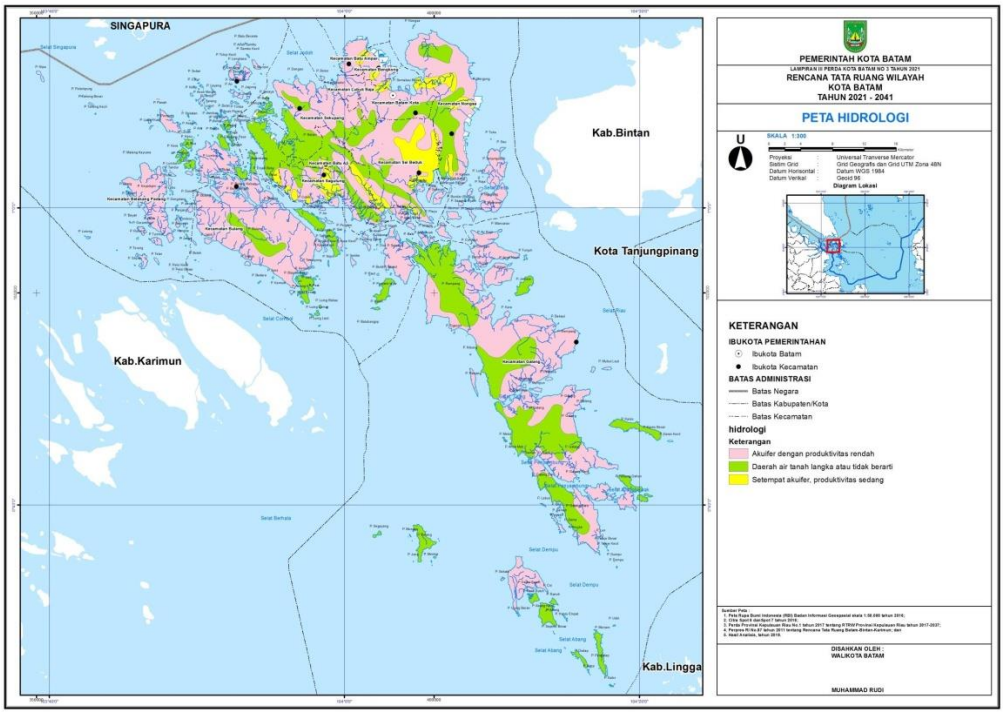

Gambar 2. 5 Peta Hidrologi Kota Batam

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017

Sedangkan untuk jenis air permukaan di Kota Batam terdapat pada Waduk Sei Baloi, Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Harapan, Waduk Nongsa, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sekanak I, Waduk Sekanak II, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Bulang Lintang, Waduk Pulau Bulan, serta air permukaan lainnya yang bersumber dari Sungai Sagulung dan Sungai Nongsa. Masing-masing waduk dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sehingga waduk tersebut berfungsi sebagai penampung air baku untuk penyediaan air bersih di Kota Batam.

2.1.1.6 Klimatologi

Kota Batam beriklim tropis dengan suhu udara minimum tahun 2020 berkisar antara 20,7^{0}C-23,9^{0}C dan suhu maksimum berkisar antara 32,5^{0}C-35,3^{0}C, sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun 2020 adalah 26,85^{0}C-29,1^{0}C, jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka telah terjadi peningkatan suhu, pada tahun 2019 suhu rata-rata sepanjang tahun 2019 adalah 26,9^{0}C-28,7^{0}C.

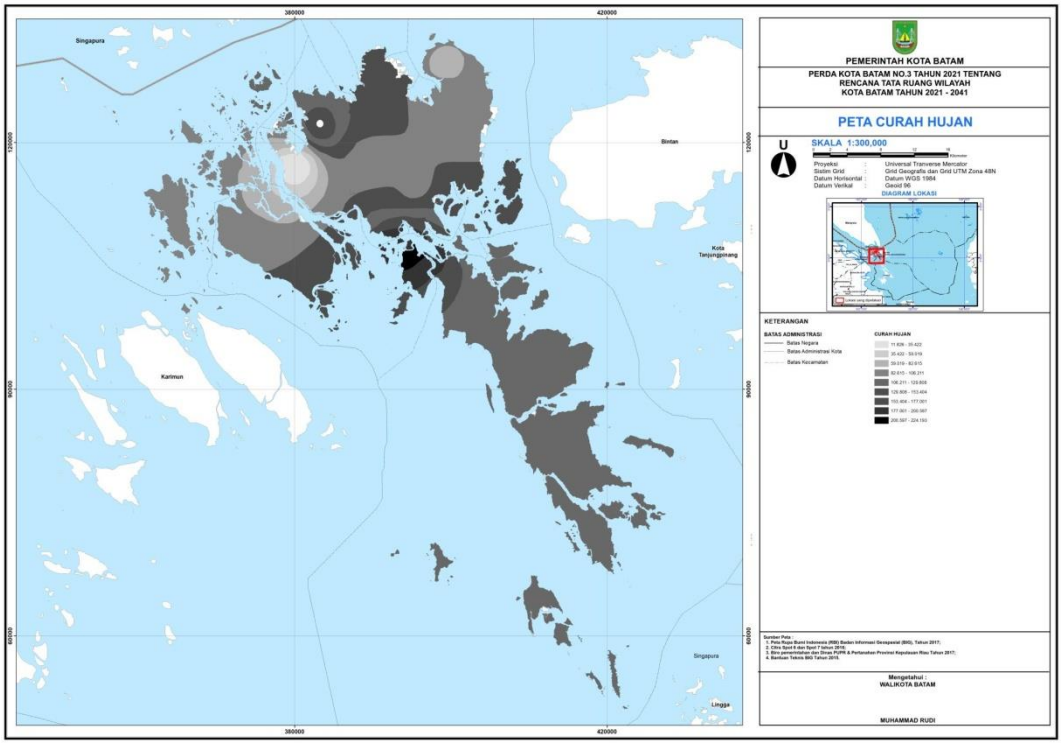

Gambar 2. 6 Peta Curah Hujan Kota Batam 2020-2040

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017

Lebih lanjut tekanan udara rata-rata untuk tahun 2020 berkisar antara 1.010,65mb-1.013,57mb, sementara kelembaban udara rata-rata berkisar antara 75,65%-86,8%. Sementara itu, tekanan udara pada tahun 2019 tercatat sebesar 1.011,4mb-1.013,7mb dan kelembaban udara tercatat antara74%-85%.Untuk kecepatan angin, tahun 2019 tercatat kecepatan angin minimum sebesar 1 knot sedangkan maksimum tercatat sebesar 19 knot, terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 3,42 knot untuk kecepatan angin minimum dan 23 knot untuk kecepatan angin maksimum.

Pada tahun 2020 jumlah hari hujan di Kota Batam sebanyak 233 hari dengan curah hujan sebesar 2.286,8 mm, terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan jumlah hari hujan sebanyak 155 hari dan curah hujan sebesar 1.227,5 mm. Jumlah hari hujan di tahun 2020 bertambah 78 hari, dan curah hujan bertambah 1.059,3 mm. Adanya kondisi peningkatan curah hujan dan penambahan jumlah hari hujan ditengarai oleh adanya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahaya yang memunculkan fenomena kekeringan. Hal ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Batam bersama seluruh stakeholder untuk meminimalkan dampak perubahan iklim dari bencana hidrometeorologi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Batam.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Rencana penggunaan lahan di Kota Batam dilihat dari rencana pola ruang Kota Batam, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Batam

No	Pola Ruang Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	
a	Kawasan Hutan Lindung	19.395
2	Kawasan Perlindungan Setempat	
a	Sempadan Sungai	9
b	Kawasan Sekitar Waduk	75

No	Pola Ruang Kawasan Lindung	Luas (Ha)
3	Kawasan Konservasi	
a	Taman Wisata Alam	901
b	Kawasan Taman Buru	2.642
4	Kawasan Cagar Budaya;	
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	404
6	RTH Kota	
a	RTH Publik	5.299
b	RTH Privat	
7	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Ruang Terbuka Hijau	33
8	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Ruang Terbuka Hijau	18
9	Kawasan Reklamasi Perairan/Ruang Terbuka Hijau	47
10	Kawasan Hutan Produksi;	
11	Badan Air	4.671
12	Kawasan Hutan Lindung/Badan Air	68
13	Badan Air/Kawasan Sumber Daya Air	1.941
TOTAL		**35.503**

Sumber: Perda RTRW Kota Batam 2021-2041

Penyediaan dan pemeliharaan RTH Privat menjadi tanggung jawab pihak swasta, perseorangan dan masyarakat. Keberadaan RTH Privat tentunya dapat membantu pemerintah kota untuk dapat memenuhi luasan RTH Publik. Besarnya keberadaan RTH Privat diharapkan dapat mewujudkan keberadaan RTH (Publik dan Privat) yang proporsional seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang yaitu proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% (terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat).

Tabel 2. 5 Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Batam

No	Pola Ruang Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	9.101
2	Kawasan Hutan Produksi Tetap	2.361
3	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	11.514
4	Kawasan Perkebunan	1.622
5	Kawasan Peternakan	6.009
6	Kawasan Peruntukan Industri	11.603

No	Pola Ruang Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
7	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan PeruntukkanIndustri	663
8	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Peruntukan Industri	1.151
9	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan PeruntukanIndustri	3.628
10	Kawasan Pariwisata	8.389
11	Kawasan Hutan Lindung/Pariwisata	190
12	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Pariwisata	1.302
13	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Pariwisata	397
14	Kawasan Perumahan	15.694
15	Kawasan Perdagangan Dan Jasa	4.161
16	Kawasan Perkantoran	116
17	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkantoran	6
18	Kawasan Fasilitas Umum Dan Sosial	829
19	Kawasan Transportasi	2.453
20	Kawasan Taman Wisata Alam/Kawasan Perumahan	2
21	Kawasan Hutan Lindung /Kawasan Perumahan	653
22	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perdagangan Dan Jasa	67
23	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial	14
24	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Transportasi	1
25	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Perumahan Seluas	4.534
26	Kawasan Hutan Produksi Yang DapatDikonversi/Kawasan Perdagangan Dan Jasa	424
27	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial	41
28	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Transportasi	103
29	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Perdagangan Dan Jasa	1.218
30	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Perumahan	657
31	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Transportasi	857
32	Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	380
33	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Pertahanan DanKeamanan	1
34	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	88
35	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	93
36	Kawasan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi	15
37	Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	18
38	Kawasan Reklamasi Perairan/Kawasan Pembangkitan Listrik	6
TOTAL		**90.361**

Sumber: Perda RTRW Kota Batam 2021-2041

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa uraian potensi pengembangan wilayah disusun dengan memperhatikan kesesuaian dengan uraian pada sub bab terdahulu serta berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga penyajian potensi pengembangan wilayah diklasifikasikan ke dalam struktur ruang dan pola ruang wilayah. Secara skematik kerangka pemikiran hubungan antara uraian kondisi geografi daerah dengan uraian potensi pengembangan wilayah disampaikan pada gambar di bawah ini.

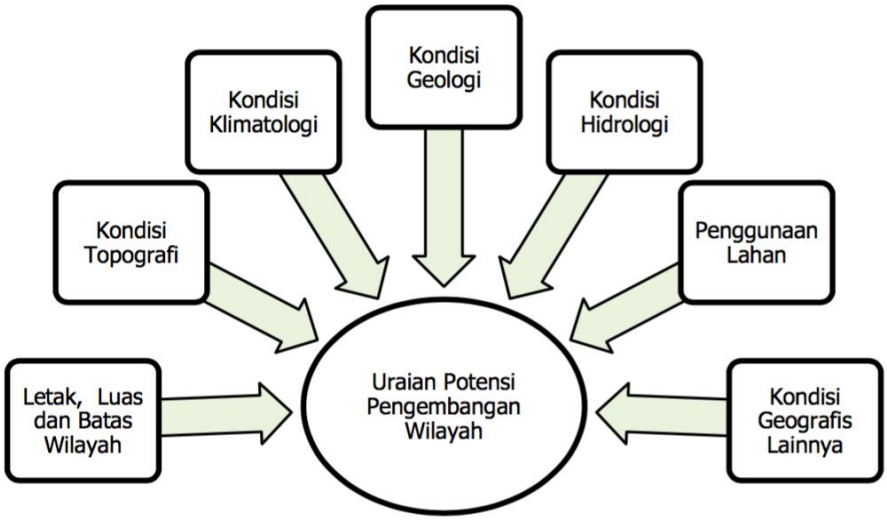

Gambar 2. 7 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah
Sumber: Lampiran Permendagri No.86 Tahun 2017

2.1.2.1 Struktur Ruang Wilayah

1. Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam sebagai komponen pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan dengan Sistem Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang melayani tidak hanya internal Kota Batam dan kawasan perbatasan, namun juga lingkup regional, nasional, dan internasional. Sesuai arahan RTRWN dan penetapan Batam sebagai Kawasan Strategis Nasional di bidang ekonomi dan tujuan investasi sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) yang direncanakan akan bertransformasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

2. Sistem pusat-pusat pelayanan kota di Kota Batam yang dilandaskan pada layanan langsung kebutuhan masyarakat dan layanan pendukung pengembangan kegiatan-kegiatan usaha produktif, berdasarkan hierarki dan skala pelayanannya dibedakan atas:
    - Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 1 (satu) untuk pelayanan lokal seluruh kota, regional, nasional, dan internasional;
    - Sub Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hierarki ke 2 (dua) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kecamatan; dan
    - Pusat Lingkungan (*Neighbourhood Services Center*), yang merupakan pusat pelayanan hierarki ke 3 (tiga) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kelurahan atau setingkat satuan lingkungan permukiman (*neighbourhood unit*).
3. Dalam jangka waktu tahun 2021-2041, Kecamatan Batam Kota merupakan Pusat Kota dalam sistem Pusat Pelayanan Kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, Pendidikan serta perdagangan dan jasa. Sub Pusat Kota tersebar di beberapa wilayah kota di Pulau Batam termasuk pengembangannya di Pulau Rempang dan Pulau Galang dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan pariwisata, permukiman, industri dan perdagangan jasa.
4. Pada Pusat Kota dialokasikan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain) serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu yang dibutuhkan oleh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang nantinya akan bertransformasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.
5. Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, struktur ruang wilayah kota dimantapkan melalui peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan

penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

6. Arahan RTRWN untuk pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistis setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hierarkinya menjadi "pelabuhan internasional hub" (*hub international port*).
7. Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada di Pulau Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis.
8. Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (*outlet*) utama transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari kawasan-kawasan sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan bebas hambatan, terminal penumpang, terminal barang, dan jaringan jalur kereta api umum serta stasiun kereta api.
9. Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, infrastruktur perkotaan dan penyehatan lingkungan permukiman.

Adapun struktur ruang wilayah Kota Batam dapat dilihat pada gambar 2.8 di bawah ini.

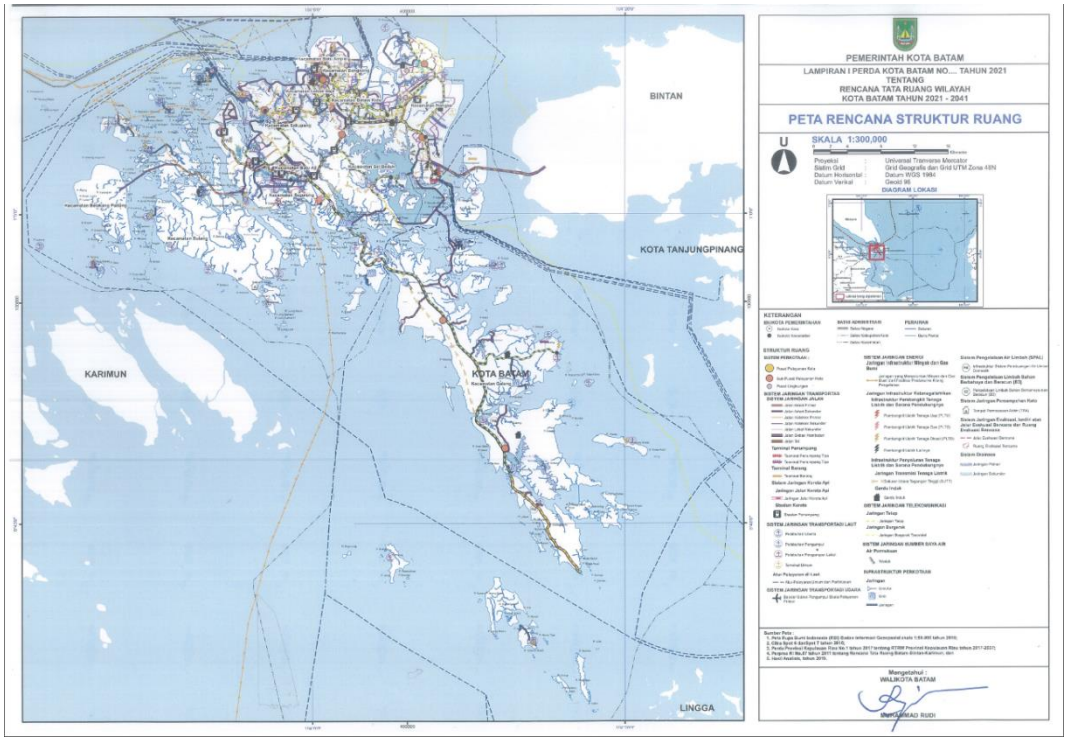

Gambar 2. 8 Peta Struktur Ruang Wilayah Kota Batam

Sumber: Perda RTRW Kota Batam 2021 – 2041

2.1.2.2 Pola Ruang Wilayah

1. Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut;
2. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, taman kota, taman lingkungan, bumi perkemahan, dll.) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30% dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota;
3. Mengembangkan kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan;
4. Menciptakan keseimbangan perkembangan dan pemerataan pembangunan antara wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas yang nantinya akan bertransformasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dengan pulau-pulau sekitar yang dapat dikembangkan juga sebagai Kawasan Strategis, Kawasan Cepat Tumbuh, dan Kawasan-kawasan Prioritas atau melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

5. Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota untuk peningkatan fasilitas pelayanan umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota;
6. Mengintensifkan pemanfaatan ruang pada kawasan kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Pulau Batam, Pulau Rempang dan pulau-pulau yang lain dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal;
7. Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan kawasan bukit dan perbukitan di Pulau Batam, dan melakukan substitusi bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir laut;
8. Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian, keselarasan, dan untuk menghindarkan dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut.

Adapun Pola ruang wilayah Kota Batam dapat dilihat pada gambar 2.9 di bawah ini.

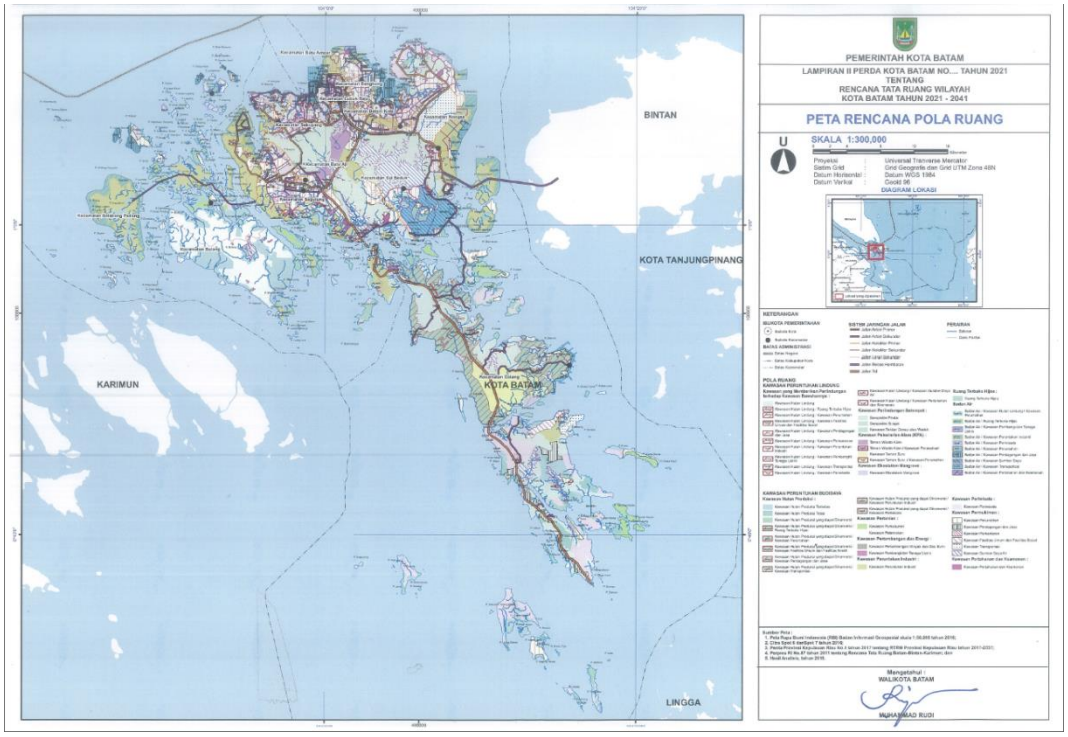

Gambar 2. 9 Peta Pola Ruang Wilayah Kota Batam

Sumber: Perda RTRW Kota Batam 2021-2041

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lebih lanjut klasifikasi bencana meliputi:

1. Bencana Alam, terdiri dari (A) Bencana Geologi; (B) Bencana Vulkanologi; (C) Bencana Hidrometeorologi; (D) Karhutla;
2. Bencana Non Alam, terdiri dari (A) Gagal Teknologi; (B) Epidemi; (C) Wabah Penyakit; (D) Gagal Modernisasi;
3. Bencana Sosial, terdiri dari (A) Konflik Sosial; (B) Teror.

Adapun potensi bencana di Kota Batam disampaikan pada Tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2. 6 Jenis, Risiko dan Potensi Bencana di Kota Batam Berdasarkan Kasus

Jenis Bencana	Risiko	Potensi	Keterangan
Bencana Alam Hidrometeorologi			
Kenaikan tinggi muka air laut	Abrasi (erosi pantai)-Akresi	√	Pulau Nongsa mengalami kemunduran akibat erosi (SDA Kementerian PUPR, 2017); Pulau Pelampong berpotensi hilang (Kementerian KKP, Tirto.id, 2016); Kawasan bukit dan perbukitan yang mempunyai kemiringan lereng > 15% dan rentan terhadap erosi/longsor, serta struktur batuan wilayah Kota Batam yang berupa jenis batuan dengan tingkat kestabilan yang cukup rendah (labil) dan mudah tererosi oleh air (*Business Case and Project Readiness Monorail* Batam, Bappenas 2015);
	Mempengaruhi Kemiringan Lereng Ling Pantai karena Banjir;	–	–
	Perubahan Suplai Sedimen	–	–
Peningkatan Gelombang Ekstrem	Membahayakan Keselamatan Pelayaran;	√	Dalam 5 tahun terakhir, setiap tahun BMKG merilis peringatan gelombang ekstrem periode bulan Nov-Jan di perairan Batam (BMKG); Perlu dilengkapi data jumlah kecelakaan kapal;
	Mengurangi Daya Jelajah Nelayan kecil <20GT	√	
Perubahan Curah Hujan	Bahaya Banjir;	√	Terdapat > 42 titik banjir di Kota Batam (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, 2021)
	Bahaya Ketersediaan Air;	√	Air minum Kota Batam diperoleh dari sumber air permukaan yang ditampung pada beberapa waduk/reservoir dengan kapasitas yang terbatas. Berdasarkan penelitian diperkirakan daya dukung alam (termasuk kemampuan suplai air minum) Pulau Batam hanya dapat memenuhi kebutuhan 700 ribu penduduk. Kondisi berdampak pada terbatasnya sumber air yang potensial untuk memenuhi kebutuhan khususnya bagi pengembangan industri. (Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia)
	Produksi komoditas sektor pertanian menurun;	–	–
Peningkatan Suhu	Bahaya Kekeringan Air;	√	Balai Wilayah Sungai (BWS) memprediksikan, jika tidak turun hujan dalam bulan Feb-Mar-Apr 2020, maka ketersediaan air bersih hanya bisa dirasakan hingga 5 Juni 2020 mendatang. (Kompas.com, 21/02/2020)
	Produksi komoditas sektor	–	–

Jenis Bencana	Risiko	Potensi	Keterangan
	pertanian menurun;		
	Peningkatan perkembangan vektor penyakit (DBD) dan *heat-stress* di wilayah perkotaan	√	Tahun 2019 sebanyak 727 warga terkena DBD (Dinkes Kota Batam, 2021); Tahun 2020 sebanyak 763 warga terkena DBD (Kadis Dinkes,2021);
Bencana Non Alam			
Gagal Teknologi	Pencemaran tumpahan minyak kotor	√	Laut Belakang Padang tercemar tumpahan minyak (Media Center Pemko Batam, 12/11/2019); *Floating storage unit* di perairan Batam berpotensi terjadi *oil spill* (portonews.com, 23/5/2018);
Epidemi	Wabah penyakit yang disebabkan Virus	√	Pasien positif Covid-19 tercatat 19.683 orang per 19 Juli2021 (Gugus Tugas Penanganan Covid Kota Batam);
Bencana Sosial			
Konflik	Konflik sosial;	√	Penutupan Radio Era Baru (2010) (Jurnal Masyarakat Maritim vol 2 no.1 2018); Demonstrasi sopir taxi akibat konflik adanya penyedia jasa Taxi Baru (2012) (Jurnal Masyarakat Maritim vol 2 no.1 2018) Konflik Taxi Online dan Konvensional (2019)
	Konflik Pertanahan	√	Adanya SK Menteri Kehutanan No.463 Tahun 2013 Tanggal 27 Juli, yang menetapkan lahan hunian yang telah ditempati warga sebagai hutan lindung (Jurnal Masyarakat Maritim vol. 2 no.1 2018); Adanya sengketa lahan 4300 M^2 yang mengakibatkan bentrok dan menelan 1 korban nyawa (2012) (Jurnal Masyarakat Maritim vol. 2 no.1 2018);
	Konflik Industrial	√	Demonstrasi Buruh menuntut UMK 50% dari tahun sebelumnya (2014) (Jurnal Masyarakat Maritim vol. 2 no.1 2018); Setiap tahun terjadi demonstrasi buruh menuntut kenaikan upah minimum (Jurnal Masyarakat Maritim vol. 2 no.1 2018);
	Konflik Lingkungan	√	Demonstrasi nelayan di Pulau Nipah terhadap kapal tanker yang mengganggu aktivitas nelayan (2013) (Jurnal Masyarakat Maritim vol. 2 no.1 2018);
Teror	Gangguan Keamanan	–	–

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kota Batam memiliki potensi bencana dominan berupa bencana *hidrometeorologi*. Bencana tersebut dipengaruhi oleh

fenomena perubahan iklim yang terjadi secara global dan hampir seluruh wilayah Indonesia berpotensi terdampak negatif. Dalam hasil Kaji Ulang Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim yang dilakukan Bappenas di tahun 2019 menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang rawan terdampak negatif perubahan iklim.

Lebih lanjut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dijabarkan bahwa perubahan iklim menjadi salah satu ancaman bagi terhambatnya pencapaian agenda pembangunan nasional dan daerah. Dokumen RPJMN telah menetapkan indikator dan target nasional Potensi Kerugian Ekonomi (*Potential Economic Losses*) dampak perubahan iklim pada empat sektor prioritas (sektor air, pertanian, kelautan dan pesisir serta sektor kesehatan) dengan menggunakan ukuran *Persentase Penurunan Potensi Kehilangan PDB Akibat Bahaya Iklim* di sektor air, pertanian, kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil serta sektor kesehatan. Berdasarkan proyeksi yang telah dibuat, potensi kerugian ekonomi dampak perubahan iklim secara nasional pada tahun 2020 sebesar 102,36 Triliun, tahun 2021 sebesar 105,72 Triliun, tahun 2022 sebesar 109,03 Triliun, 2023 sebesar 112,19 Triliun dan tahun 2024 sebesar 115,53 Triliun (Gambar 2.10).

SEKTOR	TAHUN 2020	2021	2022	2023	2024
Kelautan & Pesisir	81,30	81,43	81,57	81,69	81,82
Air	3,83	4,74	5,61	6,45	7,29
Pertanian	11,20	13,40	15,59	17,77	19,94
Kesehatan	6,03	6,15	6,26	6,37	6,48
JUMLAH	102,36	105,72	109,03	112,29	115,53

Gambar 2. 10 Potensi Kerugian Ekonomi Dampak Perubahan Iklim Sektor Prioritas (Rp Triliun)

Sumber: Ringkasan Eksekutif Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim 2019

Keberhasilan pengurangan dampak negatif perubahan iklim tentu perlu kerja sama dan dukungan dari seluruh *stakeholder* pembangunan, terutama pemerintah daerah. Dalam perspektif ini, Pemerintah Kota Batam perlu menindaklanjuti kebijakan nasional untuk mengurangi Potensi Kerugian Ekonomi (*Potential Economic Losses*) pada sektor prioritas dengan melakukan penguatan data dan informasi terkait perubahan iklim, sebagai dasar bagi perumusan strategi, program dan kegiatan serta indikator yang mendukung upaya pengurangan dampak negatif dari perubahan iklim sesuai dengan lingkup kewenangan Pemerintah Kota Batam (melalui penyusunan RAD API atau mengintegrasikan program, kegiatan berbasis ketahanan iklim dalam dokumen perencanaan). Dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan yang dihasilkan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang berketahanan iklim.

2.1.4 Demografi

Dalam perencanaan pembangunan, kondisi, dan perkembangan demografi berperan sangat penting. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, distribusi serta kompetensi

penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi demografi memiliki kedudukan strategis dalam perumusan kebijakan.

Penduduk Kota Batam bersifat heterogen terdiri dari berbagai suku yang ada di Indonesia, dengan penduduk aslinya adalah suku Melayu. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk Kota Batam dari tahun 2016 sampai dengan 2020 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk Kota Batam

Kecamatan	Luas Daratan (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Distribusi Penduduk 2020 (%)	Kepadatan Penduduk 2020 (Jiwa/Km2)
		2016	2017	2018	2019	*2020		
Belakang Padang	6.855	19.229	19.311	19.387	20.469	22.439	1,88	39
Bulang	15.893	9.924	9.969	10.012	11.310	10.707	0,90	23
Galang	35.331	15.723	15.788	15.843	17.183	16.989	1,42	8
Sei Beduk	10.597	86.691	87.386	88.018	86.220	96.193	8,04	797
Nongsa	10.837	63.133	65.094	67.002	71.847	81.451	6,81	281
Sekupang	6.853	124.165	124.165	131.001	141.314	156.283	13,07	1464
Lubuk Baja	1.116	86.193	86.751	87.249	90.560	84.533	7,07	2340
Batu Ampar	1.096	65.335	66.141	66.894	62.093	60.450	5,02	1512
Bengkong	3.854	10.622	108.091	109.866	111.923	119.836	10,02	6219
Batam Kota	5.495	243.952	257.674	271.454	176.287	198.617	16,61	4243
Sagulung	4.182	242.355	258.674	275.259	188.333	209.386	17,51	3279
Batu Aji	1.371	173.479	18.068	187.788	130.012	139.512	11,66	2252
JUMLAH	**103.480**	**1.236.399**	**1.283.196**	**1.329.773**	**1.107.551**	**1.196.396**	**100,00**	**1871**

Sumber: BPS Kota Batam, Batam dalam angka (2016-2021)
**Untuk Data tahun 2020 bersumber dari Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Kota Batam*

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Batam sesuai dengan data hasil proyeksi BPS Kota Batam tercatat sebesar 1.236.399 jiwa. Dan selanjutnya pada tahun 2020 berdasarkan hasil sensus menjadi sebesar 1.196.396 jiwa. Jika dilihat sekilas dari tabel tersebut di atas, maka penurunan jumlah penduduk di Kota Batam mulai terjadi tahun 2019 akhir, hal ini lebih disebabkan karena berkaitan dengan adanya pembersihan data ganda nasional oleh tim pengolah data administrasi

Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Laju pertumbuhan penduduk Kota Batam periode 2010-2020 sesuai dengan data BPS Kota Batam adalah 2,35% yang berarti melambat dibandingkan periode 2000-2010 yang mencapai 7,64%.

Jika dilihat dari penyebaran penduduk pada tahun 2020, maka jumlah penduduk Kota Batam masih lebih dominan berada di wilayah Kecamatan mainland yaitu Kecamatan Sagulung (17,51%) dan Batam Kota (16,61%), sedangkan yang terendah berada pada wilayah Kecamatan hinterland yaitu Kecamatan Bulang (0,90%) dan Galang (1,42%). Secara rinci penjelasan mengenai jumlah dan pertumbuhan penduduk, serta distribusinya sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 2.7, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) kecamatan yang memiliki luas wilayah daratan yang relatif kecil dengan kepadatan penduduk tinggi, yakni Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Lubuk Baja, dan Kecamatan Bengkong. Sedangkan terdapat 4 (empat) kecamatan yang memiliki luas wilayah daratan yang besar dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, yakni Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Galang. Proporsi luas wilayah daratan dengan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah seyogyanya memiliki proporsi yang seimbang. Hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga langkah perluasan wilayah kecamatan dapat menjadi solusi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Penduduk Kota Batam pada tahun 2020 berjumlah 1,196,396 jiwa, jika dilihat menurut wilayah kecamatan, yang terbanyak jumlah penduduknya adalah di Kecamatan Sagulung dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 209.386 jiwa. Di tempat kedua sampai dengan kelima terbanyak diikuti kecamatan Batam Kota, Sekupang, Batu Aji dan Bengkong masing-masing yaitu 198.617 jiwa, 156.283 jiwa, 139.512 jiwa dan 119.836 jiwa. Sedangkan jumlah

penduduk yang terendah terdapat di Kecamatan Bulang dan Galang masing-masing sebanyak 10.707 jiwa dan 16.989 jiwa.

Selanjutnya penduduk di Kota Batam dapat dianalisis berdasarkan struktur umurnya, sebagai informasi yang penting karena berkaitan dengan risiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok umur. Jika dilihat dari struktur usia penduduk, berdasarkan gambar 2.11 Piramida Penduduk selama tahun 2020 Kota Batam didominasi penduduk usia 25-29 tahun dan usia 30-34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan penduduk di Kota Batam dapat dikatakan masih cukup baik.

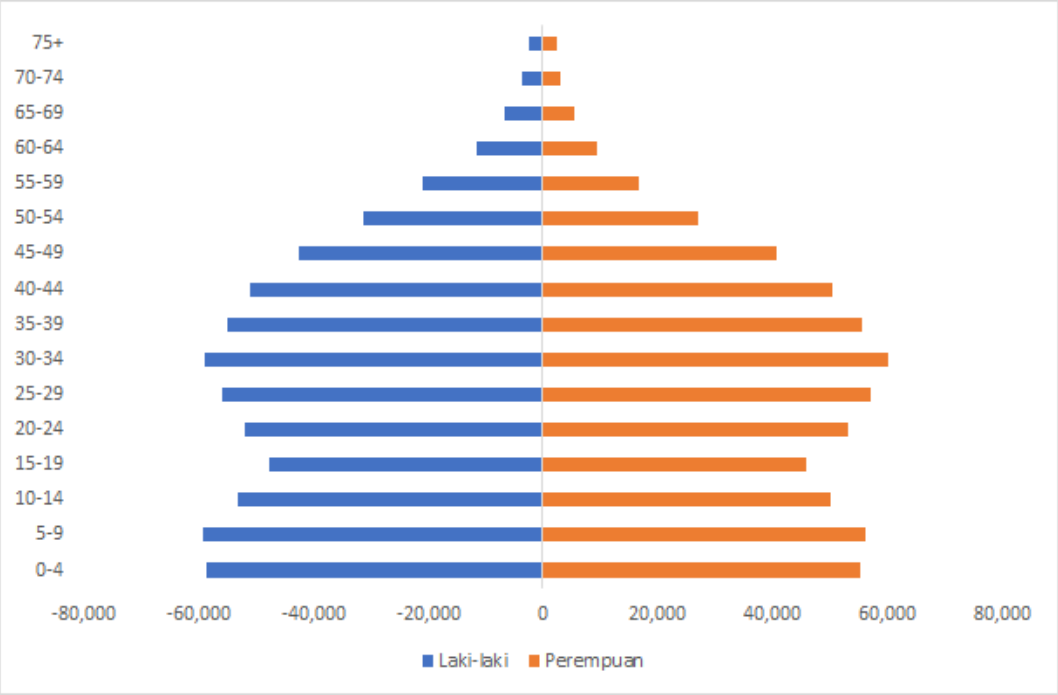

Gambar 2. 11 Piramida Penduduk Kota Batam Tahun 2020

Sumber: BPS Kota Batam SP2020 (diolah)[1]

Dengan masih baiknya angka ketergantungan penduduk, menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kota Batam relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Selain itu, hal ini berarti Kota Batam mendapatkan bonus demografi yang sangat besar, sehingga perlu upaya keras agar tidak muncul fenomena *middle income trap* pada kelompok penduduk usia muda.

[1]Diakses 12 Juli 2021

Kemudian jumlah balita dalam tahun yang sama cenderung mengalami fluktuasi, sama halnya dengan penduduk yang akan mengenyam pendidikan dasar dan menengah dalam 5-10 tahun mendatang. Secara rinci jumlah penduduk menurut kelompok umur disajikan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Umur Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	156.252	161.978	85.827	96.567	113.750
5-9	131.874	136.949	112.214	120.019	115.213
10-14	90.334	94.015	101.753	101.044	103.159
15-19	71.977	74.860	74.287	71.468	93.282
20-24	129.810	134.332	88.073	88.193	105.016
25-29	162.806	168.586	102.543	101.949	112.684
30-34	160.930	166.730	118.741	116.903	119.038
35-39	127.371	132.119	125.651	126.368	110.442
40-44	84.906	88.215	103.188	106.561	101.412
45-49	47.953	49.960	73.296	76.432	82.846
50-54	29.291	30.573	42.319	45.158	58.225
55-59	18.961	19.815	23.998	25.507	37.462
60-64	11.355	11.879	14.463	15.178	20.820
65-69	6.089	6.381	8.017	8.577	11.901
70-74	3.594	3.767	3.768	4.048	6.485
≥75	2.896	3.037	3.328	3.579	4.661
Total	**1.236.399**	**1.283.196**	**1.329.773**	**1.107.551**	**1.196.396**

Sumber: BPS Kota Batam[2]

Penduduk Kota Batam jika dilihat menurut jenis kelamin rata-rata sejak tahun 2016-2020 sebesar 51 persen adalah berjenis kelamin laki-laki dan sebesar 49 persen berjenis kelamin perempuan. Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Secara rinci penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

[2]Diakses 12 Juli 2021

Tabel 2. 9 Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2016-2020

Kecamatan	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
Belakang Padang	9,673	9,556	9,708	9,603	9,74	9,647	10,346	10,123	12,405	10,034
Batu Ampar	33,983	31,352	34,358	31,783	34,703	32,191	32,028	30,065	31,215	29, 235
Sekupang	63,757	60,408	65,456	62,181	67,091	63,91	71,697	69,617	79,153	77,130
Nongsa	33,362	29,771	34,356	30,738	35,317	31,685	37,388	34,459	42,380	39,071
Bulang	5,246	4,678	5,267	4,702	5,286	4,726	5,819	5,491	5,616	5,091
Lubuk Baja	43,048	43,145	43,270	43,481	43,459	43,79	45,223	45,337	41,919	42,614
Sungai Beduk	37,185	49,506	37,427	49,959	37,638	50,38	43,727	42,493	48,584	47,609
Galang	8,742	7,622	8,436	7,352	8,454	4,726	9,166	8,017	8,998	7,991
Bengkong	53,023	53,197	53,886	54,205	54,695	55,171	57,085	54,838	60,829	59,007
Batam Kota	121,95	121,998	128,645	129,029	135,339	136,115	88,073	88,214	99,067	99, 550
Sagulung	131,13	111,224	139,791	118,883	148,565	126,694	97,295	91,038	108,359	101,027
Batu Aji	90,564	82,915	94,204	86,476	97,781	90,007	66,402	63,61	70,874	68,638
Sub Total	631,34	605,061	654,804	628,392	678,068	651,705	564,249	543,302	609,399	586,997
Grand Total	1,236,399		1,283,196		1,329,773		1,107,551		1,196,396	

Sumber: BPS Kota Batam[3]
**Untuk Data tahun 2020 bersumber dari Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Kota Batam*

Selanjutnya struktur penduduk juga dapat dilihat dari aspek persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut karakteristik dan status pendidikan yang menampilkan rasio penduduk yang masih bersekolah di tingkat SD sampai dengan tingkat SMA ke atas serta menampilkan penduduk yang belum bersekolah dan tidak bersekolah lagi. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Batam yang belum bersekolah laki-laki (4,53%) perempuan (5,02%), masih SD/Sederajat sebanyak laki-laki (15,62%) perempuan (13,83%), masih SMP/Sederajat laki-laki (4,39%) perempuan (5,24%), masih SMA ke atas sebanyak laki-laki (5,58%) perempuan (6,36)% dan penduduk yang tidak bersekolah lagi sejumlah laki-laki (69,88%) perempuan (69,55)%. Hal ini juga dapat dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

[3]Diakses 12 Juli 2021

Tabel 2. 10 Rasio Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020

Karakteristik	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
Tidak/Belum Sekolah	6,34	5,0	5,90	5,66	4,00	5,57	3,94	6,09	4,53	5,02
SD/Sederajat	64,73	60,53	14,75	13,61	12,85	14,54	15,74	15,81	15,62	13,83
SMP/Sederajat	15,6	17,93	4,36	5,72	5,21	5,45	4,41	3,79	4,39	5,24
SMA/Ke	19,58	21,54	5,77	6,22	6,96	6,02	5,50	5,63	5,58	6,36
Tidak bersekolah lagi	70,43	68,85	69,21	68,79	70,97	68,42	70,4	68,68	69,88	69,55

Sumber: BPS Kota Batam

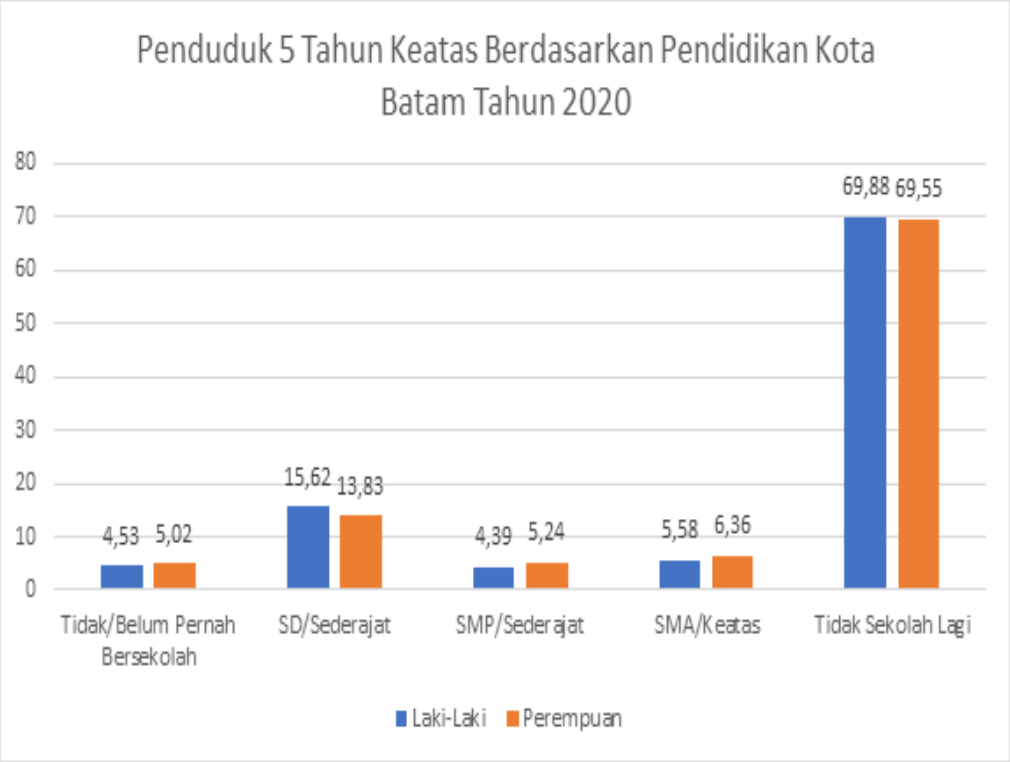

Sumber: BPS Kota Batam (data olahan)

Sedangkan berdasarkan data yang bersumber dari Perda RTRW 2020-2040 proyeksi jumlah penduduk di Kota Batam tahun 2018-2037, proyeksi rata-rata peningkatan jumlah penduduk tertinggi ada pada Kecamatan Sei Beduk, dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,48% per tahun. Kemudian peningkatan penduduk kedua tertinggi berada pada Kecamatan Lubuk Baja. Lebih lanjut penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2. 11 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2021-2027

Kecamatan	Tahun						
	2021	2022	2023	2024	2024	2026	2027
Belakang Padang	19,567	19,165	18,783	18,361	17,958	17,556	17,154
Batu Ampar	11,061	10,991	10,920	10,850	10,779	10,709	10,638
Sekupang	14,883	14,642	14,402	14,161	13,921	13,681	13,440
Nongsa	73,671	70,271	66,871	63,471	60,071	56,672	53,272
Bulang	204,727	209,438	214,149	218,861	223,572	228,283	232,995
Lubuk Baja	72,831	74,490	76,149	77,808	79,467	81,126	82,786
Sungai Beduk	194,481	199,756	205,032	210,308	215,583	220,859	226,135
Galang	137,999	139,025	140,051	141,077	142,103	143,129	144,155
Bengkong	144,058	147,254	150,451	141,077	142,103	143,129	144,155
Batam Kota	93,239	92,567	91,914	91,251	90,599	89,925	89,263
Sagulung	57,715	54,787	51,858	48,929	46,001	43,072	40,144
Batu Aji	114,828	115,592	116,356	117,119	117,883	118,647	119,411
Total	1.139.060	1,147,988	1,156,916	1,165,843	1,174,771	1,183,698	1,192,626

Tabel 2. 12 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2028-2034

Kecamatan	Tahun						
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Belakang Padang	16,751	16,349	15,947	15,544	15,142	14,740	14,337
Batu Ampar	10,568	10,497	10,426	10,356	10,920	10,215	10,144
Sekupang	13,200	12,959	12,719	12,478	12,238	11,997	11,757
Nongsa	49,872	46,472	43,072	39,673	36,273	66,871	29,473
Bulang	237,706	242,417	247,129	251,840	256,551	261,263	265,974
Lubuk Baja	84,445	76,149	87,763	89,422	91,081	92,740	94,339
Sungai Beduk	231,410	205,032	241,961	247,237	252,513	257,788	263,064
Galang	145,181	140,051	147,233	148,259	149,285	150,311	151,337
Bengkong	166,432	150,451	172,825	176,021	179,217	182,414	185,610
Batam Kota	88,600	91,914	87,724	86,612	85,949	85,286	84,624
Sagulung	37,215	51,858	31,358	28,429	25,501	22,572	19,643
Batu Aji	120,174	118,647	121,702	122,466	123,229	123,993	124,757
Total	1,201,554	1,162,796	1,219,409	1,228,337	1,237,899	1,280,190	1,255,120

Tabel 2. 13 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2035-2037

Kecamatan	Tahun		
	2035	2036	2037
Belakang Padang	13,935	13,533	13,131
Batu Ampar	10,074	10,003	9,933
Sekupang	11,516	11,276	11,036
Nongsa	26,073	22,674	19,274
Bulang	270,686	275,397	280,108
Lubuk Baja	96,058	97,717	99,376
Sungai Beduk	268,340	273,615	278,891
Galang	152,363	153,389	154,415
Bengkong	188,806	192,002	195,199
Batam Kota	83,961	83,298	82,635
Sagulung	16,715	13,786	10,857
Batu Aji	125,521	126,284	127,048
Total	1,264,047	1,272,975	1,281,903

Sumber: Perda RTRW Kota Batam 2020-2040

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga. Masing-masing dari fokus kesejahteraan masyarakat tersebut diuraikan pada bagian berikut ini.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial

Kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah melalui pembangunan. Namun, peningkatan kesejahteraan tanpa adanya pemerataan ekonomi dapat memicu permasalahan ketimpangan ekonomi yang dapat timbul menjadi permasalahan daerah. Oleh karena itu, fokus kesejahteraan ekonomi harus didampingi oleh fokus pemerataan untuk dapat menciptakan daerah sejahtera. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat antara lain

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi, PDRB per kapita, serta kemiskinan dan ketimpangan.

2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhannya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB ADHB menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Batam tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Batam Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha

Kategori Lapangan Usaha	PDRB atas Harga Berlaku (Rp. Juta)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.288.942	1.378.947	1.470.332	1.623.073	1.646.099
Pertambangan dan Penggalian	91.106	92.963	87.661	90.038	88.644
Industri Pengolahan	72.303.679	75.340.147	81.309.771	89.033.272	93.734.812
Pengadaan Listrik dan Gas	2.246.811	2.447.146	2.412.892	2.546.179	2.488.482
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	236.455	240.704	253.735	265.305	259.336

Kategori Lapangan Usaha	PDRB atas Harga Berlaku (Rp. Juta)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Konstruksi	25.459.591	26.863.953	30.978.207	34.277.773	32.129.210
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.137.123	8.929.540	10.125.672	11.034.233	9.669.266
Transportasi dan Pergudangan	4.674.682	4.915.765	5.053.549	4.486.068	2.373.240
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.934.735	3.223.837	3.598.329	4.029.884	2.070.411
Informasi dan Komunikasi	2.596.827	2.994.680	3.481.299	3.951.889	4.562.519
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.647.970	4.932.470	5.446.173	5.820.534	5.698.733
Real Estate	1.867.631	2.014.594	1.991.820	2.055.830	1.670.682
Jasa Perusahaan	5.872	6.300	7.071	6.459	3.356
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.470.584	1.565.853	1.784.198	1.852.523	2.087.618
Jasa Pendidikan	1.196.851	1.411.697	1.538.120	1.614.489	1.553.450
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	890.987	1.012.782	1.075.301	1.115.638	1.096.472
Jasa Lainnya	503.361	553.956	671.014	686.927	231.853
PDRB KOTA BATAM	**130.553.208**	**137.925.335**	**151.285.143**	**164.490.116**	**161.364.182**

Sumber: BPS Kota Batam

Berdasarkan tabel di atas nilai PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 164,48 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 13,19 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 151,28 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Selanjutnya pada tahun 2020 nilai PDRB ADHB mengalami penurunan yang dapat disebabkan adanya pandemi Covid-19, yang mana pada tahun 2020 nilai PDRB ADHB adalah 161,36 triliun rupiah.

Sementara itu berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 102,71 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 108,80 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kota Batam mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,72 persen, meningkat dibandingkan

tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ADHK ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Namun sayangnya, akibat pandemi tahun 2020, nilai PDRB ADHK Kota Batam mengalami penurunan karena banyaknya sektor ekonomi yang tidak dapat beroperasi secara normal seperti tahun sebelumnya. Uraian lebih rinci terkait nilai PDRB ADHK ditampilkan pada Tabel 2.15.

Tabel 2. 15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Batam Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha

Kategori Lapangan Usaha	PDRB atas Harga Konstan 2010 (Rp. Juta)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	989.932	1.024.382	1.052.290	1.116.082	1.110.806
Pertambangan dan Penggalian	70.379	70.667	69.412	70.403	67.843
Industri Pengolahan	52.548.433	53.433.484	55.303.168	59.176.665	61.411.918
Pengadaan Listrik dan Gas	1.367.186	1.450.646	1.435.884	1.496.666	1.456.717
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	190.727	189.992	195.956	210.127	204.174
Konstruksi	18.483.679	19.051.510	20.618.936	22.046.334	20.507.500
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.141.980	6.374.988	6.816.434	7.122.698	6.073.380
Transportasi dan Pergudangan	2.936.143	3.053.305	3.097.091	2.570.098	1.425.894
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.182.536	2.310.789	2.545.996	2.790.962	1.521.452
Informasi dan Komunikasi	2.462.979	2.647.703	2.987.911	3.345.657	3.950.887
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.456.319	3.498.887	3.711.970	3.895.276	3.849.266
Real Estate	1.472.911	1.529.946	1.451.476	1.481.957	1.233.882
Jasa Perusahaan	4.870	5.070	5.434	4.960	2.811
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.048.871	1.048.678	1.135.773	1.148.087	1.288.465

Kategori Lapangan Usaha	PDRB atas Harga Konstan 2010 (Rp. Juta)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jasa Pendidikan	918.843	985.480	1.007.812	1.014.976	954.483
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	719.025	789.705	818.901	836.098	818.624
Jasa Lainnya	374.890	397.324	464.153	473.307	151.553
PDRB KOTA BATAM	**95.369.705**	**97.862.556**	**102.718.599**	**108.800.353**	**106.029.655**

Sumber: BPS Kota Batam

Sektor-sektor yang ada dalam PDRB juga dapat diukur kontribusinya terhadap keseluruhan perekonomian di Kota Batam. Selama 5 tahun terakhir hingga tahun 2019, perekonomian Kota Batam didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Secara serentak ketiga sektor tersebut menyumbang lebih dari 80 persen terhadap keseluruhan perekonomian Kota batam dari tahun 2016 hingga 2020. Adanya pandemi Covid-19 tidak mengubah peringkat ketiga sektor tersebut terhadap perekonomian Kota Batam.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Batam selama 5 tahun terakhir dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, pada tahun 2020 mencapai 57,29 persen. Selama lima tahun terakhir, sektor Konstruksi menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa kedua terbesar di Kota Batam. Kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah Konstruksi. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung mengalami peningkatan sejak lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 peranannya mencapai 5,73 persen. Selanjutnya, di urutan keempat, ditempati oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi.

Untuk dapat melihat struktur perekonomian suatu daerah, selain menggunakan persentase kontribusi sektoral, dapat juga dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi

(LPE) daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan perekonomian daerah (PDRB).

Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Kota Batam menunjukkan kinerja yang fluktuatif. Meskipun selalu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi, pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Batam turun di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional. fluktuasi kondisi ekonomi di Kota Batam ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global sebagaimana yang diketahui bahwa transaksi perdagangan internasional di Kota Batam cukup tinggi dan memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu, fluktuasi perekonomian yang cukup besar ini juga terjadi karena perekonomian Kota Batam sangat terfokus pada industri pengolahan yang menyumbang lebih dari separuh dari keseluruhan perekonomian sehingga guncangan pada sektor ini akan mempengaruhi keseluruhan perekonomian daerah.

Dari Gambar 2.12 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Batam berada pada posisi tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya (2016-2018). Pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Namun, akibat pandemi Covid-19, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2020 menjadi negatif, hal yang sama terjadi pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2020 Kota Batam lebih baik dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau, namun tidak lebih baik dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

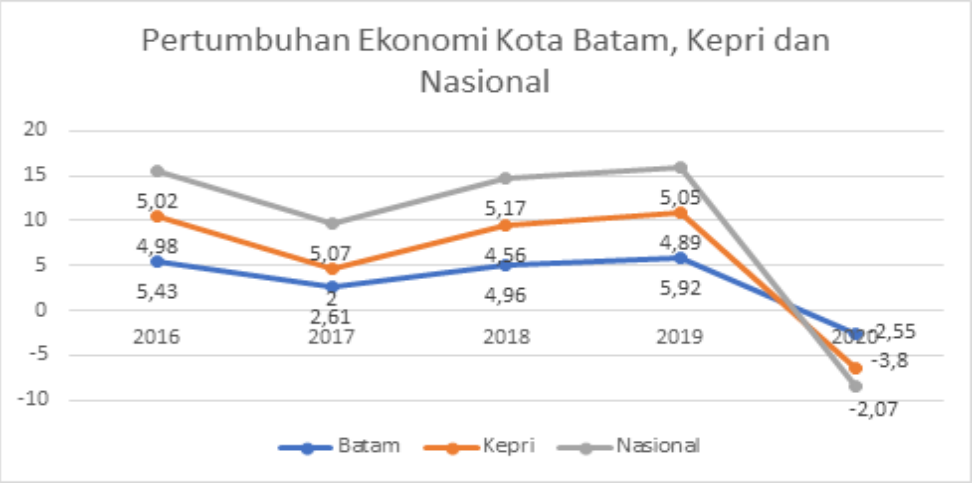

Gambar 2. 12 Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Batam

Pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2019 dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 11,97 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,62 persen. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan kunjungan wisman yang menyebabkan membaiknya tingkat hunian kamar. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif kecuali lapangan usaha transportasi dan pergudangan (-17,02 persen), serta jasa perusahaan (-8,74 persen) yang mengalami pertumbuhan negatif. Lebih lanjut, enam lapangan usaha yang mengalami peningkatan pertumbuhan antara lain: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan pertumbuhan sebesar6,35 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,43 persen; Industri Pengolahan Sebesar 7,00 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,23 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,23 persen; Real Estate sebesar 2,10 persen. Sedangkan sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang melambat antara lain: Konstruksi sebesar6,92 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,51 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar9,62 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 11,97 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,94 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 1,08 persen;

Jasa Pendidikan sebesar 0,71 persen; Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial sebesar 2,10 persen; dan Jasa Lainnya sebesar1,97 persen. Namun, akibat adanya pandemi Covid-19, pertumbuhan sub sektor kategori lapangan usaha mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019, yang dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2. 16 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Batam Tahun 2015-2020 Menurut Lapangan Usaha

Kategori Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,51%	3,48%	2,72%	6,35%	-0,47%
Pertambangan dan Penggalian	0,56%	0,41%	-1,78%	1,43%	-3,64%
Industri Pengolahan	4,64%	1,68%	3,50%	7,00%	3,78%
Pengadaan Listrik dan Gas	7,51%	6,10%	-1,02%	4,23%	-2,67%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,32%	-0,39%	3,14%	7,23%	-2,83%
Konstruksi	6,70%	3,07%	8,23%	6,92%	-6,98%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,63%	3,79%	6,92%	4,51%	-14,73%
Transportasi dan Pergudangan	6,11%	3,99%	1,43%	-17,02%	-44,52%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,11%	5,88%	10,18%	9,62%	-45,49%
Informasi dan Komunikasi	6,70%	7,50%	12,85%	11,97%	18,09%
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,75%	1,23%	6,09%	4,94%	-1,18%
Real Estate	4,67%	3,87%	-5,13%	2,10%	-16,74%
Jasa Perusahaan	5,18%	4,10%	7,19%	-8,74%	-43,33%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	8,10%	-0,02%	8,31%	1,08%	12,23%
Jasa Pendidikan	5,15%	7,25%	2,27%	0,71%	-5,96%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,71%	9,83%	3,70%	2,10%	-2,09%
Jasa Lainnya	3,50%	5,98%	15,52%	1,97%	-67,98%
PDRB KOTA BATAM	**5,43%**	**2,61%**	**4,96%**	**5,92%**	**-2,55%**

Sumber: BPS Kota Batam

Untuk meningkatkan kestabilan perekonomian daerah, Kota Batam harus mampu melakukan diversifikasi sektor ekonomi supaya tidak tergantung hanya pada satu atau beberapa sektor ekonomi saja. Tingginya kontribusi sektor industri pengolahan yang ada saat ini perlu dimanfaatkan dengan mengoptimalkan *multiplier effect* dari sektor tersebut terhadap sektor-sektor lain. Hal yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan rantai pasok

industri lokal dengan meningkatkan daya saing industri-industri kecil dan menengah yang ada sehingga kebutuhan pasokan industri besar dapat sebagian dialihkan dari bahan baku impor ke bahan baku lokal serta meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Informasi ini dapat digunakan di antaranya untuk Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai, indeksasi APBD, sebagai proksi perubahan biaya hidup. Tingkat inflasi yang rendah menunjukkan kestabilan nilai uang terhadap barang yang tersedia di suatu wilayah.

Berdasarkan data dari tahun 2016 hingga 2020, laju inflasi di Kota Batam menunjukkan penurunan dari 3,61 persen di tahun 2016 menjadi 1,97 persen di tahun 2019 dan 1,12 di tahun 2020. Inflasi Kota Batam yang sebelumnya lebih tinggi dibandingkan laju inflasi provinsi dan nasional dari tahun 2016 hingga 2018 menjadi yang paling rendah di tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2. 17 Laju Inflasi Kota Batam, Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

Indikator	Inflasi (dalam persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Batam	3,61	4,13	3,65	1,97	1,12
Kepulauan Riau	3,53	4,02	3,47	2,03	1,18
Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber: BPS Kota Batam

Secara umum, meskipun laju inflasi di Kota Batam lebih tinggi dibandingkan laju inflasi Kepulauan Riau dan Nasional, inflasi di Kota Batam masih tergolong dalam laju inflasi ringan di bawah 10%. Meski demikian, salah satu dampak dari inflasi adalah melemahnya nilai mata uang yang berpengaruh pada keengganan masyarakat untuk menyimpan uangnya terutama bagi masyarakat yang berpendapatan tetap sehingga secara jangka panjang akan berpengaruh pada tingkat daya tarik investasi di Kota Batam. Inflasi di Kota Batam perlu dijaga secara relatif terhadap daerah-daerah sekitar dan daerah di Indonesia secara umum supaya posisi Kota Batam sebagai tujuan investasi dapat terjaga.

2.2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Dalam upaya mengidentifikasi perkembangan PDRB per kapita dari tahun ke tahun maka digunakan perbandingan PDRB per kapita dengan harga konstan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita Kota Batam sebesar 79.069.510 rupiah yang artinya pendapatan tiap penduduk Kota Batam secara rata-rata mencapai 79,07 juta rupiah per orang per tahun berdasarkan tahun dasar 2010. Nilai PDRB per kapita ini terus tumbuh dari 77,13 juta rupiah di tahun 2016. Berdasarkan informasi PDRB per Kapita, kesejahteraan masyarakat Kota Batam lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional meskipun lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kepulauan Riau. Pada Tahun 2020 PDRB per kapita Kota Batam sebesar 74,57 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita di tahun 2020 mengalami

penurunan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan semakin menurun yang mana selaras dengan semakin rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun yang sama. Kondisi ini dapat dipicu oleh adanya krisis akibat pandemi Covid-19.

Tabel 2. 18 PDRB per Kapita Harga Konstan (Tahun Dasar= 2010) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

Indikator	Pendapatan per Kapita (Ribu Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Batam	77.135,06	76.264,70	77.245,21	79.069,51	74.565,80
Kepulauan Riau	114.591	114.818,2	112.175,5	113.328,3	106.245,6

Catatan: Angka 2020 merupakan angka sangat sementara
Sumber: BPS Kota Batam, BPS Kepri

2.2.1.4 Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk, yang mana jumlah penduduk semakin bertambah namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan;
2. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Tingkat pendidikan yang rendah, dimana hal ini berpengaruh pada kompetensi dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja;
4. Distribusi yang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang.

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan persentase penduduk miskin adalah jumlah penduduk miskin dibagi dengan

jumlah penduduk pada periode waktu yang sama di suatu wilayah. Indikator ini secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin.

Berdasarkan perhitungan BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Batam sejak tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan dari sebanyak 57,34 ribu jiwa pada tahun 2016 menjadi sebanyak 67,06 ribu jiwa pada tahun 2020. Persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari 4,68 persen di tahun 2016 menjadi 4,75 persen di tahun 2020. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin mencapai angka tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,11 persen. Adanya Covid-19 yang sampai saat ini masih mewabah, akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Batam. Untuk itu sinergi Pemko Batam beserta stake holder terkait termasuk lembaga swasta yang sedang dilaksanakan sangat membantu upaya pengendalian peningkatan penduduk miskin di Kota Batam.

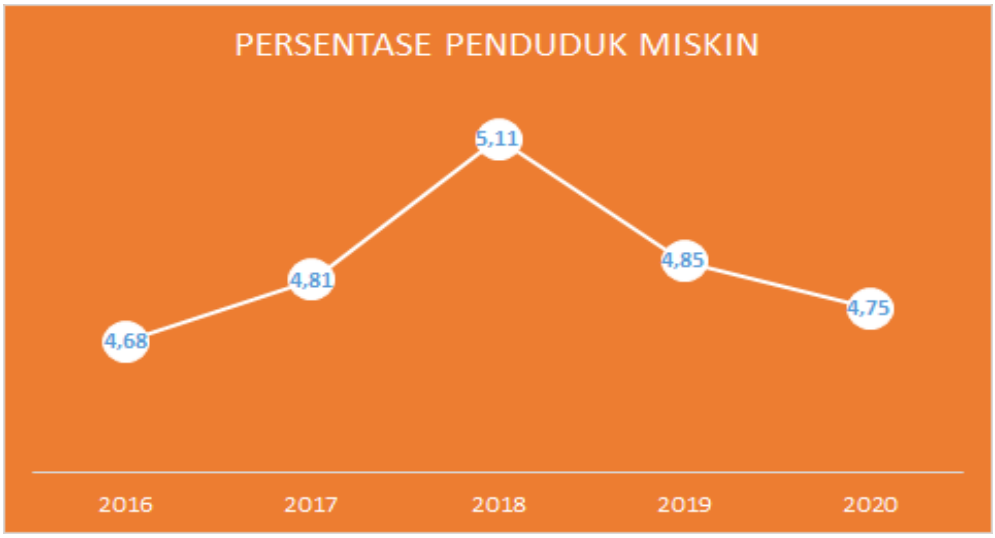

Gambar 2. 13 Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Batam

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Indikator ini digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Secara umum, garis kemiskinan di Kota Batam lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau. Garis kemiskinan tersebut terus meningkat dari 525.452 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2015 menjadi 659.170 rupiah per kapita per bulan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan pada tahun 2019 di Kota Batam adalah sebesar 686.956 rupiah per kapita per bulan. Pada tahun 2020 garis kemiskinan Kota Batam meningkat menjadi 707.856 rupiah per kapita per bulan. Hal ini menunjukan bahwa jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan pada tahun 2020 di Kota Batam adalah sebesar 707.856 rupiah per bulan. Rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan di bawah nilai tersebut akan dihitung sebagai rumah tangga miskin dalam perhitungan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.

Tabel 2. 19 Garis Kemiskinan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Wilayah Kepulauan Riau-Batam	Garis Kemiskinan (Rupiah/ kapita sebulan)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Batam	565.380	591.589	650.406	686.956	707.856
Provinsi Kepulauan Riau	502 653	513.237	559.291	594.059	614. 727

Catatan: Kondisi bulan Maret
Sumber: BPS Kota Batam

Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah *Gini Ratio*, Indeks Williamson, dan Kriteria Bank Dunia.

Gini Ratio (Indeks Gini) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks Gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi *Uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada Indeks Gini menunjukkan tingkat pemerataan pengeluaran yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pengeluaran atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan indeks gini ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- GR < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah,
- 0,4 <GR < 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat),
- GR > 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Indeks Gini di Kota Batam lebih rendah daripada Indeks Gini provinsi dan nasional. Artinya tingkat ketimpangan pengeluaran di Kota Batam lebih rendah dibanding provinsi dan nasional. Dari tahun 2016 hingga tahun 2018 angka Indeks Gini mengalami penurunan dari 0,33 di tahun 2016 menjadi 0,31 di tahun 2018. Angka Indeks Gini Kota Batam menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar golongan masyarakat tergolong ‘rendah’. Situasi ini membutuhkan upaya agar ketimpangan tidak menjadi lebih tinggi seiring meningkatnya perekonomian. Tabel 2.20 berikut ini menunjukkan perkembangan Indeks Gini di Kota Batam dari tahun 2016-2020. Kondisi pandemi tahun 2020 telah berhasil menurunkan ketimpangan pengeluaran meskipun tidak signifikan, yang mana penurunan ketimpangan pengeluaran Kota Batam sebesar 0,01 poin.

Tabel 2. 20 Indeks Gini Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

Indikator	Indeks Gini				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Batam	0,33	0,31	0,31	0,33	0,32
Provinsi Kepri	0,35	0,33	0,33	0,34	0,33
Nasional	0,41	0,41	0,40	0,39	0,39

Sumber: BPS Kota Batam (catatan kondisi bulan Maret)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Bila dilihat perkembangannya selama periode 2016-2020, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Batam berfluktuasi. Akan tetapi, Bila dilihat perkembangannya selama periode tahun 2016-2020, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Batam secara umum mengalami penurunan meskipun sempat mencapai puncak pada tahun 2018 yaitu 0,81. Namun saat ini dikarenakan pandemi Covid-19 mengalami kenaikan namun tidak lebih tinggi dibandingkan tahun 2018, yang mana indeks kedalaman kemiskinan tahun 2020 mencapai 0,7. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Selain memiliki tren yang menurun, indeks kedalaman kemiskinan Kota Batam juga lebih rendah dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kota Batam lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dan

nasional. Pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan Kota Batam mengalami kenaikan padahal sebelumnya menunjukkan tren menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa krisis pandemi akibat Covid-19 berpengaruh dalam meningkatkan indeks kedalaman kemiskinan menjadi 0,7.

Tabel 2. 21 Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

Indikator	Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Batam	0,49	0,79	0,81	0,53	0,7
Provinsi Kepri	0,89	0,97	0,99	0,69	1,11
Nasional	1,94	1,83	1,71	1,55	1,61

Sumber: BPS Kota Batam (catatan kondisi bulan Maret)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*/P2) adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indikator ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Bila dilihat perkembangannya selama periode 2015-2020, indeks keparahan kemiskinan di Kota Batam berfluktuasi. Akan tetapi, Bila dilihat perkembangannya selama periode tahun 2015-2020, indeks keparahan kemiskinan di Kota Batam secara umum mengalami penurunan dari 0,14 di tahun 2015 menjadi 0,09 di tahun 2019 meskipun sempat mencapai puncak pada tahun 2017 menjadi 0,22. Selain memiliki tren yang menurun, indeks keparahan kemiskinan Kota Batam juga lebih rendah dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di

Kota Batam lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dan nasional. Namun, pada tahun 2020, krisis akibat pandemi Covid-19 telah menyebabkan indeks keparahan kemiskinan Kota Batam naik menjadi 0,2 dari 0,09 di tahun 2019.

Tabel 2. 22 Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2020

Indikator	Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Batam	0,14	0,1	0,22	0,19	0,09	0,2
Provinsi Kepri	0,25	0,2	0,23	0,24	0,12	0,42
Nasional	0,53	0,53	0,48	0,44	0,37	0,47

Sumber: BPS Kota Batam

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial terbagi menjadi lima bagian, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender dan pemberdayaan gender, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Analisis kinerja kesejahteraan sosial di bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, dan angka partisipasi murni. Sedangkan analisis kinerja kesejahteraan sosial di bidang kesehatan dilakukan terhadap indikator angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup. Analisis kinerja kesejahteraan sosial di bidang ketenagakerjaan dilakukan terhadap indikator persentase penduduk yang memiliki lahan dan rasio penduduk yang bekerja.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian kesejahteraan penduduk secara umum, berbasis komponen dasar kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut adalah 1) mencakup umur panjang dan sehat; 2) pengetahuan, dan 3) kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH). Untuk dimensi

pengetahuan, digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikatorkemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kota Batam mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2016 hingga tahun 2020. Peningkatan IPM per tahun berkisar antara 28 hingga 55 poin. Kenaikan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,55, kenaikan IPM tersebut dikarenakan keempat indikator pembentuknya mengalami kenaikan dan 2 (dua) diantaranya mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (+0,2 tahun) dan pengeluaran per kapit (+586 ribu rupiah).

Tabel 2. 23 Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pendidikan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,67	12,94	12,95	13,15	13,16
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,10	11,11	11,12	11,13	11,14
Kesehatan						
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,09	73,19	73,24	73,29	73,33
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran per Kapita	Ribu Rupiah	16.889	17.131	17.560	18.146	18.095
Indeks Pembangunan Manusia		**79,79**	**80,26**	**80,54**	**81,09**	**81,11**

Sumber: BPS Kota Batam

Kenaikan IPM ini hendaknya menjadi pemacu peran serta yang nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Batam agar diperoleh hasil yang lebih optimal lagi. Akan tetapi perlu disadari bahwa investasi ini hasilnya tidak berdampak langsung secara seketika karena investasi pembangunan manusia merupakan pembangunan jangka panjang.

IPM sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah. Penelaahan komparatif atas disparitas dapat dilihat dengan perbandingan antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, maupun dengan kabupaten/kota secara nasional.

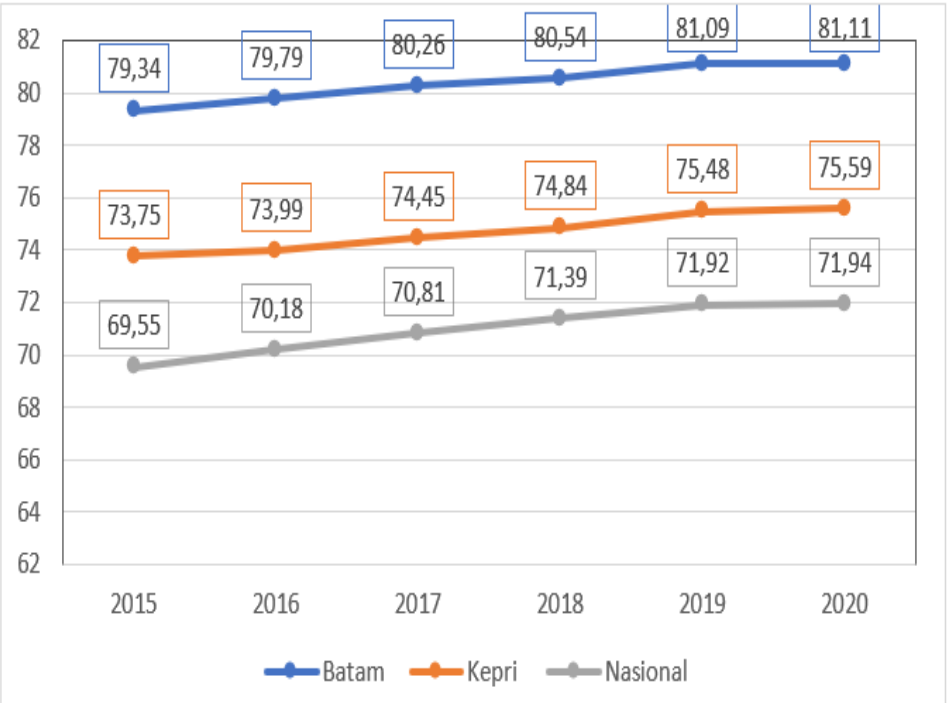

Gambar 2. 14 Perbandingan IPM Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2020

Sumber: BPS Kota Batam

Analisis komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Batam berada pada kondisi yang lebih baik. Pada tingkat provinsi, IPM Kepulauan Riau memiliki tren meningkat sejalan dengan peningkatan IPM di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut IPM Kota Batam mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih tinggi dari IPM tingkat nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Batam relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan dan Nasional. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Kepulauan Riau dan juga di tingkat nasional, maka sudah selayaknya IPM Kota Batam berada di atas level provinsi dan nasional.

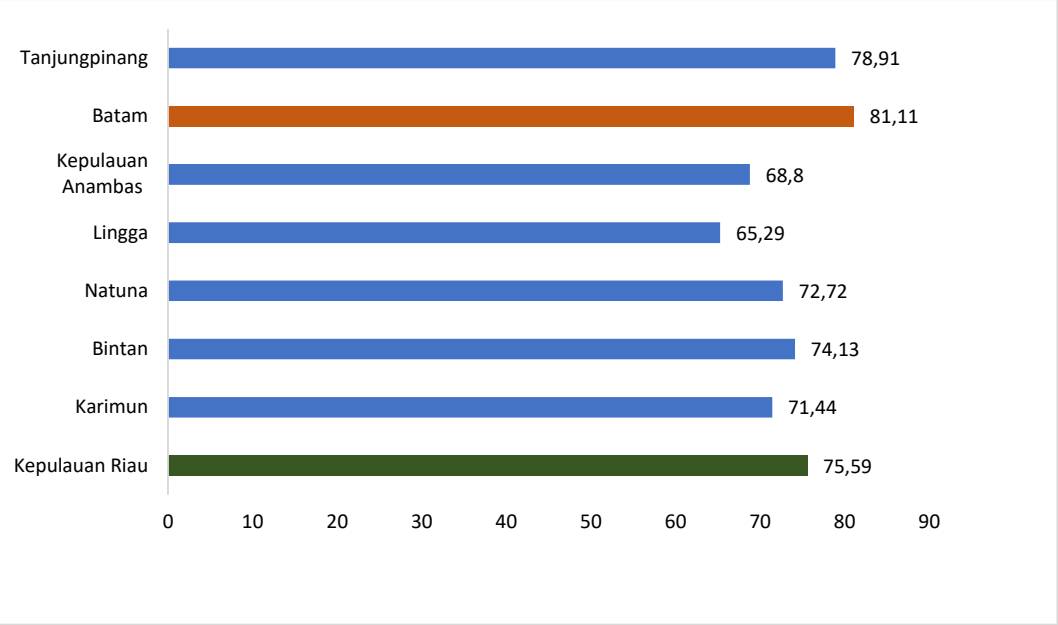

Gambar 2. 15 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Sumber: BPS Kota Batam

Grafik komparasi nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa Kota Batam memiliki nilai IPM tertinggi di tahun 2020 yaitu 81,11 tingkat kedua diduduki oleh Kota Tanjungpinang dengan nilai IPM sebesar 78,91 dan kemudian disusul oleh Kabupaten Bintan sebesar 74,13. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batam secara berkelanjutan melalui perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang harus terus diupayakan untuk dapat tetap mempertahankan tingkat daya saing (*competitiveness*) yang semakin dinamis di era global saat ini.

2.2.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran/indikator yang mencerminkan terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang

ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan, partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender.

Secara umum skor IPG Kota Batam cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2020 skor IPG Kota Batam mencapai 94,43. Nilai tersebut berada di atas skor IPG Provinsi Kepulauan Riau 93,31 dan Kabupaten/Kota lainnya. Meskipun masih di atas rata-rata provinsi, IPG Kota Batam masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2020, IPG Kota Tanjungpinang adalah 96,79.

Dengan demikian Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan, partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta perolehan manfaat yang setara dan adil dari pembangunan di Kota Batam lebih baik dibandingkan kondisi provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan di Kota Batam dalam aspek (i) *a long and healthy life;* (ii) *knowledge*; (iii) *decent standard of living* lebih baik daripada pencapaian kesetaraan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.

Tabel 2. 24 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Batam Tahun 2016-2020

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Riau	93,13	92,96	92,97	93,10	93,31
Karimun	-	91,35	91,48	90,91	91,25
Bintan	-	92,58	92,79	93,10	93,12
Natuna	-	91,31	91,62	91,72	91,67
Lingga	-	89,73	89,29	89,26	89,25
Kepulauan Anambas	-	89,97	90,12	90,16	90,27
Batam	-	94,21	94,22	94,42	94,43
Tanjungpinang	-	96,46	96,47	96,77	96,79

Sumber : www.bps.go.id

Dalam tiga tahun terakhir, skor IDG di Kota Batam mengalami tren kenaikan, pada tahun 2017 sebesar 55,28 kemudian tahun 2018 menurun menjadi 53,29, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 58,40 dan pada tahun 2020 adalah senilai 59,10. Skor IDG Kota Batam tahun 2020 lebih rendah dibandingkan IDG Provinsi Kepulauan Riau sebesar 62,02. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan di Kota Batam masih berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2. 25 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Batam Tahun 2016-2020

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Riau	65,60	66,96	66,18	61,58	62,02
Karimun	-	56,47	57,03	64,17	64,05
Bintan	-	61,24	63,41	69,71	69,64
Natuna	-	48,55	49,17	42,02	42,99
Lingga	-	47,82	46,08	48,96	48,52
Kepulauan Anambas	-	57,07	57,32	57,74	62,57
Batam	-	55,28	53,29	58,40	59,10
Tanjungpinang	-	70,33	68,57	76,13	76,44

Sumber : www.bps.go.id

2.2.2.3 Indikator Makro Urusan Pendidikan

Indikator makro di bidang pendidikan diukur berdasarkan harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

HLS Kota Batam pada tahun 2019 sebesar 13,15 tahun. Selanjutnya, HLS Kota Batam pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu sebesar 13,16 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk

jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,16 tahun atau setara dengan Diploma I.

Selain menunjukkan tren yang meningkat pada HLS dari tahun 2016 hingga 2020, analisis perbandingan HLS Kota Batam dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa Kota Batam memiliki HLS di atas rata-rata Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, HLS Provinsi Kepulauan Riau sebesar 12,66 dibandingkan dengan HLS Kota Batam sebesar 12,67, sedangkan di tahun 2019 HLS Provinsi Kepulauan Riau sebesar 12,83 dibandingkan dengan HLS Kota Batam sebesar 13,15 di tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 HLS Provinsi Kepulauan Riau sebesar 12,87 dibandingkan dengan HLS Kota Batam sebesar 13,16. Meskipun masih di atas rata-rata provinsi, HLS Kota Batam masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna. Pada tahun 2020, HLS Tanjungpinang adalah 14,12 sedangkan HLS Kabupaten Natuna 13,9.

Tabel 2. 26 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Riau	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87
Karimun	12,14	12,15	12,16	12,3	12,42
Bintan	12,27	12,6	12,75	12,95	13,1
Natuna	13,86	13,87	13,88	13,89	13,9
Lingga	12,06	12,42	12,42	12,44	12,45
Kepulauan Anambas	11,87	12,14	12,32	12,75	12,81
Batam	12,67	12,94	12,95	13,15	13,16
Tanjungpinang	14,06	14,07	14,08	14,09	14,12

Sumber: BPS Kota Batam

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang

pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS Kota Batam pada tahun 2019 sebesar 11,13 tahun, dan pada tahun 2020 RLS Kota Batam mencapai 11,14. Artinya, secara rata-rata penduduk Kota Batam yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,14 tahun atau setara dengan tamatan kelas 2 SMA.

Selain menunjukkan tren yang meningkat pada RLS dari tahun 2016 hingga 2020, analisis perbandingan RLS Kota Batam dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa Kota Batam memiliki RLS di atas rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, RLS Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,67 dibandingkan dengan RLS Kota Batam sebesar 11,10 sedangkan di tahun 2019 HLS Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,99 dibandingkan dengan RLS Kota Batam sebesar 11,13 di tahun 2019. Pada tahun 2020 RLS Provinsi Kepulauan Riau adalah 10,12 dan RLS Kota Batam adalah 11,14. Angka RLS Kota Batam merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Tabel 2. 27 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Riau	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12
Karimun	7,75	7,8	7,81	7,92	8,17
Bintan	8,33	8,34	8,35	8,36	8,44
Natuna	8,46	8,47	8,71	8,72	8,73
Lingga	5,85	5,97	6,27	6,51	6,67
Kepulauan Anambas	6,63	6,69	6,7	6,91	7,17
Batam	11,10	11,11	11,12	11,13	11,14
Tanjungpinang	9,96	9,97	9,98	9,99	10,25

Sumber: BPS Kota Batam dan BPS RI

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Secara umum, AMH Kota Batam mengalami peningkatan dari 99,1 di tahun 2016 menjadi 99,54 di tahun 2019. Meski demikian, terjadi penurunan pada tahun 2019 dari sebelumnya sebesar 99,83 di tahun 2018. Namun, pada tahun 2020 AMH Kota Batam mengalami peningkatan menjadi 99,64. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar di Kota Batam semakin efektif.

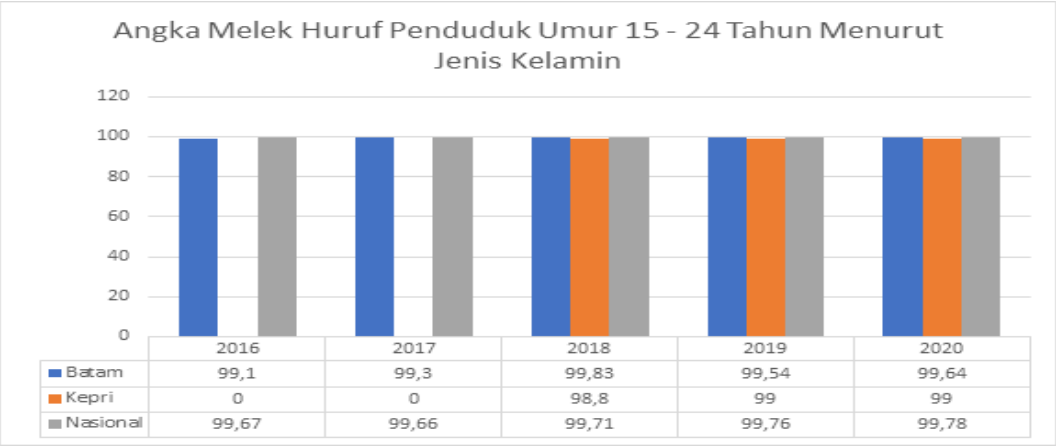

Gambar 2. 16 Angka Melek Huruf (dalam persen) Kota Batam 2016-2020

Sumber: BPS Kota Batam

2.2.2.4 Indikator Makro Urusan Kesehatan

Indikator makro bidang kesehatan diukur berdasarkan indikator angka usia harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi dan prevalensi balita

gizi buruk. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Kota Batam pada tahun 2019 adalah 73,29 tahun, artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2019 akan dapat hidup sampai 73 atau 74 tahun. Selanjutnya pada tahun 2020 nilai AHH meningkat menjadi 73,33. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan AHH Provinsi Kepulauan Riau dan nasional masing-masing sebesar 69,80 dan 71,34 di tahun 2019 dan 69,96 dan 71,53 di tahun 2020. Peningkatan AHH dari 73,09 di tahun 2016 menjadi 73,29 di tahun 2019, dan 73,33 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam selama 6 (enam) tahun terakhir.

Gambar 2. 17 Angka Harapan Hidup (dalam tahun) Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Batam

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) salah satu isu di bidang kesehatan dari rencana aksi global yang disepakati pemimpin dunia, termasuk Indonesia, melalui *Sustainable Development Goals* (*SDGs*). AKI merupakan salah satu indikator kesehatan selain ekonomi dan tingkat pendidikan dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Dalam rangka mencapai kesepakatan *SDGs,* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan target AKI pada tahun 2024 mencapai 183 per 100.000 kelahiran hidup.

Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kesepakatan tersebut di atas dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan sektor kesehatan pada 5 tahun terakhir telah berhasil menurunkan AKI, Sepanjang tahun 2016-2020 kematian ibu di Kota Batam kematian ibu dapat ditekan sehingga mencapai target nasional. Pada tahun terakhir AKI di Kota Batam mencapai 65.41 per 100.000 kelahiran hidup angka ini merupakan AKI yang paling rendah sepanjang 5 tahun terakhir. seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

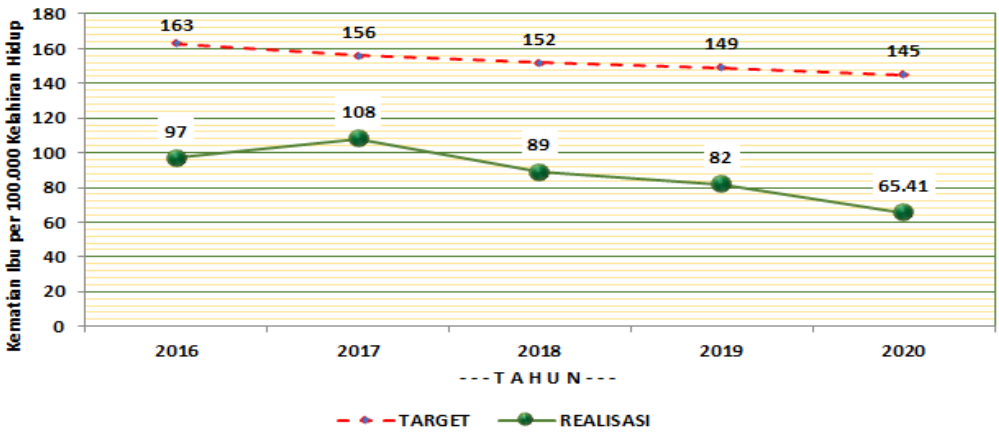

Gambar 2. 18. Angka Kematian Ibu (Jiwa per 100.000 kelahiran hidup) di Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Informasi mengenai AKI menggambarkan hasil dari pelaksanaan program peningkatan kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas serta ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia kesehatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan ibu baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan melibatkan peran masyarakat melalui desa siaga dan peran keluarga melalui suami siaga.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang penting selain AKI untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kematian bayi secara intrinsik lebih erat kaitannya dengan kesehatan ibu sebelum, selama dan setelah persalinan, artinya faktor risiko yang ada pada ibu akan mempengaruhi faktor risiko pada bayi. Untuk itu dalam menurunkan AKB perlu dipersiapkan sejak awal mulai dari calon ibu (remaja putri), serta lingkungan baik lingkungan sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi kesehatan bayi baik secara fisik, mental dan spiritual dalam setiap tahap kehidupan.

Pemerintah Kota Batam sangat mendukung program-program yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak guna mempersiapkan generasi penerus sebagai sumber daya manusia yang tangguh cerdas dan sehat pada setiap tahap siklus kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan AKB terutama pada 5 tahun terakhir, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

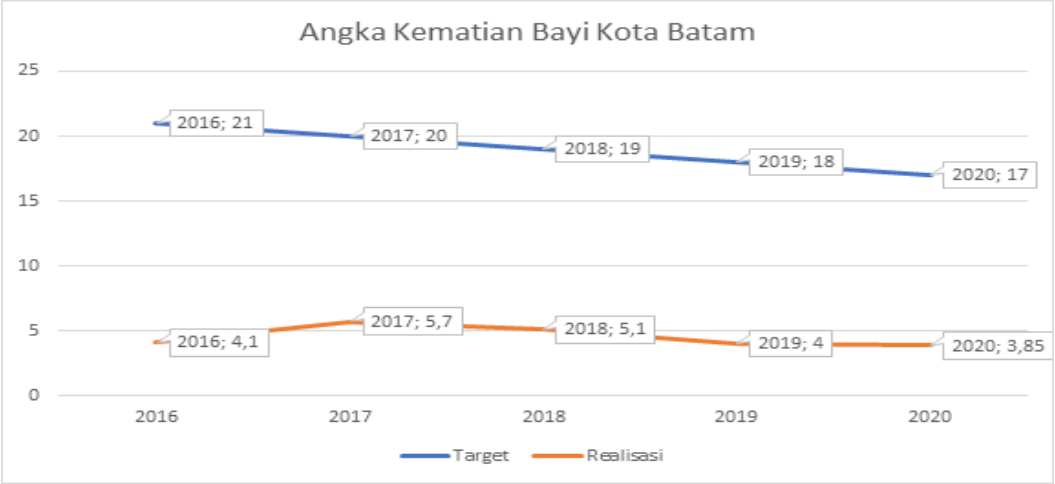

Gambar 2. 19 Angka Kematian Bayi (jiwa per 1000 kelahiran hidup) Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Pada gambar di atas terlihat AKB di Kota Batam dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2017 terjadi peningkatan yang tidak bermakna dan di tahun berikutnya menunjukkan penurunan hingga pada tahun 2020 berada pada titik terendah dengan 3.85 per 1000 kelahiran hidup.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKB adalah dengan meningkatkan cakupan pelayanan neonatus terutama pada 28 hari pertama, mencakup pemantauan tumbuh kembang bayi, pemberian imunisasi, ASI eksklusif dan peningkatan promosi kesehatan pada ibu serta keluarga tentang perawatan bayi.

Status gizi juga merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat yang terkait dengan sistem pangan dan gizi menggambarkan ketersediaan pangan untuk kelangsungan hidup. Kelompok umur balita merupakan salah satu sasaran utama program gizi masyarakat dan menjadi salah satu indikator program prioritas nasional. Masalah gizi pada balita sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dan kerentanan terhadap penyakit yang nantinya akan mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia baik fisik dan intelegensi/kecerdasannya.

Untuk menentukan masalah gizi pada balita menggunakan teknik antropometri dengan melakukan pengukuranberat badan badan dan tinggi badan.Underweight merupakan klasifikasi dari status gizi berat badan per umur (BB/U) yang menunjukkan pertumbuhan berat badan anak terhadap umurnya, jika berat badan anak di bawah rata-rata dengan usia yang sama, maka anak tersebut dikatakan underweight. Indikator ini tidak memberi indikasi masalah gizi yang berat pada anak. Prevalensi balita kekurangan gizi di Kota Batam sejak tahun 2016 terus membaik atau menunjukkan tren kasus yang selalu menurun dari tahun ke tahun dan pada tahun 2020 berada kasus terendah (0.14%) pada5 tahun terakhir.

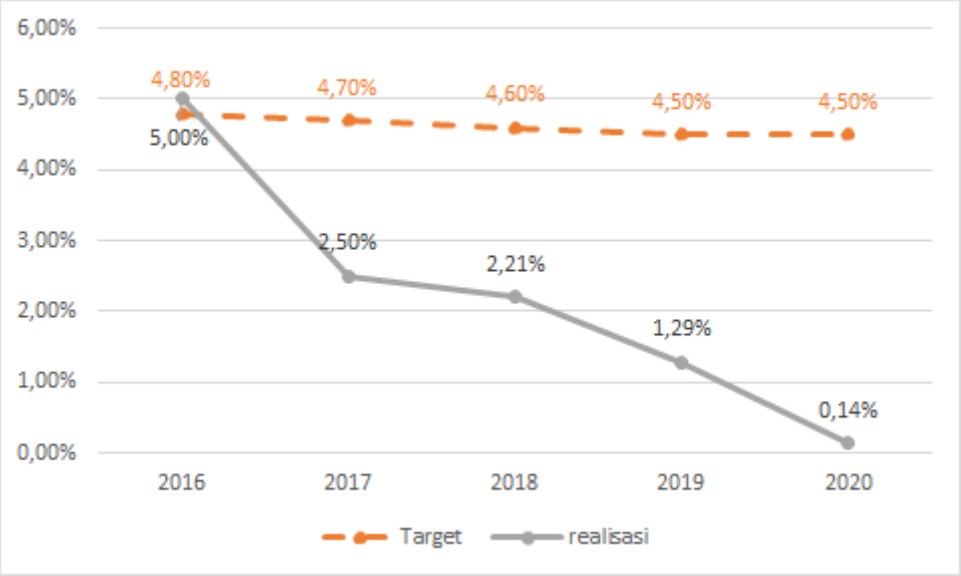

Gambar 2. 20 Nilai Target dan Realisasi Prevalensi Kekurangan Gizi (*under weight*) pada Anak Balita (dalam persen) Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Masalah gizi pada balita lainnya adalah *stunting* dengan klasifikasi tinggi badan per umur (TB/U). Balita *stunting* adalah balita yang memiliki tinggi badan tidak sesuai (kurang/pendek) dengan umurnya atau balita yang memiliki fisik yang pendek daripada anak seusianya. *Stunting* terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang, dan tidak bisa mengejar ketertinggalan pertumbuhan tinggi badan yang terjadi.

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. *Stunting* pada balita mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis, atau balita menderita penyakit berulang sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kejadian ini juga merupakan dampak dari kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan gizi pada usia balita yang merupakan masa emas dalam pertumbuhan dan perkembangan bagi anak, sehingga kasus *Stunting* pada balita memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional balita, termasuk perkembangan otak, yang sulit diperbaiki pada masa selanjutnya. Selain itu anak yang mengalami *stunting*, beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Hal ini menunjukan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup bagi balita.

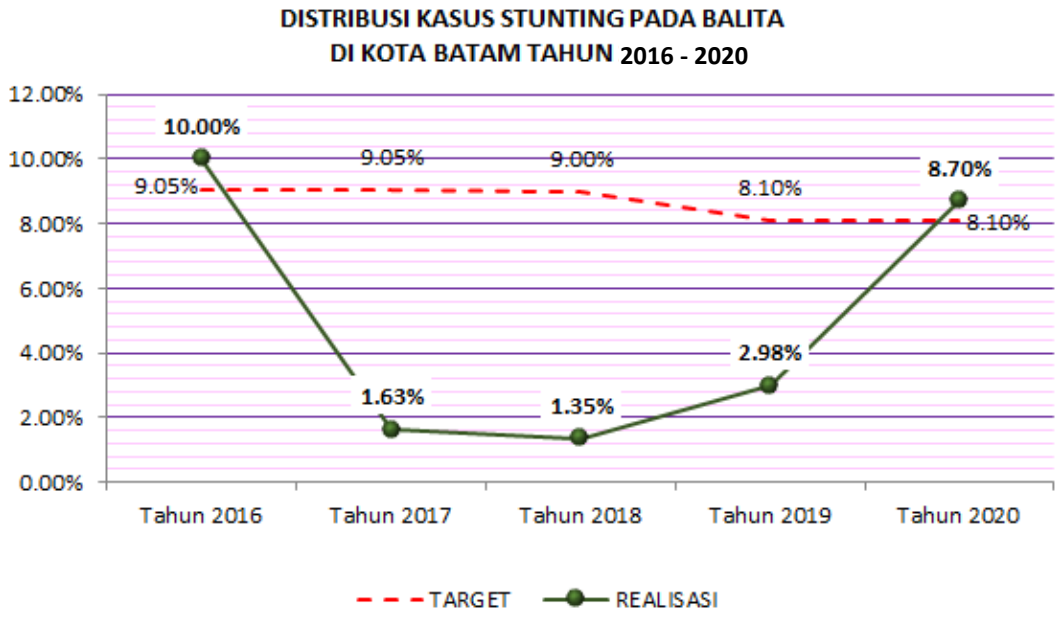

Gambar 2. 21 Perkembangan Prevalensi Pendek dan Sangat Pendek (*Stunting*) pada Anak Balita (dalam persen) Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Berdasarkan gambar di atas prevalensi *stunting* pada balita di Kota Batam sejak tahun 2017 selalu di bawah nilai targetnya. Hal ini menunjukkan salah satu kinerja yang baik dari sektor kesehatan dalam mengatasi masalah gizi pada balita. Namun pada tahun 2 tahun terakhir (2019 dan 2020), hal ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan, karena adanya perubahan sistem pencatatan dan pelaporan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI berupa Aplikasi e-PPGBM. Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada balita pada kegiatan Posyandu dan kemudian diolah menggunakan aplikasi e-PPGBM, yang mana hasil pemantauan pada 2 terakhir tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Selain identifikasi terhadap prevalensi *stunting*, masalah gizi pada balita lainya adalah balita dengan gizi kurus (*wasting)*, gizi kurus pada balita ditentukan berdasarkan hasil pengukuran berat badan per tinggi badan (BB/TB). Dinas Kesehatan Kota Batam juga melakukan identifikasi terhadap persentase kurus dan sangat kurus (*wasting*) pada anak Balita. Berdasarkan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di Kota Batam didapatkan hasil sebagai berikut.

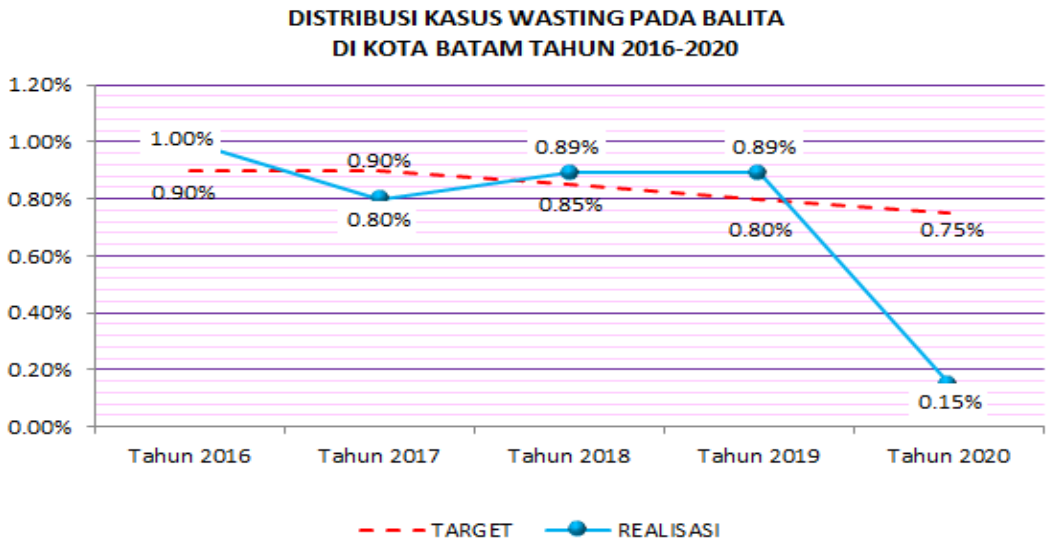

Gambar 2. 22 Perkembangan Persentase Kurus dan Sangat Kurus (*Wasting*) pada Anak Balita (dalam persen) Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Persentase wasting tahun 2016 adalah sebesar 1 persen. Angka ini terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 persentase wasting adalah 0,15 persen. Nilai ini telah sesuai dengan target Standar Pelayanan Minimum (SPM) yaitu 0,15 persen.

Tuberkulosis (TBC) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global sehingga menjadi salah satu program prioritas dalam tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan (*SDGs*) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang *SDGs*.

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Terdapat beberapa spesies *Mycobacterium*, antara lain: *M. Tuberculosis, M. Africanum, M. Bovis, M. Leprae,* dsb. Yang juga dikenal sebagai Bakteri Tahan Asam (BTA). Untuk menentukan berhasil tidaknya suatu program maka dibutuhkan indikator-indikator sebagai bahan evaluasi dan monitoring. Penularan TB dapat terjadi jika pasien TB batuk atau bersin, dapat menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak (*droplet nuclei*/percik renik). Infeksi akan terjadi apabila seseorang menghirup udara yang mengandung percikan dahak yang infeksius. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak yang mengandung kuman sebanyak 0-3500 M. Tuberculosis. Sedangkan kalau bersin dapat mengeluarkan sebanyak 4500-1.000.000 M.Tuberculosis.

Berdasarkan hasil laporan global TB tahun 2020 lalu, Indonesia termasuk dalam 3 negara dengan beban tuberkulosis (TBC) terbesar di dunia dan kematian akibat TB diperkirakan 98.000 orang meninggal karena TB setiap tahunnya. Hal ini mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi programTB Paru .

Pada kawasan pulau Sumatera termasuk Kota Batam diperkirakan prevalensi TB berkisar 160 per 100.000 penduduk. Dalam hal pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC sesuai standar

menjadi salah menjadi salah satu indikator target SPM (standar pelayanan minimal) bidang Kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 4 tahun 2019.

Sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang *SDGs* menetapkan target prevalensi TBC pada tahun 2019 menjadi 245 per 100.000 penduduk.

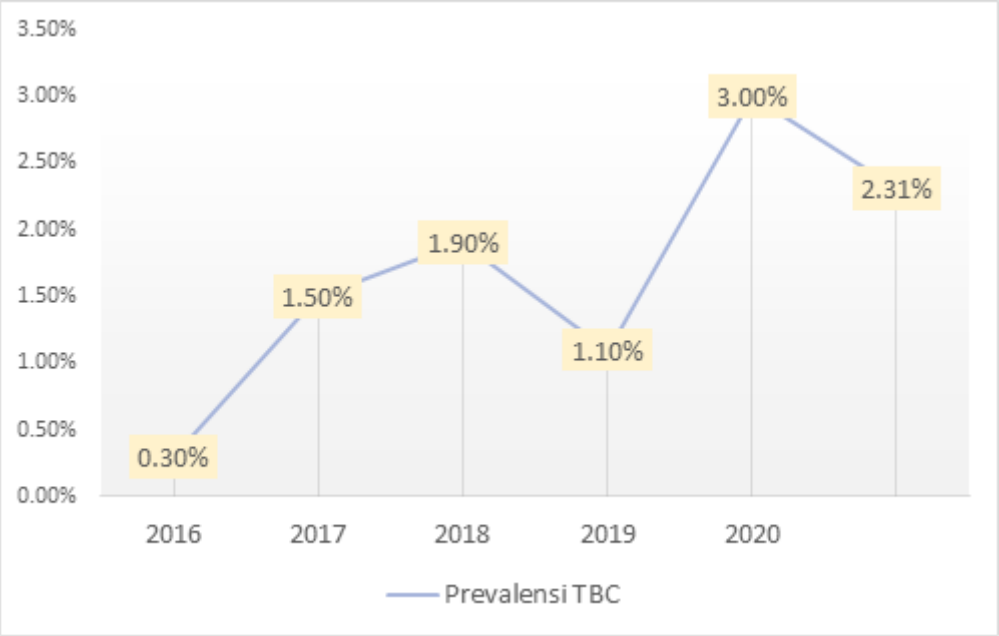

Gambar 2. 23 Prevalensi TBC (dalam persen) Kota Batam Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Prevalensi TBC adalah jumlah kasus baru dan kasus lama yang ada pada suatu wilayah tertentu pada satu masa dibagi dengan jumlah *Populatin At Risk* di kali dengan 100.000. Di Kota Batam prevalensi TB menunjukkan tren adanya peningkatan pada 4 tahun pertama dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dalam hal ini, yang perlu menjadi perhatian adalah kecenderungan angka prevalensi TBC yang cenderung meningkat. Angka prevalensi TBC pada tahun 2019 adalah sebesar 3 persen dan juga menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan target nasional sebesar 0,245 persen.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan prevalensi TB yang cukup tinggi, hal ini terjadi karena adanya penguatan surveilans melalui pemberdayaan kader kesehatan dalam melakukan pemantauan terhadap suspek terduga TB di masyarakat. Alhasil dari upaya tersebut semakin banyak ditemukan kasus TB di masyarakat dan pada tahun 2020 terjadi penurunan angka yang cukup menggembirakan. Penurunan yang terjadi tahun 2020 disebabkan karena menurunnya kasus baru dan semakin banyak kasus lama yang sembuh sehingga jumlah kasus di masyarakat didapat sebanyak 186 orang setiap 100.000 penduduk. Pada tahun 2020, angka prevalensi TBC menurun menjadi 2,31%. Meskipun demikian, angka tersebut masih belum memenuhi target nasional (Nasional tahun 2020 : 243 per 100.000 penduduk, atau 0,243%). Diperlukan upaya yang lebih tinggi untuk mengurangi angka prevalensi TBC sehingga sesuai dengan target nasional. Sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi prevalensi TBC di Kota Batam tetap dioptimalkan dengan memanfaatkan aspek yang ada.

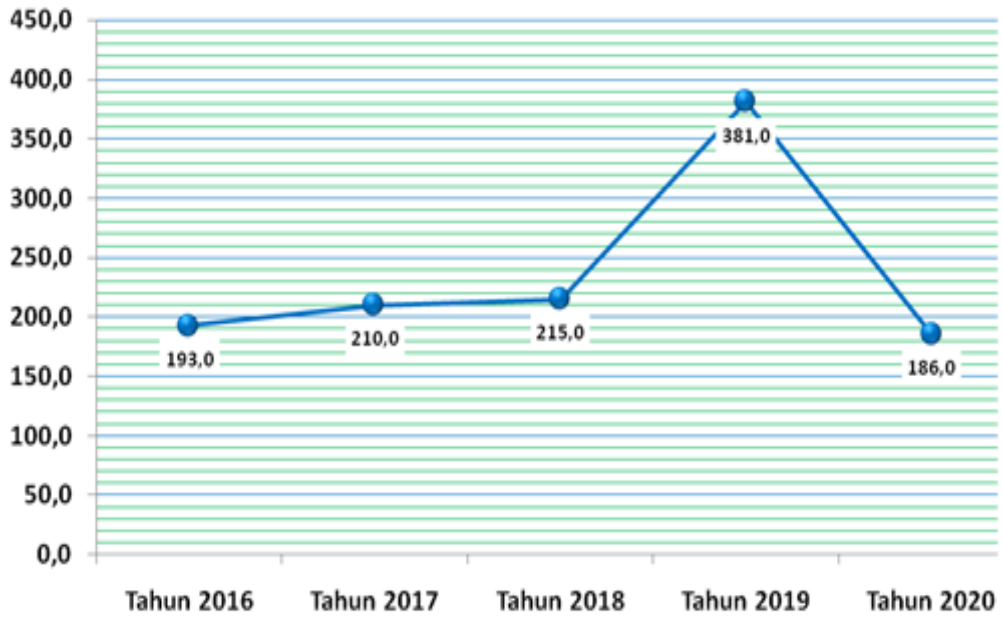

Gambar 2. 24 *Case Notification Rate* (CNR) per 100.000 penduduk Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Case Notification Rate (CNR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah

tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan (*trend*) meningkat atau menurunnya penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah. Gambar di atas menunjukkan angka notifikasi semua kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kota Batam dari tahun 2016-2020.

Secara umum, kinerja indikator makro kesehatan di Kota Batam menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kinerja provinsi maupun nasional. Meski demikian, pada indikator prevalensi kekurangan gizi, prevalensi *stunting* dan *Case Notification Rate*(CNR) TBC yang cukup tinggi, meningkatnya tren pada kedua indikator tersebut perlu menjadi perhatian karena kinerja yang baik akan menunjukkan angka prevalensi yang semakin rendah. Selain itu, perlu dicermati pada prevalensi balita gizi buruk hasilnya diiringi dengan prevalensi *stunting* yang justru meningkat secara signifikan di tahun 2020.

2.2.2.5 Indikator Makro Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Secara umum, jumlah angkatan kerja di Kota Batam mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020 meskipun terjadi penurunan jumlah angkatan kerja dari 605.518 jiwa di tahun 2017 menjadi 745.545 jiwa di tahun 2020. Penurunan jumlah angkatan kerja ini terjadi karena terjadi penurunan yang cukup besar pada jumlah angkatan kerja berjenis kelamin perempuan dari 230.365 jiwa di tahun 2017 menjadi 208.547 jiwa di tahun 2018. Pada tahun 2019, jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan menjadi 643.381 orang yang terdiri dari 424.355 berjenis kelamin laki-laki dan 219.026 berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja juga mengalami kenaikan baik dari Angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang mana jumlah

Angkatan kerja laki-laki sebanyak 469.758 orang dan angkatan kerja perempuan 275.787 orang.

Gambar 2. 25 Jumlah Angkatan Kerja Kota Batam menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Batam[4]

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tingkat pengangguran merupakan fenomena multi-dimensional, terutama fenomena ekonomi dan sekaligus fenomena sosial. Dampak dari tingkat

[4]*Data tahun 2016 merupakan data olahan tim sesuai dengan metode yang digunakan BPS*

pengangguran akan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Batam setiap tahunnya ke depan, maka secara simultan dapat memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meminimalisasi tingkat pengangguran yang ada. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Kota Batam yang tinggi perlu diupayakan agar mampu menciptakan perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat.

Tabel 2. 28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam Tahun 2016-2020

Tahun	TPAK (%)	TPT (%)
2016	66,41	8,17
2017	67,65	7,82
2018	65,25	8,93
2019	66,46	8.31
2020	68,22	11,79

Sumber: BPS Kota Batam[5]

Nilai TPAK Kota Batam dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan angka yang fluktuatif meskipun secara umum memiliki tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menjadi angkatan kerja mengalami kenaikan sejak tahun 2018. Nilai TPAK tahun 2019 adalah 66,46 persen dan pada tahun 2020 menjadi 68,22 persen.

Hal yang tidak jauh berbeda ditunjukkan oleh TPT yang memiliki nilai dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019 nilai TPT Kota Batam mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Namun, pada tahun 2020 nilai TPT mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja di Kota Batam. Kondisi ini dipicu oleh pandemi Covid-19 yang mana akibat pandemi dengan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan performa

[5]*Data tahun 2016 merupakan data olahan tim) sesuai dengan metode yang digunakan BPS*

perekonomian menurun. Tidak beroperasinya beberapa aktivitas ekonomi secara normal menyebabkan pengurangan tenaga kerja di sektor swasta mengakibatkan nilai TPT meningkat tajam.

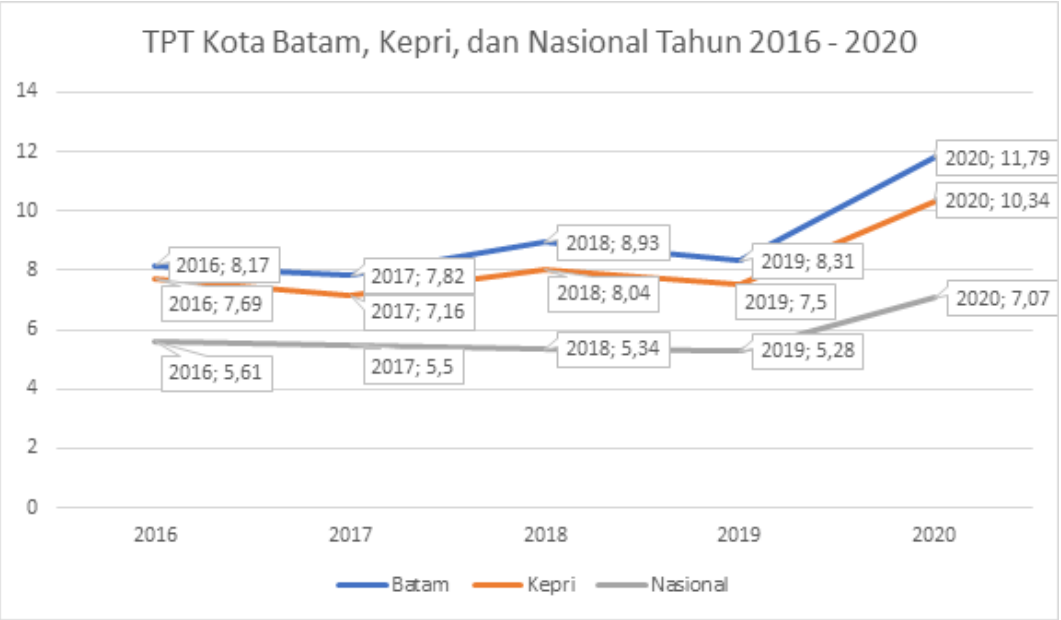

Gambar 2. 26 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Batam[6]

Analisis perbandingan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional menunjukkan bahwa TPT Kota Batam memiliki nilai yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja penyerapan maupun penyediaan lapangan pekerjaan di Kota Batam masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Pada tahun 2020, saat pandemi Covid-19 tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam naik secara signifikan mencapai 11,79 persen lebih tinggi dibandingkan nilai TPT Provinsi (10,34%) dan Nasional (7,07%).

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Dari tahun 2016 hingga 2020, Kota Batam menyelenggarakan 6 festival seni dan budaya setiap

[6]*Data tahun 2016 merupakan data olahan tim) sesuai dengan metode yang digunakan BPS*

tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dan meningkat menjadi 8 pada tahun 2019, namun menurun di tahun 2020 menjadi 2 festival seni dan budaya. Dalam setiap tahunnya, Kota Batam melestarikan 15 benda, situs dan kawasan cagar budaya dari tahun 2016-2020. Namun, pada tahun 2020 dengan adanya kondisi pandemi benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah berjumlah 3 unit yang mana sesuai dengan yang ditargetkan. Selain itu, Kota Batam juga melakukan revitalisasi dan inventarisasi 20 karya budaya setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga 2020. Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya sebagai berikut.

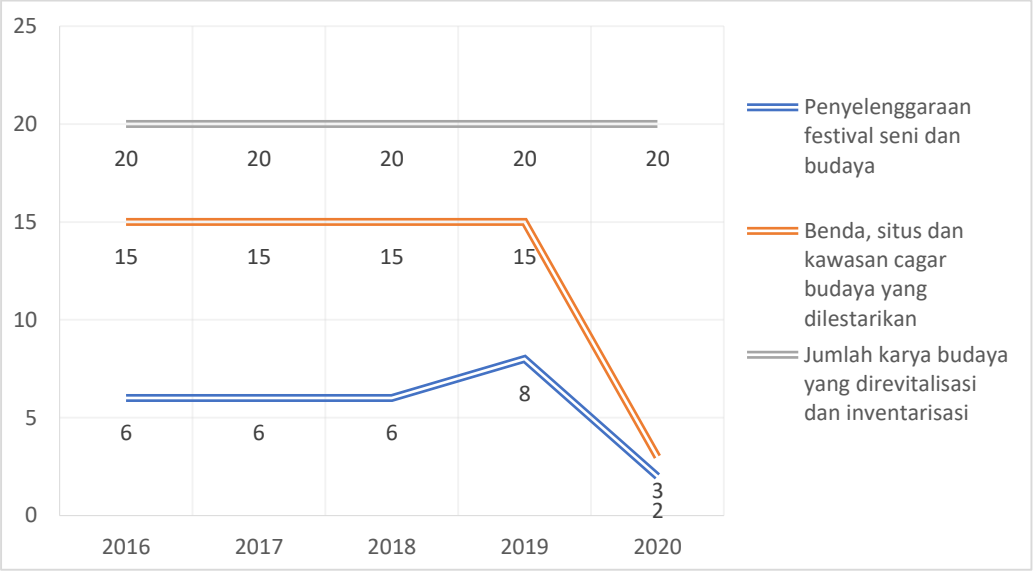

Gambar 2. 27 Indikator Makro Kinerja Seni dan Budaya Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Batam

Terkait bidang olahraga, Pemerintah Kota Batam telah membangun sarana olahraga sesuai dengan target. Penambahan sarana dan prasarana olahraga lainnya berupa lapangan olahraga serba guna yang dibangun di Kawasan permukiman. Penambahan sarana dan prasarana tersebut tidak dapat dilakukan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan bagi Pemerintah Kota Batam untuk mengalokasikan anggaran yang ada untuk membiayai seluruh upaya penanganan pandemi Covid-19.

Tabel 2. 29 Indikator Makro di Bidang Olahraga Kota Batam Tahun 2016-2020

Indikator		2016	2017	2018	2019	2020
Sarana dan Prasarana Olahraga Terbangun (satuan unit)	target	4	1	2	1	0
	realisasi	1	2	18	25	0
Jumlah Prestasi Olahraga (satuan orang)	target	-	-	-	-	-
	realisasi	6	0	24	10	0
Jumlah Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (satuan orang)	target	95	100	120	140	160
	realisasi	13	0	213	54	0
Jumlah medali yang diperoleh (satuan medali)	target	-	-	-	-	-
	realisasi	13	0	213	35	0

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian ini dijelaskan seluruh indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan berdasarkan (1) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, (2) urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar dan (3) urusan pilihan. Pembahasan indikator dilakukan terhadap indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan setiap urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Layanan Wajib

Pada bagian ini pembahasan terdiri dari 6 urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam UU 23/2014, yakni urusan (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pekerjaan umum dan penataan ruang, (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan (6) urusan sosial. Pembahasan lebih lanjut secara berurutan disampaikan pada sub bab selanjutnya.

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs

Kinerja indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs Kota Batam selama periode 2016-2020 menunjukkan capaian yang positif, hal ini diketahui karena realisasi indikator setiap tahunnya telah mencapai/melampaui target yang ditentukan. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada paragraf berikutnya.

Untuk jenjang SD/MI, APS di tahun 2019 telah mencapai 99,97 persen, hal ini bermakna sekitar 99,97 persen penduduk usia 7-12 tahun di Kota Batam sedang bersekolah di jenjang SD/MI, hanya sekitar 0,03 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sedang bersekolah di jenjang SD/MI. Pada tahun 2020 APS SD/MI mengalami penurunan menjadi 99,67, namun jika dibandingkan target pada 2020 sudah menunjukkan kinerja positif.

Sementara untuk jenjang SMP/MTs APS di tahun 2019 juga telah mencapai 99,97 persen, hal ini bermakna sekitar 99,97 persen penduduk usia 13-15 tahun di Kota Batam sedang bersekolah di jenjang SD/MI, dan sekitar 0,03 persen penduduk usia 13-15 tahun yang tidak sedang bersekolah di jenjang SD/MI. Selanjutnya pada tahun 2020 APS SMP/MTs menjadi 99,17.

Tabel 2. 30 Kinerja Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTS Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (%)	Target	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
		Realisasi	92,00	92,74	99,34	99,97	99,67
ii	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Target	90,52	92,91	94,00	95,60	97,00
		Realisasi	91,52	92,91	99,34	99,97	99,17

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

B. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD, dan SMP

Kinerja indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD, SD, dan SMP Kota Batam selama periode 2016-2020 secara umum menunjukkan capaian yang positif, hal ini diketahui karena realisasi indikator untuk jenjang PAUD, SD dan SMP secara umum untuk setiap tahunnya telah mencapai/melampaui target yang ditentukan, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 terhadap tahun 2019 yang dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 dalam upaya pencegahan penyebaran virus kebijakan terhadap pelaksanaan sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring.

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD periode lima tahun terakhir memiliki kinerja yang positif melebihi dari target. Pada tahun 2016 tercatat APK PAUD sebesar 73 dan APK PAUD tahun 2017 adalah 76,93. Selanjutnya meningkat terus setiap tahun menjadi 90,5 pada tahun 2020. Angka tersebut bermakna bahwa persentase penduduk di Kota Batam yang berumur 3-6 tahun yang mengikuti jenjang PAUD sebesar 90,5% pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan capaian APK PAUD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 yang tercatat 31,39 persen, maka capaian APK Kota Batam telah melebihi capaian provinsi. Nilai APK PAUD selama tiga tahun terakhir telah melebihi nilai targetnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan secara gradual. Pada tahun 2016 tercatat APK SD sebesar103,48 kemudian di tahun 2019 menjadi 104,88 dan 104,53 di tahun 2020. Angka tersebut bermakna bahwa persentase penduduk di Kota Batam yang bersekolah di tingkat SD sebesar 104,53%. Angka realisasi di atas 100 persen dapat bermakna adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau adanya pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa Kota Batam mampu menampung penduduk usia sekolah SD lebih dari target pada dua tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan capaian APK Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 yang tercatat 96,10 persen, maka capaian APK Kota Batam telah melebihi capaian provinsi. APK yang tinggi menunjukkan

tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan secara gradual. Pada tahun 2016 tercatat APK SMP sebesar 102,45 kemudian di tahun 2019 menjadi 104,86.Selanjutnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 106,04. Angka tersebut bermakna bahwa persentase penduduk di Kota Batam yang bersekolah di tingkat SMP sebesar 106,04%. Angka realisasi di atas 100 persen dapat bermakna adanya pendaftaran siswa usia dini (usia di bawah 13 tahun), pendaftaran siswa yang telat bersekolah (usia di atas 15 tahun), atau adanya pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa Kota Batam mampu menampung penduduk usia sekolah SMP lebih dari target yang sesungguhnya. Jika dibandingkan dengan capaian APK SMP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 yang tercatat 96,92 persen, maka capaian APK Kota Batam telah melebihi capaian provinsi. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Tabel 2. 31 Kinerja Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD DAN SMP Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	Target	77,60	79,26	80,91	82,27	84,22
		Realisasi	73	76,93	95,49	95,55	90,5
ii	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD (%)	Target	104,2	104,5	104,88	104,43	104,43
		Realisasi	103,48	104,22	104,62	104,88	104,53
iii	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (%)	Target	93,50	93,51	94,32	95,13	95,94
		Realisasi	102,45	105,58	105,81	104.86	106,04

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

C. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Kinerja indikator ini untuk jenjang PAUD,

SD/MI dan SMP/MTs di Kota Batam selama periode 2016-2020 secara umum menunjukkan kenaikan.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah PAUD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu memenuhi nilai yang ditargetkan. Pada tahun 2016 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah PAUD adalah 84,91. Selanjutnya, rasio ini terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2019 menjadi 91,91. Selanjutnya pada tahun 2020 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah PAUD menurun menjadi 90,76. Dalam hal ini terjadi peningkatan penduduk usia sekolah PAUD di tahun 2020 sehingga rasio mengalami penurunan.

Untuk jenjang SD pada tahun 2016 tersedia 344 gedung sekolah untuk 10.000 penduduk usia 7-12 tahun, meningkat menjadi 367 gedung sekolah di tahun 2020. Sementara untuk jenjang SMP tahun 2016 tersedia 143 gedung sekolah untuk 10.000 penduduk usia 13-15 tahun, meningkat menjadi 168 gedung sekolah di tahun 2020.

Tabel 2. 32 Kinerja Indikator Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah PAUD, SD/MI, SMP/MTS Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah PAUD	Target	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
		Realisasi	84,91	82,55	91,18	91,91	90,76
ii	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	Target	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00
		Realisasi	26,14	26,15	26,65	27,97	27,29
ii	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	Target	34,11	34,16	34,67	34,92	35,00
		Realisasi	30,05	31,76	31,75	30,47	29,35

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

D. Rasio Guru Terhadap Murid SD dan SMP

Standar rasio guru dan murid SD dan sederajat berdasarkan PP No. 74 Tahun 2008 adalah 1:21, dengan kata lain satu guru mengajar 21 murid. Berdasarkan standar tersebut pada jenjang SD, Kota Batam sudah berhasil mencapai indikator

tersebut karena sepanjang periode 5 tahun dari tahun 2016 total rasio Guru terhadap murid SD (Negeri dan Swasta) adalah 1:21. Pada tahun 2016 rasio Guru terhadap murid SD adalah 1:21, dan mengalami perbaikan menjadi 1:20 di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Namun jika dilihat secara terpisah pada tahun 2020 antara Rasio Guru dan murid di SD Negeri dan Swasta indikator tersebut tidak tercapai pada sisi SD Negeri yaitu masih diangka 1:34, sedangkan untuk SD swasta sudah melebihi standar yaitu 1:10. Sehingga secara keseluruhan rasio guru dan murid SD tahun 2020 adalah 1:20.

Sementara itu untuk jenjang SMP, pada tahun 2020 total rasio guru dan murid SMP Negeri dan Swasta tercatat 1:37 atau satu guru mengajar 37 murid. Standar rasio guru terhadap murid SMP dan sederajat berdasarkan PP No. 74 Tahun 2008 adalah 1:24, dengan kata lain satu guru mengajar 24 murid. Rasio guru dan murid di Kota Batam baik SMP Negeri dan Swasta belum memenuhi standar.

Berdasarkan data tabel 2.33 menunjukan indikasi bahwa Kota Batam masih membutuhkan tambahan guru baik pada jenjang SD dan SMP. Sehingga masih dibutuhkan formasi penerimaan CPNS maupun P3K guru SD dan SMP untuk memenuhi standar Rasio guru dan murid.

Tabel 2. 33 Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SD, SMP Tahun2016-2020

No	Indikator		2016			2017			2018			2019			2020		
			N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml
i	Rasio Guru Terhadap Murid SD	Target	1:29			1:29			1:29			1:29			1:29		
		Realisasi	1:31	1:12	1 : 21	1 : 29	1 : 11	1 : 20	1 : 30	1 : 11	1 : 20	1 : 34	1 : 10	1 : 20	1 : 34	1 : 10	1 : 20
ii	Rasio Guru Terhadap Murid SMP	Target	1:24			1:24			1:24			1:24			1:24		
		Realisasi	1 : 25	1 : 8	1 :17	1 : 25	1 : 7	1 : 17	1 : 27	1 : 9	1 : 18	1 : 31	1 : 9	1 : 18	1 : 32	1 : 10	1 : 19

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

E. Rasio Rombel dan Perpustakaan

Rombongan Belajar (Rombel) adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas. Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, pengaturan jumlah rombel adalah berdasarkan rasio jumlah peserta didik hanya berlaku untuk tingkat 1 (kelas1 SD), 7 (kelas 1 SMP) dan 10 (kelas 1 SMA). Rasio perserta didik SD maksimal adalah 1:28 yaitu 1 kelas maksimum peserta didik adalah 28 murid dan rasio peserta didik SMP adalah 1:32 yaitu 1 kelas maksimum peserta didik adalah 32 murid. Perkembangan rasio rombel tingkat SD di Kota Batam periode 2016-2021 jika untuk SD Negeri belum memenuhi standar yaitu pada 2016 rasio 1:35 dan menjadi 1:36 pada tahun 2020. Namun untuk SD Swasta sudah jauh di atas standar yaitu 1:24 pada tahun 2020. Untuk tingkat SMP Negeri juga belum dapat memenuhi standar masih 1:44 pada tahun 2020 sedangkan SMP Swasta juga sudah jauh di atas standar yaitu dengan rasio 1:27.

Jumlah perpustakaan di SD dan SMP mulai tahun 2016 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020. Untuk SD mulai dari 220 pada tahun 2016 meningkat menjadi 310 jumlah perpustakaan sekolah dengan rincian perpustakaan SD Negeri berjumlah 128 dan SD Swasta berjumlah 182. Pada jenjang SMP jumlah perpustakaan pada tahun 2016 berjumlah 105 bertambah menjadi 160 pada tahun 2020 dengan rincian 51 perpustakaan SMP Negeri dan 109 perpustakaan SMP Swasta.

Tabel 2. 34 Kinerja Indikator Rasio Rombel dan Jumlah Perpustakaan Jenjang SD dan SMP Tahun 2016-2020

No	Indikator		2016			2017			2018			2019			2020		
			N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml
i	Rasio Rombel	SD	1 :35	1 : 27	1 : 31	1 :38	1 : 26	1 : 32	1 : 36	1 : 27	1 : 31	1 : 36	1 : 23	1 : 30	1 : 36	1 : 24	1 : 30
		SMP	1 : 41	1 : 25	1 : 35	1 : 40	1 : 23	1 : 34	1 : 44	1 : 21	1 : 34	1 : 44	1 : 27	1 : 36	1 : 44	1 : 27	1 : 37
ii	Jumlah Perpustakaan	SD	126	94	220	126	94	220	126	108	234	128	108	236	128	182	310
		SMP	47	58	105	47	58	105	47	75	122	48	75	123	51	109	160

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

F. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, angka putus sekolah SD atau SMP menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD atau sebelum tamat SMP. Perkembangan angka putus sekolah di Kota Batam tahun 2016-2020 secara umum menunjukkan kondisi yang baik menuju ke 0 persen. Untuk jenjang SD angka putus sekolah di tahun 2016 sebesar 0,10 persen anak yang tidak selesai pendidikannya dijenjang SD (dengan rincian 0,021 SD Negeri dan 0,079 SD Swasta) dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 sebesar 0,023 persen (dengan rincian 0,006 SD Negeri dan 0,018 SD Swasta). Jika dilihat perbandingan angka putus sekolah SD Negeri dan Swasta, sekolah swasta memiliki nilai Angka Putus Sekolah yang lebih besar.

Untuk jenjang SMP angka putus sekolah tahun 2016 adalah 0,10 persen dan terus meningkat hingga tahun 2018 yaitu sebesar 0,206 persen anak tidak menamatkan SMP. Angka ini kemudian menurun sampai tahun 2020 menjadi 0,09 persen dengan rincian 0,018 persen SMP Negeri dan 0,072 persen dari SMP Swasta.

Angka mengulang SD terus meningkat dari tahun 2016-2020 baik jenjang SD maupun SMP. Untuk jenjang SD angka mengulang tahun 2026 dari 0,238 (dengan rincian 0,083 SD Negeri dan 0,155 SD Swasta) terus meningkat sampai tahun 2020 menjadi 0,477 persen (dengan rincian 0,080 SD Negeri dan 0,397 SD Swasta). Sedangkan untuk tingkat SMP jumlah siswa mengulang tahun 2016 dari 0,195 persen (dengan rincian 0,084 SMP Negeri dan 0,111 SMP Swasta) terus meningkat menjadi 0,292 persen (dengan rincian 0,081 SMP Negeri dan 0,211 SMP Swasta).

Tabel 2. 35 Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah Jenjang SD dan SMP Tahun 2016-2020

No	Indikator		2016			2017			2018			2019			2020		
			N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml
i	Persentase Angka Putus Sekolah	SD	0.021	0.079	0.10	0.027	0.108	0.135	0.023	0.060	0.083	0.020	0.027	0.047	0.006	0.018	0.023
		SMP	0.027	0.074	0.10	0.023	0.079	0.102	0.065	0.141	0.206	0.019	0.038	0.057	0.018	0.072	0.091
ii	Persentase Angka Mengulang	SD	0.083	0.155	0.238	0.114	0.258	0.373	0.154	0.478	0.631	0.167	0.476	0.643	0.080	0.397	0.477
		SMP	0.084	0.111	0.195	0.119	0.173	0.292	0.139	0.200	0.339	0.145	0.150	0.296	0.081	0.211	0.292

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

Dalam perspektif ke depan, angka putus sekolah perlu ditekan hingga 0 persen, sehingga seluruh anak pada jenjang SD dan SMP harus benar-benar tidak terputus dalam mengenyam pendidikannya. Sementara angka mengulang (tidak naik kelas) pun perlu ditekan hingga 0 persen, karena angka ini merepresentasikan kualitas pendidikan di Kota Batam.

G. Persentase Tingkat Kelulusan

Indikator Tingkat Kelulusan di Kota Batam untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs selama lima tahun memiliki capaian sebesar 100 persen, angka ini telah mencapai target setiap tahunnya. Kondisi demikian bermakna selama tahun 2016 hingga tahun 2020 siswa SD/MI dan SMP/MTs seluruhnya dapat lulus.

Tabel 2. 36 Kinerja Indikator Persentase Tingkat Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Persentase Tingkat Kelulusan SD/MI	Target	100	100	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	100	100
ii	Persentase Tingkat Kelulusan SMP/MTs	Target	100	100	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

H. Bangunan Sekolah SD dan SMP Kondisi Baik

Kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang kondusif.Kondisi bangunan sekolah kondisi baik pada jenjang PAUD di Kota Batam mengalami peningkatan menjadi 91,67 persen dari 90,00 persen di tahun 2016. Kondisi bangunan sekolah kondisi baik pada jenjang SD di Kota Batam mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir, di tahun 2019 tercatat 91,22 persen, kemudian meningkat menjadi 96,25 persen di tahun 2020. Sementara kondisi bangunan sekolah baik pada jenjang SMP sejak tahun 2016 konsisten mengalami tren peningkatan, semula 92,45 persen kemudian menjadi 96,66 persen di tahun 2020.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat persoalan yang mengarah pada terbatasnya anggaran dalam meningkatkan bangunan sekolah kondisi baik di Kota Batam, namun hal tersebut seyogyanya tidak menjadi masalah utama. Hal yang perlu difokuskan ke depan selain mencari sumber pembiayaan non APBD dalam membantu meningkatkan bangunan sekolah dalam kondisi baik, pemerintah Kota Batam juga perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi bangunan sekolah, sehingga umur pakai dapat sesuai dengan yang direncanakan.

Tabel 2. 37 Kinerja Indikator Bangunan Sekolah SD dan SMP Kondisi Baik Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Persentase Bangunan Kondisi Baik Sekolah Pendidikan PAUD	Target	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
		Realisasi	90,00	90,00	90,00	90,00	91,67
ii	Persentase Bangunan Kondisi Baik Sekolah Pendidikan SD	Target	92,90	93,14	93,82	93,79	95,22
		Realisasi	92,92	93,82	93,17	91,22	96,25
iii	Persentase Bangunan Kondisi Baik Sekolah Pendidikan SMP	Target	92,28	92,49	92,22	93,79	94,72
		Realisasi	92,45	92,22	93,00	91,45	96,66

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

I. Sekolah PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs Memiliki Kondisi Sarpras Baik

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kondisi sekolah memiliki sarana dan prasarana baik di Kota Batam untuk jenjang PAUD data dari Dinas Pendidikan Kota Batam juga menunjukkan peningkatan dari 71,89 persen di tahun 2016 menjadi 80,00 persen di tahun 2020. Pada jenjang SD mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016 yang hanya 53,10 persen menjadi 73 persen di tahun 2020. Kemudian untuk jenjang SMP terjadi peningkatan sejak tahun 2016 yang hanya 44,0 persen, kemudian secara bertahap naik menjadi 68,23 persen di tahun 2019 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 73 persen di tahun 2020.

Tabel 2. 38 Kinerja Indikator Sekolah PAUD, SD dan SMP Memiliki Kondisi Sarpras Baik Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Sekolah PAUD yang memiliki sarana dan prasarana baik (%)	Target	71,26	71,26	74,60	77,00	80,00
		Realisasi	71,89	72,89	74,87	78,00	80,00
ii	Sekolah Dasar memiliki kondisi sarana dan prasarana baik (%)	Target	60	60,20	64	70	72
		Realisasi	53,10	53,12	53,63	72,00	73,00
iii	Sekolah Menengah Pertama memiliki kondisi sarana dan prasarana baik (%)	Target	60,00	60,20	60,60	70	71,30
		Realisasi	44,00	44,10	44,8	68,23	73,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

J. Akreditasi Sekolah TK, SD dan SMP

Perkembangan akreditasi sekolah jenjang TK, SD dan SMP di Kota Batam selama tahun 2016 hingga 2020 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup kondusif. Untuk jenjang TK, sekolah yang terakreditasi A dari tahun 2016-2020 masih belum mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2020 persentase sekolah TK yang berakreditasi A mencapai 45 persen. Sedangkan persentase sekolah TK yang berakreditasi minimal B di tahun 2020 juga masih belum bisa mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2020 persentase sekolah TK berakreditasi minimal B telah mencapai 48,89 persen di bawah nilai target yang ditentukan yaitu 75 persen. Rendahnya persentase TK yang terakreditasi A diakibatkan oleh sarana dan prasarana TK yang belum terpenuhi dengan baik khususnya di wilayah *hinterland*.

Di tahun 2016-2020 persentase SD/SDLB yang berakreditasi minimal A selalu memenuhi target yang ditentukan. Meskipun demikian persentase SD/SDLB yang berakreditasi minimal A cenderung rendah, yang mana persentase SD/SDLB yang ada di Kota Batam berakreditasi minimal A kurang dari 50%. Namun, persentase SD/SDLB yang berakreditasi minimal B telah mencapai lebih dari 50% sejak tahun 2016. Akreditasi sekolah SD/SDLB di Kota Batam minimal A tahun 2020 adalah sebanyak 34,51 persen. Selanjutnya akreditasi sekolah SD/SDLB di Kota Batam minimal B tahun 2020 adalah sebanyak 74,7 persen.

Untuk jenjang SMP, sekolah yang terakreditasi minimal A dari tahun 2016-2019 masih belum mencapai target yang ditentukan. Pemenuhan target diperoleh pada tahun 2020. Pada tahun 2020 persentase SMP/SMPLB yang berakreditasi minimal A mencapai 44,7 persen. Sedangkan persentase SMP/SMPLB yang berakreditasi minimal B di tahun 2020 sebanyak 73,3 persen. Jumlah ini telah melampaui target yang ditentukan.

Kondisi demikian dapat bermakna adanya komitmen Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan standar pelayanan sekolah jenjang TK, SD/SDLB dan SMP/SMPLB melalui upaya akreditasi. Namun dalam perspektif kedepan perlu

adanya target yang konsisten dan upaya yang lebih optimal untuk menciptakan sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang seluruhnya teakreditasi minimal B.

Tabel 2. 39 Akreditasi Sekolah TK, SD/SDLB dan SMP/SMPLB Kota Batam Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Persentase TK Berakreditasi A	Target	16,00	20,00	35,00	45,00	60,00
		Realisasi	16,46	21,35	25	28	45
ii	Persentase TK Berakreditasi Minimal B	Target	20,00	35,00	49,00	60,00	75,00
		Realisasi	36,46	41,35	45	48	48,89
iii	Persentase SD/ SDLB Berakreditasi A	Target	16,56	19,21	21,86	24,51	27,16
		Realisasi	32,36	33	34	35	34,51
iv	Persentase SD/ SDLB Berakreditasi Minimal B	Target	37,73	43,77	49,80	55,84	61,87
		Realisasi	53,58	64,53	70	72,00	74,7
v	Persentase SMP/ SMPLB Berakreditasi A	Target	30,83	35,45	40,08	44,70	49,33
		Realisasi	40,99	42	43	44	44,70
vi	Persentase SMP/ SMPLB Berakreditasi Minimal B	Target	29,32	33,72	38,12	42,52	46,92
		Realisasi	64,59	67,36	69	71	73,3

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

K. Persentase Guru yang Mampu Mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) Nasional jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs

Persentase guru yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) nasional PAUD sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan namun belum memenuhi target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2016 tercatat 9,03 persen meningkat menjadi 9,96 persen di tahun 2020. Pencapaian ini belum mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya.

Untuk jenjang SD/SDLB persentase guru yang mencapai SKM Nasional SD/SDLB setiap tahun terus mengalami peningkan dan melampaui target perencanaan, tahun 2016 tercatat 17 persen kemudian meningkat menjadi 19,6 persen di tahun 2019 dan 21,28 persen di tahun 2020.

Sementara itu kondisi serupa terjadi di jenjang SMP/MTs, pada tahun 2016 guru yang mampu mencapai SKM Nasional sebesar 17 persen, meningkat menjadi 19,80 persen di tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 25,45 persen. Nilai ini telah melampaui target yang telah ditentukan.

Nilai kompetensi minimal yang ditargetkan pemerintah adalah 55. Dengan demikian, kondisi di Kota Batam pada tahun 2020 terdapat 90,25 persen guru PAUD, 79,40 persen guru SD dan 80,2 persen guru SMP yang tidak mencapai nilai 55. Selanjutnya pada tahun 2020 persentase guru yang belum mecapai standar kondisi minimum sebanyak 79,72 persen guru SD/SDLB, 74,55 persen guru SMP/MTs. Kondisi demikian menuntut upaya keras pemerintah Kota Batam untuk terus meningkatkan kompetensi guru di berbagai jenjang pendidikan yang ada untuk meningkatkan kualitas sumber daya di Kota Batam.

Tabel 2. 40 Kinerja Indikator Persentase Guru yang Mampu Mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) Nasional Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Persentase guru yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) Nasional PAUD	Target	9,80	10,12	11,18	11,85	12,00
		Realisasi	9,03	9,12	9,61	9,75	9,96
ii	Persentase guru yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) Nasional SD/SDLB	Target	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83
		Realisasi	17	18,49	19	19,6	21,28
iii	Persentase guru yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) Nasional SMP/MTs	Target	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08
		Realisasi	17	18,63	19,00	19,80	25,45

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

L. Kualifikasi Pendidikan dan Pendidik Tersertifikasi

Kualitas pelayanan pendidikan salah satunya ditentukan apabila para guru memiliki kompetensi. Dalam hal ini kompentensi diukur dari kualifikasi pendidik

(terkait dengan jenjang pendidikan minimal D4/S1) dan sertifikasi pendidik (terkait dengan penilaian standar nasional tenaga kependidikan).

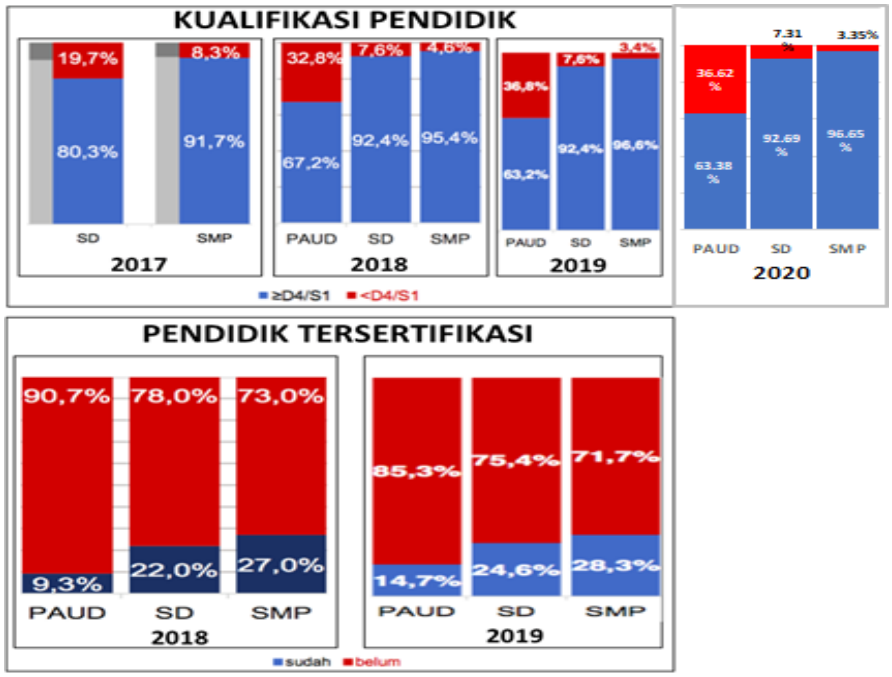

Gambar 2. 28 Kualifikasi Pendidik dan Pendidik Tersertifikasi Tahun 2017-2020
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (Ditjen GTK)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada jenjang SD guru dengan pendidikan <D4/S1 tahun 2017 sebesar 19,7 persen, kemudian menurun menjadi 7,6 persen di tahun 2018 dan di tahun 2019 tetap sebesar 7,6 persen (tidak mengalami perubahan) selanjutnya di tahun 2020 menurun kembali menjadi 7,31 persen. Untuk jenjang SMP sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 konsisten dapat dilihat adanya peningkatan kualifikasi guru. Di tahun 2017 semula tercatat 8,3% guru dengan pendidikan <D4/S1, kemudian menurun menjadi 4,6 persen di tahun 2018, dan kembali menurun menjadi 3,4 persen di tahun 2019 namun di tahun 2020 menjadi menurun kembali menjadi 3,35 persen. Hal ini menunjukkan penurunan kualifikasi guru karena jenjang guru baik PAUD, SD dan SMP <D4/S1 terus bertambah sedangkan kualifikasi guru >D4/S1 terus berkurang.

Salah satu kendala dalam meningkatkan kualifikasi guru adalah karena didominasi adanya keterbatasan finansial dari individu guru, biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam hanya untuk biaya studi sementara biaya hidup

harian (*living cost*) dibebankan pada individu guru. Dalam perspektif ke depan perlu diupayakan memfasilitasi guru untuk mendapatkan beasiswa penuh non APBD, dengan membantu peningkatan kemampuan guru untuk dapat lolos beasiswa.

Untuk guru yang tersertifikasi pada jenjang PAUD tahun 2018 adalah 9,3 persen dan yang belum tersertifikasi adalah 90,7 persen. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah guru PAUD yang tersertifikasi, yang mana jumlah guru PAUD yang tersertifikasi pada tahun 2019 adalah 14,7 persen.

Guru yang tersertifikasi pada jenjang SD di tahun 2018 sebesar 22 persen guru sudah tersertifikasi, kemudian meningkat menjadi 24,6 persen di tahun 2019. Untuk jenjang SMP di tahun 2018 sebesar 27 persen guru sudah tersertifikasi, kemudian meningkat menjadi 28,3 persen di tahun 2019. Realisasi tersebut masih sangat rendah, sehingga perlu upaya keras pada periode selanjutnya untuk terus mendorong guru mengikuti sertifikasi. Apabila standar mutu pendidik tidak tercapai, maka akan berdampak antara lain substansi kedalaman materi ajar yang tak tercapai, fasilitasi pembelajaran kurang, pembelajaran juga tak tepat sasaran, serta pendidik tak memahami karakteristik peserta didiknya.

M. Skor Indeks Parameter Mutu Pendidikan

Sebagai pembahasan terakhir indikator urusan pendidikan, disampaikan Skor Parameter Mutu Pendidikan yang dipublikasikan oleh Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud untuk Tahun 2018, indikator ini dapat merangkum pembahasan kinerja indikator-indikator sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terdapat beberapa item yang menjadi standar sistem penyelenggaraan pendidikan nasional. Beberapa standar itu meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK). Kemudian, standar sarana dan

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan.

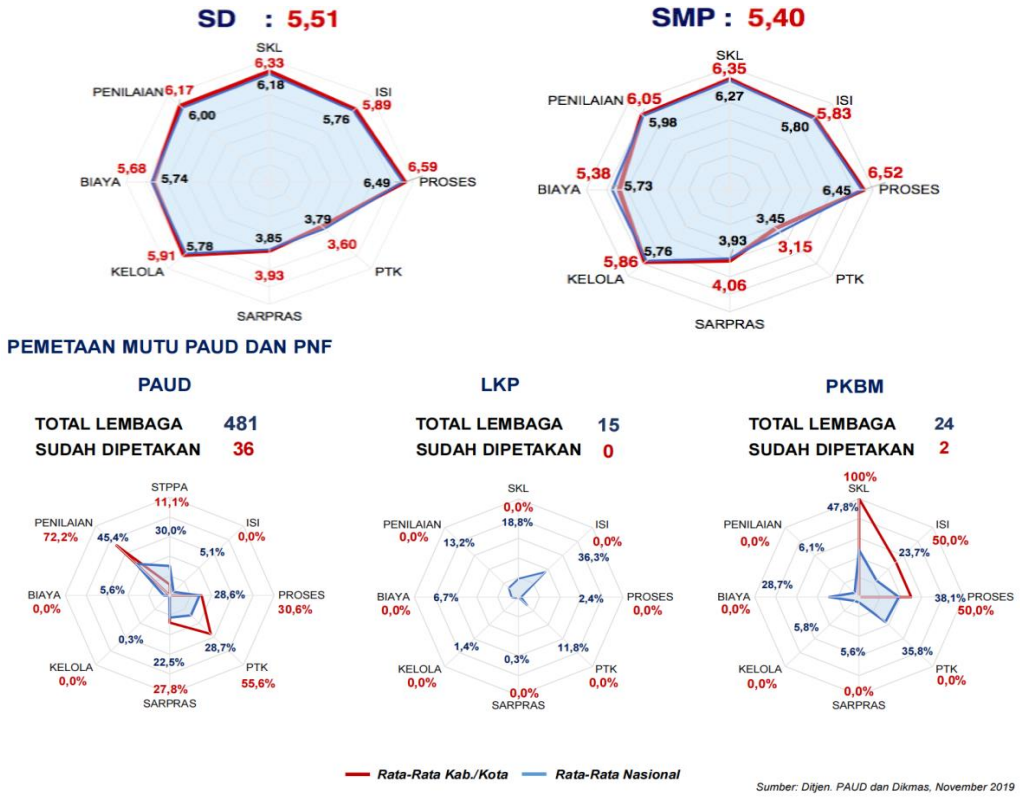

Gambar 2.29 Skor Indeks Parameter Mutu Pendidikan Tahun 2018

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (Ditjen GTK)

Jika melihat capaian Skor PMP di atas dapat diketahui bahwa pada jenjang SD permasalahan ada pada item yang memiliki nilai kecil yakni standar pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) dengan skor 3,60 dan item sarana dan prasarana dengan skor 3,93. Sementara itu pada jenjang SMP menunjukkan pola serupa, yakni item yang rendah meliputi standar pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) dengan skor 3,15 dan item sarana dan prasarana dengan skor 4,06. Hal ini relevan dengan kondisi indikator kinerja pada pembahasan sebelumnya yang benar ditemukan bahwa kualitas sarana dan prasarana masih belum sesuai, nilai akreditasi yang masih rendah, kualifikasi dan kompetensi guru yang masih kategori minim, dan seterusnya.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan (Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD dan SMP)

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan terdiri dari 1) persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD atau dikenal sebagai APM PAUD; 2) persentase anak usia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan Sekolah Dasar/sederajat atau dikenal sebagai APM SD; 3) persentase anak usia 13-15 tahun yang melaksanakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau dikenal sebagai APM SMP. Kinerja indikator Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang PAUD, SD, dan SMP Kota Batam selama periode 2016-2020 secara umum menunjukkan capaian yang positif. Untuk jenjang PAUD, indikator Angka Partisipasi Murni (APM) belum menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan khususnya bidang PAUD pada tahun 2016-2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga indikator keberhasilan bidang PAUD hanya diukur melalui capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sejak tahun 2016-2020. Khusus pada tahun 2020, mulai dihitung capaian APM PAUD dengan nilai sebesar 79,32 persen dari target 80,73 persen. Ketidaktercapaian APM PAUD ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020. Angka tersebut bermakna bahwa hanya 79,32 persen dari seluruh penduduk di Kota Batam yang berusia 3-6 tahun memasuki jenjang PAUD.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada tahun 2017 tercatat sebesar 93,03 persen, mengalami kenaikan menjadi 96 persen di tahun 2019 dan 95,65 persen di tahun 2020. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat sekitar 96 persen dari seluruh penduduk di Kota Batam yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD/Sederajat. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 yang tercatat 86,04 persen, maka capaian APM Kota Batam telah melebihi capaian provinsi.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP di Kota Batam menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan. Pada tahun 2016 tercatat APM SMP sebesar 90,25 persen,

mengalami kenaikan menjadi 92,20 persen di tahun 2019 dan menurun menjadi 90,55 persen di tahun 2020. Angka tersebut bermakna bahwa sekitar 90,55 persen dari seluruh penduduk di Kota Batam yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMP. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 yang tercatat 75,54 persen, maka capaian APM Kota Batam telah melebihi capaian provinsi.

Tabel 2. 41 Kinerja Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan PAUD Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (%)	Target	74,35	75,95	77,54	79,14	80,73
		Realisasi	-	-	-	-	79,32
ii	Angka Partisipasi Murni (APM) SD (%)	Target	91,90	92,25	92,92	93,91	94,58
		Realisasi	92,06	93,03	93,50	96,00	95,65
iii	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (%)	Target	90,00	90,75	91,50	92,25	93,00
		Realisasi	90,25	90,50	91,08	92,20	90,55

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam
catatan : data realisasi APM Paud 2016-2019 tidak diterbitkan oleh Kemendikbud

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

A. Sarana Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Secara makro pelayanan urusan kesehatan di Kota Batam dapat ditinjau dari ketersediaan sarana pelayanan kesehatan beserta tenaga medis dan tenaga penunjang medis lainnya dengan melihat rasio berdasarkan jumlah penduduk. Sarana pelayanan kesehatan rumah sakit (Pemerintah dan swasta) pada tahun 2020 berjumlah 19 RS dengan rasio jumlah rumah sakit persatuan penduduk adalah 1:59.701, artinya rata-rata 1 rumah sakit di Kota Batam melayani 59.701 penduduk, sesuai dengan standar rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah 1:100.000. Dalam hal ini dengan rasio rumah sakit 1:59701, ketersediaan rumah sakit yang ada di Kota Batam tahun 2020 sudah memenuhi dan didukung dengan ratio rumah sakit persatuan penduduk adalah 1,59:100.00 penduduk. Angka ini

bermakna bahwa setiap 100.000 penduduk akan dilayani sebanyak 1-2 rumah sakit.

Ketersediaan Puskesmas di Kota Batam setiap tahun terus bertambah, namun ketersediaan Puskesmas belum memadai, dilihat dari ratio Puskesmas persatuan penduduk, tahun 2020 jumlah Puskesmas berjumlah 21 Puskesmas dengan ratio persatuan penduduk adalah 1:56.971, dibandingkan dengan standar ratio Puskesmas persatuan penduduk adalah 1:30.000 penduduk.Artinya, jumlah Puskesmas di Kota Batam belum memenuhi standar. Dengan jumlah penduduk Kota Batam tahun 2020 (1.196.396 jiwa) diperlukan sebanyak 40 Puskesmas. Hal ini memberikan arah pada perencanaan untuk penambahan jumlah Puskesmas seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Jika dilihat dari keberadaan Puskesmas saat ini, rata-rata setiap Puskesmas di Kota Batam harus melayani sebanyak 56.971 penduduk, yang seharusnya adalah 1 Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Kelebihan beban layanan ini tentunya mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Untuk itu guna memenuhi standar ketersediaan Puskesmas di Kota Batam, perlu dilakukan penambahan Puskesmas di Kota Batam minimal sebanyak 19 Puskesmas pada masa mendatang dan akan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Untuk ketersediaan puskesmas pembantu (pustu) jika merujuk kepada standar nasional, maka kondisi idealnya satu puskesmas memiliki/dibantu 3 (tiga) sampai 5 (lima) pustu. Sementara kondisi di Kota Batam pada tahun 2019 adalah 1 (satu) puskesmas hanya dibantu oleh 2 (dua) pustu. Pada tahun 2016-2 018 jumlah Pustu berkurang karena adanya pengembangan Pustu menjadi Puskesmas dan pada tahun 2019 jumlah Pustu di Kota Batam bertambah sertapada tahun 2020 jumlah pustu di Kota Batam mencapai jumlah 63 pustu, dengan rata-rata 1 Puskesmas memiliki 2 Pustu. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ditingkatkan jumlah ketersediaan pustu di Kota Batam. Sesuai dengan standar ketersediaan Puskesmas, maka dengan merujuk pada jumlah penduduk Kota Batam sehingga diperlukan sebanyak 40 Puskesmas, dengan demikian diperlukan minimal 120

Pustu (1 Puskesmas 3 Pustu). Data ini menggambarkan bahwa untuk kedepannya perlu direncanakan pembangunan Pustu sebanyak 57 Pustu guna memenuhi standar rasio ketersediaan sarana kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Sedangkan ketersediaan puskesmas keliling (puskel) baik puskel darat maupun puskel laut di Kota Batam tahun 2020 sudah memenuhi standar dengan rasio 1,58:30.000 penduduk. Kondisi ini sudah sesuai standar nasional karena berdasarkan Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, bahwasanya setiap 1 Puskesmas minimal memiliki 1 Puskel (satu puskesmas dibantu satu puskel atau 1 : 1).

Dalam hal ketersediaan posyandu, pada tahun 2020 rasio posyandu per satuan balita tercatat 1:282 artinya satu posyandu melayani 282 balita. Standar nasional rasio posyandu per satuan balita yakni 1:100-200 (satu posyandu melayani 100 hingga 200 balita. Dari jumlah balita 150.996 balita tahun 2020, diperlukan ketersediaan Posyandu minimal 755 Posyandu, sedangkan Kota Batam Tahun 2020 baru memiliki 535 Posyandu hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan penambahan posyandu di Kota Batam sebanyak 220 Posyandu dengan perhitungan 1 Posyandu melayani 200 balita.

Ketersediaan sarana pelayanan Polindes dan Poskesdes pada tahun 2018 terdapat pengurangan Polindes, hal ini disebabkan karena Polindes yang berlokasi di Tanjung Riau berada pada row pelebaran jalan, begitu juga dengan jumlah Poskesdes pada tahun 2019 terdapat pengurangan 2 Poskesdes yang berlokasi di Tiban lama dan Taman Baloi karena dampak dari pelebaran jalan. Ketersediaan dan pertumbuhan sarana pelayanan kesehatan di Kota Batam lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 42 Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk (jiwa)	1.236.399	1.283.196	1.329.773	1.107.551	1.196.396
2	RS Pemerintah	2	3	3	3	3
	RS Swasta	13	13	15	16	16
	Jumlah	15	17	18	19	19
2.1	Rasio RS per satuan penduduk	1 : 82.427	1:62.584	1:73.876	1:61.530	1:59.701
	Rasio RS per 100.000 penduduk	1,21:100.000	1,25:100.000	1,33:100.000	1,72:100.000	1,59:100.000
3	Puskesmas	17	19	20	20	21
3.1	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:72.729	1:67.537	1:66.489	1:55.378	1:56.971
	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,41 : 30.000	0,44:30.000	0,45:30.000	0,54:30.000	0,53:30.000
4	Puskesmas Pembantu	60	59	58	61	63
4.1	Rasio Pustu per 30.000 penduduk	1.43 : 30.000	1.50 : 30.000	1.42 : 30.000	1.71 : 30.000	1.58 : 30.000
5.	Puskesmas Keliling	12 di laut & 37 di darat	12 di laut & 37 di darat	12 di laut & 37 di darat	12 di laut & 37 di darat	14 di laut & 37 di darat
5.1	Rasio Puskesmas Keliling per 30.000 penduduk	1.19 : 30.000	1.15 : 30.000	1.11 : 30.000	1.33 : 30.000	1.28 : 30.000
6	Ambulance	NA	4	5	5	9
6.1	Rasio Ambulance per 30.000 penduduk	NA	0.09 : 30.000	0.11 : 30.000	0.14 : 30.000	0.23 : 30.000
7	Posyandu	500	514	517	523	535
	Jumlah Balita (0-4 tahun)	156.252	149.517	167.964	151.003	150.996
	Rasio Posyandu per satuan balita	1 : 313	1:291	1:325	1:289	1:282
8	Polindes	29	29	28	28	28
8.1	Rasio Polindes per 30.000 penduduk	0.70 : 30.000	0.68 : 30.000	0.63 : 30.000	0.76 : 30.000	0.70 : 30.000
9	Poskesdes	16	16	16	14	14
9.1	Rasio Poskesdes per 30.000 penduduk	0.39 : 30.000	0.37 : 30.000	036 : 30.000	0.38 : 30.000	0.35 : 30.000
10	Poliklinik Pemerintah	8	8	8	8	8
	Poliklinik Swasta	151	154	159	160	165
10.1	Rasio Poliklinik per 100.000 penduduk	12.86:100.000	12.62:100.000	12.56:100.000	15.17:100.000	14.46:100.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam (diolah)

Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dalam penyediaan sarana pelayanan kesehatan di Kota Batam pada tahun mendatang. Selanjutnya

indikator kinerja pembinaan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 43 Realisasi Indikator Kinerja Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tahun 2016-2020

No	Uraian		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas yang teregistrasi	Target	17	19	20	20	21
		Realisasi	17	17	17	19	19
2	Persentase Puskesmas rawat inap	Target	79%	100%	100%	100%	100%
		Realisasi	59%	100%	100%	100%	95%
3	Jumlah Bangunan Puskesmas yang sesuai standar Permenkes	Target	2	3	4	5	6
		Realisasi	2	3	4	4	6
4	Persentase Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Target	0	29% (5 puskesmas/17 puskesmas)	53% (10 puskesmas/19 puskesmas)	75% (15 puskesmas/20 puskesmas)	90%(19 Puskesmas/ 21 puskesmas)%
		Realisasi	0	18% (3 puskesmas/17 puskesmas)	79% (15 puskesmas/19 puskesmas)	95% (19 puskesmas/20 puskesmas)	90% (19 puskesmas/ 21 puskesmas)
5	Jumlah Kebijakan PHBS yang dikeluarkan pemerintah	Target	2	2	2	2	2
		Realisasi	2	3	3	2	6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Tahun 2020, jumlah Puskesmas yang teregistrasi sebanyak 21 dan semua telah terintegrasi 100% melalui Kementerian Kesehatan RI.

Dilihat dari bangunan Puskesmas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2020 sebanyak 6 Puskesmas sudah sesuai standar dan sesuai dengan penyediaan bangunan Puskesmas sesuai dilakukan secara bertahap dengan target pada tahun 2020 sebanyak 6 Puskesmas dan dapat dilakukan 100% dari target yang sudah ditetapkan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dilakukan melalui Akreditasi FKTP termasuk Puskesmas yang dilakukan sekali 3 tahun. Di Kota Batam penilaian/survei akreditasi Puskesmas dimulai pada tahun 2017, yang dilakukan oleh tim Surveyor Akreditasi Puskesmas dari Kementerian Kesehatan RI. Tahun 2017 sebanyak 3 Puskesmas telah dilakukan penilaian oleh tim surveyor dengan hasil 3 Puskesmas sudah

terakreditasi. Tahun 2018 jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian akreditasi sebanyak 15 Puskesmas dengan hasil semua terakreditasi, pada tahun 2019 terdapat tambahan 4 Puskesmas lainnya yang dilakukan penilaian akreditasi dan dari hasil penilaian, semua Puskesmas dinilai terakreditasi. Pada tahun 2020 penilaian akreditasi tidak dapat dilakukan karena Pandemi Covid-19. Kesimpulan dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas hingga tahun 2020 terdapat 90% Puskesmas di Kota Batam sudah terakreditasi, yaitu sebanyak 19 puskesmas dari 21 puskesmas.

Upaya kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Batam dilakukan dengan berbagai upaya, terutama upaya promotif dan preventif. Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui kebijakan yang berupa himbauan bagi seluruh masyarakat, aparat serat pemerhati di bidang kesehatan. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kesehatan setiap tahun mengeluarkan minimal 2 kebijakan PHBS guna menunjang kesehatan masyarakat. Kebijakan PHBS yang telah dikeluarkan tahun 2020 antara lain:

1. Peraturan Wali Kota Batam No. 12 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
2. Peraturan Wali Kota Batam No. 49 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan;
3. Peraturan Wali Kota Batam No. 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
4. SE Wali Kota Batam No. 322 Tahun 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19;
5. SE Wali Kota Batam No. 181 tentang Tahun 2020 Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Covid
6. SE Wali Kota No. 26 tahun 2020 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Penyakit Demam Berdarah;

Untuk ketersediaan tenaga medis dan tenaga penunjang medis lainnya pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Kemenko Kesra pada tahun 2013 telah menyusun Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Target Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2014,

2019 dan 2024 melalui Keputusan Menteri Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 54 Tahun 2013. Adapun uraian kebutuhan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk tersebut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 44 Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Target Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2014, 2019 dan 2024

No	Jenis Tenaga	Tahun 2014 (per 100.000 penduduk)	Tahun 2019 (per 100.000 penduduk)	Tahun 2024 (per 100.000 penduduk)
1	Dokter Spesialis	10	11	12
2	Dokter Umum	40	45	50
3	Dokter Gigi	12	13	14
4	Perawat	158	180	200
5	Bidan	100	120	130
6	Perawat Gigi	15	18	21
7	Apoteker	9	12	15
8	Tenaga Teknis Kefarmasian	18	24	30
9	SKM	13	15	18
10	Sanitarian	15	18	20
11	Gizi	10	14	18
12	Keterapian Fisik	4	5	6
13	Keteknisian Medis	14	16	18

Sumber: Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025 (Kempen Kemenko Kesra No.54/2013)

Adapun ketersedian tenaga kesehatan di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 45 Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk Tahun 2017-2020

NO	Tahun	JUMLAH DAN RATIO TENAGA KESEHATAN														
		2017			2017			2018			2019			2020		
	Penduduk (jiwa)	1.283.196			1.283.196			1.329.773			1.107.551			1.196.396		
	Jenis Tenaga	Jumlah	Ratio	Standar Rasio	Jumlah	Ratio	Standar Rasio	Jumlah	Ratio	Standar Rasio	Jumlah	Ratio	Standar Rasio	Jumlah	Ratio	Standar Rasio
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Dokter spesialis	268	21	10	283	22	10	302	23	10	273	25	11	273	23	11
	Status	Terpenuhi			Terpenuhi			Terpenuhi			Terpenuhi			Terpenuhi		
2	Dokter umum	345	27	40	389	30	40	470	35	40	613	55	45	653	55	45
	Status	Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Terpenuhi			Terpenuhi		
3	Dokter gigi	87	7	12	96	7	12	124	9	12	127	11	13	132	11	13
	Status	Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi		
4	Perawat	1779	139	158	1785	139	158	1862	140	158	1989	180	180	2093	175	180
	Status	Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi		
5	Bidan	687	54	100	710	55	100	878	66	100	916	83	120	1049	88	120
	Status	Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi		
6	Perawat gigi	36	3	15	41	3	15	60	5	15	82	7	18	94	8	18
	Status	Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi		
7	Apoteker	126	10	9	139	11	9	145	11	9	206	19	12	279	23	12
	Status	Terpenuhi			Terpenuhi			Terpenuhi			Terpenuhi			Terpenuhi		
8	Teknisi Kefarmasian	228	18	18	231	18	18	242	18	18	251	23	24	256	21	24
	Status	Belum Terpenuhi			Terpenuhi			Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi		
9	Tenaga Kesmas	63	5	13	68	5	13	61	5	13	66	6	15	64	5	15
	Status	Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi		
10	Sanitarian	74	6	15	80	6	15	75	6	15	82	7	18	73	6	18
	Status	Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi		
11	Nutrisionis	63	5	10	70	5	10	77	6	10	81	7	14	79	7	14
	Status	Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi		
12	Keterapian fisik	28	2	4	3	0	4	3	0	4	3	0	5	3	0	5
	Status	Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi		
13	Keteknisian Medis	79	6	14	85	7	14	78	6	14	72	7	16	69	6	16
	Status	Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi			Belum Terpenuhi		

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam dan BPPSDM Kemenkes untuk Tahun 2019 (diolah).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya tenaga kesehatan belum memenuhi standar rasio ketenagaan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 jenis tenaga kesehatan yang sudah memenuhi standar rasio adalah tenaga dokter spesialis, dokter umum dan apoteker.Jumlah dokter gigi dan perawat gigi pada tahun 2020 masih belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam perspektif pemenuhan terhadap hak asasi manusia (HAM) pada aspek kesehatan, telah ditetapkan target rasio tenaga medis dan perawat dalam melayani masyarakat di tingkat Kab/Kota yang tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Dari empat indikator bidang kesehatan terkait tenaga kesehatan, tiga indikator yakni rasio tenaga dokter per penduduk,rasio dokter spesialis per penduduk dan rasio perawat per penduduk pada tahun 2020 sudah tercapai dan capaiannya masuk dalam kriteria tertinggi sesuai Permenkumham tersebut, sementara rasio rasio bidan terhadap penduduk masuk kategori sedang sehingga belum mencapai target pemenuhan HAM aspek kesehatan. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 46 Target Rasio Tenaga Kesehatan dalam Pemenuhan HAM Aspek Kesehatan Tahun 2020

No	Indikator Rasio Tenaga Kesehatan (per satuan penduduk)	Target Dalam Pemenuhan HAM Aspek Kesehatan	Capaian Kota Batam Tahun 2020	Status Terhadap Target HAM
1	Rasio Tenaga Dokter	1:2.500	1:1.131	Terpenuhi
2	Rasio Tenaga Dokter Spesialis	1:16.000	1:4.382	Terpenuhi
3	Rasio Bidan	1:1.000	1:1.140	Belum Terpenuhi
4	Rasio Perawat	1:855	1:572	Terpenuhi

Sumber: Permenkumham No.34/2016

B. Situasi Derajat Kesehatan

1. Angka Kesakitan (Morbiditas)

Angka kesakitan merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat, yang menggambarkan kerentanan masyarakat terhadap penyakit. Angka kesakitan dapat digambarkan dengan jumlah kunjungan masyarakat yang berobat ke sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta, pada tingkat pelayanan dasar maupun lanjutan dengan masalah kesehatan yang dapat dilihat dari 10 penyakit terbanyak.

Secara umum angka kesakitan dapat dilihat pada sepuluh penyakit terbesar dari kunjungan pasien yang mendapat pengobatan/perawatan dapat dilihat pola penyakit yang ada di suatu wilayah. Dengan mengetahui pola penyakit dapat menjadi acuan dalam perencanaan kesehatan, seperti penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan obat-obatan, tenaga kesehatan dan strategi program kesehatan dan lainnya. Berdasarkan laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) se-Kota Batam sepanjang tahun 2016-2020 dari 10 penyakit terbesar tercermin pola penyakit masyarakat Kota Batam seperti pada gambar berikut ini.

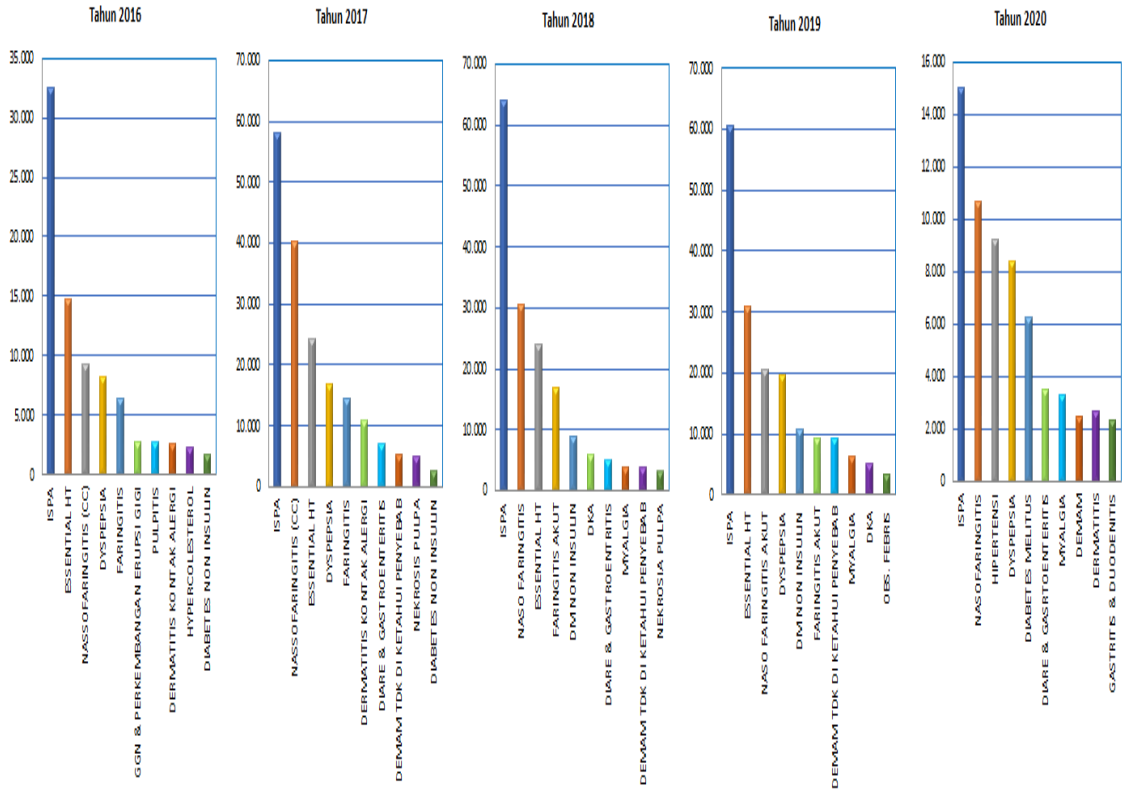

Gambar 2. 30 Distribusi Sepuluh Penyakit Terbesar Kunjungan Pasien Puskesmas Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Gambar di atas menggambarkan bahwa Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) menjadi penyakit yang paling banyak menyerang penduduk Kota Batam pada 5

tahun terakhir dengan jumlah kasus ISPA tertinggi pada tahun 2018 dengan jumlah kasus mencapai 63.929.

2. HIV/AIDS

HIV/AIDS disebabkan oleh virus *Acquired Immunode Deficiency Syndroma* (AIDS) yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyakit HIV/AIDS menduduki prioritas utama dalam 6 penyakit menular berbahaya yang menjadi prioritas utama dalam pengendalian penyakit dalam program kerja Pemerintah pada periode 2015-2020. Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk: 1) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; dan 3) Menurunkan stigma dan diskriminasi.

Penyakit HIV/AIDS seperti fenomena gunung es, yang terlihat hanyalah puncak yang muncul di permukaan tanpa diketahui seberapa besar kasus yang sebenarnya terjadi. Untuk itu surveilans HIV/AIDS memerlukan kerjasama berbagai sektor dan masyarakat.

Pemerintah Kota Batam terus berupaya melakukan penguatan dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dengan melibatkan sektor terkait, LSM dan masyarakat untuk menurunkan penyebaran HIV/AIDS baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pada 5 tahun terakhir dengan segala upaya dapat menurunkan penyebaran HIV/AIDS dengan hasil sebagai berikut;

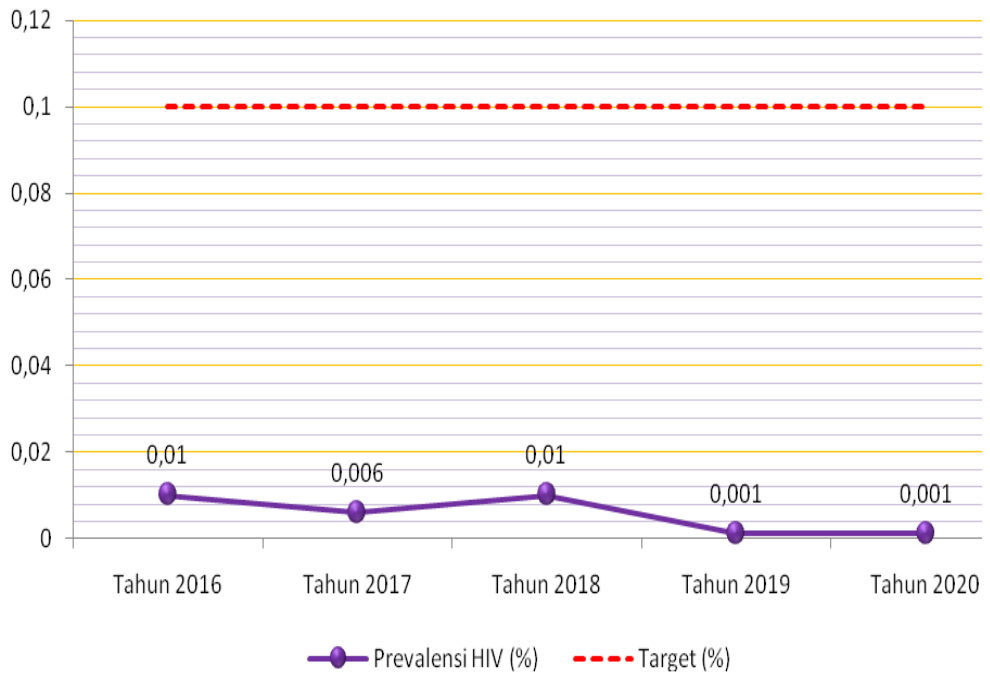

Gambar 2. 31 Prevalensi HIV di Kota Batam Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, selain menurunkan kasus baru, juga bertujuan untuk mencegah kematian akibat HIV, upaya yang dilakukan adalah memberikan obat bagi penderita HIV dan melakukan pemantauan. Pada 5 tahun terakhir, upaya pengobatan yang dilakukan cukup berhasil, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan, hal ini terjadi karena adanya pembatasan ruang gerak aktifitas masyarakat pada masa pandemic Covid-19, sehingga keterbatasan penderita maupun petugas mempengaruhi cakupan pengobatan HIV, adapun gambaran pengobatan penderita HIV dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

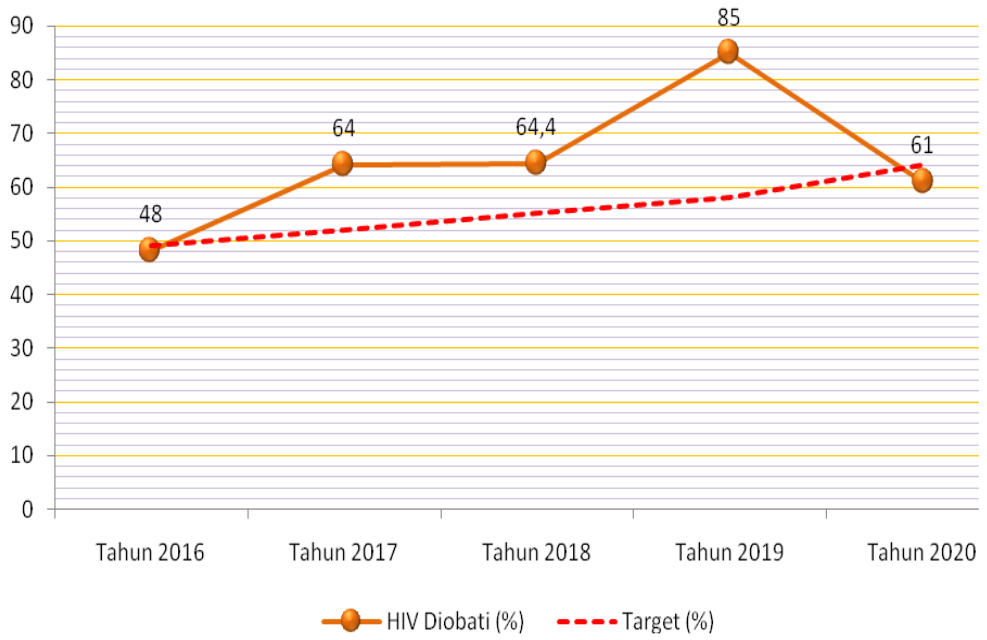

Gambar 2. 32 Persentase Pengobatan Pada Penderita HIV di Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Penularan virus HIV/AIDS tidak semudah virus lainnya, karena penularan hanya melalui hubungan seksual tanpa pelindung dan penggunaan jarum suntik yang tidak aman atau terkontaminasi cairan/darah dari penderita HIV/AIDS. Pada umumnya penyakit ini menyerang kelompok berisiko yang disebut populasi kunci, yakni wanita tuna susila (WTS), pengguna narkotika suntik, lelaki suka lelaki (LSL), remaja, pria berisiko (pelanggan/klien), pasangan pelanggan, waria, warga binaan pemasyarakatan dan ibu hamil berisiko. Namun demikian HIV dapat menyerang semua kelompok umur, berikut sajian kasus HIV berdasarkan kelompok umur tahun 2016-2020.

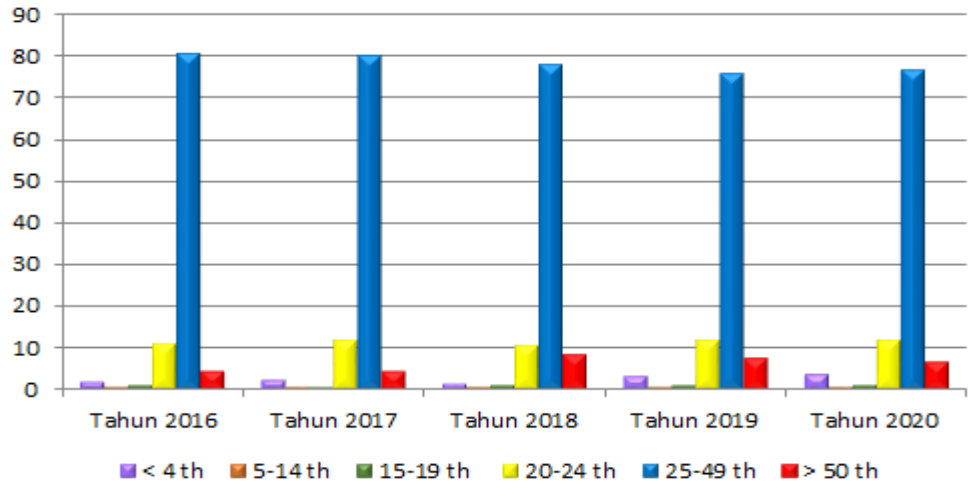

Gambar 2. 33 Distribusi Proporsi Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Dari gambaran di atas, perkembangan penyakit HIV/AIDS saat ini telah menyerang semua kelompok umur, jika dilihat gambar di atas kasus HIV banyak terjadi pada usia reproduktif dan bahkan telah menyerang anak di bawah usia lima tahun.

Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia pada umumnya berada pada tingkat II yaitu kasus masih terkonsentrasi pada kelompok berisiko (*concentrade level of epidemic*), walaupun pada beberapa daerah seperti Papua mulai menunjukkan kecenderungan menular ke populasi umum (*generalized level of epidemic*). Di Kota Batam penyebaran HIV/AIDS mulai menunjukkan kecenderungan penularan ke populasi umum. Hal ini didukung dengan adanya kasus HIV/AIDs pada anak di bawah lima tahun

AIDS adalah kelanjutan dari HIV yang ditandai dengan jumlah CD 4 < 500 dan atau penderita HIV yang disertai penyakit infeksi sekunder. Pada kondisi seseorang dinyatakan menderita AIDS, lebih mudah diserang penyakit infeksi lainnya yang jika tidak ditangani dengan baik akan mempercepat kematian akibat HIV/AIDS.

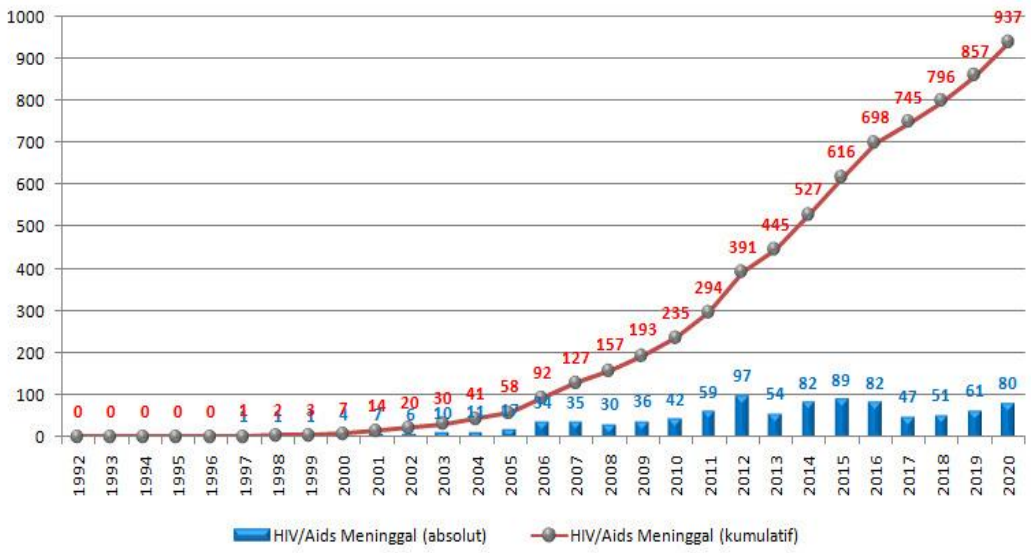

Gambar 2. 34 Distribusi Jumlah Kematian AIDS dan CFR AIDS 2010-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Gambaran di atas memberikan isyarat kepada kita semua untuk meningkatkan kepedulian dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit HIV/AIDS yang membutuhkan perhatian dan kerjasama semua pihak, terutama di Kota Batam menduduki 5 Kota terbesar kasus HIV/AIDS di Indonesia. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 jumlah kematian kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah kematian kasus HIV/AIDS sebanyak 80 orang.

3. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah *Dengeu* yang dikenal dengan DBD merupakan penyakit yang sudah endemis hampir diseluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Batam. Angka kesakitan Demam Berdarah *Dengeu* atau *Incident Rate* DBD adalah jumlah penderita DBD dengan level kasus konfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium per 100.000 penduduk dalam kurun waktu 1 tahun. Pada lima tahun terakhir di Kota Batam, kejadian penyakit DBD setiap tahunnya berfluktuasi seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

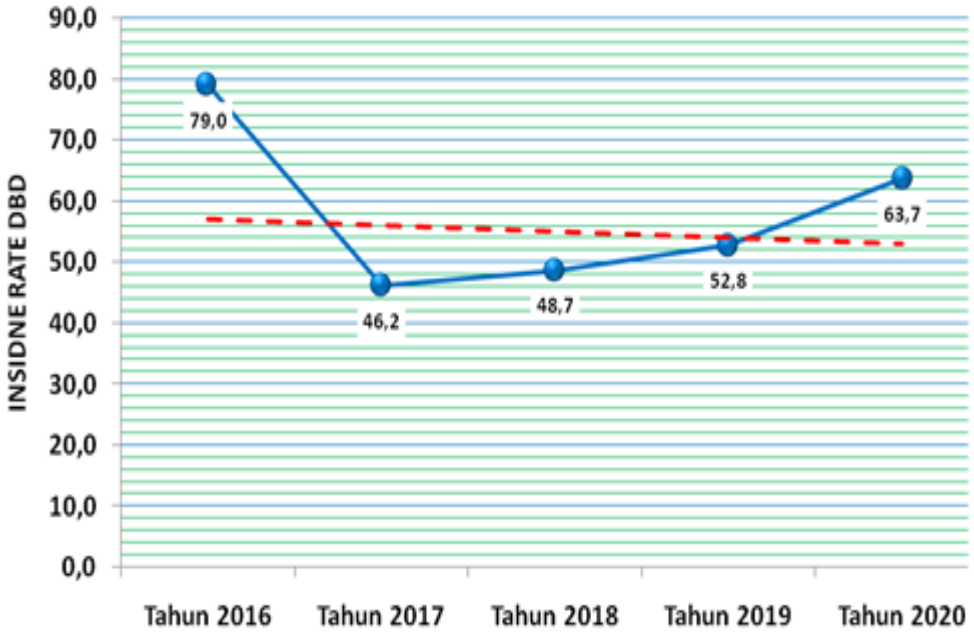

Gambar 2. 35 *Incident Rate* DBD Kota Batam Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Dilihat dari *Incident Rate* (IR) DBD pada tahun 2017 terjadi penurunan yang sangat bermakna, namun pada tahun 2020 IR DBD 63.7 per 100.000 penduduk, dengan posisi melewati batas target Kementerian Kesehatan RI (53/100.00 penduduk). Sebagaimana diketahui Penyakit DBD adalah salah satu penyakit berbasis lingkungan dan dipengaruhi oleh musim. Nyamuk *Aedes agypty* dan A*edes albopoictus* merupakan vektor penularan virus *dengue* yang dapat hidup dan berkembang biak dengan ketinggian <1000 meter di atas permukaan laut serta dipengaruhi oleh musim dan hidup pada air bersih seperti pada genangan air pada wadah yang bukan tanah.

Hasil surveilans kasus DBD, peningkatan kasus terjadi berdasarkan waktu perlu dipedomani dalam pencegahan dan pengendalian DBD dengan meningkatkan kewaspadaan dengan terutama masalah lingkungan dengan melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) seperti menguras, mengubur, menutup dan ditambah dengan memantau perindukan nyamuk *aedes* plus mencegah gigitan nyamuk. Peningkatan Insiden Rate DBD tahun 2020, dapat terjadi karena kurang optimalnya kegiatan PSN yang biasanya dilakukan secara bersama di masyarakat, karena pandemi Covid-19 yang membatasi aktifitas bersama

sehingga kegiatan PSN kurang maksimal yang berakibat pada peningkatan populasi nyamuk sehingga kasus DBD pun meningkat. Menghadapi tantangan ini diperlukan strategi penguatan PSN berbasis rumah tangga, yang mana setiap rumah melakukan secara mandiri dan berkala untuk memantau media perindukan nyamuk aedes minimal seminggu sekali dan secara rutin melakukan 3M Plus.

Dilihat dari mortalitas DBD pada 5 tahun terakhir terjadi penurunan, mulai tahun 2018 hingga 2019 terjadi penurunan yang cukup tajam namun meningkat di tahun 2020 terjadi peningkatan namun masih berada pada target yang telah ditetapkan (CFR DBD ≤ 1%). Pada tahun 2020 jumlah penderita DBD adalah sebanyak 763 orang maka *incident rate* adalah 63,9 meningkat dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan laporan *surveilans* jumlah kematian akibat DBD berjumlah 4 (satu) orang dari 763 kasus. Dengan demikian CFR penyakit DBD tahun 2020 adalah 0,52%.

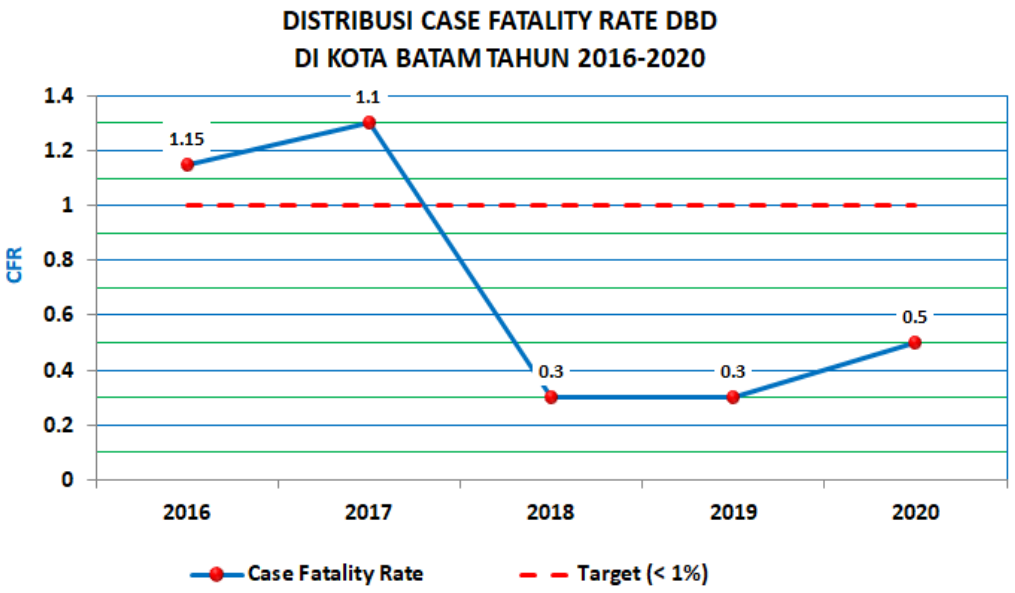

Gambar 2. 36 *Case Fatality* Rate (Dalam Persen) DBD Kota Batam
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Melihat kejadian kasus DBD setiap bulannya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terdapat perbedaan pola musim penularan. Di era pemanasan

global, faktor musim sulit untuk dipedomani, jika diamati grafik di atas terlihat puncak puncak kasus setiap bulan nya cenderung berada pada bulan Oktober dan November dan pada tahun 2016 puncak kasus tertinggi pada 5 tahun terakhir terjadi pada bulan Januari sampai dengan maret 2016. Informasi ini dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan kewaspadaan dini dengan komitmen berbagai pihak untuk menjaga lingkungan yang bebas dari perindukan nyamuk serta umpan balik kegiatan surveilens penyakit DBD melalui rangkaian kegiatan penyelidikan epidemiologi dapat menurunkan kejadian penyakit DBD pada masa mendatang.

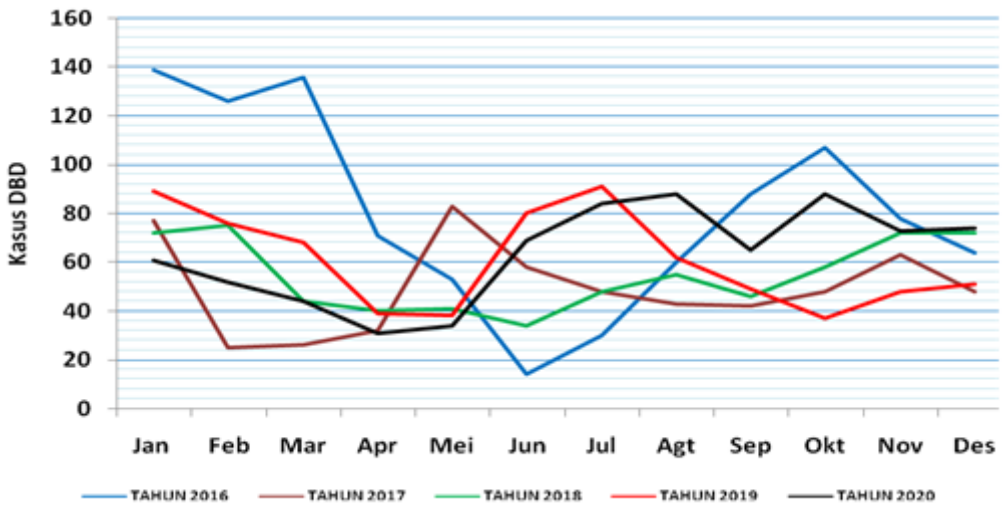

Gambar 2. 37 Pola Kejadian DBD Per Bulan di Kota Batam Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

4. Filariasis

Penyakit filariasis disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk sebagai vektor yang menyerang saluran kelenjar getah bening dengan manifestasi pembengkakan pada tangan, kaki, *glandulla mammae*, serta *scrotum* sehingga menimbulkan kecacatan seumur hidup/permanen bagi penderitanya.

Sejarah penyakit filariasis di Kota Batam ditemui awalnya pada tahun 2002 di Kecamatan Galang dan tahun 2008 ditemukan 1 kasus baru di Kecamatan Bulang. Sejak tahun 2012 telah dilakukan pemberian obat pencegahan secara massal di Kota Batam.

Sejak tahun 2017 hingga 2020 tidak ditemukan kasus baru filarisasi di Kota Batam. Kasus yang ada saat ini merupakan kasus lama yang berjumlah 9 orang dengan angka kesakitan filariasis 0,75 per 100.000 penduduk. Sejak tahun 2012 telah dilakukan pemberian obat pencegahan secara massal di Kota Batam, adapun target angka kesakitan filarisis tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah kurang dari 1%. Dengan tidak ditemukannya kasus baru filariasia pada 4 tahun terakhir dengan demikian program pencegahan dan pengendalian penyakit filarisis di Kota Batam dapat dikategorikan berhasil. Meskipun demikian kegiatan surveilens terhadap penyakit filariasis tetap dilakukan sebagai upaya mawas diri.

5. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global sehingga menjadi salah satu program prioritas dalam tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan (*SDGs*) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang *SDGs*. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis*. Penularan TB dapat terjadi jika pasien TB batuk atau bersin, dapat menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak (*droplet nuclei*/percik renik). Infeksi akan terjadi apabila seseorang menghirup udara yang mengandung percikan dahak yang infeksius. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak yang mengandung kuman sebanyak 0-3500 M.Tuberculosis. Sedangkan kalau bersin dapat mengeluarkan sebanyak 4500-1.000.000 *M.Tuberculosis*.

Berdasarkan hasil laporan global TB tahun 2020 lalu, Indonesia termasuk dalam 3 negara dengan beban tuberkulosis (TBC) terbesar di dunia dan kematian akibat TB diperkirakan 98.000 orang meninggal karena TB setiap tahunnya. Hal ini mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program TB Paru.

Pada kawasan pulau Sumatera termasuk Kota Batam diperkirakan prevalensi TB berkisar 160 per 100.000 penduduk. Dalam hal pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC sesuai standar menjadi salah menjadi salah satu indikator target SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 4 tahun 2019. Di Kota Batam semua kasus TB mendapat pengobatan, dengan demikian CNRTB menunjukkan prevalensi TB di Kota Batam.

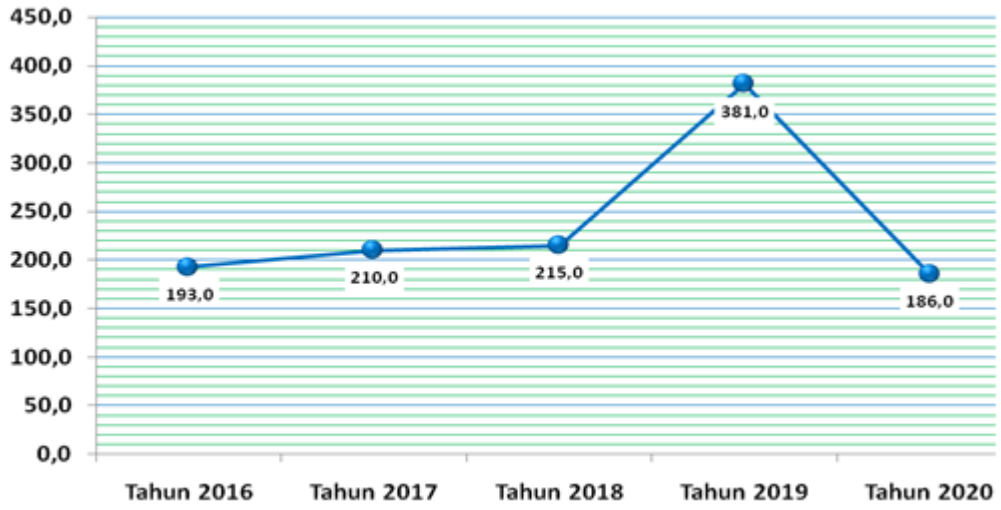

Gambar 2. 38 Case Notification Rate (CNR) di Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Case Notification Rate (CNR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu yang apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan (trend) meningkat atau menurunnya penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah. Di Kota Batam semua kasus TB mendapat pengobatan, dengan demikian CNR TB menunjukkan prevalensi TB di Kota Batam.

Gambar di atas menunjukkan angka notifikasi semua kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kota Batam dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan CNR dan tentunya terjadi peningkatan temuan kasus TB, hal ini merupakan hasil penguatan surveilans TB di Kota Batam, yang mana upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan semua fasilitas kesehatan rujukan dalam

menangani kasus TB. Namun pada tahun 2020 CNR TB menurun hingga mencapai 221 per 100.000 penduduk. Yang artinya dalam setiap 100.000 pendudukter dapat sekitar 221 orang penderita TB. Penurunan ini sejalan dengan keberhasilan dalam pengobatan TB (*Success Rate*/SR) TB, seperti keterangan berikut ini.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian pengobatan tuberkulosis dapat dilihat dari angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*). Angka keberhasilan pengobatan merupakan jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus yang menggambarkan kualitas pengobatan tuberkulosis.

Adapun gambaran keberhasilan pengobatan Tuberkulosis di Kota Batam dapat dilihat pada gambar berikut.

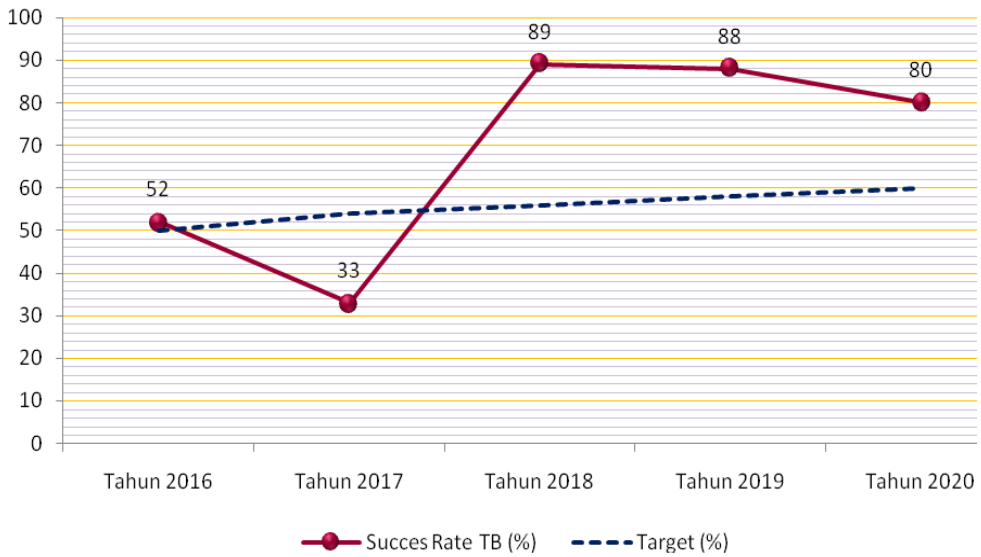

Gambar 2. 39 Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Succes Rate (SR) TB di Kota Batam sejak tahun 2018, membuahkan hasil dengan SR 89%, namun pada 2 tahun berikutnya menurun, akan tetapi angka ini masih

dalam pemenuhan target. Upaya untuk keberhasilan pengobatan Tuberkulosis harus diperkuat dengan melibatkan lintas sektor dan menjalin kemitraan. Dan capaian indikator program pencegahan dan pengendalian TB akan menjadi bagian dari dampak pandemi Covid-19. Untuk itu perlu membangun strategi yang terintegrasi dengan penanganan Covid-19, agar upaya dalam skrining kasus TB juga semakin kuat.

6. Tekanan Darah Tinggi/Hipertensi

Tekanan Darah Tinggi adalah peningkatan tekanan darah aterial secara menetap > 140/90 mmhg. Faktor risiko terjadinya darah tinggi menjadi dua yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah antara lain umur, jenis kelamin dan faktor genetik, faktor risiko yang dapat dirubah seperti merokok, diet rendah serat, konsumsi alkohol dan stress. Penyakit tekanan darah tinggi dapat dicegah dengan Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) yaitu dengan perilaku CERDIK (C=Cek kesehatan secara berkala, E=Enyahkan asap rokok, R=Rajin aktifitas fisik, D=Diet sehat dengan kalori seimbang, kelola stress. Perilaku CERDIK ini dapat diterapkan melalui kegiatan Posbindu PTM. Kasus hipertensi memerlukan pelayanan kesehatan secara rutin minimal 1 kali dalam sebulan, agar kasus hipertensi terkontrol.

Hipertensi bisa saja terjadi pada penduduk usia ≥ 18 tahun, berdasarkan laporan fasilitas pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 yang merupakan salah satu bentuk surveilans pasif penyakit hipertensi didapatkan hasil sebagai berikut.

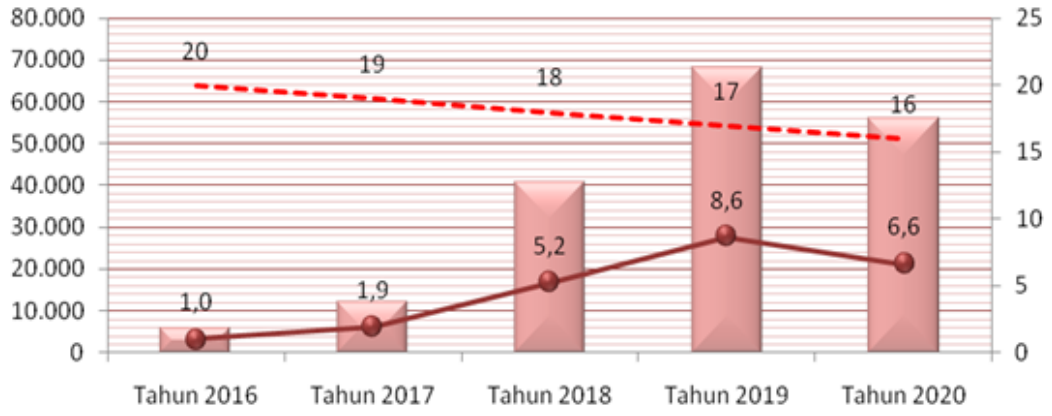

Gambar 2. 40 Temuan Kasus Hipertensi Tekanan Darah Tinggi Di Fasilitas Kesehatan Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Jika dilihat dari prevalensi tekanan darah tinggi penduduk Kota Batam terus mengalami penurunan, dan penemuan kasus terus pada 4 tahun pertama hingga tahun 2019. Pada tahun 2020 penemuan kasus hipertensi menurun, hal ini terjadi karena salah satu dampak dari pandemi Covid-19, yang membatasi ruang gerak/aktifitas keluar rumah. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Kesehatan Kota Batam dalam upaya pengendalian dan penangganan kasus hipertensi pada masa pandemi saat. Menyikapi masalah ini diperlukan strategi baru berupa *telemedicine* dengan membuka layanan online antara masyarakat dengan fasilitas kesehatan sehingga penderita hipertensi tetap terkontrol.

7. Obesitas

Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi (*energy intake*) dengan energi yang digunakan (*energy expenditure*). Kejadian obesitas di Kota Batam semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hasil penemuan kasus obesitas berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat gambar berikut ini.

Gambar 2. 41 Kejadian Obesitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Untuk menentukan seseorang mengalami obesitas dilakukan pemeriksaan berat badan, dengan menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT). Kejadian obesitas ini didapatkan dari hasil surveilans penyakit tidak menular yang melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan serta kegiatan pelayanan Posbindu yang ada di Kota Batam. Tahun 2020 terjadi penurunan penemuan obesitas, karena tidak maksimalnya pelayanan terutama pada kegiatan Posbindu karena pandemi Covid-19.

C. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan sebanyak 3 peraturan SPM tentang kesehatan selama periode 2016-2020, sebagaimana uraian berikut:

Tabel 2. 47 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2016 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
		%	%
I	**PELAYANAN KESEHATAN DASAR**		
1	Cakupan Kunjungan bumil K4	95	88
2	Komplikasi Kebidanan yang ditangani	80	69,4
3	Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	90	96

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
		%	%
4	Cakupan Pelayanan NiFas	90	88,3
5	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang dilayani	80	100
6	Cakupan Kunjungan Bayi	90	92,9
7	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	100	98,4
8	Cakupan Pelayanan anak Balita	90	26
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	100
10	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	100	100
11	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100
12	Cakupan peserta KB aktif	70	78
13	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit		
a	*Acute Flacid Paralysis (AFP) rate* per 100.000 penduduk < 15 tahun	100	100
b	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100	100
c	Penemuan Pasien baru TB BTA Positif	100	67,3
d	Penderita DBD yang ditangani	100	100
e	Penemuan Penderita Diare	100	100
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	100	100
15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin	100	100
16	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di kab/kota	100	100
II	**PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB**		
17	Cakupan Desa KLB/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100
III	**PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**		
18	Cakupan Desa Siaga Aktif	80	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Tabel 2. 48 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2017-2018 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2016

NO	INDIKATOR	2017		2018	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
		%	%	%	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	92,44	100	93,14
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	94,28	100	93,23
3	Pelayanan Bayi Baru Lahir	100	84,52	100	88,63
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	51,32	100	80,53
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (kelas 1 dan kelas 7)	100	94,33	100	95,86
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15 s.d. 59 tahun)	100	4,91	100	39,07
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut (lebih dari 60 tahun)	100	30,42	100	56,45
8	Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi (lebih dari 15 tahun)	100	7,32	100	26,77
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100	6,57	100	27,93
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	100	87,78	100	61,45
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	16,44	100	32,65

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Tabel 2. 49 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Batam Tahun 2019-2020 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019

NO	URAIAN	2019		2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
		%	%	%	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	93,18	100	89,72
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	92,48	100	91,02
3	Pelayanan Bayi Baru Lahir	100	91,09	100	88,21
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	77,32	100	58,91
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (usia 7 s.d. 15 tahun)	100	44,33	100	42,97
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15 s.d. 59 tahun)	100	63,68	100	38,74

NO	URAIAN	2019		2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
		%	%	%	%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut (lebih dari 60 tahun)	100	79,52	100	26,4
8	Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi (lebih dari 15 tahun)	100	46,29	100	34,9
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100	100	100	73,55
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	75,36	100	68,62
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga TB	100	41,15	100	26,66
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	47,48	100	60,97

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Berdasarkan Tiga (3) tabel di atas dengan indikator yang berbeda, terlihat bahwa capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Batam cenderung meningkat, namun pada tahun 2020 pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal cenderung menurun akibat dampak pandemi Covid-19 dimana akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terbatas.

D. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kesehatan Kota Batam (*SDGs*)

Sustainable Development Goals (*SDGs*) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. *SDGs* berisi 17 Tujuan dan 169 target yang dapat dicapai pada tahun 2030. Adapun capaian indikator *SDGs* bidang Kesehatan Kota Batam Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 50 Capaian SDGs Urusan Kesehatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2016-2020

NO	Indikator	Target & Realisasi	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Target	-	70	75	80	85
		Realisasi	60	84,22	96,3	93,86	90,97
2	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Target	90	91,5	92	92,5	93
		Realisasi	91	90,55	91,7	93,48	81,7
3	Persentase (prevalensi) kekurangan gizi (under weight) pada anak Balita	Target	-	4,8	4,7	4,6	4,5
		Realisasi	-	2,5	2,21	1,29	5,04
4	Persentase (prevalensi) pendek dan sangat pendek (*stunting*) pada anak Baduta	Target	-	9,05	9	8,7	8,5
		Realisasi	-	1,63	1,35	2,98	7,21
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)	Target	163	156	152	149	145
		Realisasi	97	108	89	82,72	65,41
6	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)	Target	21	20	19	18	17
		Realisasi	4,1	5,7	5,1	4,17	3,85
7	Prevalensi HIV pada penduduk	Target	< 1	< 0,1	< 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
		Realisasi	< 0,1	0,006	0,01	0,001	0,001
8	Presentase HIV yang diobati	Target	-	52	55	58	61
		Realisasi	49	64	64,4	85	64
9	Angka keberhasilan pengobatan Tb (*succes rate*)	Target	52	54	56	58	60
		Realisasi	70	86,20	89	88	80
10	Prevalensi merokok pada penduduk usia < 18 tahun	Target	-	9	8	7	6
		Realisasi	-	-	-	-	0,70.
11	Prevalensi tekanan darah tinggi	Target	-	19	18	17	16
		Realisasi	20	-	19,7	-	9,4
12	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	Target	-	25	20	15	12
		Realisasi	30	-	-	-	5,4
13	Persentase Ketersediaan obat dan Alkes di pelayanan kesehatan dasar	Target	100	85	90	90	90
		Realisasi	85	90	93,83	94	92,98

Sumber : Dinas KesehatanKota Batam

E. Situasi Upaya Kesehatan

1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

Pada sebagian ibu hamil, karena beberapa faktor seperti umur, paritas, jarak kehamilan yang terlalu dekat, faktor gizi, faktor penyakit dan lainnya, sehingga kehamilannya menjadi berisiko tinggi bagi ibu dan janin dalam kandungannya, jika tidak ditangani dengan baik dan tepat akan berakibat fatal baik bagi ibu dan janinnya.

Upaya yang dilakukan salah satunya adalah meningkatkan cakupan kunjungan ibu hamil yang merupakan langkah awal untuk menurunkan angka kematian ibu melalui penjaringan ibu hamil dengan risiko tinggi. Dengan harapan jika ditemui ibu hamil risiko tinggi dapat ditangani secara dini sehingga ibu dapat menjalani proses kehamilan, persalinan dan nifas dengan aman dan membawa keselamatan ibu dan pada bayinya dan dapat mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Kunjungan ibu hamil adalah kunjungan ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan *Ante Natal Care* (ANC) sesuai standar mencakup 10 T, yakni 1). Timbang berat badan & ukur tinggi badan, 2). Tekanan darah, 3). Nilai status gizi (ukur Lila), 4. Ukur tinggi fundus uteri, 5). Tentukan presentasi janin dan DJJ, 6). Skrining status imunisasi Tetanus toxoid dan berikan imunisasi TT bila diperlukan, Tinggi fundus, 7). Pemberian tablet FE minimal 90 tablet selama kehamilan, 8). Tes laboratorium (rutin dan khusus), 9). Tata laksana kasus dan 10). Temu wicara (konseling) termasuk P4K serta KB pasca salin. Pada tahun 2020 cakupan kunjungan ibu hamil berdasarkan wilayah kerja puskesmas, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

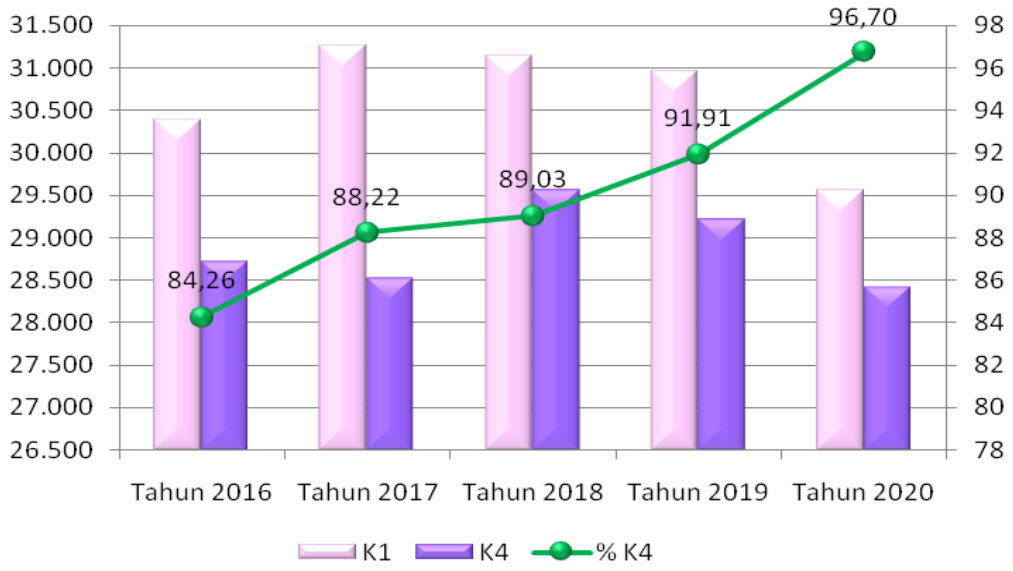

Gambar 2. 42 Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil di Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Indikator ketersediaan sarana dan prasarana serta keterjangkauan pelayanan kesehatan ibu hamil atau *Ante Natal Care* (ANC) dilihat dari cakupan K1 yaitu kunjungan ibu pertama kali pada kehamilan trisemester I dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Untuk indikator keberhasilan program dilihat dari cakupan kunjungan K4, yakni kunjungan ibu hamil yang mendapat pelayanan ANC sesuai standar, minimal 4 kali dengan ketentuan minimal pada trisemester pertama 1 kali, trisemester kedua 1 kali dan trisemester ketiga 2 kali. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kota Batam tahun 2020 telah mencapai 96,7%.

2. Cakupan Pertolongan Persalinan dengan Nakes Berkompetensi Kebidanan

Persalinan merupakan proses alami yang membutuhkan tenaga kesehatan kompeten yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar yang merupakan indikator SPM bidang kesehatan sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dengan target 100% ibu melahirkan dengan tenaga kesehatan.

Salah satu indikator proses yang penting dalam program *safe motherhood* (perlindungan terhadap ibu) adalah memperhatikan seberapa banyak persalinan yang dapat ditangani oleh tenaga kesehatan. Persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Batam walaupun menunjukkan kenaikan yang signifikan, namun jangkauannya masih rendah dan akibat dari masih adanya persalinan yang ditolong oleh tenaga non kesehatan menjadi pemicu terjadinya kematian ibu.

Sehubungan dengan hal di atas, target pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan sesuai dengan target SPM adalah 100%, dengan realisasi pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.

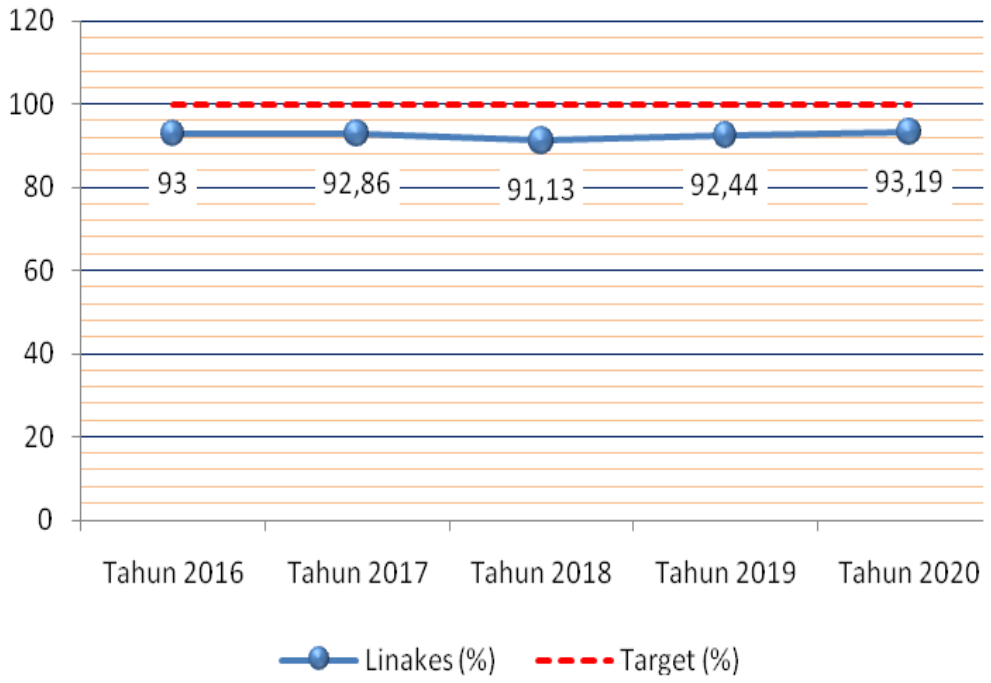

Gambar 2. 43 Realisasi Persentase Pertolongan Persalinan Dengan Tenaga Kesehatan di Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Pada gambar di atas, capaian setiap tahunnya belum mencapai 100%, yang artinya masih ada persalinan yang ditolong bukan dengan tenaga kesehatan. Hal ini disebabkan masih kurangnya tingkat pengetahuan ibu dan masih tingginya kepercayaan terhadap dukun beranak terutama di daerah *hinterland*.

3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi sebelum anak mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Kementerian Kesehatan dalam program kerja untuk menurunkan angka kematian bayi pada tahun 2018 hingga 19/1000 kelahiran hidup, angka ini menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah dalam menurunkan angka kematian bayi. Dinas Kesehatan Kota Batam dan jajaran serta mitranya terus berupaya untuk menurunkan angka kematian bayi, hasil yang didapatkan cukup menggembirakan, yang mana tahun 2016 angka kematian bayi mampu direduksi hingga mencapai 4,1 per 1.000 kelahiran hidup. Terjadi kenaikan tahun 2017 menjadi sebesar 5,7 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya pada tahun 2018 angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup meningkat menjadi 5,1. Selanjutnya semakin menurun menjadi 4,0 AKB per 1000 kelahiran hidup tahun 2019 hingga mengalami penurunan kembali yaitu menjadi 3,85 pada tahun 2020.

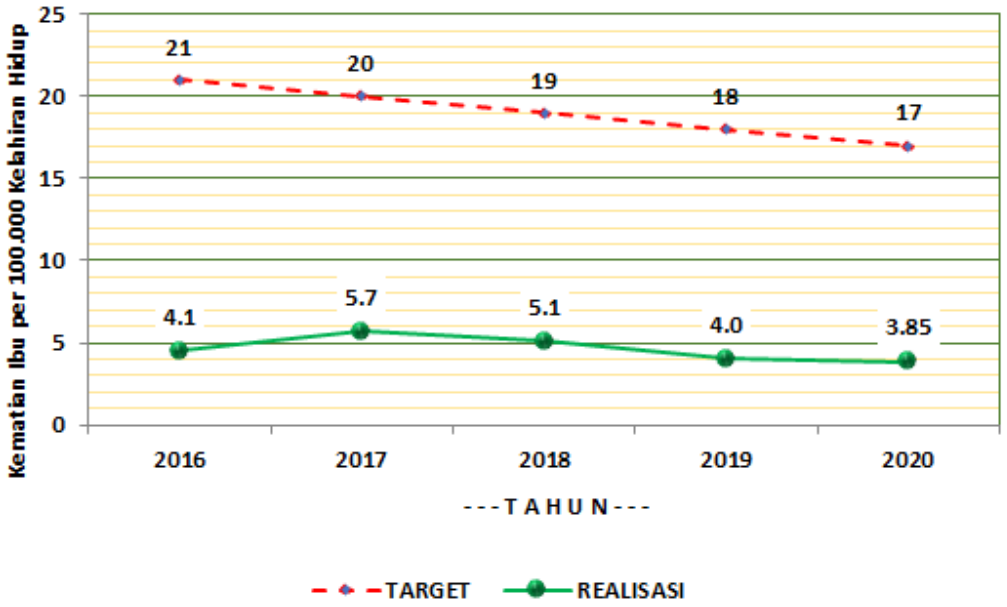

Gambar 2. 44 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Penyebab kematian bayi banyak disebabkan oleh Apeksia, BBLR dan lainnya, terdapat kematian bayi karena diare dan pneumonia dengan porsi kecil. Kasus Berat Badan Lahir Rendah menggambarkan kurangnya perawatan masa prenatal

terutama masalah gizi ibu hamil, penyakit yang menyertai ibu selama kehamilan sehingga janin tidak dapat tumbuh dengan baik.

Pada prinsipnya angka kematian ini dapat ditekan dengan mempersiapkan ibu untuk hamil dengan kondisi kesehatan yang prima untuk menjalani kehamilan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu baik upaya promotif, preventif dan kuratif.

4. Bayi dengan Asi Eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian ASI pada bayi usia 0-6 bulan tanpa ada makanan pendamping lainnya. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan ASI secara optimal disamping keuntungan ASI lainnya seperti komposisi ASI yang sangat sesuai untuk bayi, mudah dan murah. Cakupan ASI Eksklusif di Kota Batam masih cukup rendah (47,30%) tahun 2020 dibanding dengan target nasional (80%). Rendahnya cakupan ASI eksklusif, dimungkinkan karena masih rendahnya pengetahuan ibu-ibu balita akan pentingnya ASI disamping jumlah tenaga kerja wanita di Kota Batam yang cukup besar, sehingga mempunyai potensi pemberian ASI eksklusif tidak mencapai usia bayi sampai 6 bulan. Selain itu, pemberian cuti melahirkan yang kurang dari waktu 6 bulan menjadi salah satu penyebab cakupan pemberian ASI eksklusif yang rendah di Kota Batam. Angka ini menghimbau kita semua baik petugas kesehatan, kader posyandu, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh komponen masyarakat lainnya mendorong peningkatan penggunaan ASI bagi bayi secara optimal dan mengupayakan agar sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin dan Bidan Praktek Swasta memberikan pelayanan sayang bayi dengan meningkatkan program Inisiasi Menyusu Dini.

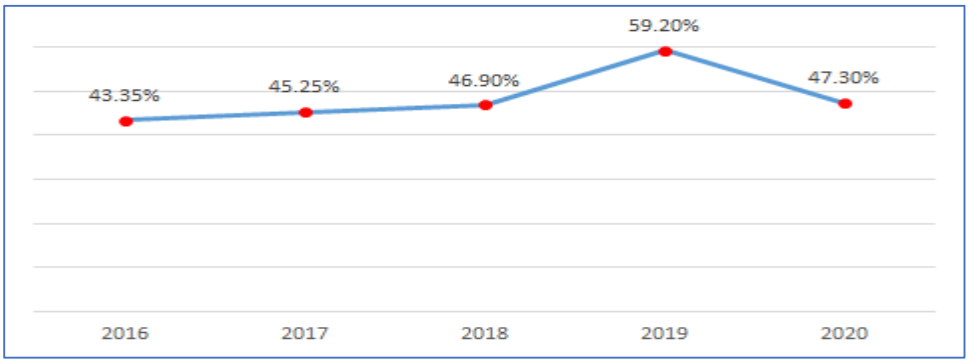

Gambar 2. 45 Persentase Cakupan ASI Eksklusif di Kota Batam Tahun 2016 -2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Dari gambar di atas terlihat bahwa Persentase cakupan ASI eksklusif di Kota Batam belum mencapai target 80% di tahun 2020. Diperlukan upaya yang lebih giat untuk mempromosikan dan memberikan edukasi tentang pentingnya ASI eksklusif.

5. Pelayanan Kesehatan Bayi

Kunjungan bayi adalah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi imunisasi dasar, Stimulasi Deteksi Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK) oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis dan penyuluhan kesehatan.

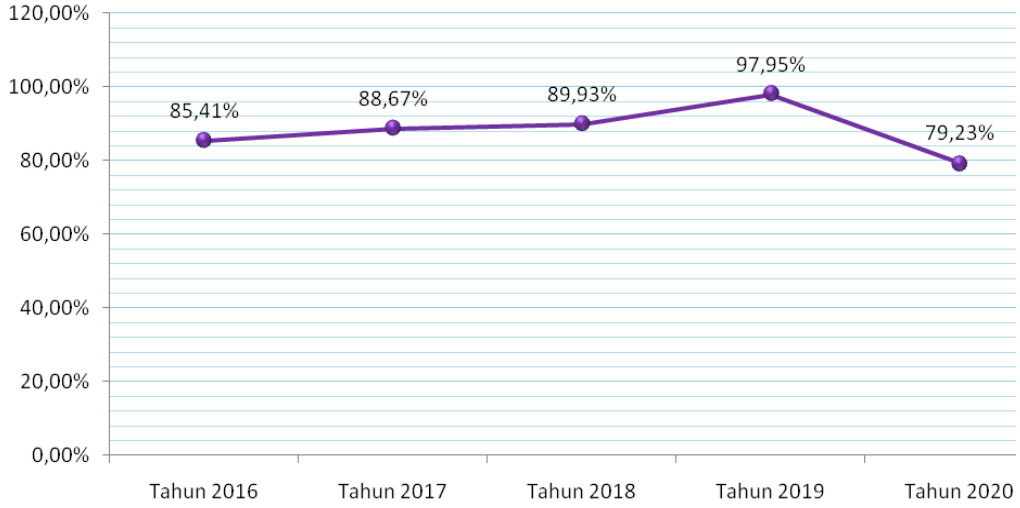

Gambar 2. 46 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Pelayanan kesehatan bayi harus memenuhi kriteria yakni mendapatkan pelayanan minimal 4 kali pada usia 29 hari sampai <1 tahun minimal satu kali setiap 3 bulan dengan ketentuan jumlah kunjungan minimal 8 kali dalam setahun. Secara umum cakupan pelayanan kesehatan bayi tahun 2020 di Kota Batam mencapai 79,23%. Indikator ini masih belum mencapai target yang diharapkan, hal ini karena belum maksimalnya sistem pencatatan dan pelaporan terutama dari sarana pelayanan kesehatan swasta yang ada di Kota Batam.

Imunisasi Lengkap pada Bayi (IDL)

Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut.

Bayi yang baru lahir memang sudah memiliki antibodi alami yang disebut kekebalan pasif. Antibodi tersebut didapatkan dari ibunya saat bayi masih di dalam kandungan. Akan tetapi, kekebalan ini hanya dapat bertahan beberapa minggu atau bulan saja. Setelah itu, bayi akan menjadi rentan terhadap berbagai jenis penyakit.

Imunisasi bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit, dengan membentuk antibodi dalam kadar tertentu. Agar antibodi tersebut terbentuk, seseorang harus diberikan vaksin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadwal imunisasi tergantung jenis penyakit yang hendak dicegah. Sejumlah vaksin cukup diberikan satu kali, tetapi ada juga yang harus diberikan beberapa kali, dan diulang pada usia tertentu. Vaksin dapat diberikan dengan cara disuntik atau tetes mulut.

Untuk mempersipakan generasi yang tangguh, sehat dan cerdas, maka bayi perlu mendapat imunisasi dasar secara lengkap. Berikut capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi di Kota Batam tahun 2016-2020.

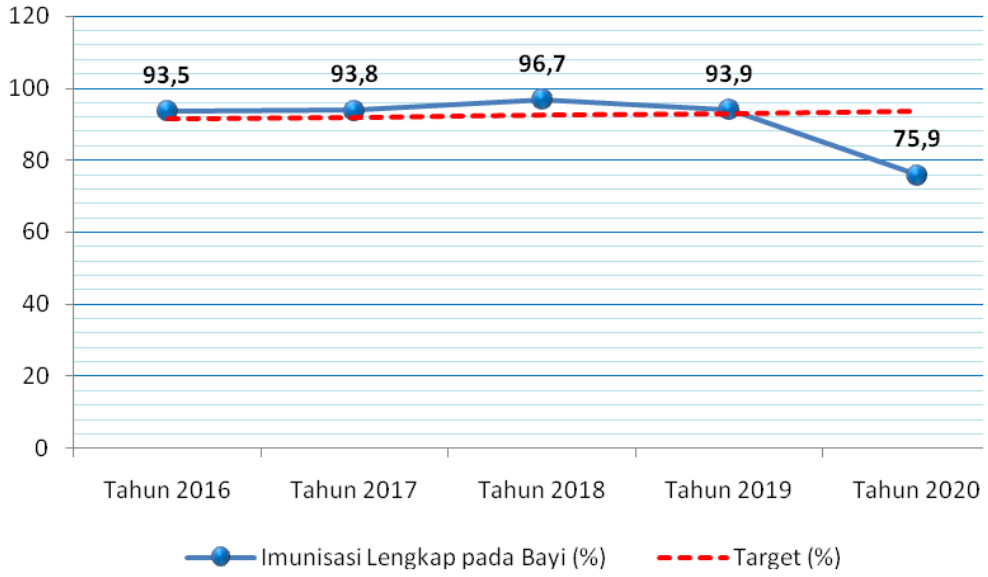

Gambar 2. 47 Persentase Imunisasi Lengkap pada Bayi di Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Pada 4 tahun pertama, capaian imunisasi lengkap pada bayi dapat mencapai target, namun pada tahun 2020 menurun, hal ini disebabkan karena kegiatan posyandu yang selama ini menjadi menjadi pusat pelayanan imunisasi dan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat tidak berjalan optimal, karena pandemi Covid-19, sehingga berdampak terhadap capaian Imunisasi pada bayi. Menyikapi masalah ini, diperlukan strategi baru agar pada masa pandemi Covid-19, agar pemberian imunisasi pada bayi tetap optimal.

6. Desa UCI (*Universal Child Immunization*)

Salah satu indikator keberhasilan program imunisasi dapat dilihat dari cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) dengan persentase cakupan imunisasi dasar minimal 88% dari jumlah bayi yang ada di desa/Kelurahan. Target cakupan desa/kelurahan UCI tahun 2020 adalah 100%, hal ini sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diharapkan tahun 2020 semua desa/Kelurahan memiliki predikat desa/Kelurahan UCI. Pada tahun 2020, wilayah Kota Batam seluruh kelurahannya memiliki predikat sudah UCI sebesar 81,25%. Dari 64 kelurahan di Kota Batam, Tahun 2016 baru sebanyak 62 kelurahan (97%), Tahun 2017 sebanyak 64 kelurahan (100%). Tahun 2018 turun

menjadi 62 kelurahan (97%) memiliki predikat desa/kelurahan UCI. Selanjutnya tahun 2019 kembali 100% kelurahan memiliki predikat desa/kelurahan UCI. Namun pada tahun 2020 capaian tersebut menurun hingga hanya 52 kelurahan (81%) sajayang memiliki predikat desa/kelurahan UCI.

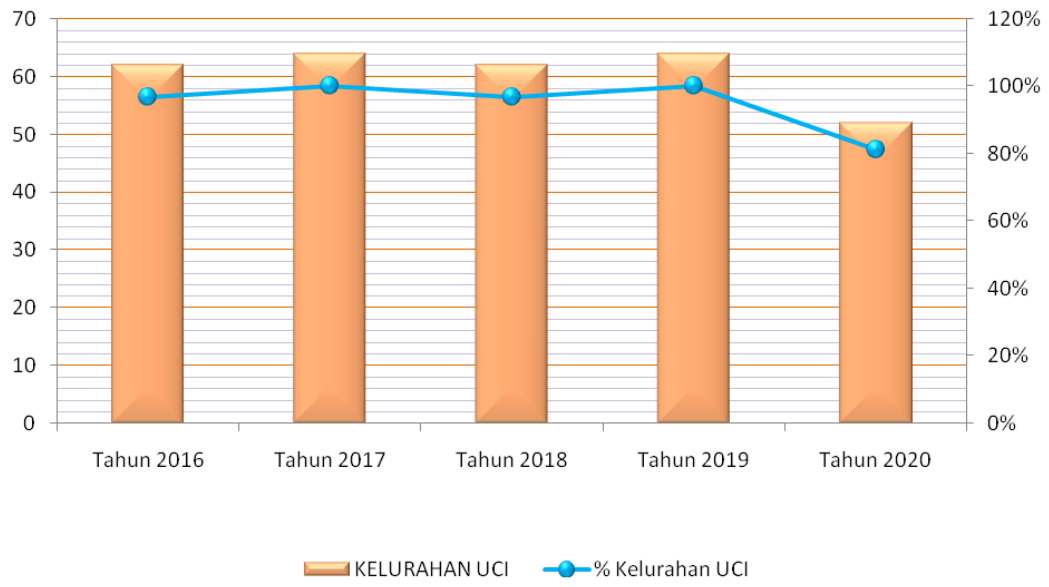

Gambar 2. 48 Distribusi Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

7. Balita Gizi Buruk *(under weight)* Mendapat Perawatan

Persentase balita yang mengalami gizi buruk dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana pada tahun 2016 dari 151.212 balita ditemukan 286 (0,19%) balita dengan gizi buruk. Tahun 2017 sebanyak 302 (0,20%) balita mengalami gizi buruk. Pada tahun 2018 kondisinya menurun dimana sebanyak 289 balita atau 0,19% balita mengalami gizi buruk (kurus sekali). Namun kondisi tersebut cenderung mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebanyak 334 (0,21%) balita yang mengalami gizi buruk. Selanjutnya tahun 2020 sebanyak 573 (0,38%) balita yang mengalami gizi buruk dari 151.003 balita yang ada.

Semua kasus pada periode tahun 2016-2020 tersebut 100% telah ditangani sesuai standar. Hasil penyelidikan epidemiologi diketahui bahwa balita yang mengalami gizi buruk/kurus sekali tidak sepenuhnya karena kurang ketersediaan makanan, tetapi lebih merupakan akibat dari penyakit kronis yang diderita

sehingga mempengaruhi asupan makanan yang berakibat balita kehilangan berat badan normal. Balita gizi buruk dengan gangguan klinis telah dilakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit dan Balita yang tidak mengalami gangguan klinis dilakukan rawat jalan atau pemantauan oleh petugas Puskesmas. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari proporsi balita gizi buruk mendapat perawatan di bawah ini.

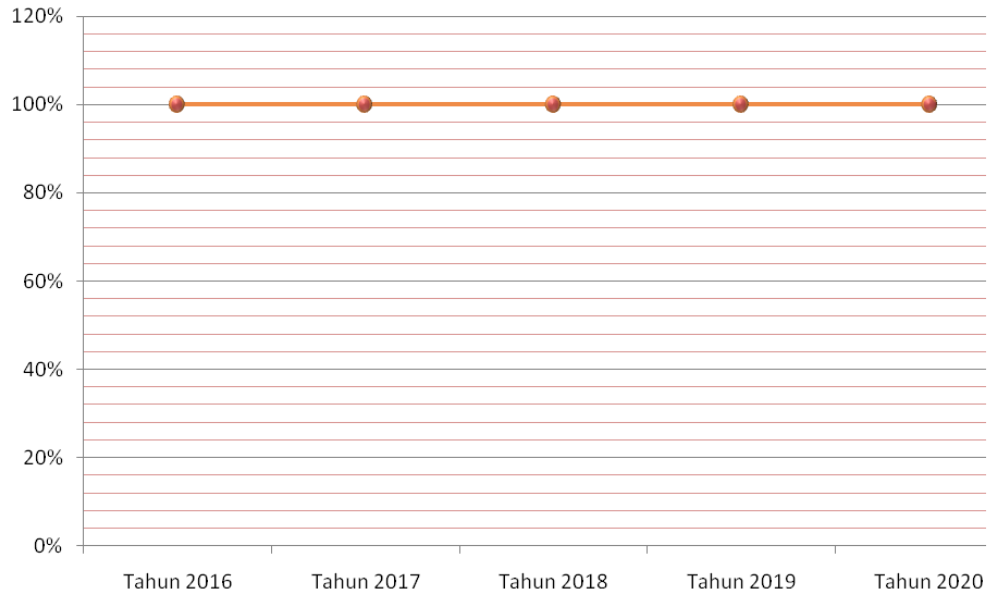

Gambar 2. 49 Proporsi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Di Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

F. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hak paling dasar bagi seorang manusia dan oleh karena itu negara mengatur pemenuhan hak azazi ini melalui UUD 1945, khususnya pasal 34 ayat 2 tentang jaminan sosial. Jaminan kesehatan memungkinkan setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengurangi beban pembiayaan kesehatan, terutama masyarakat miskin yang rentan terhadap masalah kesehatan dan pembiayaan kesehatannya. Pemerintah Kota Batam telah berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan melalui 2 skema jaminan kesehatan bagi masyarakat

miskin yaitu jaminan kesehatan nasional (JKN) dan subsidi pelayanan kesehatan. Proporsi kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Batam Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari Gambar 2.50 dapat diketahui bahwa persentase peserta jaminan kesehatan melalui SJSN di Kota Batam sudah memenuhi target yang telah ditentukan.

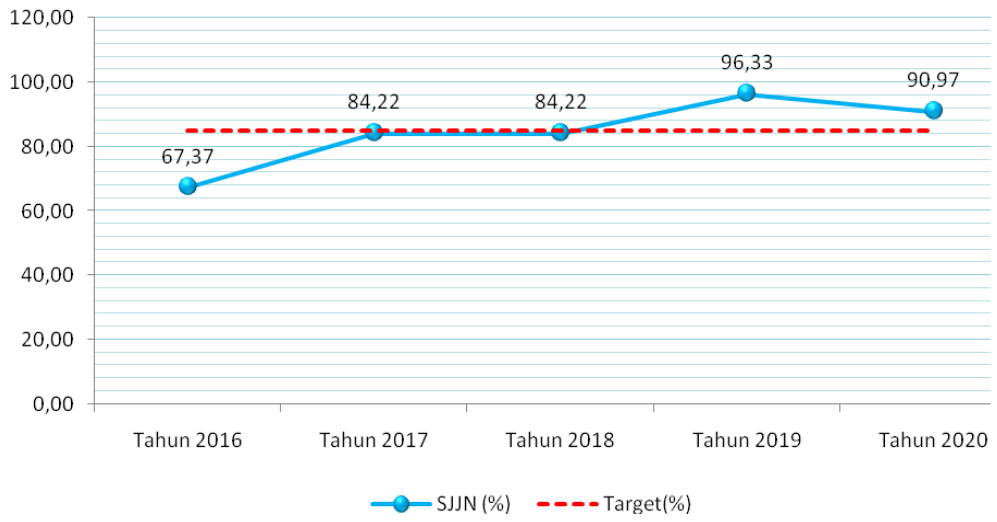

Gambar 2. 50 Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN di Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

2. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

Pelayanan kesehatan rawat jalan menunjukkan tingkat pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan primer seperti Puskesmas, klinik swasta dan pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit). Kunjungan rawat jalan erat kaitannya dengan angka kesakitan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, yang juga menggambarkan berbagai indikator, seperti tingkat upaya kesehatan masyarakat, tingkat keluarga ber PHBS dalam wilayah kerja Puskesmas. Pelayanan Kesehatan rawat jalan di rumah sakit menunjukkan masalah kesehatan yang membutuhkan tenaga medis spesialis atau kebutuhan pelayanan kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih spesifik. Berikut gambaran pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap pada pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.

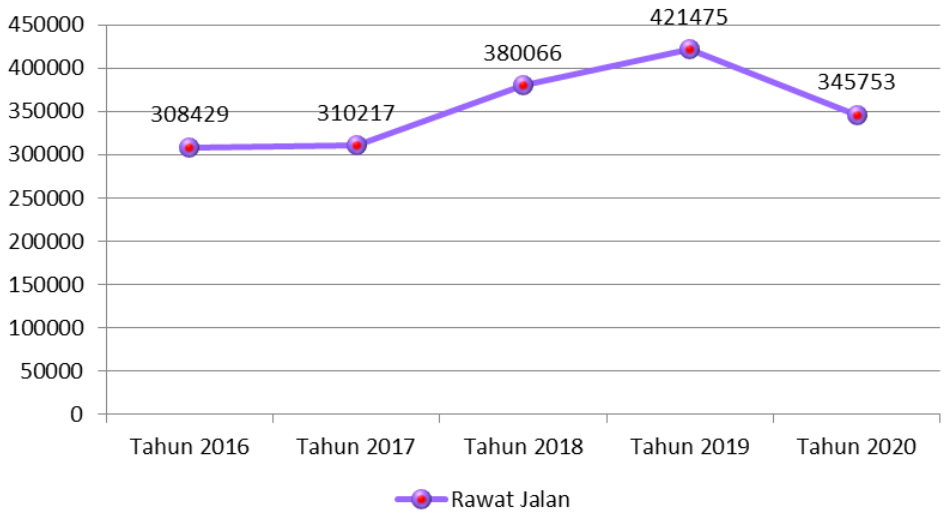

Gambar 2. 51 Cakupan Rawat Jalan Puskesmas di Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Pada tahun 2020 terjadi penurunan cakupan rawat jalan, hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kunjungan ke puskesmas berkurang. Hal ini terjadi pembatasan aktivitas masyarakat ke luar rumah dan sebagian masyarakat berasumsi bahwa puskesmas bisa menjadi tempat sumber penularan Covid-19 dan berisiko untuk tertular penyakit tersebut. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak berobat ke puskesmas dan lebih memilih konsultasi secara *online*.

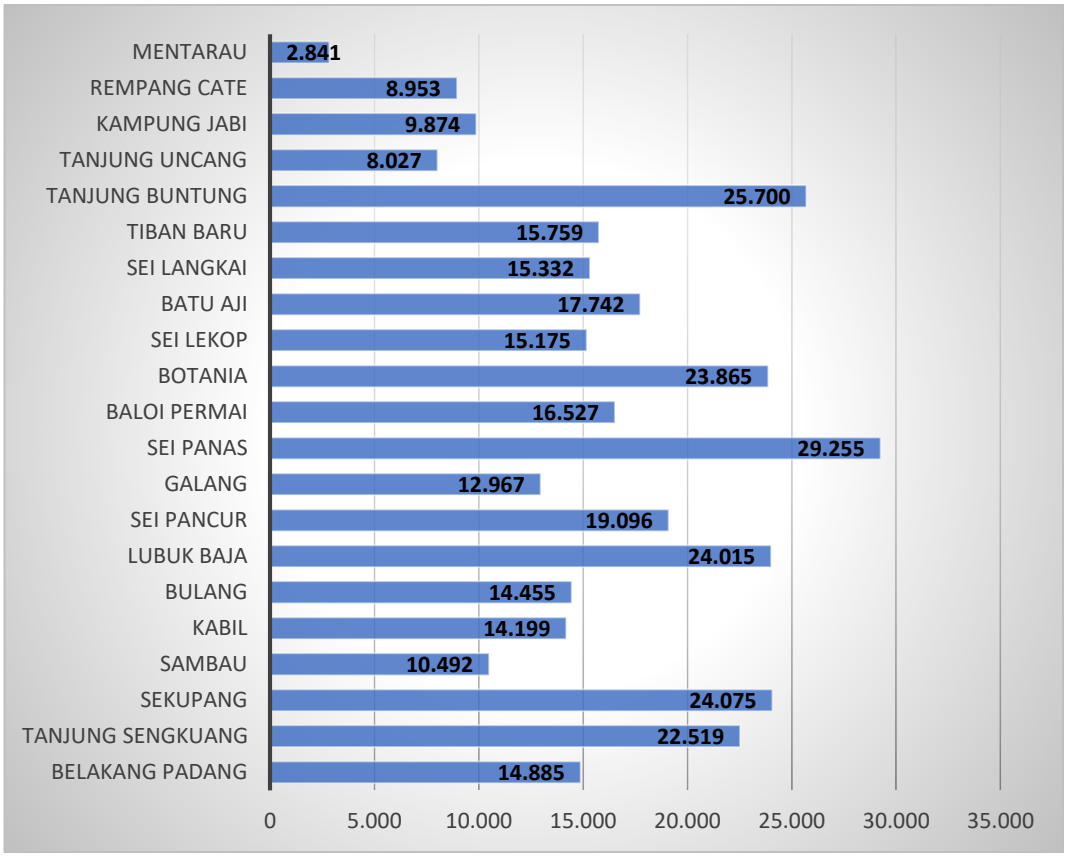

Gambar 2. 52 Cakupan Rawat Jalan Puskesmas Tahun 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

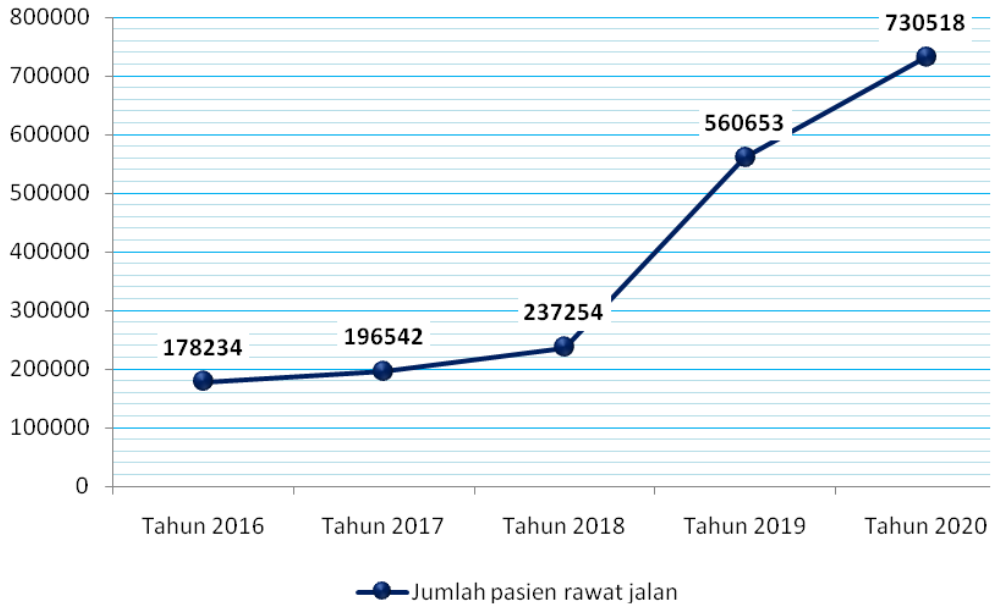

Gambar 2. 53 Cakupan Rawat Jalan Rumah Sakit di Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Melihat gambaran diatas, sejak tahun 2018 kunjungan rawat jalan di rumah sakit meningkat, hal ini dapat terjadi karena akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan rujukan semakin terjangkau, karena adanya penambahan rumah sakit di Kota Batam. Pada tahun 2018 terdapat penambahan 2 rumah sakit swasta di Kota Batam. Dengan demikian terdapat cakupan rawat jalan rumah sakit yang signifikan.

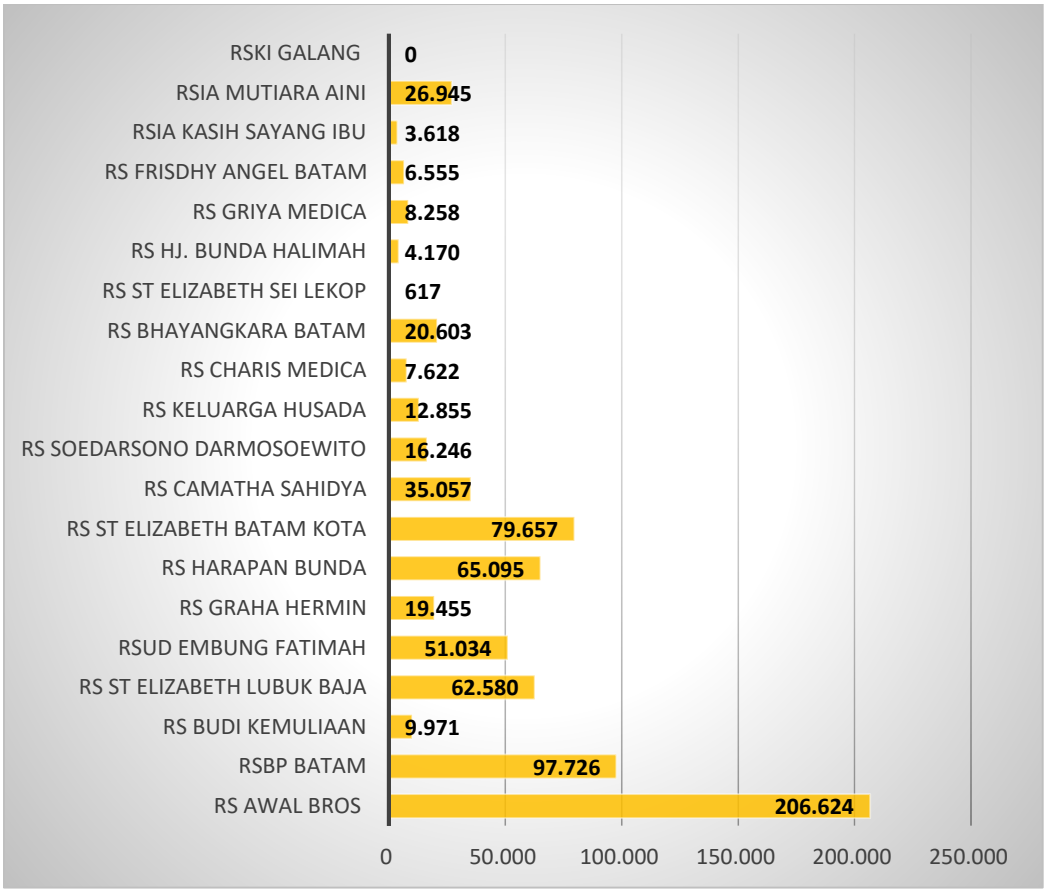

Gambar 2. 54 Cakupan Rawat Jalan Setiap Rumah Sakit Tahun 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

3. Cakupan Rawat Inap

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab

atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Puskesmas Perawatan atau Puskesmas Rawat Inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara. Rawat inap merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas perawatan dan rumah bersalin, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.

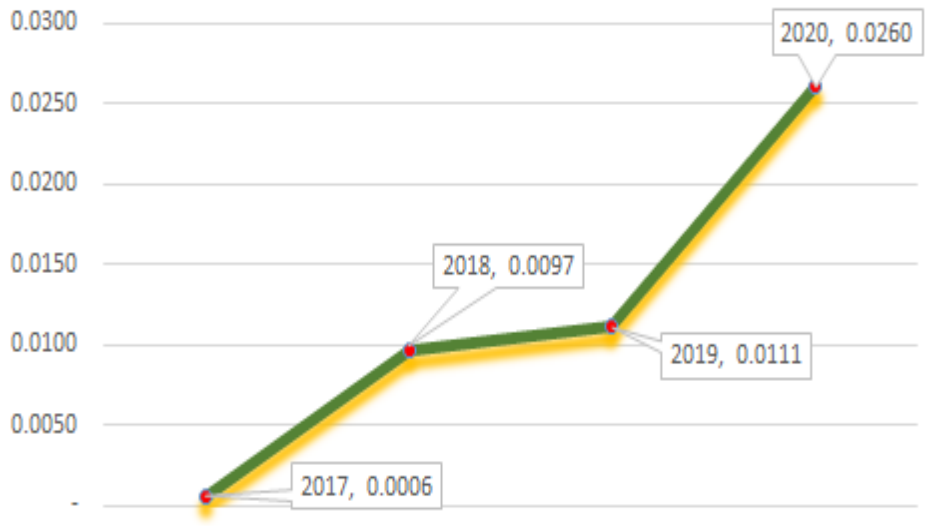

Gambar 2. 55 Cakupan Rawat Inap Penerima Manfaat Jamkesda Kota BatamTahun 2017-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

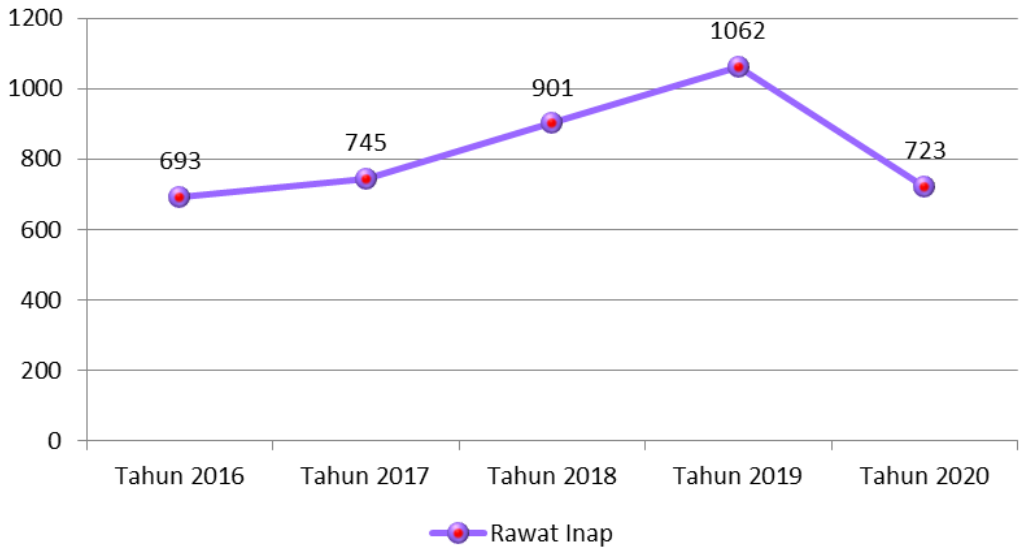

Gambar 2. 56 Cakupan Rawat Inap Puskesmas Kota Batam Tahun 2016- 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

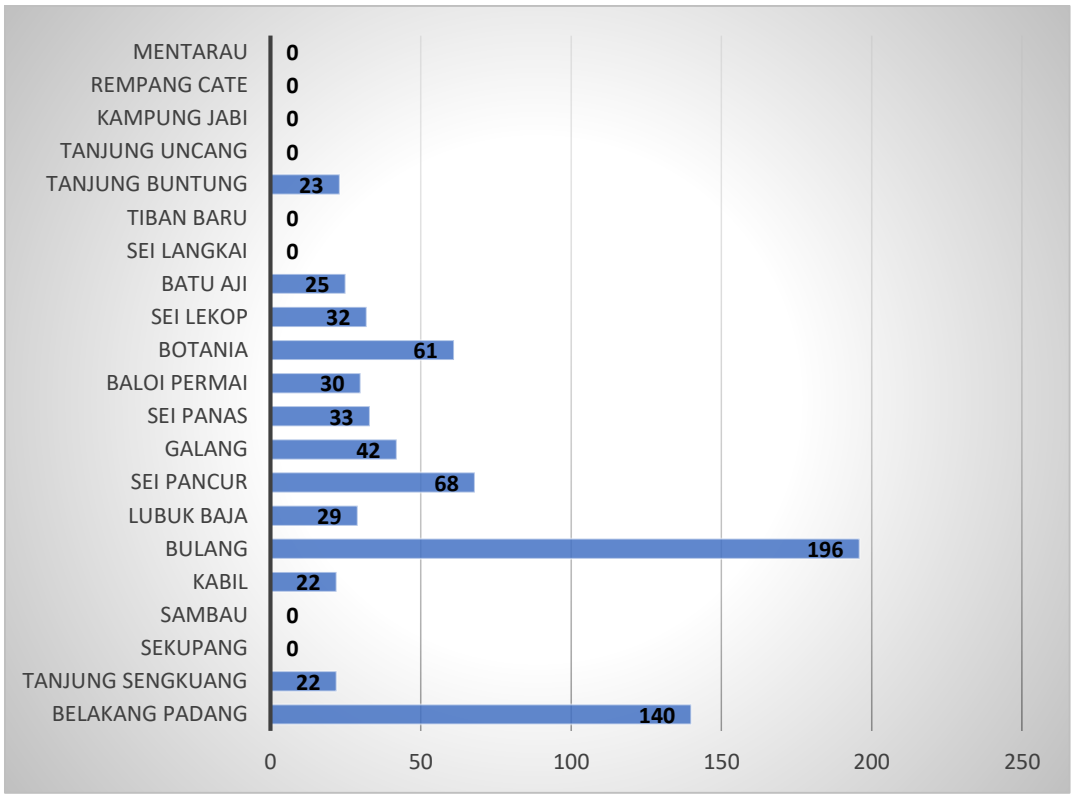

Gambar 2. 57 Cakupan Rawat Inap Puskesmas Tahun 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Pada tahun 2020 terjadi penurunan cakupan rawat inap, hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kunjungan ke puskesmas berkurang. Hal ini terjadi pembatasan aktivitas masyarakat ke luar rumah dan

sebagian masyarakat berasumsi bahwa puskesmas bisa menjadi tempat sumber penularan Covid-19 dan berisiko untuk tertular penyakit tersebut. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak dirawat inapkan di puskesmas. Selain itu puskesmas di perkotaan juga sudah menjadi puskesmas dengan kategori puskesmas nonrawat inap namun untuk pelayanan persalinan rawat inap tetap dapat diselenggarakan.

Upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain dilakukan upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Sedangkan menurut pelayanan yang diberikan, rumah sakit terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

Rumah sakit atau sarana fasilitas kesehatan tingkat lanjutan merupakan sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan lebih lengkap baik dari segi fasilitas dan sumber daya manusia yang memberikan pelayanan.Berikut gambaran pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (sekunder) di Kota Batam tahun 2016-2020.

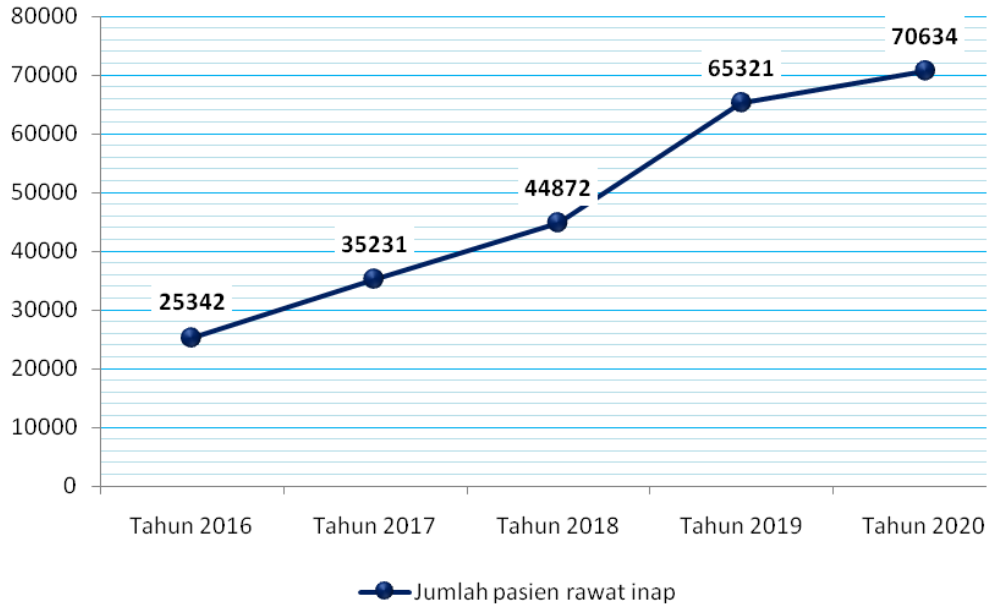

Gambar 2. 58 Cakupan Rawat Inap Rumah Sakit di Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

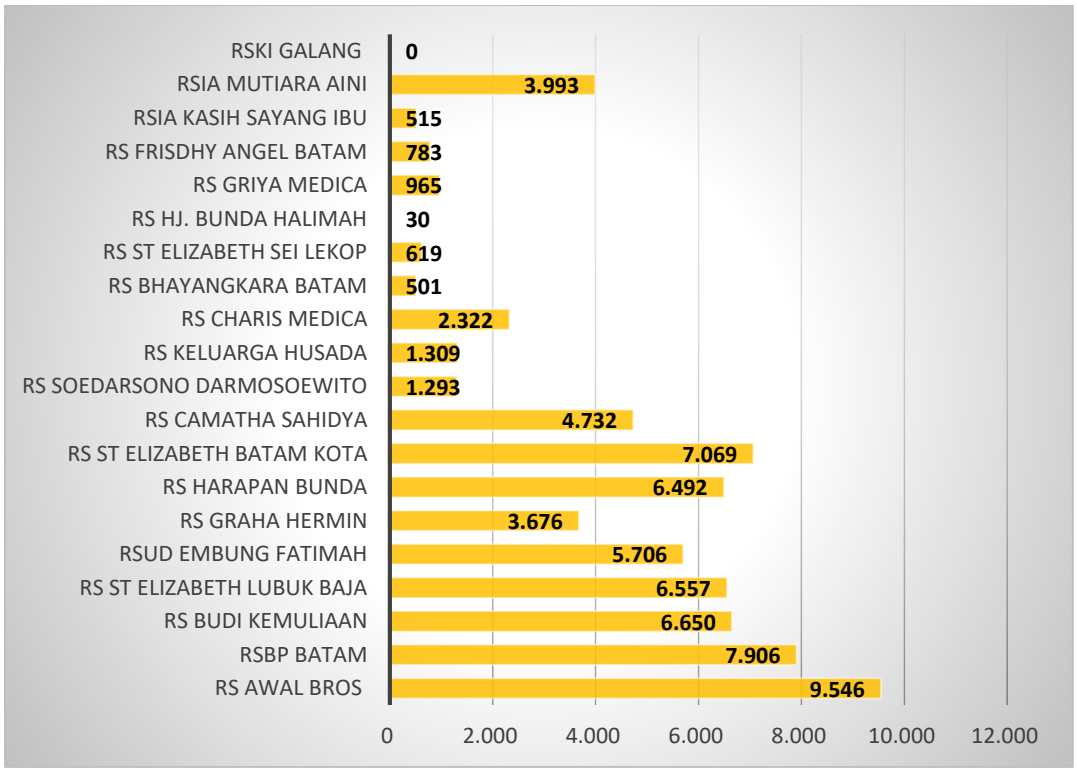

Gambar 2. 59 Cakupan Rawat Inap Rumah Sakit Tahun 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Pelayanan kesehatan rujukan pada cakupan rawat inap di Kota Batam sejak tahun 2018 juga meningkat, selain peningkatan rumah sakit sebagaimana kita

ketahui pada sitauasi pandemi Covid-19 pelayanan rujukan sangat dibtuhkan oleh masyarakat.

4. Desa STBM

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku *higiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. STBM menjadi acuan nasional untuk program sanitasi berbasis masyarakat sejak lahirnya Kepmenkes No.852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis masyarakat. STBM memiliki6 (enam) strategi nasional, yaitu: 1). Penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*),2). Peningkatan kebutuhan sanitasi (*demand creation*), 3). Peningkatan penyediaan sanitasi (*supply improvement*), 4). Pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*), 5). Pembiayaan 6). Pemantauan dan evaluasi.

Keunggulan program adalah satu-satunya program yang mengusung non subsidi untuk pembangunan sarana jamban tingkat rumah tangga. Sampai saat ini masih menjadi program sanitasi yang terbukti paling cepat meningkatkan akses sanitasi dan perubahan perilaku higiene di Indonesia. STBM adalah satu-satunya program sanitasi yang menyasar langsung ke tingkat rumah tangga yang berfokus pada perubahan perilaku, bukan pembangunan sarana.

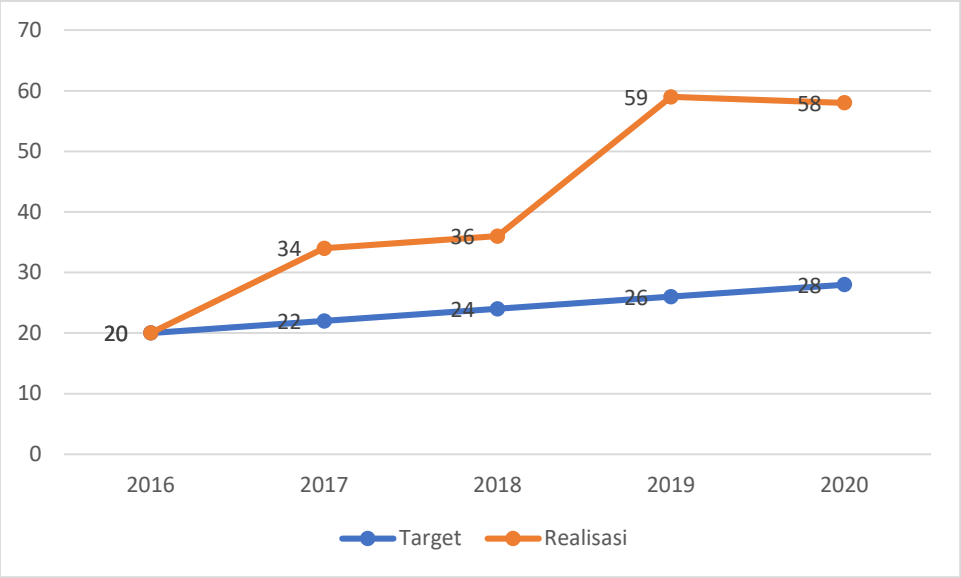

Gambar 2. 60 Jumlah Desa/Kelurahan STBM Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Pendekatan STBM selama ini banyak dilakukan di daerah rural atau pedesaan. Dengan pendekatan STBM, masyarakat mau berubah bahkan membuat fasilitas sanitasinya dengan biayanya sendiri. Penyadaran untuk melakukan perubahan perilaku untuk hidup bersih dan sehat juga sangat dibutuhkan di kawasan urban atau perkotaan.

Jumlah desa yang melaksanakan STBM dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 terdapat 20 desa/kelurahan yang melaksanakan STBM. Pada tahun 2018, dari 64 jumlah kelurahan di Kota Batam sebanyak 36 desa/kelurahan sudah melaksanakan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat. Jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 jumlah desa yang melaksanakan STBM berjumlah 58 desa/kelurahan. Jumlah ini selalu melampaui nilai yang telah ditargetkan.

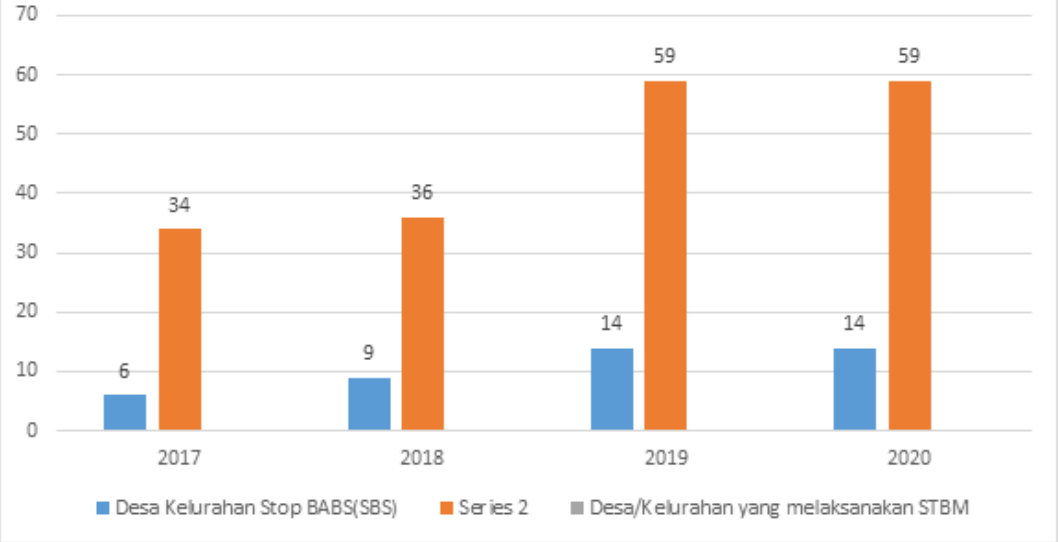

Gambar 2. 61 Jumlah Desa/Kelurahan SBS dan STBM Tahun 2017-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

5. Tempat Pengelola Makanan (TPM)

Tempat pengelola makanan merupakan suatu bangunan yang dipergunakan untuk mengolah makanan seperti pengrajin makanan, jasa boga, pembuat kue, restoran, depot air minum dan lain-lain. Tempat Pengelola Makanan (TPM) memiliki potensi cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkan.

Tempat Pengelola Makanan (TPM) Kota Batam yang dibina antara lain jasa boga, rumah makan (restoran), depot air minum dan makanan jajanan. Berikut hasil pengawasan dan pembinaan pengolahan makanan di Kota Batam tahun 2016-2020, berdasarkan gambar berikut.

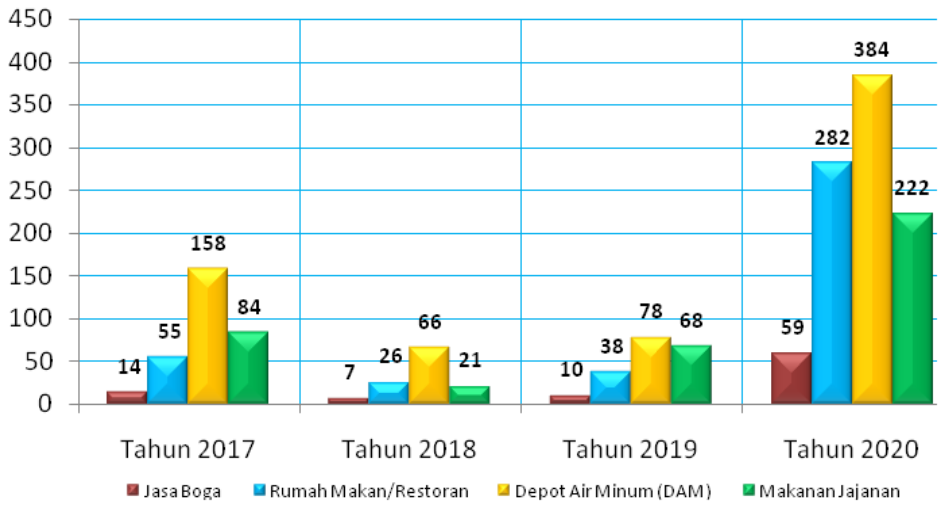

Gambar 2. 62 Pembinaan Tempat Pengelola Makanan Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Tempat pengelola makanan merupakan tempat dilakukannya pengolahan makanan mulai dari dari penerimaan bahan mentah hingga pengemasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap *hygiene* sanitasi berguna untuk menghindari penyakit bawaan makanan atau akibat kesalahan dari pengolahan makanan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan terhadap TPM guna menjaga TPM memenuhi syarat higiene sanitasi.

Sanitasi hotel merupakan usaha pencegahan timbulnya berbagai macam penyakit di antara karyawan maupun tamu hotel sebagai akibat dari tidak diperhatikannya faktor-faktor lingkungan hotel yang mengganggu. Sanitasi hotel menyangkut 2 aspek pembahasan yaitu yang berhubungan dengan perumahan di sekeliling dan yang berhubungan dengan makanan dan minuman.

Hotel merupakan area publik yang perlu dilakukan pengawasan fasilitas sanitasi secara berkala, adapun pengawasan yang dilakukan sebagai persyaratan memenuhi sanitasi kesehatan adalah kualitas air, kuantitas air, pembuangan air limbah, toilet untuk umum, kamar mandi dan jamban untuk tamu menginap, pengelolaan tempat sampah, peralatan pencegah masuknya serangga dan tikus. Berikut hasil pengawasan sanitasi hotel di Kota Batam.

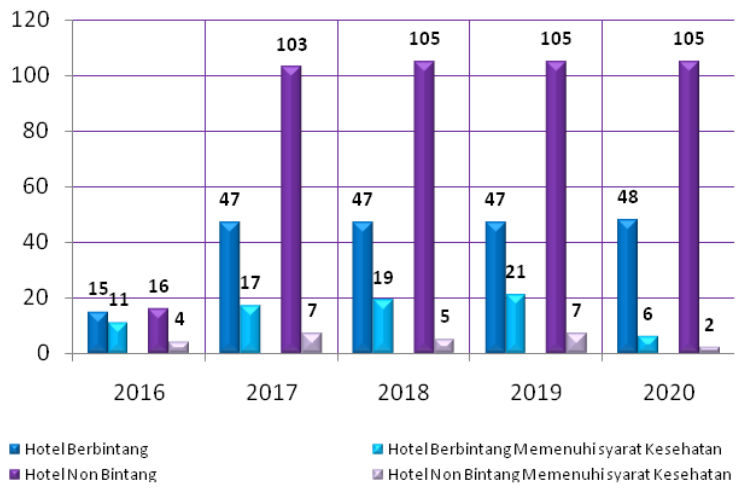

Gambar 2. 63 Distribusi Hotel yang Memenuhi Syarat Kesehatan di Kota Batam Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Selain itu persyaratan yang harus dipenuhi berkaitan dengan karyawan, pakaian kerja yang bersih dan utuh, memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang masih berlaku, memiliki persyaratan kursus penyehatan makanan bagi petugas pengelola makanan, telah menjalani pemeriksaan rectal swab bagi penjamah makanan.

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penjabaran kondisi kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode 2016-2020 berdasarkan realisasi indikator kinerja *outcome* akan disampaikan dalam empat bagian, yakni bagian *(1)* Bina Marga, *(2)* Sumber Daya Air, *(3)* Cipta Karya dan *(4)* Tata Ruang. Penjabaran lebih lanjut disampaikan di bawah ini.

A. Bina Marga

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Bidang Bina Marga/Jalan untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/Kota baik dan sedang target sampai dengan 2019 adalah 60 persen.

Terhadap target tersebut untuk urusan bidang PUPR sub bidang Bina Marga/Jalan telah mencapai target SPM yang ditetapkan, yaitu sampai dengan tahun 2019 kondisi jalan Kota baik dan sedang sudah mencapai 85,39 persen.

Indikator Panjang Jalan yang dibangun/ditingkatkan (km) selama periode 2016-2020 telah menunjukkan realisasi yang positif. Adapun pencapaian sampai dengan tahun 2020 total panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan adalah sepanjang 124,52 Km. Lebih lanjut, target tahunan sejak 2016-2018 selalu tercapai, hanya pada tahun 2019 target 30 Km hanya terealisasi 25,59 Km dan pada tahun 2020 target 33 Km namun hanya terealisasi 4,91 Km.

Untuk Indikator Program Panjang Jembatan/Pelantar yang dibangun (m) selama periode RPJMD 2016-2021 telah mencapai realisasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dengan kebutuhan total panjang jembatan/pelantar yang dibangun pada periode RPJMD 2016-2021 adalah sepanjang 60 m, kemudian sudah terealisasi sampai dengan tahun 2019 sepanjang 94 m atau dengan tingkat pencapaian sebesar 156,67 persen terhadap kebutuhan total panjang jembatan/pelantar yang dibangun pada periode RPJMD 2016-2021. Untuk pencapaian Indikator Program Panjang Jembatan/Pelantar yang dibangun tiap tahunnya rata-rata telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Pada indikator Panjang Jalan yang dipelihara (Km) dengan total Panjang Ruas Jalan Kota Batam yang harus dipelihara sepanjang 646,16 Km, selanjutnya selama periode 2016-2020 pemeliharaan jalan telah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan tiap tahunnya, hanya pada tahun 2020 terealisasi 90,56 persen dari target dikarenakan kerusakanpanjang jalan pada tahun tersebut lebih kecil dari yang ditargetkan. Sehingga seluruh permasalahan jalan pada tahun2020 tertangani dengan baik.

Selanjutnya selama periode 2016-2020 seluruh Jumlah Titik Lampu (PJU) yang dipelihara di Kota Batam telah terealisasi sesuai target. Pada Indikator panjang jaringan lampu PJU yang direhabilitasipada periode RPJMD 2016-2021 sebanyak

60.532 titik, sampai dengan tahun 2020, telah terealisasi sepanjang 60.532 titik atau dengan pencapaian 100 persen.

Adapun untuk Indikator Program jumlah titik lampu (PJU) yang dibangun, selama periode 2016-2020 telah menunjukkan realisasi yang positif. Secara total kebutuhan jumlah titik lampu (PJU) yang dibangun, selama pada periode RPJMD 2016-2021 adalah sebanyak 1.527 titik. Target titik lampu yang dibangun sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.267 titik yang dapat direalisasikan sebanyak 1.157 titik lampu (PJU) yang dibangun, atau dengan pencapaian terhadap kebutuhan sebesar 91,32persen terhadap kebutuhan jumlah titik lampu (PJU) yang dibangun sampai tahun 2020.

Sementara panjang jaringan PJU yang direhabilitasi pada tahun 2016-2017 mencapai target tahunan, namun tahun 2018-2020 tidak mencapai target, sehingga menyisakan 31.500 meter jaringan yang belum direhabilitasi di tahun 2020. Hal ini disebabkan, rehabilitasi yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan menyesuaikan dengan pelebaran jalan.

Kebutuhan Jumlah peralatan dan alat berat untuk menunjang tugas kebina margaan dan Sumber Daya Air pada periode RPJMD 2016-2021, dengan indikator Jumlah Peralatan dan Alat Berat adalah sebanyak 20 unit alat. Kebutuhan alat berat sampai tahun 2020 sebanyak 18 unit. Sampai tahun 2020 terdapat alat berat sebanyak 15 unit alat dengan pencapaian sebesar 83,33 persen. Tahun 2019 dan 2020 tidak ada pengadaan alat berat melalui APBD Kota Batam, namun tahun 2019 mendapat hibah 1 alat berat dari Provinsi Kepulauan Riau yang telah masuk dalam 15 unit alat berat tersebut.Untuk pembangunan infrastruktur pada daerah hinterland terdiri dari beberapa indikator yaitu, Indikator Program Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan di wilayah hinterland (Km) selama periode2016-2021 telah mencapai realisasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan total Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland (Km) selama periode 2016-2021 adalah sepanjang 11 Km dan target sampai dengan tahun 2020 sepanjang 9 km. Adapun realisasi sampai dengan

tahun 2020 adalah sepanjang 10,4 Km dengan pencapaian 115,5 persen terhadap kebutuhan pembangunan/peningkatan jalan wilayah *hinterland*pada periode RPJMD 2016-2021. Demikian juga dengan Indikator Program Panjang Jembatan/ Pelantar yang dibangun (m) di wilayah hinterland selama periode 2016-2021, Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan total Panjang Jembatan/ Pelantar yang dibangun (m) di wilayah hinterland adalah sepanjang 1500 m sampai akhir periode. Target pembangunan jembatan/pelantarsampai tahun 2020 sepanjang 1.250 m. Adapun realisasi sampai dengan tahun 2020 adalah sepanjang 1.040 m dengan pencapaian 83.2% persen terhadap kebutuhan total Panjang Jembatan/Pelantar yang dibangun (m) di wilayah hinterland. Untuk indikator Jumlah Titik Lampu PJU yang dibangun di wilayah hinterland dengan kebutuhan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 138 titik, sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 68 titik atau dengan pencapaian 49,3 persen. Pembangunan lampu PJU di wilayah hinterland belum dapat terpenuhi sesuai target dikarenakan Keterbatasan Daya PLN pada daerah *hinterland.* Untuk Indikator Jumlah Titik Lampu PJU yang Dipelihara di wilayah hinterland telah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan tiap tahunnya.

Tabel 2. 51 Realisasi Indikator Kinerja Bina Marga Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
I	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan (Km)	Target	25	25	28	30	33
		Realisasi	31,5	34,4	28,12	25,59	4,91
II	Panjang Jembatan/ Pelantar yang dibangun (M)	Target	10	10	10	10	10
		Realisasi	15	36	12	31	0
III	Panjang jalan yang dipelihara (Km)	Target	35	35	40	48	53
		Realisasi	35	35	40	48	48
IV	Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara (titik)	Target	11.727	11.987	12.247	12.507	12.767
		Realisasi	11.348	11.727	12.247	12.475	12.735
V	Jumlah titik lampu PJU yang dibangun (titik)	Target	227	260	260	260	260
		Realisasi	227	295	288	407	2

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
VI	Panjang jaringan lampu PJU yang direhabilitasi (m)	Target	14.300	20.000	20.000	20.000	20.000
		Realisasi	14.300	20.000	15.000	13.500	0
VII	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland (Km)	Target	1	2	2	2	2
		Realisasi	1	3,1	3	3,3	0
VIII	Jumlah Titik Lampu PJU yang Dipelihara di wilayah hinterland	Target	379	397	427	457	487
		Realisasi	379	397	447	447	465
IX	Jumlah Titik Lampu PJU yang Dibangun di wilayah hinterland	Target	18	30	30	30	30
		Realisasi	18	50	0	0	0
X	Panjang jembatan/ pelantar yang dibangun di wilayah hinterland (m)	Target	250	250	250	250	250
		Realisasi	250	276,2	250	264	0

Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

B. Sumber Daya Air

Untuk Indikator Program Panjang Drainase yang dibangun/ditingkatkan (m) selama periode RPJMD 2016-2021 telah mencapai realisasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dengan kebutuhan total Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan pada periode RPJMD 2016-2021 adalah sepanjang 22.000 m, kemudian sudah terealisasi sampai dengan tahun 2019 sepanjang 29.489 m atau dengan tingkat pencapaian sebesar 134 persen terhadap kebutuhan total panjang jembatan/pelantar yang dibangun pada periode RPJMD 2016-2021. Untuk Indikator Panjang drainase yang dipelihara telah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan tiap tahunnya.

Kondisi drainase di Kota Batam sangat berkorelasi terhadap permasalahan klasik suatu perkotaan, yakni banjir. Untuk mengetahui wilayah dan luas genangan pada area terbangun di Kota Batam terdapat 42 titik lokasi pada tahun2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 52 Lokasi Genangan di Kota Batam

No.	Titik Banjir yang Ditangani	Wilayah Genangan				
		Luas	Tinggi	Lama	Frekuensi	Penyebab
		Ha	m	Jam/Hari	Kali/Th	
1	Sei Tering (Pasar Melcem)	4	0,1-1	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
2	SPBU Jodoh (Belakang BCA)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
3	Jl. Duyung (Simpang Polsek Batu Ampar)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
4	Depan Rumah Duka Baloi	2	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
5	Depan Perumahan Taman Kota Mas	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
6	Kawasan Bengkong Indah/Bengkong Swadebi	3	0,1-1	0,5-1	3	Kapasitas saluran kecil dan pasang surut
7	Bengkong Dalam Tanjung Buntung	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
8	Perumahan Legenda Malaka-Legenda Bali	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
9	Perumahan Taman Raya (SMPN 28)	2	0,1-1	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
10	Belakang Perumahan Duta Mas (Simpang Tiga Kampung Air - Rusunawa Batam Center)	2	0,1-1	0,5-1	3	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
11	Depan Botania Plaza	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
12	Perumahan Orchard Suite dan Citra Indah	2	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
13	Depan Perumahan Bida Asri 2	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
14	Jl. Hang Kesturi (Depan Industri Taiwan)	2	0,1-0,5	0,5-1	3	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
15	Kantor Camat Nongsa	3	0,1-1	0,5-1	3	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
16	Perumahan Citra Mas Batu Besar	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
17	Kampung Mangga	2	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan pasang surut
18	Perumahan Green Nongsa City	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
19	Depan Kavling Senjulung (Dekat Tunas Kabil)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
20	Perumahan Kodim Batu Aji	2	0,1-1	0.5-2	3	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
21	Perumahan Sierra dan Masyeba Indah Batu Aji	2	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
22	Jl. Brigjen Katamso Depan PT. Asiatic Shipyard (Hyundai, Nippon Steel)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
23	Jl. Letjen Soeprapto (Depan Kantor Lurah Tembesi/Masjid Al Amin)	2	0,1-1	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
24	Belakang Gereja Mahanaim	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
25	Perumahan Tembesi Raya	1	0,1-1	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan

No.	Titik Banjir yang Ditangani	Wilayah Genangan				
		Luas	Tinggi	Lama	Frekuensi	Penyebab
		Ha	m	Jam/Hari	Kali/Th	
26	Jl. Pahlawan (Depan Aviari-RSUD Embung Fatimah)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil dan daerah cekungan
27	Perumahan Putri Tujuh	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
28	Jl. Raya Dapur 12 & Kav Mandiri Kec. Sagulung	1	0,1-0,5	0,5-1	1	Kapasitas saluran kecil
29	Jl. Menuju Jembatan I (Depan Mako Brimob Tembesi)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
30	Jalan Menuju Pelabuhan Rakyat Sagulung	1	0,1-0,5	0,5-1	1	Kapasitas saluran kecil
31	Kavling Melati	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
32	Depan Villa Muka Kuning	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
33	Kawasan Perumahan Taman Cipta Asri Tembesi	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
34	Belakang Sagulung Mall	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
35	Perumahan Anggara Sagulung Kota	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
36	Perumahan Puri Barata	2	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
37	Perumahan Devin Premier Marina	2	0,1-0,5	0,5-1	3	Daerah cekungan
38	Kawasan Industri Sekupang	1	0,1-0,5	0,5-1	1	Kapasitas saluran kecil
39	Perumahan Kartini Raya dan Pondok Pratiwi	3	0,1-0,5	0,5-1	3	Daerah cekungan dan Pasang Surut
40	Perumahan Graha Mas Marina	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
41	Komplek Rusunawa Tanjung Piayu/Kantor BPJN	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
42	Jl. S. Parman (depan Perum. Bida Ayu dan Bukit Kemuning)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil

Sumber: Dinas BMSDA Tahun 2021

Dalam konteks penanganan banjir secara permanen, langkah normalisasi, pelebaran dan penambahan drainase saja tidak cukup, Kota Batam perlu memiliki masterplan drainase yang menggambarkan ketentuan dan langkah intervensi terhadap jatuhnya air, dan akan dialirkan kemana air tersebut.Jika tidak memiliki masterplan, tatkala para pengembang memiliki izin mendirikan bangunan, maka drainase akan dibuat menggunakan aturan mereka sendiri. Sebagai ilustrasi, apabila perusahaan pengembangan membangun perumahan, jika pengembang tersebut tidak memiliki gambaran ketentuan drainase kota, maka mereka akan membangun drainase sendiri, mereka kemungkinan besar hanya akan menyambungkan antara kawasan, tidak *connected* dengan drainase

kota, ketika hal ini terjadi fenomena banjir sulit dihindari. Permasalahan banjir di Kota Batam perlu diselesaikan bersama-sama melibatkan *stakeholder* pembangunan dalam hal ini BP Batam, karena penyebab banjir bukan hanya terkait drainase, melainkan terkait aspek lain (perizinan lahan terhadap *cut and fill* yang tidak sesuai kaidah lingkungan, penutupan kolam retensi, dsb) yang bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam saja, melainkan juga melibatkan aspek yang menjadi kewenangan BP Batam, sehingga sinkronisasi kebijakan Pemko dan BP Batam sangat diperlukan dalam menangani permasalahan banjir ini.

Tabel 2. 53 Realisasi Indikator Kinerja Sumber Daya Air Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Panjang drainase yang dibangun/ ditingkatkan (m)	Target	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
		Realisasi	7.545	5.844	10.700	5.400	0
ii	Panjang drainase yang dipelihara (m)	Target	45.000	45.000	45.000	50.000	52.000
		Realisasi	45.000	45.000	48.000	50.000	52.000
iii	Panjang lokasi abrasi pantai yang ditangani (m)	Target	0	100	150	200	250
		Realisasi	0	100	333	90,2	0
Iv	Jumlah Peralatan	Target	6	6	4	4	3 unit
		Realisasi	1	6	4	4	3
v	Jumlah Peralatan dan Alat Berat Yang Dipelihara	Target	15	21	25	29	32 unit
		Realisasi	17	28	32	32	32

Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

Sedangkan untuk panjang lokasi abrasi pantai yang ditangani pada periode RPJMD 2016-2021 kebutuhannya adalah sepanjang 1.000 m sampai dengan tahun 2019 telah terealisasi sepanjang 523,2 m atau dengan pencapaian 52,32 persen terhadap target RPJMD 2016-2021. Lebih lanjut pada tahun 2019 dari target 200m hanya terealisasi 90,2 m dikarenakan pembangunan pengaman pantai menyesuaikan dengan kebutuhan teknis di lapangan.

C. Cipta Karya

Wilayah pengelolaan air minum di Kota Batam terbagi menjadi dua, yakni wilayah *mainland* yang dikelola oleh BP Batam melalui PT. ATB (sampai dengan

November 2020) dan PT. Moya Indonesia (mulai November 2020) sebagai operator air minum dan wilayah *hinterland* yang dikelola Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih. Untuk mengetahui kondisi pemenuhan air bersih di Kota Batam Tahun 2020 baik wilayah *mainland* maupun *hinterland* dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Berdasarkan Tabel 2.54 hingga tahun 2020 wilayah mainland telah terlayani air bersih dan sanitasi sebesar 98,80 persen dari total 265.752 rumah tangga di wilayah mainland, sehingga masih terdapat 3.189 rumah tangga yang belum terlayani air bersih dan sanitasi di wilayah mainland.

Sementara itu di wilayah hinterland yang menjadi kewenangan Pemko Batam, pada tahun 2020 terdapat 41,62 persen yang telah terlayani air bersih dari total 14.717 rumah tangga, atau masih terdapat 8.591 rumah tangga yang belum terlayani air bersih. Cakupan pelayanan berdasarkan kewenangan hanya meliputi lima kecamatan, yakni Belakang Padang, Bulang, Nongsa, Sagulung dan Galang. Sedangkan untuk sanitasi di wilayah hinterland sampai tahun 2020 hanya 10.74 persen yang telah memiliki sanitasi dari total 14.717 rumah tangga, atau masih terdapat 13.137 rumah tangga yang belum memiliki sanitasi. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah hinterland terdapat 22 water treatment plant /tampungan air baku (embung), 6 sambungan pipa bawah laut dari BP Batam ke pulau, 1 *Seawater Riverse Osmosis* (SWRO), dan 1 mata air (*Broncaptering*). Untuk mengetahui jumlah dan lokasi sambungan rumah air bersih serta sumbernya dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2. 54 Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Mainland dan Hinterland Kota Batam Tahun 2020

NO	NAMA KECAMATAN/ KELURAHAN		JUMLAH JIWA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA MAINLAND			JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA HINTERLAND			TOTAL PELAYANAN RUMAH TANGGA (KOTA BATAM)		BELUM TERLAYANI (HINTERLAND+MAINLAND)	
					JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH (SPAM Batam)	SANITASI	JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH	SANITASI	AIR BERSIH	SANITASI	AIR BERSIH	SANITASI
I	**BATU AMPAR**		**61,509**	**15,377**	**15,377**	**15,193**	**15,193**	**0**	**0**	**23**	**15,193**	**15,216**	**185**	**162**
	1	Tanjung Sengkuang	27,720	6,930	6,930	6,847	6,847	0	0	23	6,847	6,870	83	60
	2	Sungai Jodoh	12,738	3,185	3,185	3,146	3,146	0	0	0	3,146	3,146	38	38
	3	Batu Merah	7,971	1,993	1,993	1,969	1,969	0	0	0	1,969	1,969	24	24
	4	Kampung Seraya	13,080	3,270	3,270	3,231	3,231	0	0	0	3,231	3,231	39	39
II	**BELAKANG PADANG**		**20,385**	**5,096**	**0**	**0**	**0**	**5,096**	**3,519**	**682**	**3,519**	**682**	**1,577**	**4,414**
	5	Pemping	1,006	252	0	0	0	252	208	38	208	38	44	214
	6	Kasu	3,228	807	0	0	0	807	383	225	383	225	424	582
	7	Pulau Terong	3,364	841	0	0	0	841	464	130	464	130	377	711
	8	Pecong	945	236	0	0	0	236	236	41	236	41	0	195
	9	Tanjung Sari	5,624	1,406	0	0	0	1,406	920	n.a	920	n.a	486	n.a
	10	Sekanak Raya	6,218	1,555	0	0	0	1,555	1,304	248	1304	248	251	1,307
III	**SEKUPANG**		**145,424**	**36,356**	**36,356**	**35,920**	**35,920**			**94**	**35,920**	**36,014**	**436**	**342**
	11	Sungai Harapan	21,163	5,291	5,291	5,227	5,227	0	0	0	5,227	5,227	63	63
	12	Tanjung Pinggir	4,798	1,200	1,200	1,185	1,185	0	0	0	1,185	1,185	14	14

NO	NAMA KECAMATAN/ KELURAHAN		JUMLAH JIWA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA MAINLAND			JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA HINTERLAND			TOTAL PELAYANAN RUMAH TANGGA (KOTA BATAM)		BELUM TERLAYANI (HINTERLAND+MAINLAND)	
					JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH (SPAM Batam)	SANITASI	JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH	SANITASI	AIR BERSIH	SANITASI	AIR BERSIH	SANITASI
	13	Tanjung Riau	25,908	6,477	6,477	6,399	6,399	0	0	94	6,399	6,477	78	0
	14	Tiban Indah	22,134	5,534	5,534	5,467	5,467	0	0	0	5,467	5,467	66	66
	15	Tiban Baru	25,388	6,347	6,347	6,271	6,271	0	0	0	6,271	6,271	76	76
	16	Tiban Lama	21,086	5,272	5,272	5,208	5,208	0	0	0	5,208	5,208	63	63
	17	Patam Lestari	24,947	6,237	6,237	6,162	6,162	0	0	0	6,162	6,162	75	75
IV	**BULANG**		**11,420**	**2,855**	0	0	0	**2,855**	**1,154**	**215**	**1,154**	**215**	**1,701**	**2,640**
	18	Bulang Lintang	1,690	423	0	0	0	423	148	55	148	55	275	368
	19	Pulau Buluh	3,028	757	0	0	0	757	470	n.a	470	n.a	287	n.a
	20	Temoyong	1,474	369	0	0	0	369	83	n.a	83	n.a	286	n.a
	21	Batu Legong	1,140	285	0	0	0	285	44	25	44	25	241	260
	22	Pantai Gelam	1,082	271	0	0	0	271	153	65	153	65	118	206
	23	Pulau Setokok	3,006	752	0	0	0	752	256	70	256	70	496	682
V	**LUBUK BAJA**		**89,702**	**22,426**	**22,426**	**22,156**	**22,156**	**0**	**0**	**0**	**22,156**	**22,156**	**269**	**269**
	24	Kampung Pelita	9,403	2,351	2,351	2,323	2,323	0	0	0	2,323	2,323	28	28
	25	Lubuk Baja Kota	13,392	3,348	3,348	3,308	3,308	0	0	0	3,308	3,308	40	40
	26	Batu Selicin	16,548	4,137	4,137	4,087	4,087	0	0	0	4,087	4,087	50	50

NO	NAMA KECAMATAN/ KELURAHAN		JUMLAH JIWA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA MAINLAND			JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA HINTERLAND			TOTAL PELAYANAN RUMAH TANGGA (KOTA BATAM)		BELUM TERLAYANI (HINTERLAND+MAINLAND)	
					JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH (SPAM Batam)	SANITASI	JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH	SANITASI	AIR BERSIH	SANITASI	AIR BERSIH	SANITASI
	27	Tanjung Uma	24,624	6,156	6,156	6,082	6,082	0	0	0	6,082	6,082	74	74
	28	Baloi Indah	25,735	6,434	6,434	6,357	6,357	0	0	0	6,357	6,357	77	77
VI	**NONGSA**		**74,752**	**18,688**	**18,316**	**18,096**	**18,096**	**372**	**103**	**119**	**18,199**	**18,215**	**489**	**473**
	29	Sambau	11,310	2,828	2,828	2,794	2,794	0	0	0	2794	2,794	34	34
	30	Batu Besar	9,787	7,44	7,447	7,357	7,357	0	0	0	7,357	7,357	89	89
	31	Kabil	32,166	8,042	8,042	7,945	7,945	0	0	44	7,945	7,989	96	52
	32	Ngenang	1,489	372	0	0	0	372	103	75	103	75	269	297
VII	**SAGULUNG**		**191,083**	**47,771**	**45,699**	**45,151**	**45,151**	**2,072**	**431**	**92**	**45,582**	**45,243**	**2,189**	**2,528**
	33	Tembesi	41,430	10,358	8,286	8,187	8,187	2,072	431	92	8,618	8,279	1,740	2,079
	34	Sungai Binti	25,170	6,293	6,293	6,217	6,217	0	0	0	6,217	6,217	76	76
	35	Sungai Lekop	21,300	5,325	5,325	5,261	5,261	0	0	0	5,261	5,261	64	64
	36	Sagulung Kota	28,038	7,010	7,010	6,925	6,925	0	0	0	6,925	6,925	84	84
	37	Sungai Langkai	45,876	11,469	11,469	11,331	11,331	0	0	0	11,331	11,331	138	138
	38	Sungai Pelunggut	9,269	7,317	7,317	7,229	7,229	0	0	0	7,229	7,229	88	88
VIII	**BATU AJI**		**130,305**	**32,576**	**32,576**	**32,185**	**32,185**	**0**	**0**	**0**	**32,185**	**32,185**	**391**	**391**
	39	Tanjung Uncang	38,951	9,738	9,738	9,621	9,621	0	0	0	9,621	9,621	117	117
	40	Buliang	42,842	10,711	10,711	10,582	10,582	0	0	0	10,582	10,582	129	129

NO	NAMA KECAMATAN/ KELURAHAN		JUMLAH JIWA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA MAINLAND			JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA HINTERLAND			TOTAL PELAYANAN RUMAH TANGGA (KOTA BATAM)		BELUM TERLAYANI (HINTERLAND+MAINLAND)	
					JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH (SPAM Batam)	SANITASI	JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH	SANITASI	AIR BERSIH	SANITASI	AIR BERSIH	SANITASI
	41	Kibing	31,160	7,790	7,790	7,697	7,697	0	0	0	7,697	7,697	93	93
	42	Bukit Tempayan	17,352	4,338	4,338	4,286	4,286	0	0	0	4,286	4,286	52	52
IX	**BATAM KOTA**		**179,086**	**44,772**	**44,772**	**44,234**	**44,234**	**0**	**0**	**0**	**44,234**	**44,234**	**537**	**537**
	43	Baloi Permai	34,316	8,579	8,579	8,476	8,476	0	0	0	8,476	8,476	103	103
	44	Taman Baloi	22,642	5,661	5,661	5,593	5,593	0	0	0	5,593	5,593	68	68
	45	Teluk Tering	16,877	4,219	4,219	4,169	4,169	0	0	0	4,169	4,169	51	51
	46	Belian	73,989	18,497	18,497	18,275	18,275	0	0	0	18,275	18,275	222	222
	47	Sukajadi	5,482	1,371	1,371	1,354	1,354	0	0	0	1,354	1,354	16	16
	48	Sungai Panas	25,780	6,445	6,445	6,368	6,368	0	0	0	6,368	6,368	77	77
X	**BENGKONG**		**113,540**	**28,385**	**28,385**	**28,044**	**28,044**	**0**	**0**	**0**	**28,044**	**28,044**	**341**	**341**
	49	Bengkong Indah	21,441	5,360	5,360	5,296	5,296	0	0	0	5,296	5,296	64	64
	50	Bengkong Laut	19,654	4,914	4,914	4,855	4,855	0	0	0	4,855	4,855	59	59
	51	Sadai	36,884	9,221	9,221	9,110	9,110	0	0	0	9,110	9,110	111	111
	52	Tanjung Buntung	35,561	8,890	8,890	8,784	8,784	0	0	0	8,784	8,784	107	107
XI	**SEI. BEDUK**		**87,380**	**21,845**	**21,845**	**21,583**	**21,583**	**0**	**0**	**0**	**21,583**	**21,583**	**262**	**262**
	53	Muka Kuning	7,415	1,854	1,854	1,832	1,832	0	0	0	1,832	1,832	22	22
	54	Duriangkang	19,809	4,952	4,952	4,893	4,893	0	0	0	4,893	4,893	59	59

NO	NAMA KECAMATAN/ KELURAHAN		JUMLAH JIWA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA MAINLAND			JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA HINTERLAND			TOTAL PELAYANAN RUMAH TANGGA (KOTA BATAM)		BELUM TERLAYANI (HINTERLAND+MAINLAND)	
					JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH (SPAM Batam)	SANITASI	JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH	SANITASI	AIR BERSIH	SANITASI	AIR BERSIH	SANITASI
	55	Mangsang	39,460	9,865	9,865	9,747	9,747	0	0	0	9,747	9,747	118	118
	56	Tanjung Piayu	20,696	5,174	5,174	5,112	5,112	0	0	0	5,112	5,112	62	62
XII	**GALANG**		**17,289**	**4,322**	**0**	**0**	**0**	**4,322**	**919**	**355**	**919**	**355**	**3,403**	**3,967**
	57	Sijantung	1,932	483	0	0	0	483	0	n.a	0	0	483	483
	58	Karas	2,708	677	0	0	0	677	0	84	0	84	677	593
	59	Galang Baru	3,047	762	0	0	0	762	0	n.a	0	0	762	762
	60	Sembulang	3,054	764	0	0	0	764	200	20	200	20	564	744
	61	Rempang Cate	3,570	893	0	0	0	893	160	40	160	40	733	853
	62	Subang Mas	789	197	0	0	0	197	90	41	90	41	107	156
	63	Pulau Abang	1,575	394	0	0	0	394	298	132	298	132	96	262
	64	Air Raja	614	154	0	0	0	154	154	38	154	38	0	116
Jumlah Rumah Tangga			**1,121,875**	**280,469**	**265,752**	**262,562**	**262,562**	**14,717**	**6,126**	**1,580**	**268,688**	**264,142**	**11,780**	**16,326**
Jumlah Jiwa Terlayani			**-**	**-**	**-**	**1,050,250**	**1,050,250**	**-**	**24,504**	**7,900**	**1,074,754**	**1,058,150**	**47,121**	**63,725**
Persentase Terlayani			**-**	**-**	**-**	**98.80%**	**98.80%**	**-**	**41.62%**	**10.74%**	**95.80%**	**94.18%**	**4.20%**	**5.82%**

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Tabel 2. 55 Sambungan Rumah Air Bersih Kota Batam Tahun 2020

No	Nama WTP/Unit Pelayanan	Jumlah SR	Jumlah Jiwa	Lokasi	Ket
1	Belakang Padang	1.182	4.728	Belakang Padang	Waduk Dan Tadah Hujan
2	Bulang Lintang	221	884	Bulang Lintang, Bulang	Waduk Dan Tadah Hujan
3	Geranting	195	780	Pulau Geranting, Belakang Padang	Waduk Dan Tadah Hujan
4	Ngenang	103	412	Ngenang Nongsa	Waduk Dan Tadah Hujan
5	Pulau Abang	276	1104	Pulau Abang, Galang	Waduk Dan Tadah Hujan
6	Pulau Air Raja	151	604	Pulau Air Raja, Galang	Waduk Dan Tadah Hujan
7	Pulau Bertam	183	732	Air Gara Dan Bertam Belakang Padang	Waduk Dan Tadah Hujan
8	Pulau Buluh	542	2168	Pulau Buluh Bulang	BP. Batam
9	Pulau Jaloh	229	916	Pulau Jaloh Bulang	Waduk Dan Tadah Hujan
10	Pulau Kasu	209	836	Pulau Kasu Belakang Padang	Waduk Dan Tadah Hujan
11	Pulau Mecan	268	1072	Pulau Mecan Belakang Padang	Waduk Dan Tadah Hujan
12	Pulau Pecung	240	960	Pulau Pecung, Belakang Padang	Waduk Dan Tadah Hujan
13	Pulau Pemping	206	824	Pulau Pemping Belakang Padang	Waduk Dan Tadah Hujan
14	Pulau Temoyong	159	636	Pulau Temoyong bulang	Waduk dan Tadah Hujan
15	Pulau Terong	271	1084	Pulau Terong Belakang Padang	Waduk dan Tadah Hujan
16	Rempang Cate	137	548	Rempang Cate Galang	Waduk dan Tadah Hujan
17	Sembulang	80	320	Kuala Buluh, Galang	Tangkapan Air
18	Setokok	108	432	Pulau Setokok Bulang	Waduk dan Tadah Hujan
19	Subang Mas	68	272	Pulau Subang Mas Galang	Waduk dan Tadah Hujan
20	SWRO Belakang Padang	768	3.072	Belakang Padang	Air Laut
21	Tanjung Banun	98	392	Tanjung Banun Galang	Waduk dan Tadah Hujan
22	Tiangwangkang	432	1.728	Tiangwangkang	BP. Batam
J U M L A H		**6.126**	**24.504**		

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Untuk mengetahui kinerja cipta karya dapat dilihat pada Tabel 2.56 Indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman sejak tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan dan mencapai target tahunannya, meskipun peningkatan tahunannya tidak signifikan. Pada tahun 2016 tercatat 29 persen, kemudian tiga tahun meningkat menjadi 41,62 di tahun 2020.

Sementara itu indikator penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai setiap tahun mencapai target dan selalu meningkat meskipun demikian capaiannya masih masuk kategori minim. Tahun 2016 hanya sebesar 2,40 persen dan meningkat menjadi 10,74 persen di tahun 2020. Peningkatan indikator ini sangat kecil karena seluruh anggaran hanya mengandalkan DAK, sehingga target menyesuaikan dengan anggaran. Namun demikian kondisi minimnya pelayanan sistem air limbah di level rumah tangga sangat berpotensi mengganggu kesehatan warga, sehingga kedepan perlu kerja keras untuk memberi solusi pencarian alternatif anggaran untuk sistem air limbah di wilayah hinterland.

Tabel 2. 56 Indikator Cipta Karya Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
I	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Target	29	31,37	33,18	37,29	39,55
		Realisasi	29	31,37	35,78	39,04	41,62
II	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Target	2,40	3,40	4,74	8,4	10,10
		Realisasi	2,40	3,40	7,6	9,18	10,74

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Permasalahan kekurangan air minum di Kota Batam telah menjadi ancaman bagi kelangsungan kegiatan perekonomian masyarakat, terutama sektor industri manufaktur, pariwisata perdagangan dan jasa. Kemarau yang panjang dan berkurangnya jumlah hari hujan menjadi penyebab penurunan intensitas hujan dan berimplikasi terhadap kelangkaan air di Kota Batam, sementara itu jenis permukaan tanah yang sulit menyerap air juga menjadi persoalan tidak adanya harapan untuk air tanah. Saat ini sebagian besar sumber air bersih berasal dari

Water Treatment Plant (waduk, embung) penampung air hujan yang tentu sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, jika memasuki kemarau praktis jumlah debit berkurang drastis dan muncul ancaman kelangkaan air bersih. Beberapa pelanggan terpaksa mengalami penggiliran air bersih. Selain itu terjadi pula pencemaran pada waduk akibat perilaku masyarakat yang tidak disiplin dalam membuang sampah, tentu hal ini menyebabkan pencemaran air di Kota Batam.

Gambar 2. 64 Infografis Kondisi Air Bersih Kota Batam
Sumber: batampos.co.id

Untuk mengatasi kekeringan di waduk, dilakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan bantuan Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dengan penyemaian menggunakan pesawat Piper Cheyenne PK TMC dari dengan menyemai batang flarehigroskopis. Namun langkah ini merupakan solusi jangka pendek, kendala utama adalah area terbang di sekitar wilayah target waduk utama (waduk Duriangkang) sebagian masuk wilayah penerbangan Singapura, secara *traffic* cukup padat jadwal penerbangan masuk dan keluar Singapura. Sehingga pesawat BPPT hanya diijinkan terbang di bawah ketinggian 6.000 ribu kaki.

Sementara itu selain menampung air hujan kedalam waduk, sumber air bersih di Kota Batam bersumber dari air laut, yakni dengan mengubah air laut menjadi air tawar dengan teknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO). Cara ini terbukti sangat efektif di beberapa negara maju menjadi alternatif sumber air bersih, namun biaya investasi yang tinggi mengakibatkan jumlah SWRO di Kota Batam sulit ditambah. Adapun sumber air bersih lainnya adalah mata air (*broncaptering*), namun demikian jumlah mata air sangat sedikit dan debit airnya terbatas.

Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, idealnya Kota Batam bersama-sama dengan BP Batam menyusun masterplan penyediaan dan pengelolaan air minum yang memuat secara rinci uraian permasalahan dan solusi terkait hal tersebut. Adapun alternatif solusi untuk penyediaan air bersih di Kota Batam, yang terbukti berhasil digunakan oleh negara-negara maju dapat dipertimbangkan, antara lain:

1. Daur Ulang Air Limbah (*Water Recycle*)

   Daur ulang air limbah adalah memanfaatkan air bekas pakai baik air limbah rumah tangga maupun industri untuk kemudian air limbah tersebut didaur ulang menjadi steril dan higienis. Teknologi daur ulang menggunakan membran dan teknologi ultraviolet untuk mengubah air kotor menjadi bersih. Cara ini telah dipakai oleh Singapura sejak tahun 1970an dan kualitas air yang dihasilkan telah diakui oleh WHO. Sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alternatif sumber air bersih di Kota Batam.

2. Desalinasi

   Proses ini disebut desalinasi atau pemurnian air dari kadar garam. Cara ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam untuk pelayanan air bersih di hinterland menggunakan SWRO Belakang Padang. Namun demikian biaya investasi cukup tinggi, maka perlu dipikirkan untuk membuat skema *co benefit*, artinya dalam proses desalinasi air laut menjadi air tawar terdapat *reject water* yang dapat diproses menjadi garam, sehingga biaya penjualan air kepada masyarakat dapat ditekan karena ada produk garam yang bernilai

ekonomi sebagai turunan dari proses desalinasi air laut. Dalam konteks ini garam yang dihasilkan dapat digunakan bagi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri, serta mendukung program peningkatan produksi garam nasional. Dalam perspektif ke depan, kedua alternatif ini perlu difikirkan, dikembangkan dan ditindaklanjuti, terutama skema kerjasama, investasi dan manajemen operasionalnya.

D. Tata Ruang

Kinerja tata ruang diukur melalui indikator-indikator yang terdapat pada Tabel 2.57. Indikator ketersediaan dokumen tata ruang sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dan mencapai target tahunannya. Pada tahun 2017 tercatat 88 dokumen, kemudian meningkat menjadi 297 di tahun 2020. Dalam konteks ini dokumen tata ruang yang dimaksud adalah surat keterangan rencana kota (SKK) atau kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon untuk memanfaatkan ruang publik/privat di Kota Batam. Dalam hal ini rekomendasi atas SKK dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Idealnya pada periode ke depan perlu dirumuskan ukuran kinerja level outcome yang lebih *clear*, disertai dengan definisi operasional dan rumus perhitungan yang konkret, sehingga dapat benar-benar merepresentasikan kemanfaatan dari output-output kegiatan yang telah dilakukan.

Tabel 2. 57 Indikator Kinerja Tata Ruang Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah dokumen Rencana detail tata ruang Kota Batam	Target	-	1 Kec	3 Kec	4 Kec	4 Kec
		Realisasi		0 kec	0 kec	7 kec	0 kec
2	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan	Target	665 (kondisi akhir 2016)	249	349	301	453 bangunan
		Realisasi		276 bangunan	296 bangunan	560 bangunan	780 bangunan
3	Mesjid Agung	Target	0	0	0	1	0
		Realisasi	0	0	0	1	0
4	Ketersediaan dokumen Tata Ruang dan Kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang (dok)	Realisasi	0	88	273	343	297
5	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan tiap tahun (bangunan)	Realisasi	665	240	250	508	765
6	Penyelenggaraan Bangunan Gedung (unit)	Realisasi	8	36	46	52	14

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Untuk indikator jumlah bangunan gedung yang dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan sejak tahun 2016-2020 tiap tahunnya selalu mencapai target, bahkan di tahun 2020 jauh melampaui target, realisasi sebesar 765. Namun demikian indikator ini kurang tepat/misleading dalam menggambarkan kinerja tata ruang, karena angka realisasi 765 adalah total bangunan dan menara yang diawasi, seharusnya angka yang ditampilkan adalah bangunan/menara yang sesuai dengan standar. Idealnya pada periode ke depan perlu dirumuskan ukuran kinerja *outcome* yang lebih *clear*, disertai dengan definisi operasional dan rumus perhitungan yang konkret, sehingga dapat benar-benar merepresentasikan kemanfaatan dari output-output kegiatan yang telah dilakukan. Dalam perspektif ke depan, melakukan pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan gedung, laik fungsi, dan pengawasan terhadap menara perlu dilakukan dengan menggunakan teknologi, sehingga kegiatan pengawasan lebih efektif dan efisien serta data pengawasan lebih valid, akurat dan transparan. Hal ini juga sebagai upaya kontribusi terhadap peningkatan penerimaan retribusi Kota Batam. Lebih lanjut

uraian rekapitulasi data pengawasan bangunan dan menara disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 58 Rekapitulasi Pengawasan Bangunan dan Menara Tahun 2020

No	Uraian	Jenis Bangunan/Menara	Jumlah	Ket
1	Pengawasan Bangunan Gedung	Rumah Tinggal, Ruko, Workshop/Gudang, sekolah	20	Tidak Memiliki IMB
2	Pengawasan Menara Telekomunikasi	Green Field, Roof Top, Monopole, Self Supporting Tower, Mini Tower, Micro Cell Pole	209	Tidak Memiliki IMB, Jangka waktu IMB Habis,
3	Rekomendasi Titik Menara	Green Field, Roof Top, Monopole, Self Supporting Tower, Mini Tower, Micro Cell Pole	63	Pengajuan Titik Baru
4	Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Seluruh Jenis Bangunan Gedung	473	Untuk Kelayakan Fungsi Bangunan
J U M L A H			765	

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Kemudian untuk kinerja indikator penyelenggaraan bangunan gedung merupakan pembangunan bangunan gedung negara yang diajukan oleh dinas lain. Sehingga target dan realisasi bergantung pada permintaan pembangunan gedung. Selama periode 2016-2020 dapat kita ketahui bahwa 156 bangunan gedung negara telah diselesaikan.

Untuk penanganan banjir secara permanen, perlu *masterplan* drainase yang berisi ketentuan dan intervensi terhadap jatuhnya air (akan dialirkan kemana air tersebut); perlu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan dengan BP Batam terkait upaya penanganan banjir secara permanen, karena penyebab banjir bukan hanya drainase, melainkan banyak hal lain yang menjadi kewenangan BP Batam (contoh izin pengalokasian lahan dan *cut and fill* yang dapat mengakibatkan banjir);

2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Hasil kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman selama tahun 2016 hingga tahun 2019 direpresentasikan oleh indikator kinerja pada Tabel 2.59. Selanjutnya pembahasan masing-masing indikator kinerja disampaikan pada paragraf selanjutnya dengan mengacu pada tabel bawah ini.

Tabel 2. 59 Realisasi Kinerja Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT						
	Data BDT (Jumlah Penerima RTLH)		39.129	37.996	37.393	36.402	35.397
	Bantuan RTLH melalui DAK (jumlah rumah)		52	476	188	190	355
	Bantuan RTLH melalui Satker SNVT Penyediaan Rumah/Kemen PUPR (jumlah rumah)		420	557	300	751	600
	Bantuan RTLH melalui Dinsos/APBD (jumlah rumah)		300	100	115	50	50
	Jumlah		772	1.133	603	991	1.005
	Persentase penurunan RTLH		1,93	4,77	6,29	9,00	11,30
	Jumlah perumahan swadaya yang dibangun/direhabilitasi	Target (unit)	104	478	502	527	553 unit
		Realisasi	772	1133	603	991	1005
ii	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman didukung dengan PSU di wilayah Perkotaan		62,27	71,49	77,16	87,38	89,08
	Panjang Drainase/saluran lingkungan yang perlu dibangun/direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan	Target (m')	13.525	14.145	14.852	15.595	16.375
		Realisasi	19.740	19.740	22.830	20.131	2.997,70
	Jumlah Bangunan Rusunawa & PSU Rusunawa yang dibangun/direhabilitasi	Target (TB)	25	5	5	5	5
		Realisasi	25 TB	5 TB	5 TB	5 TB	3 TB
	Pengembangan dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Target (Kel)	64	64	64	64	64
		Realisasi	63	63	62	62	62
	Panjang Jalan lingkungan yang perlu dibangun/direhabilitasi serta dipelihara di kawasan permukiman perkotaan	Target (m')	109.802	20.250	21.263	22.326	23.442
		Realisasi	25.943	25.472	37.428	32.859	2.492,92
	Panjang Pembangunan/Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong Permukiman dan Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan	Target (m')	3,755	1,251	1,314	1,380	1,449
		Realisasi	1.500	869	1.625	1.444	0
iii	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman didukung dengan PSU di wilayah hinterland		62,025	68,35	74,68	79,74	82,87
	Panjang drainase/ saluran lingkungan panjang jalan lingkungan, panjang turap/ talud/ bronjong di wilayah hinterland	Target (m')	3.970	4.795	6.795	8.795	10.795
		Realisasi	2.030	2.475	150	750	1.490
iv	Persentase luas ruang terbuka hijau kota dalam kondisi terpelihara		2,31	2,31	2,31	2,46	2,85
	Luasan Ruang Terbuka Hijau	Target (%)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
		Realisasi	0.2	0	0.2	0.2	0.2
	Kawasan Pemakaman yang dikelola	Target (kawasan)	2	2	2	2	2
		Realisasi	2	2	2	0	0
	Jumlah ruang terbuka hijau/publik yang dibangun/ditingkatkan	Target (lokasi)	12 (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	12 (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	12 (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	12 (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	12 (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)
		Realisasi	12 (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	12 (8 Lokasi Lama dan 4 Lokasi Baru)	10 (8 Lokasi Lama dan 2 Lokasi Baru)

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

A. Perumahan

Dalam mengurangi rumah tidak layak huni Kota Batam, data yang digunakan berasal dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Data tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga perlu dilakukan identifikasi ulang untuk memastikan validitasnya, karena pada saat verifikasi di lapangan ditemukan ketidaksesuaian data antara sasaran penerima bantuan RTLH dengan kriteria penerima RTLH. Selanjutnya untuk penyelesaian rumah tidak layak huni (RTLH) digunakan indikator persentase penurunan RTLH, berdasarkan Tabel2.54 selama tahun 2016 hingga tahun 2020 telah terdapat 4.505 RTLH yang telah ditangani dari total 39.901 (*baseline 2015*).

Selama Tahun 2016-2020 pengurangan RTLH di Kota Batam dilakukan oleh dua instansi, yakni Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam(Perkimtan) serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos), sedangkan pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD. Sumber pembiayaan dari APBN menggunakan skema DAK yang dikelola Dinas Perkimtan dan skema yang dikelola oleh Satuan Kerja Non Vertikal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR (SNVT), keduanya menyasar untuk mengurangi jumlah RTLH. Kemudian untuk pembiayaan yang sumber dari APBD dikelola oleh Dinsos Kota Batam. Salah satu permasalahan dalam pengurangan RTLH adalah terbatasnya sumber pembiayaan sementara kebutuhan akan bantuan RTLH sangat tinggi, sehingga penerima bantuan RTLH harus benar-benar tepat sasaran.

Lebih lanjut dalam menangani persoalan perumahan, sejak tahun 2001 Kota Batam menyediakan hunian vertikal (rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2013 MBR di Kota Batam berjumlah 36.305 KK. Pemilihan lokasi rusunawa bagi MBR di kawasan padat dan kumuh perkotaan diarahkan pada lokasi-lokasi atau kawasan-kawasan yang potensial dikembangkan sebagai kawasan atau lokasi industri, perniagaan dan jasa.

Tabel 2. 60 Jumlah Rusun di Kota Batam s.d. Tahun 2020

No	Pengelola	Jumlah Blok	Tipe	Unit	Lokasi	Tahun Pembangunan
1	Perumnas	4 TB	21	384	TJ PIAYU	2001 s.d. 2002
2	Perumnas	1 TB	21	96	TJ PIAYU	2007 s.d. 2009
3	BPJS	6 TB	21	576	BT AMPAR	2001 s.d. 2003
4	BPJS	1 TB	21	96	MK KUNING	2008 s.d. 2009
5	BPJS	10 TB	27	1.000	KABIL	2009 s.d. 2011
6	BP	4 TB	21	384	BT AMPAR	2003 s.d. 2004
7	BP	9 TB	21	864	MK KUNING	2004
8	BP	4 TB	21	384	SEKUPANG	2004 s.d. 2006
9	BP	2 TB	27	160	KABIL	2009
10	BP	2 TB	27	170	KABIL	2010 s.d. 2011
11	BP	1 TB	27	80	KABIL	2009
12	BP	2 TB	27	160	KABIL	2011
13	BP	2 TB	36	88	TJ UNCANG	2017 s.d. 2018
14	PEMKO	2 TB	27	160	MK KUNING	2003 s.d. 2004
15	PEMKO	2 TB	27	160	MK KUNING	2008 s.d. 2009
16	PEMKO	2 TB	27	160	TJ UNCANG	2009 s.d. 2010
17	PEMKO	2 TB	27	178	TJ UNCANG	2010 s.d. 2011
18	PEMKO	1 TB	27	80	MK KUNING	2006 s.d. 2007
19	PEMKO	4 TB	24	396	TJ UNCANG	2011 s.d. 2012
20	PEMKO	2 TB	24	192	MK KUNING	2008 s.d. 2009
21	PEMKO	4 TB	24	384	SEKUPANG	2007 s.d. 2008
22	PEMKO	2 TB	27	160	TJ UNCANG	2009 s.d. 2010
23	PEMKO	4 TB	24	384	TJ UNCANG	2011 s.d. 2012
24	PEMKO	2 TB	24	192	TEMBESI	2012 s.d. 2013
25	PEMKO	3 TB	24	297	MK KUNING	2013 s.d. 2014
26	REI	2 TB	21&36	192	BTM CENTER	2008 s.d. 2009
	JUMLAH	**80 TB**		**7.365**		

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Hingga saat ini kebutuhan pembangunan rusunawa di Kota Batam berdasarkan analis data yang diperoleh yaitu jumlah tenaga kerja lokal (WNI) di Batam tahun 2019 sebesar 593.737 orang, dengan persentase pertumbuhan tenaga kerja lokal (WNI) tahun 2020 sebesar 1,06%. Perkiraan jumlah tenaga kerja lokal (WNI) yang masih belum memiliki tempat tinggal sendiri/termasuk penghuni rumah liar (Ruli) sebesar 69.300 orang, dengan probabilitas 40% tenaga kerja lokal (WNI) yang sudah berkeluarga sebesar 27.720 orang/kepala keluarga, atau jumlah

tersebut dibutuhkan untuk 1 kepala keluarga untuk 1 satuan rumah susun (sarusun), dan 60% tenaga kerja lokal (WNI) yang belum berkeluarga sebesar 41.580 orang/kepala keluarga dan atau jumlah tersebut dibutuhkan untuk 4 orang untuk 1 unit sarusun, sehingga jumlah yang dibutuhkan unit *twin block* rusunawa yang dibutuhkan dengan tipe 36 sekitar 513 *twin block* dan untuk keluarga dan dengan tipe 27 untuk yang belum berkeluarga sekitar 105 *twin block*.

Tabel 2. 61 Data Hunian Kota Batam

Jumlah WNI 2017	Jumlah WNI 2019	Persentase Pertumbuhan	WNI belum punya tempat tinggal (Berkeluarga)	Berkeluarga /Twin Blok	WNI belum punya tempat tinggal (Belum Berkeluarga)	Belum Berkeluarga /Twin Blok
558,154	593,737	1,06%	27,720	513	41,580	105

Sumber: Badan Pusat Statistik (Batam dalam Angka Tahun 2020)

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan hunian yang perlu diselesaikan dengan penyediaan rusunawa dari jumlah kebutuhan 618 *twin block* dengan target hunian sebesar 35.010 unit sarusun, yang sudah terealisasi hanya 80 twin blok/7.361 unit sarusun di kota batam, masih membutuhkan 538 *twin block* yang belum terealisasi dengan persentase 78,97%, dan untuk kebutuhan yang harus disediakan untuk alternatif hunian MBR sebesar 87,05%.

Tabel 2. 62 Kebutuhan Hunian di Kota Batam

Hunian kebutuhan saat ini	Twin Blok	Target Hunian	Target Twin Blok	Twin Blok Yang dibutuhkan	Persentase Hunian belum terealisasi	kebutuhan yang harus disediakan untuk alternatif hunian MBR
7,361	80	35,010	618	538	78,97%	87,05%

Sumber: Badan Pusat Statistik (Batam dalam Angka Tahun 2020)

Untuk memenuhi kebutuhan rusunawa yang ada di Kota Batam masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yakni:

1. *Kepemilikan Lahan*. Pemerintah Kota Batam tidak mempunyai wewenang terkait lahan yang ada di Kota Batam dikarenakan wewenang urusan lahan di

Kota Batam dipegang kendali oleh BP Kawasan selaku pemegang lahan di Kota Batam.

2. *Titik Lokasi yang Representatif untuk Pembangunan Rusunawa*. Lahan yang berada di Kota Batam saat ini lebih banyak pengembangannya jauh dari pusat kota dan lokasi industri, sehingga daya minat masyarakat untuk menetap di rusunawa sangat minim.
3. *Keterbatasan Dana APBD Kota Batam*. Dalam perspektif kedepan penting perlu difikirkan mencari pembiayaan selain APBD, dapat melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Swasta, PPP atau memanfaatkan dana CSR internasional dalam skema *governmentto government* yang sangat mungkin dilakukan.

B. Kawasan Kumuh

Berdasarkan Tabel 2.59 untuk indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU di wilayah perkotaan (*mainland*) dan wilayah *hinterland* selama kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan dan didominasi realisasi mencapai target setiap tahunnya. Untuk wilayah perkotaan pada tahun 2016 tercatat 62,27 persen, kemudian meningkat menjadi 89,08 persen di tahun 2020. Sementara untuk wilayah hinterland kondisinya sedikit tertinggal dibandingkan wilayah mainland, pada tahun 2016 tercatat 62,025 persen kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 82.27 persen.

Dalam perspektif pengurangan kawasan permukiman kumuh, kedua indikator di atas (Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU di wilayah perkotaan dan *hinterland*) secara langsung berkontribusi terhadap pengurangan kawasan permukiman kumuh di Kota Batam.

Upaya penanganan kawasan kumuh Kota Batam dilakukan melalui kegiatan yang ada pada Bidang Permukiman berfokus pada pemenuhan sarana prasarana dasar permukiman seperti Jalan Lingkungan, Drainase, Batu Miring baik *hinterland* maupun *mainland*. Selain itu dilakukan pula percepatan pembangunan

infrastruktur permukiman kumuh dengan program PM-PIK yang dilakukan seluruh Kota Batam yang terdiri dari 62 Kelurahan yang termasuk didalamnya wilayah delineasi permukiman kumuh bersama Satuan Kerja Kota Tanpa Kumuh (Satker KOTAKU). Adapun anggaran yang menopang program dan kegiatan tersebut berasal dari APBN dan APBD Kota Batam.

Selain itu untuk memaksimalkan penanganan kawasan kumuh yang ada di Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya yakni Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Kawasan Permukiman di Kota Batam yang bersumber dari anggaran APBD Provinsi, khususnya yang termasuk kawasan delineasi permukiman kumuh.

Upaya penanganan kawasan kumuh sebenarnya berawal pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang menjadi salah satu prioritas Kota Batam sebagaimana tertuang pada RPJMD yang ada sehingga dampak pada realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut mempengaruhi berkurangnya total kawasan kumuh yang ada. Lebih lanjut, realisasi indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan Prasarana Sarana Umum (PSU) di wilayah perkotaan (*mainland*) dan wilayah *hinterland* mampu berkontribusi dalam menangani masalah infrastruktur permukiman yang ada bahkan pengurangan luasan kawasan kumuh menjadi layak dan permukiman yang ada tumbuh menjadi lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan prasarana sarana utilitas yang memadai baik di wilayah *mainland* (perkotaan) maupun *hinterland* (pesisir).

Berdasarkan SK Wali Kota Batam Nomor: KPTS 68/HK/I/2015 tentang Penetapan Lokasi-Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam, luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Batam adalah seluas 178 Ha atau 0,0016 persen dari total luas wilayah darat (1087,78 Km^2), yang tersebar di 10 Kelurahan yaitu sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 63 Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam

No	Kawasan	Luas (Ha)	Kelurahan	Kecamatan	Tingkat Kumuh
1.	Tanjung Piayu	10,15	Tanjung Piayu	Sei Beduk	Sedang
2.	Mangsang	34	Mangsang	Sei Beduk	Sedang
3.	Nusa Jaya - Bukit Berbunga	5,37	Duriangkang	Sei Beduk	Sedang
4.	KSB Sei. Lekop	11	Sei. Lekop	Sagulung	Sedang
5.	KSB Sei. Pelunggut	56,47	Sei. Pelunggut	Sagulung	Sedang
6.	KSB Kabil	28	Kabil	Nongsa	Sedang
7.	Tiban Kampung	10	Tiba Lama	Sekupang	Sedang
8.	Bengkong Palapa	6,5	Tanjung Buntung	Bengkong	Sedang
9.	Bengkong Sadai	10	Sadai	Bengkong	Sedang
10.	Tanjung Sengkuang	6,5	Tanjung Sengkuang	Batu Ampar	Sedang
	Total	178			

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Pada tahun 2016 dilakukan reviu dan dilakukan pemutakhiran Data Kawasan Kumuh Kota Batam terhadap SK Wali Kota Batam Nomor: KPTS 68/HK/I/2015 oleh Tim KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) melalui survei lapangan. Hasil pemutakhiran data tersebut dituangkan dalam bentuk SK Wali Kota Batam Nomor: KPTS.393/HK/XII/2017 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam sebagaimana tertuang pada rekapitulasi realisasi pengurangan kawasan kumuh berikut.

Tabel 2. 64 Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Batam hingga Tahun 2020

No	Lokasi	SK 2019	Luasan Kumuh 2021	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh (Ha)				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	Batam Kota	33,28	21,61	0	0,00	0,00	166,22	11,67
2	Batu Aji	113,00	69,20	0	0,00	0,00	25,50	43,8
3	Batu Ampar	97,51	88,20	0	3,35	2,75	45,94	9,31
4	Belakang Padang	312,79	312,79	0	0,00	0,00	0,00	0
5	Bengkong	98,24	49,90	0	7,06	9,59	125,58	48,34
6	Bulang	223,61	223,61	0	0,00	0,00	0,00	0
7	Galang	317,37	317,37	0	0,00	0,00	0,00	0
8	Lubuk Baja	32,20	10,50	0	0,00	0,00	45,21	21,7
9	Nongsa	186,30	171,01	0	14,37	13,72	10,44	15,29
10	Sagulung	90,70	75,14	0	40,47	19,56	77,81	15,56
11	Sei Beduk	29,18	12,59	0	24,84	24,03	8,56	16,59

No	Lokasi	SK 2019	Luasan Kumuh 2021	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh (Ha)				
				2016	2017	2018	2019	2020
12	Sekupang	93,21	78,54	0	2,28	8,23	39,20	14,67
	Jumlah	**1.627,39**	**1.430,46**	**0**	**92,37**	**77,88**	**544,46**	**196,93**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Realisasi penanganan kawasan kumuh baru terlihat pada tahun 2017, setelah dilakukan pemutakhiran data kawasan kumuh, dari jumlah 2.327,11 Ha terealisasi 92,37 Ha. Pada tahun 2018 masih mengacu pada SK Wali Kota Tahun 2017 dengan hasil 77,88 Ha, sedangkan tahun 2019 realisasinya tercapai 544,46 Ha dari data kawasan kumuh Kota Batam Tahun 2017 sehingga capaian pengurangan kawasan kumuh hingga 2019 adalah 714,71 Ha dari tahun 2017. Tahun 2020 capaian pengurangan kumuh sebesar 196,93 Ha sehingga sisa luasan kawasan kumuh untuk tahun 2021 adalah 1.430,46 Ha dari total kawasan kumuh yang ada1.627,39 Ha.

C. Ruang Terbuka Hijau

Luasan wilayah RTH Publik yang tersedia di wilayah Kota Batam sesuai aturan seluas 10.912,32 Ha didapat dari 20% dari Luas daratan 103.884 Ha dikurangi luas hutan 49.322,42 Ha. Luas RTH yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batam adalah 259,51 Ha didapat dari 107,34 Ha Taman Kota dan Taman Ruas Jalan ditambah 66,51 Ha Luas Taman ROW Jalan ditambah 85,66 Ha Kebun Raya sehingga persentase 259,51 Ha/10.912,32 Ha sebesar 2,38%. Adapun luas RTH Publik berdasarkan dari luas area terbangun yang ada di Perda RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041 adalah 5.229 Ha, sehingga persentase RTH yang dikelola/dipelihara menjadi 259,21 Ha/5.229 Ha sebesar 4,96%.

Nilai target 2,31% sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.61 capaian indikator Persentase luas ruang terbuka hijau kota dalam kondisi terpelihara 2016-2019 diperoleh dari target luas RTH yang dipelihara sebesar 106,12 Ha Taman Kota dan Taman Ruas Jalan Utama ditambah 59,75 Ha luas Taman ROW Jalan Lokal ditambah 85,66 Ha Kebun Raya kemudian dibagi RTH Publik 10.912,32 Ha. Target

yang ditetapkan tersebut merupakan kondisi eksisting ruang terbuka hijau yang dipelihara oleh Bidang Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam. Target 2.31% merupakan bagian dari 20% Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batam yang dibagi menjadi 3 wilayah kewenangan yaitu wilayah pemeliharaan Pemerintah Kota Batam, wilayah pemeliharaan BP Kawasan dan wilayah pemeliharaan Satuan Kerja Jalan Nasional.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus tersedia sebesar 30%. Untuk pencapaioan target 30% ini dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi yang berkompeten untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut seperti BP Kawasan, Pemerintah Kota Batam dan pihak *private* baik swasta maupun instansi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap wilayah kerja masing-masing. Sedangkan untuk Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sendiri, selama ini program dan kegiatan yang ada khususnya Bidang Pertamanan dan Pemakaman tidak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan akuisisi lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selama ini yang dilakukan hanya kegiatan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting sesuai wilayah kerja. Untuk itu pemenuhan kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 20% tidak dapat terpenuhi. Untuk wilayah yang dikelola Pemerintah Kota Batam selama ini adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 65 Taman Aktif Kota Batam

NO	LOKASI	PANJANG PEDESTRIAN	LUAS (M^2)	URAIAN
1	Dataran Engku Putri	900 M	55.981	Taman sering dipakai untuk kegiatan PEMKO BATAM dan hiburan rakyat dengan luas 5,6 Ha, difasilitasi dengan berbagai sarana seperti Lapangan Bola Basket, Zona Internet, Arena Gym, Joging, Arena Skate Board, Rolerblade dan Berbagai Jenis Pohon Pelindung dan tanaman hias.
2	Taman Aspirasi Batam Centre	200 M	3.358	Taman aktif dengan berbagai tanaman dan fasilitas layar proyektor
3	Taman Seputaran DPRD, Bundaran dan Masjid Agung	1100 M	6.657	Taman rekreasi yang rekomendasi bagi pengunjung luar kota yang ramai di kunjungi pada sore hari dengan latar

NO	LOKASI	PANJANG PEDESTRIAN	LUAS (M^2)	URAIAN
				bukit clara (WELCOME TO BATAM), bangku taman.
4	Taman Kolam Batam Centre	200 M	3.019	Taman Rekreasi dengan berbagai tanaman dan ornamen hias dengan latar kolam yang menyejukan mata.
5	Taman Gajah Mada (Taman Tuan Putri)	900 M	14.318	Taman ramai dikunjungi pada pagi dan sore hari dengan berbagai permainan olahraga, permainan anak, pijat batu refleksi, arena joging, dan berbagai jenis tanaman yang asri, bisa untuk rekreasi maupun olah raga.
6	Taman Buluh Hangtuah	290 M	6.193	Taman yang bertema bambu, taman publik ramah anak, dilengkapi dengan sarana play ground, sarana joging dan berbagai jenis tanaman.
7	Bufferzone Depan SMP3 - Taman jalan Kartini	200 M	13.330	Taman dengan pepohonan yang rindang dengan bangku-bangku taman.
8	Kebun Raya Batam	3600 M	856.600	Taman yang menyimpan berbagai koleksi tanaman yang berada di perbukitan Nongsa yang hijau dengan pemandangan yang asri.
9	Taman Wijaya Sekupang	700 M	9.800	Taman dengan fasilitas zona internet, arena *gym*, dan *arena* joging dengan pepohonan yang rindang.
10	Taman Perum Seruni Kel. Teluk Tering	110 M	1.578	Taman Ramah Anak dengan fasilitas *Joging Track*, Gazebo, Kolam Pasir, Permainan Anak dan tanaman Hias.
11	Taman Cemara Asri	600 M	8.113	Taman Ramah Anak dengan fasilitas Joging Track, spot selfie bangku taman.
12	Taman Perum Surya Kharisma Kibing	150 M	771	Taman Ramah Anak dengan fasilitas *Joging Track*, Gazebo, Kolam Pasir, Permainan Anak dan tanaman Hias.
13	Taman Tuah Melayu	550 M	12.821	Taman Ramah Anak dengan fasilitas *Joging Track*,
14	Taman Dang Anom		8.186	Merupakan taman jalan yang menyajikan *sculpture* dengan perpaduan lampu yang menarik untuk berfoto
15	Taman Perum Puri Legenda		538	Merupakan taman ramah anak dengan berbagai fasilitas permainan anak

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Tabel di atas merupakan bagian taman aktif di Kota Batam yang menjadi bagian dari lokasi pemeliharan Pemerintah Kota Batam melalui Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam yang terdiri dari 15 Lokasi yang tersebar di Kota Batam. Untuk persebaran lokasi

pemeliharaan yang menjadi wilayah kerja Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam yang terdiri dari Taman Kota dan Taman Ruas Jalan Utama dengan luasan 1.930.023,38 m^2 tercantum pada Tabel 2.66 yang tersebar di 9 Kecamatan ditambah Taman ROW Jalan Lokal dengan luasan 665.125 m^2.

Tabel 2. 66 Ruang Terbuka Hijau Kota Batam, Taman Kota dan Taman Ruas Jalan Utama

No	Lokasi	Ket.	Luas (M^2)
A	**KECAMATAN BATAM KOTA**		
1	Taman Buluh Hangtuah	1 lokasi	6,193.17
2	Median Simp. Kabil - Simp. Kara	1 lokasi	4,782.65
3	Median Jalan Simp. Fly Over - Sim. BNI	1 lokasi	6,636.05
4	Bufferzone Simp. Fly Over - Simp. BNI	1 lokasi	29,915.09
5	Buffer Zone Simp. BNI - Sim. Fly Over	1 lokasi	9,956.00
6	Taman Pulau Jalan Simp. BNI 1	1 lokasi	1,909.87
7	Taman Tuah Melayu	1 lokasi	12,821.53
8	Bundaran Tuah Madani	1 lokasi	2,715.74
9	Median Jalan Simp. BNI -Bundaran Tuah Madani	1 lokasi	7,374.59
10	Taman Segitiga Simp Fly Over (Arah Sekupang)	1 lokasi	22,159.93
11	Bahu Jalan Simp. Rosdale - Bundaran Tuah Madani	1 lokasi	2,078.43
12	Bahu Jalan Bundaran Tuah Madani - Simp. Rosdale	1 lokasi	5,323.14
13	Taman Perum Seruni Kel. Teluk Tering	1 lokasi	1,578.12
14	Taman Aspirasi	1 lokasi	3,358.28
15	Taman Kolam Batam Center	1 lokasi	3,019.64
16	Taman Bundaran DPRD	1 lokasi	2,670.74
17	Taman Median Jalan Depan DPRD	1 lokasi	699.48
18	Dataran Engku Putri	1 lokasi	55,981.53
19	Taman Seputaran DPRD dan Masjid Raya	1 lokasi	6,657.56
20	Taman Seputaran Pagar Dataran Engku Putri	1 lokasi	1,120.17
21	Simp. Kadin s.d. Simp. Masjid Raya	1 lokasi	2,347.96
22	Simp. My Mart, Simp. Yos Sudarso, Green Land	1 lokasi	5,449.67
23	Median Simp. Yos Sudarso - Simp. Seruni	1 lokasi	2,649.55
24	Simp. Mega Mall - Simp. BI, Simp. Calista	1 lokasi	4,786.13
25	Median Simp. Kalista - Simp. KDA	1 lokasi	14,421.35
26	Hutan Kota Jalur Lambat Simp. Kabil - Simp. Flyover	1 lokasi	210,737.61

No	Lokasi	Ket.	Luas (M^2)
27	Hutan Kota Jalur Lambat Simp. Kabil - Simp.Flyover	1 lokasi	124,956.57
28	Bahu Jalan Simp. Seruni - Simp BNI	1 lokasi	1,943.36
29	Median Jalan Simp. Rosdalle - Simp. Franky	1 lokasi	3,797.75
30	Median Jalan Simp. KDA – Simp. RS Elizabeth	1 lokasi	2,348.85
31	Median Simp. RS Elizabeth UNIBA Simp. Cikitsu	1 lokasi	5,087.82
32	Median Jalan Simp. Kara - Simp. Franki	1 lokasi	1,766.42
33	Bahu Jalan Simp. BNI – Simp. Fraky	1 lokasi	4,393.27
34	Taman Segi Tiga Simp. Kabil	1 lokasi	8,186.23
35	Taman Dang Anom	1 lokasi	8,186.23
B	**KECAMATAN NONGSA**		
1	Taman Lengan Jalan Simpang Tiga Batu Besar	1 lokasi	1,930.40
2	Bundaran SMU 3	1 lokasi	320.61
3	Median Simp. Bandara - Median Jalan SMU 3	1 lokasi	4,009.15
4	Buffer Zone Taman Kolam Depan Bandara	1 lokasi	21,851.39
5	Median Simp. Bund. SMU 3 - Median Blk Prm Permata	1 lokasi	5,908.20
6	Median Jalan Simp. Bandara – Simp. Tiga Batu Besar	1 lokasi	43,606.80
7	Kebun Raya Batam	1 lokasi	856.600,03
C	**KECAMATAN BENGKONG**		
1	Bufferzone Depan Sekolah AIS s.d. Depan Bank Riau	1 lokasi	5,651.03
2	Taman Lengan Jalan Diatas Terowongan	1 lokasi	3,714.69
3	Bahu Jalan Bengkong Mahkota	1 lokasi	1,998.27
4	Median Jalan. Simp. Patung Kuda s.d. Simp. Seraya	1 lokasi	6,251.23
5	Median Jalan Simp. BNI - Simp. Terowongan	1 lokasi	30,959.73
6	Bundaran Tropicana	1 lokasi	1,886.65
7	Median Jalan Sumatera	1 lokasi	6,266.34
D	**KECAMATAN BATU AMPAR**		
1	Median Jalan Jalan Kerapu	1 lokasi	9,282.26
2	Median Jalan Raja Ali Haji (samping ex Goodway)	1 lokasi	1,003.57
3	Median dan Bahu Jalan Simp. Pasar Induk Jodoh - Simp. City Walk	1 lokasi	2,894.46
4	Bundaran Simp. Nan Tongga	1 lokasi	133.22
5	Median Jalan simp. Martabak Har - Simp. Baitul Syakur	1 lokasi	4,632.34
6	Median Jalan Simp. Planet Holiday - Simp. Nan Tonga	1 lokasi	1,722.64
7	Taman Segitiga Depan pasar Induk Jodoh	1 lokasi	579.45
8	Median dan Bahu Jalan Simp. Alium - Simp. Planet Holiday	1 lokasi	1,852.36
9	Median dan Bahu Jalan Simp. The Hill - Simp. Planet Holiday	1 lokasi	4,595.81

No	Lokasi	Ket.	Luas (M^2)
E	**KECAMATAN LUBUK BAJA**		
1	Median Jalan Depan Hotel Utama Jodoh	1 lokasi	846.29
2	Median dan bahu jalan Sp. Harmony Hotel - Sp. Martabak Har	1 lokasi	3,607.25
3	Median dan Bahu Jalan Pembangunan	1 lokasi	7,869.28
4	Median Jalan Raden Fatah	1 lokasi	1,472.37
5	Median dan Bahu Jalan Bunga Raya	1 lokasi	2,874.42
6	Median dan Bahu Jalan Sp. Baloi Center - Sp. Batu Hampar (Jl Duyung)	1 lokasi	22,356.17
7	Median Pura Agung Amerta - Lamp. Merah Baloi Taman Kota -Lampu Merah Baloi Center	1 lokasi	6,649.41
8	Taman Seputaran Fly Over	1 lokasi	14,428.75
9	Median dan Bahu Jalan Simp. Pelita - Simp. Pizza Hut	1 lokasi	1,915.65
10	Median dan Bahu Jalan Simp. Martabak Har - Simp. Pelita	1 lokasi	3,577.07
11	Median dan Bahu Jalan Simp. Terowongan - Simp Pelita	1 lokasi	2,039.78
F	**KECAMATAN SEKUPANG**		
1	Taman Bawah Jembatan Penyebrangan Sekupang	1 lokasi	57.60
2	Taman Rumdin Wako Tj Pinggir	1 lokasi	226.45
3	Taman Lengan Jalan Simp. Marina City	1 lokasi	156.72
4	Bufferzone Halte Tiban Housing	1 lokasi	1,406.32
5	Taman Gajah Mada (Taman Tuan Putri)	1 lokasi	14,318.65
6	Taman Median Simp. Sei Harapan	1 lokasi	57.60
7	Taman Bufferzone Depan SMP 3	1 lokasi	226.45
8	Taman Wijaya Sekupang	1 lokasi	156.72
9	Taman Perum Kartini	1 lokasi	1,406.32
10	Taman Jln Palapa	1 lokasi	14,318.65
11	Nursery Lubuk Mata Kucing	1 lokasi	2,374.56
12	Taman Segi Tiga South Link	1 lokasi	13,330.34
13	U Turn Tiban Kampung	1 lokasi	9,800.43
14	Taman Bawah Jembatan Penyebrangan Tiban Kampung	1 lokasi	60.00
15	Taman U Turn Depan Tiban Center	1 lokasi	328.06
G	**KECAMATAN BATU AJI**		
1	Median Jalan Sp Tobing - Sp Makam Pahlawan	1 lokasi	3,005.81
2	Taman Perum Surya Kharisma Kibing	1 lokasi	771.81
3	Median Jalan Simpang Basecamp - SP Kabil	1 lokasi	40,043.42
H	**KECAMATAN SAGULUNG**		
1	SP Base Camp - Sp Hyunday	1 lokasi	64,979.19
2	Median jalan Simp. Barelang - Jembatan Barelang	1 lokasi	13,682.79

No	Lokasi	Ket.	Luas (M^2)
3	Taman Cemara Asri	1 lokasi	8,113.76
4	Taman Perum Griya Permata	1 lokasi	717.02
I	**KECAMATAN SEI BEDUK**		
1	Simp. Panbil - Simp Pintu 4 kawasan Batamindo	1 lokasi	60,343.82
	Jumlah		1.930.023,38

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Tabel 2. 67 Ruang Terbuka Hijau Kota Batam, Taman ROW Jalan Lokal

No	Lokasi	Ket.	Luas (M^2)
1	Simp. Edukits - Jl. Laksamana Bintan	1 Lokasi	2,100
2	Simp. BI - Kampung Belian (Jl. Perahu Dendang)	1 Lokasi	4,000
3	Jalan kampung belian ke arah perkantoran (Gedung Bersama Pemko)	1 Lokasi	1,600
4	Taman Perum Seruni kell. Teluk Tering	1 Lokasi	175
5	Simp. Satpol PP - Graha Kadin (Jl. Putri Malu)	1 Lokasi	500
6	Simp. Pasir putih - Simpang hotel 01 (Jl. Daeng Kamboja)	1 Lokasi	3,150
7	Kompleks Aku Tahu - Simpang Bukit Beruntung	1 Lokasi	1,350
8	Gereja Simalungun - Bandar Srimas - Simpang Bukit Beruntung	1 Lokasi	2,000
9	Jl. Maha Vihara - Bukit Beruntung	1 Lokasi	2,800
10	Simp. Duta Mas - Anggrek Mas 3 - Jl. Laksamana Bintan	1 Lokasi	13,000
11	Simp. Duta Mas Dalam - Crown Hill (Jl. Cempaka)	1 Lokasi	4,250
12	Simp. Ruko Mega Legenda - Simp. Kawasan Industri (Jl. Raja Husin)	1 Lokasi	3,600
13	Simp. Duta Mas - Simp. Duta Mas Dalam - Simp. Gereja Legenda Malaka (Jl. Lancang Kuning)	1 Lokasi	6,000
14	Simp. Gereja Legenda Malaka - Simp. Gereja Jl. Raja Isa (Jl. Selembayung)	1 Lokasi	800
15	Simp. Kuda Sei Panas - Simp. 3 Bengkong (Jl. Raya Sei. Panas)	1 Lokasi	3,000
16	Simp. Lampu Merah Seraya Atas - Simp. Lampu Merah Bengkong Harapan	1 Lokasi	800
17	Simp. 3 Bengkong - Simp. Bengkong Seken	1 Lokasi	2,400
18	Simp. Garama - Simp. Bengkong Seken (Jl. Yos Sudarso 2)	1 Lokasi	4,500
19	Simp. Bengkong Seken - Rest. Golden Prawn (Jl. Sumatera)	1 Lokasi	5,200
20	Rest. Golden Prawn - Gerbang Bengkong Sadai	1 Lokasi	4,250
21	Simp. 3 Batu Besar - Simp. Taiwan Punggur (Jl. Hang Kesturi)	1 Lokasi	24,300
22	Simp. Pertamina Punggur - Simp. Eco Green Punggur	1 Lokasi	9,900

No	Lokasi	Ket.	Luas (M^2)
23	Simp. Punggur - Bumi Perkemahan	1 Lokasi	13,800
24	Puskesmas Kabil - Perum Pertamina	1 Lokasi	5,200
25	Simp. Batu Besar - Tj Bemban	1 Lokasi	15,900
26	Teluk Mata Ikan	1 Lokasi	3,600
27	Pasar Batu Besar	1 Lokasi	3,900
28	Simp. Batu Ampar - Simp. Melchem (Jl. Kerapu)	1 Lokasi	4,200
29	Jalan Kerapu	1 Lokasi	9,600
30	Jalan Bawal	1 Lokasi	5,800
31	Jalan Todak	1 Lokasi	2,000
32	Jalan Tenggiri	1 Lokasi	2,000
33	Jl. Kuda Laut	1 Lokasi	6,800
34	Jl. Majapahit	1 Lokasi	1,300
35	Jl. Borobudur	1 Lokasi	2,000
36	Jl. Muara Takus	1 Lokasi	200
37	Jl. Mendut	1 Lokasi	1,800
38	Jl. Prambanan	1 Lokasi	1,700
39	Simp. Planet Holiday - Simp. Graha Sulaiman (Jl. Prambanan)	1 Lokasi	2,400
40	Simp. Kak Dadut - Simp. Baloi Taman Kota - Simp. Awal Bros (Jl. Gajah Mada)		
	- Simp. Baloi Taman Kota - Simp. Awal Bros	1 Lokasi	4,250
41	Simp. Dam Baloi - BCS - Simp. Baloi Centre (Jl. Bunga Raya)		
	- Simp. Dam Baloi - Simp. Kec. Lubuk Baja (Jl. Bunga Raya)	1 Lokasi	1,200
	- Simp. Kec. Lubuk Baja - Simp. Pom Bensin Penuin (Jl. Bunga Raya)	1 Lokasi	1,200
42	Simp. Apartemen Harmoni - Simp. Polsek Lubuk Baja (Jl. Raden Patah)		
	- Simp. Apartemen Harmoni - Simp. Lampu Merah Kp. Utama	1 Lokasi	960
	- Simp. Lampu Merah Kp. Utama - Simp. Polsek Lubuk Baja	1 Lokasi	3,000
43	Simp. Lampu Merah harapan Bunda - Simp Kodim (Jl. Budi Kemuliaan)	1 Lokasi	1,600
44	Simp. Kec. Lubuk Baja - Blok 4 - Tepekong	1 Lokasi	1,100
45	Simp. Windsor - Simp. Pizza Hut Kp. Utama	1 Lokasi	250
46	Simp. Tepekong - Hotel Utama - Ruas Jl. Duyung	1 Lokasi	1,200
47	Jalan ke puskesmas tg. Uma	1 Lokasi	400
48	Simp. Pasar Tos 3000 - Simp. Hotel Utama	1 Lokasi	175
49	Jalan Samping Nagoya City Walk	1 Lokasi	175
50	Simp. Nagoya City Walk - Simp Jingle Bar	1 Lokasi	400

No	Lokasi	Ket.	Luas (M^2)
51	Simp. Windsor - Nagoya City Walk - Pasar Tos 3000	1 Lokasi	445
52	Jalur Masuk Tg. Uma	1 Lokasi	400
53	Jalan Kolektor Tiban (Princess - Tiban I - Mentarau - Gereja - SPBU Tiban III)	1 Lokasi	6,800
54	Jalan Kolektor Tiban (Pertigaan Tiban II - Vihara - Gereja - Samping STC)	1 Lokasi	5,400
55	Jalan Kolektor Tiban (Tiban mentarau - Nirwana residence)	1 Lokasi	10,200
56	Jalan Kolektor Tiban (Simp. Tiban Housing - Tiban Koperasi - Cipta Puri Indah)	1 Lokasi	2,800
57	Jalan Lingkar RSOB (Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo)	1 Lokasi	4,750
58	Jalan Kawasan Industri Sekupang	1 Lokasi	30,600
59	Jalan Perkantoran Sekupang	1 Lokasi	29,250
60	Simp. Kawasan Industri Sekupang - Patam Lestari (Jl. Ir. Sutami)	1 Lokasi	14,640
61	Bufferzone depan Dealer yamaha Tiban Kampung	1 Lokasi	3,000
62	Bufferzone Simp. Princess - Ruko Tiban Mas Asri	1 Lokasi	22,015
63	Buffezone Tiban BTN Regency	1 Lokasi	2,088
64	Bufferzone Ruko Tiban impian - Dealer Honda	1 Lokasi	8,250
65	Bufferzone Cipta puri	1 Lokasi	4,100
66	Bufferzone depan Gor Tiban	1 Lokasi	2,080
67	Jalan kolektor Tiban (Simp Tiban Koperasi - Kelurahan Tiban Baru)	1 Lokasi	800
68	Simp. Kantor Pelni - Simp. Pelabuhan Sekupang	1 Lokasi	3,300
69	Simp. Rumah Dinas Wali Kota - KTM Resort	1 Lokasi	4,500
70	Simp. Pelabuhan (Simp. RM Aisyah) - Pelabuhan Sagulung	1 Lokasi	7,750
71	Simp. Pelabuhan (Simp. RM Aisyah) - Simp. Marina	1 Lokasi	2,000
72	Simp. Base Camp - Jembatan marina	1 Lokasi	10,750
73	Simp. Sei Harapan - Marina (Jl. K.H. Ahmad Dahlan)	1 Lokasi	30,000
74	Simp. Marina - Simp. Sei. Temiang (Jl. Kartini)	1 Lokasi	22,800
75	Simp. Aviary - Hidayatullah (Jl. Lingkar Aviari Batu Aji)	1 Lokasi	10,800
76	Simp. Aviari - Jalan Samping Kampus Unrika	1 Lokasi	800
77	Simp. Aviari - Depan Perum. Masyeba	1 Lokasi	200
78	Seputaran Pasar Melayu	1 Lokasi	2,100
79	Simp. Kampus - Simp. MKGR (Jl. Lingkar Aviari Batu Aji)	1 Lokasi	3,400
80	Simp. Kawasan Industri Latrade - Kawasan Industri Tg. Uncang	1 Lokasi	3,800
81	Jalur Masuk Rusun - Batamec	1 Lokasi	2,600
82	Jalan Brigjen Katamso - PT.Bandar Abadi - Viking	1 Lokasi	11,600
83	Simp. Fanindo - PT. Marcopolo	1 Lokasi	18,400

No	Lokasi	Ket.	Luas (M^2)
84	Pasar Sagulung	1 Lokasi	8,800
85	PT. Nippon Steal	1 Lokasi	460
86	Batamec - Jln. Lingkar	1 Lokasi	7,000
87	Simp. Panbil Muka Kuning - Simp. 3 Tg. Piayu - Piayu Laut (Jl. S. Parman) - Simp. 3 Tg. Piayu - Piayu Laut	1 Lokasi	26,000
88	Simp. 3 Tg. Piayu - Kantor Kecamatan Sei. Beduk	1 Lokasi	18,000
89	Jalan Depan Kantor Kecamatan Sagulung	1 Lokasi	4,800
90	Depan Ruko Tembesi Centre	1 Lokasi	760
91	Simp. Kapling Baru - Pintu Masuk Kapling	1 Lokasi	4,800
92	Simp. Kapling Lama - Simp. Opung	1 Lokasi	760
93	Bufferzone Depan Perum. Senawangi	1 Lokasi	2,400
94	Bufferzone Depan Genta I - Pendawa	1 Lokasi	3,000
95	Bufferzone Depan Perum Buana	1 Lokasi	6,400
96	Bufferzone Depan Bank BRI Pasar Melayu	1 Lokasi	30,000
97	Bufferzone Depan Gor Basecamp	1 Lokasi	10,800
98	Puskesmas Pancur	1 Lokasi	13,600
99	Jl. Letjen Suprapto - Kantor Camat Kibing	1 Lokasi	4,400
100	Kantor Camat Sei Beduk - Kampung Bagan	1 Lokasi	1,352
101	Jalur Lambat GMP	1 Lokasi	1,250
102	Bukit Kemuning - Puri Agung 3	1 Lokasi	1,540
103	Bufferzone Villa Muka Kuning	1 Lokasi	450
104	Bufferzone Mega Motor	1 Lokasi	4,700
105	Simp. Kapling Lama - Simpang Nato	1 Lokasi	17,600
106	Simp. Kapling Baru (jln. Nusabatam)	1 Lokasi	5,250
107	Simpang Nato - Simpang Polsek Sagulung	1 Lokasi	5,400
108	Simpang Hutatap - Kapling Bukit Melati Dapur 12	1 Lokasi	5,400
	Jumlah		**665.125**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

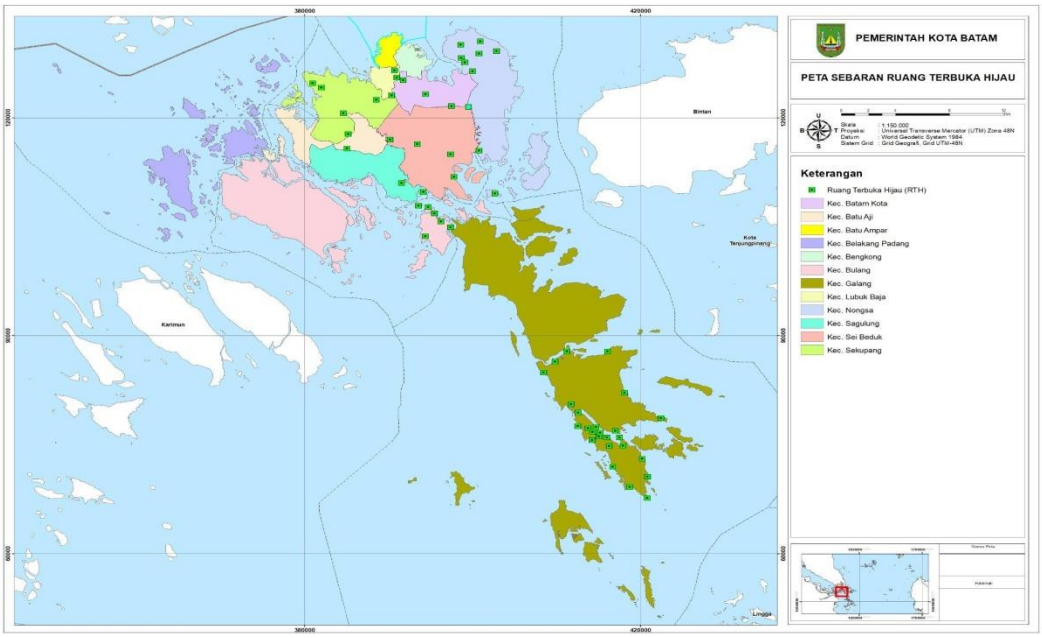

Gambar 2. 65 Peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau Kota Batam

Berdasarkan kondisi aktual di lapangan, terdapat beberapa permasalahan dalam konteks peningkatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, antara lain:

- Lokasi pembibitan masih berstatus pinjam lahan dengan Instansi lain, sehingga perlu upaya pengajuan lokasi pembibitan *nursery* ke BP Batam, agar dapat menjadi aset Pemerintah Kota Batam;
- Belum memiliki aturan/pedoman perencanaan seperti, Master Plan rencana pembangunan RTH dan Ruang Terbuka Publik (RTP). Dengan demikian diperlukan inisiasi penyusunan kajian teknis draf Perda RTH dan Ruang Terbuka Publik (RTP) Kota Batam;
- Lahan pemakaman setelah dihibahkan dari ahli waris kepada Lurah masih menunggu proses sertifikasi oleh Dinas Pertanahan Kota Batam. Saat ini untuk keperluan sertifikasi telah dilengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan telah diserahkan ke Dinas Pertanahan Kota Batam;
- Belum adanya aturan pedoman pengelolaan pemakaman mengenai permintaan izin pemindahan kerangka keluar Batam dan permohonan memakamkan jenazah orang asing di Batam. Sehingga perlu menyusun aturan terkait dalam bentuk Perda;

- Terbatasnya lahan yang diperuntukan Pemakaman Umum, sehingga perlu dicari lahan baru untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang akan dikelola oleh Pemerintah Kota Batam sesuai dengan angka pertumbuhan penduduk dan angka kematian di Kota Batam.

2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disampaikan pada Tabel 2.68. Untuk indikator pencegahan konflik sosial dan keagamaan selama periode 2016-2021 tidak terjadi konflik yang berskala besar, untuk menunjukkan capaian kinerja pada urusan ini dapat dilihatdari persentase konflik dalam masyarakat yang terselesaikan dimana angka realisasi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 75,76 persen menjadi 79,17 persen di tahun 2018. Pada tahun 2020 pencegahan konflik dalam masyarakat yang terselesaikan meningkat menjadi 90,00 persen. Dalam perspektif ke depan pencegahan konflik yang terselesaikan idealnya terus diupayakan untuk ditingkatkan pada periode selanjutnya, meskipun dalam kondisi penuh dengan keterbatasan jumlah personil.

Selanjutnya persentase masyarakat dalam pemilu tahun 2019 hanya mencapai 84 persen, kondisi ini bermakna terdapat 16 persen atau sebanyak 126.387 penduduk usia >17 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pemilu di Kota Batam, angka ini cukup besar. Setiap tahunnya, Badan Kesbangpol memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula berupa sosialisasi budaya politik untuk meningkatkan kesadaran penduduk dalam menggunakan hak pilihnya. Namun demikian, dengan banyaknya penduduk yang tidak berpartisipasi dalam pemilu, perlu dipikirkan pendekatan baru yang inovatif, kreatif dengan mengedepankan semangat efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan sosialisasi-sosialisasi sosial budaya pada periode selanjutnya. Namun pada tahun 2020, kondisi pandemi

Covid-19 di Kota Batam mampu mengurangi Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu hingga mencapai 64,22 persen.

Untuk indikator Persentase kesesuaian hasil Pertanggungjawaban Keuangan Parpol telah tercapai 100 persen sejak tahun 2016-2020. Laporan pertanggungjawaban keuangan parpol tersebut telah disampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Kepulauan Riau dengan menunjukkan tingkat kepatuhan dan kesesuaian, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI, keberhasilan ini disebabkan Kesbangol senantiasa setiap tahunnya memberikan pengetahuan kepada pengurus parpol berupa bimbingan teknis bagi pengurus parpol yang duduk di DPRD dengan demikian diharapkan laporan pertanggungjawaban semakin baik.

Tabel 2. 68 Realisasi Kinerja Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2020

No	Indikator		TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencegahan Konflik Sosial Keagamaan (jumlah konflik)	Target	0	0	0	0	0
		Realisasi	0	0	0	0	0
2	Persentase Konflik dalam Masyarakat yang terselesaikan	Realisasi	75,76	82,35	79,17	76,92	90,00
3	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Target	–	–	–	68	60
		Realisasi	–	–	–	84	64,22
4	Persentase kesesuaian hasil Pertanggungjawaban Keuangan Parpol	Target	100	100	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Kondisi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batam Periode 2016-2020 secara umum telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini diketahui dari tercapainya target yang ditetapkan pada setiap tahunnya (Tabel 2.69). Namun demikian, seluruh indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki target yang secara ideal dapat menyelesaikan persoalan ketentraman dan ketertiban di Kota Batam, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya baik jumlah petugas maupun anggaran yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Lebih rinci, untuk indikator Tingkat Penyelesaian K3 selama empat tahun sudah berada pada tingkat >50 persen. Pada tahun 2016 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) mencapai 89,52 persen dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 terealisasi 93,25 persen. Namun pada tahun 2020 justru mengalami penurunan hingga menjadi 91,76 persen. Capaian ini masih belum mencapai target 100 persen. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya pelanggaran K3 di Kota Batam, sementara kualitas SDM masih kurang, dan belum tertibnya pengadminstrasian/pelaporan kegiatan-kegiatan di lapangan, sehingga penanganan/penyelesaian pelanggaran K3 kurang maksimal.

Untuk realisasi indikator Persentase Penegakan Perda selama empat tahun masih berada di atas angka 50 persen (>50 persen). Persentase Penegakan Perda pada tahun 2020 tercatat 96,89 persen. Capaian ini dapat dianggap sangat baik, meskipun jumlah PPNS yang ada di Satpol PP, yang hanya berjumlah 7 (tujuh) orang tidak menyebabkan proses penanganan pelanggaran Perda kurang maksimal. Selain itu koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Perda sudah baik.

Sementara itu untuk indikator Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat pada tahun 2016 hanya terealisasi 15 persen dan meningkat sampai tahun 2020 menjadi 21 persen. Angka tersebut perlu dikonfirmasi apakah definisi operasional yang digunakan sesuai dengan Permendagri No.69/2012, atau menggunakan definisi operasional yang berbeda. Idealnya angka cakupan linmas menggambarkan 1 orang untuk 1 RT. Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga. Sedikitnya jumlah Linmas di Kota Batam disebabkan oleh (1) masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan satlinmas di lingkungan RT/RW masing-masing; (2) keanggotaan Linmas masih bersifat sukarela namun dalam pelaksanaan kegiataan harus didukung fasilitas, sarana dan prasarana serta akomodasi (biaya operasional); (3) kurangnya dukungan dari tingkat kelurahan tentang

persekutuan anggota linmas sebagaimana yang diamanatkan Permendagri No. 84 Tahun 2014, Lurah secara *ex-officio* sebagai Kepala Satuan Linmas; (4) Perlu adanya perhatian Pemerintah untuk diberikan insentif kepada anggota satlinmas setiap bulan.

Tabel 2. 69 Realisasi Kinerja Indikator Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Target	100%	100%	100%	100%	100%
		Realisasi	89,52%	90,94%	97,92%	93,25%	91,76%
ii	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Target	100%	100%	100%	100%	100%
		Realisasi	100%	100%	100%	100%	96,89%
iii	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	Target	15%	17%	21%	23%	26%
		Realisasi	15%	17%	21%	21%	21%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, dalam perspektif ke depan perlu dilakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan dengan mengirim ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk mengikuti Diklat Polisi Pamong Praja yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya menambah jumlah PPNS di Satpol PP Kota Batam baik itu melalui mutasi pegawai dengan kompetensi PPNS dari Dinas/Instansi lain maupun dengan mengirim ASN Satpol PP untuk mengikuti Diklat PPNS dan meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Perda.

B. Pemadam Kebakaran (Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal)

Dalam standar pelayanan minimal terdapat beberapa standar yang perlu dipenuhi dalam pemberian pelayanan masyarakat yang berorientasi pada mutu. Total pos pemadam kebakaran di Kota Batam sebanyak 9 pos, namun demikian Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini hanya mengelola 3 pos (Sei Panas, Kabil dan Tembesi), selebihnya dikelola oleh BP Batam untuk cakupan 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan se Kota

Batam. Jika melihat luas cakupan yang sangat besar, memang tiga unit pos pemadam masih sangat tidak mencukupi, namun hal ini dilengkapi oleh enam pos pemadam yang dikelola oleh BP Batam yang memiliki jangkauan yang sama. Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai 4 (empat) Mobil Pompa (*Fire truck*) dan 3 (tiga) Suplai (*Fire Suplay*) Pemadam Kebakaran, untuk menanggulangi kebakaran di Kota Batam Dinas Pemadam Kebakaran berkoordinasi bersama Subdit PBK BP Batam dan Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup.

Selanjutnya untuk indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran disampaikan pada Tabel 2.70 untuk tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran di tahun 2019 tercatat 73,60 persen, jika dibandingkan dengan target SPM 75 persen, maka hal ini belum mencapai. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 67,65 persen, sehingga masih belum memenuhi target SPM. Ketidaktercapaian kinerja pemadam kebakaran adalah dikarenakan kejadian kebakaran di daerah *hinterland* yang seringkali kurang terjangkau, sehingga menyebabkan tingkat waktu tanggap lebih lambat. Maka dari itu diperlukan juga pos pemadam kebakaran di sekitar wilayah *hinterland*.

Selanjutnya untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 94,11 persen di tahun 2019 dan 91,43 persen di tahun 2020. Hal ini melampaui target SPM 80 persen. Untuk persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi di tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebesar 39,35 persen.Hal ini juga belum mencapai target SPM sebesar 80 persen. Kemudian untuk ketersediaan mobil pemadam tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar >3000-5000 liter di wilayah manajemen kebakaran hanya mencapai 33,33 persen tahun 2019 dan 2020, sementara target SPM sebesar 90 persen.

Tabel 2. 70 Realisasi Kinerja Indikator Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
i	Tingkat Waktu Tanggap (*Response Rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	67, 49	67,93	69,86	73,6	67,65
	(target SPM 75%)	Belum memenuhi	Belum memenuhi	Belum memenuhi	Belum memenuhi	Belum memenuhi
ii	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (target SPM 80%)	91,67	92,41	93,04	94,11	91,43
iii	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (target SPM 80%)	43,06	40,28	41,2	39,35	39,35
iv	Mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter Wilayah Manajemen Kebakaran (target SPM 90%)	25	25	25	33,33	33,33

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam

2.3.1.6 Urusan Sosial

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Pelayanan yang diberikan dapat melalui bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PPKS sebagai berikut:

Tabel 2. 71 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Batam Tahun 2016-2020

NO	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak balita terlantar	0	0	0	0	1
2	Anak terlantar	14	13	9	9	2
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	0	33	38	40	24
4	Anak jalanan	200	200	200	185	185
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	404	404	404	410	438
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	24	72	86	67	123
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	0	0	1	5
8	Lanjut usia telantar	540	540	540	350	225
9	Penyandang disabilitas	525	550	584	661	767
10	Tuna Susila	1300	1250	279	280	190
11	Gelandangan	25	25	25	14	20
12	Pengemis	80	80	80	90	40
13	Pemulung	45	45	45	60	48
14	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0
15	Bekas Warga BInaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	0	0	0	0	0
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	732	732	732	688	319
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	60	60	60	65	35
18	Korban Traficking	81	10	7	1	39
19	Korban Tindak Kekerasan	15	38	47	43	22
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-	-	1556
21	Korban bencana alam	1300	650	716	531	1032
22	Korban bencana sosial	400	150	708	339	181
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	12	12	12	7	6
24	Fakir Miskin	180.515	199.515	217.152	213.766	217.054

NO	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	40	40	40	40	40
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0
Jumlah Total		186.312	204.419	221.764	217.647	222.352

Sumber:Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak Kota BatamPerempuan
Catatan: anak terlantar yang sebelumnya diberi bantuan adalah anak panti, semenjak keluarnya Permensos No 9/Tahun 2018 menjadi kewenangan Provinsi

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa jumlah PPKS selama periode 2016-2020 di Kota Batam cenderung mengalami peningkatan. Selama kurun waktu 2016-2020 PPKS di Kota Batam didominasi oleh fakir miskin, korban bencana, gepeng, lansia/miskin, dan anak terlantar. Selanjutnya pada tahun 2020 jumlah PPKS di Kota Batam didominasi oleh pekerja migran yang meningkat signifikan selama masa pandemi Covid-19. Peningkatan jumlah PPKS ini juga disebabkan karena letak Kota Batam yang strategis sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi para pendatang untuk mencari kerja baik yang mempunyai keahlian maupun tidak mempunyai keahlian khusus. Pendatang yang tidak memiliki keahlian khusus cenderung akan menambah jumlah PPKS di Kota Batam. Selain itu jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat yaitu menjadi 123 anak.

Selanjutnya untuk mengetahui kinerja urusan sosial periode 2016-2020 disampaikan pada Tabel 2.72. Secara umum seluruh indikator kinerja yang tercantum menunjukkan realisasi yang positif. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan selama tiga tahun terealisasi di atas 70 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah sebanyak 95 persen. Potensi sumber kesejahteraan sosial yang berpartisipasi menangani PPKS bertambah dari semula 25 persen di tahun 2016 menjadi 30 persen di tahun 2018. Lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 60 persen. Meskipun demikian, jumlah ini belum mencapai nilai yang ditargetkan.

Selanjutnya persentase lembaga organisasi yang dapat diberdayakan, berpartisipasi dan mandiri dalam pembangunan pun meningkat dari 70 persen di tahun 2017 menjadi 75 persen di tahun 2018, namun pada tahun 2020 menurun hingga menjadi 59 persen karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda mengakibatkan beberapa kegiatan dialihkan fokusnya (*refocussing)* di antaranya lomba kelurahan, bulan bakti gotong royong dan perlombaan inovasi teknologi tepat guna (TTG). Untuk data 2016 belum tersedia karena Nomenklatur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat baru dimulai di Tahun 2017. Secara rinci ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 72 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Sosial Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Target	100	100	100	100	100
		Realisasi	70	72	72	71	95
ii	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang berpartisipasi terhadap penanganan PPKS	Target	50	55	60	65	70
		Realisasi	25	25	30	50	60
iii	Persentase PPKS yang dapat direhabilitasi (SPM)	Target	60	65	70	80	80
		Realisasi	60	65	70	70	80
iv	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial (SPM)	Target	100	100	100	100	100
		Realisasi	45	45	50	80	100
v	Persentase Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan, berpartisipasi dan mandiri dalam pembangunan*	Target	-	70	75	80	90
		Realisasi	-	70	75	76	59

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
Catatan: *Indikator "Persentase Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan, berpartisipasi dan mandiri dalam pembangunan" pada tahun 2016 belum ada data karena nomenklatur tersebut baru dimulai tahun 2017.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial

Beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam standar pelayanan minimal di antaranya adalah Persentase PPKS yang dapat direhabilitasi dan Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial. Untuk PPKS

yang dapat direhabilitasi pun mengalami kenaikan dari semula 60 persen di tahun 2016 menjadi 70 persen di tahun 2018. Pada tahun 2020 PPKS yang dapat direhabilitasi mengalami kenaikan sampai mencapai 80 persen. Jumlah ini telah mencapai target yang diinginkan. Sementara PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan semula 45 persen di tahun 2016 menjadi 50 persen di tahun 2018 dan mencapai 100 persen di tahun 2020. Jumlah ini juga telah sesuai dengan yang ditargetkan dalam SPM.

2.3.1.7 Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat kabupaten dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi (1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil); (2) penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan izin LPTKS, perlindungan TKI); dan (3) hubungan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial). Berdasarkan kewenangan tersebut, dapat diukur realisasi kinerja urusan tenaga kerja di Kota Batam yang mencakup indikator-indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 73 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	Target (orang)	1456	1100	2100	500	1.550
		Realisasi	325	1899	1300	1224	488
2	Jumlah pencari kerja yang terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi	Target (orang)	1440	1600	2000	600	1.700
		Realisasi	330	654	939	1017	408
3	Jumlah tenaga kerja yang terserap/ ditempatkan	Target (orang)	11449	13500	14000	14500	15.500
		Realisasi	12903	20770	25108	32788	28077

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun	Target (kasus)	84	86	88	90	92
		Realisasi	226	180	193	167	210
5	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun	Target	230	220	210	200	200
		Realisasi	250	205	233	209	276
6	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Target	600.000	620.000	620.000	655.000	750.000
		Realisasi	588.470	605.581	604.831	643.381	745.545
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Target	66,0%	67,00%	67,50%	68,00%	68,50%
		Realisasi	66,41%	67,65%	65,25%	66,46%	68,22%
8	Pencari Kerja yang terserap	Target	13500	14000	14500	15500	17000
		Realisasi	12903	20770	25108	32788	28077
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Target	6,5%	6,4%	6,3%	6,2%	6,1%
		Realisasi	8,17%	7,82%	8,93%	8,31%	11,79%
10	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Target	100%	100%	100%	100%	100%
		Realisasi	22%	173%	62%	245%	31%
11	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Target	100%	100%	100%	100%	100%
		Realisasi	200%	100%	80%	66,67%	0%
12	Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dan anjuran	Target	84%	86%	88%	90%	92%
		Realisasi	92,24%	87,80%	82,83%	79,90%	76,09%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Untuk indikator angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun selama periode 2016-2020, setiap tahunnya selalu mencapai >200 sengketa antara pekerja dan pengusaha. Pada tahun 2016 angka sengketa pengusaha - pekerja adalah 250 sengketa, mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 mencapai 209 yang mana hampir mencapai target yaitu 200 sengketa. Namun pada tahun 2020, adanya pandemi menyebabkan dunia usaha mengalami penurunan sehingga sengketa pekerja-pengusaha mengalami peningkatan mencapai 276 sengketa.

Untuk indikator angka partisipasi angkatan kerja selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara indikator tingkat partisipasi angkatan kerja pada periode yang sama mengalami penurunan. Angka partisipasi angkatan kerja tahun 2017 tercatat 605.581 orang, meningkat menjadi 643.381 di tahun 2019 dan 745.545 di tahun 2020. Sementara untuk tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2017 tercatat 67,65 kemudian menurun menjadi 66,46 di tahun 2019 dan 68,22 di tahun 2020. Dinamika angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh iklim investasi dan dinamika perekonomian di Kota Batam. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal dan masih adanya kesempatan kerja yang tidak bisa terisi karena tidak sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Selain itu, banyaknya angkatan kerja yang datang dari luar Kota Batam mengakibatkan tingginya angka pencari kerja yang ada di Kota Batam, upaya-upaya peningkatan skill terhadap para pencari kerja juga tidak dapat secara instan mengurangi angka pencari kerja, karena peserta pelatihan tidak dapat langsung ditempatkan.

Lebih lanjut tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam selama tiga tahun terakhir selalu berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2017 pengangguran terbuka Kota Batam mencapai 7,82, angka ini jauh di atas rata-rata pengangguran terbuka nasional yang sebesar 5,28. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran di Kota Batam mengalami peningkatan signifikan dengan adanya pandemi Covid-19, yang mana tingkat pengangguran tahun 2020 adalah 11,79.

Untuk indikator persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi selama lima tahun mengalami peningkatan.Realisasi pada tahun 2016 tercatat 22 persen dari target 1.456 orang tenaga kerja kemudian meningkat selama empat tahun menjadi 245 persen dari target tahun 2019 sebesar 500 orang, atau dengan kata lain terdapat 1224 tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat keahlian. Selanjutnya pada tahun 2020 dalam upaya menghadapi tingginya pengangguran di masa pandemi Covid-19 persentase

besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah 31 persen (488 orang) dari target sebesar 1550 orang tenaga kerja.

Untuk indikator tenaga kerja yang terserap selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat 12.903 tenaga kerja yang terserap.Kemudian selama empat tahun menjadi 32.788 orang tenaga kerja di tahun 2019 dan 28.077 orang tenaga kerja yang terserap di tahun 2020.

Pada indikator Persentase Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dan Anjuran selama periode tahun 2016-2020 mengalami tren penurunan yang disebabkan oleh kurangnya jumlah mediator. Capaian pada tahun 2016 tercapai sebesar 92,24 persen dari target sebesar 84 persen dan pada tahun 2020 mencapai 76,09 persen dari target 92 persen.

Secara jelas dapat disampaikan bahwa pada tahun 2016 terdapat kasus yang telah dianggap selesai dengan rincian sebanyak 68,98 persen (169 Kasus) ditindak lanjuti dengan anjuran, 23,27 Persen (57 Kasus) melalui Persetujuan bersama, 6,12 persen (15 Kasus) Proses Mediasi dan Kasus yang tidak dilanjutkan oleh pelapor sebanyak 1,63 Persen (4 Kasus). Tahun 2017, 205 Kasus yang terjadi, 117 kasus (57,07%) penyelesaian dengan anjuran, 63 Kasus (30,37%) Persetujuan bersama, 10 kasus (4,88%) Proses Mediasi dan15 Kasus (7,32%) yang tidak dilanjutkan oleh pelapor. Tahun 2018, 233 Kasus yang terjadi, 115 kasus (49,36%) penyelesaian dengan anjuran, 78 Kasus (33,48%) Persetujuan bersama, 27 kasus (11,59%) Proses Mediasi dan 13 Kasus (5,58%) yang tidak dilanjutkan oleh pelapor. Tahun 2019 sejumlah 209 kasus dengan rincian sebanyak 108 kasus (51,67%) ditindaklanjuti dengan anjuran, 59 Kasus (28,23%) melalui Persetujuan bersama, 26 kasus (12,44%) Proses Mediasi dan Kasus yang tidak dilanjutkan oleh pelapor sebanyak 16 Kasus (7,66%). Dan pada priode akhir tahun 2020 terdapat 276 kasus dengan penyelesaian sebanyak 125 Kasus (45,29%) dengan Anjuran, 85 Kasus (30,80%) dengan Persetujuan Bersama, 55 Kasus (19,93%) dengan Proses Mediasi dan 11 Kasus (3,99%) yang tidak dilanjutkan oleh pelapor.

2.3.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak Kota Batam berupaya menggali potensi dan kapasitas Sumber daya perempuan sehingga mampu bersaing dan turut ambil bagian dalam pembangunan Kota Batam. Melalui berbagai pembinaan dan pelatihan sepanjang tahun 2020, 960 orang perempuan turut aktif dalam Peringatan HKK PKK Kota Batam yang disejalankan dengan Kegiatan Halal Bi Halal, 6000 orang hadir dalam Pembinaan Akhlak Mulia, 250 orang aktif dalam kegiatan sarasehan Organisasi Perempuan yang disejalankan peringatan Hari Ibu. Dan dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM Perempuan Kota Batam di bidang ekonomi sehingga mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan Kota Batam tahun 2020 diadakan pelatihan tata rias bagi 750 orang ibu rumah tangga se-Kota Batam yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan kaum perempuan. Diharapkan melalui partisipasi angkatan perempuan ini dapat meningkatkan akselerasi dan percepatan Indeks pembangunan dan pemberdayaan perempuan Kota Batam yang pada akhirnya memperkecil kesenjangan/ketimpangan gender yang kerap menimpa kaum perempuan secara umumnya.

Disamping itu dilakukan juga upaya optimalisasi peranan stakeholder dalam pelaksanaan program pengarusutamaan Gender yang melibatkan 80 perencana dan staf OPD se-Kota Batam. Perencana tersebut telah berkontribusi dalam penyusunan rencana teknis penganggaran program pembangunan Kota Batam yang berbasis gender (Ketersediaan anggaran yang mengalokasikan kesetaraan gender/*Gender Analysis Pathway/Gender Budgeting Statement* GAB/GBS). Hal tersebut diukur oleh indikator Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam yang selama tahun 2016-2020 realisasinya selalu mencapai target tahunan, pada tahun 2019 tercatat persentase ARG terhadap belanja langsung APBD sebesar 11,43 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 persentase ARG

terhadap belanja langsung APBD adalah sebesar 11,30 persen, mengalami penurunan yang tidak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Demikian halnya pelaksanaan pemetaan data gender dan anak yang telah disusun melalui pembangunan jaringan SIPUGA (Sistem Aplikasi Pengarusutamaan Gender dan Anak) yang menjadi basis penguatan pembangunan kesetaraan gender Kota Batam. Ketersediaan data ini diharapkan dapat memudahkan pemetaan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat OPD Pemerintah Kota Batam dalam usaha mencapai kesetaraan gender di seluruh elemen masyarakat. Sejak tahun2018-2020 persentase pembaharuan data gender dan anak setiap tahun telah mencapai realisasi 100 persen.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, telah diupayakan berbagai hal baik berupa sosialisasi/penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di 12 kecamatan se-Kota Batam. Bukanlah hal yang biasa bagi kita saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap terjadi dan tidak jarang meninggalkan efek traumatis berkepanjangan dalam hidup kaum perempuan dan anak. Dipandang perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggiatkan Perda Nomor 2 Tahun 2016. Diharapkan perempuan semakin cerdas dalam membentengi diri dari berbagai tindakan kekerasan demikian halnya anak-anak mendapat perlindungan dan hak hidup sebagaimana mestinya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 telah terbentuk 15 Kelurahan Layak Anak, 2 kecamatan Layak Anak (Kecamatan Sagulung dan Lubuk Baja), pembentukan Forum Anak Kecamatan Kota Batam di 3 kecamatan (Batu Aji, Sekupang, Sagulung) dan aktif melaksanakan penyuluhan perlindungan anak di Kota Batam yang pada tahun 2019 dan 2020 dilaksanakan di 4 kecamatan (Batu Aji, Sagulung, Sei Beduk, Lubuk Baja). Melalui wadah ini diupayakan juga ketersediaan fasilitas-fasilitas yang ramah anak seperti tempat bermain, pojok baca, dan penyediaan

klinik laktasi di tempat-tempat umum (Mall, bandara, perkantoran, dll). Ketersediaan instrumen, fasilitas dan sarana di atas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tumbuh kembang anak di Kota Batam dalam upaya pencapaian Kota Batam sebagai Kota Layak Anak. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 indikator Skor Kota Layak Anak selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2016 tercatat 501, mengalami peningkatan menjadi 700 di tahun 2019 dan skor ini bertahan sampai dengan tahun 2020. Capaian tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut masuk dalam kategori madya (601-700), sehingga Kota Batam dalam perspektif ke depan perlu menargetkan kategori nindya (701-800) untuk kemudian mencapai kategori utama (801-1000). Lebih lanjut penjabaran indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disampaikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 74 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	Target	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
		Realisasi	4,5	6,37	9,93	11.43	11,30
ii	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Target	5	5	5	5	5
		Realisasi	5	5	5	5	5
iii	Persentase pembaharuan data gender dan anak setiap tahun*	Target	-	-	100	100	100
		Realisasi	-	-	100	100	100
iv	Skor Kota Layak Anak	Target	500	500	600	650	700
		Realisasi	501	536	630	700	700
v	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	Target	90	100	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam
catatan: indikator ke-3 baru dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga tidak ditargetkan di 2016 dan 2017

2.3.1.9 Urusan Ketahanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Ketersediaan pangan dapat diperoleh dari produksi daerah sendiri, pasokan pangan dari luar daerah, memiliki cadangan pangan dan adanya bantuan pangan. Kota Batam merupakan daerah yang kebutuhan pangannya bergantung pada pasokan dari daerah lain. Hal ini mengingat kondisi tanah di Batam yang kurang sesuai untuk pertanian dan perkebunan. Bahkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah pun tidak ada lahan yang khusus diperuntukan untuk pertanian di Pulau Batam.

Adapun pola penyediaan ketersediaan pangan di Kota Batam dilakukan per 2 bulan. Hal in disebabkan pemasokan barang dari luar daerah Kota Batam selama ini selalu lancar dan tidak ada kendala. Bahkan untuk beras telah diatur sedemikian rupa oleh Bulog agar jumlah ketersediaan di Kota Batam tidak kurang. Ketergantungan dengan swasta pada akhirnya disiasati dengan melakukan koordinasi penuh melalui Asosiasi Bahan Pokok Kota Batam agar jumlah persediaan di Kota Batam tidak kurang. Distribusi pangan di Kota Batam diperoleh melalui pasar rakyat dan modern (supermarket, mini market, dan ritel lainnya). Adapun jumlah pasar rakyat di Kota Batam pada tahun 2020 sebanyak 44 pasar yang terdiri dari Pasar Pemerintah 6 (enam) pasar dan Pasar Swasta sebanyak38 (tiga puluh delapan) buah.

Persentase ketersediaan pangan selama 5 periode dari tahun 2016-2020 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, pada tahun 2016 ketersediaan pangan di Kota Batam mencapai 30% dan terus meningkat hingga 36% pada tahun 2020. Perkembangan indikator ketersediaan pangan selama tahun 2017 hingga tahun

2019 mengalami tren yang berfluktuatif, pada tahun 2017 tercatat 129,89 kg/jiwa/tahun, kemudian mengalami penurunan menjadi 97,135 kg/jiwa/tahun di tahun 2018, selanjutnya memasuki tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 108,45 kg/jiwa/tahun dan 151,23 kg/jiwa/tahun di tahun 2020. Jika ditelaah lebih dalam, ketersediaan pangan tahun 2019 mengalami surplus, hal ini diketahui dari jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 1.329.773 jiwa, ketersediaan pangan sebesar 108,45 kg/jiwa/tahun atau setara 144.225 ton/tahun, sementara kebutuhan pangan sebesar 105,94 kg/jiwa/tahun atau setara 140,872 ton/tahun, sehingga terdapat surplus sebesar 3.354 ton. Demikian halnya pada tahun 2020 yang mana Kota Batam telah mencapai ketersediaan pangan utama beras sebesar 151,23 kg/jiwa/tahun.

Tabel 2. 75 Realisasi Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Ketersediaan Pangan	Target	30	30	32	34	36
		Realisasi	30	30	34	34	36
2	Ketersediaan Pangan Utama Beras (kg/jiwa/tahun)		-	129,89	97,135	108,45	151,23
3	Persentase Pangan Aman Konsumsi		-	100	100	100	100
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		-	88,5	86,5	91,3	92,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam
catatan: pelimpahan kewenangan ketahanan pangan mulai tahun 2017

Lebih lanjut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam konteks menjalankan fungsi ketahanan pangan memiliki kewenangan dalam pengawasan keamanan pangan segar, atau dengan kata lain mendapat limpahan kewenangan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mulai tahun 2017. Selama tahun 2017 hingga tahun 2020 persentase pangan aman konsumsi dalam konteks pangan segar selalu mencapai 100 persen, dengan kata lain seluruh pangan segar di Kota Batam telah dijamin aman konsumsi.

Salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan pangan dan gizi khususnya dalam hal diversifikasi konsumsi pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dari data dapat diketahui bahwa skor PPH Kota Batam dari tahun ke tahun secara umum mengalami kenaikan yang mana pada tahun 2017 skor PPH adalah 88,5 menurun di tahun 2018 menjadi 86,5. Selanjutnya mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2020 skor PPH Kota Batam mencapai 92,2 yang dapat dikategorikan sudah baik.

2.3.1.10 Urusan Pertanahan

Penjabaran kinerja urusan pertanahan termuat dalam Tabel 2.76. Indikator Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi sebesar 31,79% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Aset Pemerintah Kota Batam yang belum memiliki dokumen lahan sebanyak 476 persil dari 728 persil (65,4% belum selesai termasuk jalan). Sementara untuk kampung tua yang sudah selesai disertifikasi sebanyak 7 kampung tua dari sebanyak 37 kampung tua dan masih menyisakan 81,1% atau 30 kampung tua yang belum selesai sertifikasinya.

Tabel 2. 76 Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi	Target	31,79	47,62	71,43	100	0
		Realisasi	31,79	47,62	71,43	100	0
ii	Jumlah pengadaan dokumen tanah aset Pemko Batam	Target	-	50	102	105	100
		Realisasi	-	3	4	5	44
iii	Fasilitas Penggunaan Sertifikat lahan masyarakat (dokumen)	Target	-	100	100	100	100
		Realisasi	-	100	100	-	89
iv	Jumlah pengadaan lahan asset Pemko Batam (persil)	Target	-	-	139	110	98
		Realisasi	-	-	13	10	110
v	Jumlah kampung tua	Target	7	8	9	10	-

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	yang memiliki dokumen PL atas nama Pemko Batam	Realisasi	7	1	Inventarisasi di 16 kampung tua	Penataan dan persertifikatan lahan masyarakat kp tua di 3 lokasi (1.398 sertifikat)	Penataan dan persertifikatan lahan masyarakat kp tua di 4 lokasi (470 sertifikat)

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Batam

2.3.1.11 Urusan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.77 untuk indikator persentase jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/terverifikasi terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 dengan realiasi 95,08 persen dari target yang direncanakan 90,00 persen, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 98,00 persen dari target 90,00 persen, untuk indikator ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dari target 40,00 persen pada tahun 2017 dengan realiasasi 40,00 persen terus mengalami peningkatan menjadi 55,00 persen pada tahun 2020.

Untuk persampahan, realisasi indikator persentase sampah yang dikelola secara 3R (reduce, reuse, recycle) masih tergolong sangat kecil yakni hanya sampai 6 persen di tahun 2020. Produksi sampah di Kota Batam tahun 2020 rata-rata 1.000 ton per hari, artinya hanya 50 ton yang dikelola secara 3R. Sementara itu untuk indikator persentase pengangkutan sampah mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2018 sebesar 81,15 persen kemudian menurun menjadi 79,48 persen di tahun 2020.

Berdasarkan data target dan realisasi pengelolaan sampah yang dilakukan DLH Kota Batam Tahun 2020, dapat disampaikan sebagai berikut:

- Target timbulan sampah pada tahun 2020 sebesar 1165 ton/hari (0.9 kg/hari/orang)

- Jumlah yang terangkut dari sumber sampah (perumahan, industry, jasa, TPS, dll) ke TPA Telaga Rungur Tahun 2020 (data penimbangan DLH) adalah sebesar 289.174.030 ton/tahun atau setara dengan 792, 26 ton/hari
- Persentase pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) baru mencapai ± 6 %, atau setara dengan 50.39 ton/hari

Sampah yang dikelola tidak sesuai ketentuan (dibakar, dibuang ke badan air dan media lingkungan lainnya) ±7 %atau setara dengan 59 ton/hari.

Tabel 2. 77 Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Persentase jumlahpengaduan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti/terverifikasi	Target	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		Realisasi		95,08	97,96	98,00	98,00
ii	Ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan	Target	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00
		Realisasi		40,00	47,00	46,00	55,00
iii	Persentase pengangkutan sampah	Target	63,29	65,00	70,00	75,00	80,00
		Realisasi		84,91	81,15	67,30	79,48
iv	Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3R (pengomposan, bank sampah, dll)	Target	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
		Realisasi	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Untuk persampahan, realisasi indikator persentase sampah yang dikelola secara 3R (*reduce, reuse, recycle*) masih tergolong sangat kecil yakni hanya sampai 6 persen di tahun 2020. Produksi sampah di Kota Batam tahun 2020 rata-rata 1.000 ton per hari, artinya hanya 50 ton yang dikelola secara 3R.

Berdasarkan data realisasi tahun 2020, jumlah sampah yang terangkut dari sumber sampah (perumahan, industri, jasa, TPS dll) ke TPA Telaga Punggur adalah sebesar 289.174.030 ton/tahun atau setara dengan 792,26 ton/hari (68,35% dari target 1.265 ton/hari). Pengelolaan sampah dengan konsep 3R baru mencapai± 6% atau setara 50,39 ton/hari, sampah yang dikelola tidak sesuai

ketentuan (dibakar, dibuang ke badan air penerima dan media lingkungan lainnya) ± sebesar 7% atau setara 59 ton/hari.

2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara umum perkembangan realisasi kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Batam tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan hasil yang positif. Cakupan penerbitan KTP selama tiga tahun terakhir tidak mencapai target tahunan, pada tahun 2018 ditargetkan 98 persen, namun terealisasi 97,23 persen, sementara pada tahun 2019 realisasinya meningkat menjadi 97,5 persen, namun target sebesar 100 persen tetap belum tercapai. Kondisi demikian dikarenakan adanya keterbatasan blanko KTP yang berasal dari pemerintah pusat, sehingga tidak semua penduduk yang mengurus KTP dapat mencetak KTP-nya. Pada tahun 2020 cakupan penerbitan KTP juga masih belum mencapai target 100 persen, yang mana cakupan penerbitan KTP tahun 2020 adalah sebesar 97,9 persen.

Tabel 2. 78 Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Penerbitan KTP	Target	85	87	98	100	100
		Realisasi	87,01	91,75	97,23	97,5	97,9
2	Persentase penduduk yang memiliki KK	Target	84,17	89	98	100	100
		Realisasi	89,6	90,02	93,01	93,7	94,5
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Target	75	77	80	82,5	85
		Realisasi	73,9	81,2	83,9	88,3	89,1
4	Persentase Pemanfaatan database kependudukan oleh *stakeholder*	Target	-	83	85	89	91
		Realisasi	-	85	85,71	89,95	91

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Untuk indikator persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK), realisasi selama tiga tahun terakhir meningkat, namun target tahunan tidak tercapai. Pada tahun 2017 ditargetkan 89 persen hanya terealisasi 90,02 persen, dua tahun kemudian ditargetkan 100 persen namun hanya terealisasi 93,7 persen. Kondisi demikian dipengaruhi karena adanya anggota keluarga yang sudah menikah belum melakukan pengurusan pisah KK dari keluarga asal,

biasanya terjadi pada penduduk yang bekerja di sektor informal. Pada tahun 2020 persentase penduduk yang memiliki KK bertambah dibanding tahun sebelumnya yang mana tahun 2020 mencapai 94,5 persen.

Sementara itu untuk indikator penerbitan akta kelahiran realisasi selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan mencapai target tahunan. Pada tahun 2017 ditargetkan 77 persen dan terealisasi 81,2 persen, kemudian meningkat menjadi 88,3 persen di tahun 2019. Kondisi belum mencapai 100 persen karena adanya perpindahan penduduk, sehingga anak yang lahir di Kota Batam kemudian pindah tidak diurus akte kelahirannya di Kota Batam. Pada tahun 2020 realisasi cakupan penerbitan akta kelahiran dapat mencapai targetnya yang mana pada tahun 2020 cakupan penerbitan akta kelahiran adalah 89,1 persen melebihi target 85 persen.

Selanjutnya untuk indikator persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder mengalami kenaikan setiap tahunnya, di tahun 2017 tercatat 85 persen kemudian selama dua tahun meningkat menjadi 89,95 persen di tahun 2019, lalu meningkat menjadi 91 persen di tahun 2020. Indikator ini menggambarkan kemanfaatan database kependudukan oleh instansi yang mensyaratkan data dan informasi kependudukan bagi mitra nya, sebagai contoh perbankan, KPU, Kepolisian, Pajak, KPK, dst.

2.3.1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan suatu daerah akan mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kemajuan suatu daerah. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu urusan yang menjadi perhatian besar bagi Pemerintah Kota Batam. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan terlihat pada indikator tersebut di bawah ini.

Tabel 2. 79 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	Target	PKK 77, LPM 77, Posyandu 450, RT 3215, RW 772, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif 128 org	PKK 77, LPM 77, Posyandu 500, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif 256 org	PKK 77, LPM 77, Posyandu 600, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif 384 org	PKK 77, LPM 77, Posyandu 600, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif 512 org	PKK 77, LPM 77, Posyandu 650, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif 512 org
		Realisasi	77 PKK,77 LPM,450 Posyandu, 3215 RT, 772 RW, 320 KPM, 128 orang Kader Siaga Aktif	PKK 77, LPM 77, Posyandu 501, Kader Siaga Aktif 128 org	PKK 77, Posyandu 500, Kader Siaga Aktif 256 org	PKK 77, Posyandu 501, Kader Siaga Aktif 128 org	PKK 77, LPM 77, Posyandu 650, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif 512 org
2	Meningkatnya swadaya masyarakat	Target	Swadaya 30%, Goro 2000 org	Swadaya 35%, Goro 500 org	Swadaya 40%, Goro 500 org	Swadaya 45%, Goro 500 org	Swadaya 50%, Goro 500 org
		Realisasi	Swadaya 30%, Goro 2000 org	Swadaya 100%, Goro 1000 org	Swadaya 100%, Goro 1000 org	Swadaya 100%, Goro 1000 org	Swadaya 100%, Goro 1000 org
3	Meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan	Target	UEM-SP 10, POSYANTEK 9, TTG 31	UEM- SP 10, POSYANTEK 1, TTG7, Pelatihan 100 orang	UEM- SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan 250 orang	UEM- SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan 250 orang	UEM- SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan 250 orang
		Realisasi	UEM-SP 10, POSYANTEK 9, TTG 31	TTG 7	POSYANTEK 9, TTG 7	POSYANTEK 9, TTG 7	POSYANTEK 9, TTG 7
4	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	Target	5%	6%	7%	8%	9%
		Realisasi	5%	5%	6%	8%	9%

Sumber: Dinas Sosial dan 12 Kecamatan

2.3.1.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam meningkatkan sasaran Pasangan Usia Subur dan Persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate*/CPR). CPR mempunyai definisi Angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai alat kontrasepsi pada

saat pencacahan. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Batam Tahun 2020 sebanyak 233.626 pasang. Untuk peserta KB aktif Kota Batam pada tahun 2020 sebanyak 196.295 peserta. Rumus dari CPR adalah Peserta KB Aktif (PA) dibagi Pasangan Usia Subur (PUS) x 100%. Pada tahun 2020 capaian dari indikator ini sebesar 84,02% dan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 73,50%.

Pencapaian CPR (*contraceptive prevalence rate*) ini dilakukan melalui penyuluhan dan layanan program keluarga berencana di 12 kecamatan se-Kota Batam. Dengan menggiatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan program KB dalam Pencapaian CPR (*contraceptive prevalence rate*) ini dilakukan melalui penyuluhan dan layanan program keluarga berencana di 12 kecamatan se-Kota Batam. Dengan menggiatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan program KB dalam keluarga, remaja sedini mungkin diberikan pemahaman yang matang dalam perencanaan perkawinan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi yang sangat penting dalam melahirkan tunas generasi yang unggul.

Penggerakan Kampung KB merupakan pemetaan penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi yang perlu dijadikan prioritas program layanan KB yang didukung oleh kader Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB 76 orang), Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD/sub PPKBD 128 orang) sebagai ujung tombak penggerak program KB di kecamatan dan kelurahan.

Dalam hal meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaksanakan program KB ini, maka ketercapaian *Contraceptive Prevalence rate* di Kota Batam sebesar 80,26% dapat membantu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 84,02%, sehingga upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk menjadi lebih baik. Dengan kata lain capaian indikator

ini terintegrasi dari keberhasilan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dengan peran serta PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD Kota Batam.

Tabel 2. 80 Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	Target	71,5	72	72,5	73	73,5
		Realisasi	71,5	83,29	84,3	80,26	84,02
2	Cakupan kelompok bina ketahanan keluarga		236	242	249	285	327
3	Cakupan tenaga lini lapangan yang didayagunakan perangkat daerah KB		76	140	204	268	332
4	Cakupan penyediaan informasi Data Mikro keluarga di setiap desa/kelurahan		-	-	70	-	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

2.3.1.15 Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Sejak tahun 2004 Kota Batam telah memiliki sistem transportasi perkotaan Trans Batam, secara *gradual system* transportasi tersebut mengalami peningkatan jumlah koridor setiap tahunnya. Peningkatan jumlah koridor dan armada diikuti dengan peningkatan jumlah penumpang Trans Batam. Perkembangan peningkatan jumlah penumpang disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 81 Capaian Jumlah Penumpang, Jumlah Armada dan Jumlah Koridor Trans Batam Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penumpang		Jumlah Koridor		Jumlah Armada (unit)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2016	970.000	1.018.635	6	6	60	60
2017	1.460.000	2.019.603	8	8	55	55
2018	1.845.000	2.388.718	9	8	60	60
2019	2.230.000	2.647.305	9	8	60	60
2020	2.615.000	1.313.241	10	8	60	60

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Pada Tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penumpang dikarenakan pada bulan Maret Pandemi Covid-19 sudah mulai melanda Indonesia khususnya Kota Batam. Hasil survey kebutuhan di lapangan jumlah koridor yang dibutuhkan Kota Batam untuk mengintegrasikan jaringan transportasi angkutan umum dibutuhkan sebanyak sebanyak 11 koridor dan kebutuhan armada sebanyak 130 unit dengan asumsi bus beroperasi selama 16 jam sehari. Akan tetapi karena keterbatasan armada dan biaya operasional belum terpenuhi.

Dalam membantu Kota Batam mengurai kemacetan, dalam perspektif pembangunan jangka menengah periode 2021-2026, Dinas Perhubungan Kota Batam akan mengoperasikan dan menyediakan pelayanan angkutan orang trayek pengumpan (*Feeder*) perintis bagi pelayanan angkutan penumpang Bus Trans Batam yang dilaksanakan oleh UPT Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan Kota Batam. Lebih lanjut, upaya tersebut turut menunjang pelayanan transportasi massal yang terintegrasi mulai dari pelayanan transportasi laut, bus Trans Batam dan Trayek Pengumpan (*Feeder*). Adapun Rute Angkutan Orang Trayek Pengumpan (*Feeder*) perintis yang telah disusun oleh UPT Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 82 Rencana Rute Angkutan Orang Trayek Pengumpan (Feeder)

No	Jurusan Trayek	Kode Trayek	Rute	Kuota
1.	Halte Trans Batam Fanindo – Kp Tua Dapur 12 Sagulung (PP)	TF.01	Halte Trans Batam Fanindo – Simpang Tiga Klinik Elizabeth – Pasar Seroja – Simpang Kantor Lurah Sei Pelunggut – Kavling Melati – Kampung Tua Dapur 12 Sagulung (PP)	20
2.	Halte Trans Batam SP Plaza – Halte Trans Batam Pasar Melayu (PP)	TF.02	Halte Trans Batam SP Plaza – Kantor Camat Sagulung – Kantor Polsek Sagulung – Kantor Lurah Sei Langkai – Simpang Nato – Kantor Lurah Sei Lekop – Kavling Lama – Simpang Kantor Lurah Sagulung Kota – Halte Trans batam Pasar Melayu (PP)	20
3.	Halte Trans Batam Tiban Kampung – Tiban Housing (PP)	TF.03	Halte Trans Batam Tiban Kampung – Tiban BTN – Sekolah Ulil Albab – Simpang Gereja Tiban 3 – GOR Badminton Tiban – POM Bensin Tiban 3 – Tiban Koperasi – Tiban Housing (PP)	20
4.	Halte Trans Batam Engku Puteri – Halte Trans Batam Jalan Yos Sudarso (PP)	TF.04	Halte Trans Batam Engku Puteri – Hotel Harmoni One – Tabitha Furniture (BCM) – Bundaran Tropicana – Bengkong Sadai – Kantor Camat Bengkong – Bengkong Laut – Bengkong Garama – Halte Trans Batam Jalan Yos Sudarso (PP)	20

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Selanjutnya peta rencana pengembangan sistem transportasi Kota Batam, koridor bus dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

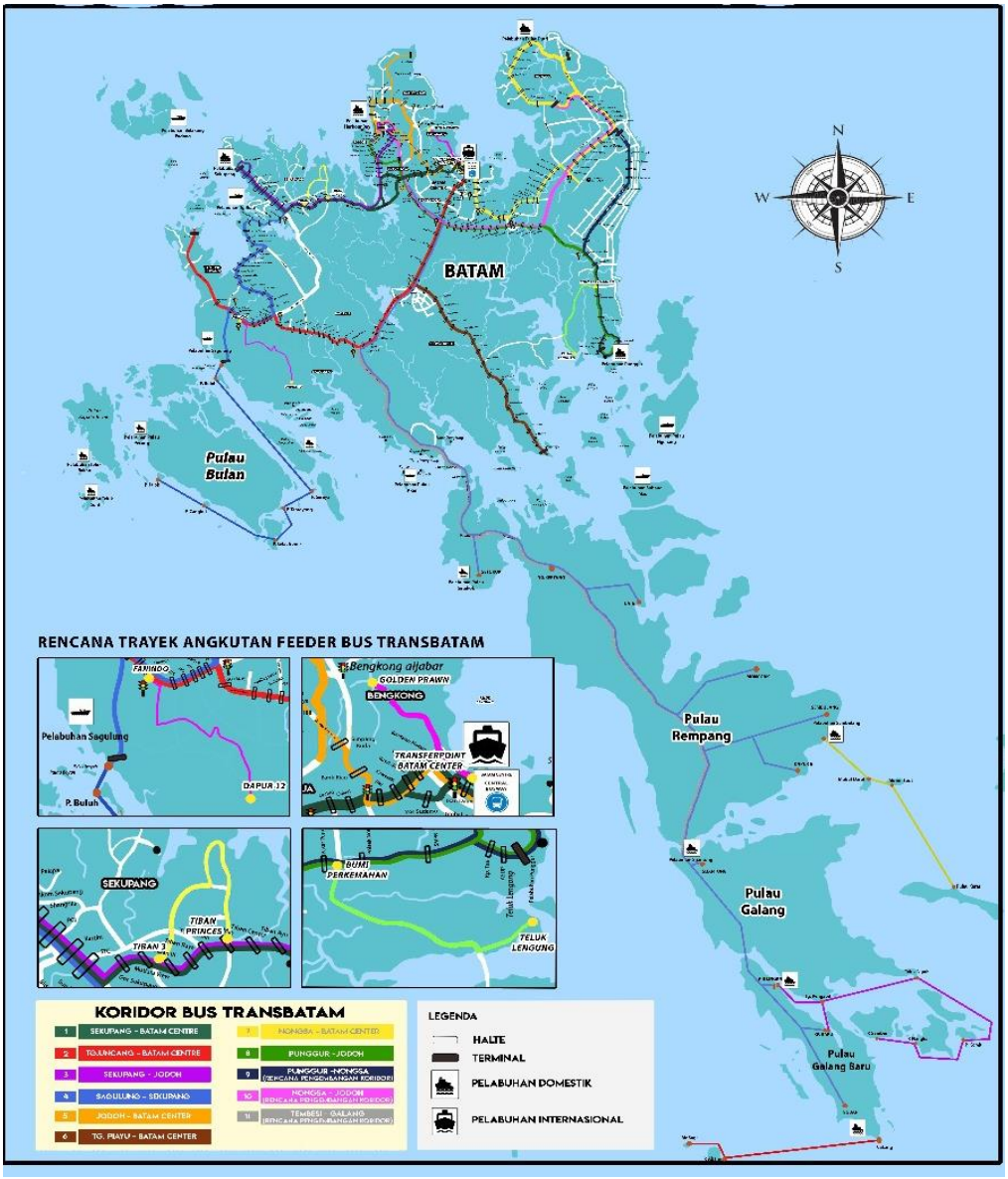

Gambar 2. 66 Peta Koridor Bus Trans Batam, Rute Bus Sekolah Batam, Trayek Angkutan Laut Perintis dan Rencana Trayek Angkutan Feeder Bus Trans Batam

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Sementara itu, gambaran transportasi tahun 2020 di Kota Batam berdasarkan data dari ijin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.83, terlihat bahwa jenis kendaraan taksi paling banyak beroperasi di kawasan Kota Batam. Sebanyak 2.545 ijin trayek untuk taksi telah dikeluarkan selama periode 2015-2020. Sementara itu sebanyak 1.745 ijin trayek cabang telah dikeluarkan selama periode 2016-2020. Meski demikian, apabila dilihat dari rasio ijin trayek terlihat bahwa angkutan umum di Kota Batam

cenderung masih kecil. Rasio ijin trayek untuk taksi pada tahun 2020 hanya sebesar 0,002127 hal ini berarti terdapat 2,12 taksi setiap 1.000 penduduk Kota Batam pada tahun 2020.

Tabel 2. 83 Rasio Ijin Trayek di Kota Batam Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	1.236.399	1.283.196	1.329.773	1.107.551	1.196.396
2	Jumlah izin trayek					
	Taksi	2.547	2.545	2.545	2.545	2.545
	Trayek utama	617	617	617	817	817
	Trayek cabang	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
	Trayek ranting	101	101	101	101	101
	Angkutan karyawan	230	338	351	314	314
	Angkutan pariwisata	100	147	168	122	122
3	Rasio izin trayek					
	Taksi	0,002060	0,001983	0,001914	0,002298	0,002127
	Trayek utama	0,000499	0,000481	0,000464	0,000738	0,000683
	Trayek cabang	0,000001	0,000001	0,000001	0,000002	0,000001
	Trayek ranting	0,000082	0,000079	0,000076	0,000091	0,000084
	Angkutan karyawan	0,000186	0,000263	0,000264	0,000284	0,000262
	Angkutan pariwisata	0,000081	0,000115	0,000126	0,000110	0,000102

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Terkait uji KIR angkutan umum, dari Tabel 2.84. terlihat bahwa truk dan mobil angkutan barang merupakan jenis kendaraan yang paling banyak melakukan uji KIR. Hal ini sesuai dengan fungsi Kota Batam sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang diarahkan sebagai kota industri dan perdagangan.

Tabel 2. 84 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Batam Tahun 2016-2020

Tahun	Uraian	Angkutan Umum				
		Taksi	Oplet	Bis	Truk	Truk Tempel
2016	Kendaraan	2.507	1.737	3.185	22.360	861
	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	1.321	125	1.730	18.517	584
2017	Taman Kendaraan	2.513	1.737	3.254	23.166	861
	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	1.609	81	1.778	18.472	578
2018	Taman Kendaraan	2.513	1.737	3.356	23.818	861
	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	1.437	65	1.683	18.168	519
2019	Taman Kendaraan	1.250	1.155	2.505	19.117	863
	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	1.680	60	1.839	18.291	519
2020	Taman Kendaraan	1.250	655	2.546	19.785	1.363
	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	824	44	1.283	15.126	503

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Untuk indikator jumlah titik lokasi parkir tepi jalan umum setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 tercatat 188 titik parkir tepi jalan, kemudian selama lima tahun meningkat menjadi 556 titik parkir tepi jalan. Pertimbangan utama dalam menambah titik parkir adalah adanya peluang peningkatan retribusi dari sektor perparkiran, namun demikian hingga tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah titik parkir tidak diikuti dengan peningkatan retribusi. Pada akhirnya dampak negatif yang muncul dari banyaknya titik parkir tepi jalan adalah mengurangi keindahan kota, dan juga mengorbankan ruang dan kenyamanan pejalan kaki. Trotoar yang sering kali berhadapan dengan parkiran, daripada gedung dan etalase yang menarik, membuat pengalaman berjalan kaki jadi tidak menarik. Penggunaan kendaraan pribadi juga menutup kemungkinan interaksi antar penduduk. Beda ceritanya bila suatu kota lebih banyak ruang terbuka hijau, ruang publik dan trotoar yang nyaman dan menarik. Lebih jauh lagi, parkir atau ketersediaan ruangnya malah mendorong orang untuk membawa kendaraan pribadi yang akan bersumbangsih pada kemacetan. Parkir sebenarnya adalah faktor yang sering diabaikan padahal berkontribusi terhadap krisis perumahan kota dan kurangnya ruang terbuka hijau. Terlebih lagi, tanpa disadari, semua orang termasuk yang tidak memiliki

kendaraan ikut mensubsidi parkir lewat peraturan pemerintah. Bukannya meringankan beban kota, parkir justru memperberat perkembangan kota bagi penduduknya. Kondisi perparkiran di Kota Batam perlu dilakukan evaluasi agar pada periode selanjutnya dapat diputuskan kebijakan perparkiran yang sesuai dengan semangat penataan kota yang baik.

Sebagai alternatif, dalam konteks jangka menengah ini pemerintah Kota Batam perlu mempersiapkan antisipasi fenomena kemacetan yang pasti akan muncul jika tidak ada upaya dini untuk itu, antara lain berfokus pada area yang sudah dilayani oleh transportasi massal yang andal seperti Trans Batam, dan beberapa alternatif lainnya sebagai berikut:

1. Batasi persediaan ruang parkir. Daripada harus mensyaratkan kuota parkir minimum, pemerintah daerah sebaiknya memperbarui peraturan dan mengubahnya menjadi kuota maksimum penyediaan parkir.
2. Hapus batas tarif parkir dan biarkan harga pasar bekerja. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk naik angkutan umum.
3. Beri insentif konversi ruang parkir yang ditujukan untuk aktivitas masyarakat.
4. Ciptakan kawasan-kawasan ramah pejalan kaki dengan area-area tanpa tempat parkir.
5. Perkenalkan konsep *park-and-ride* di kantong-kantong transit di pinggiran kota sehingga masyarakat tidak perlu membawa kendaraan pribadi ketika ke pusat kota.

Selanjutnya, untuk indikator tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan (%) sejak tahun 2016-2019 selalu mencapai target tahunan, namun pada tahun 2020 tidak mencapai target, realisasi sebesar 70 persen dari target 90 persen. Untuk persentase angkutan layanan darat dan laut yang tercatat di tahun 2020 adalah 60 persen. Kemudian untuk Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun (terminal, rambu, halte, transfer point, marka, *traffic light)* mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sebesar 59 persen, meningkat menjadi 65 persen di tahun 2020. Sedangkan untuk indikator sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara mengalami penurunan signifikan

sejak tahun 2016 sebesar 80 persen, kemudian menjadi sebesar 25 persen di tahun 2017, sebesar 30 persen di tahun 2018, dan naik tidak signifikan di tahun 2020 menjadi 40 persen. Selanjutnya cakupan pembangunan pelabuhan di hinterland sejak 2016 hingga 2019 tidak memenuhi target setiap tahunnya, pada tahun 2020 realisasi tercatat 67 persen sementara target pada tahun tersebut 90 persen.

Tabel 2. 85 Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	meningkatnya cakupan pelayanan parkir (Jumlah titik lokasi parkir tepi jalan umum)	Target	188	198	208	218	228 lokasi
		Realisasi	188	198	482	548	556
2	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketing	Target	0.97 jt	1.460 jt	1.845 jt	2.230 jt	2.615 jt
		Realisasi	1,018,635	2,019,603	2,388,718	2,647,305	1,313,241
3	Panjang Jalan Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (Km & Jumlah Koridor)	Target	94	181.5	201	246	246 km
		Realisasi	94	237	240.5	173.5	183.4
		Target	5	5	7	9	9 koridor
		Realisasi	6	8	8	8	8
4	Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Terbangun	Target	33	45	55	65	65%
		Realisasi	33	50	51	55	59%
5	Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara	Target	20	25	30	40	50%
		Realisasi	20	42	42	40	40%
6	Jalur Sepeda	Target	0	0	2	3.5	5.5 km
		Realisasi	0	0	0	0	0

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
7	Pembangunan pelabuhan di hinterland	Target	3	2	2	2	2 dermaga
		Realisasi	3	2	1	1	0
8	Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Target	0	3	0	1	1 kapal
		Realisasi	0	3	5	0	0
9	Persentase layanan angkutan darat dan laut		23,88%	46,84%	51,77%	54%	33%
10	Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan		37%	36%	34%	70%	70%
11	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun		42%	63%	65%	69%	59%
12	Persentase sarana prasarana perhubungan yang terpelihara		35%	42%	42%	40%	40%
13	Tersedianya dermaga penyeberangan pada kabupaten/kota		33%	33%	50%	67%	67%
14	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota		50%	100%	183%	183%	183%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

2.3.1.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan arah pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional 2010-2014, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah, yang menjadi bagian dari Program *Universal Service Obligation* (USO) atau kewajiban pelayanan universal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (*realtime).* Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintah Kota Batam memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat https://www.batam.go.id. Selain situs resmi utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam bentuk website yang dikelola oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Kota Batam juga memanfaatkan TIK dalam bentuk aplikasi/sistem informasi sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dan kemudahan akses layanan adminsitrasi pemerintahan bagi aparatur.

Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota Batam telah memanfaatkan teknologi informasi untuk layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan sebesar 40 (empat puluh) persen, sedangkan pada tahun 2019 naik sebesar 68 persen dan tahun 2020 capaian menjadi 73 persen, masih belum memenuhi target yang ditentukan. Adapun rincian layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran (layanan administrasi pemerintahan);
2. Keuangan (layanan administrasi pemerintahan);
3. Pengadaan Barang dan Jasa (layanan administrasi pemerintahan);
4. Kepegawaian (layanan administrasi pemerintahan);
5. Pekerjaan dan Usaha, (Layanan Publik);
6. Lingkungan Hidup (Layanan Publik);
7. Pariwisata (Layanan Publik);

8. Komunikasi dan Informatika (Layanan Publik);
9. Pendidikan (Layanan Publik);
10. Perencanaan (layanan administrasi pemerintahan);
11. Kesehatan (Layanan Publik);
12. Aset (layanan administrasi pemerintahan);
13. Kearsipan/Surat Menyurat (layanan administrasi pemerintahan);
14. Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja (layanan administrasi pemerintahan).

Layanan Lain (Kependudukan, Pelaporan, Ketenagakerjaan, Kesejahteraan Sosial/Bansos, pemuda dan Olahraga, Hukum, Politik, Pertanian, Perikanan, Jasa Konstruksi/Cipta Karya, Perdagangan, Tempat Tinggal, Perhubungan)

Tabel 2. 86 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi	Target	C (43-62.50)	B (62.51-81,25)	B (62.51-81,25)	B (62.51-81,25)	B (62.51-81,25)
		Realisasi	C (62)	B (65)	B (70)	B (75)	A (85)
ii	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online	Target	0	29	52	68	84
		Realisasi	40	55	63	68	73

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan selama ini berbasis web. Melalui sistem informasi yang terpadu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Batam telah membangun aplikasi atau sistem informasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Kepuasan masyarakat yang memperoleh layanan informasi menjadi indikator kinerja Pemerintah Kota Batam dalam melayani

masyarakat. Tingkat kepuasan yang memperoleh layanan informasi Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.86 di atas.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi: Rencana Induk SPBE Nasional. Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Pada tahun 2020, SPBE Kota Batam telah dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB dengan hasil sebagai berikut:

- Domain Kebijakan SPBE : 2,76
- Domain Tata Kelola SPBE : 2,57
- Domain Layanan SPBE : 3,48

Adapun indeks SPBE Kota Batam tahun 2020 yaitu 3,11 dengan predikat “Baik”.

INDEKS SPBE - PEMERINTAH KOTA BATAM	3,11 (Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Nama Indeks	Nilai
SPBE	3,11
Domain Kebijakan Internal SPBE	2,76
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,86
Kebijakan Internal Layanan SPBE	2,70
Domain Tata Kelola SPBE	2,57
Kelembagaan	3,00
Strategi dan Perencanaan	2,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,33
Domain Layanan SPBE	3,48
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,57
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33

Gambar 2. 67 Indeks SPBE Kota Batam Tahun 2020

2.3.1.17 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator Kinerja urusan koperasi dan usaha mikro disampaikan pada Tabel 2.87. Secara umum indikator yang mengukur pelayanan terhadap koperasi dan usaha mikro binaan menunjukkan rata-rata capaian yang positif. Untuk indikator jumlah Koperasi Aktif mengalami peningkatan dari 222 unit pada tahun 2016 menjadi 235 unit pada tahun 2020. Uraian lebih rinci terkait kondisi perkoperasian tahun2016-2020 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 87 Kondisi Koperasi di Kota Batam hingga Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi (unit)	982	988	1010	1014	899
2	Koperasi Aktif (unit)	222	224	228	230	235
3	Jumlah Koperasi yang memiliki sertifikat NIK (unit)	1	36	46	76	85

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah Anggota Koperasi (orang)	13.100	17.200	15.733	26.100	36.507
5	Jumlah tenaga kerja yang terserap	184	189	191	193	206
6	Jumlah modal sendiri (Rp)	97,936,029	77,765,589,903	68,202,748,790	147,404,425,374	64.393.796.582
7	Jumlah modal luar (Rp)	92,895,840,474	95,895,840,474	96,235,840,474	96,995,840,474	213.621.555.655
8	Jumlah Volume Usaha (Rp)	240,310,486	112,503,553,626	86,934,125,323	218,401,065,307	259.515.461.246
9	Jumlah SHU (Rp)	13,124,616	11,451,866.225	10,380,914,253	20,635,258,383	31.617.526.206
10	Jumlah Koperasi Baru (unit)	24	6	22	24	16
11	Jumlah Koperasi yang dibubarkan (unit)	0	1	19	131	0
12	Koperasi dalam proses penyelesaian pembubaran koperasi oleh pemerintah (unit)	0	0	20	0	131
13	Jumlah Koperasi dalam proses pencabutan Badan Hukum (unit)	0	0	0	20	0

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Koperasi belum bisa berperan sebagai lembaga ekonomi yang dapat menyejahterakan anggotanya disebabkan lemahnya manajemen, kurangnya keterkaitan usaha koperasi dengan kepentingan ekonomi anggotanya, kurangnya pemahaman anggota, pengurus, dan pengawas koperasi tentang perkoperasian dan Koperasi belum dikelola secara profesional. Sehingga masih diperlukan sosialisasi, bimtek, pelatihan dan penerapan manajemen informasi sistem keuangan perkoperasian kepada pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi dan kepada kelompok-kelompok orang yang akan mendirikan koperasi. Namun demikian mekanisme sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang telah dilakukan pada periode terdahulu perlu dilakukan telaah dan evaluasi, hal ini untuk mengetahui model *transfer knowledge* seperti apa yang efektif, jangan sampai kegiatan sosialisasi tidak berdampak dalam mewujudkan tujuan. Hakikatnya kegiatan sosialisasi dan *transfer knowledge* harus dapat merubah *mindset* kelompok yang akan mendirikan koperasi dan para penggiat koperasi sehingga bermuara pada perubahan perilaku peningkatan kualitas manajemen koperasi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam perlu menyusun langkah strategis dalam

melakukan *transfer knowledge* cara-cara baru yang bersifat kekinian yang telah terbukti berhasil dilakukan daerah lain, sehingga terus terjadi *continuous improvement* dalam pelayanan kepada masyarakat dan tidak terperangkap dalam model pelayanan *business as usual*.

Tabel 2. 88 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2020

No	Indikator		2016	2017	2018	2019	2020
1	JumlahKoperasi Aktif	Target	571	596	624	684	684
		Realisasi	222	224	228	230	235
2	Jumlah Pelaku usaha kreatif bernilai tambah yang dibina	Target	125	85	250	300	350
		Realisasi	125	440	495	525	685
3	Jumlah Sentra UMKM yang dibentuk	Target	0	0	1	1	1
		Realisasi	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Selanjutnya untuk indikator jumlah pelaku usaha kreatif bernilai tambah yang dibina mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan jumlah 125 pelaku usaha kreatif pada tahun 2016 terus meningkat hingga 685 pelaku usaha kreatif yang telah dibina pada tahun 2020. Jumlah ini melebihi yang ditargetkan.

Selama 5 (lima) periode RPJMD 2016-2021 belum terealisasi pembentukan sentra UMKM hal ini dikarenakan belum ada Zona Ekonomi bagi usaha mikro pada PERDA RTRW sebalai dasar lokasi sentra umum. Untuk melihat keberhasilan indikator kinerja urusan Koperasi dan UKM ini juga dapat dilihat melalui persentase pembinaan usaha mikro yang terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 tercatat 15 persen, kemudian dalam tiga tahun meningkat menjadi 60 persen di tahun 2019 dan 64 persen di tahun 2020. Saat ini berdasarkan data ODS Kementerian Koperasi jumlah UMKM di Kota Batam adalah 81.129 unit, 1.212 unit diantaranya adalah usaha mikro (sektor kuliner, fashion, kerajinan, dll). Jika mengacu pada indikator pembinaan usaha mikro, maka saat ini terdapat 727 unit usaha mikro yang belum dilakukan pembinaan. Realisasi jumlah pembinaan usaha mikro juga meningkat di tahun 2020 dan

melebihi target yang ditentukan. Selanjutnya jumlah koperasi aktif di tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mana jumlah koperasi aktif tahun 2020 sebanyak 235 unit.

Di berbagai belahan dunia, usaha mikro yang tergabung dalam *Small Medium Enterprise* (SME) berperan sangat sentral terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional suatu negara. Kontribusi UMKM di Perancis mencapai 99,80% dari total jumlah perusahaan, dengan kontribusi lebih dari 56% GDP dan menyerap lebih dari 61% tenaga kerja, UMKM di Jerman mencapai 99,55% dengan kontribusi 53% GDP dan menyerap 61% tenaga kerja, UMKM di Italia mencapai 99,92% dengan kontribusi 71% GDP dan menyerap 81% tenaga kerja, UMKM di Nederlands mencapai 99,72% dengan kontribusi 62% GDP dan menyerap 68% tenaga kerja *(European Commision*, 2012). Begitu pula di Indonesia, dimana 98,90 persen perekonomian ditopang oleh usaha mikro (Gambar 2.68), dan mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97 persen dari seluruh tenaga kerja nasional dan mempunyaikontribusi terhadap produk domestik bruto(PDB) sekitar 57 persen.

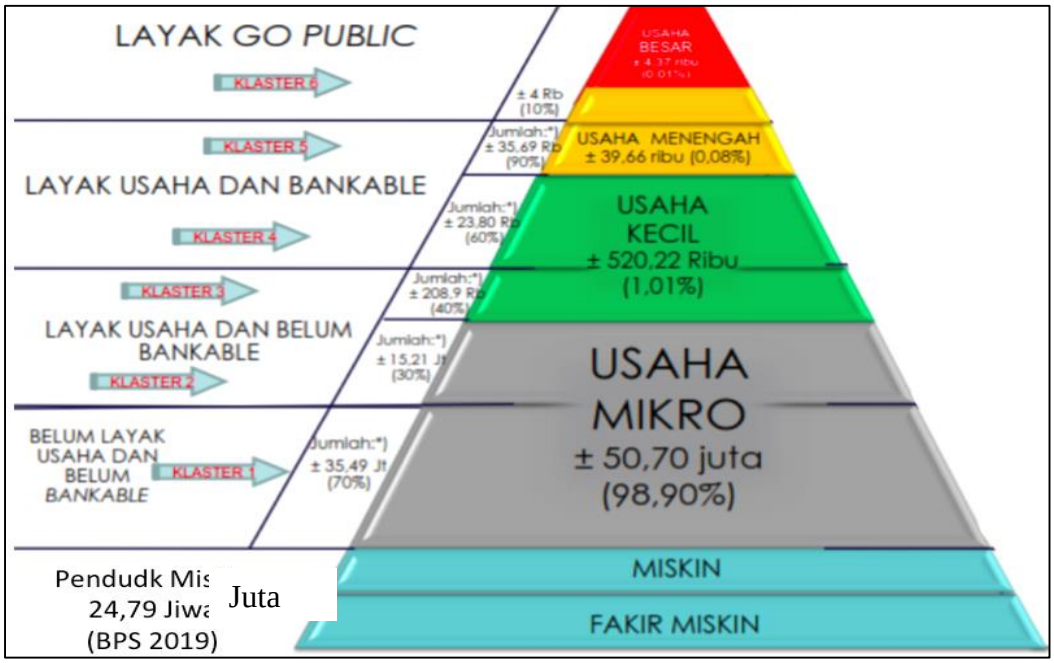

Gambar 2. 68 Piramida Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM RI

Berdasarkan uraian paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa usaha mikro adalah tulang punggung perekonomian di Indonesia, sehingga peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengembangan usaha mikro pada tingkat daerah selayaknya menjadi suatu prioritas. Sejalan dengan itu, cara-cara baru, inovasi-inovasi kekinian, kreatifitas dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan tugas fungsi pelayanan terhadap usaha mikro menjadi suatu keharusan di Kota Batam.

Hingga saat ini pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terhadap usaha mikro dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Lebih lanjut (1) proses pendataan dilakukan melalui registrasi pendataan UMKM ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan melengkapi persyaratan yang ada, seperti perizinan IUMK / NIB (PP No. 24 Tahun 2018) serta pengisian form binaan Dinas, (2) proses fasilitasi kemitraan dilaksanakan antara pelaku usaha mikro dengan pengelola toko modern (mini market, supermarket, 212 mart, lotte mart, carrefour dan hypermart), (3) proses penguatan kelembagaan dilakukan dengan memfasilitasi pendaftaran perizinan melalui aplikasi OSS dan memfasilitasi perizinan lainnya seperti Halal dan PIRT, dan (4) proseskoordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan memfasilitasi kepentingan Pengusaha/BUMN/BUMD seperti KUR, Pendaftaran Merek dan HCCP, dll.

Secara umum persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro antara lain (1) kurangnya kesadaran pelaku usaha mikro dalam izin usaha; (2) kurangnya pemahaman tentang perencanaan bisnis (*Business Plan*); (3) produk belum memenuhi standar mutu (PIRT, Packaging, Merek, Sertifikasi Halal, Komposisi Produk, Masa Produk dan Registrasi Produk); (4) Belum memiliki catatan transaksi usaha; (5) terbatasnya akses teknologi dan pemasaran; (6) sulitnya terhadap akses pembiayaan; (7) terbatasnya tenaga pendampingan terhadap pelaku usaha.

Setidaknya terdapat dua pendekatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pendekatan pertama dari sisi internal pelaku usaha mikro itu sendiri, dan pendekatan kedua adalah dari sisi eksternal, yakni pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Kota Batam kepada pelaku usaha mikro.

1. Pendekatan dari sisi internal

   Pelaku usaha mikro perlu memiliki komitmen untuk terus belajar dan meningkatkan skill usaha, terlebih saat ini akses *knowledge* yang mendukung pelaku usaha mikro lebih mudah dijangkau, selain itu juga perlu komitmen menjalankan strategi usaha yang terintegrasi dan berkesinambungan sebagai landasan menjalankan usaha. Setidaknya terdapat empat pilar utama yang bersifat iteratif dalam menjalankan usaha mikro yakni (1) prima administrasi (terkait dengan pembukuan, perhitungan keuangan rutin, pendaftaran IUMK, dst); (2) mengembangkan tim (SDM) terbaik; (3) peningkatan kualitas produk dan proses; dan (4) pemasaran terintegrasi. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

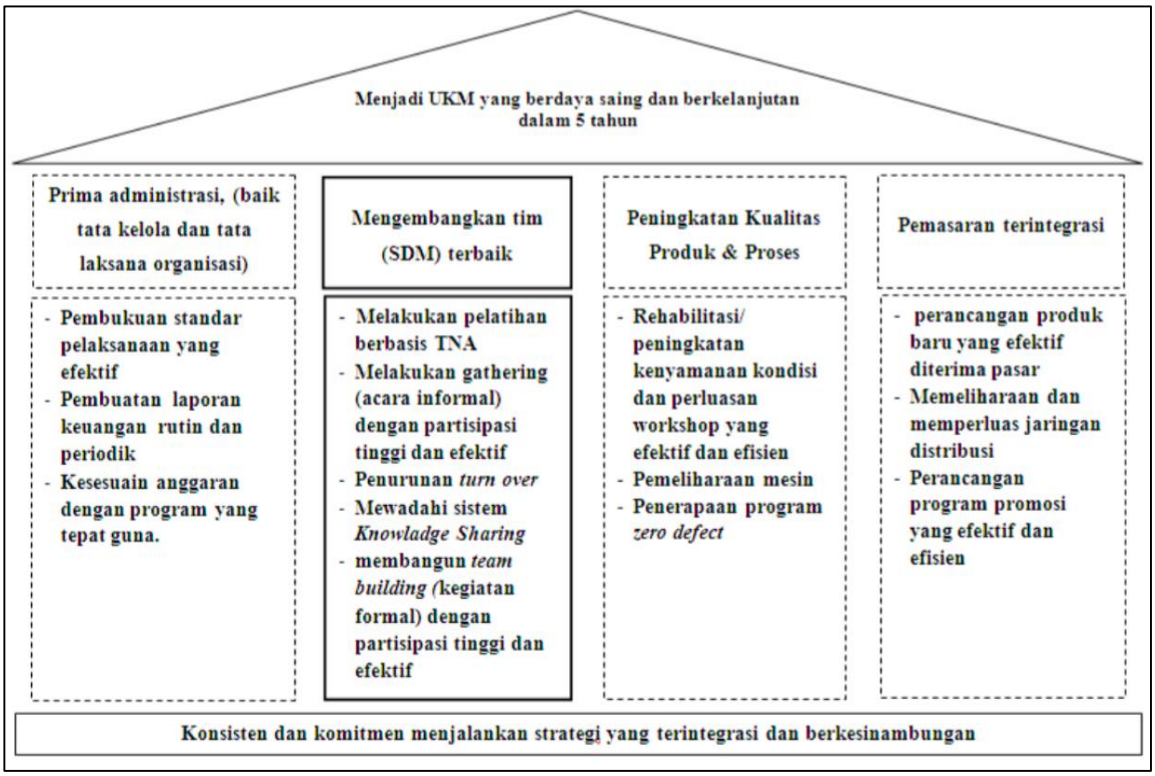

Gambar 2. 69 *The House Model Small Enterprise*

Sumber: Jurnal Manajemen dan Organisasi, IPB Vol V, No 2, Agustus 2014

2. Pendekatan dari sisi eksternal

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam bekerja sama dengan Kecamatan melakukan sosialisasi pengurusan IUMK dan dalam pelaksanaan dibantu oleh pendamping KUMKM yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sehingga dengan memiliki IUMK para pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses bantuan, baik dari Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selain itu Pemerintah Kota Batam juga memberikan bantuan fasilitasi permodalan melalui BLUD, Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran HAKI, *Business Matching* pelaku usaha mikro, *Pre event* Indonesia *marketers* festival, Sosialisasi pinjaman dana bergulir, Bimtek SMKI berbasis indeks KAMI, Bimtek peningkatan kapasitas tenaga pendamping KUMKM, pelatihan pengembangan kewirausahaan bagi UMKM, pelatihan uji kompetensi SDM KUMKM melalui SKKNI bidang UKM ekspor, pelatihan peningkatan standarisasi mutu dan sertifikasi produk,

konsultasi dan pemberkasan dalam rangka standarisasi PIRT, konsultasi desain dan kemasan serta pemberkasan pendaftaran merek produk KUMKM, pelatihan pemasaran online bagi UMKM, pelatihan belajar membuka toko *online* di tokopedia, pelatihan *entrepreneur*bagi pelaku usaha mikro yang didampingi, seminar peningkatan kesadaran masyarakat pelajar dan siswa terhadap produk dalam negeri. Dalam hal pendampingan dilakukan melalui melengkapi sarana dan prasarana pendukung gedung PLUT KUMKM, membangun akses jalan dan jembatan serta recruitment tenaga konsultan pendamping yang dibiayai oleh Kementerian KUMKM RI sebanyak 5 orang. Lebih lanjut usaha mikro kecil di Kota Batam perlu didorong masuk ke dalam ekosistem digital, karena *e-commerce* telah terbukti merupakan satu-satunya sektor yang paling sedikit mendapatkan dampak negatif dari adanya pandemi Covid-19. Bank Indonesia mencatat, pada Maret 2020 volume transaksi melalui *e-commerce* di Indonesia mencapai 98,3 juta atau meningkat 18,1 persen (mtm), dengan total nilai transaksi Rp20,9 triliun atau meningkat 9,9 persen (mtm). Peningkatan transaksi terbesar bersumber dari kebutuhan primer atau makanan dan minuman (52 persen), perlengkapan sekolah (34 persen), dan perawatan pribadi seperti sanitasi tangan dan masker (29 persen). Saat ini peluang tingginya bisnis di toko online tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM, dari sekitar 64 juta populasi UMKM di Indonesia, baru 13 persennya saja yang telah terhubung ke ekosistem digital.

Sementara itu terdapat beberapa masyarakat yang tinggal di hunian tidak resmi, sehingga tidak dapat mengurus legalitas usahanya. Hal tersebut berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro yang tinggal di hunian tidak resmi untuk mendaftarkan usahanya kurang, sehingga bantuan dan pembinaan (karena mereka tidak terdaftar di database) tidak dapat diperoleh mereka. Dalam mengatasi hal ini perlu pemetaan lebih rinci terhadap pelaku usaha mikro yang tidak dapat mengurus izin karena kendala status huniannya.

2.3.1.18 Urusan Penanaman Modal

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sehingga kehadiran investor nampaknya tidak mungkin dihindari, namun kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kota Batam. Gambaran mengenai jumlah investor PMDN/PMA di Kota Batam selama kurun waktu 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 89 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Meningkatnya persentase realisasi investasi	Target (%)	15.89	17	18	19	20
		Realisasi	22	32	42	39	42
ii	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terbit sesuai waktu SOP		14.238 Izin	12.608 Izin	9.095 Izin	2.985 Izin	4.509 Izin
iii	Realisasi Investasi di Kota Batam (miliar rupiah)		Rp. 815,97	Rp 663,36	Rp. 3.181	Rp. 11.020	Rp. 22.948
iv	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)						
	PMDN		28	60	145	384	395
	PMA		71	74	51	211	204
v	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)						
	PMDN (Juta Rp)		815.971	663.356	3.181.498.50	5.088.823,80	13.076.404,90
	PMA (Juta US $)		462.844	1.116.807	572.118.65	750.767,90	643.031,00
vi	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja						
	PMDN		1.575	3.656	6.341	1.891	13.016
	PMA		4.571	683	22.135	25.209	33.245
vii	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rp)		570.619	-152.615	191.49	53.28	108.23

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dari sisi eksternal, terdapat beberapa pemohon yang mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan (sertifikat, penguasaan lahan, terutama di IMB) sehingga proses perizinannya terkendala. Sedangkan dari sisi internal, masih terdapat kekurangan SDM, misalnya dalam pengurusan izin IMB perlu petugas survei ke lapangan sedangkan jumlah petugas yang dimiliki masih terbatas. Selain itu, aplikasi yang mendukung pelayanan perizinan yaitu aplikasi OSS (*One Single Submition*) baru efektif digunakan pada triwulan 4 tahun 2019 sehingga banyak terjadi pelaku usaha mendaftarkan (baru/daftar ulang) dan melaporkan kegiatan usahanya setelah aplikasi OSS efektif digunakan.

Indikator realisasi investasi di Kota Batam menunjukkan angka yang fluktuatif meskipun secara umum dari tahun 2016 hingga 2020 tercatatkan menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Meski demikian pada tahun 2017 realisasi investasi di Kota Batam turun menjadi 664 miliar rupiah dari sebelumnya sebesar 816 miliar rupiah di tahun 2016. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,18 triliun rupiah sebelum meningkat sangat tinggi menjadi 11 triliun rupiah di tahun 2019. Selanjutnya tahun 2020 mengalami peningkatan kembali 22,95 triliun rupiah. Nilai realisasi investasi dari tahun 2016-2020 melebihi target yang ditetapkan. Selanjutnya realisasi investasi di tahun 2020 mencapai dua kali lipat nilai investasi pada tahun 2019, juga melebihi nilai yang ditargetkan. Perlu diingat juga bahwa terdapat pembagian kewenangan dalam pengelolaan investasi di Kota Batam dimana PMA dikelola oleh BP Batam dan PMDN dikelola oleh Pemko Batam.

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Meskipun realisasi investasi dalam nilai rupiah mengalami fluktuasi, indikator jumlah investor berskala nasional baik

penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Jumlah investor berskala nasional untuk PMDN meningkat dari 28 di tahun 2016 menjadi 60 di tahun 2017 dan terus meningkat hingga di tahun 2019 menjadi 384. Peningkatan yang cukup besar pada jumlah investor berskala nasional PMDN terjadi di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, yang mana pada tahun 2020 jumlah investor berskala nasional (PMDN) adalah 395. Sedangkan untuk PMA, jumlah investor di tahun 2016 sebesar 71 dan meningkat menjadi 74 di tahun2017. Penurunan jumlah investor berskala nasional PMA terjadi di tahun 2018 yaitu menjadi 51. Namun, selanjutnya meningkat lagi secara signifikan menjadi 211 di tahun 2019, meskipun mengalami penurunan tidak signifikan di tahun 2020 menjadi 204. Mesikipun demikian, hal ini tidak menurunkan persentase realisasi investasi di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Sejalan dengan realisasi investasi yang menunjukkan peningkatan, daya serap tenaga kerja baik PMDN maupun PMA juga menunjukkan kecenderungan untuk meningkat. Daya serap tenaga kerja PMDN adalah sebesar 1.575 di tahun 2016, dan daya serap tenaga kerja PMA lebih besar yaitu sebesar 4.571 di tahun 2017. Daya serap tenaga kerja PMDN meningkat di tahun 2018 sebesar 6.341 sebelum turun menjadi 1.891 di tahun 2019. Begitu pula dengan daya serap tenaga kerja PMA yang mencatatkan 4.571 di tahun 2016 sebelum turun drastis menjadi 683 di tahun 2017. Setelah itu, daya serap tenaga kerja PMA di tahun 2018 dan 2019 menunjukkan peningkatan yang sangat besar menjadi 22.135 dan 25.209. Selanjutnya daya serap tenaga kerja mengalami peningkatan kembali di tahun 2020 yaitu menjadi 33.245 dari PMA dan 13.016 dari PMDN. Namun hal ini masih tetap menyebabkan peningkatan nilai TPT, yang mana nilai TPT saat 2020 adalah 11,79%.

Terkait dengan investasi di Kota Batam, perlu juga dilakukan pengukuran daya tarik investasi sebagai sebuah acuan dalam meningkatkan kinerja di bidang penanaman modal. Dalam indeks daya tarik investasi terdapat sembilan

indikator yang akan diukur yaitu indikator perijinan, perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, infrastruktur (jalan raya), infrastruktur publik (listrik, telepon, air, dan gas), kondisi keamanan, perolehan tanah untuk investasi, akses pembiayaan perusahaan, dan kondisi lingkungan bisnis. Kesembilan indikator tersebut perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan daya tarik investasi di Kota Batam.

Selain mengandalkan investasi di sektor industri, pemerintah daerah dapat mendorong lebih banyak investasi di daerah melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau dikenal juga dengan istilah *public private partnership* (PPP). KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Dengan mendorong KPBU, pemerintah daerah dapat mendorong investasi dalam bidang infrastruktur dengan bekerja sama dengan pihak ketiga berupa badan usaha swasta sehingga selain investasi di daerah meningkat, masyarakat juga dapat memperoleh manfaat dari infrastruktur yang dibangun menggunakan skema tersebut.

2.3.1.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pada hakikatnya kegiatan olahraga merupakan miniatur kehidupan. Hal ini dapat dikatakan demikian karena di dalam aktivitas olahraga terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan tujuan, perjuangan, kerjasama, persaingan, komunikasi dan integrasi, kekuatan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas. Semua aspek ini merupakan aspek-aspek yang berada dalam diri manusia baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Ikut aktif dalam berolahraga, berarti melatih diri untuk meningkatkan kualitas berbagai aspek yang diperlukan untuk dapat eksis ditengah-tengah masyarakat yang semakin dinamis. Berdasarkan nilai yang

terkandung dalam olahraga tersebut, maka sudah selayaknya olahraga ditempatkan pada posisi penting dan dikelola secara profesional.

Dengan demikian, pembangunan olahraga sesungguhnya tidak cukup hanya diidentifikasi ukuran prestasi yang diidentikkan dengan perolehan medali khususnya emas atau peringkat yang dicapai dalam event olahraga seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) atau pekan-pekan olahraga yang diselenggarakan pada tingkat daerah. Olahraga sebagai instrumen pembangunan hendaknya diposisikan dan diberdayakan dalam arti luas untuk tidak saja pencapaian prestasi demi harkat dan martabat bangsa, tetapi untuk mencapai tujuan nasional antara lain kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Tabel 2. 90 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020

No	Indikator		Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prestasi/Capaian Kepemudaan (orang)	Target	0	40	40	40	40
		Realisasi	45	85	45	45	35
2	Prestasi Olahraga (orang)	Target	95	100	120	140	160
		Realisasi	13	0	213	54	0
3	Budaya Olahraga (kegiatan)	Target	0	5	5	5	5
		Realisasi	4	2	4	5	1
4	Prestasi Kepramukaan (orang)	Target	380	80	80	80	80
		Realisasi	170	53	90	160	40
5	Sarana Prasarana Terbangun (unit)	Target	4	1	2	1	0
		Realisasi	1	2	18	25	0

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

Dalam perspektif perencanaan periode selanjutnya, seyogyanya perlu dirumuskan tolak ukur kinerja yang lebih jelas, terutama dalam mengukur pelayanan olahraga kepada masyarakat. Saat ini Kota Batam telah membangun beberapa fasilitas lapangan olahraga, seharusnya fasilitas ini dapat menstimulus masyarakat untuk melakukan olahraga dan dibuktikan dengan tolak ukur indikator yang tepat. Sebagai contoh, sejauh mana masyarakat memanfaatkan *car free day* sebagai sarana olahraga. Kemudian perlu juga dibuat kegiatan-

kegiatan olahraga bersama komunitas, seperti lomba, olahraga rekreasi, dan sebagainya.

Pelaksanaan kegiatan lomba atau olahraga bersama tidak harus secara formal dianggarkan dalam suatu kegiatan, mengingat banyak pertimbangan dalam efisiensi anggaran APBD. Sehingga paradigma pelayanan saat ini dan ke depan, anggaran bukan menjadi faktor utama sebagai hambatan dalam menjalankan tugas melayani masyarakat, dalam konteks ini pemerintah melalui Dinas Pemuda Dan Olahraga dapat menjadi katalisator dan fasilitator, persoalan anggaran sudah banyak skema kerjasama non APBD, terlebih event olahraga skala kecil sudah merupakan *lifestyle* di masyarakat, sehingga banyak peluang menyelenggarakan kegiatan/event melalui skema non APBD sangat memungkinkan. Dalam konteks ini jangan sampai keterbatasan anggaran menjadi hambatan untuk tidak kreatif dan inovatif dalam menstimulus masyarakat untuk berolahraga menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah atau fasilitas yang disediakan oleh *private sector*.

Dalam perspektif menggerakan ekonomi wilayah, sektor olahraga saat ini dapat menjadi penggerak sektor lainnya, terutama sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Sebagai ilustrasi, penyelenggaraan event olahraga seperti maraton dan *city tour* sepeda dapat menjadi pintu masuk wisatawan untuk berpartisipasi, dan tentu perputaran ekonomi berdampak pada sektor perhotelan, restoran dan *leisure economic* lainnya, terlebih Kota Batam sangat dekat dengan negara Singapura dan Malaysia, sehingga event olahraga perlu dikemas dalam skema pariwisata sehingga olahraga dapat bernilai ekonomi, dalam perspektif ke depan Kota Batam memerlukan hal-hal seperti ini.

Lebih lanjut pengarusutamaan olahraga masyarakat pada level keluarga dalam skema model bangunan olahraga nasional menjadi pondasi utama untuk mencetak bakat-bakat calon atlet berprestasi. Upaya-upaya menggiring masyarakat untuk berpartisipasi olahraga sangat penting sekali dilakukan, dalam perspektif ini menstimulus masyarakat untuk berolahraga lebih utama

dibandingkan menyediakan bangunan fasilitas olahraga, karena banyak jenis olahraga yang tidak memerlukan fasilitas khusus, fasilitas olahraga hanya sebagai penunjang, hal utama adalah melakukan *mainstreaming* aktivitas olahraga kepada masyarakat.

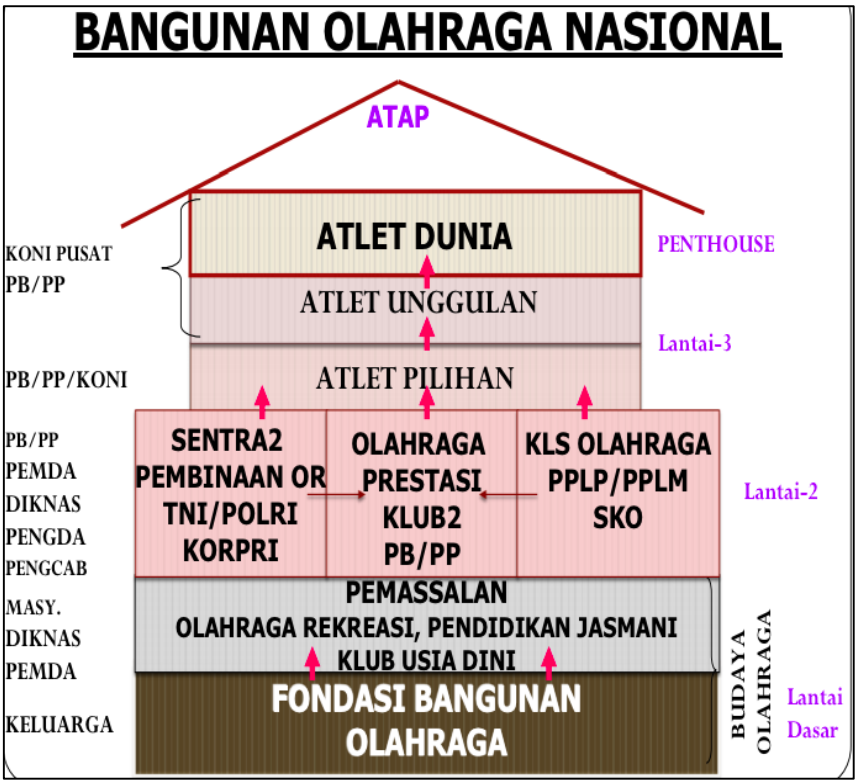

Gambar 2. 70 Model Bangunan Olahraga Nasional
Sumber: Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Bappenas

Berdasarkan model Bangunan Olahraga Nasional peran pemerintah Kota Batam ada pada lantai dasar atau pemassalan atau pengarusutamaan (*mainstreaming*) olahraga, kemudian naik ke lantai dua yakni kluster pembinaan yang berorientasi prestasi. Penjelasan berikutnya terkait gambar di atas adalah bahwa budaya olahraga menjadi pondasi dalam pembangunan olahraga nasional. Pengembangan budaya olahraga dapat dilakukan melalui peningkatan peran serta keluarga, masyarakat dan institusi pendidikan melalui kegiatan pemassalan olahraga rekreasi, olahraga pendidikan di sekolah, serta pembinaan olahraga melalui klub-klub dan komunitas olahraga, sebagaimana yang telah diutarakan pada paragraf terdahulu. Setelah budaya olahraga berkembang di tengah

masyarakat, maka siswa didik dan masyarakat yang memiliki bakat dan prestasi di bidang olahraga akan memperoleh pembinaan lebih lanjut di PPLP/PPLM, klub-klub olahraga dan sentra-sentra pembinaan olahraga di lingkungan kerja dan masyarakat. Pembinaan atlet berbakat ini merupakan upaya dalam pengembangan olahraga berprestasi. Dalam upaya pengembangan olahraga berprestasi diperlukan dukungan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat masing-masing cabang olahraga, private sektor, serta instansi terkait.

Lebih lanjut untuk sub urusan kepemudaan, pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Nilai penting ini semakin terasa kuat apabila hal ini dihubungkan dengan fenomena bonus demografi yang tengah dan akan dialami Indonesia saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *the Sustainable Development Goals (SDGs)* telah menempatkan pemuda beserta peranan mereka dalam proses menuju pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk usia muda (15-44 tahun) cukup banyak, sehingga pemberdayaan dan pengembangan terhadap generasi muda menjadi hal yang sangat penting di Kota Batam. Bentuk dan mekanisme pemberdayaan serta pengembangan dapat ditempuh melalui beragam cara, namun tujuan utamanya adalah pemuda di Kota Batam harus produktif di semua bidang yang diminatinya dan harus ada komitmen dari Pemerintah Kota Batam untuk hal itu, sehingga generasi muda dapat terhindar dari *middle income trap* di masa yang akan datang.

2.3.1.20 Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, urusan statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam baru dilaksanakan tahun 2017 berdasarkan Perwako Nomor 54 Tahun

2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, pasal 3. “bahwa tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika mencangkup bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik daerah sesuai dengan kewenangannya”. Data statistik sektoral yang di sediakan disajikan dalam Buku Statistik Sektoral Kota Batam mulai tahun 2018 s.d. 2020.Target dan realisasi kinerja pada tahun 2016 belum terealisasi karena adanya perubahan SOTK dan pelaksanaan fungsi Bidang Statistik baru efektif pada Tahun 2017.

Pemetaan nomenklatur urusan Statistik yang dilakukan tahun 2017 ditentukan sebanyak 5 (lima) bidang yang meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM dan terdiri dari 25 (dua puluh lima) sektor yakni: Pendidikan, Kependudukan, Perikanan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Koperasi, Perkimtan, Pertanahan, Pariwisata, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Perindustrian, Perdagangan, Infrastruktur, Investasi, Politik, Hukum, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Keuangan Daerah, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepegawaian Daerah, Geografis, Pemerintahan.

Tabel 2. 91 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kelengkapan Data SIPD Kota Batam	Target (%)	-	20	40	80	100
		Realisasi	-	4	12,9	100	100
2	Jumlah dokumen pendataan pendukung perencanaan	Target	3	2	2	2	2
		Realisasi	3	2	2	2	2

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku Statistik Sektoral Kota Batam	Belum ada	Belum ada	ada	ada	ada
2	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah	-	4	12,9	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam

Selanjutnya indikator persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2017 tercatat hanya 4 persen,

yakni bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM. Untuk bidang sosial dan ekonomi sudah terealisasi dengan melakukan survey data statistik di 1 sektor industri (kuliner, material, shipyard, garmen, depot air, advertising, furniture, otomotif, jamu dan obat), sementara bidang lainnya belum dilakukan pada tahun 2017. Memasuki tahun 2018 realisasi mengalami peningkatan menjadi 12,9 persen, hal ini meliputi 20 sektor yang merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya menjadi 4 sektor, yaitu sektor Restoran (hotel dan restoran); sektor kependudukan (kependudukan 12 kecamatan); sektor Pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan PKBM); sektor perikanan (budidaya ikan, nelayan), namun realisasi kegiatan berupa buku statistik tentang pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah tidak terlaksana karena terjadi perubahan pagu anggaran. Selanjutnya untuk tahun 2019 dan tahun 2020 juga telah terealisasi 100 persen, yang bermakna semua sektor terpenuhi dan sudah terdapat dan terkumpul. Adapun 20 sektor/data terhadap pemetaan nomenklatur urusan Statistik sebagai berikut: Pendidikan, Kependudukan, Restoran dan Perhotelan, Perikanan, Industri Pengolahan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Angkutan, Hukum, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Perdagangan, Telekomunikasi, Pergudangan, Perusahaan dan Keuangan, Partai politik dan HAM.

2.3.1.21 Urusan Persandian

Urusan Persandian ditujukan untuk pengamanan informasi pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Indikator Kinerja Persandian dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Persentase Sumber Daya Manusia yang memahami Pengamanan Informasi, Perangkat/peralatan yang memadai, Peraturan/SOP, Operasional Pelaksanaan Pengamanan Informasi (empat elemen utama). Berdasarkan Tabel 2.92 dapat diketahui bahwa Realisasi Kinerja Urusan persandian sejak tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2016 belum ada realisasi, disebabkan Tugas Pokok dan Fungsi Persandian baru ada dan melekat di SOTK Kominfo sejak Tahun 2017.

Pada Tahun 2017 dari target 10 persen elemen yang ingin dicapai, baru terealisasi 4 persen hal ini bermakna dari keempat elemen yang ditargetkan. Pada tahun 2019 terdapat target sebesar 25 persen informasi berkualifikasi di Pemerintah Kota Batam, namun realisasi pada tahun 2019 belum mencapai target pencapaian elemen-elemen tersebut. Pada tahun 2020 realisasi Persentase Informasi berkualifikasi di Pemerintah Kota Batam adalah sebesar 20 persen dari 35 persen yang ditargetkan.

Tabel 2. 92 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Informasi berkualifikasi di Pemerintah Kota Batam	Target	5	10	15	25	35
		Realisasi	0	4	5	11	20

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam

Pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dari Aspek SDM yaitu 200 orang dari 44 OPD yang telah menerima pemahaman tentang informasi berklasifikasi, sedangkan untuk 3 aspek lainnya belum terealisasi. Untuk aspek perangkat belum bisa diadakan karena proses pengadaan peralatan persandian yang terbentur dengan peraturan dari BSSN. Untuk aspek peraturan masih dalam proses penyusunan, dan untuk aspek operasional pelaksanaan pengamanan informasi belum dapat dilaksanakan karena belum ada sandiman di Pemko Batam.

Realisasi Kinerja urusan persandian pada tahun 2019dari Aspek SDM bertambah yaitu diperoleh dari adanya satu orang ASN yang mendapat sertifikasi sebagai sandiman, aspek Perangkat didapat dari perangkat *jammer* yang dipinjamkan oleh Diskominfo Provinsi, aspek Operasional Pelaksanaan Pengamanan Informasi yaitu pengamanan rapat pimpinan.

Pada tahun 2020 Persentase informasi berkualifikasi di Kota Batam bertambah menjadi 20% dengan rincian: Aspek SDM turun menjadi 5%, aspek dikarenakan wafatnya satu-satunya sandiman di Pemko Batam, Aspek Perangkat sebesar 3%,

aspek Peraturan sebesar 5% dengan terbitnya SOP bidang Persandian, dan Aspek Operasional Pelaksanaan Pengamanan Informasi naik sebesar 7% diperoleh dari oleh aset atau fasilitas website pemerintah dengan domain @batam.go.id yang telah diamankan dengan SSL serta dilaksanakannya kegiatan kontra pengindraan di ruang pimpinan dengan bantuan sandiman dari BSSN.

Tabel 2. 93 Pencapaian Elemen Persandian

No	ELEMEN	URAIAN	KEGIATAN	REALISASI S.D. 2020	REALISASI PERTAHUN				
					2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sumber daya manusia yang memahami pengamanan informasi	Jumlah ASN yang Bersertifikasi Sandi dan Jumlah ASN Pemko Batam yang Sadar Keamanan Informasi	Pelatihan ASN tentang informasi berklasifikasi dan ASN yang mendapat sertifikasi	200 aparatur ASN dan 1 ASN yang bersertifikasi Sandiman	0	200	200	200	200
2.	Perangkat/Peralatan yang memadai	Jumlah pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak persandian	Perangkat jammer yang dipinjamkan Diskominfo Kepri	1 perangkat	0	0	0	1	1
3.	Peraturan/SOP	Jumlah Peraturan/SOP Keamanan Informasi	Peraturan dan SOP dalam Keamanan Informasi	1 Perwako dan 1 SOP	0	0	0	0	1
4.	Operasional Pengamanan Informasi	Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan tingkat kota	Pengamanan Rapat Pimpinan	1 kegiatan	0	0	0	2	2
		Jumlah aset/ fasilitas/ instalasi kritis/ vital/ penting yang harus diamankan	Pengamanan Informasi dari fasilitas website pemerintah dengan domain batam.go.id	20 Website SSL	0	2	3	3	20

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam

2.3.1.22 Urusan Kebudayaan

Berdasarkan Tabel 2.94 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 diselenggarakan enam festival seni dan budaya, kemudian di tahun 2019 diselenggarakan delapan festival seni dan budaya, capaian kinerja tersebut telah mencapai target setiap tahunnya. Pada tahun 2020, dengan adanya pandemi yang mengakibatkan adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan penurunan pada penyelenggaraan festival seni dan budaya. Pada tahun 2020 festival seni dan budaya yang diselenggarakan sebanyak dua kali.

Lebih lanjut, setiap tahun target 15 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan selalu tercapai. Untuk karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 setiap tahunnya sebanyak 20 karya budaya dan selalu mencapai target tahunannya. Dalam perspektif pengembangan ekonomi pariwisata, perlu dilakukan analisis korelasi antara pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya serta karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi terhadap aktifitas ekonomi yang diperoleh masyarakat. Idealnya anggaran pemeliharaan dan pelestarian serta biaya revitalisasi dan inventarisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam harus dapat menggerakan ekonomi masyarakat lokal, minimal yang berkegiatan di daerah sekitar situs atau kawasan cagar budaya. Lebih lanjut indikator kinerja urusan kebudayaan disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 94 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Jumlah pagelaran seni dan budaya (event))	Target	6	6	6	8	10
		Realisasi	6	6	6	8	2

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam

2.3.1.23 Urusan Perpustakaan

Kinerja pelayanan urusan perpustakaan diukur melalui indikator persentase pengunjung perpustakaan per tahun yang selama periode 2016-2019 memiliki capaian cukup tinggi. Pada tahun 2016 persentase kunjungan 6,44 persen dari target 5 persen. Untuk tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga menjadi 13,15 persen di tahun 2019. Dalam konteks ini data kunjungan perpustakaan meliputi kunjungan di seluruh perpustakaan yang ada di Kota Batam (perpustakaan sekolah, kecamatan, perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus). Namun, pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 jumlah pengunjung perpustakaan menurun secara signifikan yaitu menjadi 63.520 pengunjung atau sebesar 5,29 persen

dibandingkan target sebesar 8 persen, salah satunya dikarenakan adanya kebijakan pembatasan *social distancing*.

Tabel 2. 95 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	Target	5	5	6	7	8
		Realisasi	6,44	6,81	8,86	13,15	5,29

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam

Kondisi persoalan urusan perpustakaan saat ini Kota Batam antara lain belum memiliki gedung perpustakaan daerah secara mandiri, belum memiliki tenaga perpustakaan (*librarian*) kemudian fasilitas perpustakaan digital saat ini juga belum berjalan. Dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap perpustakaan, saat ini belum terpetakan secara pasti jumlah perpustakaan *private* maupun publik di Kota Batam, selain itu belum seluruhnya perpustakaan melaporkan jumlah kunjungan di perpustakaannya, sehingga angka kunjungan perpustakaan setiap tahun belum berasal dari seluruh perpustakaan di Kota Batam.

2.3.1.24 Urusan Kearsipan

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2009 pasal 4 Kearsipan pemerintah daerah melalui Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) dalam melaksanakan penyelenggaran kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Batam harus memperhatikan Asas dalam pengelolaan arsip secara Akuntabilitas. Pemerintah Daerah Kota Batam telah menerbitkan 5 (lima) Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

1. Perwako No 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
2. Perwako No. 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis Penyusutan Arsip dan Pengolahaan Arsip Vital;
3. Perwako No. 23 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Substantif Urusan Pemerintahan Kota Batam;

4. Perwako No. 35 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
5. Perwako No. 55 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Empat diantaranya merupakan instrumen wajib dalam penyelenggaraan kegiatan kearsipan. Untuk akuisisi arsip belum sepenuhnya dilakukan karena ruang penyimpanan arsip (depo) Pemerintah Kota Batam belum ada. Demikian juga dengan kegiatan penyusutan arsip. Saat ini perangkat daerah melakukan penyimpanan arsip di tempat masing-masing.

Penyelenggaran kearsipan di Perangkat Daerah baru dilakukan pembinaan Sumber Daya Manusia kearsipan mulai dari tahun 2016-2020 sebanyak 44 OPD yang mana masing-masing OPD mengirimkan 1 ASN. Dengan demikian terdapat 44 OPD (44 ASN) arsiparis yang mendapatkan pembinaan.

Tabel 2. 96 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	OPD/ASN Arsiparis yang dibina	Target	8	8	8	8	8
		Realisasi	44	44	44	44	44

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Jumlah produksi perikanan di Kota Batam mengalami peningkatan selama periode 5 (lima) tahun. Tahun 2016 sebesar 35.345,00 ton, meningkat menjadi 45.629,23 ton pada tahun 2020. Secara persentase peningkatan produksi perikanan setiap tahunnya mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 peningkatan mencapai 7,23% menurun pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 2,58 persen pada tahun 2018 dan kembali meningkat hingga tahun 2020 mencapai 6,36%.

Dalam hal konsumsi ikan, terjadi peningkatan konsumsi ikan perkapita di Kota Batam setiap tahunnya dari sebesar 33,05 kg per kapita di tahun 2016 menjadi 37,06 kg per kapita di tahun 2019 dan 41,18 kg di tahun 2020, namun nilai ini masih di bawah nilai konsumsi ikan per kapita nasional tahun 2020 yaitu sebesar 56,39 kg/kapita.

Tabel 2. 97 Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan (ton)	Target	35.345,00	36.700,00	37.500,00	38.000,00	39.000,00
		Realisasi	37.570,42	39.903,99	40.935,35	42.901,05	45.629,23
2.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (persen)		7,23%	2,38%	2,58%	4,80%	6,36%
3.	Konsumsi Ikan per Kapita per Tahun (kg)		33,05	34,50	35,92	37,06	41,18

Sumber: BPS Kota Batam, Dinas Perikanan Kota Batam
catatan: indikator ke-2 dan 3 tidak memiliki target karena bukan indikator RPJMD

Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima, dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Standar kesejahteraan nelayan adalah NTN sebesar 100. NTN >100, artinya kenaikan harga produksi lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. NTN sama dengan 100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. Sedangkan NTN kurang dari 100, kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kota Batam tahun 2020 sebesar 106,73. Nilai NTN Kota Batam cukup baik yaitu lebih tinggi dari 100. NTN di Kota Batam tahun 2020 ini lebih tinggi dibandingkan NTN nasional pada tahun yang sama sebesar 100,22.

Dengan meningkatnya produksi perikanan Kota Batam dari tahun 2016-2020 juga mempengaruhi produksi hasil olahan perikanan Kota Batam yang semakin

meningkat dari tahun 2017-2020 dan melebihi nilai yang ditargetkan. Data produksi hasil olahan perikanan Kota Batam baru dihitung pada tahun 2017 sehingga data tahun 2016 belum tersedia. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 98 Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kota Batam Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	-	1.201,6	1.055,55	1.467,86	1.290,43

Sumber: Dinas Perikanan Kota Batam

Peningkatan produksi olahan hasil perikanan juga menambah jenis produksi olahan hasil perikanan dari 6 jenis produk pada tahun 2017 terus berkembang menjadi 17 jenis produk pada tahun 2020 dengan rincian pada tabel di bawah ini. Tahun 2020, masa pandemi juga mampu menurunkan sisi penawaran yang mana jumlah produksi olahan hasil perikanan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2. 99 Rincian Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kota Batam Tahun 2016-2020

No	Nama Produk	Jumlah Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bakso Ikan	-	546,3	474,5	487,4	430,21
2	Ikan Asin/kering	-	442	417	562,5	367,42
3	Kerupuk Ikan, udang, sotong	-	208,3	125,76	50,54	53,19
4	Abon Ikan	-	0,5	7,75	1,78	3,93
5	Ikan Salai	-	3,5	5,09	12,7	3,19
6	Bandeng Presto	-	1	2,71	1,64	7,98
7	Sirip Hiu	-	-	18,75	19,54	11,85
8	Gelembung Renang ikan	-	-	0,52	0,86	1,69
9	Tulang Ikan hiu	-	-	3,47	4,21	3,14
10	*Valueadded Breaded Shrimp* / Tempura Shrimp	-	-	-	84,94	158,93

No	Nama Produk	Jumlah Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
11	Nugget ikan	-	-	-	2,05	6,58
12	Teripang kering	-	-	-	2,7	1,83
13	Otak-otak	-	-	-	33,01	48,1
14	Empek-empek	-	-	-	23,25	45,27
15	Ikan Pindang	-	-	-	-	146,26
16	Serundeng Ikan	-	-	-	-	0,56
17	Keripik Gonggong	-	-	-	-	0,3
18	*Dried Shrimp Shell Meal**	-	-	-	180,74	-
	Jumlah	-	1.201,60	1.055,55	1.467,86	1.290,49

Keterangan: *Dried Shrimp Shell Meal* tidak tidak dimasukkan lagi dalam data Tahun 2020 karena bukan merupakan olahan untuk konsumsi tetapi untuk pembuatan pakan ternak.
Sumber: Dinas Perikanan Kota Batam

2.3.2.2 Urusan Pariwisata

Kota Batam merupakan salah satu kota destinasi wisata unggulan Provinsi Kepulauan Riau, nasional bahkan internasional. Kota Batam menempati urutan ke-3 dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak setelah Bali dan Jakarta. Dalam pengembangan sektor pariwisata, indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Sementara itu, jika realisasi wisman dibandingkan dengan target tahunan, maka hanya tahun 2018 dan 2019 yang melampaui target, tahun 2018 target wisman tercatat 1.811.243 dengan realisasi 1.887.284, pada tahun 2019 target wisman tercatat 1.919.917 dengan realisasi 1.947.943. Selanjutnya pada tahun 2020 karena ada pandemi Covid-19 jumlah kunjungan wisman mengalami penurunan yang signifikan menjadi 299.158 dengan target 2.100.000.

Namun demikian, jika diamati lebih jauh, persentase peningkatan kunjungan wisman mengalami peningkatan 3,22% di tahun 2019, dari 20,61% di tahun 2018. Turunnya persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2019 dikarenakan beberapa alasan, antara lain:

a. Kondisi geo-strategis Kota Batam yang sangat terkait dan tergantung dengan situasi dan kondisi global khususnya dalam kepariwisataan yang sejak tahun

2018 sudah mengalami turbulensi dengan keterpurukan ekonomi global seperti perang dagang Amerika dan China;

b. Kebijakan Nasional yang menetapkan penerapan VOA (*Visa on Arrival*). memberikan peluang yang sama dan kemudahan bagi wisatawan mancanegara untuk mencari variasi kunjungan ke daerah lain di luar Kota Batam.

Selanjutnya, turunnya persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 yang mana pada tahun 2020 terjadi penurunan kunjungan wisman menjadi -84,25%. Lebih lanjut indikator lama kunjungan wisatawan (*length of stay*) yang selalu mencapai target kecuali pada tahun 2016 dan menunjukkan tren yang meningkat dari 1,9 hari di tahun 2015 menjadi 3,22 hari di tahun 2019 dan 3,29 hari di tahun 2020.

Tabel 2. 100 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

No.	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara	Target	1.500.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
		Realisasi	1.432.472	1.564.717	1.887.284	1.947.943	299.158
2	*Length of Stay* (Rata-rata Lama Menginap pada hotel/jasa akomodasi) (hari)	Target	1,93	1,97	2,01	2,03	2,07
		Realisasi	1,73	2,07	2,80	3,22	3,29
3	Persentase peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara		7,33	9,2	20,6	3,22	-84,25
4	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (persen)		18,03	18,6	18,04	24,34	18,03

Sumber: BPS Kota Batam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Tren peningkatan kunjungan wisatawan disertai dengan meningkatnya lama kunjungan berimplikasi terhadap naiknya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2016 tercatat sebesar 18,03 persen dan meningkat menjadi 18,60 persen di tahun 2017, sedikit turun menjadi 18,04 persen di tahun 2018 dan meningkat secara signifikan menjadi 24,34 persen di tahun 2019 namun turun kembali menjadi 18,03 persen di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sektor pariwisata di Kota Batam menyumbang 24,34% pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batam. Selanjutnya

pada tahun 2020 sektor pariwisata di Kota Batam masih menyumbang 18,03% pendapatan asli daerah (PAD) meskipun terjadi penurunan kunjungan wisman. Namun, nilai tersebut masih melebihi dari nilai yang ditargetkan.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan dan Karimun, sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi unggulan yang harus dikembangkan secara sinergis dan berkelanjutan untuk pengembangan perekonomian kawasan. Di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang dijadikan tumpuan untuk membawa Indonesia menuju negara dengan pendapatan menengah-tinggi dan Kota Batam menjadi salah satu dari 11 destinasi wisata potensial yang akan dikuatkan bersama dengan Kabupaten Bintan. Penguatan destinasi wisata potensial tersebut dilakukan untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan dan pengeluaran wisatawan melalui perbaikan aksesibilitas, amenitas dan atraksi di destinasi-destinasi wisata yang ditentukan.

Sektor pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang berfungsi menjadi katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Sektor pariwisata di Kota Batam ini tumbuh antara lain karena efek multiplier dari posisi Kota Batam sebagai daerah industri sehingga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata terutama sebagai kota wisata konvensi atau MICE. Meski demikian, destinasi wisata lain selain MICE yang ada di Kota Batam tetap harus dioptimalkan terutama untuk mengoptimalkan aksesibilitas Kota Batam yang sudah cukup baik dengan meningkatkan amenitas dan atraksi wisata lain yang ada di Kota Batam.

Aksesibilitas (atau keteraksesan, ketercapaian) adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Dalam

pengertian yang lain bahwa aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antar tempat-tempat atau kawasan. Amenitas adalah berbagai fasilitas di luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi. Amenitas bisa berupa fasilitas pariwisata seperti rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain. Sedangkan Atraksi wisata adalah seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan, yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata. Berikut ini merupakan peta wisata Kota Batam.

Gambar 2. 71 Peta Wisata Kota Batam

Sumber: arsipskpd.batam.go.id

Pengembangan pariwisata Kota Batam dapat difokuskan untuk meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan atraksi wisata di Kota Batam selain itu Kota Batam pada kondisi saat ini juga sudah memiliki beberapa destinasi wisata yang sedikit mengambarkan kodisini kewilayahan Kota Batam, diantara destinasi wisata yang ada sebagai berikut:

a. Wisata Religi

   Sebagai Kota heterogen, penduduk Batam memeluk berbagai agama, karena itulah Batam memiliki banyak tempat ibadah yang mewakili dari tiap aliran agama yang ada dan diakui di Indonesia.

b. Wisata Warisan Budaya

   Batam merupakan bagian dari Kesultanan Riau Lingga, sehingga banyak peninggalan warisan budaya di kota Batam. Sebut saja “Rumah Limas Potong” yang merupakan Rumah Tradisional Melayu Asli di Nongsa. Kemudian ada juga makam Zuriat Nong Isa, di mana Nong Isa atau juga disebut Raja Isa bin Raja Ali merupakan salah satu penguasa yang pertama yang ada di Pulau Batam. Sekitar 1829, Nong Isa mendapatkan sebuah mandat dari Sultan Riau dan juga diberikan perintah oleh Muda Riau VI agar memerintah pada kawasan Nongsa dan juga wilayah sekitarnya. Surat mandat yang diberikan kepada Nong Isa tersebut dikeluarkan pada 22 Jumadil Akhir 1245 Hijriah atau tahun masehinya jatuh pada 18 Desember 1829. Tanggal tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Kota Batam.

c. Wisata Kuliner

   Dengan lokasi Batam yang berada di wilayah kepulauan, wisata kuliner di Batam mulai dari masakan lokal yang beraneka rupa, hidangan *western food* yang lezat, *Japanese food*, *Indian food*, *Korean food* yang khas, sampai sajian *seafood* yang *fresh*.

d. Wisata MICE

   Sebagai daerah perbatasan, banyak aktivitas MICE dilaksanakan di Batam. Ratusan amenitas tersedia untuk kebutuhan pertemuan, seperti Ballroom

dengan kapasitas hingga ribuan orang dan tersebar di berbagai hotel bintang berkelas di Batam.

e. Wisata Belanja

Dengan lebih dari sepuluh pusat perbelanjaan yang ada di Batam, kota ini layak disebut sebagai surganya belanja. Aneka kebutuhan belanja mulai dari produk fesyen dan aksesorisnya, perangkat elektronik, pecah-belah, souvenir khas hingga rupa-rupa barang seken.

f. Wisata Bahari

Perlahan namun pasti, Batam yang dibentangi ratusan pulau-pulau kecil, terutama Gugusan Pulau Abang, terus merekah menjadi destinasi bahari terdepan di Kepulauan Riau.

g. Wisata Agro dan ECO

Dibentangan lahan subur dan lansekap alam yang berbukit serta dibingkai dengan laut, Batam surga bagi para penikmat wisata agro dan eco. Banyak opsi yang bisa dipilih untuk menikmatinya, mulai dari menyusuri hutan mangrove, menjelajahi kebun-kebun buah serta menikmati kebun raya Batam

h. Wisata Sejarah

Sebagai bagian tak terpisahkan dari kegemilangan Kerajaan Riau Lingga di masa lalu, Batam sarat dengan tempat-tempat yang bernilai sejarah tinggi. Karenanya, menjelajahi situs-situs bersejarah, diantaranya: Makam Temenggung Abdul Jamal di Bulang Lintang, Makam Nong Isa di Nongsa, Eks Kamp Pengungsi Vietnam serta Museum Raja Ali Haji hingga Tugu Jepang di Sembulang.

i. Wisata Olahraga

Olahraga golf merupakan salah satu opsi bijak yang bisa dipilih selama berkunjung ke Batam. Batam memiliki 7 lapangan golf bertaraf internasional. olahraga air, seperti bersepeda air, jet ski, banana boat, kayak, snorkeling hingga bersepeda

j. Wisata Berbasis Masyarakat atau *Community Based Tourism*(CBT)

Pengembangan wisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT) ini merupakan salah satu strategi dalam pengembangan sektor pariwisata Batam. Saat ini Batam telah memiliki 30-an objek wisata berbasis masyarakat yang menyuguhkan keunikan dan kekhasannya masing-masing. Diantaranya Kampung Tenun Ngenang, Hutan Wisata Mangrove Pandang Tak Jemu, Pantai Bale-Bale, Pantai Anak Karas, Pantai Pulau Mubut, Galang, Wisata Bahari Pulau Abang, Kampung Seni , Kampung Belian, Pantai Mak Dare, Nongsa, Hutan Wisata Mata Kucing, Temiang, Puncak Beliung, Sungai Harapan, Agrowisata Jambu Marina, Kampung Sawah Sekupang dan lainnya.

2.3.2.3 Urusan Pertanian

Meskipun Kota Batam bukan merupakan wilayah pertanian, namun terdapat beberapa kawasan yang digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas pertanian palawija dan perkebunan. Dalam urusan pertanian, indikator yang digunakan adalah meningkatnya produksi pertanian dan peternakan. Produksi pertanian dan peternakan di Kota Batam meskipun menunjukkan hasil yang fluktuatif secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Produksi pertanian dan peternakan pada tahun 2017 menghasilkan 63.524 ton yang meningkat menjadi 68.403 ton pada tahun 2018. Produksi pertanian dan peternakan sempat mengalami penurunan menjadi 60.313 ton pada tahun 2018 sebelum kemudian meningkat menjadi 67.446 ton pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga menjadi 63.158 ton. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, produksi pertanian dan peternakan telah memenuhi nilai yang ditargetkan.

Indikator berikutnya, persentase peningkatan produksi pertanian menunjukkan hasil yang fluktuatif antara -13 persen hingga 10 persen sepanjang periode tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, produksi pertanian mengalami penurunan sebesar -1,05 persen. Persentase peningkatan produksi pertanian mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi sebesar 4,24 persen. Produksi pertanian

mengalami penurunan kembali menjadi sebesar -13 persen di tahun 2018 dan kemudian meningkat menjadi 10 persen di tahun 2019, namun turun di tahun 2020 menjadi -16 persen. Persentase peningkatan produksi pertanian selama lima tahun terakhir terjadi paling rendah di tahun 2020. Di tahun 2020 adanya pandemi telah mengurangi produktivitas di bidang pertanian.

Berbeda dengan persentase peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi peternakan di Kota Batam terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, persentase peningkatan produksi peternakan di Kota Batam tercatat sebesar 0,52 persen yang meningkat menjadi 5,56 persen di tahun 2017. Terjadi peningkatan pada tahun berikutnya menjadi sebesar 7,2 persen di tahun 2018. Selanjutnya produksi peternakan meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 15,5 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 produksi peternakan di Kota Batam menurun sehingga menjadi 13,45 persen.

Indikator lain dalam urusan pertanian adalah persentase cakupan pelayanan kesehatan hewan. Besaran persentase cakupan pelayanan kesehatan hewan di Kota Batam menunjukkan hasil yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016, persentase cakupan pelayanan hewan di Kota Batam tercatat sebesar 0,6 persen yang mana nilai ini tumbuh menjadi 0,7 persen di tahun 2017 dan tumbuh lagi menjadi 0,94 persen di tahun 2018. Meski demikian, pada tahun 2019 persentase cakupan pelayanan kesehatan hewan di Kota Batam turun menjadi 0,43 persen. Selanjutnya persentase cakupan pelayanan kesehatan hewan tahun 2020 menunjukkan nilai yang sama dengan tahun 2019. Secara lebih lengkap, realisasi indikator kinerja urusan pertanian dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 101 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020

No.	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan (ton)	Target	19.015	19.025	19.338	19.841	20.354
		Realisasi	63.524	68.403	60.313	67.446	63.158

No.	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2.	Presentase peningkatan produksi Pertanian	Realisasi	-1,05%	4,24%	-13%	10%	-16%
3.	Presentase peningkatan produksi Peternakan	Realisasi	0,52%	5,56%	7,2%	15,5%	13,45%
4.	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan	Realisasi	0,6%	0,7%	0,94%	0,43%	0,43%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Dari sisi ketersediaan dan kebutuhan pangan, Kota Batam yang pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa dengan ketersediaan beras sebesar 108,46 kg per kapita memiliki ketersediaan beras sebanyak 144.225 ton. Dibandingkan dengan kebutuhan per kapita beras sebesar 105,94 kg dan total kebutuhan sebesar 140.872, Kota Batam memiliki surplus beras sebesar 3.354 ton di tahun 2019.

Tabel 2. 102 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kota Batam Tahun 2019

Komoditi Pangan	Jumlah Penduduk 2019	Ketersediaan (Kg/kapita)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Kg/kapita)	Kebutuhan (Ton)	Surplus / Defisit (Ton)
Beras	1.329.773	108,46	144.225	105,94	140.872	3.354

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB Kota Batam, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan peternakan selalu menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB pada tahun 2016 sebesar 1.289 miliar rupiah yang meningkat menjadi 1.379 miliar rupiah di tahun 2017, 1.479 miliar rupiah di tahun 2018, 1.479 miliar rupiah di tahun 2018 dan 1.623 miliar rupiah di tahun 2019. Selanjutnya di tahun 2020 1.646 miliar rupiah. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHK pada tahun 2016 sebesar 990 miliar rupiah pada tahun 2016 yang meningkat menjadi 1.024 miliar rupiah di

tahun 2017, 1.052 miliar rupiah di tahun 2018 dan 1.119 miliar rupiah di tahun 2019 dan 1.111 miliar rupiah di tahun 2020. Data kontribusi ini menunjukkan bahwa meskipun dari sisi kuantitas ton produksi mengalami fluktuasi, dari sisi nilainya sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan tetap menunjukkan perkembangan positif di Kota Batam sampai dengan tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menurun yaitu sebesar -0,71 persen.

Tabel 2. 103 Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
i	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (Miliar Rupiah)	ADHB	1.289	1.379	1.479	1.623	1.646
		ADHK	990	1.024	1.052	1.119	1.111
ii	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB ADHK (%)		3,56	3,43	2,73	6,37	-0,71

Sumber: BPS dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Pengembangan sektor pertanian di daerah yang didominasi wilayah industri dan perkotaan memiliki tantangan tersendiri begitu pula dengan Kota Batam. Fluktuatifnya produksi perikanan dan peternakan di Kota Batam salah satunya adalah terkait dengan faktor ketersediaan lahan pertanian. Saat ini banyak lahan pertanian yang digunakan bukan lah lahan yang secara spesifik diperuntukkan untuk pertanian sehingga memiliki kemungkinan cukup tinggi atas terjadinya alih fungsi lahan tersebut. Hal ini mengakibatkan luas lahan pertanian produktif yang ada di Kota Batam menjadi fluktuatif dan begitu pula dengan produksinya. Selain itu, petani yang ada saat ini masih didominasi oleh petani gurem yang memiliki keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana pertanian serta daya tawar terhadap tengkulak.

Pada kondisi daerah seperti Kota Batam, untuk meningkatkan kedaulatan pangan adalah dengan melakukan intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian ini dapat menjadi pilihan pada saat ekstensifikasi pertanian yang membutuhkan

banyak lahan sulit untuk dilakukan. Intensifikasi pertanian adalah salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada. Intensifikasi pertanian ditempuh dengan program Panca Usaha Tani, yang kemudian dilanjutkan dengan program Sapta Usaha Tani. Sapta usaha tani yang dapat dilakukan antara lain adalah pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama penyakit, pengairan atau irigasi yang baik, penanganan pasca panen, dan pemasaran hasil pertanian. Untuk mendukung sapta usaha tani tersebut, pengoptimalan kawasan pertanian terpadu yang ada perlu ditingkatkan. Selain itu kelompok tani yang ada juga perlu dioptimalkan baik dalam bentuk penyuluhan maupun dalam menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian untuk mendorong peningkatan produksi pertanian yang ada di Kota Batam.

2.3.2.4 Urusan Perdagangan

Capaian kinerja perangkat daerah dalam urusan perdagangan di Kota Batam melebihi target yang telah ditetapkan. Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan ini semula direncanakan akan direalisasikan melalui kegiatan pembinaan saja sehingga target Indikator jumlah PKL yang dibina hanya ditargetkan 100 PKL pertahun. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan penyesuaian berkembang tidak hanya pembinaan tetapi dalam bentuk pengawasan dan sosialisasi melalui Sidang Tera Ulang (STU) untuk PKL sehingga realisasi melebihi target setiap tahunnya. Target 2016 sebanyak 100 PKL dalam realisasi 2016 tercapai sebanyak 1.298 PKL. Sedangkan target 2017 masih seperti tahun 2016 yaitu sebanyak 100 PKL dan realisasinya pada tahun 2017 mencapai sebanyak 1.532 PKL. Target tahun 2018 jumlah PKL yaitu masih sebanyak 100 PKL, dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 1.166 PKL. Target tahun 2019 jumlah PKL yaitu masih sebanyak 100 PKL, dengan realisasi tahun 2019 sebanyak 1.177 PKL. Selanjutnya di tahun 2020 target jumlah PKL yang dibina juga berjumlah 100 dan yang terealisasi adalah 687.

Indikator berikutnya dalam urusan perdagangan adalah memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok. Target tahun 2016 dalam indikator ini yaitu sebesar 65% dengan realisasi tahun 2016 sebesar 70%. Target tahun 2017 dalam indikator ini yaitu sebesar 65% dengan realisasi tahun 2017 sebesar 75%. Target 2018 sebesar 70% dengan realisasi sebesar 83,09%. Target tahun 2019 yaitu sebesar 75% dan realisasinya mencapai 2019 sebesar 83,09 % seperti pada realisasi tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2020 target untuk memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok adalah 75%, sedangkan realisasinya telah mencapai target. Indikator memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok menunjukkan status melebihi target. Pada indikator lainnya yaitu persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar, berdasarkan realisasi tahun 2016-2020 persentase indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi tahun 2016 sebesar 18%, meningkat menjadi 24% pada realisasi tahun 2017, meningkat kembali menjadi 35% dalam tahun 2018, dan pada realisasi tahun 2019 meningkat kembali menjadi sebesar 59%. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2020 sehingga jumlah realisasi adalah 70%.

Indikator berikutnya dalam urusan perdagangan di Kota Batam adalah persentase pembinaan dan pengendalian perdagangan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa rata-rata realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Realisasi tahun 2016 sebesar 18,43%, realisasi tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 6,37%, namun realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 7,36%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan yaitu menjadi 9,56%. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali yaitu menjadi 12,75%.

Indikator yang terakhir adalah jumlah UTTP bertanda tera sah, realisasi tahun 2016 menunjukkan jumlah UPTTP sebanyak 13.122. Pada realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 17.605, jumlah UTTP dalam realisasi tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi 15.980. Pada tahun 2019

mengalami penurunan kembali yaitu menjadi 15.357. Selanjutnya tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 16.726.

Tabel 2. 104 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020

No.	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKL yang dibina	Target	100	100	100	100	100
		Realisasi	1.298	1.531	1.166	1.177	687
2	Memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok	Target	65	65	70	75	75
		Realisasi	70	75	79,09	83,09	80,01
3	Persentase Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar	Realisasi	18%	24%	35%	59%	70%
4	Persentase pembinaan dan pengendalian perdagangan	Realisasi	18,43%	6,37%	7,36%	9,56%	12,75%
5	Jumlah UTTP bertanda tera sah	Realisasi	13.122	17.605	15.980	15.357	16.726

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Sektor perdagangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar ketiga bagi perekonomian Kota Batam setelah sektor industri dan konstruksi. Kontribusi sektor perdagangan selalu menunjukkan pertumbuhan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada PDRB ADHB sektor perdagangan tumbuh dari 8,14 triliun rupiah di tahun 2016 menjadi 11,03 triliun rupiah di tahun 2019 dan turun menjadi 9,67 triliun di tahun 2020. Sedangkan pada PDRB ADHK tahun 2010, sektor perdagangan mencatatkan nilai 6,14 triliun rupiah di tahun 2016 dan tumbuh menjadi 7,12 triliun rupiah di tahun 2019 serta turun menjadi 6,07 triliun di tahun 2020. Dari data diketahui terdapat tren yang menurun pada kinerja ekspor Kota Batam yang meskipun mencapai puncak pada tahun 2018 sebesar 9,5 juta US Dollar, mengalami penurunan dari 9,17 juta US Dollar di tahun 2015 menjadi 8,78 juta US Dollar di tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 ekspor meningkat melebihi nilai ekspor di tahun 2018 yang mana nilai ekspor tahun 2020 adalah sebesar 9,52 juta US Dollar.

Tabel 2. 105 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020

Indikator		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Juta Rupiah)	ADHB	8.137.122.80	8 929540.07	10.125.672.19	11.034.232.62	9.669.265.80
	ADHK	6.141.980.40	6.374.988.23	6.816.434.37	7.123.698.99	6.073.379.96
Ekspor Kota Batam (Juta USD)		8.412,17	8.708.70	9.507,43	8.775,38	9.522,00

Sumber: BPS Kota Batam

2.3.2.5 Urusan Perindustrian

Terdapat dua indikator dalam urusan perindustrian di Kota Batam, yang pertama yaitu indikator jumlah sentra industri yang dibentuk. Dalam target jumlah sentra industri yang dibentuk dari tahun 2017 hingga 2019 target yang ditetapkan sebanyak 1 sentra industri yang dibentuk setiap tahunnya. Meski demikian, pada realisasinya, dari tahun 2017 hingga 2019 belum ada sentra industri yang berhasil dibentuk. Jumlah sentra industri yang dibentuk tidak tercapai karena pada praktiknya, pelaksanaan lebih fokus pada penyiapan pelaku usaha/IKM yang akan ditempatkan pada sentra industri. Namun pada tahun 2020 sudah terbentuk 5 sentra industri yang berlokasi di: 1) Sentra IKM Batik di Tiban Kampung; 2) Sentra IKM Tenun di Pulau Ngenang; 3) Sentra IKM Rajut di Mangsang; 4) Sentra IKM Anyaman Pandan di Pulau Panjang Timur dan 5) Sentra Kerupuk Ikan Tamban di Pulau Karas.

Indikator yang kedua yaitu persentase pertumbuhan industri kecil menengah. Realisasi persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif. Dalam realisasi tahun 2016 pertumbuhan industri kecil dan menengah sebesar 4,85 persen meningkat hingga 8,03 persen pada tahun 2020.

Tabel 2. 106 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020

No.	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sentra industri yang dibentuk	Target	1	1	1	1	1
		Realisasi	0	0	0	0	5
2	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	Realisasi	4,85	5,19	7,61	7,87	8,03

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Sebagai kota industri, perekonomian Kota Batam bertumpu pada kinerja sektor industri. Kinerja di sektor industri akan memberikan *multiplier effect* kepada sektor lain sehingga menggerakkan perekonomian bagi seluruh Batam. Berdasarkan data kontribusi sektoral, nilai sektor industri di Kota Batam selalu menunjukkan nilai yang meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020 baik dari PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010. Pada PDRB ADHB sektor industri Kota Batam, pada tahun 2016 mencatatkan kinerja sebesar 72,3 triliun rupiah dan terus meningkat menjadi 89, 03 triliun rupiah di tahun 2019 dan 93,73 triliun rupiah di tahun 2020. Dari nilai PDRB ADHK sektor industri Kota Batam dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun masa pandemi Covid-19 kontribusi sektor perindustrian tetap mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 107 Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Tahun 2016-2020

Indikator		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB (Juta Rupiah)	ADHB	72.303.679	75.340.147	81.309.771	89.033.272	93.734.811,60
	ADHK	52.548.433	53.433.484	55.303.168	59.176.665	61.411.918,20

Sumber: BPS Kota Batam

Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Batam selama periode 5 (lima) tahun terus tumbuh hingga mencapai total 502 IKM baru pada tahun 2020 dengan total nilai Investasi 45,89 Milyar yang dapat menyerap 1.686 tenaga kerja. Industri Kecil Menengah lebih didominasi oleh jenis usaha industri pangan dan kerajinan

sedangkan jenis usaha industri aneka industri belum mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang periode 2016-2021.

Tabel 2. 108 Data Perkembangan IKM pertahun di Kota Batam Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Usaha Industri	Jumlah IKM	Investasi (Rp)	Jumlah Naker
2016	Pangan	81	4.323.800.000,00	455
	Aneka Industri	10	116.000.000,00	11
	Kerajinan	8	79.000.000,00	26
	Total	**99**	**4.518.800.000,00**	**492**
2017	Pangan	75	10.547.000.000,00	620
	Aneka Industri	18	108.500.000,00	54
	Kerajinan	23	53.540.000,00	41
	Total	**116**	**10.709.040.000,00**	**715**
2018	Pangan	40	760.000.000,00	80
	Aneka Industri	22	342.000.000,00	42
	Kerajinan	94	979.000.000,00	110
	Total	**156**	**2.081.000.000,00**	**232**
2019	Pangan	21	1. 903.695.000,00	65
	Aneka Industri	2	22.500.000,00	2
	Kerajinan	21	105.000.000,00	25
	Total	**44**	**2.031.195.000,00**	**92**
2020	Pangan	20	22.439.490.000,00	46
	Aneka Industri	4	1.232.650.000,00	21
	Kerajinan	63	2.887.040.000,00	88
	Total	**87**	**26.559.180.000,00**	**155**
TOTAL PENINGKATAN IKM 2016-2020	Pangan	237	39.973.985.000,00	1.266
	Aneka Industri	56	1.821.650.000,00	130
	Kerajinan	209	4.103.580.000,00	290
	Total	**502**	**45.899.215.000,00**	**1.686**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Pada IKM-IKM yang ada, juga dilakukan pembinaan dengan jumlah pembinaan setiap tahunnya mengalami fluktuatif menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pada tahun 2016 sebanyak 247 IKM yang dibina dan terus ditingkatkan

jumlah IKM yang dibina setiap tahunnya hingga mencapai 1.830 total IKM yang dibina selama periode 5 (lima) tahun.

Tabel 2. 109 Jumlah Pembinaan IKM di Kota Batam Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					TOTAL
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Pembinaan IKM	247	315	325	350	380	1.830

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Sebagai kota industri dengan lahan yang terbatas, sektor industri menjadi sektor vital dalam perekonomian. Di satu sisi, sektor IKM dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong pemerataan pendapatan masyarakat karena cenderung lebih padat karya dibandingkan sektor industri besar. Berdasarkan data yang ada, sektor IKM masih terfokus pada IKM pangan dan kerajinan, hal ini menunjukkan bahwa rantai pasok industri di Kota Batam belum banyak melibatkan IKM setempat sebagai salah satu bagian dalam rantai pasok industri di Kota Batam.

Untuk dapat mendorong keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri dibutuhkan peningkatan daya saing IKM agar dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi pemasok dalam rantai pasok industri antara lain dalam hal standar kualitas, permodalan dan juga keselamatan produksi.

2.3.3 Fokus Fungsi Penunjang

2.3.3.1 Urusan Perencanaan

Fungsi penunjang perencanaan Spasial dan A-spasial pada intinya merupakan suatu sistem yang meliputi penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan, monitoring evaluasi perumusan serta implementasi kebijakan, dan monitoring evaluasi hasil kinerja pembangunan. Secara umum indikator kinerja urusan perencanaan selama periode 2016-2020 menunjukkan hasil yang positif.

Implementasi pendekatan perencanaan partisipatif di Kota Batam yang ditunjukkan dengan indikator Persentase Keterlibatan Publik dalam Proses

Musrenbang tahunan mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2017 sebesar 53,59 persen, menjadi 87 persen di tahun 2019 dan 90 persen di tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepedulian penduduk terhadap kualitas program dan kegiatan pembangunan melalui penyaluran aspirasi usulan saat musyawarah perencanaan pembangunan.

Sementara itu implementasi kebijakan RPJMD ke dalam RKPD yang diukur dengan indikator Penjabaran Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD yang selama tahun 2016-2020 mencapai realisasi 100 persen. Untuk implementasi kebijakan RKPD ke dalam APBD selama 2016-2020 memiliki capaian yang sama yakni 100 persen. Hal yang penting diperhatikan pada proses penjabaran RKPD ke APBD adalah adalah bahwa nomenklatur kegiatan serta target output RKPD perlu dijabarkan dalam KUA PPAS hingga APBD, adapun jika terdapat penambahan kegiatan diluar yang tercantum dalam RKPD, maka legalitas hal tersebut memerlukan berita acara kesepakatan antara Wali Kota dengan Ketua DPRD (Pasal 343 Permendagri 86/2017).

Selanjutnya dalam hal penyediaan data dan informasi pembangunan yang tepat waktu selama tahun 2016-2020 mencapai capaian 100 persen. Dalam konteks ini yang penting menjadi fokus penyempurnaan adalah kualitas/validitas dan kemudahan mengakses serta mengolah data dan informasi tersebut. Dengan mempertimbangkan pendeknya jangka waktu perencanaan kebijakan dan anggaran tahunan, musrenbang tahunan, evaluasi triwulanan, evaluasi tahunan dan rangkaian kegiatan lainnya dalam kalender perencanaan yang baku, maka kebutuhan kecepatan dan ketepatan ketersediaan data informasi pembangunan mutlak diperlukan. Sehingga penyempurnaan sistem data dan informasi menjadi pintu masuk bagi terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Dalam hal keberhasilan pencapaian target pembangunan yang diukur dengan indikator Persentase Indikator Kinerja sasaran Daerah dalam RPJMD yang mencapai Target, selama tahun 2016-2020 belum menunjukkan hasil yang positif

selama periode 2016-2020 rata-rata masih di bawah 45 persen. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa berdasarkan peraturan perundangan indikator sasaran daerah merupakan indikator agregat atau komposit yang dihasilkan dari kumpulan indikator-indikator program, sementara indikator program merupakan indikator agregat atau komposit yang dihasilkan dari kumpulan indikator-indikator kegiatan. Sehingga jika persentase pencapaian indikator sasaran daerah pada tahun 2020 hanya 35,5 persen, dapat dimaknai bahwa terdapat lebih dari 64,5 persen indikator program yang tidak mencapai target. Namun demikian dapat pula terjadi pencapaian indikator sasaran daerah tidak berkorelasi dengan pencapaian indikator program, artinya indikator program tidak berkontribusi terhadap indikator sasaran daerah atau indikator sasaran daerah tidak bisa menjadi ukuran keberhasilan bagi pencapaian kumpulan indikator-indikator program. Penyebab tersebut dapat diketahui secara akurat ketika terdapat analisis evaluasi kinerja di seluruh level indikator. Sehingga idealnya proses monitoring dan evaluasi dapat menjangkau permasalahan yang lebih dalam dari implementasi suatu kebijakan pemerintah.

Tabel 2. 110 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2016-2020

No	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD	Target	N/A	45	50	55	60
		Realisasi	45	61	50	55	55
2.	Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD	Target	N/A	90	92	94	96
		Realisasi	40	98,59	98,59	97,18	100
3.	Partisipasi perusahaan dalam pembangunan Kota Batam melalui dana CSR	Target	N/A	10	30	50	60
		Realisasi	0	0	30	50	60
4.	Penjabaran konsistensi Program di RPJMD ke dalam RKPD		99%	99%	99%	99%	95,83%
5.	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target		51	44,37	43,4	44,7	35,5
6.	Persentase Jumlah Program yang tidak Terlaksana		2.78%	2.78%	2.78%	4.16%	4,16%

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

2.3.3.2 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait otonomi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan inovasi daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan pelayanan publik; (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan (c) peningkatan daya saing Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 387 dijelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintah daerah mengacu pada prinsip:(a) peningkatan efisiensi; (b) perbaikan efektivitas; (c) perbaikan kualitas pelayanan; (d) tidak ada konflik kepentingan; (e) berorientasi kepada kepentingan umum; (f) dilakukan secara terbuka; (g) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan (h) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pada periode Tahun 2016-2020 urusan penelitian dan pengembangan di Kota Batam belum dapat dimaknai pelaksanaanya dikarenakan keterbatasan data dan informasi yang dapat merepresentasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2018 dan 2019 tidak dilaksanakan kajian/penelitian dikarenakan adanya keterbatasan APBD Kota Batam sehingga perlu dilakukan prioritas program, namun pada tahun 2020 terealisasi kajian/penelitian yang mendukung pembangunan. Dalam perspektif ke depan Kota Batam perlu terus menstimulasi proses penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 2. 111 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Litbang Tahun 2016-2020

No.	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kajian/Penelitian yang mendukung pembangunan	Target	-	3	4	4	4
		Realisasi	16	1	0	0	2

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

2.3.3.3 Urusan Keuangan

Fungsi penunjang urusan keuangan dalam kebijakan yang terkait otonomi daerah pada hakikatnya ditujukkan untuk menilai kinerja di bidang keuangan dalam konteks sebagai fungsi penunjang urusan yang dijalan oleh 2 OPD, yaitu BPKAD dan BP2RD. Evaluasi dan proyeksi terhadap kinerja keuangan daerah sendiri disajikan dalam Bab tersendiri, yaitu di Bab III. Kinerja urusan keuangan menggambarkan bagaimana kualitas pengelolaan keuangan daerah selama ini dijalankan. Kualitas ini dapat menggambarkan secara umum proses pengelolaan keuangan daerah. Berikut data perkembangan urusan keuangan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 112 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2016-2020

No.	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Peningkatan PAD	Target	1T	1,1 T	1,3 T	1,4 T	1,5 T
		Realisasi	0,891 T	0.97T	1,2T	1,14T	0,959T
3	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Target	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Realisasi	tidak tepat	tidak tepat	tepat	Tepat	tepat
	Tanggal Penetapan		29 Januari 2016	27 Januari 2017	22 Desember 2017	28 Desember 2018	20 Desember 2019
4	Peningkatan Pelayanan BLUD Dana Bergulir Kota Batam (%)		100	100	100	100	100

Sumber: BPKAD Kota Batam

Tabel 2. 113 Penyaluran Pokok dan Pendapatan Bunga

NO	TAHUN	TARGET PENYALURAN	REALISASI PENYALURAN	PERSENTASE (%)	TARGET PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	PERSENTASE (%)
1	2016	9,000,000,000	8,832,000,000	98.13%	1,300,000,000	1,481,009,537	113.92%
2	2017	10,500,000,000	11,186,000,000	106.53%	1,650,000,000	1,455,125,517	88.19%
3	2018	10,500,000,000	5,022,000,000	47.83%	1,800,000,000	1,353,415,418	75.19%
4	2019	10,500,000,000	4,130,000,000	39.33%	1,259,649,839	1,141,401,877	90.61%
5	2020	7,500,000,000	2,745,000,000	36.60%	1,200,000,000	880,715,179	73.39%
TOTAL		**48,000,000,000**	**31,915,000,000**		**7,209,649,839**	**6,311,667,528**	

Sumber : BPKAD Kota Batam

Secara keseluruhan kualitas proses pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Batam sudah baik, dengan didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam dari BPK RI selama 5 tahun terakhir. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Batam telah berjalan transparan dan akuntabel.

Jika dilihat dari aspek pendapatan kinerja peningkatan PAD perlu mendapatkan perhatian, selama periode 5 tahun PAD Kota Batam tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan hal ini dikarenakan pada saat penyusunan target PAD Periode RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 menggunakan target optimis. Sedangkan sebagaimana kita ketahui terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Batam di tahun 2016-2017 tentunya kondisi makro pembangunan baik dalam negeri maupun global memberikan dampak besar terhadap PAD Kota Batam

Di masa mendatang, penting bagi Pemerintah Kota Batam untuk lebih cermat dalam memperkirakan target penerimaan daerah sesuai dengan potensi daerah yang sebenarnya dan perlu untuk melakukan kajian yang mendalam terkait potensi daerah.

2.3.3.4 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Tabel 2.114 dapat diketahui kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Secara umum indikator kinerja masuk

dalam kategori realisasi rendah, karena dalam implementasinya hanya menggunakan sumber anggaran APBD yang sangat terbatas. Untuk indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (tugas belajar untuk peningkatan karir) selama tahun 2016-2019 masih < 1 persen. Selanjutnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (diklat Pim) selama tahun 2017-2019 masih < 1 persen. Sementara indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pada tahun 2019 terealisasi sebesar 8,79 persen. Untuk persentase ASN yang mengikuti program minat dan bakat di tahun 2019 terealisasi 2,44 persen. Adapun indikator pelanggaran pegawai di tahun 2019 sebesar 0,22 persen. Selanjutnya untuk indikator persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian sejak tahun 2018 hingga 2019 telah mencapai realisasi 91 persen.

Dalam perspektif periode selanjutnya perlu dipikirkan untuk memanfaatkan peluang-peluang peningkatan kompetensi pegawai (diklat/tugas belajar, dst) menggunakan anggaran APBN. Dalam kerangka mempersiapkan perampingan organisasi sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa struktur organisasi instansi pemerintah perlu disederhanakan (tepat struktur kaya fungsi), maka pelatihan-pelatihan terhadap pegawai fungsional menjadi fokus dalam peningkatan kompetensi pegawai.

Tabel 2. 114 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020

No.	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Target	-	46,67	60,00	73,33	86,67
		Realisasi	37,6	88,35	91,05	91,76	97,84
2	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat	Target	-	17,75	54,32	68,55	83,48
		Realisasi	30,56	38,00	58,37	72,3	51,56
3	Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur	Target	-	60,00	75,00	83,33	91,67
		Realisasi	41,63	75,31	80,56	89,74	99,47
4	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	Realisasi	0,03	0,08	0,08	0,12	0,12

No.	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
5	Persen ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural*	Realisasi	-	0,73	0,55	0,90	0,00
6	Persen ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional*	Realisasi	4,6	6,3	6,35	8,79	5,76
7	Persentase ASN yang mengikuti program minat dan bakat*	Realisasi	1,26	1,68	1,78	2,44	1,94
8	Persentase pelanggaran pegawai*	Realisasi	0,66	0,67	0,61	0,22	0,38

Sumber: BKPSDM Kota Batam
**indikator ini tidak memiliki target karena bukanindikator program RPJMD*

2.3.3.5 Urusan Pengawasan

Fungsi penunjang urusan pengawasan berkaitan dengan penilaian atas kinerja pengawasan yang dijalankan oleh fungsi pengawas internal di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Kualitas pengawasan internal akan memberikan gambaran tentang jaminan kualitas atas proses pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah data perkembangan kinerja pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 115 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2016-2020

No.	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kepatuhan terhadap standar dan prosedur pertanggungjawaban keuangan	Target	42	46	50	54	58
		Realisasi	42	73	78	78	80
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Target	85	87	89	91	93
		Realisasi	85	100	97	97	93
3	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Pemerintah Kota Batam		96	95	93	95	90
4	Penilaian level kapabilitas APIP Pemerintah Kota Batam		2	2	3	3	3
5	Jumlah Temuan BPK (sumber: LHP BPK RI)		27	49	30	19	12
6	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan BPK		58	41	59	70	97
7	Penilaian level maturitas SPIP Pemerintah Kota Batam		2	2	3	3	3

Sumber: Inspektorat Kota Batam

Jika dilihat dari tabel di atas, kinerja pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Batam sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan kualitas SPIP dan kapabilitas APIP yang berada di level 3 selama 2 tahun terakhir ini, dan juga

tingginya persentase tindak lanjut atas hasil rekomendasi temuan BPK dan temuan APIP. Kinerja yang sudah baik tersebut juga turut andil dalam konsistensi Pemerintah Kota Batam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun terakhir sebagaimana telah diungkap dalam kinerja urusan keuangan di atas.

Namun demikian, meski secara umum kinerja pengawasan telah baik, bukan berarti tanpa kelemahan dan kendala. Kelemahan yang paling pokok dihadapi oleh fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Batam adalah masih berjalannya pola *post audit*, sementara *probity audit* belum dilakukan hingga tahun 2019, dan rencananya akan dilakukan di tahun 2020 ini, meski kemungkinan akan tertunda hingga tahun 2021 karena adanya wabah pandemi Covid-19. Saat ini audit belum dapat diselenggarakan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan, sehingga dukungan peningkatan sistem IT menjadi keharusan dalam peningkatan pengawasan.

Selain masih kurangnya dukungan IT, persoalan kuantitas dan kualitas SDM menjadi hambatan peningkatan pengawasan. Berdasarkan standar pelayanan minimal pengawasan internal, idealnya auditor madya sebanyak 5 orang dan auditor muda sebanyak 15 orang, sedangkan auditor pertama harusnya 45 orang. Namun, saat ini secara keseluruhan auditor masih ada 32 orang (madya 5 orang, muda 14 orang dan pertama 8 orang). Fungsional P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah) menurut standar sejumlah 48 orang, akan tetapi saat ini hanya tersedia 2 orang. Masih kurangnya kebutuhan SDM ini perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan secara berlanjut di masa mendatang.

Terakhir, belum adanya penilaian atas zona integritas dalam pengukuran kinerja pengawasan disebabkan karena adanya wabah Covid-19, BPS mengundurkan diri dari survei penilaian integritas untuk tahun 2019. Rencana awal, terdapat 6 OPD yang akan dijadikan *pilot project* dalam penerapan survei penilaian integritas.

Sampai dengan tahun 2020 ini kemungkinan survei atas penilaian integritas masih belum dapat dilakukan.

2.3.3.6 Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020 secara umum menunjukkan hasil yang positif. Indikator persentase penyelesaian agenda DPRD selama tahun 2018 hingga 2020 berada diangka 90 persen. Sebagai indikator tambahan penilaian kinerja urusan Sekretariat DPRD Kota Batam dapat dilihat melalui indeks pelayanan sekretariat DPRD yang sesuai SOP pada selama empat tahun selalu meningkat, hingga pada tahun 2019 tercatat sebesar 80 persen dan 92 persen di tahun 2020. Untuk indikator persentase Perda yang disahkan tepat waktu (berdasarkan yang tercantum dalam APBD) pada tahun 2020 tercatat hanya 83 persen, jika dibanding tahun 2019 mengalami penurunan kinerja hal ini dikarenakan karena keterbatasan waktu sehingga dari sembilan perda yang diagendakan hanya 6 perda yang disahkan dan 3 perda akan dilanjutkan kembali pada tahun 2021. Angka tersebut tidak mencapai 100 persen karena dinamika politik terutama dari sisi eksternal sangat menentukan pencapaian indikator tersebut. Selanjutnya untuk persentase penetapan penganggaran tepat waktu pada tahun 2020 mencapai 100 persen, dalam konteks ini kriteria tepat waktu berdasarkan mekanisme penetapan APBD/produk hukumnya.

Tabel 2. 116 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2016-2020

No.	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	Target	60	65	70	75	80
		Realisasi	85	85	90	90	90
2	Persentase indeks pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam sesuai SOP		65	70	75	80	92
3	Persentase Perda yang disahkan tepat waktu (berdasarkan yang di APBD)		83,94	91,37	92,09	96,83	83
4	Persentase penetapan penganggaran tepat waktu (dari aspek mekanisme penetapan APBD/produk hukumnya)		75	89,9	95,53	99,49	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Batam

Secara umum persoalan pada Sekretariat DPRD adalah terkait dengan aspek kelembagaan, dimana saat ini masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat dewan, dengan kata lain peta dalam analisis jabatan tidak sesuai dengan jabatan yang ditempati oleh pegawai di Sekretariat Dewan.

2.3.3.7 Urusan Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Tabel 2.117 dapat diketahui indikator kinerja urusan administrasi pemerintahan Kota Batam Periode Tahun 2016-2020. Peringkat LPPD baik tingkat Provinsi maupun Nasional belum dapat tercapai target selama periode 2016-2018 sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 penilaian LPPD se-Indonesia belum terbit Surat Keputusan Kemendagri.

Untuk nilai LAKIP selama lima tahun mengalami peningkatan secara bertahap, pada Tahun 2016 tercatat nilai Lakip sebesar 50,36 (CC) kemudian meningkat setiap tahunnya hingga menjadi 64,84 (B) pada tahun 2019 dan 65,21 (B) pada tahun 2020, namun jika dibandingkan dengan target pada tahun 2018 dan 2019 Pemerintah Kota Batam berhasil memenuhi target, sedangkan pada tahun 2020 target tidak terlampaui.

Perangkat Daerah yang memiliki SOP merupakan Indikator yang menunjukkan upaya Pemerintah Daerah untuk menerapkan terstandarisasi agar dapat bekerja secara selaras dan sesuai standar yang ada terutama yang berhubungan langsung dengan Pelayanan Publik, pada tahun 2019 dan 2020 sudah 100 persen Perangkat Daerah di Kota Batam memiliki SOP.

Selama periode Tahun 2016-2020 Kota Batam menetapkan perda sebanyak 10 perda, sementara perwako sebanyak 62 di tahun 2016. Perda terbanyak dihasilkan pada Tahun 2016, sementara perwako terbanyak dihasilkan pada Tahun 2017. Pada tahun 2020 jumlah perda yang dihasilkan adalah empat perda dan74 perwako. Indikator persentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga selama periode Tahun 2017-2020 telah menghasilkan 750 MoU, dimana

MoU terbanyak dihasilkan pada Tahun 2019 (225 MoU) dan tahun 2020 juga 225 MoU.

Sebagai indikator tambahan lainnya yang dapat menunjukkan capaian kinerja urusan Administrasi Pemerintahan yaitu Indikator jumlah perkara yang ditangani, pada tahun 2016 tercatat dua perkara perdata dan empat PTUN, kemudian bersifat fluktuatif setiap tahunnya sehingga menjadi 4 perkara perdata dan 5 PTUN di tahun 2019 serta 4 perkara perdata dan 2 PTUN di Tahun 2020. Jumlah perkara yang ditangani cenderung menurun karena (1) tidak adanya gugatan perdata/TUN yang harus ditangani; (2) adanya peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat; dan (3) menunjukkan keberhasilan penyuluhan taat hukum.

Selain itu penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang baru dilakukan pada tahun 2018 oleh Kemenpan RB juga menjadi indikator tambahan capaian kinerja urusan Administrasi Pemerintahan, Kota Batam meraih nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang terus meningkat dari tahun 2019 dari 41,32 (C) menjadi 52,33 pada tahun 2020 hal ini menunjukkan kriteria cukup baik (CC), sehingga perlu menjadi perhatian kedepan Pemerintah Kota Batam untuk perbaikan yang tidak mendasar.

Tabel 2. 117 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2016-2020

No.	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Peringkat LPPD Provinsi	Target	3	2	1	1	1
		Realisasi	3	6	5	-	-
2	Peringkat LPPD Nasional	Target	30 besar	20 besar	10 besar	5 besar	3 besar
		Realisasi	40	89	37	-	-
3	Nilai LAKIP daerah	Target	B	B	B	B	BB
		Realisasi	50,36 (CC)	61,05 (CC)	64,74 (B)	64,84 (B)	65,21 (B)
4	Jumlah PD yang memiliki SOP (persen)	Target	0	5	7	9	12
		Realisasi	0	0	50	100	100
5	Produk Hukum (Perda dan Perwal) yang	Target	7 Perda dan 10 Perwako	7 Perda dan 10 Perwako	7 Perda dan 10 Perwako	7 Perda dan 20 Perwako	7 Perda dan 10 Perwako

No.	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	dihasilkan	Realisasi	10 Perda dan 62 Perwako	9 Perda dan 79 Perwako	6 Perda dan 60 Perwako	9 Perda dan 57 Perwako	4 Perda dan 74 Perwako
6	Jumlah kerjasama antar lembaga (MoU)	Target	0	5	10	10	10
		Realisasi	0	100	200	225	225
7	Persentase Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	Target	100	100	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	100	100

Catatan: Data LPPD 2019 dan 2020 belum dikeluarkan secara resmi oleh Kemendagri ; Penilaian IRB dimulai tahun 2019 oleh KemenPAN RB

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pada tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kota Batam tahun 2016-2020 dapat dilihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah konsumsi rumah tangga per kapita per bulan sebesar Rp1.706.412 yang terdiri dari Rp777.096 konsumsi makanan dan Rp929.316 konsumsi non makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut meningkat menjadi

Rp1.747.003 di tahun 2017 dan Rp1.749.746 di tahun 2018. Pada tahun 2019 jumlah konsumsi rumah tangga per kapita per bulan meningkat menjadi Rp2.020.847 yang terdiri dari Rp854.178 pengeluaran konsumsi makanan dan Rp1.166.669 pengeluaran bukan makanan. Namun, pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19, pengeluaran konsumsi non-makanan mengalami penurunan. Meskipun demikian pengeluaran konsumsi makanan tetap mengalami peningkatan. Sehingga, total pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita mengalami penurunan yang tidak signifikan. Pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi makanan per kapita adalah Rp864.511 dan pengeluaran konsumsi non-makanan per kapita adalah Rp1.124.023. Sehingga total konsumsi tahun 2020 adalah Rp1.988.534. Rasio konsumsi non-makanan di masa pandemi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 118 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Batam Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Makanan	777.096	829.062	811.553	854.178	864.511
Konsumsi Non Makanan	929.316	917.941	938.193	1.166.669	1.124.023
Total	1.706.412	1.747.003	1.749.746	2.020.847	1.988.534
Rasio konsumsi non-makanan	54,46	52,54	53,62	57,73	56,53

Sumber: BPS Kota Batam

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa baik pengeluaran makanan maupun non makan di Kota Batam mengalami peningkatan. Selain itu, konsumsi non makanan menunjukkan proporsi yang lebih tinggi atau lebih dari 50 persen seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah ini. Rasio konsumsi makanan per kapita sebulan di Kota Batam pada tahun 2016 sebesar 54,46 persen dan meningkat menjadi 57,73 persen di tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan proporsi konsumsi non pangan di Kota Batam meskipun sempat turun menjadi 52,54 persen di tahun 2017 dan 53,62 persen di tahun 2018. Namun pada tahun

2019 terjadi peningkatan yang signifikan. Selanjutnya di tahun 2020 rasio konsumsi non-makanan menurun menjadi 56,53.

Peningkatan konsumsi non pangan per kapita dapat dipahami bahwa secara umum, pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan sudah dapat terpenuhi sehingga terjadi pergeseran untuk memenuhi kebutuhan non pangan lainnya. Namun, pada tahun 2020 akibat krisis pandemi terdapat penurunan konsumsi non-makanan oleh rumah tangga, sehingga rasio pengeluaran konsumsi non-makanan pada rumah tangga juga mengalami penurunan seperti gambar berikut.

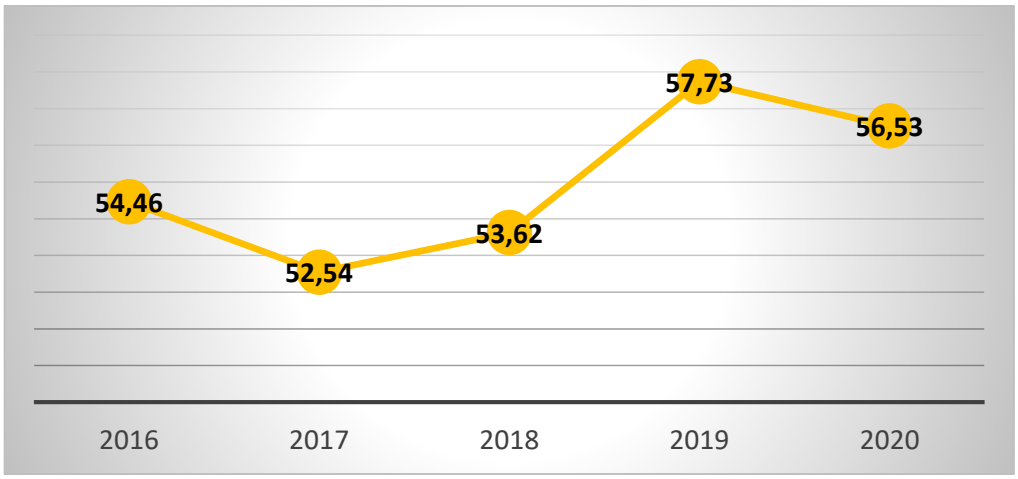

Gambar 2. 72 Rasio Pengeluaran Non Makanan Kota Batam Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kota Batam

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang

Salah satu ukuran daya saing infrastruktur daerah adalah ketersediaan layanan perbankan dalam mendukung aktivitas perekonomian. Ketersediaan layanan perbankan dapat direpresentasikan melalui jumlah kantor cabang bank yang ada di daerah tersebut. Pada bank umum pemerintah Tahun 2018 berjumlah 235 bank yang merupakan data keseluruhan Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu dari Bank Umum dan Bank Pemerintah Daerah, jumlah Bank Umum dan Bank Pemerintah Daerah setiap tahunnya mengalami penurunan, pada tahun 2019 berjumlah 234 bank dan pada tahun 2020 berjumlah 230, penurunan juga terjadi pada jumlah kantor kas Bank Umum dan

Bank Pemerintah daerah selama kurun waktu 2018 ke tahun 2020, walaupun terjadi penurunan jumlah Bank Umum dan Bank Pemerintah Daerah ini layanan aktivitas perekonomian masih dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2. 119 Bank Umum Pemerintah

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Kantor Cabang dan Cabang Pembantu	235	234	230
Kantor Kas	117	114	113
Jumlah	352	348	343

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Batam

Selain bank umum, juga terdapat Bank Perkreditan Rakyat guna menunjang aktifitas perekonomian di Kota Batam. Jumlah BPR di Kota Batam cenderung siginfikan yaitu dengan jumlah 76 Bank BPR dari tahun 2018 hingga tahun 2020 di Kota Batam, sedangkan terjadi peningkatan untuk Kantor Kas BPR di Kota Batam dari tahun 2018 dan tahun 2019 berjumlah 8 Kantor Kas menjadi 9 Kantor Kas pada tahun 2020 untuk terdapat pula bank perkreditan rakyat (BPR) di Kota Batam yang juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2. 120 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Kantor Cabang dan Cabang Pembantu	76	76	76
Kantor Kas	8	8	9
Jumlah	84	84	85

Sumber: BPS Kota Batam

Meningkatnya jumlah kantor perbankan di Kota Batam menunjukkan bahwa infrastruktur keuangan dalam mendukung aktivitas perekonomian di Kota Batam selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat meningkatkan daya saing daerah Kota Batam. Meski demikian, ke depannya indikator jumlah kantor perbankan bukan lagi menjadi indikator daya saing infrastruktur keuangan

daerah melainkan penetrasi layanan teknologi finansial dalam mendukung aktivitas perekonomian. Semakin berkembangnya layanan teknologi finansial selain perlu dimanfaatkan juga perlu diwaspadai supaya tidak dimanfaatkan oleh pelaku teknologi finansial yang kurang bertanggung jawab.

2.4.2.2 Jenis, Kelas Dan Jumlah Restoran

Hotel dan restoran merupakan salah satu infrastruktur wilayah yang mendukung aktivitas perekonomian. Tersedianya hotel dan restoran yang mencukupi dapat meningkatkan daya saing daerah terutama dalam penyediaan akomodasi yang mendukung aktivitas bisnis bagi pelaku usaha. Selain itu, hotel dan restoran juga mendukung aktivitas pariwisata di daerah terutama untuk jenis pariwisata kuliner dan MICE *(Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)*. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terdapat peningkatan jumlah restoran yang signifikan setiap tahunnya terlihat dari jumlah restoran pada tahun 2016 berjumlah 535 restoran, pada tahun 2017 meningkat 47,66% menjadi 709 restoran. Di tahun 2018 meningkat 27,92% menjadi 907 restoran, selanjutnya pada tahun 2019 restoran di Kota Batam berjumlah 997 restoran atau meningkat 0,9% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 jumlah restoran menjadi 1091 restoranatau meningkat 0,94% daripada tahun 2019 .

Tabel 2. 121 Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kota Batam Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2020

Jumlah Restoran dan Rumah Makan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belakang Padang	2	2	3	3	3
Bulang	2	2	2	2	2
Galang	3	4	5	7	9
Sungai Beduk	23	27	35	39	44
Nongsa	23	31	39	46	47
Sekupang	26	45	52	58	62

Jumlah Restoran dan Rumah Makan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lubuk Baja	193	230	287	325	351
Batu Ampar	51	62	78	82	90
Batam Kota	143	207	277	300	332
Batu Aji	27	29	39	38	42
Sagulung	29	39	44	47	54
Bengkong	13	31	46	50	55
TOTAL	**535**	**709**	**907**	**997**	**1091**

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk Perhotelan dari Tahun 2016-2020 secara keseluruhan Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah akomodosi keseluruhan berjumlah 189 hotel dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 202 hotel. Pada tahun 2019 jumlah hotel di Kota Batam masih mengalami peningkatan sehingga berjumlah 227 hotel. Pada tahun 2020 jumlah hotel meningkat kembali menjadi sebanyak 252 hotel. Peningkatanjumlah hotel yang terjadi lebih didominasi meningkatnya hotel non bintang yang tahun 2019 berjumlah 143 menjadi172 hotel non bintang di tahun 2020.

Tabel 2. 122 Jumlah Hotel di Kota BatamTahun 2016-2020

KECAMATAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belakang Padang	2	1	2	1	1
Bulang	1	0	1	1	1
Galang	1	1	3	4	5
Sungai Beduk	0	1	1	1	1
Nongsa	5	5	5	6	6
Sekupang	9	10	13	11	11

KECAMATAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lubuk Baja	103	109	120	115	125
Batu Ampar	30	34	34	35	38
Batam Kota	22	22	24	30	38
Batu Aji	11	11	11	14	14
Sagulung	2	3	4	5	5
Bengkong	3	5	5	4	7
Jumlah	**189**	**202**	**223**	**227**	**252**

Sumber : BP2RD Kota Batam

2.4.2.3 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik merupakan infrastruktur penting bagi daya saing daerah. Listrik yang memadai akan mendukung berjalannya industri di suatu daerah karena energi merupakan salah satu faktor produksi penting dalam memproduksi barang dan jasa. Selain itu, listrik juga merupakan prasarana penting bagi masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh, persentase rumah tangga pengguna listrik secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 66,07 persen menjadi 85,13% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang dapat mengakses listrik di Kota Batam.

Meski semakin banyak yang dapat mengakses listrik, dari sisi ketersediaan listrik di Kota Batam masih belum mencukupi. Berdasarkan data, rasio ketersediaan listrik di Kota Batam mengalami perkembangan yang fluktuatif antara 15,40 persen hingga 42,85 persen. Rasio ketersediaan tersebut cukup rendah mengingat nilainya masih di bawah 50 persen. Hal ini berarti belum semua kebutuhan listrik dapat dipenuhi sehingga masih perlu adanya pemadaman atau pemenuhan listrik menggunakan sumber sendiri baik untuk masyarakat maupun pelaku usaha.

Saat ini terdapat Sembilan desa/kelurahan yang memperoleh listrik hanya 14 jam/hari yakni desa/kelurahan (1) Pemping, (2) Bulang Lintang, (3) Pulau Buluh

(4) Temoyong, (5) Batu Legong, (6) Pantai gelam, (7) Karas, (8) Subang Mas, dan (9) Air Raja. Secara umum, dari 88 pulau yang berpenghuni di Kota Batam, masih terdapat 28 pulau yang belum memiliki listrik, sedangkan 27 pulau menggunakan listrik PLN dan 33 pulau menggunakan listrik Non PLN.

Tabel 2. 123 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rumah tangga pengguna listrik	66,07%	66,11%	85,44%	85,13%	-
Rasio ketersediaan listrik	15,40%	37,30%	42,85%	26,13%	-

Sumber: PT PLN (Persero)

Untuk dapat meningkatkan daya saing daerah, ketersediaan listrik memegang peranan penting dalam mencukupi kebutuhan energi terutama untuk industri. Dalam perencanaan ketenagalistrikan, pemerintah daerah melalui Provinsi Kepri telah berkoordinasi dengan PT PLN sebagai penyedia listrik agar secara gradual meningkatkan pelayanan demi memenuhi kebutuhan listrik baik bagi masyarakat maupun industri.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Tingkat kriminalitas atau kejahatan adalah jumlah kejahatan setahun dalam suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Tingkat keamanan suatu wilayah akan menentukan iklim berinvestasi di wilayah tersebut. Berdasarkan data BPS Kota Batam dan pemerintah Kota Batam, tingkat kriminalitas di Kota Batam dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan dari 2.473 di tahun 2018 menjadi 2.263 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan Kota Batam semakin baik dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, demonstrasi yang merupakan salah satu penyaluran aspirasi yang masyarakat juga dapat menjadi cerminan tingkat keamanan suatu wilayah. Meski demikian, jumlah demonstrasi yang terlalu banyak tentu akan menghambat iklim

investasi. Jumlah demonstrasi di Kota Batam tahun 2017 dan 2018 yaitu sebanyak 25 demonstrasi dan meningkat menjadi 30 demonstrasi di tahun 2019. Dengan demikian, secara rata-rata dalam satu tahun terjadi 2-3 kali demonstrasi di Kota Batam. Pada tahun 2020 jumlah demonstrasi semakin menurun dengan adanya pandemi Covid-19 dan pembatasan aktivitas masyarakat. Pada tahun 2020 jumlah demonstrasi adalah sebanyak 20 kali, artinya secara rata-rata dalam satu tahun terjadi 1-2 kali demonstrasi.

Tabel 2. 124 Angka Kriminalitas (Tindak Pidana) dan Jumlah Demonstrasi Kota Batam Tahun 2016-2020

Tahun	Angka Kriminalitas	Jumlah Demonstrasi
2016	-	25
2017	-	25
2018	2.473	25
2019	2.513	30
2020	2.263	20

Sumber: BPS Kota Batam dan Satpol PP

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka kualitas SDM dapat semakin baik. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di Kota Batam. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang menamatkan perguruan tinggi.

Perkembangan rasio lulusan perguruan tinggi selama periode 2016-2020 menunjukkan hasil yang meningkat. Pada tahun 2016, rasio pekerja lulusan perguruan tinggi Kota Batam mencapai 17,78 dan meningkat menjadi 18,06 pada tahun 2017. Hal ini bermakna bahwa terdapat 79.449 orang pekerja lulusan perguruan tinggi di tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan signifikan terhadap rasio tenaga kerja yang lulus perguruan tinggi, pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja dengan kualifikasi lulus perguruan tinggi adalah 117.635 orang.

Pada tahun 2019 meningkat menjadi 123.989 orang dan pada tahun 2020 juga meningkat yaitu menjadi 133.238 lulusan. Dengan demikian rasio lulusan perguruan tinggi menjadi 20,26 di tahun 2020.

Tabel 2. 125 Kualitas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	447.044	558.154	550.813	635.516	657.642
Jumlah Pekerja Lulusan Perguruan Tinggi	Orang	79.499	100.825	117.653	123.989	133.238
Rasio Lulusan perguruan tinggi	Persen	17,78	18,06	21,36	19,51	20,26

Sumber: BPS Kota Batam
Tahun 2016 : Olahan Tim

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2. 126 Rasio Ketergantungan Kota Batam Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk usia tidak produktif (usia <15 tahun dan usia >64 tahun)	Jiwa	395.742	409.144	421.083	431.568	355.169

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun)	Jiwa	840.657	874.052	908.690	944.441	841.227
Rasio Ketergantungan	persen	47,08	46,81	46,34	45,70	42,22

Sumber: BPS Kota Batam

Secara umum, rasio ketergantungan di Kota Batam menunjukkan kinerja yang baik dengan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2016, rasio ketergantungan sebesar 47,08 dan sempat menurun menjadi 46,81 di tahun 2017. Pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rasio ketergantungan mengalami penurunan yang siginifikan yaitu menjadi 42,22 pada tahun 2020.

BAB III
GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

BAB III

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung

jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasasi program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Batam dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kota Batam secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 ditambah 1 tahun transisi yaitu tahun 2026 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Perkiraan proyeksi pendapatan selama 5 tahun ke depan mempertimbangkan tren realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun-tahun sebelumnya, proyeksi rata-rata pertumbuhan ekonomi 2021-2026 (Tabel 5.1 di Bab V) dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya wabah Covid-19.

Secara umum komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ZTahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1 Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya dan menyandingkan antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan dan menyandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 6 tahun ke depan (dari tahun 2021 s.d. tahun 2026) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.

A. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,

Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	+/(-)
1	2016	2,276,443,231,337.92	2,215,680,286,681.50	97.33%	(60,762,944,656.42)
2	2017	2,352,145,967,331.55	2,157,662,190,348.08	91.73%	(194,483,776,983.47)
3	2018	2,508,604,184,132.21	2,360,092,860,079.71	94.08%	(148,511,324,052.50)
4	2019	2,746,310,491,516.42	2,522,890,256,865.30	91.86%	(223,420,234,651.12)
5	2020	2.654.947.608.748,27	2.577.504.994.815,32	97,08%	(77.442.613.932,95)

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Batam

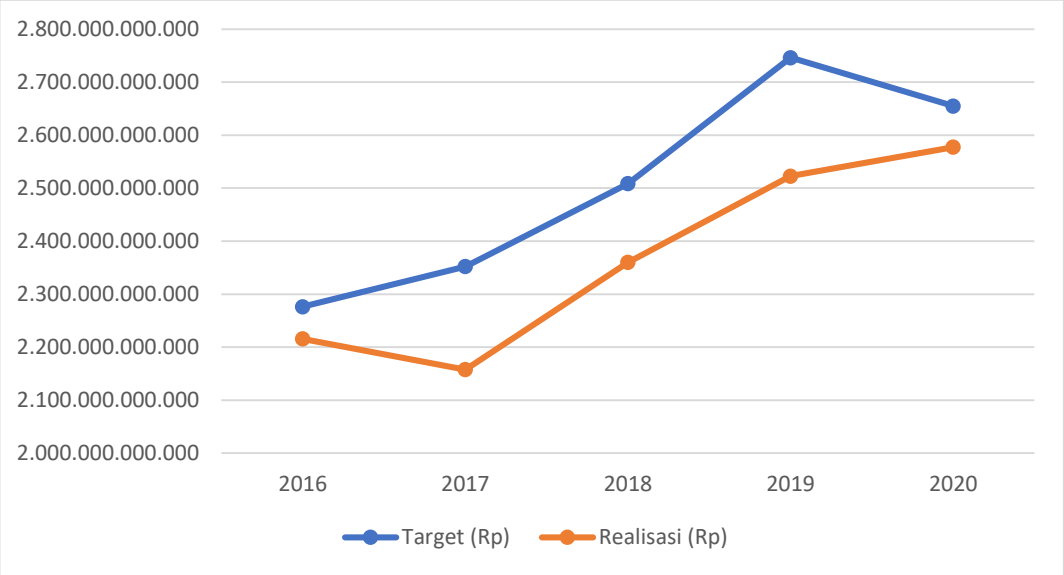

Gambar 3. 1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2016 - 2020

Adapun rincian target dan realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Batam untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Batam Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Daerah Tahun 2016			
	a. PAD	909.266.681.460,69	881.268.969.156,50	96,92%
	b. Pendapatan Transfer	1.367.176.549.877,23	1.334.411.317.525,00	97,60%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah	2.276.443.231.337,92	2.215.680.286.681,50	97,33%
2.	Pendapatan Daerah Tahun 2017			
	a. PAD	1.086.585.819.982,57	974.124.203.684,08	89,65%
	b. Pendapatan Transfer	1.265.560.147.348,98	1.183.537.986.664,00	93,52%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah	2.352.145.967.331,55	2.157.662.190.348,08	91,73%
3.	Pendapatan Daerah Tahun 2018			
	a. PAD	1.235.027.230.923,76	1.084.640.559.852,99	87,82%
	b. Pendapatan Transfer	1.165.316.078.599,13	1.179.622.117.473,00	101,23%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	108.260.874.609,32	95.830.182.753,72	88,52%
	Jumlah	2.508.604.184.132,21	2.360.092.860.079,71	94,08%
4.	Pendapatan Daerah Tahun 2019			
	a. PAD	1.284.363.117.436,42	1.147.685.950.193,30	89,36%
	b. Pendapatan Transfer	1.363.668.774.080,00	1.277.894.831.625,00	93,71%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	98.278.600.000,00	97.309.475.047,00	99,01%
	Jumlah	2.746.310.491.516,42	2.522.890.256.864,30	91,86%
5	Pendapatan Daerah Tahun 2020			
	a. PAD	1.032.354.004.000,27	975.283.123.576,32	94,47%
	b. Pendapatan Transfer	1.434.713.368.287,00	1.432.995.313.284,00	99,88%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	187.880.236.461,00	169.226.557.955,00	90,07%
	Jumlah	2.654.947.608.748,27	2.577.504.994.815,32	97,08%

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Batam

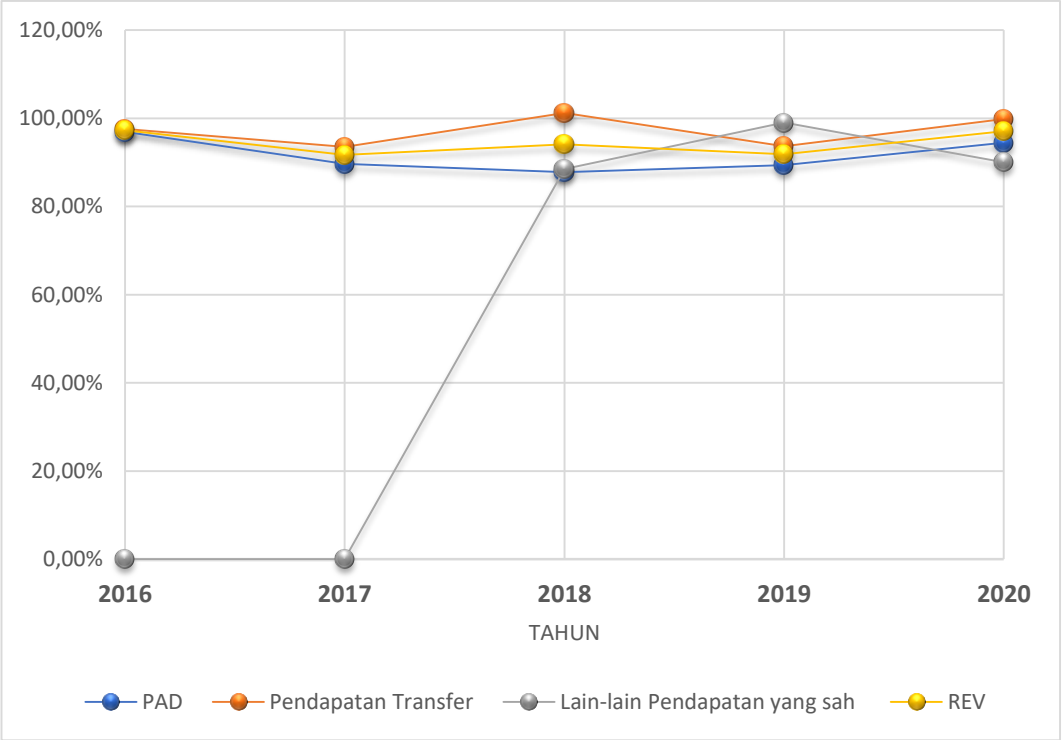

Gambar 3. 2 Efektivitas Pendapatan Daerah (REV), Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Batam Tahun 2016-2020

Dari data di atas menggambarkan bahwa secara umum, kinerja pendapatan daerah mengalami fluktuatif selama tahun 2016 hingga 2020. Jadi, secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir, kinerja pendapatan daerah Kota Batam masih di bawah kinerja (*underperformance*) dan cenderung stagnan.

Pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik Kota Batam terjadi pada tahun 2016, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 97,33% dari target. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada realisasi dikarenakan adanya perubahan regulasi terkait pelaporan keuangan daerah yang di implementasikan pada tahun 2018. Kinerja realisasi PAD dan Pendapatan Transfer masih di bawah target yaitu masing-masing sebesar 96,92% dan 97,06%.

Pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik kedua Kota Batam terjadi pada tahun 2020, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 97,08% dari

target. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi Pendapatan Transfer yang hampir memenuhi target, yaitu sebesar 99,88%. Sementara itu, kinerja realisasi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih jauh di bawah target, yaitu masing-masing sebesar 94,47% dan 90,07%. Sedangkan, kinerja pendapatan daerah terendah terjadi pada tahun 2017 dengan pencapaian hanya 91,73% dari yang ditargetkan. Rendahnya kinerja realisasi pendapatan daerah pada tahun 2017 disebabkan tidak ada realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan PAD hanya sebesar 89,65%. Sedangkan kinerja realisasi Pendapatan Transfer cukup besar yaitu sebesar 93,52%, meski masih di bawah target.

Kinerja PAD memiliki kontribusi terbesar dalam Pendapatan Daerah, dengan rata-rata 42,84%. Komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar adalah dari pos Pajak Daerah, dengan rata-rata kontribusi 32,30%. Rata-rata kontribusi terbesar Pajak Daerah berasal dari BPHTB (10,87%) dan Pajak Penerangan Jalan (6,84%). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja PAD ditopang dari besarnya pungutan pajak daerah dan ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang baik.

Pajak Daerah memiliki rata-rata kinerja 90,74% (di bawah target) dan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan daerah (32,30%), lebih tinggi dibandingkan dengan DAU (25,75%). Kontribusi terbesar pajak daerah berasal dari BPHTB (10,87%), diikuti oleh PPJ (6,84%), PBB-P2 (5,77%), Pajak Hotel (4,38%), dan Pajak Restoran (3,14%). Dari kelima obyek pajak daerah tersebut, hanya BPHTB yang kecenderungannya relatif stabil, sedangkan yang lain memiliki kecenderungan tren naik. Hal ini disebabkan Kota Batam yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai kawasan industri, perdagangan, pariwisata, *transhipmen* dan jasa telah menarik investor untuk menanamkan modalnya dan perkembangan ekonomi ini telah memicu tingginya transaksi pengalihan hak atas tanah baik yang terjadi untuk bisnis maupun tempat tinggal sehingga bekontribusi terhadap penerimaan pajak dari sektor BPHTB. Selain itu juga, tingginya pajak dari sektor PPJ (Pajak

Penerangan Jalan) disamping bersumber dari listrik konsumsi rumah tangga juga bersumber dari listrik untuk kebutuhan industri (yang dikelola PLN) maupun yang diadakan sendiri oleh Perusahaan atau Kawasan Industri.

Namun, tingginya kinerja BPHTB dan PPJ memiliki resiko adanya penurunan realisasi di kemudian hari karena banyak mengandalkan dari *external effort* (notaris dan kebutuhan listrik). Kinerja pencapaian target dari BPHTB dan PPJ sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro daerah dan daya beli masyarakat, untuk itu ketergantungan terhadap dua sektor pajak ini perlu dilakukan melalui optimalisasi pendapatan dari sumber pajak lain seperti Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame dan PBB-P2, yang memang menjadi prioritas yang harus dilakukan di masa mendatang dan BPPRD telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan sektor-sektor penerimaan pajak daerah tersebut sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah. Untuk itu perlu untuk memiliki data potensi optimal dari beberapa obyek pajak misal: perbaikan NJOP, hotel, restoran (dan sejenisnya), parkir, hiburan.

Retribusi daerah memiliki rata-rata kinerja 94,90% dan rata-rata kontribusi 3,93%. Kontributor terbesar adalah retribusi perpanjangan IMTA (1,24%) dan retribusi pelayanan persampahan (1,23%). Namun retribusi perpanjangan IMTA memiliki kecenderungan penurunan, dan sebaliknya untuk retribusi pelayanan persampahan. Untuk retribusi berkinerja terbaik (mencapai target) adalah retribusi pemeriksaan alat Damkar dan retribusi pelayanan kesehatan. Hal ini perlu juga mendapatkan perhatian untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan (potensi peningkatan tarif) dan potensi yang dapat diperoleh (intensifikasi). Hal ini dikarenakan seperti retribusi pelayanan pasar cenderung menurun dan di bawah target. Jadi diperlukan upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan kualitas kemandirian keuangan daerah.

Namun demikian, jika dilihat dari nilai realiasasinya, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kecenderungan kenaikan realisasi sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 (lihat Tabel 3.3 di bawah). Relatif pada tahun 2020

terjadi penurunan realisasi hampir di seluruh komponen pendapatan daerah terutama pada pajak dan retribusi daerah akibat adanya dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi secara global. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah juga menunjukan persentase yang lebih besar dibanding dengan DAU. Hal ini terjadi karena adanya inovasi/terobosan yang terus dilakukan oleh BPPRD untuk pencapaian penerimaan pajak secara optimal, antara lain:

- Melakukan penguatan basis data objek pajak;
- Penambahan *Payment Point* pajak bekerjasama dengan Bank Kasda;
- Pemasangan Perangkat Perekaman Transaksi Pembayaran (*Tapping Box*) pada Objek Pajak Hotel, Restoran, hiburan dan Parkir;
- Penerapan Aplikasi e-Billing berbasis Web (*Web-base*) yang dapat diakses langsung oleh Subject Pajak yang akan membayar pajak daerah;
- Pengadaan kegiatan bulan panutan pajak dengan membuka akses pembayaran pajak PBB-P2 ke masyarakat;
- Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi pajak ke masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik;
- Pemberian Insenfif Pajak Daerah pada masa Pandemi Covid-19;
- Dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari efektifitas insentif pemungutan terhadap total pajak daerah dan retribusi daerah yang diperoleh, maka dapat diketahui hasilnya sebagai berikut:

1. Efektifitas insentif pemungutan pajak daerah adalah sebesar 1 Rupiah biaya pemungutan pajak dapat menghasilkan Rp32,94 realiasi pajak daerah (Rp1 : Rp32,94) pada tahun 2016 dan meningkat signifikan pada tahun 2020 menjadi Rp1 : 1.030,57;
2. Efektifitas insentif pemungutan retribusi daerah adalah Rp1 : Rp24,55, artinya untuk biaya pemungutan senilai Rp1 dapat menghasilkan realisasi retribusi daerah senilai Rp24,55 pada tahun 2016, dan kemudian meningkat signifikan pada tahun 2020 menjadi Rp1 : Rp373,82;

3. Efektifitas anggaran belanja BP2RD dibandingkan dengan pajak daerah yang diperoleh senilai Rp 1 : Rp10,79 pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2020 senilai Rp1 : Rp28,63.

Kinerja deviden dari BUMD hanya pada tahun 2019 dan 2020 melampaui target dan memiliki rata-rata kontribusi 0,48%. Perlu adanya peninjauan kembali atas kebijakan penyertaan modal dan pendirian 2 BUMD lainnya (PT Pembangunan dan Usaha Kepelabuhan) agar kebijakan pendirian dan penyertaan modal BUMD ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada Daerah. Kontributor Lain-lain PAD yang Sah diperoleh sebagian besar dari Pendapatan BLUD dari RSUD (3,34%). Namun, pada tahun 2020 cenderung kinerja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melampaui target meski 4 tahun sebelumnya realisasi jauh di bawah target.

Pendapatan Transfer selama 5 tahun terakhir relatif mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 dan 2018 realisasinya cenderung menurun dan kemudian meningkat kembali di tahun 2019 dan kembali turun di bawah target pada tahun 2020. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2019 meski kembali naik cukup signifikan di tahun 2020. Kinerja DAU memiliki kinerja yang konsisten meningkat dibandingkan kinerja Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan DAK, meskipun sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 telah mempengaruhi penerimaan Negara sehingga berdampak juga terhadap pengurangan DAU dari Pemerintah Pusat. Perkembangan pendapatan transfer ini tentu perlu mendapatkan perhatian untuk tahun-tahun mendatang karena adanya pelemahan ekonomi nasional dan dunia sehingga akan berdampak pada perolehan pendapatan Negara.

Sementara itu, untuk kinerja Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya, selama 5 tahun terakhir relatif terjadi penurunan kinerja, terutama dari kontributor utamanya, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Realisasi kinerja Dana bagi hasil pajak dari Pemprov terbesar terjadi pada tahun 2016, dan setelah itu mengalami penurunan, di hampir seluruh obyek pajak

provinsi yang dibagi ke Kota Batam. Meskipun demikian, pada tahun 2020 terjadi kenaikan meski relatif sedikit. Hal ini memberikan harapan adanya perbaikan perolehan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi di tengah adanya pelemahan ekonomi nasional dan dunia. Selain dana bagi hasil pajak dari Pemprov, sumber lainnya dari pendapatan hibah dan pendapatan dari dana penyesuaian, terutama Dana Insentif Daerah (DID) karena berhasilnya Pemerintah Kota Batam mempertahankan opini audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun untuk tahun 2017 dan 2018 Pemerintah Kota Batam tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah dikarenakan keterlambatan dalam penetapan APBD 2016 dan APBD 2017.

Untuk dapat menghitung proyeksi pendapatan daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Batam untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	PENDAPATAN						
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**881.268.969.157**	**974.124.203.684**	**1.084.640.559.853**	**1.147.685.950.193**	**975.283.123.576**	**3,17%**
	Pajak Daerah	648.110.809.097	648.218.537.855	845.697.306.043	934.458.907.797	755.878.193.410	5,47%
	Retribusi Daerah	93.194.628.137	91.582.658.447	94.581.392.976	90.518.037.599	92.622.927.690	-0,11%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.667.300.466	13.848.550.711	13.897.911.908	11.836.597.248	8.601.742.730	9,70%
	Lain - Lain PAD yang Sah	132.296.231.457	220.474.456.671	130.463.948.926	110.872.407.550	118.180.259.747	4,42%
2	**Pendapatan Transfer**	**1.334.411.317.525**	**1.183.537.986.664**	**1.179.622.117.473**	**1.277.894.831.625**	**1.432.995.313.284**	**2,21%**
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**991.714.849.932**	**962.500.055.668**	**897.475.587.149**	**955.858.409.492**	**1.058.103.342.486**	**1,88%**
	Dana Bagi Hasil Pajak	153.099.242.859	126.284.472.444	104.694.249.054	63.403.441.380	127.988.781.032	6,95%
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	91.318.882.061	94.400.978.051	117.946.833.795	101.787.230.511	169.087.812.980	20,18%
	Dana Alokasi Umum	576.930.711.000	577.144.597.000	599.074.016.000	659.164.959.000	629.854.829.000	2,36%

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Dana Alokasi Khusus	170.366.014.012	164.670.008.173	75.760.488.300	131.502.778.601	131.171.919.474	6,44%
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**40.405.162.000**	**-**	**86.400.150.226**	**123.854.964.336**	**167.515.720.197**	**39,30%**
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00%
	Dana Penyesuaian	40.405.162.000	-	86.400.150.226	123.854.964.336	167.515.720.197	39,30%
	Transfer Pemerintah Provinsi	**302.291.305.593**	**221.037.930.996**	**195.746.380.098**	**198.181.457.797**	**207.376.250.601**	**-8,11%**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	302.291.305.593	221.037.930.996	195.746.380.098	198.181.457.797	205.376.250.601	-8,36%
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	2.000.000.000	0,00%
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	**0,00%**
3	**Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah**	**0,00**	**0,00**	**95.830.182.753,72**	**97.309.475.047,00**	**169.226.557.955,00**	**37,72%**
	Pendapatan Hibah	-	-	95.830.182.754	97.309.475.047	169.226.557.955	37,72%
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00%
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH	**2.215.680.286.682**	**2.157.662.190.348**	**2.360.092.860.080**	**2.522.878.551.656**	**2.577.504.994.815**	**3,96%**

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Batam

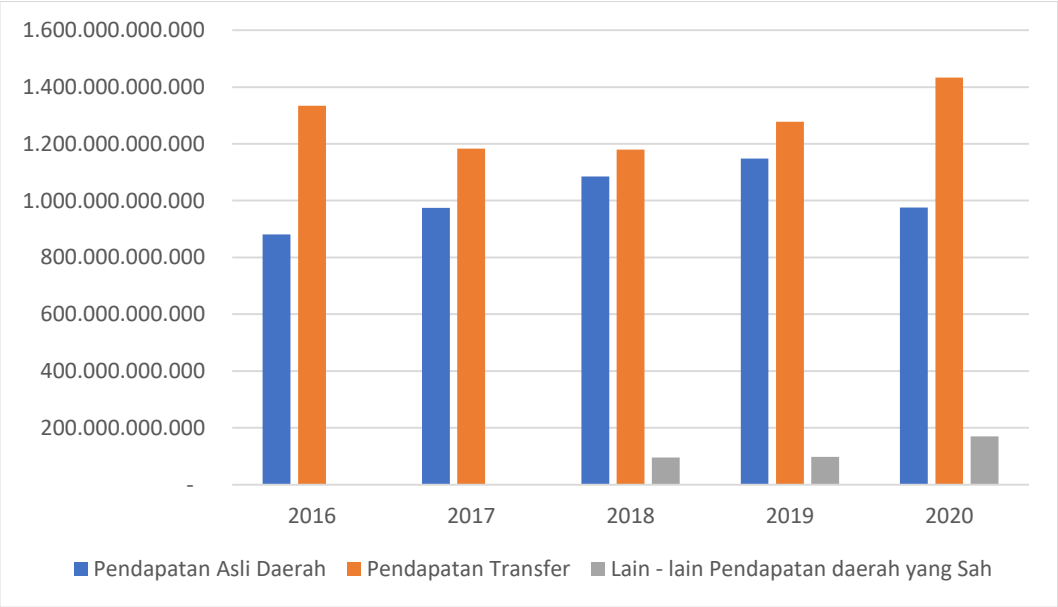

Gambar 3. 3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Kota Batam Tahun 2016 - 2020

Berdasarkan data selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam dapat diketahui tingkat peningkatan

maupun penurunannya. Dari data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan hampir di seluruh komponen pendapatan daerah. Untuk perkembangan Pendapatan Asli Daaerah (PAD), selama 5 tahun terakhir memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,17%. Kecuali retribusi daerah, ketiga komponen PAD mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan hampir di seluruh komponen PAD akibat adanya dampak Pandemi Covid-19. Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DIpisahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 meskipun penurunan tersebut masih lebih besar peningkatan tahun-tahun sebelumnya. Khusus terkait dengan kinerja Retribusi Daerah, selama 5 tahun terakhir cenderung menurun dengan adanya pertumbuhan negatif sebesar -0,11%, meskipun kebalikan dari komponen PAD yang lainnya, justru di tahun 2020 mengalami peningkatan realisasi.

Perkembangan kinerja Dana Transfer secara keseluruhan juga mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, dan diikuti dengan pertumbuhan positif dari hampir seluruh komponen Dana Transfer, terutama Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Sementara, kinerja realisasi Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi perlu mendapatkan perhatian karena adanya kecenderungan penurunan (negatif), meskipun di tahun 2020 justru ada peningkatan. Penurunan realisasi ini kemungkinan disebabkan adanya tunda salur bagi hasil pajak provinsi dari Pemerintah Provinsi yang baru direalisasi di tahun-tahun berikutnya. Ditengah ketidakpastian krisis ekonomi dan kesehatan seperti saat ini, diperlukan perhatian yang ekstra bagi Pemerintah Kota Batam untuk lebih menerapkan disiplin anggaran dan efisiensi anggaran.

B. Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penerimaan daerah terdiri dari realisasi pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan. Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pembiayaan hanya pada pos Penggunaan SiLPA.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan daerah selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel 3.4 di bawah.

Tabel 3. 4 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Total Penerimaan Daerah Kota Batam Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
A	**Total Pendapatan Daerah**	**2.215.680.286.682**	**2.157.662.190.348**	**2,360,092,860,080**	**2.522.878.551.656**	**2.577.504.994.815**	**3,96%**
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan**	**44.868.397.129**	**133.301.586.366**	**65.839.607.920**	**44.408.264.485,74**	**35.380.532.738**	**23,40%**
	Penggunaan SiLPA	44.868.397.129	133.301.586.366	65.839.607.920	44.408.264.485,74	35.380.532.738,17	23,40%
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	-	0,00%
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	-	0,00%
	Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	-	0,00%
	Penerimaan Kembali Pinjaman	0	0	0	0	-	0,00%
	Total Penerimaan Daerah	**2.260.548.683.810**	**2.290.963.776.714**	**2.425.932.468.000**	**2.567.286.816.142**	**2.612.885.527.553,49**	**3,71%**

Sumber: Diolah dari LRA dan APBD Pemerintah Kota Batam

Jika dilihat dari tabel 3.4 di atas, penggunaan SiLPA menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

3.1.1.2 Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terbagi menjadi belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Meskipun demikian, dalam sistematika APBD pengeluaran pembiayaan masuk dalam pembiayaan daerah. Secara garis besar, sistematika APBD tersusun dari pendapatan dikurangi belanja menghasilkan surplus atau defisit. Surplus dan defisit tersebut kemudian dimanfaatkan atau ditutup dengan pembiayaan sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA). SILPA akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang masuk dalam penerimaan pembiayaan tahun berikutnya. Berikut

analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Kota Batam selama 5 tahun terakhir dan perhitungan proyeksi untuk 5 tahun mendatang.

A. Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

Dalam realisasi APBD Pemerintah Kota Batam selama kurun waktu 5 tahun terakhir, belanja daerah mengalami perkembangan yang terus meningkat, meski di tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan akibat adanya dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2016 realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Batam sebesar Rp2.127.247.097.444,29, tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp2.225.121.485.774,77. Selanjutnya tahun 2018 realisasi belanja daerah sebesar Rp2.381.523.875.914,02 dan meningkat menjadi sebesar Rp2.531.917.988.612,87 di tahun 2019, kemudian pada tahun anggaran 2020 realisasi belanja daerah hanya sebesar Rp2.342.283.027.037,71,-. Jika dilihat selama 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan hanya sebesar 2,61% akibat adanya dampak pandemi Covid-19. Rata-rata pertumbuhan tersebut ditopang dari rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 5,68%, dan rata-rata pertumbuhan belanja modal 5 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar -7,41% (lihat tabel 3.7). Penurunan terbesar belanja modal terjadi pada tahun 2020 akibat adanya kebijakan refocusing anggaran sesuai dengan arahan

kebijakan dari Pemerintah Pusat sebagai upaya untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat. Jika dilihat 4 tahun sebelumya terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan perekonomian dan investasi daerah oleh Pemerintah Kota Batam. Semakin besarnya alokasi anggaran untuk belanja modal memberikan bukti bahwa Pemerintah Kota Batam sangat serius dalam meningkatkan infrastruktur wilayah agar dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat dan daerah, sebagai daerah investasi dan industri.

Untuk melihat gambaran kinerja belanja daerah disajikan dalam tabel 3.5 dan 3.6 di bawah.

Tabel 3. 5 Kinerja Belanja Daerah Kota Batam Selama Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	BELANJA DAERAH					
1	**Belanja Operasi**	**91,02%**	**91,57%**	**94,99%**	**94,47%**	**87,02%**
	Belanja Pegawai	95,93%	95,38%	97,91%	97,38%	95,76%
	Belanja Barang dan Jasa	88,69%	88,83%	92,42%	92,46%	81,54%
	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Hibah	49,35%	86,09%	90,55%	87,93%	79,78%
	Belanja Bantuan Sosial	82,03%	70,36%	100,00%	52,62%	0,52%
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	**Belanja Modal**	**92,24%**	**82,96%**	**86,61%**	**81,58%**	**93,29%**
	Belanja Tanah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Peralatan dan Mesin	85,24%	82,54%	91,71%	93,57%	121,45%
	Belanja Gedung dan Bangunan	92,28%	92,98%	94,28%	80,08%	90,73%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	94,95%	80,25%	83,29%	83,96%	96,03%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	98,67%	82,23%	84,65%	299,56%	452,56%
	Belanja Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	**Belanja Tidak Terduga**	**83,22%**	**3,46%**	**9,72%**	**0,29%**	**58,70%**
	Belanja Tidak Terduga	83,22%	3,46%	9,72%	0,29%	58,70%
4	**Transfer**	**77,28%**	**97,42%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
	Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Bantuan Keuangan ke Desa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Bantuan Keuangan Lainnya	77,28%	97,42%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTAL BELANJA DAERAH	**91,29%**	**89,15%**	**92,58%**	**90,73%**	**87,06%**

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Batam

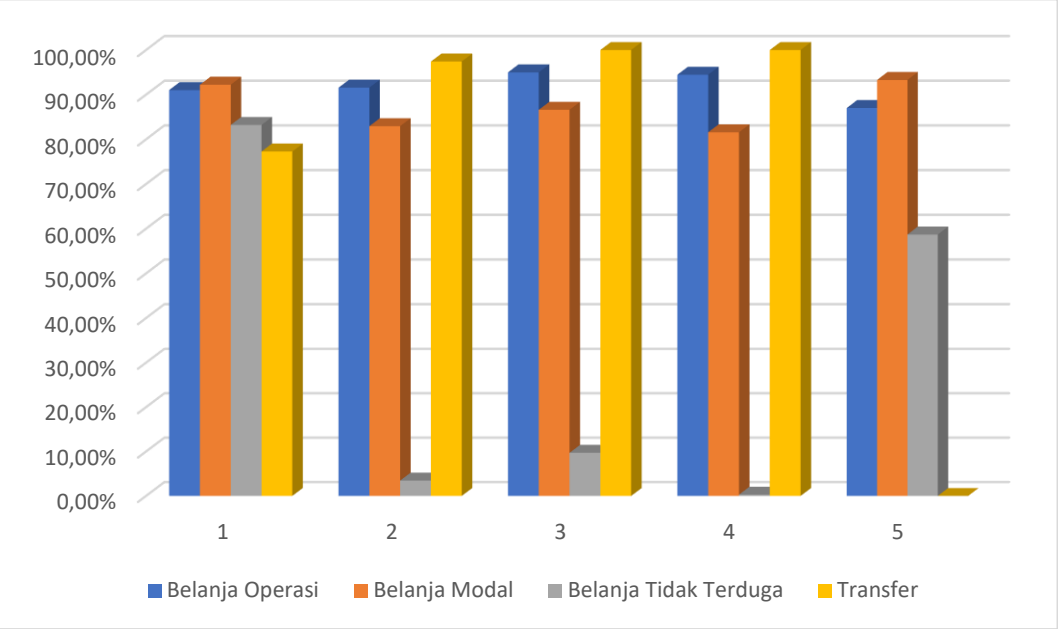

Gambar 3. 4 Kinerja Belanja Daerah Kota Batam Selama Tahun 2016 - 2020

Tabel 3.5 di atas menggambarkan bahwa kinerja realisasi Belanja Daerah Kota Batam cukup baik dengan tingkat penyerapan mencapai di atas 90% kecuali untuk tahun 2017 dan 2020. Kinerja penyerapan belanja terbesar ada di belanja pegawai. Sedangkan belanja barang dan jasa dan belanja modal seringkali masih di bawah 90% kinerja penyerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam perlu lebih meningkatkan kinerja realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modalnya, terutama yang terkait dengan peningkatan infrastruktur wilayah agar berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat gambaran kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Batam dapat dilihat dari perhitungan proporsi jenis belanja terhadap total belanja daerah berikut.

Tabel 3. 6 Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	BELANJA DAERAH					
1	**Belanja Operasi**	**75,07%**	**74,88%**	**74,16%**	**74,05%**	**85,05%**
	Belanja Pegawai	35,63%	33,71%	36,36%	35,68%	37,53%
	Belanja Barang dan Jasa	38,33%	39,30%	35,70%	35,72%	42,46%
	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Hibah	0,94%	1,78%	1,98%	2,52%	5,05%
	Belanja Bantuan Sosial	0,18%	0,08%	0,12%	0,13%	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	**Belanja Modal**	**24,65%**	**25,03%**	**25,76%**	**25,88%**	**13,21%**
	Belanja Tanah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Peralatan dan Mesin	5,31%	5,14%	2,01%	2,04%	3,25%
	Belanja Gedung dan Bangunan	5,06%	15,72%	6,78%	8,06%	3,69%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	13,56%	0,51%	16,20%	15,03%	5,56%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,73%	0,00%	0,78%	0,76%	0,71%
	Belanja Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	**Belanja Tidak Terduga**	**0,20%**	**0,00%**	**0,01%**	**0,00%**	**1,74%**
	Belanja Tidak Terduga	0,20%	0,00%	0,01%	0,00%	1,74%
4	**Transfer**	**0,08%**	**0,09%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,00%**
	Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Bantuan Keuangan ke Desa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Bantuan Keuangan Lainnya	0,08%	0,09%	0,07%	0,07%	0,00%
	TOTAL BELANJA DAERAH	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Batam

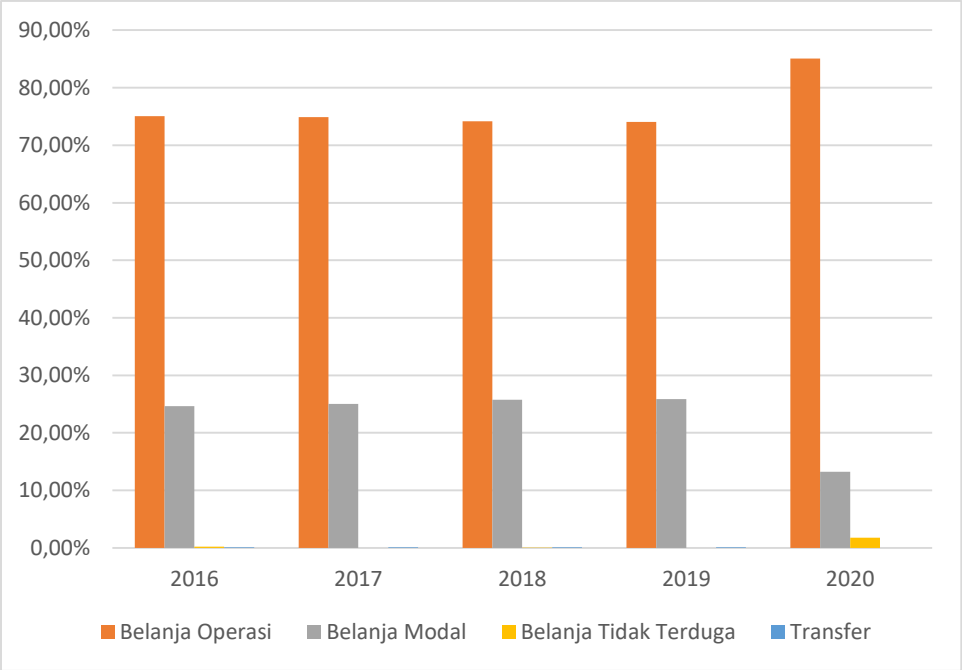

Gambar 3. 5 Proporsi Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2016 - 2020

Dari segi kebijakan alokasi anggaran, tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam lebih berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui kebijakan porsi belanja modal dan belanja barang dan jasa yang lebih besar dibanding jenis belanja lainnya. Proporsi kedua belanja relatif sama atau Pemerintah Kota Batam memiliki komitmen untuk dapat mempertahankan alokasi anggaran kedua belanja tersebut. Hal ini terlihat jelas pada persentase proporsi realisasi kedua belanja tersebut selama 5 tahun terakhir dimana belanja barang dan jasa berada pada kisaran 35%, sedangkan belanja modal stabil berada di kisaran 25%. Kondisi ini terkecuali untuk tahun 2020 yang memang terdapat kebijakan refocusing anggaran untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang telah diarahkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk dapat menghitung proyeksi belanja daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi belanja daerah selama 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Batam untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3. 7 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	BELANJA DAERAH						
1	**Belanja Operasi**	**1.596.958.885.878,22**	**1.666.089.679.998,38**	**1.766.077.705.587,77**	**1.875.022.764.421,72**	**1.992.008.701.074,55**	**5,68%**
	Belanja Pegawai	757.886.211.497,00	750.182.482.840,00	865.739.436.560,00	903.495.293.050,00	879.057.813.329,00	4,01%
	Belanja Barang dan Jasa	815.272.038.531,22	874.549.381.808,38	850.235.081.538,77	904.406.874.943,00	994.646.428.151,62	5,21%
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Hibah	20.050.021.850,00	39.508.565.350,00	47.260.687.489,00	63.788.146.428,72	118.288.889.593,93	59,27%
	Belanja Bantuan Sosial	3.750.614.000,00	1.849.250.000,00	2.842.500.000,00	3.332.450.000,00	15.570.000,00	-19,82%
2	**Belanja Modal**	**524.463.723.680,27**	**556.926.371.276,39**	**613.438.215.481,25**	**655.137.393.960,15**	**309.463.968.545,16**	**-7,41%**
	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Peralatan dan Mesin	112.889.037.757,18	81.309.827.118,57	47.892.055.674,23	51.629.877.319,27	76.165.649.899,89	-3,44%
	Belanja Gedung dan Bangunan	107.594.062.069,84	114.464.498.137,58	161.346.168.485,29	203.770.635.793,58	86.535.361.300,92	4,03%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	288.541.700.815,25	349.763.998.741,48	385.669.659.853,40	380.617.502.525,30	130.177.363.876,35	-8,91%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.438.923.038,00	11.388.047.278,76	18.530.331.468,33	19.119.378.322,00	16.585.593.468,00	-9,08%
	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	**Belanja Tidak Terduga**	**4.161.085.781,80**	**103.830.000,00**	**291.500.000,00**	**2.908.153,00**	**40.810.357.418,00**	**350.798,18%**
	Belanja Tidak Terduga	4.161.085.781,80	103.830.000,00	291.500.000,00	2.908.153,00	40.810.357.418,00	350.798,18%
4	**Transfer**	**1.663.402.104,00**	**2.001.604.500,00**	**1.716.454.845,00**	**1.754.922.078,00**	**0,00**	**-22,92%**
	Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Bantuan Keuangan Lainnya	1.663.402.104,00	2.001.604.500,00	1.716.454.845,00	1.754.922.078,00	0,00	**-22,92%**
	JUMLAH	**2.127.247.097.444,49**	**2.225.121.485.774,77**	**2.381.523.875.914,02**	**2.531.917.988.612,87**	**2.342.283.027.037,71**	**2,61%**

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Batam

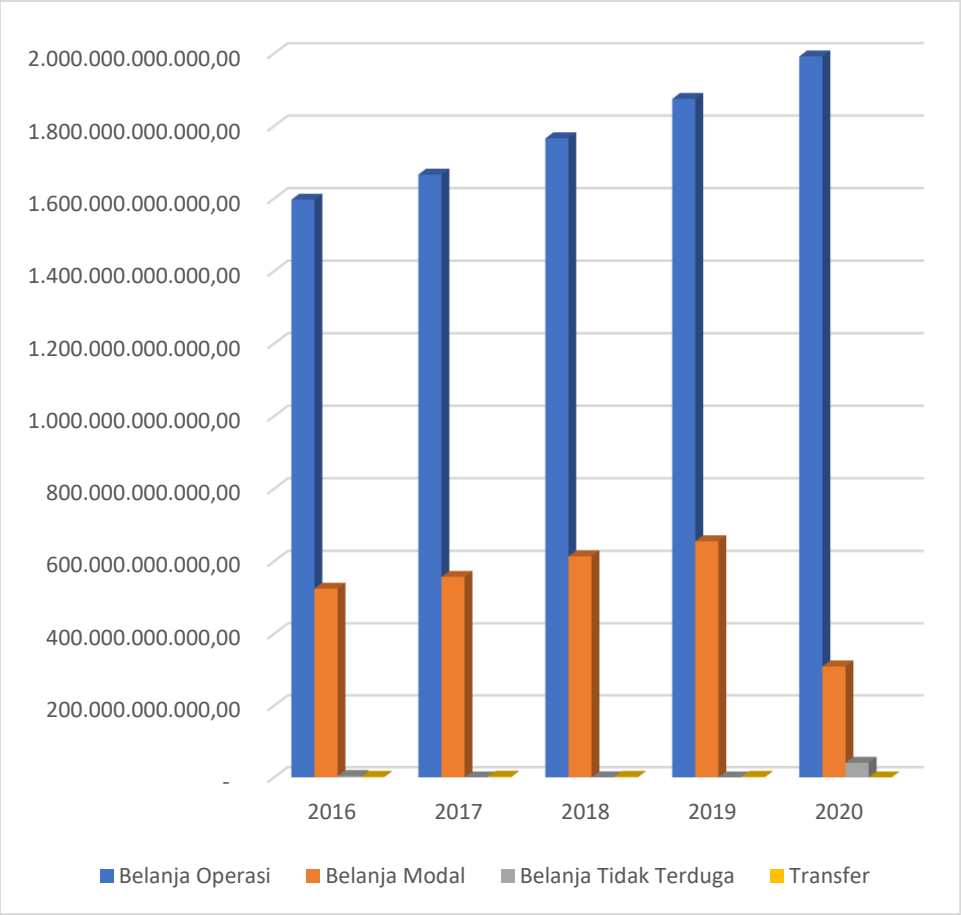

Gambar 3. 6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016 - 2020

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 untuk realisasi belanja setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 2,61%. Jika dilihat dari proporsi realisasi belanja dan rata-rata pertumbuhan komponen belanja tersebut, menunjukkan adanya keberpihakan kebijakan anggaran dari Pemerintah Kota Batam untuk lebih memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah.

Sama halnya dengan yang terjadi pada pendapatan daerah, jika dilihat pertumbuhan per jenis belanja baik dalam belanja operasional maupun belanja modal, nilai rata-rata pertumbuhannya relatif terlalu tinggi, terutama untuk belanja hibah, serta penurunan yang sangat signifikan pada belanja bantuan

sosial. Disisi lain, jika dilihat per tahunnya pertumbuhannya fluktuatif tidak menunjukkan kecenderungan tertentu, misal naik atau menurun, terutama dengan adanya kebijakan refocusing anggaran pada tahun 2020 untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 sebagaimana arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

Oleh karena itu, dengan tetap berpegang pada prinsip konservatif, perlu adanya penyesuaian nilai rata-rata pertumbuhan pada saat akan melakukan perhitungan proyeksi anggaran belanja daerah. Di masa mendatang perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kota Batam, terutama oleh Bappelitbang dan BPKAD, untuk memantau kinerja keuangan dan anggaran Pemerintah Daerah agar tidak terlalu fluktuatif sehingga dapat memberikan informasi peramalan untuk perencanaan keuangan di masa mendatang dengan lebih baik.

Begitu juga, sama dengan yang dilakukan pada proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan perlu mempertimbangkan dan memperhatikan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam LKPD Tahun 2020. Apalagi, adanya penyesuaian akibat dampak wabah Covid-19 sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Penggunaan data realisasi APBD TA 2020 perlu dipertimbangkan karena data yang dihasilkan banyak mengandung bias dan abnormal. Terkait dengan penyesuaian kebijakan anggaran tahun 2020 akibat adanya wabah pandemi Covid-19 akan dibahas lebih lanjut dalam sub bahasan proyeksi.

B. Kinerja Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Informasi realisasi pengeluaran pembiayaan untuk melihat seberapa besar pengeluaran pemerintah yang sifatnya mengikat untuk dipenuhi oleh surplus anggaran yang ada. Bersama dengan belanja daerah, pengeluaran pembiayaan merupakan komponen pengeluaran daerah. Tabel berikut merupakan data realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun terakhir dan pertumbuhannya.

Tabel 3. 8 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Batam Tahun Anggaran 2016 - 2020

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
- Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Batam

Tabel 3.8 di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun terakhir tidak ada kebijakan alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan terutama untuk kebijakan penyertaan modal yang biasanya selalu ada di hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Tidak adanya kebijakan alokasi anggaran untuk Penyertaan Modal kepada Bank Daerah atau BUMD lainnya, disebabkan karena regulasi atau Perda terkait penyertaan modal masih belum diperbaharui dan ditetapkan. Sedangkan, terdapat 2 BUMD yang saat ini masih melakukan restrukturisasi organisasi dan pemilihan direksi baru. Untuk itu, dalam proyeksi ke depan kemungkinan besar pengeluaran pembiayaan terutama untuk penyertaan modal perlu untuk dialokasikan.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka

pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan pemerintah daerah untuk menjalankan *good governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah. Berikut ini tabel 3.9 perkembangan Neraca Daerah selama 5 tahun terakhir dan rata-rata pertumbuhannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan. Tabel 3.10 berikut akan menyajikan hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3. 9 Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2016 - 2020 dan Rata-rata Pertumbuhannya

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas	**135,223,354,808.80**	**65,934,586,363.37**	**44,431,434,547.51**	**35,402,657,726.94**	**270.602.500.515,78**	**140,05%**
Kas di Kasda	123,616,708,499.23	47,740,064,211.72	28,737,850,896.05	20,022,572,609.62	234.684.194.717,02	235,15%
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,992,431,366.39	0.00	0.00	626,100.00	206.909.553,00	0,00%
Kas di Bendahara Penerimaan	300,811,667.00	7,638,000.00	21,244,300.00	24,839,700.00	4.171.100,00	3,60%
Kas di BLUD	7,481,905,132.44	10,081,787,954.75	10,237,781,560.06	7,769,257,498.67	14.270.698.014,98	23,97%
Kas Lainnya	1,831,498,143.74	8,105,096,196.90	5,434,557,791.40	7,585,361,818.65	21.436.527.130,78	132,94%
Investasi Jangka Pendek	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
Piutang	**540.979.686.846,86**	**576.445.766.425,85**	**608.943.078.036,59**	**825.694.257.387,58**	**848.490.227.213,53**	**12,64%**
Piutang Pajak	311,918,910,287.00	358,269,486,443.00	391,185,884,715.00	452.643.429.076,00	531.944.796.058,00	14,32%
Piutang Retribusi	2,611,064,368.00	2,347,440,319.00	3,572,333,964.00	3.684.693.555,00	4.106.696.278,00	14,17%
Piutang Lainnya	226,449,712,191.86	215,828,839,663.85	214,184,859,357.59	369.366.134.756,58	312.438.734.877,53	12,90%
Penyisihan Piutang	**(284,991,674,217.41)**	**(284,094,693,458.47)**	**(364,827,315,041.75)**	**(373.410.519.700,68)**	**(448.576.127.974,16)**	**12,65%**
Belanja dibayar Dimuka	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
Persediaan	**27,935,544,594.47**	**26,444,720,819.68**	**42,492,333,485.56**	**46.996.484.773,30**	**77.343.083.159,01**	**32,63%**
Jumlah Aset Lancar	**419,146,912,032.72**	**384,730,380,150.43**	**331,039,531,027.91**	**534.682.880.187,14**	**747.859.682.914,16**	**19,80%**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Dana Bergulir	22,221,929,790.00	22,221,929,790.00	22,221,929,790.00	22,221,929,790.00	22.460.999.907,00	0,27%
Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00%
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	0.00	(7,848,731,495.68)	(7,848,731,495.68)	(7,836,522,594.02)	(8.111.684.304,65)	1,12%
Jumlah Investasi Non Permanen	**22,221,929,790.00**	**14,373,198,294.32**	**14,373,198,294.32**	**14,385,407,195.98**	**14.349.315.602,35**	**-8,87%**
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	67,997,011,627.88	70,905,438,407.37	74,052,662,879.05	71,700,340,656.35	69.676.870.284,83	0,68%
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00%
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00%
Jumlah Investasi Permanen	**67,997,011,627.88**	**70,905,438,407.37**	**74,052,662,879.05**	**71,700,340,656.35**	**69.676.870.284,83**	**0,68%**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**90,218,941,417.88**	**85,278,636,701.69**	**88,425,861,173.37**	**86,085,747,852.33**	**84.026.185.887,18**	**-1,71%**
ASET TETAP						
Tanah	699,843,419,139.08	617,752,408,087.58	722,524,056,220.58	1.932.412.790.866,58	2.124.499.077.288,13	45,66%
Peralatan dan Mesin	597,998,237,109.82	660,104,007,380.83	642,831,198,109.61	707.406.607.333,25	776.307.247.622,74	6,89%
Gedung dan Bangunan	1,407,453,594,990.13	1,366,798,922,539.82	1,512,225,819,664.23	2.598.968.197.867,27	2.657.570.435.505,40	20,47%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,593,813,289,963.33	1,933,095,153,952.69	2,296,465,555,898.36	2.521.900.917.980,73	2.598.943.162.823,72	13,24%
Aset Tetap Lainnya	85,332,106,512.24	146,881,029,988.62	222,528,912,839.29	312.933.474.118,11	330.034.403.108,73	42,43%

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	26,989,338,603.61	67,472,869,613.61	167,669,746,872.98	47.728.502.109,08	54.633.841.385,50	60,36%
Akumulasi Penyusutan	(1,214,548,145,152.98)	(1,453,307,677,038.37)	(1,771,005,198,359.11)	(2.723.377.171.895,78)	(3.015.289.210.222,12)	26,50%
Jumlah Aset Tetap	**3,196,881,841,165.23**	**3,338,796,714,524.78**	**3,793,240,091,245.94**	**5.397.973.318.379,24**	**5.526.698.957.512,10**	**15,68%**
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Jumlah Dana Cadangan	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
ASET LAINNYA						
Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aset Tak Berwujud	37,842,442,522.28	40,708,862,766.68	42,639,592,552.42	43.184.892.552,42	44.476.272.552,42	4,15%
Aset Lain - Lain	39,155,436,334.94	154,254,330,334.85	85,894,906,811.87	87.468.804.436,93	88.917.913.491,40	63,28%
Kas yang dibatasi penggunaannya	1,290,580,947.86	1,438,720,999.96	1,648,799,000.86	1.821.420.600,86	1.944.898.600,00	10,83%
Amortisasi	(26,467,278,110.28)	(32,806,266,408.63)	(38,245,938,028.42)	(41.093.947.598,46)	(42.846.466.606,00)	9,43%
Jumlah Aset Lainnya	**51,821,181,694.80**	**163,595,647,692.86**	**91,937,360,336.73**	**91.381.169.991,75**	**92.492.618.037,82**	**43,13%**
JUMLAH ASET	**3,758,068,876,310.63**	**3,972,401,379,069.76**	**4,304,642,843,783.95**	**6.110.123.116.410,46**	**6.451.077.444.351,26**	**15,40%**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	90,270,299.32	94,287,862.32	22,842,488.77	22,124,988.77	0.00	0.00%

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata–Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pendapatan diterima dimuka	75,181,501.67	105,730,000.00	911,173,100.92	888,737,287.39	573.700.160,19	191,13%
Utang Belanja	1,843,598,685.00	84,047,028,386.56	69,655,504,643.59	84,242,459,060.18	4.166.002.969,29	1091,91%
Utang Jangka Pendek Lainnya	10,052,533,745.11	17,787,693,328.31	13,904,427,668.21	14,072,602,753.95	16.346.718.910,59	18,12%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**12,061,584,231.10**	**102,034,739,577.19**	**84,493,947,901.49**	**99,225,924,090.29**	**21.086.422.040,07**	**166,86%**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
JUMLAH KEWAJIBAN	**12,061,584,231.10**	**102,034,739,577.19**	**84,493,947,901.49**	**99,225,924,090.29**	**21.086.422.040,07**	**166,86%**
EKUITAS						
Ekuitas	3,746,007,292,079.53	3,870,366,639,492.57	4,220,148,895,882.46	6.010.897.192.320,17	6.429.991.022.311,19	15,44%
Jumlah Ekuitas	**3,746,007,292,079.53**	**3,870,366,639,492.57**	**4,220,148,895,882.46**	**6.010.897.192.320,17**	**6.429.991.022.311,19**	**15,44%**
JUMLAH EKUITAS	**3,746,007,292,079.53**	**3,870,366,639,492.57**	**4,220,148,895,882.46**	**6.010.897.192.320,17**	**6.429.991.022.311,19**	**15,44%**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3,758,068,876,310.63**	**3,972,401,379,069.76**	**4,304,642,843,783.95**	**6.110.123.116.410,46**	**6.451.077.444.351,26**	**15,40%**

Sumber: Diolah dari Neraca Daerah dan CaLK Pemerintah Kota Batam

Tabel 3. 10 Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Batam Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A	Rasio Likuiditas					
	Aset Lancar	419.146.912.032,72	384.730.380.150,43	331.039.531.027,91	534.682.880.187,14	747.859.682.914,16
	Persediaan	27.935.544.594,47	26.444.720.819,68	42.492.333.485,56	46.996.484.773,30	77.343.083.159,01
	Kewajiban Jangka Pendek	12.061.584.231,10	102.034.739.577,19	84.493.947.901,49	99.225.924.090,29	21.086.422.040,07
1	Rasio Lancar	34,75	3,77	3,92	5,39	35,47
2	Rasio Quick	32,43	3,51	3,42	4,91	31,80
B	Rasio Solvabilitas					
	Total Aset	3.758.068.876.310,63	3.972.401.379.069,76	4.304.642.843.783,95	6.110.123.116.410,46	6.451.077.444.351,26
	Total Hutang	12.061.584.231,10	102.034.739.577,19	84.493.947.901,49	99.225.924.090,29	21.086.422.040,07
	Total Ekuitas	3.746.007.292.079,53	3.870.366.639.492,57	4.220.148.895.882,46	6.010.897.192.320,17	6.429.991.022.311,19
1	DAR	0,0032	0,0257	0,0196	0,0162	0,0033
2	DER	0,0032	0,0264	0,0200	0,0165	0,0033
C	Rasio Aktivitas					
	Pendapatan Daerah	2.215.680.286.681,50	2.157.662.190.348,08	2.360.092.860.079,71	2.522.890.256.865,30	2.577.504.994.815,32
	Saldo Awal Piutang (net)	336.798.797.847,52	255.988.012.629,45	292.351.072.967,38	244.115.762.994,84	452.283.737.686,90
	Saldo Akhir Piutang (net)	255.988.012.629,45	292.351.072.967,38	244.115.762.994,84	452.283.737.686,90	399.914.099.239,37

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Rata-rata Umur Piutang	48,8263	46,3798	41,4836	50,3759	60,3398
	Nilai Persediaan (Beban Persediaan)	199,594,367,785.74	166,050,176,054.96	157,747,979,329.61	158,573,882,188.40	350.278.818.873,84
	Saldo Awal Persediaan	21.983.704.442,12	27.935.544.594,47	26.444.720.819,68	42.492.333.485,56	46.996.484.773,30
	Saldo Akhir Persediaan	27.935.544.594,47	26.444.720.819,68	42.492.333.485,56	46.996.484.773,30	77.343.083.159,01
2	Rata-rata Umur Persediaan	49,7228	59,7675	79,7539	102,9912	64,7826

Sumber: Diolah dari Neraca Daerah dan CaLK Pemerintah Kota Batam

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan, rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat Pemerintah Kota Batam positif dan cenderung membaik. Kedua rasio tersebut jauh masih di atas 1, meski nilai rasio menunjukkan nilai yang riil setelah tahun 2017 karena pada 2 tahun sebelumnya masih adanya penyesuaian dalam penerapan SAP berbasis akrual secara penuh. Kinerja kedua rasio tersebut menunjukkan tidak adanya gejala tekanan keuangan (*financial distress*) yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batam karena memang jika dilihat dari informasi kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Batam cukup hati-hati dan tetap menjaga kondisi arus kasnya.

Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Sedangkan, DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam, dilihat dari kinerja Neraca Daerah, sangat sehat.

Rata-rata Umur Piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Jika dilihat dari rasio rata-rata umur piutang, adanya kecenderungan penurunan, hal ini berarti terjadi perbaikan kinerja piutang menjadi kas untuk operasional Pemerintah Daerah (antara 48-41 hari), meski pada tahun 2019 dan 2020 terjadi

peningkatan umur piutang. Sedangkan, rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Dari analisis neraca menunjukkan adanya peningkatan rata-rata umur persediaan, hal ini menunjukkan adanya penurunan konversi persediaan untuk memenuhi pelayanan publik, jika dilihat dari umur persediaan (antara 49-102 hari) meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi hanya 64 hari. Hal ini menunjukkan perlu adanya kebijakan anggaran belanja persediaan yang lebih efisien.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Batam merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut 2 analisis kedua kebijakan tersebut akan dijelaskan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan belanja modal untuk pembangunan daerah. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Sedangkan, analisis belanja modal untuk pembangunan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar alokasi anggaran (kebijakan anggaran) Pemerintah Kota Batam untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan

ekonomi daerah. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Batam selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3. 11 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Batam Tahun Anggaran 2016 - 2020

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran [Belanja + Pengeluaran Pembiayaan] (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5
1	**2016**	757.886.211.497,00	2.127.247.097.444,29	35,63%
2	**2017**	750.182.482.840,00	2.225.121.485.774,77	33,71%
3	**2018**	865.739.436.560,00	2.381.523.875.914,02	36,35%
4	**2019**	903.495.293.050,00	2.531.917.988.612,87	35,68%
5	**2020**	879.057.813.329,00	2.342.283.027.037,71	37,53%

Sumber: Diolah dari LRA, dan LKPJ Wali Kota Batam

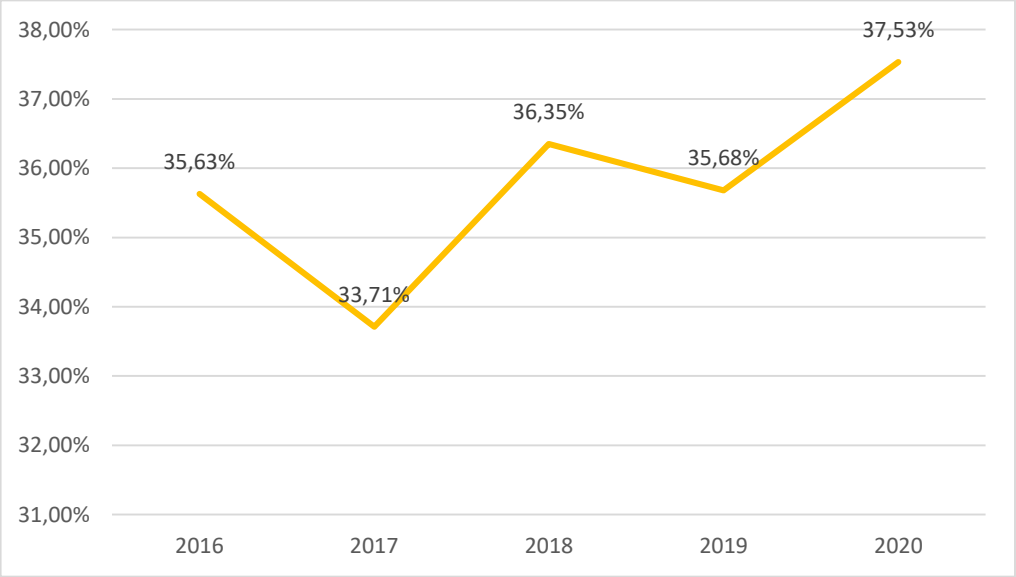

Gambar 3. 7 Persentase Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Kota Batam Tahun Anggaran 2016 - 2020

Jika dilihat dari tabel 3.11 di atas, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur relatif mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 realisasi total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai sebesar Rp757.886.211.497,00 dan meningkat menjadi sebesar Rp903.495.293.050,00

pada tahun 2019, atau meningkat sebesar 4,01% per tahun. Namun demikian, pada tahun 2020, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menurun menjadi sebesar Rp879.057.813.329,00.

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan tren peningkatan dapat dilihat dari besaran nominal belanja untuk aparatur tersebut cenderung meningkat. Pada tahun 2018, porsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 36,35% dari total realisasi pengeluaran daerah. Kemudian realisasinya sedikit menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 35,68% dan kemudian naik kembali pada tahun selanjutnya menjadi sebesar 37,53% di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah.

Sedangkan gambaran realisasi belanja modal selama 5 tahun terakhir akan menggambarkan seberapa besar perhatian dan komitmen kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam mempercepat pembangunan daerah dan memberikan akselerasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dapat kita lihat dalam tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel 3. 12 Realisasi Belanja Modal untuk Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016 - 2020

No	Uraian	Total Belanja Modal untuk Pembangunan Daerah (Rp)	Total Pengeluaran [Belanja + Pengeluaran Pembiayaan] (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5
1	**2016**	524.463.723.680,27	2.127.247.097.444,29	24,65%
2	**2017**	556.926.371.276,39	2.225.121.485.774,77	25,03%
3	**2018**	613.438.215.481,25	2.381.523.875.914,02	25,76%
4	**2019**	655.137.393.960,15	2.531.917.988.612,87	25,88%
5	**2020**	309.463.968.545,16	2.342.283.027.037,71	13,21%

Sumber: Diolah dari LRA, dan LKPJ Wali Kota Batam

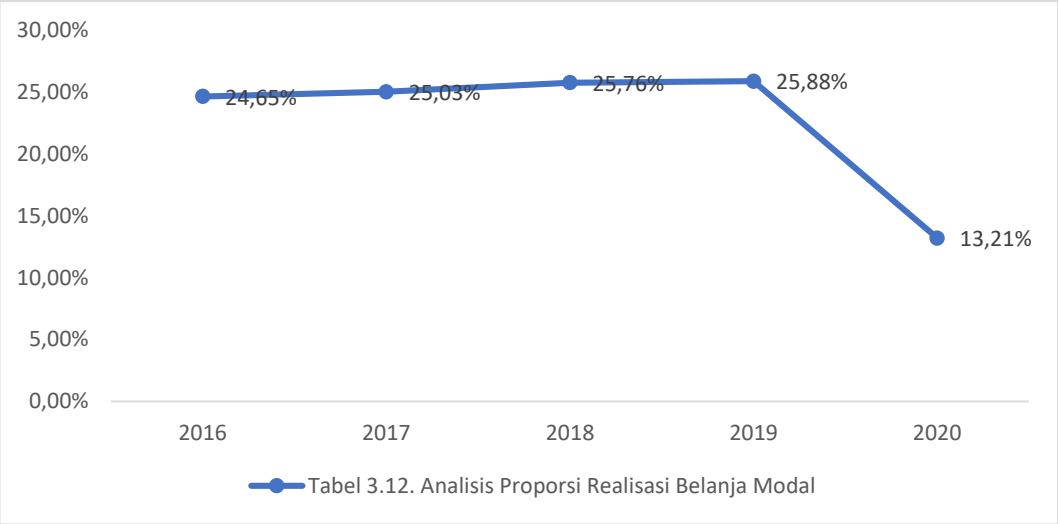

Gambar 3. 8 Persentase Realisasi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Kota Batam Tahun Anggaran 2016 - 2020

Jika dilihat dari tabel 3.12 di atas, maka dapat digambarkan bahwa pada saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19, yaitu antara tahun 2016 s.d. 2019, proporsi realisasi belanja modal terhadap total pengeluaran daerah relatif terus meningkat persentasenya, dan kemudian menurun seiring dengan adanya kebijakan refocusing anggaran dari Pemerintah Pusat untuk menghadapi pandemi Covid-19 di tahun 2020 sampai dengan sekarang ini di tahun 2021. Kondisi di atas menunjukkan adanya komitmen dan keberpihakan kebijakan dari Pemerintah Kota Batam untuk lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur selama 5 tahun terakhir.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan Daerah Kota Batam berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan daerah Kota Batam adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang.

Analisis realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, beserta proyeksinya sudah dibahas dan dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya, masuk dalam kategori penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab ini akan dibahas lebih mendalam pada komponen dalam Pembiayaan, misalnya analisis Penutup Defisit Anggaran, analisis SiLPA, dan analisis Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Jika dilihat dari tabel 3.13 di bawah, diketahui bahwa penggunaan SiLPA relatif mengalami penurunan. Penurunan terhadap Penggunaan SiLPA ini tentu dipengaruhi oleh SILPA yang terus berkurang juga setiap tahunnya. Gejala ini tentu mengarah pada potensi adanya kondisi *fiscal distress* (tekanan anggaran). Sedangkan, pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagaimana telah disajikan dalam Tabel 3.8 di atas, diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir Pemerintah Kota Batam tidak melakukan kebijakan pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal ke BUMD sebagaimana lazimnya Pemerintah Daerah di Indonesia. Tabel berikut menunjukkan analisis perhitungan surplus (defisit) riil dan pengaruhnya terhadap kebijakan pembiayaan daerah.

Tabel 3. 13 Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Kota Batam Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.215.680.286.681,50	2.157.662.190.348,08	2.360.092.860.079,71	2.522.890.256.865,30	2.577.504.994.815,32
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.127.247.097.444,49	2.225.121.485.774,77	2.381.523.875.914,02	2.531.917.988.612,87	2.342.283.027.037,71
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-
A	Surplus (Defisit) Riil	88.433.189.237,21	(67.459.295.426,69)	(21.431.015.834,31)	(9.027.731.747,57)	235.221.967.777,61
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
	- Penggunaan SiLPA	44.868.397.128,53	133.301.586.365,74	65.839.607.920,05	44.408.264.485,74	35.380.532.738,17
	- Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
	- Pinjaman Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	- Penerimaan Kembali Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	44.868.397.128,53	133.301.586.365,74	65.839.607.920,05	44.408.264.485,74	35.380.532.738,17
A+B	SILPA	133.301.586.365,74	65.842.290.939,05	44.408.592.085,74	35.380.532.738,17	270.602.500.515,78

Sumber: Diolah dari LRA, APBD, dan LKPJ Wali Kota Batam

Tabel 3.13 di atas menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir terjadi defisit riil pada realisasi anggaran pada tahun 2017, 2018, dan 2019 serta surplus riil yang besar pada tahun 2020. Meskipun terjadi defisit riil selama 3 tahun sebelumnya, saldo penggunaan SiLPA pada penerimaan pembiayaan relatif cukup besar sehingga masih menghasilkan realisasi SILPA dan dapat digunakan untuk menutup defisit riil pada tahun selanjutnya. Pada tahun 2018 defisit riil yang terjadi lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai sebesar -Rp21.431.015.834,31 ditambah realisasi penggunaan SiLPA sebesar Rp65.839.607.920,05 sehingga SILPA menjadi hanya tinggal sebesar Rp44.408.592.085,74. Pada tahun 2019 terjadi realisasi defisit riil sebesar -Rp9.027.731.747,57, sehingga SILPA turun hanya menjadi sebesar Rp35.380.532.738,17 jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2018. Terakhir, pada tahun 2020 terjadi realisasi surplus riil sebesar Rp235.221.967.777,61, sehingga SILPA diperkirakan naik signifikan menjadi sebesar Rp270.602.500.515,78. Kenaikan SILPA yang dipicu karena adanya surplus riil yang besar di tahun 2020 disebabkan karena adanya dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran.

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat disajikan tabel analisis sisa lebih riil perhitungan anggaran tahun berjalan sebagai berikut. Perhitungan sisa lebih riil anggaran diperoleh dari sisa kas daerah pada akhir tahun anggaran dikurangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak ketiga dan kegiatan lanjutan. Untuk itu akan diperoleh data sisa anggaran sebenarnya yang dapat digunakan untuk memproyeksi sisa anggaran riil yang dapat digunakan untuk

melaksanakan program prioritas pembangunan daerah. Perhitungan analisa sisa lebih (riil) perhitungan anggaran dilakukan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Untuk menentukan proyeksi sisa lebih (riil) perhitungan anggaran tetap mempergunakan angka hasil perhitungan pada tahun 2020. Berikut disajikan perhitungan analisa sisa lebih (riil) perhitungan anggaran.

Tabel 3. 14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Batam Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2018		2020	
		(Rp)	% dari SILPA	(Rp)	% dari SILPA	(Rp)	% dari SILPA	(Rp)	% dari SILPA	(Rp)	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	**133.301.586.365,74**		**65.842.290.939,05**		**44.408.592.085,74**		**35.380.532.738,17**		**270.602.500.515,78**	
2	Pelampauan penerimaan PAD	(27.997.712.304)	-21,00%	(112.461.616.298)	-170,80%	(150.386.671.071)	-338,64%	(136.677.167.243,12)	-386,31%	(57.070.880.423,95)	-21,09%
3	Pelampauan penerimaan pendapatan transfer	(32.765.232.352)	-24,58%	(82.022.160.685)	-124,57%	14.306.038.873,87	32,21%	(85.773.942.455)	-242,43%	(1.718.055.003)	-0,63%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah	-	-	-	-	(12.430.691.855,60)	-27,99%	(969.124.953,00)	-27,39	(18.653.678.506,00)	-6,89
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	194.064.531.022	145,58%	260.326.067.922	395,37%	192.919.916.138,24	434,42%	258.800.767.389,29	731,48%	348.045.114.448,73	128,62%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga s/d akhir tahun belum terealisasi					0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	Kegiatan lanjutan					0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Sumber: Diolah dari LRA, Neraca, dan LKPJ Wali Kota Batam

Data pada tabel 3.14 di atas, menunjukkan bahwa analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sampai dengan 31 Desember menunjukkan adanya pembentuk SILPA. Jika dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) maka pembentuk SILPA terbesar dari Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Sedangkan, sisa anggaran yang berasal dari pelampauan target pendapatan relatif sebagai pengurang SILPA (tidak ada pelampauan). Untuk itu, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dari sisi perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran. Pelampauan/penghematan belanja dapat diduga berasal dari efisiensi anggaran (jika terlalu besar maka menunjukkan adanya ketidakcermatan pada saat menentukan pagu anggaran) dan/atau ketidakcermatan pada saat pelaksanaan anggaran. Atau, dengan kata lain banyak kegiatan yang tidak

terlaksana sesuai dengan perencanaan. Hal ini perlu dilakukan analisis lebih mendalam lagi untuk mencari penyebab dan kejadian transaksi yang menyebabkan ketidakcermatan tersebut.

Sementara itu, jika dilihat dari data komposisi penggunaan SiLPA tidak ada keterangan yang jelas terkait dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan. Untuk itu, seluruh saldo kas dalam Neraca Daerah dianggap sebagai sisa kas riil yang dapat dimanfaatkan untuk menghitung proyeksi kemampuan riil keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan data realisasi SILPA riil sebagaimana pada tabel 3.13 di atas dengan hasil perhitungan sisa lebih riil perhitungan sisa kas dalam neraca, maka terdapat selisih, meski cukup kecil, antara SILPA dengan sisa kas riil perhitungan anggaran. Selain itu juga, nilai SILPA tidak berbanding lurus dengan nilai sisa lebih kas riil perhitungan anggaran. Hal ini perlu dilakukan analisis lebih mendalam lagi untuk mencari penyebab dan kejadian transaksi yang menyebabkan perbedaan tersebut.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen dalam pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan sebagaimana pada tabel 3.3 dan 3.4 di atas menunjukkan angka pertumbuhan yang relatif sangat optimistik. Rata-rata pertumbuhan pada komponen PAD di atas 3,17% dengan angka pertumbuhan setiap tahunnya sangat fluktuatif (turun-naik). Sedangkan, perkembangan Pendapatan Transfer relatif cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,21%, meski tingkat pertumbuhan DAK dinilai terlalu optimistik, yaitu rata-rata naik 6,44% per tahun. Rata-rata penurunan pendapatan bagi hasil dari pajak Pemerintah Provinsi sebesar -8,36% dinilai terlalu pesimistik. Pertumbuhan Dana Penyesuaian, berupa DID biasanya, sebesar 39,30% juga terlalu tinggi. Realiasi di hampir seluruh pendapatan daerah pada tahun 2020 perlu diperhatikan dan dikaji lebih mendalam untuk

menentukan target pada tahun 2021 dan 2022 akibat adanya dampak pandemi Covid-19 berupa krisis ekonomi dan pembatasan mobilitas penduduk.

Oleh karena itu, dalam menentukan angka proyeksi perlu dilakukan penyesuaian agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimistik. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Apalagi jika dilihat dari pertumbuhan setiap jenis pendapatan per tahunnya, masih sangat fluktuatif, bahkan beberapa pos pendapatan mengalami kecenderungan pertumbuhan negatif. Penetapan angka pertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan menetapkan secara langsung persentase pertumbuhan dengan tetap mempertimbangkan informasi-informasi kebijakan Pemerintah dan kondisi terkini terkait adanya dampak wabah Covid-19. Penyesuaian terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah juga telah dilakukan serta penurunan dan relaksasi terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer juga perlu dipertimbangkan. Penurunan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah serta bagi hasil pajak provinsi juga harus diperhitungkan. Penerimaan Dana Alokasi Umum juga diperkirakan akan terjadi pada 2 tahun ke depan, sesuai dengan arahan dari Pemerintah, sebesar 10%-20% dari realisasi TA 2020.

Selain itu, tahun dasar menggunakan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2020 setelah dilakukan penyesuaian APBD akibat adanya wabah Covid-19. Adanya wabah nasional dan dunia berupa pandemi covid 19 (virus corona) yang menyebabkan terjadinya bencana kesehatan dunia dan nasional, telah berdampak pada kondisi ekonomi dunia dan nasional yang sedang mengalami krisis yang sangat berat, selain ancaman korban jiwa yang semakin banyak. Oleh karena itu, selain tentu pastinya akan terjadi penurunan kapasitas fiskal, juga perlu adanya kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengadakan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan, termasuk keuangan daerah, untuk mengatasi dan menanggulangi wabah beserta dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat. Untuk itu, pemerintan pusat telah mengeluarkan sejumlah

aturan setingkat Perppu sampai dengan aturan teknis setingkat Menteri terkait, untuk menanggulangi kejadian bencana kesehatan seperti saat ini.

Berdasarkan kebijakan terkait penanggulangan dampak atas wabah Covid-19 di tahun 2020, maka Pemerintah Kota Batam melakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2020 dan begitu juga data realisasi APBD TA 2020 menunjukkan adanya penurunan atas kinerja pendapatan yang sangat drastis, terutama pada PAD.

Sedangkan, untuk proyeksi tahun 2021 menggunakan data yang sudah ditetapkan dalam APBD Kota Batam Tahun 2021. Khusus, untuk data proyeksi pajak dan retribusi daerah TA 2022 s.d. 2026 menggunakan data perhitungan yang disampaikan oleh BP2RD dan BPKAD. Berdasarkan asumsi dan kebijakan di atas, maka perhitungan proyeksi penerimaan daerah daerah disajikan dalam tabel 3.15 sebagai berikut.

Tabel 3. 15 Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Total Penerimaan Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026

Uraian	Tahun Dasar	Rata-rata Pertumbuhan	Proyeksi					
	(Realisasi APBD TA 2020)	%	2021* (Rp)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH								
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**975.283.123.576,32**	**4,72%**	**1.212.464.139.941**	**1.618.052.879.903**	**1.694.425.737.517**	**1.774.402.924.314**	**1.858.158.862.528**	**1.945.865.602.176**
Pajak Daerah	755.878.193.409,76		945.743.797.151	1.290.683.000.000	1.351.604.000.000	1.415.400.000.000	1.482.211.000.000	1.552.173.000.000
Retribusi Daerah	92.622.927.690,00		127.906.700.000	184.749.105.918	193.469.263.000	202.601.013.000	212.163.781.000	222.177.912.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.601.742.730,00		12.648.420.047	12.648.420.047	13.245.425.473	13.870.609.556	14.525.302.327	15.210.896.596
Lain - Lain PAD yang Sah	118.180.259.746,56		126.165.222.743	129.972.353.938	136.107.049.044	142.531.301.759	149.258.779.202	156.303.793.580
Pendapatan Transfer	**1.432.995.313.284,00**	**3,21%**	**1.289.424.306.402**	**1.615.967.984.141**	**1.667.840.556.432**	**1.721.378.238.293**	**1.776.634.479.743**	**1.833.664.446.542**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.225.619.062.683,00**		**1.057.565.062.402**	**1.349.329.853.541**	**1.392.643.341.840**	**1.437.347.193.113**	**1.483.486.038.012**	**1.531.105.939.832**
Dana Bagi Hasil (DBH)	297.076.594.012,00		182.492.414.402	208.214.814.741	214.898.510.294	221.796.752.475	228.916.428.229	236.264.645.575
Dana Alokasi Umum (DAU)	629.854.829.000 ,00		626.199.396.000	873.339.950.700	901.374.163.117	930.308.273.754	960.171.169.341	990.992.663.877
Dana Alokasi Khusus (DAK)	251.291.507.671 ,00		224.854.891.000	224.854.891.000	232.072.733.001	239.522.267.730	247.210.932.525	255.146.403.459
Dana Insentif Daerah (DID)	47.396.132.000,00		24.018.361.000	42.920.197.100	44.297.935.427	45.719.899.154	47.187.507.917	48.702.226.921
Pendapatan Transfer antar Daerah	**207.376.250.601,00**		**231.859.244.000**	**266.638.130.600**	**275.197.214.592**	**284.031.045.181**	**293.148.441.731**	**302.558.506.711**
Pendapatan Bagi Hasil	205.376.250.601 ,00		231.859.244.000	266.638.130.600	275.197.214.592	284.031.045.181	293.148.441.731	302.558.506.711
Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun Dasar	Rata-rata Pertumbuhan	Proyeksi					
	(Realisasi APBD TA 2020)	%	2021* (Rp)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	**169.226.557.955,00**	**20,00%**	**148.656.540.000**	**135.271.680.000**	**162.326.016.000**	**194.791.219.200**	**233.749.463.040**	**280.499.355.648**
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	169.226.557.955,00		148.656.540.000	135.271.680.000	162.326.016.000	194.791.219.200	233.749.463.040	280.499.355.648
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	**2.577.504.994.815,32**		**2.650.544.986.343**	**3.369.292.544.044**	**3.524.592.309.949**	**3.690.572.381.808**	**3.868.542.805.310**	**4.060.029.404.367**
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan								
- Penggunaan SiLPA	35.380.532.738,17		270.602.500.516	84.696.823.080	91.734.557.430	95.721.848.339	95.707.253.652,00	90.540.407.367
- Pencairan Dana Cadangan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pinjaman Dalam Negeri	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Penerimaan Piutang Daerah	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**35.380.532.738,17**		**270.602.500.516**	**84.696.823.080**	**91.734.557.430**	**95.721.848.339**	**95.707.253.652,00**	**90.540.407.367**
TOTAL PENERIMAAN DAERAH	**2.612.885.527.553,49**		**2.921.147.486.859**	**3.453.989.367.124**	**3.616.326.867.379**	**3.786.294.230.147**	**3.964.250.058.962**	**4.150.569.811.734**

*Sumber: * dari data LRA 2020 audited; **PAPBD 2021; *** dari data proyeksi BPPRD dan BPKAD s.d. 2026*

Gambar 3. 9 Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Total Penerimaan Daerah Kota Batam Tahun 2021 – 2026

Untuk penerimaan pembiayaan (tabel 3.15) pada tahun 2021 sebesar Rp270.602.500.516,- hal ini diperoleh dari Penggunaan SILPA tahun sebelumnya, Pada Tahun 2022 terjadi penurunan proyeksi penerimaan pembiayaan yaitu sebesar Rp84.696.823.080, hal ini disebabkan adanya perhitungan selisih pendapatan dengan belanja. Dari tahun 2023 s.d. 2025 proyeksi penerimaan pembiayaan terjadi peningkatan, hal ini disebabkan oleh besarnya belanja daripada pendapatan, sehingga ditutupi dengan SILPA. Namun di tahun 2026 SILPA terjadi penurunan proyeksi penerimaan pembiayaan.

Terhadap Pengeluaran Pembiayaan dalam rangka pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman dan pembayaran hutang kepada pihak ketiga dapat dilakukan apabila kondisi keuangan daerah pada posisi SURPLUS.

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh

Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017 Tabel T-B.10 dijelaskan bahwa pengeluaran dan belanja wajib mengikat dan prioritas utama terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Insentif Pimpinan Daerah), Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bagi Hasil. Ditambah lagi dengan Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Hutang dan Penyertaan Modal. Tabel di bawah merupakan data perkembangan realisasai pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun terakhir serta pertumbuhan per tahunnya.

Tabel 3. 16 Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Batam Tahun Anggaran 2016 - 2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 3 Tahun Terakhir
A	**Total Belanja Wajib dan Mengikat**	**757.886.211.497,00**	**750.182.482.840,00**	**865.739.436.560,00**	**903.495.293.050,00**	**879.057.813.329,00**	**4,01%**
	Belanja Pegawai	757.886.211.497,00	750.182.482.840,00	865.739.436.560,00	903.495.293.050,00	879.057.813.329,00	4,01%
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan ke Pemdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
B	**Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- Pembay aran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- Pembay aran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah	**757.886.211.497,00**	**750.182.482.840,00**	**865.739.436.560,00**	**903.495.293.050,00**	**879.057.813.329,00**	**4,01%**

Sumber: Diolah dari LRA Wali Kota Batam

Berdasarkan perhitungan di tabel 3.16 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya rata-rata pertumbuhan per tahun tidak disebabkan karena adanya kenaikan yang tidak merata tiap tahunnya. Jika dilihat data keuangan per tahun anggaran, maka data yang relevan yang masuk menjadi perhitungan dalam belanja wajib dan mengikat hanya belanja pegawai, karena selama 5 tahun terakhit Pemerintah Kota Batam tidak melakukan kebijakan belanja bunga, belanja subsidi, dan tidak ada belanja transfer ke Pemerintah Desa. Berbeda halnya dengan pengeluaran pembiayaan, selama 5 tahun terakhir Pemerintah Kota Batam tidak melakukan kebijakan penyertaan modal maupun pengeluaran pembiayaan lainnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bahasan penentuan proyeksi pendapatan, khusus untuk proyeksi tahun 2021 perlu mempertimbangkan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam LKPD Tahun Anggaran 2020 sebagai tahun dasar, setelah adanya penyesuaian kebijakan anggaran akibat adanya dampak wabah Covid-19. Perubahan yang terjadi pada alokasi anggaran belanja dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran juga penting untuk melihat kemungkinan alokasinya di tahun 2021. Perkiraan dari sejumlah hasil riset dan pendapat ahli, bahwa kemungkinan dampak dari adanya wabah pandemic Covid-19 ini, terutama untuk pemulihan perekonomian, akan memakan waktu sampai dengan 2 tahun ke depan, atau sampai dengan tahun 2022. Informasi tersebut tentu akan berdampak pada perkiraan alokasi anggaran belanja pada tahun 2 tahun pertama, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022. Baru kemudian, pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 untuk menentukan proyeksi belanja dilakukan dengan mengkalikan proyeksi terakhir dengan pertumbuhan yang ditetapkan.

Dengan demikian proyeksi belanja dan proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat disajikan sebagaimana tabel 3.17 dan tabel 3.18 di bawah.

Tabel 3. 17 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 – 2026

Uraian	Tahun Dasar	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
	(Realisasi APBD TA 2020)*		P-APBD TA 2021 (Rp)**	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
BELANJA DAERAH								
Belanja Operasi	**1.992.008.701.074,55**		**2.244.015.709.006,00**	**2.386.215.100.892**	**2.493.882.667.303**	**2.606.527.397.885**	**2.724.383.030.997**	**2.847.694.636.629**
Belanja Pegawai	879.057.813.329,00	4,01%	997.972.687.813,00	1.256.711.296.358	1.307.105.419.342	1.359.520.346.658	1.414.037.112.559	1.470.740.000.772
Belanja Barang dan Jasa	994.646.428.151,62	5,21%	1.196.595.837.854,00	1.080.962.580.210	1.137.280.730.639	1.196.533.056.705	1.258.872.428.960	1.324.459.682.508
Belanja Bunga	-		-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-		-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	118.288.889.593,93	2,00%	48.843.563.339,00	48.470.044.269	49.439.445.154	50.428.234.057	51.436.798.739	52.465.534.713
Belanja Bantuan Sosial	15.570.000,00	-19,82%	603.620.000,00	71.180.055	57.072.168	45.760.464	36.690.740	29.418.636
Belanja Bantuan Keuangan	-		-		-	-	-	-
Belanja Modal	**309.463.968.545,16**		**669.175.156.491,00**	**1.003.058.708.362**	**1.059.425.361.940**	**1.119.733.758.405**	**1.184.259.124.068**	**1.253.295.944.217**
Belanja Tanah	-		-	-	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	76.165.649.899,89	-0,36%	109.973.239.971,00	144.655.437.567	144.134.677.992	143.615.793.151	143.098.776.296	142.583.620.701
Belanja Gedung dan Bangunan	86.535.361.300,92	7,00%	147.976.990.753,00	285.636.370.183	305.630.916.096	327.025.080.223	349.916.835.838	374.411.014.347
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	130.177.363.876,35	7,00%	383.326.193.394,00	516.414.509.726	552.563.525.407	591.242.972.185	632.629.980.238	676.914.078.855
Belanja Aset Tetap Lainnya	16.585.593.468,00	1,32%	27.898.732.373,00	56.352.390.886	57.096.242.446	57.849.912.846	58.613.531.696	59.387.230.314
Belanja Aset Lainnya	-		-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	**40.810.357.418,00**		**7.956.621.362,00**	**64.715.557.870**	**63.018.838.136**	**60.033.073.857**	**55.607.903.897**	**49.579.230.888**
Belanja Tidak Terduga	40.810.357.418,00		7.956.621.362,00	64.715.557.870	63.018.838.136	60.033.073.857	55.607.903.897	49.579.230.888

Uraian	Tahun Dasar	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
	(Realisasi APBD TA 2020)*		P-APBD TA 2021 (Rp)**	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
Transfer	-		-	-	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pajak	-		-	-	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-		-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan ke Desa	-		-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Lainnya	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA DAERAH	2.342.283.027.037,71		2.921.147.486.859,00	3.453.989.367.124	3.616.326.867.379	3.786.294.230.146	3.964.250.058.962	4.150.569.811.734

*Sumber: * dari data LRA 2020 audited; **P- APBD 2021; *** dari data proyeksi BPPRD dan BPKAD s.d. 2026*

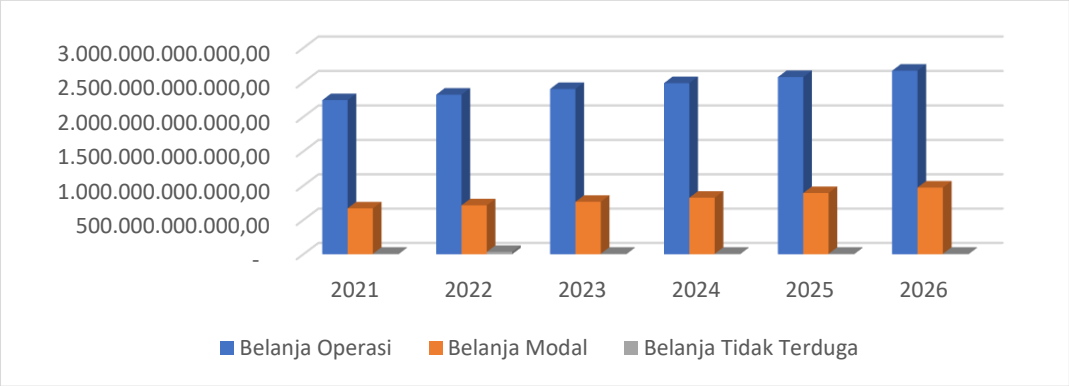

Gambar 3. 10 Proyeksi Anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 – 2026

Tabel 3. 18 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Batam Tahun Anggaran 2021 - 2026

Uraian	Tahun Dasar (Realisasi APBD TA 2020)*	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
Total Belanja Wajib dan Mengikat	879.057.813.329,00	997.972.687.813,00	1.256.711.296.358	1.307.105.419.342	1.359.520.346.658	1.414.037.112.559	1.470.740.000.772
Belanja Pegawai	879.057.813.329,00	997.972.687.813,00	1.256.711.296.358	1.307.105.419.342	1.359.520.346.658	1.414.037.112.559	1.470.740.000.772
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemdes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembay aran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembay aran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	879.057.813.329,00	997.972.687.813,00	1.256.711.296.358	1.307.105.419.342	1.359.520.346.658	1.414.037.112.559	1.470.740.000.772

*Sumber: * dari data LRA 2020 audited; Analisis Tim;*

Dari tabel 3.17 dan 3.18 di atas, penyesuaian angka pertumbuhan yang digunakan dilakukan dengan mengkalikan angka rata-rata pertumbuhan realisasi periode sebelumnya dengan pengecualian untuk beberapa belanja yang sifatnya tidak bisa diprediksi dan sifatnya fluktuatif tidak dimasukkan dalam perhitungan proyeksi .

Untuk proyeksi anggaran belanja operasi (tabel 3.17) pada tahun 2021 sebesar Rp2.244.015.709.006,-, belanja modal sebesar Rp669.175.156.491,-, kemudian untuk belanja tidak terduga sebesar Rp7.956.621.362,-, perhitungan ini berdasarkan ketetapan RANPERDA APBD Perubahan 2021. Pada Tahun 2022 belanja operasi sebesar Rp2.386.215.100.892,-, belanja modal sebesar Rp1.003.058.708.362,-, kemudian untuk belanja tidak terduga sebesar Rp64.715.557.870,-, perhitungan ini berdasarkan ketetapan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022. Untuk proyeksi belanja daerah mulai tahun anggaran 2023 sampai dengan 2026 diestimasikan rata-rata kenaikan 4,72% mengacu kepada kenaikan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, dengan total belanja daerah pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp4.150.569.811.734,-.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa kebijakan belanja daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD setiap tahunnya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10%

(sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah yaitu:
   1) DBH Cukai Hasil Tembakau;
   2) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; dan
b. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
c. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (*empat puluh persen*) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani antara lain:

a. Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
b. Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;

c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d. Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
e. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:
    1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
    2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
f. Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berakhir tahun 2026, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah sebagaimana pada tabel 3.5 di atas ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SILPA) seperti pada tabel 3.14 di atas, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total peneriman riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun mendatang.

Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kota Batam tahun 2021 s.d. tahun 2026 disajikan pada tabel 3.19 berikut.

Tabel 3. 19 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026

Uraian	Proyeksi					
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
Pendapatan Daerah	**2.650.544.986.343**	**3.369.292.544.044**	**3.524.592.309.949**	**3.690.572.381.808**	**3.868.542.805.310**	**4.060.029.404.367**
Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	270.602.500.516	84.696.823.080	91.734.557.430	95.721.848.339	95.707.253.652,00	90.540.407.367
Total Penerimaan	**2.921.147.486.859,00**	**3.453.989.367.124**	**3.616.326.867.379**	**3.786.294.230.147**	**3.964.250.058.962**	**4.150.569.811.734**
Dikurangi:						
Total Belanja dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	997.972.687.813,00	1.256.711.296.358	1.307.105.419.342	1.359.520.346.658	1.414.037.112.559	1.470.740.000.772
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**1.923.174.799.046,00**	**2.197.278.070.766**	**2.309.221.448.037**	**2.426.773.883.489**	**2.550.212.946.404**	**2.679.829.810.961**

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam dan Data Proyeksi dari BPPRD dan BPKAD

Tabel 3.19 di atas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Batam meski cukup tinggi tapi jika dibandingkan dengan kapasitas riil tahun 2019 tidak lebih baik karena adanya dampak wabah pandemi Covid-19 ini menyebabkan adanya krisis perekonomian global dan nasional, yang juga menyebabkan adanya tekanan anggaran (*fiscal distress*). Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan kembali normal setelah 2 tahun dari selesainya wabah pandemi Covid-19, atau jika diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2020 wabah ini akan mereda, maka baru tahun 2023 perekonomian global akan kembali normal. Di masa 2 tahun ke depan diperkirakan fiskal Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan mengalami tekanan dan penurunan kapasitas. Sehingga, diperkirakan dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2020 kemarin, baru pada tahun 2024 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Batam akan melampaui dari tahun anggaran 2019.

Kemudian, Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 5 tahun mendatangkan yang akan dirumuskan dalam RPJMD ini. Tetapi dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dengan adanya PP Nomor 12 Tahun 2019 dan pola nomenklatur Program-Kegiatan-Sub Kegiatan dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, maka perlu adanya pendefinisian ulang terkait penyelarasan antara kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah yang telah diproyeksikan di atas dengan total kerangka pendanaan program yang ada di Bab selanjutnya RPJMD ini. Untuk itu, **penyelarasan total proyeksi anggaran pada pendanaan program tidak dapat lagi dibandingkan dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai**

pembangunan daerah, melainkan dibandingkan dengan proyeksi total penerimaan daerah dikarenakan adanya perubahan peraturan tersebut.

Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dibagi menjadi 2 prioritas sebagai berikut:

a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar (urusan wajib pelayanan dasar) dan juga termasuk pelaksanaan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Janji Wali Kota/Wakil Wali Kota);

b. Prioritas II adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diperoleh proyeksi alokasi anggaran indikatif untuk ketiga prioritas di atas dibandingkan dengan kapasitas total penerimaan daerah.

Tabel 3. 20 Rencana Penggunaan Penerimaan / Kemampuan Keuangan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026

Uraian	Proyeksi					
	2021 (Rp)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
Penerimaan	**2.921.147.486.859**	**3.453.989.367.124**	**3.616.326.867.379**	**3.786.294.230.147**	**3.964.250.058.962**	**4.150.569.811.734**
PRIORITAS I	1.567.236.439.033	1.866.089.949.388	2.087.419.341.432	2.197.417.755.557	2.086.542.623.639	2.123.828.192.067
PRIORITAS II	1.353.911.047.826	1.653.424.710.042	1.772.723.430.389	1.859.449.096.425	1.949.221.753.992	2.047.476.088.128

Sumber: Analisis Tim

Jika dilihat dari Tabel 3.20 di atas, maka dapat diperoleh persentase proyeksi alokasi anggaran untuk ketiga prioritas di atas selama 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2021 s.d 2026, adalah untuk prioritas I pada tahun 2021 memiliki alokasi 53,65% dari total penerimaan daerah tahun 2021, dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2026 menjadi hanya sebesar 51,17%. Sedangkan, untuk prioritas II, pada tahun 2021 memiliki alokasi 46,35% dari total proyeksi penerimaan daerah tahun 2021, kemudian menjadi 49,33% pada tahun 2026.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJMD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat wajib.

Permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, permasalahan pembangunan daerah lintas sektoral (*cross cutting*) sekaligus menjadi isu pembangunan makro daerah. Permasalahan ini mencakup permasalahan di aspek kesejahteraan masyarakat, geografi-demografi, maupun daya saing daerah. Kedua, permasalahan pembangunan sektoral yang identik dengan permasalahan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah atau permasalahan di aspek pelayanan umum.

A. Permasalahan Pembangunan Makro Daerah

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Batam mengalami fluktuasi yang cukup tinggi antara -2,55 persen hingga 5,92 persen dengan pertumbuhan ekonomi terakhir pada tahun 2020 menunjukkan angka -2,55 persen. Pada kurun waktu 2016-2019, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di antara 4,96 persen hingga 5,07 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Batam dapat dikatakan relatif tidak stabil dengan dua periode tahun 2017 dan 2018 tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan nasional. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 dan 2018 Indonesia dan Batam khususnya mengalami dampak negatif dari krisis ekonomi global dimana harga minyak dunia jatuh sampai pada titik terendah 10 USD/barrel dan ini membawa

dampak kepada industri perkapalan, industri sektor migas dan industri lainnya yang ada di Kota Batam yang merupakan sektor-sektor andalan di Kota Batam.

Keterpurukan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020 di Kota Batam juga lebih parah dibandingkan nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07, sementara di Kota Batam mencapai -2,55. Stabilitas serta relatif tingginya pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari faktor fundamental ekonomi makro yang diperlukan untuk menjamin stabilitas keberlanjutan pembangunan daerah. Fluktuasi kondisi ekonomi di Kota Batam ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global sebagaimana yang diketahui bahwa transaksi perdagangan internasional di Kota Batam cukup tinggi dan memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu, fluktuasi perekonomian yang cukup besar ini juga terjadi karena perekonomian Kota Batam sangat terfokus pada industri pengolahan yang menyumbang lebih dari separuh dari keseluruhan perekonomian sehingga guncangan pada sektor ini akan mempengaruhi keseluruhan perekonomian daerah. Pembatasan aktifitas ekonomi regional, nasional, maupun global akibat Pandemi Covid-19 sejak akhir tahun 2019 semakin memperparah guncangan ekonomi di Kota Batam.

Untuk mengembalikan dan meningkatkan stabilitas perekonomian Kota Batam, percepatan pemulihan perekonomian hampir di semua sektor sebagai akibat Pandemi Covid-19 harus diprioritaskan. Selain itu, Kota Batam harus mampu melakukan diversifikasi sektor ekonomi supaya tidak tergantung hanya pada satu atau beberapa sektor ekonomi saja. Tingginya kontribusi sektor industri pengolahan yang ada saat ini perlu dimanfaatkan dengan mengoptimalkan *multiplier effect* dari sektor tersebut terhadap sektor-sektor lain. Hal yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan rantai pasok industri lokal dengan meningkatkan daya saing industri-industri kecil dan menengah yang ada sehingga kebutuhan pasokan industri besar dapat sebagian dialihkan dari bahan baku impor ke bahan baku lokal serta meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah.

Inflasi adalah suatu proses terjadinya kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan sistem pasar. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat yang mengalami peningkatan, likuiditas di pasar yang berlebihan hingga proses distribusi yang tidak lancar. Penyebab inflasi adalah karena kenaikan biaya produksi. Inflasi bisa disebabkan karena biaya produksi mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu dan terjadi secara terus-menerus. Selain itu, penyebab inflasi lainnya adalah karena permintaan dan minat masyarakat terhadap suatu barang meningkat. Jika suatu barang atau jasa laris dan banyak dibutuhkan masyarakat, maka bisa membuat harga menjadi naik. Meskipun inflasi merupakan salah satu tanda meningkatnya perekonomian di daerah, inflasi yang terlalu tinggi dapat memberikan dampak negatif ke masyarakat seperti menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya daya saing ekspor, dan mengurangi minat investasi.

Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 Kota Batam mencatatkan laju inflasi yang lebih rendah dari laju inflasi nasional dan Kota Tanjungpinang, selama periode 2016 hingga 2018, laju inflasi di Kota Batam selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi nasional dan Kota Tanjungpinang sebagai pembanding. Meskipun laju inflasi di Kota Batam masih tergolong dalam laju inflasi ringan di bawah 10%, salah satu dampak dari inflasi adalah melemahnya nilai mata uang yang berpengaruh pada keengganan masyarakat untuk menyimpan uangnya terutama bagi masyarakat yang berpendapatan tetap sehingga secara jangka panjang akan berpengaruh pada tingkat daya tarik investasi di Kota Batam. Inflasi di Kota Batam perlu dijaga secara relatif terhadap daerah-daerah sekitar dan daerah di Indonesia secara umum supaya posisi Kota Batam sebagai tujuan investasi dapat terjaga.

Permasalahan makro lain yang perlu diperhatikan di Kota Batam adalah masih relatif lebih tingginya tingkat pengangguran dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau maupun rata-rata nasional. Semakin diperburuk oleh dampak Pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam di tahun

2020 mencapai 11,79%, angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan TPT nasional yang sebesar 7,07%. Sebagai daerah pusat industri, hal ini perlu menjadi perhatian lebih mengingat industri diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada di daerah. Semakin rendah TPT yang berarti penduduk bekerja/produktif secara ekonomi semakin tinggi, maka semakin tinggi pula jaminan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain itu, dengan meningkatnya angka pengangguran, nilai pendapatan masyarakat pun ikut menurun, artinya jika pendapatan menurun maka daya beli masyarakat juga mulai menurun. Hal ini menjadi menimbulkan permasalahan lainnya seperti perlambatan ekonomi. Masalah dalam pergerakan perekonomian dilihat dari daya beli dan pengangguran ini berdampak pada melambatnya pergerakan roda ekonomi membawa masalah bagi sektor ketenagakerjaan di Kota Batam. Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Indiaktor makro lain yang mengindikasikan kesejahteraan masyarakat adalah Persentase Penduduk Miskin. Data di Bab II memperlihatkan bahwa persentase penduduki miskin di Batam membaik dalam tiga tahun terakhir, termasuk di tahun 2020 di mana berbagai daerah lain justru mengalami peningkatan (memburuk). Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional maupun Kepulauan Riau, Kota Batam memiliki kondisi yang lebih baik. Walaupun demikian, jika dilihat dari indikator jumlah penduduk miskinnya, maka Kota Batam adalah penyumbang jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin Kota Batam sebesar 57,34 ribu jiwa atau 47,62% dari total penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau, maka pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 67.060 jiwa atau 50,81% dari jumlah di Kepulauan Provinsi

Riau. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah Kota Batam untuk berupaya menurunkan jumlah penduduk miskinnya.

Indikator kesejateraan makro daerah lainnya adalah Indeks Gini yang memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Batam relatif lebih rendah daripada nasional dan Kepulauan Riau. Walaupun demikian, pada nilai indikator dua tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Meskipun di tahun 2020 indeks gini sempat menurun, yang bisa jadi disebakan oleh gencarnya berbagai bantuan sosial bagi masyarakat rentan dan dampak negatif pandemi Covid-19 bagi perekonomian kelompok masyarakat kaya, namun tetap saja lebih tinggi daripada kondisi tahun 2020. Mengingat bahwa hingga pertengahan tahun 2021 pandemi Covid-19 belum tertangani dengan baik, maka penurunan ekonomi baik di sisi penawaran maupun permintaan akan tetap terjadi yang menyebabkan perekonomian memburuk. Meskipun indeks gini akan terus menurun (semakin merata), namun perlu untuk mengidentifikasi tingkat pertumbuhan ekonomi untuk melihat kondisi perekonomian secara komprehensif. Selain itu, indeks gini merupakan ukuran kesejahteraan masyarakat yang digunakan secara nasional sekaligus pembanding hasil pembangunan antar daerah. Karenanya, meskipun ketimpangan ekonomi di Kota Batam masih relatif baik, pembangunan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat seoptimal mungkin harus tetap menjadi perhatian pembangunan di masa mendatang.

Permasalahan ketimpangan atau ketidak-merataan di Kota Batam justru terlihat antara *hinterland* dan *mainland*. Berbagai indikator memperlihatkan kesenjangan/ketimpangan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah di kedua bagian wilayah Kota Batan ini. Pun demikian dengan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Kedua pelayanan tersebut di Kota Batam sudah berjalan secara baik, namun seiring dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika

perubahan lingkungan regional, nasional maupun global maka pelayanan Kesehatan dan Pendidikan secara iteratif perlu terus dioptimalkan. Dalam pelayanan Pendidikan masih diperlukan pemerataan kualitas antara wilayah *mainland* dan *hinterland*, perluasan kapasitas pelayanan Pendidikan sesuai standar masih harus terus dilakukan. Seiring dengan hal tersebut, pelayanan Kesehatan juga masih perlu peningkatan pemerataan, kapasitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta tenaga pendukungnya masih perlu dioptimalkan baik di wilayah *mainland* dan *hinterland*

Tabel 4. 1 Rangkuman Permasalahan Makro Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pertumbuhan ekonomi yang kurang stabil dan mengalami konstraksi pada tahun 2020	Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi belum optimal; Menurunnya pertumbuhan sektor ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19	Perekonomian terlalu bertumpu pada industri besar yang ada di kawasan industri sehingga pengembangan sektor ekonomi lain belum optimal. Pembatasan hampir seluruh kegiatan masyarakat sebagai bentuk penanganan Pandemi Covid-19.
2.	Tingginya Laju Inflasi	Meningkatnya harga pada kelompok barang penyumbang inflasi terutama dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.	Masih belum optimalnya pengelolaan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi yang efektif dalam mengendalikan harga.
3	Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Rendahnya serapan pasar tenaga kerja di Kota Batam	Kesesuaian kompentensi tenaga kerja serta *link & match* antara institusi pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri
4	Jumlah penduduk miskin Kota Batam tinggi dan meningkat, penyumbang terbesar penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau	Daya tarik kota membuat arus urbanisasi tidak gampang dibendung, sementara ketersediaan lapangan kerja di kota terbatas. Jika pun ada, maka lebih ke sektor informasl dengan pendapatan terbatas	Belum optimalnya pengelolaan terhadap urbanisasi maupun pelayanan sosial terhadap kelompok rentan.
5	Indeks Gini perlu terus diturunkan pada tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi	Gencarnya Bantuan sosial bagi masyarakat rentan dan dampak negatif pandemi covid-19 bagi masyarakat kaya mungkin mampu menurunkan Indeks Gini, namun pada tingkat rata-rata	Pembatasan aktifitas masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi covid-19 membuat aktifitas perekonomian terganggu dan di periode tertentu terhenti. Adaptasi “new normal” agar masyarakat tetap aman beraktifitas selama pandemi maupun pasca pandemi

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pendapatan masyarakat yang rendah	masih belum optimal.
6	Ketimpangan antar wilayah, khususnya antar *mainland* (perkotaan) dan *hinterland*		
a	Kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan belum merata	Kapasitas pelayanan Pendidikan SD-SMP, serta kapasitas pelayanan Kesehatan masih belum sesuai standar;	Masih belum tercukupinya daya tampung sarana dan prasarana pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, serta belum tercukupinya jumlah tenaga pendidik dan tenaga Kesehatan serta tenaga pendukungnya.
b	Kualitas infrastruktur belum merata, khususnya antara *mainland* dan *hinterland*	Pemenuhan hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih kurang	Sulitnya penyediaan lahan untuk pemenuhan hunian vertikal untuk MBR, pemanfaatan anggaran selain APBD untuk penyediaan lahan dan pembangunan hunian vertikal belum dioptimalkan.
		Pemenuhan perumahan di wilayah hinterland belum optimal	Kendala penyediaan lahan dan potensi pembiayaan selain APBD belum dioptimalkan.
		Rasio Panjang jalan terhadap jumlah kendaraan rendah	Masih kurangnya moda transportasi massal yang handal memicu pertambahan kendaraan bermotor, sehingga penurunan rasio Panjang jalan terhadap jumlah kendaraan cukup tinggi. Pembangunan transportasi massal merupakan pendekatan *green infrastructure* yang dapat menekan produksi asap kendaraan bermotor, selain itu pembangunan transportasi massal akan lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan hanya pembangunan/penambahan panjang jalan.
		Kualitas permukaan jalan (kondisi mantap) masih perlu dioptimalkan	Laju penurunan kualitas permukaan jalan belum di imbangi dengan tingkat pemeliharaan jalan.
		Ketersediaan air bersih belum merata antara wilayah mainland dengan hinterland	Faktor geografis kepulauan dan jenis struktur tanah berimplikasi pada sulitnya ketersediaan air tanah, serta faktor iklim yang berdampak pada kekeringan. Selain itu masih kurangnya sumber-sumber penampung air bersih beserta jaringan pipa distribusi air.
7	Meskipun IPM meningkat namun peringkat nasional IPM Kota Batam menurun	Konsumsi riil per kapita menurun, indeks pendidikan masih di angka 73,69 (dari makss 100) dan indeks kesehatan di angka 0,8205 (dari maks 1)	Belum merata dan tingginya kualitas layanan kesehatan maupun pendidikan. Pandemi covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Adaptasi new normal belum terimplementasikan.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
8.	Tata kelola pemerintahan belum optimal		
a.	Indeks reformasi birokrasi masih rendah	Tata kelola pemerintahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monev) penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah masih terbatas	Masih terbatasnya kualitas ASN, tingkat maturitas SPIP, dan manajeman pendukung penyelenggaraan pemeritahan
b.	Kontraksi PAD saat pandemi covid-19	Turunnya pendapatan yang bersumber dari pajak akibat pandemi covid-19	Aktifitas perekonomian terganggu akibat upaya penanganan covid-19, sementara adaptasi "new normal" belum terimplementasi dengan baik.
c.	Kualitas pelayanan di tingkat kecamatan belum merata	Area pelayanan di beberapa kecamatan sangat besar sehingga tidak efektif dalam menjangkau masyarakat	Faktor demografis pertumbuhan penduduk di suatu kecamatan belum di imbangi dengan pemekaran kecamatan sehingga menjauhkan pelayanan kepada masyarakat
9	Kinerja pemberdayaan gender Kota Batan lebih rendah dari nasional dan Kepulayan Riau	Pembangunan gender belum menjadi prioritas.	Upaya pengarusutamaan gender terbatas. Anggaran responsive gender di perangkat daerah masih terbatas.
10	Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan menengah	Belum optimalnya partisipasi IKM dalam rantai pasok industri	Daya saing IKM yang masih rendah

Sumber: Hasil analisis

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi indikator makro pembangunan yang dipergunakan secara nasional. Indeks ini memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Meskipun secara umum IPM Kota Batam relatif tinggi dibandingkan nasional dan Kepulauan Riau – bahkan tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, namun peningkatan layanan untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat adalah kewajiban pemerintah daerah. Meskipun demikian, ternyata peringkat IPM Kota Batam secara nasional di tahun 2020 memburuk. Jika pada tahun 2019 Kota Batam berada di peringkat 15, namun tahun 2020 melorot ke peringkat 23 nasional. Karenanya, IPM Kota Batam harus terus ditingkatkan dengan percepatan yang tidak kalah dengan

daerah lain di Indonesia, sehingga pembangunan manusia akan tetap menjadi prioritas pembangunan Kota Batam di masa mendatang.

Kinerja tata kelola pemerintahan juga menjadi hal krusial dalam menentukan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik setidaknya dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien dan selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah pada khususnya dan penyelenggara pemerintahan daerah pada umumnya. Ukuran kinerja tata kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Di tahun 2020, IRB Kota Batam sebesar 52,33 berpredikat CC atau terkategori cukup baik (memadai). Dengan predikat ini pemerintah Kota Batam masih harus meningkatkan kualitas tata kelolanya menuju predikat AA atau berkategori memuaskan dengan angka di atas 85.

Kinerja tatakelola pemerintahan lainnya juga bisa dilihat dari indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan publik penyelenggara pemerintahan daerah. IKM 64 perangkat daerah di Kota Batam tahun 2020 sebesar 81,61, angka yang perlu terus ditingkatkan seoptimal mungkin. Selain itu, variasi IKM antar pernagkat daerah cukup tinggi, terendah sebesar 63,8 dan tertinggi sebesar 93,0. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah Kota Batam harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sehingga kepuasan masyarakat meningkat dan merata di seluruh penyelenggara urusan pemerintahan.

Kinerja tata kelola keuangan daerah pun harus ditingkatkan. Pandemi covid-19 telah menyebabkan kontraksi Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar sehingga cukup mempengaruhi kondisi kemampuan keuangan daerah. Pengelolaan pajak daerah, sebagai sumber terbesar PAD harus ditingkatkan agar kemampuan fiskal daerah meningkat dalam membangun Kota Batam.

Permasalahan pembangunan daerah lintas sektor di Kota Batam juga menjadi permasalahan makro daerah. Pembangunan gender selama ini belum mendapatkan prioritas yang cukup dalam pembangunan daerah Kota Batam salah satunya ditunjukkan dengan pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Meskipun dalam tiga tahun terakhir, skor IDG di Kota Batam mengalami tren kenaikan, namun skor IDG tersebut masih lebih rendah dibandingkan IDG Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selain itu, isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan. Proses ini memerlukan suatu strategi yang menempatkan rakyat pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan. Memerankan rakyat sebagai aktor berarti memerankan perempuan dan laki-laki sebagai aktor. Filosofi ini yang kemudian diterapkan dalam program pembangunan melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Permasalahan pembangunan lintas sektor lainnya adalah permasalahan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dipercaya memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional dan daerah. IKM memiliki jumlah yang besar dan menyumbang penyerapan tenaga kerja industri yang sangat besar. Disamping itu IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional dan daerah yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Pandemi covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 di dunia dan awal tahun 2020 di Indonesia telah menyebabkan perekonomian terpuruk, tidak terkecuali

sektor IKM ini. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, maka pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata sebesar 1 persen per tahun atau sekitar 30 ribu unit usaha IKM per tahun dan peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 3 persen per tahun secara nasional. Pengembangan IKM di Kota Batam perlu mengacu pada sasaran nasional tersebut untuk mendukung pengembangan IKM secara nasional. Dari sisi kelembagaan, diharapkan terbentuknya sentra IKM serta UPT terkait yang mampu menyediakan penyuluh dan konsultan pengembangan IKM. Dari sisi fasilitas, peningkatan kompetensi SDM, fasilitas produksi dan permodalan perlu diupayakan untuk meningkatkan daya saing IKM di daerah.

Di samping itu juga memperhatikan posisi Wali Kota Batam sebagai *Ex-Officio* Kepala Badan Pengusahaan Batam sesuai amanat PP Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memberikan nilai lebih tersendiri dalam proses pembangunan Kota Batam.

B. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II tentang kondisi kinerja pemerintah Kota Batam berdasarkan capaian kinerja pelayanan pemerintahan di seluruh urusan pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan penunjang Tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan pembangunan yang harus diberikan solusi di periode pembangunan Tahun 2021-2026.

Permasalahan pembangunan daerah muncul dari adanya celah/*gap expectation* antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Celah tersebut juga dapat muncul antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut disusun. Untuk itu, dari hasil analisis pada Bab II akan dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kota Batam sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Pendidikan	1. Belum meratanya akses pendidikan yang tercermin dari: • Rasio Rombel terhadap murid jenjang SD dan SMP masih belum sesuai standar, khususnya pada sekolah negeri, yaitu 1:36 untuk SD dan 1:44 untuk SMP di tahun 2020, padahal standarnya adalah 1:28 untuk SD dan 1:32 untuk SMP. • Meskipun jumlah perpustakaan SD maupun SMP meningkat dalam 5 tahun terakhir, namun masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya; • Belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling; 2. Belum Optimalnya mutu pendidikan yang tercermin dari: • Relatif tingginya angka mengulang atau tidak naik kelas, baik di jenjang SD maupun SMP, yaitu masing-masing 0.477% dan 0,292%, khususnya di sekolah swasta; • Persentase sekolah dengan Akreditasi A jenjang PAUD, SD maupun SMP masih rendah, yaitu 45% jenjang TK, 34,51% SD/SLB, dan 44,7% jenjang SMPdi tahun 2020 • Persentase guru PAUD, SD dan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) sangat rendah, yaitu masing-masing 9,96%, 19,6%, dan 24,45% di tahun 2020. Pun demikian dengan persentase Guru PAUD, SD, dan SMP yang bersertifikasi, yaitu masing-masing 9,3%, 24,6%, dan 28,3 di tahun 2019 • Angka harapan lama sekolah (HLS) di Kota Batam juga masih relatif	1. Meningkatkan kapasitas daya tampung fasilitas pendidikan; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (perpustakaan, laboratorium, dst); 3. Peningkatan mutu, kedisiplinan dan peningkatan kesadaran pengabdian bagi guru/tenaga kependidikan; 4. Menyusun regulasi kemitraan sekolah dalam mengelola perpustakaan dengan komunitas-komunitas literasi, dan menyusun regulasi lainnya yang mendorong percepatan peningkatan urusan pendidikan di Kota Batam; 5. Meningkatan kualitas perencanaan bidang pendidikan di seluruh jenjang instansi terkait pendidikan; 6. Meningkatkan keterjangkauan dan validitas data kinerja penyelenggaraan pendidikan.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		rendah, yaitu pada tahun 2020 sebesar 13,16 tahun 3. Belum optimalnya tata kelola pendidikan: • Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja sama dengan komunitas literasi seperti forum perpustakaan desa/kelurahan atau forum perpustakaan taman bacaan masyarakat; • Beberapa data realisasi indikator pendidikan Kota Batam berbeda dengan data realisasi indikator yang sama versi Kemendikbud; • Dalam beberapa indikator penting, penggunaan nomenklatur indikator kinerja Kota Batam tidak sama dengan indikator pendidikan Kemendikbud skala kota/kab yang telah memiliki definisi operasional yang jelas, perhitungan dan angka realisasi yang jelas;	
2	Kesehatan	1. Belum tercapainya target pemenuhan HAM aspek kesehatan pada rasio bidan terhadap penduduk, yaitu sebesar 1:1.140 di tahun 2020, padahal targetnya sebesar 1:1.000. 2. Masih terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas dan pustu, di mana rasio puskesmas:penduduk sebesar 1:56.971 di tahun 2020, padahal standarnya sebesar 1:30.000. Sementara, jumlah Pustu Kota Batam rata-rata sebanyak 2 per puskemas, masih di bawah standar sebesar 3-5 pustu per puskesmas. Pun demikian dengan rasio posyandu:balita yang sebesar 1:282 di tahun 2020, padahal standarnya sebesar 1:100-200. 3. Masalah Gizi masyarakat, masih terdapat kasus stunting di wilayah Kota Batam, yaitu sebesar 8,70% di tahun 2020 4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	1. Penambahan fasilitas pelayanan kesehatan, baik sarana dan prasarana (puskesmas, pustu beserta sarana penunjangnya) maupun tenaga dan penunjang medis (dokter, perawat, bidan, kefarmasian, sanitarian, ahli gizi, keterapian fisik dan keteknisian medis) sehingga memenuhi standar pelayanan minimun yang telah ditetapkan perundangan 2. Meningkatkan peran serta/dukungan *stake holder* yang terkait kesehatan di Posyandu baik pemerintah, swasta dan layanan non pemerintah; 3. Peningkatan aktifitas di Posyandu sebagai upaya persuasif sehingga muncul ketertarikan para ibu untuk memeriksakan anaknya; 4. Menurunkan kasus stunting; 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Batam Kota Sehat

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Bina Marga dan Sumber Daya Air masih menyisakan beberapa target yang belum terealisasi 100 persen pada periode lalu (2016-2020), diantaranya adalah jalan dan jembatan/pelantar yang dibangun/ditingkatkan dan PJU yang yang dibangun atau direhabilitasi – baik di mainland maupun hinterlnad, penambahan alat berat ke-PU-an, pembangunan drainase maupun kebutuhan tebing pantai yang ditangani 2. Terget yang belum terealisasi tersebut di atas adalah kebutuhan infrastruktur daerah, baik di mainland dan hinterland yang dibutuhkan dan belum terpenuhi, baik karena keterbatasan anggaran maupun daya listrik dari PLN yang tersedia.	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran (menghindari target yang terlalu optimis atau terlalu pesimis) pembangunan infrastruktur daerah; 2. Mencari alternatif pembiayaan selain APBD; 3. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah, meliputi jalan, jembatan/pelantar, PJU, alat berat ke-PU-an, drainase, kebutuhan tebing pantai, maupun infrastruktur bina marga dan sumberdaya air lainnya.
		Cipta Karya antara lain memiliki permasalahan sebagai berikut: 1. Pelayanan sistem air limbah rumah tangga (*hinterland/*Rumah tangga yang berada diatas laut-pinggiran sungai) sangat rendah (10,74%), 2. Hingga tahun 2020 masih terdapat 3.189 rumah tangga (1,2%) yang belum terlayani air bersih dan sanitasi di wilayah mainland; 3. Penyediaan Sumber Air Baku di wilayah Hinterland 4. Hingga tahun 2020 masih terdapat 8.591 rumah tangga (58.37%) yang belum terlayani air bersih di wilayah hinterland; 5. Masih terdapat 13.137 rumah tangga (89,26%) yang belum memiliki sanitasi ; 6. Ketersediaan sumber air baku belum merata.	1. Potensi sumber penyediaan air bersih berkelanjutan dapat dilakukan dengan (i) Optimalisasi waduk/embung (dibantu teknologi modifikasi cuaca ketika kemarau) serta membendung air laut untuk menjadi waduk; (ii) Memperbanyak SWRO dengan mulai memikirkan *co benefit approach* dimana proses desalinasi selain mengeluarkan air tawar, juga menghasilkan garam yang bernilai ekonomi; dan/atau (iii) Menyediakan air bersih melalui teknologi *recycle water* skala kota. (iv) Penyambungan pipa bawah laut untuk suplai dari reservoir/waduk air baku ke rumah tangga. Semua alternatif tsb perlu dikaji lebih dalam, khususnya terkait kerjasama, pembiayaan dan investasi serta pengelolaannya; 2. Mencari alternatif pembiayaan selain APBD; 3. Penguatan sistem kontrol dalam pembangunan infrastruktur; 4. Perlu bersinergi dengan perangkat daerah yang lain, terutama terkait penyediaan sanitasi dalam rangka mewujudkan *open defecation free* di Kota Batam.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Tata Ruang antara lain memiliki permasalahan sebagai berikut: 1. Pengawasan dan pengendalian terkait penggunaan dan pemanfaatan ruang masih dilakukan manual, belum terintegrasi sehingga pelaksanaan pengawasan kurang efektif dan efisien; 2. Beberapa dokumen perencanaan dan pengendalian tata ruang belum tersusun. Setelah RTRW Kota Batam disahkan pada Mei 2021, maka di 5 tahun mendatang harus dilakukan penyusunan dokumen dan implementasi kebijakan turunannya, salah satunya adalah kebijakan pengendalian pemanfatan tata ruang.	1. Perlu adanya percepatan penyusunan dan penetapan beberapa dokumen perencanaan teknis tata ruang dan wilayah pasca pengesahan Perda RTRW Kota Batam; 2. Penguatan kualitas perencanaan agar tepat sasaran, target tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis, serta perumusan indikator *outcome* yang lebih *clear*, disertai definisi operasional dan rumus perhitungan yang konkret, sehingga tidak *misleading* dan benar-benar dapat merepresentasikan kemanfaatan dari *output-output* kegiatan yang telah dilakukan; 3. Pengawasan terkait penggunaan dan pemanfaatan ruang perlu menggunakan teknologi, sehingga kegiatan pengawasan lebih efektif, efisien serta data pengawasan lebih valid, akurat dan transparan, terlebih hal ini berkaitan dengan kontribusi terhadap peningkatan retribusi;
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Selama 2016-2020 rata-rata penurunan RTLH sebesar 6,66 persen, saat ini berdasarkan data BDT masih terdapat 235.397 kk yang perlu menerima bantuan RTLH; 2. Kebutuhan hunian vertikal (rusunawa) di Kota Batam sebanyak 618 *twin block* (lahan tersedia di Batamindo-Muka Kuning, Tanjung Ucang Rusun Putra Jaya, masing-masing lahan hanya cukup untuk 1 TW/54 unit); 3. Ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah susun masih terkendala; 4. Luas kawasan permukiman kumuh tahun 2017 adalah 2.327,11 Ha, sementara itu pengurangan luasan permukiman kumuh sejak tahun 2017 hingga di tahun 2020 sebesar 911,64 Ha (39,17%), sehingga masih menyisakan 1.415,47 Ha (60,83%) kawasan permukiman kumuh; 5. Ruang terbuka hijau (RTH) hanya pada pengelolaan, sehingga	1. Perlu melakukan validasi data BDT terkait data penerima bantuan yang benar-benar memenuhi kriteria penyaluran bantuan RTLH berdasarkan kriteria baku; 2. Mencari alternatif pembiayaan selain APBD (APBN, PPP, CSR); 3. Penguatan sistem kontrol dalam pembangunan infrastruktur; 4. Meningkatkan koordinasi dengan BP Batam dan Kantor pertanahan untuk menyediakan lahan pembangunan Rumah Susun; 5. Perlu dibuat regulasi yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan RTH dan peningkatan luasannya untuk mencapai proporsi ideal.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		pertambahan RTH sulit diwujudkan.	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Pada tahun 2020 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 64,22 persen, 2. Cakupan petugas linmas standar SPM adalah 1 orang pada 1 RT, saat ini di Kota Batam belum seluruh RT memiliki petugas linmas; 3. *Response rate* manajemen kebakaran Tahun 2020 sebesar 67,65% (target SPM 75%); 4. Persentase Aparatur/SDM pemadam kebarakan yang memiliki standar kualifikasi Tahun sebesar 39,35% (target SPM 80%); 5. Kapasitas mobil pemadam >3000-5000 liter wilayah manajemen kebakaran sebesar 33,33% (target SPM 90%);	1. Perlu cara-cara baru dan strategi yang bukan *business as usual* dalam pendekatan kepada masyarakat supaya mereka memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu; 2. Perlu optimalisasi sistem penegakan perda yang dibantu dengan pendekatan ICT sehingga meningkatkan coverage pemantauan untuk menindak pelanggaran Perda; 3. Perlu konsolidasi bersama BP Batam terkait dengan sinergitas kekuatan *rescue and firefighter resource*, sehingga menjadi suatu kesatuan yang memiliki sinergitas dalam mekanisme pelaksanaan pelayanan di Kota Batam, dengan memasukan BP Batam sebagai elemen kekuatan dalam pelayanan damkar, maka SPM damkar di Kota Batam dapat tercapai. 4. Ditengah keterbatasan sumber daya, dalam konteks periode kedepan tetap perlu diupayakan agar realisasi pencegahan konflik dalam masyarakat yang terselesaikan dapat meningkat >90 persen;
6	Sosial	1. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di mana tahun 2016 sebanyak 186.312, meningkat menjadi 217.647 di tahun 2019 dan 222.352 orang di tahun 2020. 2. PMKS didominasi fakir miskin yang umumnya berasl dari pekerja migran/pendatang yang tidak memiliki keahlian khusus. 3. Cakupan PMKS yang dilayani masih perlu ditingkatkan mengingat di tahun 2020 persentase PMKS yang dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya 95% dan yang direhabilitasi sebesar 80% 4. Pemberdayaan lembaga/organisasi masyarakat maupun potensi sumberdaya kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS juga perlu	1. Perlu adanya penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial; 2. Perlu melakukan pemberdayaan sosial dan menyediakan jaminan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi sosial; 3. Penyusunan regulasi jika diperlukan; 4. Perlu verifikasi data secara rutin; 5. Dalam menangani permasalahan PMKS, perlu dilakukan ocialma dengan Lembaga sosial keagamaan maupun Lembaga non pemerintah yang bergerak pada upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		ditingkatkan. Di tahun 2020 sekitar 60% potensi sumberdaya kesejahteraan yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS, sementara lembaga/organisasi masyarakat yang dapat diberdayakan sebesr 59%, belum memenuhi target. Beberapa hal yang mempengaruhi kondisi di atas antara lain: 1. Masih berfluktuatifnya tingkat kemiskinan dan pengangguran; 2. Belum optimalnya penanganan bencana sosial; 3. Belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial; 4. Masih rentan terhadap konflik sosial; dan 5. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); 6. Kurang optimalnya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).	6. Meningkatnya fungsi SLRT dalam pelayanan kepada masyarakat miskin.
7	Tenaga Kerja	1. Belum optimalnya koordinasi dengan pimpinan kawasan industri lintas sektoral tentang masalah penempatan dan kompetensi yang sudah dilatih dengan melakukan kerjasama/MoU; 2. Belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja lokal oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); 3. Masih kurangnya kompetensi SDM pencari kerja lokal. Pencari kerja yang terlatih dan bersertifikat kompetensi di tahun 2020 sebanyak 408, jauh dari target sebesar 1.700. 4. Belum tersedianya tenaga fungsional pengantar kerja; 5. Masih kurangnya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait tenaga kerja asing. 6. Masih relatif tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selama tahun 2016-2020, realisasi TPT masih di atas target dan cenderung	1. Perlunya regulasi yang mengatur tentang optimalisasi pemanfaatan tenaga kerja lokal 2. Perlu optimalisasi tata Kelola urusan tenaga kerja, meliputi penguatan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi, pelatihan dan pembinaan ketenagakerjaan; 3. Membangun jaringan data ketenagakerjaan (RPTK: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja); 4. Meningkatkan kualitas pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan dan sertifikasi. 5. Kerjasama dengan Bidang pendidikan terutama Sekolah Kejuruan untuk membuka Jurusan sesuai formasi yang dibutuhkan baik di Perusahaan maupun Lembaga lainnya; 6. Pengusulan rekruitmen tenaga fungsional pengantar kerja.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		meningkta. Di tahun 2019 TPT sebesar 8,31% meningkat menjadi 11,79%	7. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Luasnya cakupan indikator Indeks Pemberdayaan Gender yang berkaitan dengan keberhasilan di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi Kota Batam; 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Tahun 2020, Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 58,35. 3. Masih tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4. Masih rendahnya kapasitas SDM perempuan dalam upaya peningkatan mutu keluarga sejahtera. Persentase kapasitas SDM perempuan di Kota Batam masih 5% sepanjang tahun 2016-2020.	1. Perlu upaya yang koheren dan komprehensif antara lini terkait dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Laki-laki dan mutu pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi sebagai proyeksi peningkatan Indeks Pembangunan Gender Kota Batam; 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi dan politik; 3. Peningkatan sosialisasi, kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak-hak anak; 4. Meningkatkan sumber daya dan kompetensi perempuan melalui pelatihan keterampilan dalam upaya pencapaian keluarga mandiri dan sejahtera.
9	Pangan	1. Keragaman konsumsi pangan masih rendah, hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok yaitu beras; 2. Perlu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), hal ini berpengaruh terhadap prevalansi stunting di Kota Batam. 3. Persentase ketersediaan pangan masih perlu ditingkatkan mengingat di tahun 2020 bernilai 36%.	1. Perlu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA);
10	Pertanahan	1. Aset Pemko yang belum memiliki dokumen lahan sebanyak 476 persil dari 728 persil (65,4% belum selesai termasuk jalan); 2. 30 kampung tua dari total 37 kampung tua belum diselesaikan (81,1%);	1. Perlu meningkatkan tata Kelola urusan pertanahan, seperti mengoptimalkan fungsi perencanaanm pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan pendekatan kreatif dan inovatif, meninggalkan pola *business as usual* yang kurang responsive dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan pertanahan;
11	Lingkungan Hidup	1. Degradasi kualitas udara ambien akibat emisi sumber bergerak dan tidak bergerak, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor energi, transportasi dan pengelolaan limbah domestik;	1. Perlu dilakukan tata kelola urusan lingkungan hidup yang menyangkut usaha perlindungan dan pengelolaan LH dengan mengoptimalkan aspek-aspek; perencanaan, pemanfaatan,

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		2. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran bersumber dari kegiatan domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, Penataan lahan dsb. 3. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan (erosi, abrasi, sedimentasi, intrusi air laut), perhutanan ilegal, pemamfaatan hutan ilegal, penyalahan konservasi lindung. 4. Meningkatnya risiko bencana hidrometeoroligi akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana; 5. Masih ada sampah yang tidak dikelola dengan benar (dibakar, dibuang ke badan air, dan media lingkungan) sebesar 13,5%; 6. Jumlah armada sampah yang tidak sesuai dengan penambahan volume sampah sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk; 7. Penempatan TPS Permanen dan BIN container mengalami kesulitan karena berhubungan dengan lahan; 8. 86.8% rumah tangga belum melakukan pemilahan sampah; 9. Masih terbatasnya pengelolaan sampah berupa TPST 3R; 10. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan belum memadai; 11. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga masih sering kita temukan sampah dibuang dibadan air, sampah dibakar, hutan lindung dijadikan kavling, dll. 12. Penerapan sanksi hukum dari perda persampahan belum efektif; 13. Proses pengolahan sampah dihilir (TPA) masih dilakukan dengan metode konvensional (control landfill dan sanitary landfill), jika dikembangkan lagi sel baru untuk landfill, hal ini akan membuat usia TPA mencapai 8-10 tahun kedepan, sehingga untuk memperpanjang	pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum sebagai satu kesatuan yang sistematis dalam usaha menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup. Mengoptimalkan peran dan fungsi laboratorium untuk kegiatan uji emisi terhadap ESTB, ESB, udara ambien dan selanjutnya data dan informasi tersebut dikelola dan dievalausi sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan. 2. Mengoptimalkan kegiatan pengendalian lingkungan hidup, yang meliputi kegiatan pencegahan, penaggulangan dan pemulihan. Penyelesaian sengketa lingkungan untuk kasus-kasus yang mengakibatkan terjadinya kerugian lingkungan hidup harus diprioritaskan untuk ditangani, sehingga proses penaggulanagan dan proses pemulihan lingkungan hidup dapat berjalan efektif. 3. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan persetujuan lingkungan hidup dan pengawasan pengaduan lingkuangan hidup untuk upaya pencegahaan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan mengikuti ketententuan perataturan di bidang LH, dan apabila terdapat pelanggaran pidana di bidang lingkungan hidup, perlu dilakukan penegakan hukum. 4. Perlu dibatasi pengunaan bahan bakar fosil (batu bara, hydrocarbon, dll) dan mendorong untuk penggunaan energi terbarukan (solar cell, tenaga air, dll) ,pengendalian penggunaan CFC, adanya kegiatan penghijauan secara massive, pembatasan penggunaan kantong plastic, penerapan eco office, mass transport, aplikasi kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim), dll 5. Perlu dilakukan kampanye, sosialisasi, pembentukan komunitas/kampung peduli lingkungan, sekolah adiwiyata, saka kalpataru, pelatihan/workshop pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat, dan aksi-aksi lainnya.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		usia TPA perlu dilakukan teknologi pengolahan sampah dengan konsep zero waste dan ramah lingkungan.	6. Dengan pertumbuhan penduduk yang setiap tahun meningkat, masyarakat harus diberi pemahaman untuk perlu dilakukan pemilahan sampah sejak dari rumah masing-masing, sehingga membantu mengurangi volume sampah yang akan dibawa ke TPA. Hal ini akan berdampak pada efisiensi anggaran sejalan dengan berkurangnya volume sampah yang diangut ke TPA. Perlu dikaji kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang efektif, sehingga dapat dibuat suatu skema untuk pengadaan dan pemeliharaan armada. 7. Pengelolaan sampah dihilir (TPA) dengan melibatkan pihak ketiga, melalui pola kerjasama yang diatur dalam peraturan yang berlaku. 8. Penempatan Bin Container pada suatu lokasi yang secara teknis memadai, sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan dan social pada saat operasional. Pedekatan yang perlu dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat di sekitar dalam penentuan titik Bin Container 9. Perlu dilakukan edukasi (workshop, sosialiasi, seminar, dll) secara berkesinambungan menyangkut pentingnya melakukan pemilhan sampah, sehingga armada mengangkut sampah yang sudah terpilah. 10. Dukungan anggaran dari APBN, APBD dan CSR diperlukan untuk pengadaan dan peremajaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 11. Perlu ditambah jumlah TPST 3R yang lokasinya berada di setiap kecamatan, sehingga melalui TPST 3R ini, dapat mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan KTP dan persentase penduduk yang memiliki KK belum mencapai target 100%. Tahun 2020, nilai keduanya masing-masing 97,9% dan 94,5%. Selain itu, meskipun cakupan penerbitan akte kelahiran	1. Perlu menyediakan sistem untuk pendataan administrasi kependudukan yang lebih cepat, tepat, valid dengan biaya murah; 2. Sistem yang tersentralisasi menjadi desentralisasi;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		telah mencapai target, namun angkanya masih perlu ditingkatkan karena di tahun 2020 sebear 89,1%. Beberapa penyebab kondisi tersebut di antaranya adalah: 1. Arus migrasi masuk penduduk ke Kota Batam yang tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk ber-KTP Kota Batam dan penduduk non permanen di Kota Batam. Hal ini yang menyebabkan selalu terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara data SIAK dengan data BPS; 2. Ketergantungan logistic perekaman dan pencetakan (blanko KTP EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah; 3. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM jemput bola menyebabkan proses pelayanan dokumen administrasi kependudukan terhambat, dalam menjangkau daerah terpencil/pelosok (pulau di *hinterland*); 4. Kompetensi SDM dalam hal memberikan pelayanan masih belum merata. Sehingga perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif, untuk meminimalkan terjadinya kasus pungli di area pelayanan.	3. Penambahan sarana prasarana perekaman KTP; 4. Perlu peningkatan kompetensi dan Integritas SDM serta peningkatan kuantitas SDM.
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Tingginya minat pencari kerja masuk ke Kota Batam meningkatkan jumlah pasangan usia produktif (PUS) yang rentan terhadap penambahan angka kelahiran; Banyaknya PUS tahun 2020 sebanyak 233.636 dan 84,02% adalah peserta KB aktif. 2. Luasnya keterbukaan akses informasi dan teknologi yang dilatarbelakangi oleh letak geografis Kota Batam sebagai wilayah border/ perbatasan rentan terhadap peningkatan kenakalan remaja yang berdampak meningkatkan perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan pernikahan pada usia dini; 3. Belum optimalnya koordinasi antar PD untuk menurunkan angka	1. Optimalisasi pelayanan dan penyuluhan melalui edukasi Program Keluarga Berencana bagi pasangan usia produktif terkhusus bagi Pasangan Usia Subur (PUS); 2. Meningkatkan sosialisasi program generasi berencana dan kesehatan reproduksi remaja dalam upaya mencegah terjadinya perilaku seks bebas pada remaja, penyalahgunaan narkoba dan menghindari pernikahan pada usia dini; 3. Perlunya koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam penyediaan data keluarga miskin yang akurat setiap tahun agar pelayanan yang diberikan tepat sasaran;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Keluarga Pra Sejahtera dan Pra Sejahtera I; 4. Terbatasnya jumlah penyuluh KB/ petugas lapangan KB sebagai koordinator pelaksanaan program bangga kencana di lapangan.	4. Program Bangga Kencana sebagai salah satu program prioritas nasional memerlukan tenaga PKB/PLKB sebagai tenaga lini lapangan yang defenitif untuk mensukseskan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kelurahan/Kecamatan se-Kota Batam.
14	Perhubungan	1. Pada tahun 2020 kebutuhan 11 koridor Trans Batam dan penambahan 130 armada belum tercapai; 2. Pengoperasian *feeder* untuk mendukung *integrated transportation system* belum terlaksana; 3. Belum optimalnya sistem pengelolaan perparkiran; 4. Belum optimalnya Pengujian terhadap Kendaraan wajib uji; 5. Belum optimalnya sarana dan prasarana Perhubungan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas; 6. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi ke wilayah kepulauan (*hinterland*); 7. Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional Dinas Perhubungan; 8. Belum terbentuknya moda transportasi yang modern di Kota Batam.	1. Melakukan pengadaan Bus Trans Batam dengan mencari pembiayaan selain APBD, dapat melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Swasta atau memanfaatkan dana CSR lokal; 2. Menata kembali trayek-trayek angkutan yang ada di Kota Batam*;* 3. Memaksimalkan transaksi non tunai; 4. Menambah line Pengujian (Lahan, Gedung dan Alat), 5. Mengadakan Fasilitas Uji KIR (Uji KIR Kliling, peremajaan alat uji KIR); 6. Menyusun Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok); 7. Menyediakan sarana dan prasarana Perhubungan yang lengkap dan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan keselamatan berlalulintas 8. Peremajaan sarana angkutan laut 9. Penambahan pembangunan dermaga di wilayah hinterland 10. Menambah jumlah kendaraan operasional dan Peremajaan kendaraan operasional 11. Perlu adanya Perda yang mengatur moda transportasi.
15	Komunikasi dan informatika	1. Belum optimalnya Penerapan *e-Government* atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online sebesar 73, di bawah target yang sebesar 84 di tahun 2020. 2. Belum adanya rencana induk arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Batam; 3. Kurangnya SDM pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1. Mengoptimalkan penerapan Kebijakan Daerah (Perwako no 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; 2. Menyusun Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Batam; 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pengelola TIK disertai peningkatan kompetensinya; 4. Mengoptimalkan peran Perangkat Daerah se-Kota Batam dalam diseminasi informasi publik dan informasi pembangunan;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		baik secara kualitas maupun kuantitas; 4. Diseminasi informasi publik dan informasi pembangunan secara digital masih belum optimal; 5. Belum optimalnya peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk ikut mendesiminasikan informasi; 6. Belum optimalnya penyerapan opini dan aspirasi publik dari berbagai media; 7. Belum optimalnya sarana dan prasarana jaringan internet di Kota Batam khususnya wilayah Hinterland;	5. Pendampingan dan bimbingan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); 6. Mengoptimalkan peran dan sosialisasi terhadap kanal-kanal pengaduan masyarakat (SPAN LAPOR); 7. Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan internet di Kota Batam khususnya wilayah Hinterland.
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah koperasi memenuhi ketentuan masih jauh di bawah jumlah koperasi yang ada. Tahun 2020, dari 899 unit koperasi yang ada, sebanyak 235 unit saja yang aktif. Hanya ada 85 koperasi yang memiliki NIK. Untuk UMKM, selama kurun waktu 2016-2020, belum ada jumlah sentra UMKM yang dibentuk. Beberapa hal yang menyebabkannya antara lain: 1. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	1. Perlu di lakukan peningkatan kapasitas Aparat Pembina melalui Pelatihan/BIMTEK dan Uji Khompetensi Perkoperasian; 2. Perlu di lakukan peningkatan kapasitas Pengurus,Pengawas dan Pengelola Koperasi melalui Pelatihan/BIMTEK dan Uji Kompetensi Perkoperasian; 3. Melakukan Tindakan Hukum kepada Koperasi yang tidak aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Memfasilitasi Kemitraaan dan Pembiayaan bagi Koperasi dengan Koperasi dan Pelaku Usaha Lainya; 5. Menyiapkan regulasi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; 6. Perlu adanya Penambahan petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan tenaga Pendamping; 7. Perlu dilakukan Sertifikasi Koperasi dan Pendaftaran Nomor Induk Koperasi (NIK) 8. Pemberdayaan Gerakan Koperasi /DEKOPINDA.
		2. Belum optimalnya Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi	1. Perlu dilakukan Pelatihan dan Sertifikasi Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Aparatur; 2. Perlu dilakukan Pelatihan Pengelolaan simpan pinjam berbasis kompetensi.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		3. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1. Perlu di lakukan peningkatan kapasitas pengawas koperasi. Sertifikasi Pengawas Koperasi; 2. Penunjukan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi
		4. Masih minimnya Pembinaan bagi Pelaku Usaha Mikro dari sisi Pemanfaatan serta Pengembangan akses pemasaran dan promosi.	1. Peningkatan Kapasitas kepada Pelaku Usaha Mikro Binaan; 2. Memfasilitasi Legalitas Usaha dan Standarisasi Mutu Produk; 3. Fasilitasi akses pemasaran/Promosi; 4. Pengembangan jaringan Usaha dan Kemitraaan; 5. Pemanfaatan Ekosistem Digital dalam Pemasaran; 6. *Marketingpoint* Produk Usaha Mikro.
		5. Masih Minimnya Data Pelaku Usaha Mikro	Penyiapan Database Usaha Mikro secara Online
		6. Belum Optimalnya PLUT KUMKM Kota Batam dalam Fasilitasi Layanan Pendampingan	1. Perlunya Pengembangan Pemanfaatan gedung sebagai rumah KUMKM 2. Penambahan tenaga konsultan pendamping. 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung 4. Menjadikan PLUT KUMKM menjadi Media Centre pengembangan KUMKM
17	Penanaman Modal	Realiasi penanaman modal/investasi berfluktuasi yang berarti sangat rentan dipengaruhi faktor penyebabnya. Tahun 2016 – 2018 persentase realiasi investasi meningkat dan mencapai 42%, namun tahun 2019 menurun menjadi 39%. Tahun 2020 kembali meningkat, namun belum melebihi kondisi tahun 2018. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: 1. Dari sisi eksternal, terdapat beberapa pemohon yang mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan (sertifikat, penguasaan lahan, terutama di IMB) sehingga proses perizinannya terkendala. Sedangkan dari sisi internal, masih terdapat kekurangan SDM, misalnya dalam pengurusan izin IMB perlu petugas survei ke lapangan sedangkan jumlah petugas yang dimiliki masih terbatas. Selain itu, aplikasi yang	1. Perlu adanya koordinasi untuk mensinergikan antara peraturan pusat dan daerah; 2. Penyederhanaan peraturan daerah yang ada; 3. Pemberiaan insentif-disinsentif sesuai perda; 4. Perlu ditingkatkan pengawasan dan penindakan; 5. Koordinasi kepada dinas terkait dalam penyediaan infrastruktur perkotaan yang mendukung investasi; 6. Tim Teknis ditetapkan setiap Tahun;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		mendukung pelayanan perizinan yaitu aplikasi OSS (One Single Submition) baru efektif digunakan pada triwulan 4 tahun 2019 sehingga banyak terjadi pelaku usaha mendaftarkan (baru/daftar ulang) dan melaporkan kegiatan usahanya setelah aplikasi OSS efektif digunakan; 2. Belum terintegrasinya data kualifikasi kebutuhan tenaga kerja lokal untuk dipromosikan sebagai peluang investasi di daerah; 3. Belum tersedia RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) dan peta potensi investasi daerah; 4. Tingkat keamanan dan kepastian hukum dalam hal pemberian insentif di daerah; 5. Perlu optimalisasi fungsi tim teknis dalam penyelenggaraan PTSP;	
18	Kepemudaan dan Olahraga	Realiasi prestasi/capaian kepemudaan, jumlah prestasi olahraga, budaya olahraga cenderung sangat berfluktuatif. Bahkan, tahun 2020 hampir semua target kinerja urusan kepemudaan dan olahraga tidak mencapai target. Beberapa faktor penyebab antara lain: 1. Belum terpetakannya kondisi partisipasi pemuda di Kota Batam dalam lapangan dan kesempatan kerja; 2. Belum terpetakannya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan; 3. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan; 4. Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian di Kota Batam; 5. Masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan; 6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Kota Batam yang	1. Mengoptimalkan kualitas perencanaan (kesesuaian target sasaran, indicator sebagai tolok ukur kinerja dengan program dan kegiatan yang dilakukan); 2. Melakukan sinergi Bersama Dinas Pariwisata untuk menyelenggarakan event olahraga tingkat kota maupun tingkat nasional yang bernilai ekonomi bagi peningkatan pendapatan daerah; 3. Melakukan pembinaan kepada Cabor-cabor untuk meningkatkan prestasi; 4. Memberikan pemberdayaan dan pembinaan kepada atlit disabilitas; 5. Melakukan sinergi dengan Disnaker Kota Batam dalam pelaksanaan pembinaan pelatihan tenaga kerja usia muda; 6. Pelatihan dan pembinaan wirausahawan muda; 7. Melakukan sinergi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam dalam pembinaan Cabor untuk meningkatkan prestasi;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		melakukan kegiatan olahraga; 7. Belum adanya sarana olahraga yang berstandar nasional; 8. Kurangnya lahan untuk sarana olahraga di beberapa kecamatan.	8. Membangun sarana olahraga berstandar nasional melalui peluang pembiayaan APBN dan APBD
19	Statistik	1. Ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Bidang statistik belum maksimal pengelolaan data diperangkat daerah masih rendah sehingga *supply* masih dinamis; 2. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database; 3. Rendahnya SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaan data statistik sektoral; 4. Beberapa Produsen Data (Organisasi Perangkat Daerah) belum mengelola data secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel sehingga berdampak belum optimalnya distribusi data kepada Wali Data.	1. Mengoptimalkan peran Forum Satu Data dalam memproduksi data statistik sektoral; 2. Mengembangkan sistem *open data* dengan SDM yang berkualitas; 3. Perlu rekruitmen pengelola data statistik sektoral dan peningkatan kualitas SDM Pranata Komputer dan Statistisi; 4. Komitmen Produsen Data dalam mengelola dan menyediakan data yang berkualitas dan tepat waktu.
20	Persandian	Realisasi kinerja urusan ini, yaitu persentase informasi berkualitas selama tahun 2016-2020 meningkat, namun selalu berada di bawah target dan bernilai relatif rendah. Di tahun 2020, nilai indiktor tersebut sebesar 20%. Beberapa faktor penyebab adalah: 1. Belum optimalnya standar dan kebijakan tentang keamanan informasi; 2. Kurangnya SDM Fungsional Sandiman dan kurangnya peralatan sandi sehingga operasional sandi tidak bisa berjalan dengan maksimal; 3. Permasalahan VA (*vurnerability assesment*) pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi. 4. Permasalahan Kontra Penginderaan (*Sterilisasi*) yang berkaitan dengan pengamana ruangan pimpinan yang perlu disterilkan dari upaya-upaya penyadapan informasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab masih dilakukan.	1. Membuat payung hukum Perwako tentang Standar Keamanan Informasi terhadap Pemerintah Kota Batam 2. Meningkatkan koordinasi dengan BSSN untuk kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan kompetensi SDM dari Perangkat Daerah, kegiatan terkait pengamanan informasi dan pengamanan ruang pimpinan;
21	Kebudayaan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya tetap selama tahun 2016-2018, yaitu sebanyak 6 event. Tahun 2019 sempat meningkat menjadi 8 event,	1. Urusan kebudayaan perlu disinergikan dengan unsur pariwisata agar produk dari berbagai unsur kebudayaan yang ada di Kota Batam

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		namun tahun 2020 turun drastis menjadi 2 event. Beberapa penyebab antara lain: 1. Urusan kebudayaan cenderung belum disinergikan dengan aspek pariwisata; 2. Minimnya Anggaran; 3. Belum optimalnya implementasi Perda No. 01 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu;	dapat memiliki nilai tambah ekonomi khususunya bagi para penggiat dan pelestari budaya, umumnya bagi perkembangan pariwisata Kota Batam. Jika telah terbentuk sinergi antara kebudayaan dengan menciptakan produk budaya sehingga permintaan pasar untuk menikmati produk budaya, maka kelestarian eksistensi nilai-nilai budaya dengan sendirinya akan menjadi keniscayaan.
22	Perpustakaan	Layanan perpustakaan masih relative rendah, meskipun kecenderungan indikator kinerjanya, yaitu persentase pengunjung perpustakaan per tahun, meingkat. Di tahun 2019, nilai indikator tersebut sempat mencapai 13,15%, meningkat dari angka tahun 2016 yang sebesar 6,44%. Di tahun 2020, nilai indikator menurun kembali ke nilai 5,29%. Faktor yang mempengaruhi antara lain: 1. Belum optimalnya regulasi tentang penyelenggaraan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca; 2. Penyelenggaraan perpustakaan belum mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang meliputi: pengembangan koleksi, SOTK, sarana dan prasarana, anggaran, layanan, bahan perpustakaan, tenaga perpustakaan, kerja sama, penyelenggaraan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan; 3. Perpustakaan yang sudah ada sebagian besar belum menginput data melalui aplikasi Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional; 4. Perpustakaan Umum Kota belum memiliki prasarana gedung permanen; 5. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan;	1. Perlu melengkapi regulasi tentang penyelenggaraan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca yang mengatur lintas sektor terkait dengan peningkatan literasi masyarakat di Kota Batam; 2. Pelaksanaan urusan perpustakaan perlu mengacu pada standar nasional; 3. Perlu optimalisasi fungsi pembinaan 4. Pembangunan gedung perpustakaan; 5. Pengadaan mobil perpustakaan keliling.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		6. Kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau daerah kepulauan (*hinterland*); 7. Masih rendahnya pemahaman pengelola perpustakaan yang sesuai standar nasional; 8. Perpustakaan belum dijadikan tempat pelestarian yang bernilai sejarah lokal atau *the new city landmark*; dan 9. Perpustakaan belum dijadikan kebutuhan primer dalam membangun pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat.	
23	Kearsipan	Penyimpanan arsip masih dilakukan di tempat masing-masing dan kegiatan penyusutan arsip belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini dikarenakan: 1. Belum optimalnya pembinaan kearsipan; 2. Belum optimalnya pengelolaan arsip; 3. Sarana dan Prasarana kearsipan belum sesuai standar; 4. Belum tersedianya SDM yang memadai.	1. Menjalankan regulasi terkait kearsipan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan;
24	Kelautan dan Perikanan	1. Masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll). 2. Pemasaran hasil perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir; 3. Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan; 4. Pencemaran perairan umum dan laut;	1. Penyediaan sarpras perikanan budidaya-tangkap; 2. Penyediaan pakan ikan-induk ikan dan sarana pendukung lainnya; 3. Peningkatan kapasitas tenaga pendamping dan kelembagaan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. 4. Koordinasi antar sektor yang terkait dalam menyelesaikan persoalan terkait pencemaran; 5. Pendampingan, pembinaan dan pemberdayaan pemasaran hasil perikanan sehingga terintegrasi di hulu dan di hilir; 6. Meningkatkan konsumsi ikan per kapita untuk mendukung program pusat (meningkatkan produksi nelayan untuk mengimbangi peningkatkan konsumsi tersebut); 7. Pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap usaha produksi perikanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
25	Pariwisata	1. Penurunan kunjungan wisatawan sebagai dampak dari Covid-19; 2. Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan; 3. Masih perlu peningkatan kualitas SDM bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam mendorong peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; 4. Masih terbatasnya promosi dan pemasaran Pariwisata dengan menggunakan berbagai Media; 5. Masih belum terintegrasinya kegiatan kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan ke dalam upaya pengembangan pariwisata Kota Batam	1. Sektor pariwisata perlu meyakinkan wisatawan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan publik untuk berkunjung ke Kota Batam. 2. Perlu adanya sinergi antara sektor pariwisata dengan sektor-sektor pendukung lainnya secara terintegrasi, seperti sektor olahraga, sektor seni budaya, sektor usaha mikro dan kecil, sektor industri kreatif dan sektor lainnya yang dapat menjadi pengungkit sektor pariwisata Kota Batam; 3. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, maka perlu peningkatan inisiatif SDM di bidang pariwisata untuk meningkatkan kapasitas secara mandiri melalui sumber-sumber pembelajaran informal dengan memanfaatkan keterbukaan akses memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi melalui buku bacaan atau melalui daring mengingat ilmu pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan ilmu populer yang bisa dipelajari secara mandiri; 4. Perlu pengembagan pariwisata yang diarahkan ke minat “halal tourism”. 5. Perlu integrasi kegiatan kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dalam upaya pengembangan pariwisata Kota Batam.
26	Pertanian	1. Masih rendahnya kontribusi komoditas pertanian dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB; 2. Sangat rendahnya Nilai Tukar Petani; 3. Rendahnya SDM dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian; 4. Minimnya lahan pertanian; 5. Intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi; 6. Masih panjangnya mata rantai pemasaran hasil produk pertanian;	1. Menggalakkan budaya urban farming di masyarakat, minimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (subsisten); 2. Memberdayakan masyarakat melalui cara-cara penanaman baru dengan orientasi optimalisasi lahan; 3. Membuat pilot project pertanian kota berbasis teknologi yang sesuai dengan kondisi Kota Batam melalui pemanfaatan lahan tidur, bertujuan untuk mendiseminasikan teknologi pertanian dalam mengajak masyarakat untuk bertani di lahan masing-masing dengan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		7. Masih tingginya ketergantungan atas pasokan bahan pokok dari luar Kota Batam; 8. Belum terwujudnya sentra industri pertanian;	dukungan teknologi pertanian yang murah dan efektif; 4. Menentukan kawasan khusus pertanian; 5. Mengefektifkan fungsi koperasi atau wadah bagi petani dalam pemasaran hasil produk pertanian; 6. Menyiapkan *grand design* pertanian di Kota Batam.
27	Perdagangan	1. Kuantitas SDM dan sarana prasarana kemetrologian perlu ditingkatkan; 2. Pedagang kaki lima masih perlu ditata secara proporsional; 3. Rantai distribusi komoditas tertentu tidak efisien sehingga berdampak pada mahalnya harga komoditas tersebut; 4. Belum adanya aplikasi sistem jaringan perdagangan; 5. Belum tertibnya distribusi LPG bersubsidi; 6. Belum optimalnya penyediaan sarana distribusi perdagangan; 7. Minimnya produk IKM ekspor unggulan Kota Batam.	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan Sarpras kemetrologian; 2. Penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima; 3. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan distribusi komoditas tertentu yang tidak efisien; 4. Membangun sistem aplikasi jaringan perdagangan; 5. Pembinaan para pelaku usaha gas LPG; 6. Peningkatan sarana distribusi perdagangan melalui mekanisme APBN; 7. Peningkatan pembinaan usaha produk ekspor unggulan, misi dagang dan peningkatan citra produk ekspor;
28	Perindustrian	1. Perlunya peningkatan pertumbuhan IKM dalam rangka menyokong pertumbuhan ekonomi; 2. Rantai pasok industri di Kota Batam belum banyak melibatkan IKM setempat sebagai salah satu bagian dalam rantai pasok industri di Kota Batam; 3. IKM di Kota Batam didominasi oleh IKM pangan dan kerajinan; 4. IKM belum memiliki daya saing karena masih lemahnya standar kualitas, permodalan dan juga keselamatan produksi; 5. Belum memadainya ketersediaan SDM IKM yang kompeten dan tersertifikasi; 6. Belum tersedianya *grand design* pembangunan Industri Kota Batam.	1. Pelatihan-pelatihan SDM yang meningkatkan kualitas para pelaku IKM; 2. Memperbanyak bantuan fasilitasi mesin/Alat peningkatan teknologi produksi; 3. Berupaya menghubungkan IKM ke dalam rantai pasok industri di Kota Batam didukung dengan regulasi; 4. Melakukan pendampingan dan pembinaan agar IKM dapat kompeten dan tersertifikasi; 5. Mendorong IKM agar terkoneksi ke dalam *e-commerce;* 6. Pemutakhiran Data; 7. Penyelesaian rencana pembangunan industry Kota Batam yang sejalan dengan RPIK Provinsi dan RIPIN Nasional

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
29	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1. Masih lemahnya kualitas indikator kinerja *outcome* dan *impact* yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja perangkat daerah Kota Batam; 2. Masih lemahnya kelengkapan dan validitas data realisasi indikator kinerja pembangunan; 3. Pelaksanaan evaluasi baru sebatas realisasi anggaran, belum melakukan evaluasi dengan pendekatan *gap analysis* yang membandingkan (1) realisasi anggaran kegiatan dengan output fisik kegiatan; (2) realisasi anggaran per program dengan masing-masing indikator *outcome* program; (3) realisasi indikator *impact* dengan realisasi outcome program nya; 4. Persentase pencapaian sasaran daerah pada tahun 2019 hanya sebesar 70 persen; 5. Masih lemahnya data dan informasi yang menggambarkan kinerja penelitian dan pengembangan di Pemerintah Kota Batam; 6. Belum optimalnya anggaran di bidang Penelitian dan Pengembangan.	1. Masih perlu ditingkatkan kualitas fungsi pembinaan terhadap perangkat daerah terkait kualitas perencanaan di seluruh perangkat daerah Kota Batam (ketepatan perencanaan kegiatan dengan permasalahan, ketepatan arsitektur kinerja OPD, menjamin kualitas pelaksanaan monev di masing-masing OPD, dst); 2. Perlu dilaksanakannya sistem evaluasi kinerja yang holistik pada setiap jenjang dokumen perencanaan yang berfokus pada evaluasi anggaran kegiatan, *output* fisik, *outcome* program dan *impact* sasaran daerah; 3. Perlu digunakannya hasil-hasil evaluasi sebagai basis menyusun perencanaan; 4. Pelaksanaan pendekatan penyusunan perencanaan yakni tematik, holistik, integratif, spasial perlu digunakan secara optimal; 5. Menyusun regulasi terkait Sistem Inovasi Daerah; 6. Perlu adanya data terintegrasi di Pemerintah Kota Batam; 7. Penguatan Tim Satu Data; 8. Penguatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka atau Lembaga Penelitian lainnya; 9. Penguatan institusi/ kelembagaan dan alokasi dana Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Kota Batam.
30	Keuangan	1. Penurunan realisasi pajak dan retribusi daerah mulai tahun 2020 akibat adanya krisis ekonomi dan kesehatan dampak dari pendemi Covid 19; 2. Belum optimalnya pemetaan dan penyediaan data dukung dalam menghitung potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di masing-masing OPD penghasil; 3. Belum optimalnya mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai target yang telah ditetapkan;	1. Pentingnya memperkirakan target realisasi pendapatan daerah yang lebih cermat, terutama untuk PAD; 2. Pentingnya untuk melakukan kajian atas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berdasarkan potensi daerah untuk meningkatkan kualitas kemandirian keuangan daerah; 3. Penguatan regulasi di bidang optimalisasi pajak dan retribusi daerah; 4. Perlu inovasi, digitalisasi pendapatan daerah dan strategi serta sistem yang tepat sasaran (*tapping box,* QRIS dll);

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		4. BUMD belum berkontribusi terhadap capaian pendapatan daerah.	5. Penguatan kapasitas dan kelembagaan BUMD melalui penempatan komisaris dan direksi yang kompeten dan profesional dan pengalokasian anggaran yang memadai; 6. Melakukan kajian terhadap potensi bisnis yang dapat dikelola oleh BUMD.
31	Pengawasan	1. Kuantitas dan kualitas kompetensi SDM APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan tenaga fungsional baik sebagai auditor internal maupun tenaga P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah) yang masih kurang sehingga tidak dapat memenuhi standar operasional pengawasan internal yang memadai; 2. Penerapan predikat Zona Integritas belum memenuhi standar dari Kementerian terkait (Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)) ; 3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.	1. Perlunya penambahan SDM APIP dan tenaga fungsional sebagai auditor internal maupun tenaga P2UPD dan peningkatan pelaksanaan bimtek bagi SDM Inspektorat; 2. Perlunya dukungan IT dan kualitas SDM yang memadai untuk penerapan fungsi pengawasan internal yang memadai; 3. Perlunya melakukan pemetaan kompetensi SDM aparatur pengawasan internal Pemerintah; 2. Perlunya kebijakan beserta penerapannya yang serius untuk mengimplementasikan zona integritas dan pemantapan SPIP di semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
32	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1. Pembiayaan pendidikan dan pelatihan masih bertumpu sepenuhnya dari APBD, idealnya diimbangi dengan peluang pembiayaan dari APBN; 2. Pemenuhan kebutuhan ASN secara kuantitas dan kualitas belum optimal; 3. Masih belum adanya Standar Kompetensi Jabatan untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional; 4. Hak Pengembangan Kompetensi bagi PNS yang belum terpenuhi.	1. Perlu memanfaatkan peluang pembiayaan APBN; 2. Perlu optimalisasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait dalam mensiasati kekurangan SDM; 3. Perlu adanya Standar Kompetensi Jabatan untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional; 4. Berupaya memenuhi hak pengembangan kompetensi bagi PNS sesuai dengan PP 11/2017;

Sumber: Hasil Analisis

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam pembangunan daerah, isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan (isu) internal pembangunan daerah maupun isu eksternal. Isu internal pembangunan yang telah teridentifikasi sebelumnya (sub bab 4.1) merupakan isu dari hasil evaluaasi kinerja Kota Batam pada periode sebelumnya (2016-2020). Dengan demikian, isu strategis dalam kategori ini dirumuskan dari permasalahan (umum) kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, geografi dan kewilayahan, sumberdaya penyelenggaran pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, kelompok isu strategis kedua adalah isu yang berasal dari pihak eksternal daerah/Kota Batam, baik yang berasal dari kebijakan pemerintah daerah sekitar/tetangga, Provinsi Kepulauan Riau, nasional, maupun internasional. Isu eksternal yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan/kegagalan pembangunan Kota Batam di masa mendatang, baik positif (dikenal sebagai peluang) maupun negatif (dikenal sebagai tantangan), dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Peluang bisa menjadi isu strategis karena kondisi tersebut dapat dimanfaatkan dan berdampak besar bagi pembangunan Kota Batam. Sementara itu, tantangan pun bisa menjadi isu strategis yang menjadi penghambat keberhasilan pembangunan jika tidak diselesaikan dan/atau diantisipasi. Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa isu strategis Kota Batam dibangun dari hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, arahan dari dokumen perencanaan acuan – seperti RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, RPJPD Kota Batam 2005-2025, RTRW Kota Batam 2021-2041, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Batam 2021-2026 – maupun agenda/isu-isu global/internsional.

Gambar 4. 1 Komponen Pembentuk Isu Strategis Kota Batam

Telaah terhadap isi-isu internasional (global) menghasilkan isu-isu tingkat global yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan Pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026. ***Pertama,*** isu terkait pandemi Covid-19 beserta dampaknya. Hingga pertengahan 2021, dunia masih menghadapi tantangan munculnya kasus varian-varian baru covid-19 yang berakibat pada semakin tingginya ketidakpastian kapan pandemi berakhir serta semakin tingginya kebutuhan sumberdaya untuk mengupayakan penanganannya, baik di masa maupun adaptasi pasca pandemi ini. ***Kedua,*** kebutuhan pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan upaya lain mengatasi perubahan iklim, serta tuntutan implementasi pembangunan berkelanjutan/*sustainable development*. Kerusakan lingkungan hidup secara global telah berdampak pada perubahan iklim yang menuai berbagai bencana yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang. Pimpinan negara-negara di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai 8 Millenium Development Goals (hingga tahun 2015) dan dilanjutkan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2030. Seluruh komponen negara, tidak terkecuali seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus berkontribusi dalam pencapaian SDGs di daerahnya masing-masing. Isu

internasional ***ketiga*** adalah globalisasi ekonomi yang terlihat dari tuntutan perdagangan bebas. Indonesia pun dituntut terbuka dan bersaing dalam perdagangan antar negara, baik di ASEAN, Asia, bahkan dunia. Implikasinya adalah seluruh pemerintah daerah juga dituntut meningkatkan daya saing daerahnya. Isu internasional ***keempat*** adalah disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah memunculkan revolusi industri 4.0 di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Tuntutan pemanfaatan TIK dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan publik, semakin tinggi dan harus diakomodasi oleh pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunannya.

Telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 menghasilkan isu-isu tingkat nasional yang harus dipertimbangkan dan selaras dengan kebijakan Pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026. Isu-isu strategis dalam RPJMN antara lain: (1) Urgensi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan; (2) Permasalahan bidang tenaga kerja, investasi, dan perdagangan di Indonesia berakar dari lemahnya tata kelola pemerintahan dan institusi. Regulasi pemerintah di bidang ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Keteganakerjaan dan Undang-Undang Cipta Karya menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di seluruh daerah di Indonesia. Pun demikian dengan regulasi investasi dan perdagangan yang menuntut debirokratisasi akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam pengimlementasiannya; (3) Penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia unggul untuk menyelesaikan permasalahan rendahnya akses dan kualitas pendidikan, capaian indikator kesehatan Indonesia yang masih rendah dan tertinggal dibandingkan negara sebanding, serta permasalahan karakter bangsa; (4) Infrastruktur masih terbatas yang diindikasikan oleh penurunan stok infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto, stok infrastruktur di bawah rata-rata internasional, tingginya biaya logistik serta kinerja infrastruktur logistik yang rendah; (5) berbagai isu kewilayahan di

Indonesia, seperti ketimpangan antar wilayah, konektivitas yang belum optimal, akses dan kualitas pelayanan dasar yang masih terbatas; ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi, proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi, lemahnya pengelolaan urbanisasi, pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan peruntukannya, kepastian hukum dan penguasaan/pemanfaat atas tanah yang timpang, serta dominannya wilayah metropolitan Jakarta dalam perekonomian nasional dan tingginya gap dengan daerah lain di Indonesia; (6) Isu lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana; serta (7) isu politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang meliputi belum kokohnya kelembagaan demokrasi, belum optimalnya pelaksanaan kebijakan luar negeri, penegakan hukum, serta kinerja kelembagaan birokrasi dan pelayanan publik.

Seiring dengan isu strategis tersebut, maka agenda nasional dalam RPJMN yang juga harus diselaraskan dengan pembangunan daerah adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Telaah terhadap RPJMD Provinsi Kepulauan Riau memperlihatkan isu-isu regional (provinsi) harus dipertimbangkan dan selaras dengan kebijakan Pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026. Isu Strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 adalah: (1) Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi; (2) Sebaran wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang luas dan terletak di perbatasan membutuhkan akselerasi pembangunan; (3) Terbukanya wilayah Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan rentannya luruh budaya Melayu; (4) Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan (5) Belum tereksplorasinya secara optimum potensi kemaritiman.

Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kepulauan Riau menjadikan Kota Batam sebagai pusat hubungan logistik internasional dan Industri kedirgantaraan, pariwisata, industri digital dan kreatif, serta *international trade* and *finance center*. Karenanya, fokus kegiatan Kota Batam diharapkan pada; (1) pengembangan jalur transportasi lokal dan internasional; (2) pembangunan jalan, jembatan dan drainase; (3) pembangunan infrastruktur utama dan penunjang kegiatan industri; (4) pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus); (5) pengembangan industri galangan kapal, jasa kepelabuhan, pergudangan, offshore, dan elektronik; (6) Pengembangan pelabuhan logistik; (7) Pengembangan kawasan industri dan pariwisata Galang Rempang; (8) Menjadikan Batam sebagai tujuan utama wisata MICE di Indonesia; (9) Fasilitasi dan percepatan pembangunan jembatan Batam-Bintan; dan (10) Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menyiapkan kebijakan pembangunan *Cross Cutting,* yaitu beberapa program prioritas pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi antar organisasi perangkat daerah dan/atau antar kabupaten/kota. Kebijakan

yang dimaksud adalah penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan *Stunting*, Pembangunan Infrastruktur, *Cluster* Daerah Pertanian, *Tourism Linkage Networking*, Industri Perikanan dan Kelautan dan *Link and Match* Pendidikan dan Industri.

Arahan dokumen perencanaan jangka panjang di Kota Batam juga menjadi isu lokal daerah yang harus dipertimbangkan dan selaras dengan kebijakan Pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2005-2025 mengarahkan pembangunan tahun 2021-2026 untuk mencapai 25 sasaran pembangunan jangka panjang tahap IV. Keduapuluh lima sasaran tersebut tersebar dalam penyelenggaran empat misi pembangunan, yaitu Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional, Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Menciptakan Masyarakat Sejahtera dan Menciptakan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang Madani. Sementara itu, dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021, kebijakan pembangunan kewilayahan Kota Batam mengikuti indikasi program pengembangan tahap I (tahun 2021-2025), khususnya yang program yang pendanaannya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Dokumen lain yang rekomendasinya harus dipertimbangkan, diselaraskan dan diintegrasikan dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 adalah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Batam. Rekomendasi dokumen ini mengarahkan penyelenggaran pemerintahan untuk mengoptimalkan pencapaian *SDGs* di Kota Batam. Fokus rekomendasi adalah pada pelaksanaan program pembangunan untuk percepatan pencapaian 8 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengentasan kemiskinan, mengakhiri kelaparan, penyediaan layanan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan

berkualitas, kesetaraan gender, penyediaan air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, komunitas yang berkelanjutan.

Proses penentuan isu strategis mengikuti arahan dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Seluruh isu pembangunan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kota Batam dianalisis dengan menggunakan kriteria pembobotan isu strategis. Gambar 4.2 menyajikan kriteria pembobotan isu strategis yang mengacu pada lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sepuluh isu yang memiliki skor tertinggi ditetapkan sebagai isu strategis pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026. Uraian lebih rinci disampaikan pada Sub bab 4.2.1 hingga Sub bab 4.2.10.

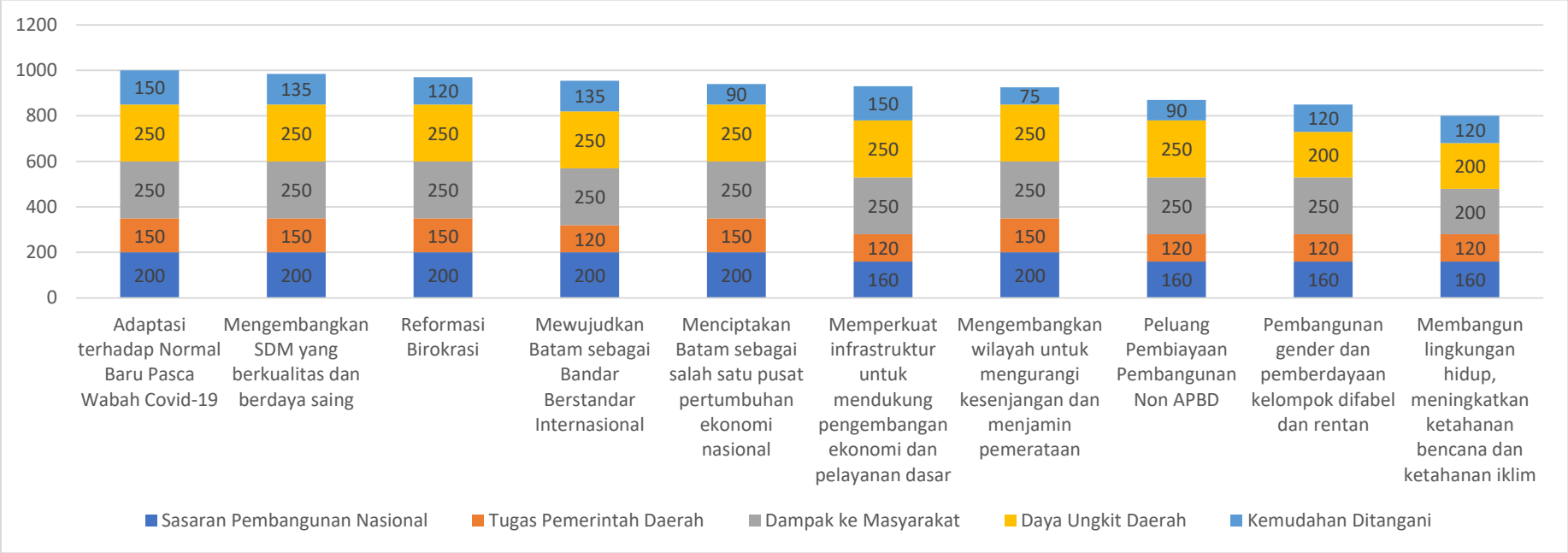

Gambar 4. 2 Pembobotan Isu Strategis Kota Batam 2021-2026

Keterangan Bobot:

- Sasaran Pembangunan Nasional = 20
- Tugas Pemerintah Daerah = 15
- Dampak ke Masyarakat = 25
- Daya Ungkit Daerah = 20
- Kemudahan Ditangani = 15

4.2.1 Adaptasi Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19

Wabah COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 menyebabkan pandemik global yang mempengaruhi mayoritas negara di dunia termasuk negara-negara yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia seperti Tiongkok, AS, Jerman, Britania Raya, Italia, Jepang, dan lain-lain. Wabah ini dipicu pada Desember 2019 di Kota Wuhan di Provinsi Hubei, Tiongkok. COVID-19 terus menyebar ke seluruh dunia.

Dalam dunia yang sangat terhubung dan terintegrasi, dampak penyakit di luar mortalitas (korban jiwa akibat Covid-19) dan morbiditas (mereka yang tidak mampu atau merawat yang tidak mampu dan tidak dapat bekerja selama periode tertentu) telah tampak jelas sejak munculnya wabah. Pandemik ini membuat Tiongkok harus melakukan karantina di berbagai wilayahnya; menutup akses keluar-masuk dan menghentikan berbagai kegiatan sosial dan bisnis. Dampaknya, rantai pasokan dunia terganggu karena Tiongkok merupakan salah satu negara pengekspor barang terbesar di dunia, juga salah satu dari tiga negara manufaktur terbesar. Pasalnya, perusahaan di seluruh dunia, terlepas dari ukurannya, yang bergantung pada impor dari Tiongkok telah mulai mengalami kesulitan dalam produksi. Transportasi pun menjadi sangat terbatas sehingga semakin memperlambat kegiatan ekonomi global; lebih dari 100 negara telah memberlakukan *travel restriction* (BBC, 27/03/2020). Kepanikan konsumen dan perusahaan telah mendistorsi pola konsumsi yang biasa dan menciptakan anomali pasar. Pasar keuangan global juga responsif terhadap perubahan dan indeks saham global telah jatuh. Sejak Januari 2020, pada tanggal 1 April Dow Jones telah turun sebesar 24,1%, Niikei turun 22,2%, dan FTSE turun sebesar 28,8% (Bloomberg 1/04/2020), penurunan terburuk setelah krisis tahun 2008.

Tentu Indonesia termasuk Kota Batam tidak luput dari gerusan ekonomi Covid-19 ini. Misalnya, data per Desember 2019, Tiongkok tercatat sebagai negara tujuan ekspor non-migas terbesar Indonesia (2,351 juta USD), dan impor non-migas terbesar Indonesia pun berasal dari Tiongkok (4,071 juta USD) (BPS 2020). Tentu

ini sangat mengganggu rantai pasokan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk Kota Batam, serta mengurangi pendapatan ekspor. Selain itu, sektor yang terkena dampak langsung secara signifikan adalah sektor pariwisata. Sebagai gambaran, wisatawan asal China, BPS menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 (Januari-Oktober), jumlah wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia mencapai 1.77 juta orang.

Dalam konteks ini Kota Batam sebagai kawasan industri dan kota destinasi wisata penyumbang wisatawan mancanegara peringkat kedua nasional, setelah Bali turut mengalami goncangan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2019 sebesar 5,92 persen, yang merupakan nilai tertinggi dari capaian selama tiga tahun terakhir. Dengan adanya pandemi Covid-19 dipastikan akan mengkoreksi secara signifikan target pertumbuhan ekonomi periode tahun 2021 hingga tahun 2026. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam berdasarkan data BPS adalah sebesar -2.55 persen, kemudian untuk tahun 2021 diproyeksikan naik menjadi 3.25 persen, dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2026.

Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik Kota Batam telah merilis angka penurunan di sektor pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara atau wisman yang berkunjung ke Kota Batam pada tahun 2020 mencapai 299.158 kunjungan, mengalami penurunan sebesar 84,64 persen jika dibandingkan jumlah wisman pada tahun sebelumnya, dimana jumlah wisman pada tahun 2019 sebanyak 1.947.943 kunjungan.

Adanya pandemi Covid-19 secara global semestinya berpengaruh terhadap sektor perdagangan Kota Batam yang mana ekspor Kota Batam (sektor migas dan non-migas) pada tahun 2020 yaitu 9.521,96 juta USD. Apabila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2019 yaitu 8.775,38 juta USD justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak mengubah kinerja ekspor Kota Batam baik di sektor migas dan non-migas.

Pada tahun 2019 nilai impor Kota Batam adalah 8.926,91 juta USD, sedangkan pada tahun 2020 adalah 8.509,46 juta USD. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai impor di tahun 2020 namun penurunan ini tidak berbeda signifikan. Dengan demikian pada tahun 2020 Kota Batam telah mengalami surplus perdagangan. Kondisi pandemi tidak mengubah kinerja perdagangan Kota Batam selama ini baik di sektor migas dan non-migas. Upaya peningkatan surplus perdagangan yang terjadi selama ini dapat dilakukan dengan melakukan inovasi kebijakan pengembangan SDM berkualitas, berdaya saing dan penguatan modal sosial yang telah dibahas sebelumnya.

Kemudian dari sektor ketenagakerjaan, pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam adalah sebesar 11,79% atau sekitar 87.903 orang. Dibandingkan pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam sebesar 8,31% atau sebesar 53.464 orang. Dari data tersebut menunjukkan tren kenaikan yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang diakibatkan banyaknya usaha yang bergerak di bidang pariwisata, seperti Spa, Tour and travel, restoran hingga perhotelan yang tutup atau mengurangi karyawannya.

Resesi ekonomi dampak Covid-19 tentu berdampak pada peningkatan kemiskinan di Kota batam. Berdasarkan Data Terpadu Kementerian Sosial RI, jumlah penduduk miskin Kota Batam tahun 2020 mencapai 52.551 kepala keluarga. Namun, dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, terdapat 284.223 kepala keluarga yang mendapatkan *social safety net* (bantuan jaring pengaman sosial), meskipun tidak masuk kategori miskin dalam Data Terpadu Kementerian Sosial RI, fakta riil di lapangan ditemukan adanya penurunan status dari masyarakat menengah menjadi masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19 ini.

Dari sisi penerimaan pemerintah Kota Batam, pada tahun 2020 pendapatan asli daerah menurun dari tahun 2019 sebesar 15,02%. Kemudian penurunan pajak daerah sebesar 19,11%. Kondisi pandemi menyebabkan proyeksi penerimaan tahun-tahun selanjutnya semakin sulit diprediksi disertai dengan tingkat

ketidakpastian yang tinggi, sehingga sangat berpengaruh signifikan terhadap penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan periode 2021-2026.

Merebaknya wabah Covid-19 beserta penanganannya menimbulkan protokol kesehatan baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sering disebut dengan normal baru. Era dimana kebiasaan-kebiasaan baru tersebut menjadi normal disebut dengan era normal baru. Pada era tersebut, kebiasaan baru tidak hanya timbul pada aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Normal baru akan mendorong berubahnya cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan bisnis bagi sebagian besar masyarakat. Perlu adaptasi pada era normal baru ini supaya dapat tetap bersaing terutama dalam berinteraksi dengan pihak luar baik di Indonesia maupun negara lain.

Adaptasi terhadap normal baru menjadi penting bagi daerah, terutama Kota Batam sebagai pusat pertumbuhan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi dan mobilitas orang dan barang yang juga sangat tinggi. Era normal baru ini juga perlu diadaptasi oleh industri-industri yang ada di Kota Batam karena akan menimbulkan perubahan permintaan barang dan jasa dimana sebagian industri akan mengalami pertumbuhan karena permintaan dari kebutuhan yang timbul atas normal baru, sedangkan industri yang lain perlu menyesuaikan bisnisnya karena tergantikan oleh kebutuhan baru yang ada di era tersebut.

Faktor yang menjadi kunci dalam menghadapi era normal baru pasca wabah Covid-19 ini adalah kesigapan elemen-elemen di Kota Batam, termasuk pemerintah daerah dalam mengadaptasi protokol dan normal baru dalam mengantisipasi Covid-19 ke dalam kebijakan, aturan maupun pelaksanaan pelayanannya. Kedua, sensitivitas atas perubahan kondisi lingkungan akibat normal baru juga diperlukan untuk dapat memahami dan merespon perubahan yang ada. Ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari berjalannya normal baru di masyarakat

mengingat selama wabah Covid-19, banyak teknologi baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan berbagai aktivitas mulai dari pendidikan, bisnis hingga pemerintahan. Keempat adalah peningkatan infrastruktur yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap munculnya wabah baru dengan memanfaatkan pengalaman dalam menghadapi Covid-19, mulai dari infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya.

Pemerintah Kota Batam memandang pandemi Covid-19 sebagai titik tolak dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Batam yang lebih baik melalui pendekatan *Build Back Better* dengan berorientasi pada peningkatan ketahanan (*resilience*) untuk seluruh sektor pembangunan, dan perlahan mulai meninggalkan pendekatan *Bussines as Usual* yang tidak responsif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan saat ini. Kebijakan pembangunan jangka menengah harus benar-benar di desain untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, menjamin kesehatan dalam jangka panjang, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik (*green jobs*), menanggulangi perubahan iklim (kelangkaan air bersih, kekeringan, kelangkaan pangan, dst) sekaligus membangun masyarakat yang tangguh di masa mendatang. Dengan demikian Kota Batam dapat berkontribusi secara optimal bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

4.2.2 Mengembangkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan, pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukung penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja,

dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi, politik dan budaya.

Oleh karena itu, pilihan strategi pembangunan dengan fokus utama pembangunan sumber daya manusia sangat tepat untuk menjawab tantangan bagi Kota Batam, mengingat Indonesia saat ini berada dalam periode Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menuntut sumber daya manusia yang terampil dan unggul agar memiliki daya saing yang tinggi sehingga memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah.

Kunci dalam menghadapi isu pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing terdapat pada pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan serta bagaimana efektivitas dalam memanfaatkan bonus demografi yang dihadapi oleh daerah. Kuantitas SDM merupakan salah satu sumber daya yang dapat mendorong pembangunan daerah terutama dalam penyediaan tenaga kerja dalam mendukung aktivitas perekonomian. Namun, apabila peningkatan kuantitas SDM ini tidak diimbangi oleh peningkatan kualitas dan daya saing SDM tersebut, bonus demografi akan menjadi permasalahan yang dapat menghambat pembangunan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dari adanya bonus demografi misalnya adalah *middle income trap*, meningkatnya pengangguran, dan permasalahan sosial kependudukan lainnya.

Selain itu, perlu juga memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial bagi masyarakat serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Kedua faktor tersebut merupakan salah satu modal dasar dalam mendukung kualitas SDM terutama dari sisi kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan bagi semua masyarakat Kota Batam akan semakin meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dari sisi pendidikan juga perlu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh elemen masyarakat di seluruh penjuru Kota Batam. Pemerataan di sini menjadi faktor yang penting juga supaya daya saing SDM dapat merata tidak hanya di pusat pertumbuhan. Pemerataan dapat dilakukan melalui pembangunan sarana-prasarana baru maupun melalui kebijakan dan inovasi yang memberikan dampak positif bagi proses pemerataan pendidikan yang berkualitas yang menjadi hak bagi masyarakat Kota Batam.

4.2.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditujukkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

Secara lebih rinci, kebijakan transformasi birokrasi mengacu pada peta jalan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk periode 2020-2024 adalah menekankan pada *Dynamic Governance*, dimana visi yang diusung adalah "Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia". Pada tahun 2024 pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan semakin baik yang ditandai dengan: (a) tidak ada korupsi; (b) tidak ada pelanggaran; (c) APBD baik; (d) semua program selesai dengan baik; (e) semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; (f) komunikasi dengan publik baik; (g) penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; (h) penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan; (i) hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan).

Untuk mencapai kondisi pada paragraf di atas setidaknya perlu ditempuh dengan strategi sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan diperlukan dalam menguatkan *leadership* dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terwujud rasa memiliki (*ownership*) dalam organisasi;
2. Implementasi reformasi birokrasi sampai unit kerja, diperlukan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja individu dalam organisasi;
3. Pemilihan program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi bermakna perlu adanya ketelitian dalam menentukan program dan kegiatan yang bersifat *solving problem*, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan, mewujudkan organisasi yang kredibel, dan meningkatkan pelayanan prima bukan hanya di level atas, juga sampai di unit kerja terkecil;
4. Selanjutnya mutlak dilakukan peningkatkan kualitas manajemen reformasi birokrasi (*plan, do, check, action*) dimana melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta tindak lanjut secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang sedang dijalankan tetap dijalurnya dan memiliki umpan balik perbaikan secara kolaboratif.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Batam antara lain adalah masih perlunya penguatan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik.

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan,

serta menghindari *high cost economy* diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga.

Secara konkret salah satu upaya pemerintah Kota Batam untuk melakukan reformasi birokrasi adalah melalui reformasi birokrasi dalam Tata Kelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PTSP berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja beserta turunannya. Pada tahun 2019 DPM-PTSP Kota Batam berhasil menerima Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). DPM-PTSP Kota Batam telah mampu mengintegrasikan perizinan dengan sistem *online single submission* (OSS).

Melalui reformasi birokrasi kedepannya jika dilaksanakan dengan baik diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat Kota Batam terhadap pelayanan yang diberikan. Kepercayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Disamping itu juga dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta harmonisasi data dengan BP Batam dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

4.2.4 Mewujudkan Batam sebagai Bandar Madani Berstandar Internasional

Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, perlu meningkatkan statusnya sebagai kota bandar berstandar internasional untuk dapat meningkatkan daya saingnya di antara kota-kota bandar lain yang ada di dunia. Dengan posisi berada di tengah jalur perdagangan internasional dan didukung oleh industri-industri berorientasi ekspor, serta secara geostrategis dan geopolitik Kota Batam bergantung dengan situasi dan kondisi global, karena itu peran bandar berstandar internasional menjadi kunci meningkatkan pembangunan ekonomi di Kota Batam.

Fokus dari perwujudan Kota Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional adalah pada kegiatan yang memanfaatkan keberadaan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas. Posisi Batam yang strategis karena berada pada jalur pelayaran terpadat, dekat dengan salah satu pusat bisnis internasional (Singapura) adalah keuntungan tersendiri bagi Kota Batam. Kebijakan-kebijakan ekonomi di Kota Batam perlu lebih berorientasi keluar (*outward looking*), terlebih perhatian pemerintah pusat dengan adanya Badan Pengusahaan Kawasan yang dapat menjadi penggerak penting. Tujuannya adalah agar Bandar Internasional Batam sebagai potensi alam dan posisi Kota Batam dapat menjadi andalan (*core*) bagi upaya-upaya sinergi pembangunan daerah atau menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Keberhasilan Kota Batam menjawab isu strategis ini terkait erat dengan kebijakan-kebijakan hubungan/kerjasama luar negeri, termasuk di dalamnya perdagangan internasional, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karenanya, isu koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Kota Batam dengan pemerintah pusat, khususnya BP Batam, menjadi isu yang tidak terpisahkan.

4.2.5 Menciptakan Batam sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kondisi perekonomian di Kota Batam secara fundamental saat ini relatif lebih baik dibandingkan daerah-daerah sekitar maupun rata-rata nasional terutama dari sisi pendapatan masyarakat. Kesenjangan pendapatan pun dapat dijaga pada tingkat yang cukup rendah relatif dibandingkan dengan daerah lain. Untuk mencapai keberlanjutan peningkatan pendapatan, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Karena tingkat pendapatan penduduk relatif sudah tinggi, maka keberlanjutan pertumbuhan tersebut akan berdampak pada pertumbuhan wilayah lain dan secara umum akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kota Batam sebagai salah satu simpul penting dapat menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia.

Untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, iklim investasi dan usaha yang kondusif dan bagi

lembaga-lembaga yang didalamnya diharapkan dapat lebih kooperatif dan sinergis. Proses yang mengiringi perkembangan ini adalah transformasi struktur ekonomi, yang bergerak dari sektor industri ke sektor jasa.

Sebagai penarik kegiatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi, maka perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan besar sebagai jangkar (penarik), misalnya pengembangan pariwisata bertaraf internasional, sarana pendidikan bertaraf internasional, sarana kesehatan bertaraf internasional serta kegiatan-kegiatan lain memanfaatkan potensi yang ada di Kota Batam.

Pemerataan kesejahteraan masyarakat harus tercapai sejalan dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Pemerataan memiliki dua arti yaitu pemerataan pendapatan antar golongan pendapatan maupun pemerataan antar wilayah di Kota Batam. Kebijakan memberdayakan dan memaksimalkan pulau-pulau kecil di Kota Batam merupakan langkah yang sangat tepat dalam menciptakan wilayah atau kawasan perbatasan yang strategis yang sesungguhnya merupakan aplikasi atas ciri maritim (kelautan) dari kehidupan masyarakat bahari.

Tujuan dari misi tersebut adalah untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pendukungnya, baik yang terkaitkan langsung atau tidak langsung dengan keberadaan Bandar Internasional dalam rangka meningkatkan pendapatan umum penduduk.

4.2.6 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur, utamanya di daerah, akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut. Kemudahan akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Dalam proses pembangunan, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas dalam RPJMN periode 2020-2024 yang akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan) yang ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah. Cakupan infrastruktur pelayanan dasar yang akan dibangun antara lain penyediaan hunian layak yang ditopang dengan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan layanan jaringan *on grid* dan *off grid* untuk akses ketenagalistrikan, penyediaan layanan telekomunikasi dan internet untuk fasilitas umum (fasum), pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, penyediaan pelayanan transportasi perintis (darat, laut dan udara) serta pembangunan waduk *multi-purpose* dan irigasi.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi, ketenagalistrikan dan energi, teknologi informatika dengan kapasitas besar dan berkecepatan tinggi untuk pengoperasian *Big Data*, *Internet of Things* (IoT) maupun *artificial intelligence* (AI). Sementara itu pembangunan infrastruktur untuk perkotaan mencakup peningkatan sarana dan prasarana yang akan menunjang kenyamanan hidup di kota seperti pembangunan angkutan umum massal, pembangunan jaringan pipa gas kota, pipa air minum dan sanitasi serta pengelolaan limbah. Pembangunan infrastruktur pada periode ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan

pembangunan nasional menuju negara yang makmur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud.

4.2.7 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan

Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Ekonomi yang berkeadilan harus diperkuat agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan. Agar ekonomi lebih adil dan merata, masyarakat kelas bawah membutuhkan modal (*equity*) untuk meningkatkan kualitas hidupnya, bukan sekadar *equality* atau kesamaan perlakuan. Untuk mendukung Kota Batam sebagai *economic growth center*, pengembangan wilayah di Kota Batam perlu dilakukan secara merata untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (*leave no one behind*). Fokus pembangunan adalah daerah di dekat pusat pertumbuhan yang dapat diberikan *input* untuk mengejar pertumbuhan di koridor pertumbuhan terdekatnya. Strategi pertumbuhan dan pemerataan membutuhkan sarana pendidikan yang terdistribusi secara merata, peningkatan potensi lokal yang secara spesifik dapat mendorong peningkatan pertumbuhan daerah. Selain itu, dibutuhkan pula keterkaitan antar wilayah serta perkuatan rantai antara penghasil sumber daya, industri hulu, industri hilir, serta pusat perdagangan lokal, regional dan global. Kedua strategi tersebut dikembangkan untuk mencapai sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia di kedua koridor tersebut, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Penguatan tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, terutama di

hinterland sangat diperlukan untuk akselerasi pembangunan di kedua koridor tersebut.

Salah satu yang perlu diupayakan untuk mengembangkan wilayah secara merata adalah menjamin ketersediaan infrastruktur layanan dasar bagi masyarakat secara merata baik di pusat pertumbuhan maupun di wilayah *hinterland*. Upaya pengembangan wilayah berbasis pemerataan tersebut juga perlu didukung melalui pengembangan keterkaitan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan daerah *hinterland*, pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi baru berskala kecil dan menengah di daerah hinterland, dan pengembangan kemitraan usaha - antara usaha di *mainland* dan *hinterland*.

4.2.8 Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD

Kompleksitas permasalahan di Kota Batam menuntut penyediaan anggaran yang tinggi, terutama dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Namun demikian keterbatasan anggaran selalu muncul sebagai persoalan dan berimplikasi adanya *trade off*. Sebagai gambaran, jika penyediaan infrastruktur menjadi prioritas dalam penganggaran, maka pelayanan sosial dan budaya yang masih perlu dikembangkan berpotensi tidak mendapat tempat prioritas.

Dalam konteks ini pemerintah Kota Batam dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan Kota Batam. Terdapat beberapa alternatif pembiayaan non-APBD yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Batam dan memiliki landasan hukum peraturan perundang-undangan, di antaranya skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penerbitan Obligasi Daerah, serta skema pinjaman ke Bank Pembangunan Daerah atau pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai penyedia pinjaman infrastruktur yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan ke daerah. Namun demikian, Pemerintah Kota Batam harus mempertimbangkan

dan mampu menghitung kemampuan dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari berbagai skema tersebut.

Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik, sehingga jika akan menggunakan skema ini Pemerintah Kota Batam perlu melakukan berbagai Langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM dan lainnya.

Selain skema pembiayaan di atas, terdapat pola pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) / *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sejauh ini sudah ada kontribusi TSLDU terhadap pelayanan publik dan fasilitas kepada masyarakat, namun demikian dirasakan masih ada peluang dan ruang untuk optimalisasi baik dari sisi swasta maupun Pemerintah Kota Batam, diantaranya sinergi antara kegiatan TSLDU dengan program pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan rill masyarakat.

Lebih lanjut, selain pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan pihak swasta, terdapat pula potensi pembiayaan yang cukup signifikan dan belum dioptimalkan oleh pemerintah, yaitu pendanaan yang bersifat swadaya dari komunitas/masyarakat. Selama ini, pola tersebut telah banyak digunakan untuk keperluan aktivitas yang berbasis komunitas seperti pembangunan rumah ibadah, aktifitas sosial kemasyarakatan, dan lainnya. Untuk mengoptimalkan potensi swa-pendanaan, Pemerintah Kota Batam perlu mendorong dan melakukan pembinaan melalui tokoh masyarakat, memberikan stimulan dan apresiasi terhadap komunitas masyarakat yang mampu memberdayakan potensi sosial untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Kota Batam Bersama dengan BP Batam perlu bersinergi dalam upaya mengoptimalkan peluang pembiayaan untuk kemajuan pembangunan Kota Batam.

4.2.9 Pembangunan Berbasis Gender (Perempuan, Anak, Disabilitas dan Lansia)

Isu kesetaraan gender merupakan salah satu isu tingkat global yang menjadi sasaran dalam *Sustainaible Development Goals* (SDGs) yang ikut diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target SDGs 2030 dengan menetapkan prinsip, *no one left behind*. Hal ini menimbulkan konsekuensi negara harus dapat memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Strategi inilah yang diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses, berpartisipasi, ikut dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasinya. Upaya percepatannya telah dituangkan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menempatkan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.

Lingkup dari isu kesetaraan gender adalah mengurangi segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun dan pada tingkat apapun. Selain itu, juga menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa,

serta sunat perempuan. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Terakhir adalah Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Untuk dapat menghadapi isu terkait dengan kesetaraan gender, perlu adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam program-program pembangunan gender. Pengawasan dan pengendalian pada program-program pembangunan gender termasuk melakukan pengukuran kinerja pembangunan gender supaya dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pembangunan gender ke depannya. Pada pelaksanaannya, juga perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan gender di berbagai bidang dan tingkatan yang ada di Kota Batam mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta kelompok masyarakat. Kedua, peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok marjinal dalam pembangunan juga dapat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penanganan isu kesetaraan gender. Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok tersebut dalam pembangunan daerah dapat meningkatkan rekognisi dari berbagai elemen masyarakat lain sehingga ketanggapan atas isu kesetaraaan gender dapat meningkat. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang ramah perempuan dan anak juga perlu didorong untuk meningkatkan pembangunan gender di Kota Batam.

Selain itu Pemerintah Kota Batam dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat masih memerlukan pembenahan dan penyempurnaan. Salah satunya adalah belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut secara jelas menyebutkan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah terhadap penyandang disabilitas di antaranya adalah memenuhi hak untuk pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi. Upaya untuk

mendorong partisipasi para disabilitas antara lain dapat dilakukan dengan mendirikan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dan pemberian insentif kepada pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas minimal satu persen dari jumlah karyawan. Hak difabel lainnya yang perlu untuk difasilitasi secara optimal yaitu hak untuk hidup secara mandiri, termasuk penentuan tempat tinggal dengan menerima bantuan Pemerintah Daerah, serta menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam akan mendorong perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Disamping itu hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah akan pentingnya peningkatan fasilitas publik dan pelayanan publik untuk disabilitas yang hingga saat ini belum maksimal.

4.2.10 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan daerah perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup di wilayahnya untuk menjamin kelayakan hidup bagi warga masyarakat. Daya dukung lingkungan perlu diperhatikan untuk menghasilkan lingkungan yang asri dan layak huni bagi segenap warga Kota Batam. Isu yang tercakup dalam pembangunan lingkungan hidup ini meliputi mulai dari tata ruang, daya dukung air, ruang terbuka hijau, dan permukiman bagi masyarakat termasuk di dalamnya adalah persampahan. Pembangunan lingkungan hidup juga perlu menjadi perhatian karena akan berdampak pada keberlangsungan wilayah pada jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup di Indonesia secara umum relatif stagnan sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih progresif untuk mencapai hasil yang diharapkan di masa depan.

Kemudian, pembangunan lingkungan hidup ini juga berkaitan dengan peningkatan ketahanan bencana dan terutama bencana iklim yang diakibatkan

oleh perubahan iklim akibat dari peningkatan gas rumah kaca secara global. Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) menunjukkan lebih dari 30.000 kejadian bencana selama periode 2011-2020, sekitar 97 persen diantaranya adalah bencana hidrometeorologi atau bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, gelombang laut ekstrem dan kenaikan permukaan laut, sementara itu hanya sekitar 3 persen yang berasal dari bencana geologi. Dalam konteks ini Kota Batam memang dapat dikatakan tidak memiliki potensi bencana geologi, namun Kota Batam sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama kekeringan yang diikuti kelangkaan air bersih, potensi curah hujan tinggi yang diikuti dengan banjir, dan peningkatan gelombang ekstrem yang berdampak pada aktifitas pelayaran terutama bagi kapal 10-30GT, serta potensi peningkatan penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti DBD.

Dalam rangka pengurangan kerentanan (*vulnerability*), perlu pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas adaptif di daerah-daerah rentan. Peningkatan kapasitas adaptif dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur strategis pada sektor-sektor terdampak perubahan iklim seperti sektor sumber daya air, kelautan dan pesisir, serta sektor kesehatan; peningkatan SDM masyarakat yaitu kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas; serta peningkatan regulasi terkait ketahanan iklim pada sektor terdampak. Peningkatan ketahanan iklim juga perlu didukung dengan penyediaan informasi iklim yang cepat dan akurat melalui program pengembangan dan pembinaan meteorologi, klimatologi dan geofisika yang juga berperan penting untuk mendukung pengurangan risiko bencana.

Isu lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan iklim sendiri merupakan salah satu prioritas dalam RPJMN yang perlu didukung pelaksanaannya oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Sebagai kota yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kualitas

lingkungan hidup dan ketahanan atas bencana dan perubahan iklim akan meningkatkan daya saing daerah terutama dalam meningkatkan investasi dan aktivitas ekonomi di daerah.

Tabel 4. 3 Abstraksi Isu-isu Strategis

No.	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Internasional Nasional Daerah	Adaptasi terhadap Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19	• Respon dalam mengadaptasi protokol kesehatan dan kebiasaan baru yang muncul; • Sensitivitas atas perubahan kondisi lingungan yang mempengaruhi masyarakat • Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung aktivitas pembangungan • Peningkatan infrastruktur dalam meningkatkan ketahanan terhadap wabah global
2.	Daerah	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	• Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan • Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta • Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas • Pengentasan kemiskinan • Meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan daya saing tenaga kerja • Memanfaatkan bonus demografi
3.	Nasional Daerah	Reformasi Birokrasi	• Menguatkan komitmen pimpinan dalam menggerakan *ownership* pegawai terhadap organisasi; • Implementasi reformasi birokrasi sampai unit kerja; • Pilihlah program dan kegiatan yang bersifat problem solving; • Peningkatan kualitas manajemen reformasi birokrasi (*plan, do, act, check*)
4.	Nasional	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• Pengembangan wilayah hinterland • Pengembangan sentra industri dan usaha kecil yang terintegrasi dengan rantai pasok industri • Pemerataan infrastruktur dasar
5.	Daerah	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi	• infrastruktur perhubungan dan transportasi • Peningkatan sistem transportasi perkotaan

No.	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
		dan pelayanan dasar	• Energi dan listrik yang berkelanjutan • Infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi • Akses air bersih
6.	Internasional Nasional Daerah	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	• Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau • Kelembagaan dan infrastruktur Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Iklim • Penanganan Limbah dan Persampahan
7.	Daerah	Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional	• Pembangunan Sarana dan Prasaran yang memadai • Optimalisasi penataan ruang • Pengembangan jaringan kerja sama dengan bandar-bandar lain di negara lain • Peningkatan kualitas daya dukung linkungan
8.	Nasional Daerah	Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional	• Koordinasi Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengelola Batam • Pengembangan Teknologi Informasi • Sinergi antara pusat pertumbuhan dengan daerah *hinterland* • Pengembangan IKM sebagai pendukung rantai pasok industri
9.	Nasional Daerah	Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Kelompok Difabel dan Kelompok Rentan	• Peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam program-program pembangunan gender, pemberdayaan difabel dan kelompok rentan • Peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok marjinal dalam pembangunan • Pembangunan infrastruktur yang ramah perempuan, anak, kelompok difabel dan rentan; • Pemberian hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi pada kelompok difabel, serta memberi insentif bagi pemberi kerja pada kelompok difabel
10.	Daerah	Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD	• Mengupayakan peluang pembiayaan melalui KPBU, PHLN, skema Obligasi, pinjaman melalui BPD/ PT.SMI dan optimalisasi peran CSR disesuaikan dengan kebutuhan rill masyarakat

Sumber: Hasil Analisis

Secara ringkas disampaikan abstraksi dari isu-isu strategis pembangunan Kota Batam 2021-2026 pada Tabel 4.3. Sementara itu, Tabel 4.4 memperlihatkan

sandingan untuk memastikan bahwa isu strategi pembangunan Kota Batam selaras atau sejalan dengan isu strategis pemerintahan di level atasnya (nasional maupun Kepulauan Provinsi Riau).

Tabel 4. 4 Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Kota Batam 2021-2026 dengan Isu Strategis Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau

No	Isu Strategis Pembangunan Nasional (dalam RPJMN 2020-2024)	Isu Strategis Pembangunan Provinsi (dalam RPJMD) Kepulauan Riau 2021-2026	Isu Strategis Pembangunan Kota Batam
1	Urgensi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan Memerlukan upaya ekstra untuk meningkatkan petumbuhan ekonomi Indonesia	Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi	Adaptasi terhadap Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19
			Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional
2	Infrastruktur Masih Terbatas	Sebaran wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang luas dan terletak di perbatasan membutuhkan akselerasi pembangunan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
			Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
3	Permasalahan karakter bangsa	Terbukanya wilayah Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan rentannya luruh budaya Melayu	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
4	Sumber Daya Manusia perlu diperbaiki mulai dari sekarang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka menengah panjang	Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Kelompok Difabel dan Kelompok Rentan
5	Isu kewilayahan	Belum tereksplorasinya secara optimum potensi kemaritiman	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
			Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional
6	Permasalahan bidang tenaga kerja, investasi, dan perdagangan di Indonesia berakar dari lemahnya tata kelola pemerintahan dan institusi		Reformasi Birokrasi
7	isu politik, hukum, pertahanan dan keamanan		Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi Kota Batam periode 2021-2026 merupakan visi dan misi sekaligus janji politik dari Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2021-2026 pada tanggal 15 Maret 2021. Kepala Daerah atau Walikota Batam periode 2021-2026 adalah H. Muhammad Rudi, sementara Wakil Walikota Batam periode 2021-2026 adalah H. Amsakar Achmad. Sejak pelantikan tersebut, maka visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota menjadi Visi dan Misi Kota Batam periode 2021-2026.

5.1 Visi

Visi Kota Batam periode 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan kemajuan yang telah dicapai pemerintahan periode sebelumnya, berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah di masa mendatang. Visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 juga diacu dalam perumusan visi jangka menengah ini. Karenanya, maka rumusan Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah:

“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”.

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari keempat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

a. “Bandar Dunia” mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "*center of excellence*".
b. “Madani” bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep *civil society* yang religius.
c. “Sejahtera” mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.
d. “Modern” mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pokok visi “modern” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong *pentahelix* pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.

5.2 Misi

Untuk mencapai visi “**TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA**”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaran pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan

kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama dan keempat, Kota Batam sebagai “Bandar Dunia” yang “Modern”. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagi tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "*center of excellence*" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai “Bandar Dunia” yang “Modern”. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” dan “Modern”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan

mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia” yang “Modern”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah *hinterland*, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani” yang “modern”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep *civil society* yang tetap mengedepankan sikap religius. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam

memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemeritahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Tabel 5.1. Penjelasan Pokok Visi dan Kaitannya dengan Misi Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026

Pokok Visi	Penjelasan	Misi
Bandar Dunia	Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "center of excellence".	1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
		2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
Madani	Pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society.	5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sejahtera	kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.	3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.
		4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
Modern	sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan. POKOK VISI INI MERUPAKAN FOKUS/CARA/STRATEGI UNTUK MENCAPAI VISI	

Pokok visi “modern” menjadi pokok visi yang ingin dicapai di seluruh penyelenggaraan misi yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pokok visi “modern” merupakan cara atau strategi mencapai tiga pokok visi lainnya. Penyelenggaraan ke lima misi pembangunan mengarahkan dan membiasakan seluruh stakeholders pembangunan Kota Batam bersikap, berfikir, dan bertindak produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pembangunan Kota Batam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dirumuskan atau diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kota Batam yang telah ditetapkan. Satu atau lebih tujuan ditetapkan untuk mewujudkan suatu misi. Tujuan ini juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi pembangunan Kota Batam dalam lima tahun mendatang. Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kota Batam yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program pembangunan daerah. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi tercapainya satu tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran. Sebagai gambaran tercapainya tujuan, maka sasaran harus terukur melalui indikator tertentu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan untuk dicapai dalam periode pembangunan yang direncanakan, yaitu lima tahun mendatang.

Tujuan pembangunan untuk masing-masing misi pembangunan Kota Batam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya saing. Tujuan ini ditetapkan untuk menyelenggarakan misi pertama, yaitu Mewujudkan Pertumbuhan

Ekonomi yang berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang mantap tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil, khususnya pada sektor-sektor ekonomi unggulan.

2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif. Tujuan ini pun mendukung penyelenggaraan misi pertama. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang berkeadilan berarti pembangunan ekonomi yang merata dan inklusif, serta terukur dari indikator pemerataan pendapatan (indeks gini atau rasio gini) yang semakin mengecil.
3. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan. Tujuan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan misi kedua. Cakupan tujuan ini meliputi penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan perkotaan serta permukiman, penataan ruang kota dan peningkatan kualitas lingkungan. Ukuran ketercapaian tujuan ini adalah Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan yang relatif tinggi dan meningkat/stabil dari tahun ke tahun. Mengingat cakupan infrastruktur di tujuan ini difokuskan ke wilayah perkotaan (*Mainland*), maka indikator tujuan secara eksplisit menyebutkan wilayah Perkotaan.
4. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan ini ditetapkan untuk penyelenggaraan misi ketiga, yaitu Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Cakupan tujuan ini meliputi upaya meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, serta urusan pemberdayaan perempuan dan pemuda. Upaya lain dalam mencapai tujuan ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan, karena kemiskinan identik dengan kualitas hidup masyarakat yang rendah. Karenanya, ukuran keberhasilan tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia yang semakin meningkat serta Persentase Penduduk Miskin yang menurun dan relatif rendah dari tahun ke tahun.

5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland. Tujuan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan misi ke empat. Cakupan tujuan ini meliputi percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan serta permukiman di wilayah hinterland. Ukuran ketercapaian tujuan ini adalah nilai Indeks Infrastruktur wilayah *hinterland* yang relatif tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun. Pemerataan pembangunan antara wilayah Perkotaan (*mainland*) dengan *hinterland* juga dapat tercermin dari kesenjangan antara nilai indeks infrastruktur wilayah kedua wilayah yang semakin menurun setiap tahunnya.
6. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi. Tujuan ini ditetapkan untuk penyelenggaraan misi kelima pembangunan Kota Batam lima tahun mendatang. Cakupan tujuan ini meliputi berbagai upaya reformasi birokrasi melalui pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang baik, peningkatan kemandirian keuangan daerah, serta pelayanan publik yang prima dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ukuran keberhasilan tujuan ke enam ini adalah indeks reformasi birokrasi yang relatif tinggi dan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sementara itu, sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sub sektor perdagangan meliputi perdagangan besar dan eceran, namun bukan perdagangan mobil dan sepeda motor. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan pertama Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan sub sektor pendukung

pariwisata di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sub sektor yang dimaksud meliputi sub sektor akomodasi, makanan dan minuman. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan pertama Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan realisasi investasi daerah, baik yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan pertama Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
4. Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan omset industri kecil dan menengah di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
5. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan omset koperasi dan usaha mikro di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
6. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya. Ukuran dari ketercapaian sasaran ini adalah nilai tukar nelayan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
7. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan kawasan atau kluster kreatif daerah yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi keempat yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

8. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase Tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan persentase pengelolaan sampah yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
10. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan, serta Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
11. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Pendidikan serta Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
12. Meningkatnya aksebilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Kesehatan masyarakat Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat

Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

13. Meningkatnya daya beli masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Tingkat DayaBeli (*Purchasing Power Parity*) masyarakat Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
14. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan. Terdapat dua ukuran ketercapaian sasaran ini, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan. Nilai kedua ukuran/indikator tersebut diharapkan meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi keempat yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
15. Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah persentase penurunan berbagai potensi konflik maupun pelanggaran di Kota Batam dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kelima yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
16. Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Skor Pola Pangan Harapan yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi keenam yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
17. Menurunnya angka pengangguran. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam yang menurun dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketujuh yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
18. Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Batam dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedelapan yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

19. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan kelima Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
20. Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah *hinterland*. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan kelima Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
21. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah *hinterland*. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan kelima Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
22. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas. Terdapat empat ukuran ketercapaian sasaran ini, yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah Kota Batam, Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Batam, Nilai Tata Kelola Kearsipan, dan Tingkat Maturitas Satuan Pengawas Internal Pemerintahan (SPIP) Kota Batam. Ketercapaian sasaran tercermin dari status atau nilai yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan keenam Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
23. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan keenam

Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

24. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terdapat tiga ukuran ketercapaian sasaran ini, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketercapaian sasaran tercermin dari nilai ukuran/indikator yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan keenam Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

Berbagai sasaran yang telah diuraikan di atas telah ditentukan untuk mencapai tujan-tujuan yang telah ditetapkan. Saat tujuan-tujuan pembangunan tercapai, maka misi pembangunan dapat terselesaikan dan visi pembangunan Kota Batam dapat tercapai. Kaitan misi, tujuan, sasaran, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan dan sasaran, definisi operasional dan rumus indikator, serta target nilainya disajikan dalam Tabel 5.2. dan Tabel 5.3.

Tabel 5.2. Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (Indikator Kinerja Utama/IKU) Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026 beserta Target Capaiannya

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target						Kondisi Akhir (2026)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.	1.1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan ekonomi adalahmeningkatnya nilai PDRB lapangan usaha tahun n dibanding tahun n-1	[(PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun n-1) / PDRB ADHK tahun n-1] x 100%	Persen	-2,55%	3,25%	5,05%	5,91%	6,40%	6,92%	7,52%	7,52%
		1.2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	Indeks Gini	Indeks Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks gini berada antara 0 s.d 1.	$GR = 1 - \sum fi\ [Yi + Yi\text{-}1]$ DImana: GR = Indeks Gini fi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i Yi = Frekuensi kumulatif ari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i Yi-n = Frekuensi kumulatif ari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke i-1	Indeks	0,323	0,330	0,330	0,325	0,320	0,310	0,300	0,300
2	Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman	2.1. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan (IIWP) adalah indeks yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur (tata ruang, lingkungan hidup dan persampahan, pekerjaan umum, perhubungan, dan permukiman) di wilayah perkotaan (mainland P. Batam). Kategori indeks infrastruktur wilayah perkotaan:	IIWP = [(% Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah Kota Batam berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital) + (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) + (% Pengelolaan sampah) + (% Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum) + (% Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan) + (%	Indeks	57,24	57,87	65,11	69,40	73,40	78,65	84,46	84,46

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target						Kondisi Akhir (2026)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	sesuai Tata Ruang.			Sangat Baik IIWP > 80 Baik 70 > IIWP ≥ 80 Cukup Baik 60 > IIWP ≥ 70 Kurang Baik 50 > IIWP ≥ 60 Sangat Kurang Baiik 40 > IIWP ≥ 60	pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan perkotaan)] / 6									
3	Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.	3.1. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran}}$ $I_{kesehatan}$ = Indeks Kesehatan $I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan $I_{pengeluaran}$ = Indeks Pengeluaran	Indeks	81,11	81,15	81,46	81,74	81,89	82,00	82,10	82,10
			Persentase penduduk miskin	Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan	Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk dikalikan seratus	Persen	4,75%	4,79%	4,74%	4,69%	4,68%	4,66%	4,65%	4,65%
4	Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.	4.1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland (IIWH) adalah indeks yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur (permukiman, sarana dan prasarana perhubungan, dan air bersih dan sanitasi) di wilayah hinterland (di luar wilayah mainland P. Batam). Kategori indeks infrastruktur wilayah perkotaan: Sangat Baik IIWH > 80 Baik 70 > IIWH ≥ 80 Cukup Baik 60 > IIWH ≥ 70 Kurang Baik 50 > IIWH ≥ 60	IIWH =[(% Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland) + (% Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland) + (% Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland)] / 3	Indeks	48,50	48,77	53,07	59,41	63,46	67,57	71,66	71,66

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target						Kondisi Akhir (2026)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Sangat Kurang Baiik 40 > IIWH ≥ 60										
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	5.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Pemerintah Kota Batam yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja penerapan RB tahun n-1. Kategori indeks RB sebagai berikut: 1. AA: >90-100= istimewa 2. A: >80-90= sangat baik 3. BB: >70-80= baik 4. B: >60-70= cukup baik 5. CC: >50-60= cukup 6. C: >30-50= buruk 7. D: 0-30= sangat buruk	Predikat RB (Dikeluarkan oleh Kemenpan RB)	Indeks	52 (CC)	57 (CC)	64 (B)	70 (B)	74 (BB)	79 (BB)	81 (A)	81 (A)

Sumber: Data diolah

Tabel 5.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Daerah) beserta Target Capaiannya Setiap Misi Pembangunan Kota Batam 2021-2026

Misi 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target						Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1.1.1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor) adalah meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor) tahun n dibanding tahun n-1	[(PDRB ADHK Sub sektor perdagangan besar dan eceran tahun n - PDRB ADHK Sub sektor perdagangan besar dan eceran tahun n-1) / (PDRB ADHK Sub sektor perdagangan besar dan eceran tahun n-1)] x 100 %	Persen	-14,73%	1,50%	3,01%	4,53%	6,50%	6,98%	7,12%	7,12%	PD Pengampu Urusan Perindustrian; PD Pengampu Urusan Perdagangan
		1.1.2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam	Pertumbunan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum) adalah meningkatnya nilai PDRB lapangan usaha sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum) tahun n dibanding tahun n-1	[(PDRB ADHK Sub sektor akomodasi dan makan minum tahun n - PDRB ADHK Sub sektor akomodasi dan makan minum tahun n-1) / (PDRB ADHK Sub sektor akomodasi dan makan minum tahun n-1)] x 100 %	Persen	-45,49%	0,12%	2,45%	3,70%	4,70%	6,84%	7,41%	7,41%	PD Pengampu Urusan Pariwisata (Utama); PD Pengampu Urusan Kebudayaan; PD Pengampu Urusan Perindustrian; PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (pendukung)
		1.1.3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah adalah nilai kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA untuk melakukan usaha di Kota Batam	[(Realisasi investasi daerah tahun n - Realisasi investasi daerah tahun n-1) / Realisasi investasi daerah tahun n-1] x 100 %	Persen	49,13%	-10,15%	9,56%	9,51%	10,16%	10,85%	11,61%	11,61%	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target						Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	Indeks Gini	1.2.1. Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah adalah nilai kegiatan produksi IKM selama 1 tahun yang ada di Kota Batam	[(Omset Industri Kecil dan Menengah tahun n - Omset Industri Kecil dan Menengah tahun n-1) / Omset Industri Kecil dan Menengah tahun n-1] x 100 %	Persen	6,05%	5,27%	5,72%	6,77%	7,76%	8,82%	12,16%	12,16%	PD Pengampu Urusan Perindustrian
		1.2.2. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian daerah	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro adalah nilai kegiatan usaha Koperasi dan Usaha Mikro selama 1 tahun yang ada di Kota Batam	[(Omzet koperasi dan UM tahun n - Omzet koperasi dan UM tahun n-1) / Omzet koperasi dan UM tahun n-1] x 100 %	Persen	17,39%	20,69%	23,34%	25,51%	28,21%	31,20%	34,34%	34,34%	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
		1.2.3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya	Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima Nelayan (it) dengan indeks harga yang dibayar Nelayan (ib)	(Indeks yang Diterima Nelayan / Indeks yang Dibelanjakan Nelayan) x 100	Nilai	100,30	100,50	101,00	101,50	102,00	102,50	103,00	103,00	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
		1.2.4. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah	Pertumbuhan Kawasan/Kluster Kreatif Daerah	Pertumbuhan Kawasan/Kluster Kreatif Daerah adalah meningkatnya Kawasan atau klaster ekonomi kreatif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam	[(Jumlah klaster atau kawasam ekonomi kreatif tahun n - Jumlah klaster atau kawasam ekonomi kreatif tahun n-1) / Jumlah klaster atau kawasam ekonomi kreatif tahun n-1] x 100 %	Persen	72,07%	74,07%	76,07%	78,07%	80,07%	82,07%	84,07%	84,07%	PD Pengampu Urusan Pariwisata; PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (Utama); PD Pengampu Urusan Perdagangan (Pendukung)

Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target						Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2.1. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	2.1.1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam berserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam berserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital adalah cakupan ketersediaan dokumen Tata Ruang yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	(Jumlah Dokumen Penataan Ruang Tahun Berjalan / Jumlah Target Akhir Dokumen Penataan Ruang) x 100%	Persen	0,84%	54,95%	76,92%	82,42%	87,91%	93,41%	100%	100%	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH adalah indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari: 1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kategori IKLH: Sangat Baik IKLH > 80 Baik 70 > IKLH ≥ 80 Cukup Baik 60 > IKLH ≥ 70 Kurang Baik 50 > IKLH ≥ 60 Sangat Kurang Baiik 40 > IKLH ≥ 60	(30% IKA + 30% IKU + 40% IKL)	Indeks	69	69	69.5	70	70.5	71	71,5	71,5	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup/ Urusan Perumahan dan Permukiman
			Persentase Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah adalah perbandingan volume sampah yang ditangani dengan timbunan sampah	(Volume sampah yang ditangani / Volume timbulan sampah) x 100%	Persen	55,30%	55,50%	59,25%	61,75%	64,50%	67,25%	71,25%	71,25%	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup/ Unsur Kewilayahan
		2.1.3. Tersedianya infrastruktur	Persentase Pemenuhan Infrastruktur	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah cakupan pemenuhan	(% Jalan dalam kondisi mantap + % Titik banjir yang ditangani 42 titik	Persen	48,40%	49,75%	56%	62,25%	68,50%	81,25%	95%	95%	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target						Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Pekerjaan Umum	jalan dalam kondisi mantab dan penanggulangan 42 titik banjir dalam wilayah perkotaan di Kota Batam	banjir sebagai baseline) / 2										Penataan Ruang
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan adalah perbandingan antara sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi yang telah terpenuhi dengan total kebutuhan yang ada dalam wilayah perkotaan di Kota Batam	(Jumlah Sarana Prasarana perhubungan perkotaan yang Terpenuhi / Total Kebutuhan Sarana Prasarana perhubungan perkotaan) x 100%	Persen	45,00%	45,00%	51,00%	58,00%	63,00%	68,00%	74,00%	74,00%	PD Pengampu Urusan Perhubungan
			Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan adalah cakupan rumah layak huni yang dipenuhi, sarana dan prasarana utilitas yang layak, luasan wilayah yang bebas kumuh, dan peningkatan infrastruktur limgkungan permukiman dalam wilayah perkotaan di Kota Batam	(% Rumah layak huni perkotaan + % Lingkungan perumahan atau permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan + % Penurunan luasan kawasan kumuh perkotaan + % Peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman di perkotaan) / 4	Persen	60%	73%	78%	82%	86%	91%	95%	95%	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Misi 3: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target						Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3.1. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	3.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat	Indeks pendidikan	Indeks Pendidikan adalah rata-rata antara indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	$I_{pendidikan} = (I_{HLS} + I_{RLS}) / 2$	Indeks	73,69	73,75	73,81	73,87	73,93	73,99	74,05	74,05	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atas kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu	Nilai tingkat kegemaran membaca diperoleh dari survey tingkat kegemaran membaca di perpustakaan	Persen	7%	9%	12%	15%	20%	30%	35%	35%	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
		3.1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan adalah indeks yang membandingkan antara nilai minimum dan maksimamum Angka Harapan Hidup (AHH). gka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi	$I_{kesehatan} = (AHH - AHH_{min}) / (AHH_{maks} - AHH_{min})$	Indeks	82,05	82,12	82,19	82,26	82,33	82,4	82,47	82,47	PD Pengampu Urusan Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target						Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat											
		3.1.3. Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks Pengeluaran adalah indeks yang membandingkan antara nilai pengeluaran per kapita Kota Batam dengan nilai pengeluaran per kapita minimum dan maksimum di Indonesia.	Indeks Pengeluaran = Pengeluaran per Kapita Disesuaikan = [ln(pengeluaran) - ln(pengeluaran min)] / [ln(pengeluaran maks) - ln(pengeluaran min)]	Indeks	88,26	88,68	90,06	91,11	91,87	92,62	93,38	93,38	PD Pengampu Urusan Perdagangan (OPD Utama); PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) (OPD Pendukung)
		3.1.4. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pembangunan gender adalah indikator yang menggambarkan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki dan merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia	(IPM perempuan / IPM laki-laki) x 100	Indeks	94,42	94,43	94,44	94,46	94,48	94,50	94,52	94,52	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan adalah perbandingan antara jumlah pemuda, baik yang diakukan secara perorangan maupun terorganisir dalam suatu organisasi kepemudaan, yang berperan secara aktif dan memiliki kontribusi di berbagai bidang kreatif yang nyata dalam rangka memajukan pembangunan masyarakat	(Jumlah pemuda yang aktif dalam usaha ekonomi produktif atau aktif berorganisasi / jumlah pemuda di Kota Batam) x 100%	Persen	6,64%	6,64%	7,64%	8,64%	9,64%	10,64%	11,64%	11,64%	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target						Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		3.1.5. Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat	Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran adalah menurunnya tingkat angka kejadian konflik sosial dan pelanggaran terhadap Perda yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Konflik Sosial adalah Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik,adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	(Jumlah konflik atau pelanggaran terhadap Perda dan trantibum tahun (n-1) - Jumlah konflik atau pelanggaran terhadap Perda dan trantibum tahun (n) / Jumlah konflik atau pelanggaran terhadap Perda dan trantibum tahun (n-1) x 100%	Persen	10,00%	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20,00%	25,00%	25,00%	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat / Unsur Pemerintahan Umum
	Persentase penduduk miskin	3.1.6. Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi **pangan** sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi **pangan**	Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100	Skor	92,2	86,9	87,2	87,6	87,9	88,2	88,5	88,5	PD Pengampu Urusan Pangan
		3.1.7.	Tingkat	Pengangguran terbuka adalah	(Jumlah penduduk usia	Persen	11,79%	10,50%	10,00%	9,75%	9,65%	9,60%	9,55%	9,55%	PD Pengampu

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target						Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Menurunnya angka pengangguran	Pengangguran Terbuka	mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai	15 tahun lebih yang menganggur / Jumlah angkatan kerja) x 100%										Urusan Tenaga Kerja
		3.1.8. Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat	Persentase Penurunan PPKS	Persentase Penurunan PPKS adalah menurunnya jumlah PPKS di Kota Batam selama 1 tahun. **PPKS** (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).	(Jumlah PPKS tahun n - Jumlah PPKS tahun n-1) / Jumlah PPKS tahun n-1) x 100%	Persen	1,65%	1,60%	1,55%	1,50%	1,45%	1,40%	1,35%	1,35%	PD Pengampu Urusan Sosial

Misi 4: Melanjutkan Percepatan Pembangunan Di Daerah Hinterland Untuk Pemerataan Dan Sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam.

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target						Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
4.1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	4.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman wilayah Hinterland adalah cakupan rumah layak huni yang dipenuhi, sarana dan prasarana utilitas yang layak, luasan wilayah yang bebas kumuh, dan peningkatan infrastruktur limgkungan permukiman dalam wilayah Hinterland (di luar wilayah mainland P. Batam).	(% Rumah layak huni di wilayah hinterland + % Lingkungan perumahan atau permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di wilayah hinterland + % Penurunan luasan kawasan kumuh wilayah hinterland + % Peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman di wilayah hinterland) / 4	Persen	60,00%	40,46%	41,67%	55,85%	63,01%	70,19%	77,19%	77,19%	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		4.1.2. Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan di wilayah Hinterland adalah perbandingan antara sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi yang telah terpenuhi dengan total kebutuhan yang ada dalam wilayah Hinterland (di luar wilayah mainland P. Batam)	(Jumlah Sarana prasarana perhubungan wilayah hinterland yang Terpenuhi / Total Kebutuhan Sarana prasarana perhubungan wilayah hinterland) x 100%	Persen	80,00%	78,00%	88,00%	91,00%	94,00%	97,00%	100,00%	100,00%	PD Pengampu Urusan Perhubungan
		4.1.3. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland adalah cakupan penduduk yang memperoleh layanan air bersih dan sanitasi yang layak dalam wilayah Hinterland (di luar wilayah mainland P. Batam)	(% penduduk yang mendapatkan layanan air bersih yang layak + % penduduk yang mendapatkan layanan sanitasi yang layak) / 2	Persen	27,50%	27,86%	29,55%	31,38%	33,37%	35,51%	37,80%	37,80%	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Responsif, Efektif Dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target						Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
5.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Indeks Reformasi Birokrasi	5.1.1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Opini BPK	Opini BPK adalah pendapat yang dikeluarkan oleh BPK atas hasil pemeriksaan (audit) terhadap LKPD Pemerintah Kota Batam tahun anggaran tertentu sesuai dengan standar pemeriksaan.	Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan /PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
			Nilai LPPD	Nilai LPPD adalah status Kinerja Pemerintah Daerah adalah nilai yang diperoleh Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) dan atau sebutan lainnya atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun n-2	Nilai LPPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	BPD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan) (PD Utama); PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Perencanaan; PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan (OPD Pendukung)
			Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD	Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD merupakan hasil penilaian atas pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Batam	Nilai Tata Kelola Kearsipan yang Dikeluarkan oleh Lembaga ANRI melalui Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Nilai	53 (Cukup)	53 (Cukup)	55 (Cukup)	60 (Cukup)	65 (Baik)	67 (Baik)	70 (Baik)	70 (Baik)	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
			Tingkat Maturitas SPIP	**Tingkat maturitas** penyelenggaraan **SPIP** adalah **tingkat** kematangan **SPIP** dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penilaian tingkat kualitas SPIP dari BPKP	Kategori	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target						Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		5.1.2. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah adalah meningkatnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun n dibandingkan tahun n-1.	((Realisasi pajak dan retribusi daerah tahun n - Realisasi pajak dan retribusi daerah tahun n-1) / Realisasi pajak dan retribusi daerah tahun n-1) x 100%	Persen	-19,11% dan 2,34%	25,12% dan 38,09%	36,47% dan 44,44%	4,72% dan 4,72%	4,72% dan 4,72%	4,72% dan 4,72%	4,72% dan 4,72%	4,72% dan 4,72%	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan
		5.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE	Nilai **Indeks SPBE** adalah nilai **indeks** yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan **SPBE** secara keseluruhan. Nilai **Indeks SPBE** merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai **Indeks** Domain dan bobot domain	Hasil Penilaian Kementerian Kominfo atau Penilaian Mandiri	Indeks	3,11	2,82	3,09	3,18	3,47	3,66	3,86	3,86	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Indeks Profesionalitas ASN	Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari IP-**ASN** adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas **ASN** yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai **ASN** dalam melakukan tugas jabatannya	Hasil penilaian dari BKN	Indeks	51,99	53,99	55,49	60	62	64	66	66	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Indeks Kepuasan Masyarakat** (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadapap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,61	82	88,31	89	90	91	92	92	Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah ; PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD; PD Pengampu Unsur Kewilayahan; PD terkait

5.4 Hubungan Antara Isu Strategis dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026

Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan periode 2021-2026 yang ditetapkan haruslah bisa menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Batam, sebagaimana tertuang dalam Bab IV. Dalam Bab IV telah diuraikan hubungan antara permasalahan (internal) pembangunan Kota Batam dengan isu-isu strategisnya. Selain itu, telah diuraikan pula isu-isu strategis nasional maupun internasional yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kota Batam hingga tahun 2026. Karenanya, untuk menjamin bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam dapat menjawab semua isu strategis, maka Tabel 5.4 memperlihatkan hubungan isu strategis terkait permasalahan pembangunan Kota Batam maupun isu regional/nasional/internasional dengan visi, misi, tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, jika sasaran, tujuan, misi dan visi tercapai, maka isu strategis tersebut telah terjawab.

Tabel 5.4. Hubungan Isu Strategis Pembangunan Kota Batam, Nasional dan Internasional dengan Pokok Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026

Isu Strategis	Pokok Visi	Misi ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BATAM 2021-2026				
Adaptasi Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19	"Sejahtera", "Modern"	Misi 3	Tujuan 4	11 s.d. 18
Mengembangkan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing				
Reformasi Birokrasi	"Madani", "Modern"	Misi 5	Tujuan 6	22 dan 24
Mewujudkan Batam sebagai Bandar Madani Berstandar Internasional	"Bandar Dunia", "Modern"	Misi 2 dan Misi 4	Tujuan 3 dan 5	8 s.d. 10 dan 19 s.d. 21
Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional		Misi 1	Tujuan 1 dan 2	1 s.d. 7
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	"Bandar Dunia", "Modern" dan "Sejahtera"	Misi 2 dan 4	Tujuan 3 dan 5	8 s.d. 10 dan 19 s.d. 21

Isu Strategis	Pokok Visi	Misi ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim				
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan				
Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD	"Madani", "Modern"	Misi 5	Tujuan 6	22 dan 24
Pembangunan Berbasis Gender (Perempuan, Anak, Disabilitas, Lansia)	"Sejahtera", "Modern"	Misi 3	Tujuan 4	11 s.d. 18
ISU STRATEGIS NASIONAL				
Adaptasi terhadap Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19	"Sejahtera", "Modern"	Misi 3	Tujuan 4	11 s.d. 18
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Bandar Dunia", "Modern" dan "Sejahtera"	Misi 2 dan 4	Tujuan 3 dan 5	8 s.d. 10 dan 19 s.d. 21
Reformasi birokrasi	"Madani", "Modern"	Misi 5	Tujuan 6	22 dan 24
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	"Bandar Dunia", "Modern" dan "Sejahtera"	Misi 2 dan 4	Tujuan 3 dan 5	8 s.d. 10 dan 19 s.d. 21
Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional	"Bandar Dunia", "Modern"	Misi 1	Tujuan 1 dan 2	1 s.d. 7
Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Kelompok Difabel dan Kelompok Rentan	"Sejahtera", "Modern"	Misi 3	Tujuan 4	11 s.d. 18
ISU STRATEGIS INTERNASIONAL				
Adaptasi terhadap Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19	"Sejahtera", "Modern"	Misi 3	Tujuan 4	11 s.d. 18
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Bandar Dunia", "Modern" dan "Sejahtera"	Misi 2 dan 4	Tujuan 3 dan 5	8 s.d. 10 dan 19 s.d. 21
Perdagangan Bebas ASEAN, Asia dan Dunia	"Bandar Dunia", "Modern"	Misi 1	Tujuan 1 dan 2	1 s.d. 7
Revolusi 4.0 dan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi	"Madani", "Modern"	Misi 5	Tujuan 6	22 dan 24

5.5 Keselarasan Visi dan Misi Pembangunan Kota Batam 2021-2026 dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, dan RPJPD Kota Batam 2005-2025

Seperti telah diungkapkan di Bab I, dokumen RPJMD ini akan terkait dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dengan dokumen rencana pembangunan jangka panjang maupun dengan dokumen rencana level pemerintahan di atasnya (provinsi dan nasional). Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Batam 2021-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam 2005-2025 di tahap keempat. RPJPD tersebut tetap menjadi acuan sehingga keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Batam dengan jangka menengahnya akan tetap terjamin. Keselarasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Misi pertama RPJPD Tahap IV, Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional, selaras dan diterjemahkan dalam pokok Visi “Bandar Dunia” yang “modern” dengan penyelenggaran Misi II, serta pokok visi “Sejahtera” dan “modern” dengan penyelenggaraan Misi IV Pembangunan Kota Batam 2021-2026.
2. Misi kedua RPJPD Tahap IV, Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional, selaras dan diterjemahkan dalam pokok Visi “Bandar Dunia” yang “Modern” dengan penyelenggaraan Misi I Pembangunan Kota Batam 2021-2026.
3. Misi Ketiga RPJPD Tahap IV, Menciptakan Masyarakat Sejahtera, selaras dan diterjemahkan dalam pokok Visi “Sejahtera” dan “Modern” dengan penyelenggaraan Misi III Pembangunan Kota Batam 2021-2026.
4. Misi Keempat RPJPD Tahap IV – Menciptakan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang Madani – selaras dan diterjemahkan dalam pokok Visi “Madani” yang “Modern” dengan penyelenggaraan Misi V Pembangunan Kota Batam 2021-2026.

Tabel 5.5. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025 Tahap IV

Misi RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025 Tahap IV	RPJMD Kota Batam Tahun 2021 - 2026	
	Pokok Visi	Misi
Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional	Bandar Dunia", "Modern" dan "Sejahtera"	Misi 2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang; dan Misi 4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional	"Bandar Dunia", "Modern"	Misi 1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah
Menciptakan Masyarakat Sejahtera	"Sejahtera", "Modern"	Misi 3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
Menciptakan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang Madani	"Madani", "Modern"	Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam 2021-2026 juga selaras dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Keselarasan yang dimaksud adalah:

1. Tiga pokok Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau selaras dengan tiga pokok visi pembangunan Kota Batam. Pokok visi "Makmur" dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau selaras dengan pokok visi "sejahtera" dan "modern" dalam pembangunan Kota Batam. Pun demikian, pokok visi "berdaya saing" dan "Berbudaya" pembangunan Kepulauan Riau masing-masing selaras dengan pokok visi "bandar dunia" dan "madani"
2. Misi I pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat, selaras dengan Misi I pembangunan Kota Batam

3. Misi II dan IV pembangunan Provinsi Kepulauan Riau - Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasis Iman dan taqwa dan Mengembangkan dan melestarikan budaya melayu dan budaya nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan - selaras dengan Misi III pembangunan Kota Batam
4. Misi III pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan dan berwawasan lingkungan, selaras dengan misi V pembangunan Kota Batam.
5. Misi V pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur antar pulau guna perintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir, selaras dengan Misi II dan IV pembangunan Kota Batam.

Tabel 5.6. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026		RPJMD Kota Batam Tahun 2021 - 2026	
Pokok Visi	**Misi**	**Pokok Visi**	**Misi**
“Makmur”		“sejahtera” dan “modern”	
“berdaya saing”		“bandar dunia” yang "Modern"	
“Berbudaya”		"Madani" yang "Modern"	
	Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat		Misi 1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah
	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasis Iman dan taqwa		Misi 3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026		RPJMD Kota Batam Tahun 2021 - 2026	
Pokok Visi	**Misi**	**Pokok Visi**	**Misi**
	Mengembangkan dan melestarikan budaya melayu dan budaya nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan		
	Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan dan berwawasan lingkungan		Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
	Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur antar pulau guna perintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir		Misi 2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang; dan Misi 4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam

Visi dan Misi pembangunan Kota Batam juga selaras dengan tujuh agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Keselarasan yang dimaksud adalah:

1. Agenda nasional I, Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah,

lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi, selaras dengan pokok visi "Bandar Dunia" yang "Modern" dan Misi I pembangunan Kota Batam

2. Agenda nasional II, Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah selaras dengan pokok visi "Bandar Dunia" yang "Modern" dan Misi II, serta pokok visi "Sejahtera" dan "Modern" dengan Misi IV pembangunan Kota Batam
3. Agenda nasional III, Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk, selaras dengan pokok visi "Sejahtera" dan "Modern" dengan Misi III pembangunan Kota Batam
4. Agenda nasional IV, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja, juga selaras dengan pokok visi "Sejahtera" dan "Modern" dengan Misi III pembangunan Kota Batam
5. Agenda nasional V, Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selaras dengan pokok visi "Bandar Dunia" yang "Modern" dan Misi II, serta pokok visi "Sejahtera" dan "Modern" dengan Misi IV pembangunan Kota Batam
6. Agenda nasional VI, Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, juga selaras dengan pokok visi "Bandar Dunia" yang "Modern" dan Misi II, serta pokok visi "Sejahtera" dan "Modern" dengan Misi IV pembangunan Kota Batam
7. Meskipun tidak sepenuhnya sama karena perbedaan kewenanangan, namun agenda nasional VII, Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan

keamanan serta transformasi pelayanan publik, tetap selaras dengan pokok visi “Madani” yang “Modern” dan Misi V pembangunan Kota Batam

Tabel 5.7. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan Agenda Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Agenda Nasional dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024	RPJMD Kota Batam Tahun 2021 - 2026	
	Pokok Visi	Misi
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi	“Bandar Dunia”, “Modern”	Misi 1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah	Bandar Dunia”, “Modern” dan “Sejahtera”	Misi 2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang; dan Misi 4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk	“Sejahtera”, “Modern”	Misi 3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja		
Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Bandar Dunia”, “Modern” dan “Sejahtera”	Misi 2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung

Agenda Nasional dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024	RPJMD Kota Batam Tahun 2021 - 2026	
	Pokok Visi	Misi
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim		Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang; dan Misi 4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik	"Madani", "Modern"	Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Dengan pokok visi serta misi yang selaras, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026 juga akan selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang tahap IV Kota Batam, serta pembangunan jangka menengah nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau di periode yang bersesuaian.

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah. Strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa strategi merupakan "ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan". Untuk dapat diimplementasikan dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan, strategi pembangunan akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit yang menjadi arahan dan panduan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun kedepan.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi pemangku kepentingan pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategis" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berpijak pada komitmen yang tinggi untuk mencapai visi "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera", melalui lima misi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam periode 2021- 2026 yakni:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang.
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia.
4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Agar lebih implementatif maka dirumuskan 23 strategi pencapaian yang telah dirumuskan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, sebagai berikut:

A. Misi pertama: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah, dengan strategi:
   1. Mempercepat pemulihan ekonomi terdampak Covid-19 melalui penguatan Usaha Mikro dan industri serta peningkatan investasi;
   2. Meningkatkan aktivitas perekonomian bagi usaha besar, Usaha Mikro dan IKM;
   3. Meningkatkan pelayanan investasi dan kemudahan berusaha;
   4. Mendorong percepatan dan fasilitasi pelaksanaan KEK bersama BP Batam;
   5. Menyusun perencanaan kegiatan investasi skala besar, sedang dan kecil berdasarkan RTRW Kota Batam.

B. Misi kedua: Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang, dengan strategi:
   1. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, utilitas dan pengendalian banjir;
   2. Menyediakan sistem transportasi perkotaan yang aman dan ramah lingkungan;
   3. Meningkatkan pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang kota yang terintegritas;
   4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri, ramah, aman dan nyaman.

C. Misi ketiga: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia, dengan strategi:
   1. Meningkatkan pemerataan sektor pendidikan dan kesehatan;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga didik dan tenaga medis;
4. Memperkuat pendidikan vokasi dan kompetensi;
5. Meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai agama, seni dan budaya.
6. Meningkatkan penyediaan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan.

D. Misi keempat: Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam, dengan strategi:
   1. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan hinterland;
   2. Mengembangkan kawasan hinterland sebagai penopang kawasan ekonomi;
   3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan di bidang ekonomi, sumber daya manusia dan legalitas lahan.

E. Misi kelima: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan strategi:
   1. Membangun sistem dan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-Government yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, responsif dan berkualitas;
   2. Membangun struktur kelembagaan yang efektif, efisien dan berkualitas;
   3. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel;
   4. Meningkatkan kinerja dan motivasi ASN;
   5. Memberikan tambahan insentif sesuai beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

Misi dan Strategi di atas merupakan rumusan misi dan strategi yang disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Namun demikian, rumusan misi dan strategi tersebut harus diselaraskan dengan konsep penjabaran visi-misi ke dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan sektor yang ditentukan dan urusan pemerintahan yang terkait sehingga berpengaruh terhadap rumusan strategi. Oleh karena itu, pada tabel 6.1 di bawah disajikan rumusan tujuan dan sasaran serta strategi yang disesuaikan berdasarkan sektor dan urusan pemerintahan yang terkait.

Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026

VISI : "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"		
Misi 1: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Tujuan 1: Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing	**Sasaran 1:** Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	**Strategi 1:** Meningkatkan sarana distribusi perdagangan dan mempermudah perijinan serta pendafataran perusahan perdagangan **Strategi 2:** Meningkatkan promosi dan pemasaran perdagangan
	Sasaran 2: Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam.	**Strategi 1:** Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemasaran destinasi wisata Kota Batam **Strategi 2:** Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan untuk mendukung pariwisata
	Sasaran 3: Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	**Strategi 1:** Meningkatkan pelayanan investasi dan kemudahan berusaha; **Strategi 2:** Menyusun perencanaan kegiatan investasi skala besar, sedang dan kecil berdasarkan RTRW Kota Batam. **Strategi 3:** Mendorong percepatan dan fasilitasi pelaksanaan KEK bersama BP Batam
Tujuan 2: Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	**Sasaran 4:** Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah	**Strategi 1:**Menyusun perencanaan pengembangan IKM Kota Batam dan fasilitasi pengimplentasiannya; **Strategi 2:** Meningkatkan produktivitas IKM;

VISI : "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"		
	Sasaran 5: Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah	**Strategi 1:** Meningkatkan produktivitas Usaha Mikro **Strategi 2:** Pengembangan kelembagaan dan produktivitas koperasi
	Sasaran 6: Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya	**Strategi 1:** Meningkatkan produktivitas Nelayan Kecil dan Budidaya
	Sasaran 7: Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah	**Strategi 1:**Menyusun perencanaan kawasan ekonomi kreatif dan fasilitasi pengimplementasiannya
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Tujuan 3: Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan.	**Sasaran 8:** Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten.	**Strategi 1:** Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perencanaan dan pemanfaatan/data dan informasi bidang keciptakaryaan dan tata ruang. **Strategi 2:** Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.
	Sasaran 9: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	**Strategi 1:** Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan **Strategi 2:** Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau. **Strategi 3:** Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan.
	Sasaran 10: Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni.	**Strategi 1:** Meningkatkan kualitas jaringan jalan. **Strategi 2:** Meningkatkan kualitas jaringan drainase. **Strategi 3:** Meningkatkan kualitas infratruktur permukiman. **Strategi 4:** Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan. **Strategi 5:** Memperbaiki kondisi lalu lintas dan meningkatkan tingkat keamanan lalu lintas. **Strategi 6:** Pengembangan sistem transportasi umum masal.

VISI : "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"		
Misi 3: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Tujuan 4: Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	**Sasaran 11:** Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat	**Strategi 1:** Meningkatkan efektifitas dan kualitas layanan pendidikan kesetaraan, pra sekolah dan dasar (9 tahun) **Strategi 2:** Meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat.
	Sasaran 12: Meningkatnya aksebilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	**Strategi 1:** Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan **Strategi 2:** Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat **Strategi 3:** Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat
	Sasaran 13: Meningkatnya daya beli masyarakat	**Strategi 1:** Mengupayakan stabilisasi harga, standarisasi dan perlindungan konsumen
	Sasaran 14: Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	**Strategi 1:** Optimalisasi upaya pemberdayaan gender **Strategi 2:** Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak **Strategi 3:** Meningkatkan upaya ketahanan keluarga dan optimalisasi pengendalian penduduk **Strategi 4:** Meningkatkan partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri dan/atau organisasi kepemudaan/sosial kemasyarakatan
	Sasaran 15: Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat	**Strategi 1:** Optimalisasi upaya penurunan pelanggaran terhadap perda dan Trantibum **Strategi 2:** Meningkatkan ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, politik, dan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat
	Sasaran 16: Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah	**Strategi 1:** Meningkatkan keanekragaman, ketersediaan dan keamanan pangan
	Sasaran 17: Menurunnya angka pengangguran	**Strategi 1:** Optimalisasi upaya/fasilitasi penyerapan dan perlindungan tenaga kerja **Strategi 2:** Meningkatkan upaya

VISI : "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"		
		pencegahan dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan/ hubungan industrial
	Sasaran 18: Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat	**Strategi 1:** Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan terhadap PPKS **Strategi 2:** Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarkat untuk berpartisipasi dalam penanganan permasalahan sosial
Misi 4: Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Tujuan 5: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland.	**Sasaran 19:** Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	**Strategi 1:** Meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland
	Sasaran 20: Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland	**Strategi 1:** Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland
	Sasaran 21: Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	**Strategi 1:** Optimalisasi penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland.
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Tujuan 6: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	**Sasaran 22:** Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	**Strategi 1:** Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah **Strategi 2:** Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Sasaran 23: Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah	**Strategi 1:** Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
	Sasaran 24: Meningkatnya kualitas pelayanan	**Strategi 1:** Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan

VISI : "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"		
	publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	pemerintahan / pelayanan publik **Strategi 2:** Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan publik

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditentukan, selanjutnya guna dapat implementasikan dalam mencapai sasaran pembangunan Kota Batam, maka strategi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan daerah. Berikut program prioritas atau unggulan daerah sesuai dengan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang disinkronkan dengan program pembangunan daerah beserta pagu indikatif dan Perangkat Daerah penanggung jawab:

Tabel 6. 2 Program Prioritas Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Disinkronkan dengan Program Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
1	Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	I. Penguatan Usaha Mikro dan IKM melalui:			
		a. Memfasilitasi Akses bagi Usaha Mikro dan IKM ke Pusat Perdagangan Modern dan Internasional.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	5,362,115,712	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	14,198,756,175	PD Pengampu Urusan Perindustrian; PD Pengampu Urusan Perdagangan
			Program pengembangan ekspor	718,026,500	
		b. Mendorong berkembangnya pusat kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, bidang industri dan KEK.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	495,400,000	PD Pengampu Urusan Perindustrian
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13,060,492,700	PD Pengampu Urusan Pariwisata
		c. Pemasaran dan promosi yang optimal.	Program Pengembangan UMKM	10,132,934,478	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
			Program pengembangan ekspor	897,710,000	PD Pengampu Urusan Perdagangan
		d. Penurunan Suku Bunga Dana Bergulir menjadi 4% (sesuai dengan ketentuan).	Berupa kegiatan koordinasi dan monitoring yang Dilakukan oleh Setdako		PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
		e. Fasilitasi Ruang dan Tempat Usaha Usaha Mikro yang akan disiapkan oleh Pemerintah	Sudah ada dalam Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro dan masuk dalam koordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan inisiasi		PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro

No	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
			Gedung BLUD untuk UMKM		
		f. Percepatan Pembangunan Pasar Induk Jodoh	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	8,282,358,519	PD Pengampu Urusan Perdagangan
		g. Relaksasi Pajak Daerah dan Insentif kepada Usaha Mikro terdampak Covid-19.	Tidak ada sub kegiatan atau program khusus, hanya berupa kegiatan rapat koordinasi yang ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan
		II. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui:			
		a. Meningkatkan pendapatan nelayan dan petani melalui pasar yang menjual produk lokal.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	27,800,529,562	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	29,527,905,938	PD Pengampu Urusan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8,138,559,855	
		b. Meningkatkan jaring pengaman sosial dan kegiatan padat karya;	Program Rehabilitasi Sosial	10,856,407,135	PD Pengampu Urusan Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11,631,633,701	
			Program Penanganan Bencana	2,314,796,758	
		c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Tua melalui kepemilikan aset lahan; III. Sertifikasi Rumah Ibadah Gratis	Program Penatagunaan Tanah	10,453,070,003	PD Pengampu Urusan Pertanahan
		d. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja terdampak Covid-19;	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	56,237,078,707	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	320,652,013	
		e. Operasi pasar dan bantuan sembako untuk	Program stabilisasi harga barang	37,582,028,138	PD Pengampu Urusan

No	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
		mengontrol harga dan menekan laju inflasi.	kebutuhan pokok dan barang penting		Perdagangan
		f. Insentif Pemulasaran Jenazah (Fardhu Kifayah Jenazah);	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	9,550,000,000	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
		g. Peningkatan Insentif RT/RW	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	196,014,961,524	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
		h. Guru TPQ, Guru Agama, Mubaligh, Imam Mesjid, Pendeta Menetap	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	382,637,843,088	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
		i. Kader Posyandu.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	97,522,440,477	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		j. Bantuan biaya pemakaman orang miskin.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	63,112,088,497	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup; PD Pengampu Urusan Perumahan dan Pemukiman
			Program Rehabilitasi Sosial	850,854,660	PD Pengampu Urusan Sosial
		k. Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah layak huni.	Program Kawasan Permukiman	7,902,716,952	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Pemukiman

No	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
		IV. Dukungan dan fasilitasi pengembangan Kawasan Ekonomi Baru di KPBPB, KEK di bidang industri, pariwisata dan kawasan pulau untuk kegiatan pariwisata, pertanian, dan perkebunan.	Program Penyuluhan Pertanian	2,481,377,900	PD Pengampu Urusan Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	379,605,264	
			Program Pengelolaan Permuseuman	5,360,637,875	PD Pengampu Urusan Kebudayaan; PD Pengampu Urusan Pariwisata
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	978,718,648,065	
			Program Pemasaran Pariwisata	8,813,780,975	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14,754,564,750	
		V. Mendorong BP Batam untuk Pembebasan UWT seluruh rumah ibadah dan instansi pemerintah	Merupakan kewenangan BP Batam		
2	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	I. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Utilitas Perkotaan yang berkualitas, dengan cara :			
		a. Peningkatan Jalan Utama Tuntas.	Program Penyelenggaraan Jalan	982,347,223,446	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	506,080,695,602	
		b. Peningkatan Jalan Lingkungan Tuntas.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	488,304,954,067	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Pemukiman
			Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	601,403,278,760	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
		c. Pengendalian/Penanganan Banjir Tuntas.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	71,688,460,871	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan

No	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	226,120,091,087	Penataan Ruang
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	95,542,932,463	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Pemukiman
			Program Pengelolaan Persampahan	43,308,381,636	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
				130,394,320,157	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
		d. Peningkatan PIK menjadi 2,5 M per Kelurahan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	859,147,541,086	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
		II. Sarana dan Prasarana Pedestrian dan Jalur Sepeda (Gowes)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	29,002,428,200	PD Pengampu Urusan Perhubungan
		III. Pengembangan Koridor Transportasi Massal.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	163,497,777,579	PD Pengampu Urusan Perhubungan
		IV. Pembangunan Utilitas Perkotaan berupa jaringan pipa gas dan sanitasi terpadu.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	460,444,687,223	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	28,240,789,151	
		V. Penyiapan Taman-Taman Kota Bertema sebagai Ruang Terbuka Hijau, tempat berolahraga serta Rekreasi Masyarakat.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	121,273,590,855	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup; PD Pengampu Urusan Perumahan dan Pemukiman
3	Peningkatan Kualitas SDM	I. Bidang Pendidikan, melalui :			

No	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
	yang Unggul dan Bermartabat.	a. Sekolah Gratis, Transportasi Pelajar Gratis, Baju Seragam Gratis bagi Siswa Baru (SD dan SMP).	Program Pengelolaan Pendidikan	1,073,362,431,954	PD Pengampu Urusan Pendidikan
		b. Beasiswa di 7 universitas di Indonesia.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	26,041,820,000	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		c. Peningkatan Insentif dan Pemberian Beasiswa Guru Berprestasi.	Program Pengelolaan Pendidikan	263,622,600,000	PD Pengampu Urusan Pendidikan
		d. Fasilitasi Pendidikan Vokasi di Bidang Digital, Dirgantara dan Maritim.	Merupakan Kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		
		e. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana pendidikan yang modern.	Program Pengelolaan Pendidikan	2,390,105,798,537	PD Pengampu Urusan Pendidikan
		f. Meningkatkan kembali Kerjasama Pendidikan dan Kompetensi Tenaga Kerja dengan Pemerintah Singapura.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1,865,648,184	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)
		II. Bidang Kesehatan, melalui:			
		a. Jampersal gratis bagi masyarakat tidak mampu.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	11,766,989,936	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		b. Memberikan Jamkesda melalui pembayaran premi BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Bagi Masyarakat Miskin.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	136,347,634,039	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		c. Peningkatan puskesmas rawat inap serta fasilitas Kesehatan yang layak.	Berdasarkan Permenkes RI Nomor: 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat maka Puskesmas Rawat Inap hanya di Peruntukan bagi Skala		

No	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
			Kabupaten.		
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	125,407,360,000	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		d. Meningkatkan insentif tenaga medis.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	94,500,000,000	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		e. Fasilitasi Penyiapan KEK Jasa Kesehatan (Health Tourism).	Merupakan kewenangan BP Batam		
		f. Peningkatan kualitas dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	152,122,898,074	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		g. Perawatan pasien Covid-19 gratis.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	356,107,067,355	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	25,377,382,631	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		III. Bidang Tenaga Kerja, melalui:			
		a. Membina kerjasama Lembaga Pendidikan dengan pelaku dunia usaha.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	5,968,346,579	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		b. Fasilitasi Pendirian BLK Kemaritiman sebagai pusat peningkatan Kapasitas/Skill SDM Batam di Kabil, Nongsa.	Merupakan Kewenangan dari Kementerian Tenaga Kerja		
		c. Sertifikasi Gratis Tenaga Kerja Batam.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	56,411,635,126	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		d. Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Terpadu.	Program Penempatan Tenaga Kerja	1,642,668,362	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja

No	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
		e. Fasilitasi pembangunan Rumah Susun untuk pekerja.	Program Pengembangan Perumahan	54,863,450,623	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup; PD Pengampu Urusan Perumahan dan Pemukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	17,149,343,559	
4	Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	I. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Provinsi, BP Batam, dan dunia usaha dalam rangka memberikan kemudahan fasilitas investasi dan Promosi.	Program Promosi Penanaman Modal	584,833,640	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
		II. Meningkatkan dan memperkuat kinerja pelayanan perizinan melalui penguatan SDM dan Teknologi Informasi.	Program Pelayanan Penanaman Modal	2,386,438,520	
		III. Memberikan insentif dan kemudahan berusaha sebagai stimulus ekonomi bagi pelaku usaha.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	750,000,000	
		IV. Menciptakan kenyamanan dan kepastian investasi melalui fasilitasi sarana pendukung investasi di bidang lahan, infrastruktur dasar dan utilitas serta dukungan aspek legal.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1,926,732,000	
			Program Promosi Penanaman Modal	300,610,000	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	29,565,162,723	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		V. Mendorong percepatan penyelesaian lahan di Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru.	Merupakan kewenangan BP Batam		
5	Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	I. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, pelantar dan jembatan.	Program Penyelenggaraan Jalan	81,774,800,374	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana	40,696,265,791	PD Pengampu Urusan

No	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
			dan Utilitas Umum (PSU)		Perumahan dan Pemukiman
		II. Peningkatan keterhubungan antar pulau.	Program Pengelolaan Pelayaran	45,800,801,371	PD Pengampu Urusan Perhubungan
		III. Fasilitasi pemenuhan akses listrik, air bersih dan telekomunikasi bagi pulau-pulau strategis.	Akses Listrik dan Telekomunikasi bukan menjadi Kewenangan dari Pemerintah Kota, sedangkan Penyediaan Air Bersih menjadi satu dengan pembangunan di wilayah perkotaan yang ada dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di atas		PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		IV. Pemberian bantuan penunjang kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan.	Menjadi satu dengan Program Pengelolaan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan di atas		PD Pengampu Urusan Pendidikan; PD Pengampu Urusan Kesehatan
		V. Pemberian beasiswa ke Perguruan Tinggi Negeri.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	711,729,951	PD Pengampu Urusan Sosial
		VI. Melanjutkan kegiatan verifikasi lahan masyarakat hinterland melalui prona dan proda.	Menjadi satu dalam Program Penatagunaan Tanah di Dinas Pertanahan yang sudah disajikan di atas		PD Pengampu Urusan Pertanahan
		VII. Percepatan penyelesaian Sertifikasi Lahan.			
6	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	I. Penerapan e-Government, SPM dan SOP di setiap aspek pelayanan publik.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	36,005,245,442	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,732,890,074	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

No	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	461,852,456	PD Pengampu Urusan Statistik
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	609,425,587	PD Pengampu Urusan Persandian
				296,712,510	
				312,713,077	
		II. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	40,726,448,605	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
				1,160,250,000	
				5,520,348,118	
				34,045,850,487	
		III. Pemberian sanksi dan penghargaan terhadap kinerja aparatur.	Program Kepegawaian Daerah	8,336,537,000	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian
		IV. Peningkatan disiplin, kualitas kerja, dan kompetensi aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	29,985,470,300	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian
			Program Kepegawaian Daerah	5,761,284,000	

Sesuai dengan pendekatan penyusunan perencanaan berdasarkan substansinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan pendekatan holistik, tematik integratif dan spasial.

Dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 terdapat arah kebijakan pembangunan kewilayahan dimana pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, pariwisata, industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, *international trade and finance center*. Sedangkan arah pengembangan wilayah Kota Batam dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan jalur transportasi lokal dan internasional;
2. Pembangunan jalan, jembatan dan drainase;
3. Pembangunan infrastruktur utama dan penunjang kegiatan industri;
4. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus);
5. Pengembangan industri galangan kapal, jasa kepelabuhan, pergudangan, offshore, dan elektronik;
6. Pengembangan pelabuhan logistik;
7. Pengembangan kawasan industri dan pariwisata Galang Rempang;
8. Manjadikan Batam sebagai tujuan utama wisata MICE di Indonesia;
9. Fasilitasi dan percepatan pembangunan jembatan Batam-Bintan; dan
10. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

Dalam sub bab ini, disajikan deskripsi pendekatan spasial yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2021-2041. Dalam konteks mewujudkan keselarasan menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026, maka strategi dan arah kebijakan kewilayahan ditujukan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan. Adapun rumusan tujuan penataan ruang Kota Batam yaitu: ***"Untuk mewujudkan ruang Kota Batam menuju bandar dunia madani berbasis sektor pariwisata,***

perdagangan dan jasa, maritim, logistik dan industri yang bertaraf internasional."

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. 3 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Aspek	Arah Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah	a. Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan berhirarki;	1. Mengembangkan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan secara merata; 2. Mengembangkan pemanfaatan ruang antar pusat-pusat pertumbuhan primer, antara pusat pertumbuhan primer dengan pusat pertumbuhan sekunder, dan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya; 3. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan 4. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
	b. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas Kota;	1. Meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat, laut dan udara; 2. Meningkatkan akses serta layanan jaringan jalan arteri, kolektor, jaringan jalan lokal dan jaringan jalan lingkungan baik dalam sistem primer maupun dalam sistem sekunder; 3. Mengembangkan jalan bebas hambatan yang menghubungkan pusat pertumbuhan dan kawasan ekonomi; 4. Mengembangkan moda transportasi massal perkotaan yang menghubungkan antar pusat pelayanan wilayah Kota; 5. Meningkatkan kapasitas dan pengembangan sistem energi; 6. Meningkatkan kapasitas dan pengembangan sistem telekomunikasi; dan

Aspek	Arah Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
		7. Meningkatkan sistem infrastruktur perkotaan.
	c. Peningkatan fungsi dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung;	1. Menetapkan dan melestarikan fungsi kawasan lindung serta mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya; 2. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya; 3. Mewujudkan RTH Publik dengan luas paling sedikit 20% dari luas kawasan terbangun; 4. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup berbasis wilayah sungai dan daerah aliran sungai; dan 5. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lahan;
	d. Pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan budidaya; dan	1. Mewujudkan industri pariwisata, maritim, logistik, perdagangan dan jasa, pengembangan teknologi yang mampu menggerakkan perekonomian nasional dan internasional; 2. Mengembangkan sarana prasarana untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah; dan 3. Mengendalikan pemanfaaatan ruang kawasan budidaya.
	e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.	1. Menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan; 2. Mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan keamanan; dan 3. Mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya.

Sumber: RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041

Lebih lanjut, RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041 menetapkan Kawasan Strategis Kota (KSK) yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang dan arahan penanganan yang disepakati oleh lintas sektor untuk mewujudkan

penanganan kawasan secara terpadu. Penjelasan lebih rinci disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. 4 Rencana Kawasan Strategis Kota Batam

No	Arahan Pengembangan	Lokasi
1	Pengembangan kawasan pariwisata di Pulau Pengalap, Pulau Ranoh dan Pulau Abang Kelurahan Pulau Abang	Kecamatan Galang
2	Pengembangan pariwisata maritim/bahari Galang Baru	Kecamatan Galang

Sumber: RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sebagaimana disampaikan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RKPD.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Tabel 6. 5 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Arah Kebijakan Tahun-I **Memacu Terwujudnya Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat**	**Arah Kebijakan Tahun-II** **Mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 dan Melanjutkan Pembangunan Menuju Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera**	**Arah Kebijakan Tahun-III** **Pemantapan Infrastruktur Perkotaan untuk Meningkatkan Akselerasi dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Daerah**	**Arah Kebijakan Tahun-IV** **Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Hinterland untuk Pemerataan Pembangunan Daerah**	**Arah Kebijakan Tahun-V** **Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan**	**Arah Kebijakan Tahun-VI** **Pemantapan Pelayanan Dasar dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing**
Misi 2 dan Misi 3	**Misi 1; Misi 2; dan Misi 3**	**Misi 2 dan Misi 1**	**Misi 4, Misi 3 dan Misi 5**	**Misi 5 dan Misi 2**	**Misi 3 dan Misi 4**

Berdasarkan hasil FGD yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah (PD), diperoleh tahapan Arah Kebijakan Umum sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.5 di atas. Arah kebijakan tersebut berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui arah pembangunan dengan asumsi yang dibuat saat penyusunan dokumen RPJMD ini. Adapun pada perkembangan selanjutnya terdapat perubahan pada asumsi yang dipergunakan, maka diharapkan arah pembangunan yang dilaksanakan tetap selaras dengan tahun sebelumnya dan mengarah pada pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Dalam rangka menyelaraskan program pembangunan jangka menengah Kota Batam tahun 2021-2026 dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), maka Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk mendukung menetapkan arah kebijakan yang secara konkrit dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan. Pencapaian TPB/SDG's langsung diterapkan pada sejumlah program pembangunan daerah

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan pilar TPB/SDGs. Adapun program prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goal* (TPB/SDG's) adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 6. 6 Program Prioritas Pembangunan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goal* (TPB/SDG's) di Dalam RPJMD Tahun 2021-2026

Tujuan	Program Pembangunan Dalam RPJMD	PD Penanggung Jawab
Pilar Pembangunan Sosial		
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan
	Program Penanggulangan Bencana	Dinas Pemadam Kebakaran

Tujuan	Program Pembangunan Dalam RPJMD	PD Penanggung Jawab
	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
	Program Pengamanan Keamanan Pangan	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Program Penyuluhan Pertanian	
Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	

Tujuan	Program Pembangunan Dalam RPJMD	PD Penanggung Jawab
	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
Tujuan 5 : Kesetaraan Gender	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
	Program Perlindungan Perempuan	
	Program Perlindungan Khusus Anak	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pilar Pembangunan Ekonomi		
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BP2RD
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
	Program Pengembangan UMKM	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	

Tujuan	Program Pembangunan Dalam RPJMD	PD Penanggung Jawab
	Program Pelayanan Penanaman Modal	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Program Penyuluhan Pertanian	
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
	Program Pengembangan Ekspor	
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
Tujuan 9 : Industri, inovasi, dan infrastruktur	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan
	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja

Tujuan	Program Pembangunan Dalam RPJMD	PD Penanggung Jawab
	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
	Program Penelitan dan Pengembangan Daerah	Bappelitbang
Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Pemberdayaan Sosial	
	Program Rehabilitasi Sosial	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
Pilar Pembangunan Lingkungan		
Tujuan 6 : Air bersih dan sanitasi layak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Bina Marga dan SDA; Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
	Program Penanggulangan Bencana	Dinas Pemadam Kebakaran
	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan

Tujuan	Program Pembangunan Dalam RPJMD	PD Penanggung Jawab
	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapelitbang
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Tujuan 12 : Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	**Tujuan 12 : Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab**	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
	Program Pengelolaan Persampahan	
	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
Tujuan 13 : Penanganan perubahan iklim	**Tujuan 13 : Penanganan perubahan iklim**	
	Program Penanggulangan Bencana	Dinas Pemadam Kebakaran
	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan 15 : Ekosistem Darat	**Tujuan 15 : Ekosistem Darat**	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola		
Tujuan 16 Perdamaian,	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Tujuan	Program Pembangunan Dalam RPJMD	PD Penanggung Jawab
keadilan, dan institusi yang tangguh	Program Perlindungan Perempuan	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
	Program Perlindungan Khusus Anak	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapelitbang
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
	Program Penelitan dan Pengembangan Daerah	Bappelitbang
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6.3 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang berdasarkan isu strategis dan sasaran strategis berikut penjabaran program pembangunan daerah yang disertai dengan pagu indikatif (Tabel 6.7):

Tabel 6. 7 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kota Batam

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Misi 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah					**15.494.191.994**		**18.421.497.927**		**20.318.397.495**		**34.131.873.724**		**20.949.995.511**		**21.694.009.314**		**131.009.965.965**	
	Tujuan 1.1: Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing	**Pertumbuhan Ekonomi Daerah**	**%**	**-2,55%**	**3,25%**	**6.757.551.444**	**5,05%**	**7.554.560.887**	**5,91%**	**7.617.707.614**	**6,40%**	**7.807.650.006**	**6,92%**	**8.063.372.790**	**7,52%**	**8.536.685.969**	**7,52%**	**46.337.528.710**	
	Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	**Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)**	**%**	**-14,73%**	**1,50%**	**2.810.451.779**	**3,01%**	**1.717.643.240**	**4,53%**	**1.580.000.000**	**6,50%**	**1.555.000.000**	**6,98%**	**1.580.000.000**	**7,12%**	**1.805.000.000**	**7,12%**	**11.048.095.019**	
	Urusan Pemerintahan Pilihan - Perdagangan																		
3.30.02	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	%	100%	0%	-	0%	-	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	350.000.000	PD Pengampu Urusan Perdagangan
3.30.03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berkualitas baik	%	15,09%	20,75%	2.810.451.779	24,53%	1.471.906.740	30,19%	1.200.000.000	37,74%	1.200.000.000	43,40%	1.200.000.000	50,94%	1.200.000.000	50,94%	9.082.358.519	PD Pengampu Urusan Perdagangan
3.30.05	Program pengembangan ekspor	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	Rp	959 (juta $)	0	-	900 (juta $)	245.736.500	925 (juta $)	305.000.000	950 (juta $)	255.000.000	975 (juta $)	305.000.000	1000 (juta $)	505.000.000	1000 (juta $)	1.615.736.500	PD Pengampu Urusan Perdagangan
	Sasaran 1.1.2 : Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam	**Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)**	**%**	**-45,49%**	**0,12%**	**3.268.829.185**	**2,45%**	**5.010.149.847**	**3,70%**	**5.182.499.001**	**4,70%**	**5.366.995.967**	**6,84%**	**5.565.038.117**	**7,41%**	**5.778.179.078**	**7,41%**	**30.171.691.195**	
	Urusan Pemerintahan Pilihan - Pariwisata																		
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan LN dan DN (non museum)	Orang	500.000	500.000	1.284.666.700	1.000.000	1.892.622.887	1.500.000	1.957.729.114	1.700.000	2.027.424.271	1.800.000	2.102.236.226	1.900.000	2.182.751.874	8.400.000	11.447.431.072	PD Pengampu Urusan Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah produk pariwisata daerah	Produk	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	192.350.000	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	214.075.000	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	221.439.180	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	229.322.415	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	237.784.412	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	246.891.555	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	1.341.862.562	PD Pengampu Urusan Pariwisata
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Kebudayaan																		
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	%	28,00%	20,00%	1.226.075.000	20,00%	1.874.371.000	20,00%	1.938.849.362	20,00%	2.007.872.400	20,00%	2.081.962.891	20,00%	2.161.702.070	100,00%	11.290.832.723	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total	%	16,66%	16,66%	179.536.000	16,66%	214.200.000	16,66%	221.568.480	16,66%	229.456.318	16,66%	237.923.256	16,66%	247.035.717	99,96%	1.329.719.771	PD Pengampu Urusan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		registrasi																	
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Tingkatan tipe Museum	Kategori	C	C	386.201.485	B	814.880.960	B	842.912.865	B	872.920.563	B	905.131.332	B	939.797.862	B	4.761.845.067	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
	Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	**Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah**	**%**	**49,13%**	**-10,15%**	**678.270.480**	**9,56%**	**826.767.800**	**9,51%**	**855.208.613**	**10,16%**	**885.654.039**	**10,85%**	**918.334.673**	**11,61%**	**953.506.891**	**11,61%**	**5.117.742.496**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Penanaman Modal																		
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	%	8.14% (Tahun 2019 : 405 Proyek; Tahun 2020 :438 Proyek)	5%	118.089.840	5%	111.000.000	5%	114.818.400	5%	118.905.935	5%	123.293.564	5%	128.015.708	30%	714.123.447	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kepeminatan investasi	%	Belum dikerjakan	90%	145.645.760	90%	309.477.000	90%	320.123.009	95%	331.519.388	95%	343.752.453	95%	356.918.172	95%	1.807.435.782	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	%	10% (500 Perusahaan)	10%	326.122.000	10%	319.790.800	10%	330.791.604	10%	342.567.785	10%	355.208.536	10%	368.813.023	70%	2.043.293.748	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistim Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime	%	Belum dikerjakan	60%	88.412.880	70%	86.500.000	70%	89.475.600	80%	92.660.931	80%	96.080.120	90%	99.759.988	90%	552.889.519	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	Tujuan 1.2 : Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	**Indeks Gini**	**Indeks**	**0,323**	**0,330**	**8.736.640.550**	**0,330**	**10.866.937.040**	**0,325**	**12.700.689.881**	**0,320**	**26.324.223.718**	**0,310**	**12.886.622.721**	**0,300**	**13.157.323.345**	**0,300**	**84.672.437.255**	
	Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah	**Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah**	**%**	**6,05%**	**5,27%**	**1.808.443.500**	**5,72%**	**2.485.712.675**	**6,77%**	**2.600.000.000**	**7,76%**	**2.600.000.000**	**8,82%**	**2.600.000.000**	**12,16%**	**2.600.000.000**	**12,16%**	**14.694.156.175**	
	Urusan Pemerintahan Pilihan - Perindustrian																		
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	8,03%	8,50%	1.808.443.500	8,60%	2.485.712.675	8,70%	2.600.000.000	8,80%	2.600.000.000	9,01%	2.600.000.000	9,05%	2.600.000.000	9,05%	14.694.156.175	PD Pengampu Urusan Perindustrian
	Sasaran 1.2.2 : Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah	**Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro**	**%**	**17,39%**	**20,69%**	**725.674.000**	**23,34%**	**1.418.208.650**	**25,51%**	**1.798.146.426**	**28,21%**	**1.861.929.716**	**31,20%**	**2.391.361.270**	**34,34%**	**2.359.673.381**	**34,34%**	**10.554.993.443**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Koperasi dan Usaha Mikro																		
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	%	25,47%	0,00%	-	26,94%	137.206.800	27,70%	141.871.831	28,81%	146.837.345	30,23%	152.123.490	32,02%	157.904.182	32,02%	735.943.648	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang sehat	%	64,00%	0,00%	-	0,00%	-	80,00%	120.960.000	83,33%	125.266.176	88,89%	129.888.498	91,67%	134.863.227	91,67%	510.977.901	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	%	17,09%	18,59%	390.304.000	21,38%	493.851.850	23,77%	510.746.479	25,36%	528.783.454	27,26%	548.069.520	30,79%	568.982.523	30,79%	3.040.737.826	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi	%	18,80%	0,00%	-	21,00%	444.676.000	0,00%	-	0,00%	-	24,00%	461.084.544	0,00%	-	24,00%	905.760.544	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	%	25,23%	27,03%	335.370.000	30,00%	342.474.000	34,45%	1.024.568.116	35,34%	1.061.042.741	37,45%	1.100.195.218	39,21%	1.497.923.449	39,21%	5.361.573.524	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
	Sasaran 1.2.3 : Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya	**Nilai Tukar Nelayan**	**Skor**	**100,30**	**100,50**	**3.588.370.550**	**101,00**	**2.749.856.705**	**101,50**	**3.944.451.775**	**102,00**	**17.349.054.258**	**102,50**	**3.215.483.161**	**103,00**	**3.338.636.165**	**103,00**	**34.185.852.614**	
	Urusan Pemerintahan Pilihan - Perikanan dan Kelautan																		
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi nelayan kecil (ton)	Ton	19.954,32	20.153,86	3.329.589.300	20,355	1.678.263.090	20,559	2.785.995.340	20,765	16.097.576.774	20,972	1.917.826.157	21,182	1.991.278.899	21,182	27.800.529.560	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi pembudidaya ikan (ton)	Ton	7.234,87	7.379,57	258.781.250	7,527	594.127.135	7,678	614.565.108	7,831	688.223.626	7,988	713.619.078	8,148	740.950.688	8,148	3.610.266.885	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan (ton)	Ton	1.290,49	-	-	1.316,43	477.466.480	1.329,59	543.891.327	1.342,89	563.253.858	1.356,32	584.037.926	1.369,88	606.406.578	1.369,88	2.775.056.169	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
	Sasaran 1.2.4 : Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah	**Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah**	**%**	**72%**	**74,07%**	**2.614.152.500**	**76,07%**	**4.213.159.010**	**78,07%**	**4.358.091.680**	**80,07%**	**4.513.239.744**	**82,07%**	**4.679.778.290**	**84,07%**	**4.859.013.799**	**84,07%**	**25.237.435.023**	
	Urusan Pemerintahan Pilihan - Pariwisata																		
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina	Sub Sektor	2 Sub Sektor	2 Sub Sektor	2.221.098.500	2 Sub Sektor	2.399.290.260	2 Sub Sektor	2.481.825.845	2 Sub Sektor	2.570.178.845	2 Sub Sektor	2.665.018.444	2 Sub Sektor	2.767.088.651	10 Sub Sektor	15.104.500.545	PD Pengampu Urusan Pariwisata
		Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina	Orang	155 Orang	155 Orang		155 Orang		155 Orang		155 Orang		155 Orang		155 Orang		155 Orang		
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Koperasi dan Usaha Mikro																		
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	%	19,82%	26,32%	393.054.000	42,15%	1.813.868.750	43,76%	1.876.265.835	45,45%	1.943.060.899	48,60%	2.014.759.846	53,79%	2.091.925.148	53,79%	10.132.934.478	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang					**485.617.064.810**		**697.600.183.343**		**757.195.610.136**		**818.868.309.785**		**754.790.710.270**		**733.481.303.407**		**4.247.553.181.751**	
	Tujuan 2.1 : Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	**Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan**	**Indeks**	**57,24**	**57,87**	**485.617.064.810**	**65,11**	**697.600.183.343**	**69,40**	**757.195.610.136**	**73,40**	**818.868.309.785**	**78,65**	**754.790.710.270**	**84,46**	**733.481.303.407**	**84,46**	**4.247.553.181.751**	
	Sasaran 2.1.1 : Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	**Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital**	**%**	**0,84%**	**54,95%**	**3.511.795.000**	**76,92%**	**6.110.003.780**	**82,42%**	**5.068.376.067**	**87,91%**	**4.565.034.184**	**93,41%**	**4.733.483.946**	**100%**	**5.576.469.746**	**100%**	**29.565.162.723**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang	%	8 dokumen, 1 aplikasi	54,95%	3.511.795.000	76,92%	6.110.003.780	82,42%	5.068.376.067	87,91%	4.565.034.184	93,41%	4.733.483.946	100.00%	5.576.469.746	100.00%	29.565.162.723	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam**	**Indeks**	**69**	**69**	**21.333.902.468**	**69,5**	**32.970.788.995**	**70**	**37.459.484.136**	**70,5**	**38.793.041.771**	**71**	**40.224.505.014**	**71,5**	**41.765.103.556**	**71,5**	**212.546.825.940**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Lingkungan Hidup																		
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	%	na	100%	502.204.000	100%	355.978.000	100%	368.223.643	100%	381.332.405	100%	395.403.571	100%	410.547.527	100%	2.413.689.146	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Kualitas Lahan (IKL)	%	50,00; 88,78; 69,13	50,00; 88,78; 69,13	1.006.835.625	51,21; 88,65; 68,85	1.599.087.075	52,47; 88,76; 69,08	1.654.095.670	53,42; 88,89; 69,52	1.712.981.476	53,59; 89,62; 70,09	1.776.190.493	55,19; 90,93; 70,42	1.844.218.589	55,19; 90,93; 70,42	9.593.408.928	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	%	na	na	-	0%	-	50%	1.100.000.000	60%	1.139.160.000	70%	1.181.195.004	80%	1.226.434.773	80%	4.646.789.777	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	na	na	-	100%	190.340.425	100%	196.888.136	100%	203.897.353	100%	211.421.166	100%	219.518.596	100%	1.022.065.676	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	na	100%	62.330.000	0%	-	100%	154.500.000	100%	160.000.200	100%	165.904.207	100%	172.258.339	100%	714.992.746	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	%	na	na	-	0%	-	90%	2.100.000.000	90%	2.174.760.000	90%	2.255.008.644	90%	2.341.375.475	90%	8.871.144.119	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanakeragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik yang dikelola	%	4,96%	4,96%	19.762.532.843	5,17%	30.825.383.495	5,44%	31.885.776.687	5,45%	33.020.910.337	5,46%	34.239.381.929	5,46%	35.550.750.257	5,46%	185.284.735.548	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman
		Persentase Pengelolaan Sampah	**%**	**55,30%**	**55,50%**	**89.593.618.879**	**59,25%**	**90.260.753.133**	**61,75%**	**100.607.799.012**	**64,50%**	**103.756.836.657**	**67,25%**	**107.036.448.180**	**71,25%**	**110.455.721.588**	**71,25%**	**601.711.177.449**	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	na	10,00%	69.790.362.824	15,00%	67.679.740.940	18,00%	77.250.000.000	22,00%	79.567.500.000	26,00%	81.954.525.000	30,00%	84.413.160.750	30,00%	460.655.289.514	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup
		Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	%	20,00%	20,00%	19.803.256.055	18,00%	22.581.012.193	13,00%	23.357.799.012	10,00%	24.189.336.657	8,00%	25.081.923.180	5,00%	26.042.560.838	5,00%	141.055.887.935	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
	Sasaran 2.1.3 : Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	**Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum**	**%**	**48,40%**	**49,75%**	**247.665.570.727**	**56,00%**	**381.070.833.777**	**62,25%**	**404.952.474.414**	**68,50%**	**458.809.776.480**	**81,25%**	**379.351.312.256**	**95,00%**	**336.034.636.732**	**95,00%**	**2.207.884.604.386**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase penanganan lokasi abrasi pantai	%	29,00%	29,00%	10.478.052.180	43,00%	12.539.495.968	57,00%	12.583.591.479	71,00%	13.662.465.888	86,00%	14.840.253.502	100%	14.825.911.404	100%	78.929.770.421	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100%		
01.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase yang ditangani	%	16,00%	16% (61.268 m)	22.944.416.183	33% (61.550 m)	31.775.672.419	49% (61.750 m)	41.250.000.000	66% (62.450 m)	43.350.000.000	83% (62.650 m)	45.450.000.000	100% (63,350 m)	47.550.000.000	100% (82,018 m)	232.320.088.602	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan yang Ditangani	%	18,00%	19% (44,31 km)	138.457.888.556	35% (38,98 km)	192.371.862.516	51 % (38,98 km)	184.318.027.563	67% (38,98 km)	184.598.241.313	84% (38,98 km)	184.727.526.737	100% (38,98 km)	188.248.466.991	100% (239,19 km)	1.072.722.013.676	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengujian yang dilakukan	%	16,00%	17,00%	571.783.560	33,00%	399.419.400	50,00%	902.332.870	67,00%	488.049.514	83,00%	502.451.989	100,00%	517.574.589	100,00%	3.381.611.922	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	955 orang	17.23%	200.471.000	33.79%	840.251.690	50.34%	869.156.348	66.89%	900.098.314	83.45%	933.311.942	100.00%	969.057.789	100.00%	4.712.347.083	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	%	2.577 bangunan	16.67%	75.012.959.248	33.33%	143.144.131.784	50.00%	165.029.366.154	66.67%	215.810.921.451	83.33%	132.897.768.086	100.00%	83.923.625.959	100.00%	815.818.772.682	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	**%**	**43,00%**	**45,00%**	**53.642.986.158**	**51,00%**	**71.064.877.932**	**58,00%**	**90.652.999.424**	**63,00%**	**90.272.164.227**	**68,00%**	**96.246.927.663**	**74,00%**	**107.579.653.902**	**74,00%**	**509.459.609.306**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Perhubungan																		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	%	48%	51%	28.028.577.268	61%	22.106.675.602	71%	39.424.782.000	81%	36.077.042.000	90%	39.919.536.000	100%	48.439.658.000	100%	213.996.270.870	PD Pengampu Urusan Perhubungan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Unit	2,488 unit	2656		3197		3698		4199		4710		5211		5211		
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	%	24%	26%		27%		33%		41%		50%		63%		63%		
		Jumlah Jukir yang Melaksanakan Transaksi Non Tunai	Orang	0	0		0		100		200		300		400		400		
		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	%	69%	70%		73%		75%		78%		80%		80%		80%		
		Persentase lampu PJU yang Ditangani	%	16%	16%	25.614.408.890	33%	48.958.202.330	49%	51.228.217.424	66%	54.195.122.227	83%	56.327.391.663	100.00%	59.139.995.902	100%	295.463.338.436	PD Pengampu Urusan Perhubungan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	**%**	**60,00%**	**73,00%**	**69.869.191.578**	**78,00%**	**116.122.925.726**	**82,00%**	**118.454.477.083**	**86,00%**	**122.671.456.466**	**91,00%**	**127.198.033.211**	**95,00%**	**132.069.717.883**	**95,00%**	**686.385.801.947**	
	Uursan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani	%	0%	0%	8.997.673.108	100%	9.107.509.163	100%	9.420.807.478	100%	9.756.188.224	100%	10.116.191.570	100%	10.503.641.707	100%	57.902.011.250	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Rumah Susun Layak Huni	%	89,95%	92%		93%		95%		97%		98%		100%		100%		
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	%	18,17%	33,68%	1.625.320.000	46,60%	2.669.860.000	59,53%	1.080.472.176	72,46%	1.118.936.985	87,97%	1.160.225.760	100.00%	1.204.662.407	100.00%	8.859.477.328	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	%	89,08%	94,17%	59.246.198.470	95,6%	104.345.556.563	97,02%	107.953.197.429	98,01%	111.796.331.257	99,01%	115.921.615.881	100.00%	120.361.413.769	100.00%	619.624.313.369	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Misi 3: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia					**681.644.945.111**		**617.492.586.772**		**678.673.100.957**		**748.323.005.273**		**707.151.242.546**		**739.287.828.182**		**4.111.475.830.249**	
	Tujuan 3.1: Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**81,11**	**81,15**	**641.095.294.605**	**81,46**	**569.769.936.638**	**81,74**	**625.068.170.875**	**81,89**	**692.383.451.977**	**82,00**	**648.505.392.551**	**82,10**	**677.772.986.417**	**82,10**	**3.851.982.318.563**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Sasaran 3.1.1: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat	**Indeks Pendidikan**	**Indeks**	**73,69**	**73,75**	**411.215.662.036**	**73,81**	**368.530.906.158**	**73,87**	**371.036.906.158**	**73,93**	**397.374.600.878**	**73,99**	**412.037.723.651**	**74,05**	**427.818.768.466**	**74,05**	**2.388.014.567.347**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Pendidikan																		
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD 2. Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat 3. Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat 4. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	%	1) 79.32 2) 95.65 3) 90.55 4) 91.25	1) 79.50 2) 96.00 3) 91.00 4) 91.45	411.215.662.036	1) 80.00 2) 96.50 3) 91.50 4) 91.65	368.530.906.158	1) 80.50 2) 97.00 3) 92.00 4) 91.85	368.530.906.158	1) 81.00 2) 97.50 3) 92.50 4) 92.30	394.779.387.278	1) 81.50 2) 98.00 3) 93.00 4) 92.70	409.346.746.669	1) 82.00 2) 98.50 3) 93.50 4) 93.00	425.024.727.066	1) 82.00 2) 98.50 3) 93.50 4) 93.00	2.377.428.335.365	PD Pengampu Urusan Pendidikan
01.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	70%	70%	-	70%	-	85%	2.180.000.000	90%	2.257.608.000	95%	2.340.913.735	100%	2.430.570.731	100%	9.209.092.466	PD Pengampu Urusan Pendidikan
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknya sesuai kebutuhan	%	13,66%	13,66%	-	29,66%	-	45,66%	100.000.000	61,66%	103.560.000	77,66%	107.381.364	93,66%	111.494.070	93,66%	422.435.434	PD Pengampu Urusan Pendidikan
01.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan yang masih berlaku	%	88,15%	90,13%	-	92,10%	-	94,10%	226.000.000	96%	234.045.600	98%	242.681.883	100%	251.976.599	100%	954.704.082	PD Pengampu Urusan Pendidikan
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	**Persen**	**7%**	**9%**	**950.730.000**	**12%**	**721.905.950**	**15%**	**2.250.000.000**	**20%**	**2.875.000.000**	**30%**	**3.325.000.000**	**35%**	**3.683.500.000**	**35%**	**13.806.135.950**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Perpustakaan																		
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	%	2,00%	2,00%	950.730.000	2,50%	721.905.950	2,50%	2.200.000.000	2,50%	2.775.000.000	3,00%	3.225.000.000	3,50%	3.583.500.000	16,00%	13.456.135.950	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
		Persentase peningkatan koleksi perpustakaan	%	67,00%	67,00%		70,00%		73,00%		76,00%		79,00%		80,00%		80,00%		
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	%	0	0	-	0	-	60,00%	50.000.000	70,00%	100.000.000	80,00%	100.000.000	90,00%	100.000.000	90,00%	350.000.000	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
	Sasaran 3.1.2: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	**Indeks Kesehatan**	**Indeks**	**82,05**	**82,12**	**187.417.179.961**	**82,19**	**128.918.016.159**	**82,26**	**129.044.893.543**	**82,33**	**138.100.155.450**	**82,4**	**143.196.051.186**	**82,47**	**148.680.459.946**	**82,47**	**875.356.756.245**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Kesehatan																		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%	145.136.396.911	100%	125.229.720.120	100%	125.229.720.120	100%	134.149.161.853	100%	139.099.265.925	100%	144.426.767.810	100%	813.271.032.739	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase diabetes mellitus mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		AVLOS (Average Length of Stay) Rumah sakit	Hari	5-8	5-8		5-8		5-8		5-8		5-8		6-9		6-9		
		Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target	%	90%	90.00%		92.00%		95.00%		98.00%		98.00%		100.00%		100%		
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	%	48%	48%	41.331.515.000	59%	1.034.001.599	80.00%	1.069.571.254	90.00%	1.107.647.991	100.00%	1.148.520.202	100.00%	1.192.508.525	100.00%	46.883.764.571	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit (IKM RS)	%	80%	80%		85%		85%		90%		90%		92%		92%		
01.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan	%	0%	40%	276.163.000	60%	310.813.000	65%	321.504.967	70%	332.950.544	75%	345.236.419	80%	358.458.974	80%	1.945.126.904	PD Pengampu Urusan Kesehatan
01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu	%	8%	9%	673.105.050	13%	2.343.481.440	19%	2.424.097.202	25%	2.510.395.062	33%	2.603.028.640	39%	2.702.724.637	39%	13.256.832.031	PD Pengampu Urusan Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		dan Posyandu remaja) aktif																	
	Sasaran 3.1.3: Meningkatnya daya beli masyarakat	**Indeks Pengeluaran**	**Indeks**	**88,26**	**88,68**	**3.417.580.300**	**90,06**	**7.207.606.520**	**91,11**	**8.133.190.752**	**91,87**	**9.037.604.190**	**92,62**	**9.956.802.685**	**93,38**	**10.748.247.603**	**93,38**	**48.501.032.050**	
	Urusan Pemerintahan Pilihan - Perdagangan																		
3.30.04	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	%	20	40	2.273.650.000	50	5.176.311.000	60	6.649.171.201	70	7.486.353.543	80	8.337.055.889	100	9.058.594.505	100	38.981.136.138	PD Pengampu Urusan Perdagangan
3.30.06	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase peningkatan Tertib Ukur	%	8,76%	4,63%	721.118.300	5,14%	1.563.372.520	5,43%	1.000.000.000	5,67%	1.050.000.000	5,85%	1.100.000.000	5,99%	1.150.000.000	5,99%	6.584.490.820	PD Pengampu Urusan Perdagangan
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah																		
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan (Sub Kegiatan: Pengendalian dan Distribusi Perekonomian)	Persentase rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian (Bagian Perekonomian)	%	100%	100%	422.812.000	100%	467.923.000	100%	484.019.551	100%	501.250.647	100%	519.746.796	100%	539.653.098	100%	2.935.405.092	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah
	Sasaran 3.1.4: Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**Indeks**	**94,42**	**94.43**	**7.023.903.690**	**94.44**	**8.956.990.385**	**94.46**	**9.070.333.330**	**94.48**	**9.545.874.857**	**94.50**	**10.156.012.519**	**94.52**	**10.841.434.951**	**94.52**	**52.981.635.232**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	%	11,30%	11,30%	338.005.800	11,30%	511.280.000	11,30%	680.000.000	11,40%	720.000.000	11,50%	735.000.000	11,60%	823.000.000	11,60%	1.194.371.300	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	%	55%	55%		60%		65%		70%		75%		80%		80%		
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	%	100%	100%	444.678.000	100%	518.723.085	100%	525.000.000	100%	557.000.000	100%	589.000.000	100%	594.000.000	100%	3.228.401.085	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	%	4%	4%	918.680.000	4.25%	2.417.580.750	4.5%	1.790.000.000	4.75%	1.865.000.000	5%	2.046.312.519	5.5%	2.350.000.000	5.5%	11.387.573.269	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	%	60%	60%	49.580.000	65%	61.175.400	70%	170.858.956	75%	185.000.000	80%	190.000.000	85%	210.000.000	85%	866.614.356	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Skor	700 Skor	750	323.995.000	770	440.000.750	780	504.277.200	800	574.070.857	820	585.000.000	830	650.000.000	830	3.077.343.807	PD Pengampu Urusan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
																			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	%	100%	100%	367.381.000	100%	367.364.400	100%	367.381.000	100%	410.201.000	100%	450.000.000	100%	475.000.000	100%	2.437.327.400	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Pengendalian Penduduk dan KB																		
02.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	%	0%	0%	81.208.500	30%	81.176.100	40%	120.000.000	50%	125.000.000	60%	130.000.000	70%	135.000.000	70%	672.384.600	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	%	84,03%	80%	3.809.080.390	80,50%	3.958.489.900	81,00%	4.217.500.000	82,00%	4.295.500.000	83,00%	4.600.500.000	84,03%	4.680.500.000	84,03%	25.561.570.290	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	%	40%	40%	691.295.000	45%	601.200.000	50%	695.316.174	55%	814.103.000	60%	830.200.000	65%	923.934.951	65%	4.556.049.125	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	**%**	**6,64%**	**6,64%**	**20.900.864.574**	**7,64%**	**43.949.928.305**	**8,64%**	**69.147.768.061**	**9,64%**	**82.598.093.144**	**10,64%**	**46.053.034.251**	**11,64%**	**51.393.620.584**	**11,64%**	**314.043.308.919**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga																		
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina	%	77,78%	95,74%	1.421.899.771	95,74%	6.905.294.855	100,00%	14.865.189.341	100,00%	8.708.364.000	100,00%	15.208.364.000	100,00%	10.958.364.000	100,00%	58.067.475.967	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	%	43,38%	43,73%	500.000.000	44,08%	1.225.691.380	44,44%	16.050.000.000	44,79%	31.100.000.000	45,14%	16.150.000.000	45,49%	21.200.000.000	45,49%	86.225.691.380	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga berprestasi	%	0	26%	18.978.964.803	76%	35.818.942.070	24%	38.232.578.720	80%	42.789.729.144	24%	14.694.670.251	84%	19.235.256.584	84%	169.750.141.572	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Jumlah perolehan medali	medali	0	11		301		11		86		11		316		736		
	Sasaran 3.1.5: Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat	**Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran**	**%**	**10,00%**	**11,10%**	**10.169.374.044**	**12,50%**	**11.484.583.161**	**14,30%**	**36.385.079.031**	**16,70%**	**52.852.123.458**	**20%**	**23.780.768.259**	**25%**	**24.606.954.867**	**25%**	**159.278.882.820**	
	Unsur Pemerintahan Umum - Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan	%	100%	100%	130.427.500	100%	160.016.000	100%	165.520.550	100%	171.413.082	100%	177.738.225	100%	184.545.599	100%	989.660.956	PD Pengampu Unsur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Kebangsaan	karakter kebangsaan "yang dilaksanakan"																	Pemerintahan Umum
		Cakupan peserta kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa serta jumlah total calon peserta yang seharusnya	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan	%	100%	100%	1.893.456.544	100%	2.177.920.861	100%	22.760.768.115	100%	38.727.074.673	100%	8.875.959.053	100%	8.893.421.261	100%	83.328.600.507	PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
		Persentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/dilaksanakan	Kebijakan	1 kebijakan	1 Kebijakan	306.945.000	1 Kebijakan	2.876.460.500	1 Kebijakan	3.486.102.314	1 Kebijakan	3.512.307.556	1 Kebijakan	3.641.911.705	1 Kebijakan	3.781.396.923	6 kebijakan	17.605.123.998	PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
8.01.05	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan	Kebijakan	na	1 kebijakan	62.685.000	1 kebijakan	3.741.362.550	1 kebijakan	3.870.065.422	1 kebijakan	4.007.839.751	1 kebijakan	4.155.729.038	1 kebijakan	4.314.893.460	6 kebijakan	20.152.575.221	PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
		Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	%	-	-	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	%	100%	100%	5.886.950.000	100%	486.674.000	100%	2.015.774.724	100%	2.252.928.704	100%	2.534.607.894	100%	2.869.553.584	100%	16.046.488.906	PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
		Persentase rekomendasi Forkopimda yang ditetapkan sebagai kebijakan	%	-	-		-		80%		81%		83%		86%		86%		
		Persentase potensi konflik yang terdeteksi	%	90%	75%		75%		80%		80%		80%		80%		80%		
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																		
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	91,76%	100,00%	1.888.910.000	100,00%	2.042.149.250	100%	4.086.847.906	100%	4.180.559.692	100%	4.394.822.344	100%	4.563.144.040	100%	21.156.433.232	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	96,89%	100,00%		100,00%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum	%	-	-		100,00%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		terhadap pelanggaran Perda dan Perkada																	
		Persentase penduduk miskin	**%**	**4,75%**	**4,79%**	**40.549.650.506**	**4,74%**	**47.722.650.134**	**4,69%**	**53.604.930.082**	**4,68%**	**55.939.553.296**	**4,66%**	**58.645.849.995**	**4,65%**	**61.514.841.765**	**4,65%**	**259.493.511.686**	
	Sasaran 3.1.6 : Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**Skor**	**92,20**	**86,90**	**5.457.802.506**	**87,20**	**6.811.003.762**	**87,60**	**10.168.702.332**	**87,90**	**10.956.995.838**	**88,20**	**12.003.436.168**	**88,50**	**13.086.023.486**	**88,50**	**58.483.964.092**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Pangan																		
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi	kkal per kapita per hari	2.604	2.605	519.062.000	2.606	931.781.700	2.607	1.507.883.976	2.608	1.529.524.645	2,609	1.552.754.105	2.610	1.577.754.587	2.610	7.618.761.013	PD Pengampu Urusan Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase wilayah aman pangan	%	belum ada	belum ada	301.177.000	54,70%	216.396.440	59,40%	223.840.478	62,50%	231.809.199	65,63%	240.362.958	70,31%	249.568.859	70,31%	1.463.154.934	PD Pengampu Urusan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	%	100%	85%	-	86%	89.515.060	87%	92.594.378	88%	95.890.738	89%	99.429.106	90%	103.237.241	90%	480.666.523	PD Pengampu Urusan Pangan
	Urusan Pemerintahan Pilihan - Pertanian																		
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	%	30309	3,00%	3.318.630.000	3,50%	2.800.152.425	4,00%	5.210.565.355	4,00%	5.744.765.185	4,00%	6.374.241.704	4,00%	7.011.665.874	22,50%	30.460.020.543	PD Pengampu Urusan Pertanian
		Jumlah produksi ternak sapi	ekor	297	132		70		85		95		110		120		612		
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	ton per tahun	na	226 ton	779.888.995	233.4 ton	823.670.860	256 ton	1.285.000.000	266 ton	1.500.000.000	282 ton	1.750.000.000	292 ton	2.000.000.000	1555	8.138.559.855	PD Pengampu Urusan Pertanian
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	%	40,00%	10,00%	101.320.000	10,00%	655.064.790	10,00%	725.000.000	10,00%	775.000.000	10,00%	850.000.000	10,00%	950.000.000	60,00%	4.056.384.790	PD Pengampu Urusan Pertanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	%	70%	75%	437.724.511	80%	1.294.422.487	85%	1.123.818.145	90%	1.080.006.071	95%	1.136.648.295	100%	1.193.796.925	100%	6.266.416.434	PD Pengampu Urusan Pertanian
	Sasaran 3.1.7: Menurunnya angka pengangguran	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**%**	**11,79%**	**10,50%**	**12.719.669.800**	**10,00%**	**18.064.461.707**	**9,75%**	**18.411.099.933**	**9,65%**	**19.066.535.090**	**9,60%**	**19.770.090.235**	**9,55%**	**20.527.284.691**	**9,55%**	**108.559.141.456**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Tenaga Kerja																		
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	49,37%	9.89%	12.496.804.800	15,12%	17.181.764.097	16,38%	17.772.816.782	18,32%	18.405.529.059	19,59%	19.084.693.082	20,77%	19.815.636.827	20,77%	104.757.244.647	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan	%	0,00%	0,00%	-	50,00%	475.845.310	51,00%	492.214.389	52,00%	509.737.221	53,00%	528.546.524	54,00%	548.789.856	54,00%	2.555.133.300	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	%	96,00%	96,00%	222.865.000	97,00%	141.211.100	97,00%	146.068.762	98,00%	151.268.810	98,00%	156.850.629	99,00%	162.858.008	99,00%	981.122.309	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
02.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku	%	na	na	-	100,00%	265.641.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	265.641.200	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Sasaran 3.1.8: Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat	**Persentase Penurunan PPKS**	**%**	**1,65%**	**1,60%**	**22.372.178.200**	**1,55%**	**22.847.184.665**	**1,50%**	**25.025.127.817**	**1,45%**	**25.916.022.368**	**1,40%**	**26.872.323.592**	**1,35%**	**27.901.533.588**	**1,35%**	**150.934.370.230**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Sosial																		
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	%	100%	100.00%	1.530.269.000	100%	1.893.524.515	100.00%	1.958.661.758	100%	2.028.390.117	100%	2.103.237.712	100%	2.183.791.717	100%	11.697.874.819	PD Pengampu Urusan Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	1.Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	%	1. 45,45%; 2. 14,40%	1. 63,64%; 2. 16,57%	4.311.179.200	1. 67,27%; 2. 22,86%	2.430.057.765	1. 72,73%; 2. 34,29%	2.623.651.752	1. 81,82%; 2. 45,71%	2.717.053.754	1. 90,91%; 2. 58,06%	2.817.313.038	1. 100%; 2. 69,49%	2.925.216.127	1. 100%; 2. 69,49%	17.824.471.636	PD Pengampu Urusan Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)	%	76,35%	77,76%	1.372.360.000	78,35%	2.043.142.185	78,68%	2.113.426.276	79,01%	2.188.664.252	79,35%	2.269.425.962	79,85%	2.356.344.977	79,85%	12.343.363.652	PD Pengampu Urusan Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100%	100%	388.080.000	100%	358.814.600	100%	371.157.822	100%	384.371.041	100%	398.554.332	100%	413.818.963	100%	2.314.796.758	PD Pengampu Urusan Sosial
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	%	0%	0%	-	89,66%	251.707.830	89,66%	260.366.579	89,66%	269.635.630	93,10%	279.585.184	93,10%	290.293.297	93,10%	1.351.588.520	PD Pengampu Urusan Sosial
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	%	18,75%	37,50%	200.592.000	56,25%	208.983.620	75%	216.172.657	93,75%	223.868.403	93,75%	232.129.147	100%	241.019.694	100%	1.322.765.521	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%	91,43%	93,55%	14.569.698.000	94,44%	15.660.954.150	97,55%	17.481.690.973	98,44%	18.104.039.171	99,22%	18.772.078.217	100%	19.491.048.813	100%	104.079.509.324	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Misi 4: Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam					**63.214.078.384**		**96.455.123.860**		**100.830.367.561**		**104.514.067.259**		**108.457.631.107**		**112.689.607.595**		**586.160.875.766**	
	Tujuan 4.1 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	**Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland**	**Indeks**	**48,50**	**48,77**	**63.214.078.384**	**53,07**	**96.455.123.860**	**59,41**	**100.830.367.561**	**63,46**	**104.514.067.259**	**67,57**	**108.457.631.107**	**71,66**	**112.689.607.595**	**71,66**	**586.160.875.766**	
	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	**Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Wilayah Hinterland**	**%**	**60,00%**	**40,46%**	**2.632.800.400**	**41,67%**	**7.088.601.400**	**55,85%**	**7.999.161.464**	**63,01%**	**8.283.931.612**	**70,19%**	**8.589.608.689**	**77,19%**	**8.918.590.702**	**77,19%**	**43.512.694.267**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah	%	0,00%	0,00%	-	0.00%	-	46,85%	666.712.176	65,59%	690.447.129	83,16%	715.924.629	100.00%	743.344.542	100.00%	2.816.428.476	PD Pengampu Urusan Perumahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		Hinterland																	dan Kawasan Permukiman
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	%	82,27%	84,80%	2.632.800.400	87,34%	7.088.601.400	89,87%	7.332.449.288	92,40%	7.593.484.483	96,20%	7.873.684.060	100.00%	8.175.246.160	100.00%	40.696.265.791	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sasaran 4.1.2. Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Wilayah Hinterland**	**%**	**80,00%**	**78,00%**	**2.623.131.013**	**88,00%**	**8.102.566.320**	**91,00%**	**8.480.956.167**	**94,00%**	**8.877.016.820**	**97,00%**	**9.291.573.506**	**100,00%**	**9.725.489.988**	**100,00%**	**47.100.733.814**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Perhubungan																		
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	%	49%	49%	2.623.131.013	49%	8.102.566.320	49%	8.480.956.167	49%	8.877.016.820	49%	9.291.573.506	49%	9.725.489.988	100%	47.100.733.814	PD Pengampu Urusan Perhubungan
	4.1.3. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	**Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland**	**%**	**27,50%**	**27,86%**	**57.958.146.971**	**29,55%**	**81.263.956.140**	**31,38%**	**84.350.249.930**	**33,37%**	**87.353.118.827**	**35,51%**	**90.576.448.912**	**37,80%**	**94.045.526.905**	**37,80%**	**495.547.447.685**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
01.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	%	41.62%	43.49%	54.708.665.371	45.36%	76.838.582.140	47.40%	79.481.829.366	49.61%	82.311.382.491	51.99%	85.348.672.505	54.54%	88.617.526.662	54.54%	467.306.658.535	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
01.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	%	10.74%	12,22%	3.249.481.600	13,04%	4.425.374.000	14,13%	4.868.420.564	15,28%	5.041.736.336	16,50%	5.227.776.407	17,86%	5.428.000.243	17,86%	28.240.789.150	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat					**369.882.603.279**		**511.979.763.131**		**538.732.697.380**		**555.370.077.647**		**585.392.087.351**		**609.577.722.054**		**3.168.624.808.496**	
	Tujuan 5.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**52 (CC)**	**57 (CC)**	**369.882.603.279**	**64 (B)**	**511.979.763.131**	**70 (B)**	**538.732.697.380**	**74 (BB)**	**555.370.077.647**	**79 (BB)**	**585.392.087.351**	**81 (A)**	**609.577.722.054**	**81 (A)**	**3.168.624.808.496**	
	Sasaran 5.1.1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	**Opini BPK**	**Kategori**	**WTP**	**WTP**	**10.485.833.862**	**WTP**	**73.329.322.537**	**WTP**	**75.851.851.232**	**WTP**	**78.552.177.136**	**WTP**	**81.450.752.472**	**WTP**	**84.570.316.291**	**WTP**	**401.930.111.184**	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Keuangan																		
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat/Tidak Tepat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	9.453.293.862	Tepat Waktu	69.796.517.959	Tepat Waktu	72.197.518.177	Tepat Waktu	74.767.749.824	Tepat Waktu	77.526.679.792	Tepat Waktu	80.495.951.628	Tepat Waktu	384.237.711.242	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	%	97%	97%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	849.800.000	100%	3.136.616.078	100%	3.244.515.671	100%	3.360.020.429	100%	3.484.005.183	100%	3.617.442.581	100%	17.692.399.942	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan - Inspektorat Daerah																		
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	%	85%	85%	182.740.000	87%	396.188.500	88%	409.817.384	89%	424.406.883	90%	440.067.497	93%	456.922.082	93%	2.310.142.346	PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
		Nilai LPPD	**Tingkat Penilaian**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**7.882.880.800**	**Sangat Tinggi**	**8.319.355.330**	**Sangat Tinggi**	**9.173.969.260**	**Sangat Tinggi**	**9.776.130.387**	**Sangat Tinggi**	**9.834.194.599**	**Sangat Tinggi**	**10.081.056.752**	**Sangat Tinggi**	**55.067.587.129**	
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah																		
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti (Bagian Tata Pemerintahan)	%	100%	100%	6.991.737.800	100%	6.806.182.650	100%	7.040.315.333	100%	7.290.950.559	100%	7.559.986.635	100%	7.849.534.123	100%	43.538.707.100	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Perencanaan																		
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	90%	90%	891.143.000	90%	1.086.497.875	95%	1.123.873.402	95%	1.513.883.295	95%	1.556.830.589	95%	1.616.457.200	95%	7.788.685.361	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Perencanaan
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	100%	-	-	100%	842.591.330	100%	902.226.647	100%	948.649.331	100%	999.070.641	100%	1.053.916.569	100%	4.746.454.518	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Perencanaan
		Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Penelitian dan Pengembagan																		
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	%	-	-	-	50%	90.784.500	50%	662.335.594	50%	611.482.562	50%	344.286.269	50%	227.684.933	50%	1.936.573.858	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
																			Pengembangan
		Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD	**Skor**	**53 (Cukup)**	**53 (Cukup)**	**217.780.000**	**55 (Cukup)**	**497.553.320**	**60 (Cukup)**	**1.373.000.000**	**65 (Baik)**	**1.710.000.000**	**67 (Baik)**	**2.068.000.000**	**70 (Baik)**	**2.316.800.000**	**70 (Baik)**	**8.183.133.320**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Kearsipan																		
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	%	10%	10%	217.780.000	10%	497.553.320	20%	1.023.000.000	10%	1.245.000.000	5%	1.468.000.000	3%	1.646.800.000	58%	6.098.133.320	PD Pengampu Urusan Kearsipan
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip	%	0	-	-	-	-	20%	350.000.000	20%	465.000.000	20%	600.000.000	20%	670.000.000	80%	2.085.000.000	PD Pengampu Urusan Kearsipan
		Tingkat Maturitas SPIP	**Level**	**Level 3**	**Level 3**	**301.211.000**	**Level 3**	**446.459.550**	**Level 3**	**536.817.759**	**Level 3**	**555.928.471**	**Level 3**	**576.442.232**	**Level 3**	**597.712.950**	**Level 3**	**3.014.571.962**	
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan - Inspektorat Daerah																		
6.01.02	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	%	0%	100%	301.211.000	100%	446.459.550	100%	536.817.759	100%	555.928.471	100%	576.442.232	100%	597.712.950	100%	3.014.571.962	PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
	Sasaran 5.1.2. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah	**Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah**	**%**	**-19,11% dan 2,34%**	**25,12% dan 38,09%**	**6.443.849.560**	**36,47% dan 44,44%**	**4.944.993.420**	**4,72% dan 4,72%**	**7.421.101.194**	**4,72% dan 4,72%**	**9.421.212.396**	**4,72% dan 4,72%**	**11.436.015.134**	**4,72% dan 4,72%**	**13.467.194.513**	**4,72% dan 4,72%**	**53.134.366.217**	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Keuangan																		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rp	Rp.755,878,717,409.76	945,743,797,151.00	6.443.849.560	1,290,683,000,000	4.944.993.420	1,351,604,000,000	7.421.101.194	1,415,400,000,000.00	9.421.212.396	1,482,211,000,000.00	11.436.015.134	1,552,173,000,000.00	13.467.194.513	8,037,814,797,151	53.134.366.217	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan
		Realisasi Retribusi Daerah	Rp	Rp.92,487,837,368.00	127,906,700,000.00		184,749,105,918.00		193,469,263,000.00		202,601,013,000.00		212,163,781,000.00		222,177,912,000.00		1,143,067,774,918		
	Sasaran 5.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	**Indeks SPBE**	**Indeks**	**3,11**	**2,82**	**4.437.847.000**	**3,09**	**5.721.223.742**	**3,18**	**6.533.115.500**	**3,47**	**6.637.362.674**	**3,66**	**6.791.915.531**	**3,86**	**7.374.905.490**	**3,86**	**37.496.369.937**	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Komunikasi dan Informasi																		
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE;	Indeks	2,86	3	4.361.049.000	3	5.593.031.442	3	6.228.391.500	3	6.321.790.500	3	6.464.968.000	3	7.036.015.000	3	36.005.245.442	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
		Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,57	3,3		3,4		3,5		3,9		4		4		4		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks	3,33	3,16		3,16		3,16		4		4		5		5		
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Statistik																		
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100%	11.005.000	100%	26.951.000	100%	200.000.000	100%	207.120.000	100%	214.493.472	100%	222.129.440	100%	881.698.912	PD Pengampu Urusan Statistik
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Persandian																		
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Level	N/A	3	65.793.000	3	101.241.300	3	104.724.000	3	108.452.174	3	112.454.059	3	116.761.050	3	609.425.583	PD Pengampu Urusan Persandian
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Level	0	3		3		3		3		3		3		3		
		Indeks Profesionalitas ASN	**Indeks**	**51,99**	**53, 99**	**1.708.649.000**	**55,49**	**8.041.671.300**	**60**	**9.492.818.000**	**62**	**9.295.185.000**	**64**	**9.557.057.000**	**66**	**9.456.487.000**	**66**	**47.551.867.300**	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Kepegawaian																		
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	%	89,61%	90,15%	705.199.000	90.75%	2.200.059.000	91.35%	3.737.716.000	91.95%	3.530.083.000	92.55%	3.791.955.000	93.15%	3.601.385.000	93,15%	17.566.397.000	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian
		Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	%	100,00%	100,00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100,00%		
		Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	%	72,48%	72,48%		72.62%		72.76%		72.90%		73.03%		73.17%		73,17%		
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Pendidikan dan Pelatihan																		
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	%	60,70%	60,70%	1.003.450.000	61.97%	5.841.612.300	65.59%	5.755.102.000	69.21%	5.765.102.000	72.83%	5.765.102.000	76.45%	5.855.102.000	76.45%	29.985.470.300	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Indeks**	**81,61**	**82,00**	**338.404.552.057**	**88,31**	**410.679.183.932**	**89,00**	**428.350.024.435**	**90**	**439.422.081.582**	**91**	**463.677.710.383**	**92**	**481.713.249.058**	**92**	**2.562.246.801.447**	
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah																		
4.01.01	Program Administrasi Umum	1. Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah; 2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Indeks dan %	1. 67,13%; 2. na	1. 60-70; 2. 30%	110.162.744.453	1. 60-70; 2. 25%	138.468.996.882	1. 70-80; 2. 20%	138.468.996.882	1. 70-80; 2. 15%	138.468.996.882	1. 80-90; 2. 10%	153.804.830.045	1. 80-90; 2. 5%	159.695.555.036	1. 80-90; 2. 5%	839.070.120.180	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan; 2. Indeks Kepuasan Layanan	% dan Indeks	1) 100% 2) 67,13%; 3) 100%	1) 100% 2) 60-70 3) 100%	65.804.736.500	1) 100% 2) 60-70 3) 100%	71.456.003.250	1) 100% 2) 70-80 3) 100%	75.814.089.762	1) 100% 2) 80-90 3) 100%	79.056.111.357	1) 100% 2) 80-90 3) 100%	82.242.101.866	1) 100% 2) 80-90 3) 100%	85.944.309.368	1) 100% 2) 80-90 3) 100%	460.317.352.103	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		Kesejahteraan Rakyat; 3. Persentase MoU yang ditindaklanjuti.																	Daerah Sekretariat Daerah
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1. Persentase rekomendasi Kebijakan Layanan Perekanomian; 2. Persentase rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan; 3. Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa 4. Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	% dan Indeks	1) 100% 2) 90% 3) 67,13%; 4) 100%	1) 100% 2) 90% 3) 60-70 4) 100%	952.620.100	1) 100% 2) 90% 3) 60-70 4) 100%	2.212.305.200	1) 100% 2) 100% 3) 70-80 4) 100%	2.288.408.499	1) 100% 2) 100% 3) 70-80 4) 100%	2.369.875.842	1) 100% 2) 100% 3) 80-90 4) 100%	2.457.324.260	1) 100% 2) 100% 3) 80-90 4) 100%	2.551.439.780	1) 100% 2) 100% 3) 80-90 4) 100%	12.831.973.681	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat DPRD																		
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	%	75%	75%	9.393.724.000	76%	13.586.404.500	78%	14.674.416.815	80%	15.196.826.054	82%	15.757.588.935	84%	16.361.104.591	84%	84.970.064.895	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD
		Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang dilaksanakan	75%	75%	76%	54,133,984,608	78%	55,503,175,822	80%	60,586,438,030	82%	62,743,315,224	84%	65,058,543,556	84%	67,550,285,774	75%	365,575,743,014	
	Unsur Kewilayahan - Kecamatan																		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	%	1. 100%; 2. 100%	1. 100%; 2. 100%	26.884.525.500	1. 100%; 2. 100%	27.007.785.375	1. 100%; 2. 100%	27.936.853.192	1. 100%; 2. 100%	28.931.405.166	1. 100%; 2. 100%	29.998.974.016	1. 100%; 2. 100%	31.147.934.721	1. 100%; 2. 100%	171.907.477.970	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	%	1. 40%; 2. 100%	1. 10%; 2. 100%	107.472.670.201	1. 10%; 2. 100%	137.415.054.665	1. 10%; 2. 100%	142.142.132.545	1. 10%; 2. 100%	147.202.392.464	1. 10%; 2. 100%	152.634.160.746	1. 10%; 2. 100%	158.480.049.103	1. 100%; 2. 100%	845.346.459.724	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	%	100%	100%	7.747.934.500	100%	9.888.993.855	100%	10.229.175.244	100%	10.593.333.882	100%	10.984.227.903	100%	11.404.923.831	100%	60.848.589.215	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Penanaman Modal																		
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	%	71,10%	90,00%	554.345.120	90.00%	21.483.000	90.00%	22.222.015	90.00%	23.013.119	95.00%	23.862.303	95.00%	24.776.229	95.00%	669.701.786	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Kependudukan dan Catatan Sipil																		
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	64%	73,00%	61.479.363	80%	-	87%	550.000.000	94%	569.580.000	98,0%	589.857.048	100%	612.448.573	100%	2.383.364.984	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	%	97%	97,5%	-	98%	-	98,5%	425.000.000	99%	440.130.000	99,5%	455.798.628	100%	473.255.715	100%	1.794.184.343	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
02.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	%	17%	21%	-	34%	83.890.800	48%	218.363.951	100%	226.137.708	100%	234.188.210	100%	243.157.618	100%	1.005.738.287	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Komunikasi dan Informasi																		
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	74,59%	74,59%	6.722.335.840	74,59%	7.514.296.765	74,59%	8.044.972.934	74,59%	8.309.786.536	74,59%	8.584.855.273	74,59%	8.870.716.078	74,59%	48.046.963.426	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Pertanahan																		
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	%	34,62%	41,57%	685.922.840	54,74%	1.023.289.000	66,04%	3.169.868.542	77,33%	3.513.555.862	88,63%	1.222.653.073	100,00%	1.037.780.686	100,00%	10.653.070.003	PD Pengampu Urusan Pertanahan
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																		
01.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	%	10 Hydrant (Unit)	92,00%	1.961.513.640	100,00%	2.000.680.640	100,00%	3.501.544.054	100,00%	3.626.199.022	100,00%	3.759.534.568	100,00%	3.902.511.261	100,00%	18.751.983.185	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
01.05.04	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan)	Kecamatan	-	-	-	-	-	3 Kecamatan	863.980.000	3 Kecamatan	894.737.688	3 Kecamatan	927.753.509	3 Kecamatan	963.286.468	12 kecamatan	3.649.757.665	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	%	-	-		-		75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
		Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong	%	-	-		-		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
						1.615.852.883.578		1.941.949.155.033		2.095.750.173.530		2.261.207.333.687		2.176.741.666.785		2.216.730.470.552		12.244.824.662.227	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang dilanjutkan dengan penyajian program Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan ***Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah*** yang menjadi dasar penyusunan strategi, arah kebijakan dan target program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka *review* terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah Kota Batam selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disampaikan dalam uraian di bawah ini.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab III, tidak lagi mengacu pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan perubahan aturan perundang-undangan dalam penganggaran dan tata cara nomenklatur program-kegiatan-sub kegiatan, maka kapasitas riil seharusnya diperoleh dari proyeksi total penerimaan daerah. Untuk itu, perlu adanya perubahan format penyajian tabel kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021 -2026

Uraian	Proyeksi					
	APBD 2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**1.923.174.799.046**	**2.197.278.070.766**	**2.309.221.448.037**	**2.426.773.883.489**	**2.550.212.946.403**	**2.679.829.810.962**
TOTAL PENERIMAAN DAERAH	**2.921.147.486.859**	**3.453.989.367.124**	**3.616.326.867.379**	**3.786.294.230.147**	**3.964.250.058.962**	**4.150.569.811.734**
BELANJA DAERAH	**2.921.147.486.859**	**3.453.989.367.124**	**3.616.326.867.379**	**3.786.294.230.146**	**3.964.250.058.962**	**4.150.569.811.734**
Belanja Operasi	**2.244.015.709.006**	**2.386.215.100.892**	**2.493.882.667.303**	**2.606.527.397.884**	**2.724.383.030.998**	**2.847.694.636.629**
Belanja Pegawai	997.972.687.813	1.256.711.296.358	1.307.105.419.342	1.359.520.346.658	1.414.037.112.559	1.470.740.000.772
Belanja Barang dan Jasa	1.196.595.837.854	1.080.962.580.210	1.137.280.730.639	1.196.533.056.705	1.258.872.428.960	1.324.459.682.508
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	48.843.563.339	48.470.044.269	49.439.445.154	50.428.234.057	51.436.798.739	52.465.534.713
Belanja Bantuan Sosial	603.620.000	71.180.055	57.072.168	45.760.464	36.690.740	29.418.636
Belanja Bantuan Keuangan						
Belanja Modal	**669.175.156.491**	**1.003.058.708.362**	**1.059.425.361.941**	**1.119.733.758.405**	**1.184.259.124.068**	**1.253.295.944.217**
Belanja Tanah	0	0	0	0	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin	109.973.239.971	144.655.437.567	144.134.677.992	143.615.793.151	143.098.776.296	142.583.620.701
Belanja Gedung dan Bangunan	147.976.990.753	285.636.370.183	305.630.916.096	327.025.080.223	349.916.835.838	374.411.014.347
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	383.326.193.394	516.414.509.726	552.563.525.407	591.242.972.185	632.629.980.238	676.914.078.855
Belanja Aset Tetap Lainnya	27.898.732.373	56.352.390.886	57.096.242.446	57.849.912.846	58.613.531.696	59.387.230.314

Uraian	Proyeksi					
	APBD 2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0
Belanja Tidak Terduga	**7.956.621.362**	**64.715.557.870**	**63.018.838.136**	**60.033.073.857**	**55.607.903.897**	**49.579.230.888**
Belanja Tidak Terduga	7.956.621.362	64.715.557.870	63.018.838.136	60.033.073.857	55.607.903.897	49.579.230.888
Transfer	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transfer Bagi Hasil Pajak	0	0	0	0	0	0
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	0
Bantuan Keuangan ke Desa	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam

7.2 Program Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan; maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terpilih untuk periode 2021-2026.

Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, maka penyusunan program pembangunan Kota Batam juga memperhatikan kapasitas riil fiskal sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 di atas. Hal ini dimaksudkan agar penentuan target dan anggaran selama lima tahun akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencara Strategis Perangkat Daerah. Selain itu juga dengan memaksimalkan potensi atau peluang untuk sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari non APBD.

Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan tiap urusan yang diampu. Penyajian program-program Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 7.2 di bawah ini.

Tabel 7. 2 Indikator Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Batam Tahun 2021-2026

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
Pendidikan																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	338,901,827,131	100%	488,645,993,573	100%	488,645,993,573	100%	488,645,993,573	100%	540,073,942,865	100%	560,758,774,876	100%	2,905,672,525,591	PD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan	1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD 2. Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/sederajat 3. Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/sederajat 4. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	%	79.32 95.65 90.55 91.25	79.50 96.00 91.00 91.45	411.215.662.036	80.00 96.50 91.50 91.65	368.530.906.158	80.50 97.00 92.00 91.85	368.530.906.158	81.00 97.50 92.50 92.30	394.779.387.278	81.50 98.00 93.00 92.70	409.346.746.669	82.00 98.50 93.50 93.00	425.024.727.066	82.00 98.50 93.50 93.00	2.377.428.335.365	PD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	70%	70%	-	70%	-	85%	2,180,000,000	90%	2,257,608,000	95%	2,340,913,735	100%	2,430,570,731	100%	9,209,092,466	PD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase sekolah yang telah terpenuhi tendik dan pendidiknya sesuai kebutuhan	%	13.66%	13.66%	-	29.66%	-	45.66%	100,000,000	61.66%	103,560,000	77.66%	107,381,364	93,66%	111,494,070	93,66%	422,435,434	PD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin	%	88.15%	90.13%	-	92.10%	-	94.10%	226,000,000	96.00%	234,045,600	98.00%	242,681,883	100.00%	251,976,599	100%	954,704,081	PD Pengampu Urusan Pendidikan

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	penyelenggaraan yang masih berlaku																	
Kesehatan																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	301,958,185,324	100%	280,687,985,221	100%	280,687,985,221	100%	280,687,985,221	100%	311,774,973,711	100%	323,715,955,204	100%	1,779,513,069,902	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%	145,136,396,911	100%	125,229,720,120	100%	125,229,720,120	100%	134,149,161,853	100%	139,099,265,925	100%	144,426,767,810	100%	813,271,032,739	PD Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase diabetes mellitus mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	AVLOS (Avarage Lenght of Stay (Rumah Sakit)	Hari	5-8 Hari	5-8 Hari		5-8 Hari		5-8 Hari		5-8 Hari		5-8 Hari		6-9 Hari		6-9 Hari		
	Persentase SPM Rumah Sakit yang Mencapai Target	%	90%	90.00%		92.00%		95.00%		98.00%		98.00%		100.00%		100%		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar	%	48%	48%	41,331,515,000	59%	1,034,001,599	80.00%	1,069,571,254	90.00%	1,107,647,991	100.00%	1,148,520,202	100.00%	1,192,508,525	100%	46,883,764,571	PD Pengampu Urusan Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit (IKM RS)	%	80%	80%		85%		85%		90%		90%		92%		92%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan	%	40%	40%	276,163,000	60%	310,813,000	65%	321,504,967	70%	332,950,544	75%	345,236,419	80%	358,458,974	80%	1,945,126,904	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja) aktif	%	9%	9%	673,105,050	13%	2,343,481,440	19%	2,424,097,202	25%	2,510,395,062	33%	2,603,028,640	39%	2,702,724,637	39%	13,256,832,031	PD Pengampu Urusan Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	39,413,256,837	100%	23,359,162,685	100%	23,359,162,685	100%	23,359,162,685	100%	41,823,542,957	100%	45,551,823,653	100%	196,866,111,502	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase penanganan lokasi abrasi pantai	%	29%	29%	10,478,052,180	43%	12,539,495,968	57%	12,583,591,479	71%	13,662,465,888	86%	14,840,253,502	100%	14,825,911,404	100%	78,929,770,421	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang drainase yang ditangani	%	16%	16% (61.268 m)	22,944,416,183	33% (61.550 m)	31,775,672,419	49% (61.750 m)	41,250,000,000	66% (62.450 m)	43,350,000,000	83% (62.650 m)	45,450,000,000	100% (63,350 m)	47,550,000,000	100% (82,018 m)	232,320,088,602	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan yang Ditangani	%	18%	19% (44,31 km)	138,457,888,556	35% (38,98 km)	192,371,862,516	51 % (38,98 km)	184,318,027,563	67% (38,98 km)	184,598,241,313	84% (38,98 km)	184,727,526,737	100% (38,98 km)	188,248,466,991	100% (239,19 km)	1,072,722,013,676	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengujian yang dilakukan	%	16%	17%	571,783,560	33%	399,419,400	50%	902,332,870	67%	488,049,514	83%	502,451,989	100%	517,574,589	100%	3,381,611,922	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	19,334,926,486	100%	21,017,396,693	100%	21,017,396,693	100%	21,017,396,693	100%	25,071,439,295	100%	26,031,675,420	100%	133,490,231,280	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	%	41.62%	43.49%	54,708,665,371	45.36%	76,838,582,140	47.40%	79,481,829,366	49.61%	82,311,382,491	51.99%	85,348,672,505	54.54%	88,617,526,662	54.54%	467,306,658,535	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	%	10.74%	12,22%	3,249,481,600	13,04%	4,425,374,000	14,13%	4,868,420,564	15,28%	5,041,736,336	16,5%	5,227,776,407	17,86%	5,428,000,243	17,86%	28,240,789,150	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola	%	2.577 bangunan	16.67%	75,012,959,248	33.33%	143,144,131,784	50.00%	165.029.366.154	66.67%	215,810,921,451	83.33%	132,897,768,086	100.00%	83,923,625,959	100.00%	815,818,772,682	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	955 orang	17.23%	200,471,000	33.79%	840,251,690	50.34%	869,156,348	66.89%	900,098,314	83.45%	933,311,942	100.00%	969,057,789	100.00%	4,712,347,083	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang	%	8 dokumen, 1 aplikasi	54,95%	3,511,795,000	76,92%	6,110,003,780	82,42%	5,068,376,067	87,91%	4,565,034,184	93,41%	4,733,483,946	100.00%	5,576,469,746	100%	29,565,162,723	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	11,443,232,394	100%	15,733,604,099	100%	15,463,229,152	100%	15,967,764,573	100%	16,602,988,311	100%	17,263,474,250	100%	92,474,292,779	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Ditangani	%	0%	0%	-	100%	394,253,000	100%	407,815,303	100%	422,333,528	100%	437,917,635	100%	454,689,881	100%	2,117,009,347	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Rumah Susun Layak Huni	%	89,95%	92%	8,997,673,108	93%	8,713,256,163	95%	9,012,992,175	97%	9,333,854,696	98%	9,678,273,935	100%	10,048,951,826	100%	55,785,001,903	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	%	18,17%	33,68%	1,625,320,000	46,60%	2,669,860,000	59,53%	1,080,472,176	72,46%	1,118,936,985	87,97%	1,160,225,760	100.00%	1,204,662,407	100.00%	8,859,477,328	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	%	0%	0%	-	0.00%	-	46,85%	666,712,176	65,59%	690,447,129	83,16%	715,924,629	100.00%	743,344,542	100.00%	2,816,428,476	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	%	89.08%	94.17%	59.246.198.470	95,6%	104,345,556,563	97.02%	107,953,197,429	98.01%	111,796,331,257	99.01%	115,921,615,881	100.00%	120,361,413,769	100.00%	619,624,313,369	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	%	82.27%	84.80%	2.632.800.400	87,34%	7,088,601,400	89.87%	7,332,449,288	92.40%	7,593,484,483	96.20%	7,873,684,060	100.00%	8,175,246,160	100.00%	40,696,265,791	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	47,202,024,327	100%	50,021,217,091	100%	50,021,217,091	100%	50,021,217,091	100%	57,740,254,574	100%	59,951,706,324	100%	314,957,636,498	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	91,76%	100,00%	1.888.910.000	100,00%	2.042.149.250	100,00%	4.086.847.906	100,00%	4.180.559.692	100,00%	4.394.822.344	100,00%	4.563.144.040	100%	21.156.433.232	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	96,89%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100%		
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan	%	-	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Perkada																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	7,274,863,721	100%	8,549,093,641	100%	8,549,093,641	100%	8,549,093,641	100%	9,762,193,853	100%	10,136,085,877	100%	52,820,424,374	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan, pengendalian, penyelamatan korban kebakaran yang terlaksana sesuai dengan SPM	%	10 Hydrant (Unit)	92.00%	1,961,513,640	100%	2,000,680,640	100%	3,501,544,054	100%	3,626,199,022	100%	3,759,534,568	100%	3,902,511,261	100%	18,751,983,185	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Program Penanggulangan Bencana	Cakupan wilayah yang mendapat informasi rawan bencana (12 kecamatan)	Kecamatan	-	-	-	-	-	3 Kecamatan	863,980,000	3 Kecamatan	894,737,688	3 Kecamatan	927,753,509	3 Kecamatan	963,286,468	12 Kecamatan	3,649,757,665	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang dilatih	%	-	-		-		75%		75%		75%		75%		75%		
	Persentase korban yang dicari, dievakuasi dan ditolong	%	-	-		-		100%		100%		100%		100%		100%		
Sosial																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	9,634,264,885	100%	11,954,039,824	100%	11,954,039,824	100%	11,954,039,824	100%	13,277,983,555	100%	13,786,530,325	100%	72,560,898,237	PD Pengampu Urusan Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	%	100.00%	100.00%	1,530,269,000	100.00%	1,893,524,515	100.00%	1,958,661,758	100.00%	2,028,390,117	100.00%	2,103,237,712	100.00%	2,183,791,717	100.00%	11,697,874,819	PD Pengampu Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	%	1. 45.45% 2. 14.40%	1. 63,64%; 2. 16,57%	3,513,835,700	1. 67,27%; 2. 22,86%	2,430,057,765	1. 72,73%; 2. 34,29%	2,623,651,752	1. 90.18% 2. 90.18%	2,717,053,754	1. 81,82%; 2. 45,71%	2,817,313,038	1. 100%; 2. 69,49%	2,925,216,127	1. 100%; 2. 69,49%	17,824,471,636	PD Pengampu Urusan Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH,	%	76.35%	77.76%	1,372,360,000	78.35%	2,043,142,185	78.68%	2,113,426,276	79.01%	2,188,664,252	79.35%	2,269,425,962	79.85%	2,356,344,977	79.85%	12,343,363,652	PD Pengampu Urusan Sosial

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	BPNT)																	
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100.00%	100%	388,080,000	100%	358,814,600	100%	371,157,822	100%	384,371,041	100%	398,554,332	100%	413,818,963	100%	2,314,796,758	PD Pengampu Urusan Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	%	0%	0%	-	89.66%	251,707,830	89.66%	260,366,579	89.66%	269,635,630	93.10%	279,585,184	93.10%	290,293,297	93.10%	1,351,588,520	PD Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																		
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)**																	
Tenaga Kerja																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	9,137,268,309	100%	10,580,883,162	100%	10,580,883,162	100%	10,580,883,162	100%	11,752,745,908	100%	12,202,876,076	100%	64,835,535,779	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	49.37%	9.89%	12,496,804,800	15.12%	17,181,764,097	16.38%	17,772,816,782	18.32%	18,405,529,059	19.59%	19,084,693,082	20.77%	19,815,636,827	100.00%	104,757,244,647	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap/ ditempatkan	%	0%	0%	-	50%	475,845,310	51%	492,214,389	52%	509,737,221	53%	528,546,524	54%	548,789,856	54%	2,555,133,300	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	%	96%	96%	222,865,000	97%	141,211,100	97%	146,068,762	98%	151,268,810	98%	156,850,629	99%	162,858,008	99%	981,122,308	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku	%	na	na	-	100%	265,641,200	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	265,641,200	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	7,740,067,280	100%	9,387,833,297	100%	9,387,833,297	100%	9,387,833,297	100%	10,220,552,287	100%	10,315,552,287	100%	56,439,671,745	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota	%	11.30%	11.30%	31,755,800	11.30%	92,615,500	11.30%	260,000,000	11.40%	260,000,000	11.50%	270,000,000	11.60%	280,000,000	11.60%	1,194,371,300	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Perempuan	Batam																	Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	%	55%	55%	306,250,000	60%	418,664,500	65%	420,000,000	70%	460,000,000	75%	465,000,000	80%	543,000,000	80.00%	2,612,914,500	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	%	100%	100%	444,678,000	100%	518,723,085	100%	525,000,000	100%	557,000,000	100%	589,000,000	100%	594,000,000	100%	3,228,401,085	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	%	4%	4%	918,680,000	4.25%	2,417,580,750	4.5%	1,790,000,000	4.75%	1,865,000,000	5%	2,046,312,519	5.5%	2,350,000,000	5.5%	11,387,573,269	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase PD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	%	60%	60%	49,580,000	65%	61,175,400	70%	170,858,956	75%	185,000,000	80%	190,000,000	85%	210,000,000	85%	866,614,356	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Skor	700 Skor	750	323,995,000	770	440,000,750	780	504,277,200	800	574,070,857	820	585,000,000	830	650,000,000	830	3,077,343,807	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	%	100%	100%	367,381,000	100%	367,364,400	100%	367,381,000	100%	410,201,000	100%	450,000,000	100%	475,000,000	100%	2,437,327,400	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pangan																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	9,265,857,195	100%	11,121,645,956	100%	11,121,645,956	100%	11,121,645,956	100%	12,353,399,711	100%	12,826,534,920	100%	67,810,729,694	PD Pengampu Urusan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi	kkal per kapita per hari	2604	2605	519,062,000	2606	931,781,700	2607	1,507,883,976	2608	1,529,524,645	2,609	1,552,754,105	2610	1,577,754,587	2610	7,618,761,013	PD Pengampu Urusan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase wilayah aman pangan	%	belum ada	belum ada	301,177,000	54.7%	216,396,440	59.4%	223,840,478	62.50%	231,809,199	65.63%	240,362,958	70.31%	249,568,859	70.31%	1,463,154,933	PD Pengampu Urusan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	%	100%	85%	-	86%	89,515,060	87%	92,594,378	88%	95,890,738	89%	99,429,106	90%	103,237,241	90.00%	480,666,523	PD Pengampu Urusan Pangan

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Pertanahan																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	5,236,001,921	100%	6,947,885,633	100%	6,947,885,633	100%	6,947,885,633	100%	7,717,383,624	100%	8,012,959,417	100%	41,810,001,861	PD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	%	34,62%	41.57%	685,922,840	54.74%	1,023,289,000	66.04%	3,169,868,542	77.33%	3,513,555,862	88.63%	1,222,653,073	100.00%	1,037,780,686	100.00%	10,653,070,003	PD Pengampu Urusan Pertanahan
Lingkungan Hidup																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	15,031,893,269	100%	17,481,459,783	100%	17,481,459,783	100%	17,481,459,783	100%	19,417,580,913	100%	20,161,274,262	100%	107,055,127,793	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	%	Na	100%	502,204,000	100%	355,978,000	100%	368,223,643	100%	381,332,405	100%	395,403,571	100%	410,547,527	100%	2,413,689,146	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks	50,00; 88,78; 69,13	50,00; 88,78; 69,13	1,006,835,625	51,21; 88,65; 68,85	1,599,087,075	52,47; 88,76; 69,08	1,654,095,670	53,42; 88,89; 69,52	1,712,981,476	53,59; 89,62; 70,09	1,776,190,493	55,19; 90,93; 70,42	1,844,218,589	55,19; 90,93; 70,42	9,593,408,928	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	%	na	na	0	na	0	50%	1,100,000,000	60%	1,139,160,000	70%	1,181,195,004	80%	1,226,434,773	80%	4,646,789,777	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	-		-	100%	190,340,425	100%	196,888,136	100%	203,897,353	100%	211,421,166	100%	219,518,596	100%	1,022,065,676	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakaat	%	-	100%	62,330,000	-	-	100%	154,500,000	100%	160,000,200	100%	165,904,207	100%	172,258,339	100%	714,992,746	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	%	-	-	-	-	-	90%	2,100,000,000	90%	2,174,760,000	90%	2,255,008,644	90%	2,341,375,475	90%	8,871,144,119	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	na	10%	69,790,362,824	15%	67,679,740,940	18%	77,250,000,000	22%	79,567,500,000	26%	81,954,525,000	30%	84,413,160,750	30%	460,655,289,514	PD Pengampu Urusan Lingkungan hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	%	20%	20%	19,803,256,055	18%	22,581,012,193	13%	23,357,799,012	10%	24,189,336,657	8%	25,081,923,180	5%	26,042,560,838	5%	141,055,887,935	PD Pengampu Penunjang Urusan Kewilayahan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik yang dikelola	%	4,96%	4,96%	19,762,532,843	5,17%	30,825,383,495	5,44%	31,885,776,687	5,45%	33,020,910,337	5,46%	34,239,381,929	5,46%	35,550,750,257	5,46%	185,284,735,548	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	16,891,251,150	100%	17,994,242,955	100%	17,994,242,955	100%	17,994,242,955	100%	20,887,165,663	100%	21,679,709,359	100%	113,440,855,037	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	64%	73%	61,479,363	80%	-	87%	550,000,000	94%	569,580,000	98%	589,857,048	100%	612,448,573	100%	2,383,364,984	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	%	97%	97.5%	-	98%	-	98.5%	425,000,000	99%	440,130,000	99.5%	455,798,628	100%	473,255,715	100%	1,794,184,343	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	%	17%	21%	-	34%	83,890,800	48%	218,363,951	100%	226,137,708	100%	234,188,210	100%	243,157,618	100%	1,005,738,287	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	%	18.75%	37.50%	200,592,000	56.25%	208,983,620	75.00%	216,172,657	93.75%	223,868,403	93.75%	232,129,147	100.00%	241,019,694	100%	1,322,765,520	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	%	91.43%	93.55%	14,569,698,000	94.44%	15,660,954,150	97.55%	17,481,690,973	98.44%	18,104,039,171	99.22%	18,772,078,217	100.00%	19,491,048,813	100%	104,079,509,323	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
Program pengendalian penduduk	Persentase PD yang telah melaksanakan kebijakan	%	0	0%	81,208,500	30%	81,176,100	40%	120,000,000	50%	125,000,000	60%	130,000,000	70%	135,000,000	70%	672,384,600	PD Pengampu Urusan Pengendalian

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	GDPK																	Penduduk dan KB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	%	84.03%	80.00%	3,809,080,390	80.50%	3,958,489,900	81%	4,217,500,000	82%	4,295,500,000	83%	4,600,500,000	84.03%	4,680,500,000	84.03%	25,561,570,290	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	%	40%	40%	691,295,000	45%	601,200,000	50%	695,316,174	55%	814,103,000	60%	830,200,000	65%	923,934,951	65%	4,556,049,125	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
Perhubungan																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	21,968,742,077	100%	29,730,706,368	100%	29,730,706,368	100%	29,730,706,368	100%	33,023,466,213	100%	34,288,264,969	100%	178,472,592,363	PD Pengampu Urusan Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	%	48%	51%	28,028,577,268	61%	22,106,675,602	71%	39,424,782,000	81%	36,077,042,000	90%	39,919,536,000	100%	48,439,658,000	100%	213,996,270,870	PD Pengampu Urusan Perhubungan
	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Unit	2,488 unit	2656		3197		3698		4199		4710		5211		5,211 Unit		
	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	%	24%	26%		27%		33%		41%		50%		63%		63%		
	Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai	Jumlah Jukir	0	0		0		100		200		300		400		400		
	Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji	%	69%	70%		73%		75%		78%		80%		80%		80%		PD Pengampu Urusan Perhubungan
Program Pengelolaan Pelayaran	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	%	49%	49%	2,623,131,013	49%	8,102,566,320	49%	8,480,956,167	49%	8,877,016,820	49%	9,291,573,506	49%	9,725,489,988	49%	47,100,733,814	PD Pengampu Urusan Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang Ditangani	%	16%	16%	25,614,408,890	33%	48,958,202,330	49%	51,228,217,424	66%	54,195,122,227	83%	56,327,391,663	100.00%	59,139,995,902	100%	295,463,338,436	PD Pengampu Urusan Perhubungan/ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Komunikasi dan Informatika																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan	%	100%	100%	7,587,742,904	100%	9,031,083,850	100%	9,031,083,850	100%	9,031,083,850	100%	11,258,460,626	100%	13,978,862,058	100%	59,918,317,138	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Kabupaten/ Kota	pemerintahan daerah																	Informatika
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	74.59%	74.59%	6,722,335,840	74.59%	7,514,296,765	74.59%	8,044,972,934	74.59%	8,309,786,536	74.59%	8,584,855,273	74.59%	8,870,716,078	74.59%	48,046,963,426	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE;	Indeks	2,86	3	4,361,049,000	3	5,593,031,442	3	6,228,391,500	3	6,321,790,500	3	6,464,968,000	3	7,036,015,000	3	36,005,245,442	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
	Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.57	3.30		3.40		3.50		3.90		4.00		4.00		4.00		
	Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks	3.33	3.16		3.16		3.16		4.00		4.00		5.00		5.00		
Koperasi, Usaha Kecil, dan Mikro																		
Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	8,596,800,289	100%	10,689,968,478	100%	10,689,968,478	100%	10,689,968,478	100%	11,873,912,731	100%	12,328,683,589	100.00%	64,869,302,043	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	%	25.47%	0.00%	-	26.94%	137,206,800	27.70%	141,871,831	28.81%	146,837,345	30.23%	152,123,490	32.02%	157,904,182	32.02%	735,943,648	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang sehat	%	64.00%	0.00%	-	0.00%	-	80.00%	120,960,000	83.33%	125,266,176	88.89%	129,888,497.89	91.67%	134,863,227.36	91.67%	510,977,901	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	%	17.09%	18.59%	390,304,000	21.38%	493,851,850	23.77%	510,746,479	25.36%	528,783,454	27.26%	548,069,520	30.79%	568,982,523	30.79%	3,040,737,826	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi	%	18.80%	0.00%	-	21.00%	444,676,000	0.00%	-	0.00%	-	24.00%	461,084,544	0.00%	-	24.00%	905,760,544	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	%	25.23%	27.03%	335,370,000	30.00%	342,474,000	34.45%	1,024,568,116	35.34%	1,061,042,741	37.45%	1,100,195,218	39.21%	1,497,923,449	39.21%	5,361,573,524	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	%	19.82%	26.32	393,054,000	42.15%	1,813,868,750	43.76%	1,876,265,835	45.45%	1,943,060,899	48.60%	2,014,759,846	53.79%	2,091,925,148	53.79%	10,132,934,478	PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro
Penanaman Modal					**0**													
Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	14,678,278,428	100%	15,872,985,516	100%	15,872,985,516	100%	15,872,985,516	100%	17,630,963,570	100%	18,306,229,475	100%	98,234,428,021	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	%	8.14% (Tahun 2019 : 405 Proyek; Tahun 2020 :438 Proyek)	5%	118,089,840	5%	111,000,000	5%	114,818,400	5%	118,905,935	5%	123,293,564	5%	128,015,708	30%	714,123,447	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kepeminatan investasi	%	Belum dikerjakan	90%	145,645,760	90%	309,477,000	90%	320,123,009	95%	331,519,388	95%	343,752,453	95%	356,918,172	95%	1,807,435,782	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	%	71.10%	90.00%	554,345,120	90.00%	21,483,000	90.00%	22,222,015	90.00%	23,013,119	95.00%	23,862,303	95.00%	24,776,229	95.00%	669,701,786	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	%	10% (500 Perusahaan)	10%	326,122,000	10%	319,790,800	10%	330,791,604	10%	342,567,785	10%	355,208,536	10%	368,813,023	70%	2,043,293,747	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistim Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime	%	Belum dikerjakan	60%	88,412,880	70%	86,500,000	70%	89,475,600	80%	92,660,931	80%	96,080,120	90%	99,759,988	90%	552,889,519	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Kepemudaan dan Olahraga																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	7,663,628,560	100%	9,061,005,152	100%	9,061,005,152	100%	9,061,005,152	100%	10,885,270,452	100%	11,329,977,373	100%	57,061,891,841	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina	%	77.78%	95.74%	1,421,899,771	95.74%	6,905,294,855	100%	14,865,189,341	100%	8,708,364,000	100%	15,208,364,000	100%	10,958,364,000	100%	58,067,475,967	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga berprestasi	%	0	26%	18,978,964,803	76%	35,818,942,070	24%	38,232,578,720	80%	42,789,729,144	24%	14,694,670,251	84%	19,235,256,584	84%	169,750,141,572	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
	Jumlah perolehan medali	medali	0	11		301		11		86		11		316		736		
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota pramuka aktif dalam organisasi	%	43.38%	43.73%	500,000,000	44.08%	1,225,691,380	44.44%	16,050,000,000	44.79%	31,100,000,000	45.14%	16,150,000,000	45.49%	21,200,000,000	45.49%	86,225,691,380	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Statistik																		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100%	11,005,000	100%	26,951,000	100%	200,000,000	100%	207,120,000	100%	214,493,472	100%	222,129,440	100.00%	881,698,912	PD Pengampu Urusan Statistik
Persandian																		
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Level	-	3	65,793,000	3	101,241,300	3	104,724,000	3	108,452,174	3	112,454,059	3	116,761,050	3	609,425,583	PD Pengampu Urusan Persandian
	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Level	-	3		3		3		3		3		3		3		
Kebudayaan																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	9,912,856,335	100%	12,996,130,447	100%	12,996,130,447	100%	12,996,130,447	100%	14,435,488,663	100%	14,988,367,879	100%	78,325,104,218	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	%	28%	20%	1,226,075,000	20%	1,874,371,000	20%	1,938,849,362	20%	2,007,872,400	20%	2,081,962,891	20%	2,161,702,070	100%	11,290,832,723	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya, dan cagar budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	16.66%	16.66%	179,536,000	16.66%	214,200,000	16.66%	221,568,480	16.66%	229,456,318	16.66%	237,923,256	16.66%	247,035,717	100%	1,329,719,771	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Tingkatan tipe Museum	Kategori	C	C	386,201,485	B	814,880,960	B	842,912,865	B	872,920,563	B	905,131,332	B	939,797,862	B	4,761,845,067	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Perpustakaan																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	5,759,197,294	100%	8,836,679,660	100%	8,836,679,660	100%	8,836,679,660	100%	11,238,100,000	100%	11,386,000,000	100%	54,893,336,274	PD Pengampu Urusan Perpustakaan

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar nasional perpustakaan	%	2%	2%	950,730,000	2,5%	721,905,950	2,5%	2,200,000,000	2,5%	2,775,000,000	3%	3,225,000,000	3,5%	3,583,500,000	16%	13,456,135,950	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
	Persentase peningkatan koleksi perpustakaan	%	67%	67%		70%		73%		76%		79%		80%		80%		
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	%	0	-	-	-	-	60%	50,000,000	70%	100,000,000	80%	100,000,000	90%	100,000,000	90%	350,000,000	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
Kearsipan																		
Program Pengelolaan Arsip	Persentase unit pengolah dengan pengelolaan arsip dinamis yang baku	%	10%	10%	217,780,000	10%	497,553,320	20%	1,023,000,000	10%	1,245,000,000	5%	1,468,000,000	3%	1,646,800,000	58%	6,098,133,320	PD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip	%	0	-	-	-	-	20%	350,000,000	20%	465,000,000	20%	600,000,000	20%	670,000,000	80%	2,085,000,000	PD Pengampu Urusan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
Kelautan dan Perikanan																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	9,650,511,936	100%	11,369,586,796	100%	11,369,586,796	100%	11,369,586,796	100%	12,575,110,019	100%	13,056,736,733	100%	69,391,119,076	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi nelayan kecil (ton)	Ton	19,954	20,154	3,329,589,300	20,355	1,678,263,090	20,559	2,785,995,340	20,765	16,097,576,774	20,972	1,917,826,157	21,182	1,991,278,899	21,182	27,800,529,560	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi pembudidaya ikan (ton)	Ton	7,235	7,380	258,781,250	7,527	594,127,135	7,678	614,565,108	7,831	688,223,626	7,988	713,619,078	8,148	740,950,688	8,148	3,610,266,885	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan (ton)	Ton	1290,49	-	-	1,316.43	477,466,480	1,329.59	543,891,327	1,342.89	563,253,858	1,356.32	584,037,926	1,369.88	606,406,578	1,369.88	2,775,056,169	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Pariwisata																		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan LN dan DN (non museum)	wisatawan	500,000	500,000	1,284,666,700	1,000,000	1,892,622,887	1,500,000	1,957,729,114	1,700,000	2,027,424,271	1,800,000	2,102,236,226	1,900,000	2,182,751,874	8,400,000	11,447,431,072	PD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah produk pariwisata daerah	produk	3 Objek yang dipublikasikan	3 Objek yang dipublikasikan	192,350,000	3 Objek yang dipublikasikan	214,075,000	3 Objek yang dipublikasikan	221,439,180	3 Objek yang dipublikasikan	229,322,415	3 Objek yang dipublikasikan	237,784,412	3 Objek yang dipublikasikan	246,891,555	3 Objek yang dipublikasikan	1,341,862,562	PD Pengampu Urusan Pariwisata

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
			5 Media Promosi	5 Media Promosi		5 Media Promosi		5 Media Promosi		5 Media Promosi		5 Media Promosi		5 Media Promosi		5 Media Promosi		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina	sub sektor	2 Sub Sektor	2 Sub Sektor	2,221,098,500	2 Sub Sektor	2,399,290,260	2 Sub Sektor	2,481,825,845	2 Sub Sektor	2,570,178,845	2 Sub Sektor	2,665,018,444	2 Sub Sektor	2,767,088,651	10 Sub Sektor	15,104,500,545	PD Pengampu Urusan Pariwisata
	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina	Orang	155 Orang	155 Orang		155 Orang		155 Orang		155 Orang		155 Orang		155 Orang		775 Orang		
Pertanian																		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	%	30,309	3%	3,318,630,000	3,5%	2,800,152,425	4%	5,210,565,355	4%	5,744,765,185	4%	6,374,241,704	4%	7,011,665,874	22,5%	30,460,020,543	PD Pengampu Urusan Pertanian
	Jumlah produksi ternak sapi	ekor	297	132		70		85		95		110		120		612		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	ton per tahun	na	226 ton	779,888,995	233.4 ton	823,670,860	256 ton	1,285,000,000	266 ton	1,500,000,000	282 ton	1,750,000,000	292 ton	2,000,000,000	1555	8,138,559,855	PD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	%	40%	10%	101,320,000	10%	655,064,790	10%	725,000,000	10%	775,000,000	10%	850,000,000	10%	950,000,000	60%	4,056,384,790	PD Pengampu Urusan Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	%	70%	75%	437,724,511	80%	1,294,422,487	85%	1,123,818,145	90%	1,080,006,071	95%	1,136,648,295	100%	1,193,796,925	100%	6,266,416,434	PD Pengampu Urusan Pertanian
Perdagangan																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	10,563,318,695	100%	12,726,773,551	100%	12,726,773,551	100%	12,726,773,551	100%	12,674,255,851	100%	12,684,674,475	100%	74,102,569,674	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	%	100%	0%	0.00	0%	0.00	100%	75,000,000	100%	100,000,000	100%	75,000,000	100%	100,000,000	100%	350,000,000	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas Baik	%	15.09	20.75	2,810,451,779	24.53	1,471,906,740	30.19	1,200,000,000	37.74	1,200,000,000	43.40	1,200,000,000	50.94	1,200,000,000	50.94	9,082,358,519	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	%	20.00	40	2,273,650,000	50	5,176,311,000	60	6,649,171,201	70	7,486,353,543	80	8,337,055,889	100	9,058,594,505	100	38,981,136,138	PD Pengampu Urusan Perdagangan

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
dan barang penting																		
Program pengembangan ekspor	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	$	959 (juta $)	0	-	900 (juta $)	245,736,500	925 (juta $)	305,000,000	950 (juta $)	255,000,000	975 (juta $)	305,000,000	1000 (juta $)	505,000,000	1000 (juta $)	1,615,736,500	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase peningkatan Tertib Ukur	%	8.76%	4.63%	721,118,300	5.14%	1,563,372,520	5.43%	1,000,000,000	5.67%	1,050,000,000	5.85%	1,100,000,000	5.99%	1,150,000,000	5.99%	6,584,490,820	PD Pengampu Urusan Perdagangan
Perindustrian																		
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	8.03%	8.50%	1,808,443,500	8.60%	2,485,712,675	8.70%	2,600,000,000	8.80%	2,600,000,000	9.01%	2,600,000,000	9.05%	2,600,000,000	9.05%	14,694,156,175	PD Pengampu Urusan Perindustrian
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
Sekretariat Daerah																		
Program Administrasi Umum	1. Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah; 2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Indeks dan %	1) 67.13%; 2) na	1) 60-70; 2) 30%	110,162,744,453	1) 60-70; 2)25%	138,468,996,882	1) 70-80; 2) 20%	138,468,996,882	1) 70-80; 2) 15%	138,468,996,882	1) 80-90; 2) 10%	153,804,830,045	1) 80-90; 2) 5%	159,695,555,036	1) 80-90; 2) 5%	839,070,120,180	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan; 2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat; 3. Persentase Rekomendasi kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti; 4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	% dan Indeks	1) 100% 2) 67.13% 3) 100% 4) 100%	1) 100% 2) 60-70 3) 100% 4) 100%	72,796,474,300	1) 100% 2) 60-70 3) 100% 4) 100%	78,262,185,900	1) 100% 2) 70-80 3) 100% 4) 100%	82,854,405,095	1) 100% 2) 70-80 3) 100% 4) 100%	86,347,061,916	1) 100% 2) 80-90 3) 100% 4) 100%	89,802,088,501	1) 100% 2) 80-90 3) 100% 4) 100%	93,793,843,491	1) 100% 2) 80-90 3) 100% 4) 100%	503,856,059,203	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan	1. Persentase rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian; 2. Persentase rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan;	Indeks dan %	1) 100% 2) 90% 3) 67,13% 4) 100%	1)100% 2) 90% 3) 60-70 4) 100%	1,375,432,100	1)100% 2) 90% 3) 60-70 4) 100%	2,680,228,200	1)100% 2) 100% 3) 70-80 4) 100%	2,772,428,050	1)100% 2) 100% 3) 70-80 4) 100%	2,871,126,489	1)100% 2)100% 3) 80-90 4) 100%	2,977,071,056	1)100% 2)100% 3) 80-90 4) 100%	3,091,092,878	1)100% 2) 100% 3) 80-90 4) 100%	15,767,378,773	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	3. Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa 4. Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti																	
Sekretariat DPRD																		
Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya administrasi umum sekretariat DPRD Kab/Kota	%	88%	88%	56,241,277,167	89%	60,824,673,225	90%	60,824,673,225	92%	60,824,673,225	93%	67,934,367,256	94%	70,536,253,521	94%	377,185,917,619	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	%	75%	75%	9,393,724,000	76%	13,586,404,500	78%	14,674,416,815	80%	15,196,826,054	82%	15,757,588,935	84%	16,361,104,591	84%	84,970,064,895	PD Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD
	Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang di laksanakan	%	75%	75%	54,133,984,608	76%	55,503,175,822	78%	60,586,438,030	80%	62,743,315,224	82%	65,058,543,556	84%	67,550,285,774	84%	365,575,743,014	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
Perencanaan																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	11,592,822,133	100%	13,027,866,393	100%	13,718,498,457.19	100%	14,206,877,002.27	100%	15,627,564,702.49	100%	16,226,100,430.60	100%	84,399,729,119	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Perencanaan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	90%	90%	891,143,000	90%	1,086,497,875	95%	1,123,873,402	95%	1,513,883,295	95%	1,556,830,589	95%	1,616,457,200	95%	7,788,685,361	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Perencanaan
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	100 %	-	-	100%	335,890,305	100%	347,444,931.49	100%	359,813,971.05	100%	373,091,106.58	100%	387,380,495.97	100%	1,803,620,810	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Perencanaan
	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan	%	100%	-	-	100%	185,085,600	100%	222,102,720.00	100%	244,312,992.00	100%	268,744,291.20	100%	295,618,720.32	100%	1,215,864,324	

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu																	
	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	100%	-	-	100%	321,615,425	100%	332,678,995.62	100%	344,522,367.86	100%	357,235,243.24	100%	370,917,353.05	100%	1,726,969,385	
Keuangan																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	26,809,823,301	100%	28,742,628,589	100%	28,742,628,589	100%	28,742,628,589	100%	31,925,956,024	100%	33,148,720,140	100%	178,112,385,232	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat/Tidak Tepat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	9,453,293,862	Tepat Waktu	69,796,517,959	Tepat Waktu	72,197,518,177	Tepat Waktu	74,767,749,824	Tepat Waktu	77,526,679,792	Tepat Waktu	80,495,951,628	Tepat Waktu	384,237,711,242	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan
	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	%	97%	97%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	849,800,000	100%	3,136,616,078	100%	3,244,515,671	100%	3,360,020,429	100%	3,484,005,183	100%	3,617,442,581	100%	17,692,399,942	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	25,688,922,268	100%	37,130,689,153	100%	37,130,689,153	100%	37,130,689,153	100%	41,243,018,027	100%	42,822,625,618	100%	221,146,633,372	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rp	755,878,193,409	945,743,797,151.00	6,443,849,560	1,290,683,000,000	4,944,993,420	1,351,604,000,000	7,421,101,194	1,415,400,000,000.00	9,421,212,396	1,482,211,000,000.00	11,436,015,134	1,552,173,000,000.00	13,467,194,513	8,037,814,797,151	53,134,366,217	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Keuangan
	Realisasi Retribusi Daerah	Rp	92,622,927,690	127,906,700,000.00		184,749,105,918.00		193,469,263,000.00		202,601,013,000.00		212,163,781,000.00		222,177,912,000.00		1,143,067,774,918		
Kepegawaian																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan	%	98,99%	100.00%	10,734,966,790	100.00%	13,859,144,085	100.00%	13,859,144,085	100.00%	13,859,144,085	100.00%	15,106,793,000	100.00%	15,275,118,000	100.00%	82,694,310,045	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Kabupaten/Kota	pemerintahan daerah																	Kepegawaian
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	%	89.61%	90.15%	403,915,000	90.75%	1,884,327,000	91.35%	2,106,847,000	91.95%	1,914,214,000	92.55%	2,149,784,000	93.15%	1,914,214,000	93.15%	10,373,301,000	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian
	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	%	100.00%	100.00%	-	100.00%	103,732,000	100.00%	318,869,000	100.00%	303,869,000	100.00%	330,171,000	100.00%	375,171,000	100.00%	1,431,812,000	
	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	%	72.48%	72.48%	301,284,000	72.62%	212,000,000	72.76%	1,312,000,000	72.90%	1,312,000,000	73.03%	1,312,000,000	73.17%	1,312,000,000	73.17%	5,761,284,000	
Pendidikan dan Pelatihan																		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	%	60.70%	60.70%	1,003,450,000	61.97%	5,841,612,300	65.59%	5,755,102,000	69.21%	5,765,102,000	72.83%	5,765,102,000	76.45%	5,855,102,000	76.45%	29,985,470,300	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Penelitian dan Pengembangan																		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	%	-	-	-	50%	90,784,500.00	50%	662,335,594.00	50%	611,482,562.35	50%	344,286,268.90	50%	227,684,933.00	50%	1,936,573,858	PD Pengampu Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
Inspektorat Daerah																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	19,708,493,832	100%	25,917,674,888	100%	25,917,674,888	100%	25,917,674,888	100%	41,672,036,089	100%	42,115,437,941	100%	181,248,992,526	PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	%	85%	85%	182,740,000	87%	396,188,500	88%	409,817,384	89%	424,406,883	90%	440,067,497	93%	456,922,082	93%	2,310,142,346	PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	%	0%	100%	301,211,000	100%	446,459,550	100%	536,817,759	100%	555,928,471	100%	576,442,232	100%	597,712,950	100%	3,014,571,962	PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
UNSUR KEWILAYAHAN																		

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Kecamatan																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	145,370,940,804	100%	174,412,308,572	100%	174,412,308,572	100%	174,412,308,572	100%	193,728,965,196	100%	201,148,784,563	100%	1,063,485,616,279	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	%	1. 100%; 2. 100%	1. 100%; 2. 100%	26,884,525,500	1. 100%; 2. 100%	27,007,785,375	1. 100%; 2. 100%	27,936,853,192	1. 100%; 2. 100%	28,931,405,166	1. 100%; 2. 100%	29,998,974,016	1. 100%; 2. 100%	31,147,934,721	1. 100%; 2. 100%	171,907,477,970	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	%	1. 40%; 2. 100%	1. 10%; 2. 100%	107,472,670,201	1. 10%; 2. 100%	137,415,054,665	1. 10%; 2. 100%	142,142,132,545	1. 10%; 2. 100%	147,202,392,464	1. 10%; 2. 100%	152,634,160,746	1. 10%; 2. 100%	158,480,049,103	1. 100%; 2. 100%	845,346,459,724	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					13,862,767,500												13,862,767,500	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	%	100%	100%	7,747,934,500	100%	9,888,993,855	100%	10,229,175,244	100%	10,593,333,882	100%	10,984,227,903	100%	11,404,923,831	100%	60,848,589,215	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																		
Kesatuan Bangsa dan Politik																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	6,304,608,131	100%	8,317,983,655	100%	8,317,983,655	100%	8,317,983,655	100%	9,239,223,878	100%	9,593,086,153	100%	50,090,869,127	PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan "yang dilaksanakan"	%	100%	100%	130,427,500	100%	160,016,000	100%	165,520,550	100%	171,413,082	100%	177,738,225	100%	184,545,599	100%	989,660,956	PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
	Cakupan peserta kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa serta jumlah total calon peserta yang seharusnya	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan	%	100%	100%	1,893,456,544	100%	2,177,920,861	100%	22,760,768,115	100%	38,727,074,673	100%	8,875,959,053	100%	8,893,421,261	100%	83,328,600,507	PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
	Persentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/dilaksanakan	kebijakan	1 kebijakan	1 Kebijakan	306,945,000	1 Kebijakan	2,876,460,500	1 Kebijakan	3,486,102,314	1 Kebijakan	3,512,307,556	1 Kebijakan	3,641,911,705	1 Kebijakan	3,781,396,923	6 kebijakan	17,605,123,998	PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan	kebijakan	na	1 kebijakan	62,685,000	1 kebijakan	3,741,362,550	1 kebijakan	3,870,065,422	1 kebijakan	4,007,839,751	1 kebijakan	4,155,729,038	1 kebijakan	4,314,893,460	6 kebijakan	20,152,575,221	PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
	Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	%	-	-	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	%	100%	100%	5,886,950,000	100%	486,674,000	100%	2,015,774,724	100%	2,252,928,704	100%	2,534,607,894	100%	2,869,553,584	100%	16,046,488,906	PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum
	Persentase rekomendasi Forkopimda yang ditetapkan sebagai kebijakan	%	-	-		-		80%		81%		83%		86%		86%		

Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Pengampu Urusan/ Penanggung Jawab
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Persentase potensi konflik yang terdeteksi	%	90%	75%		75%		80%		80%		80%		80%		80%		
Total Pagu Anggaran Indikatif					2.921.147.486.859		3.453.989.363.871		3.613.341.982.383		3.781.982.987.346		3.892.975.289.400		4.000.556.147.567			
Total Penerimaan Daerah					2.921.147.486.859		3.453.989.367.124		3.616.326.867.379		3.786.294.230.147		3.964.250.058.962		4.150.569.811.734			
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah					1.923.174.799.046		2.197.278.070.766		2.309.221.448.037		2.426.773.883.489		2.550.212.946.403		2.679.829.810.962			

Jika dilihat dari tabel 7.2 di atas, maka proyeksi total pagu anggaran dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, telah sama atau lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi total penerimaan daerah. Sebagaimana dengan adanya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari PP Nomor 58 Tahun 2005, dan kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutkahirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka seluruh komponen belanja tidak lagi dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja saat ini diklasifikasi dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Selain itu juga, penganggaran belanja saat ini sepenuhnya tertuang dalam program-kegiatan-sub kegiatan, sehingga memiliki indikator kinerja yang dapat diukur. Oleh karena itu, seluruh komponen belanja telah masuk dalam tabel 7.2 di atas, sehingga menyebabkan pengertian Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah tidaklah relevan lagi untuk dibandingkan dengan proyeksi total pagu indikatif dari program-program di atas. Total pagu indikatif program pada tabel 7.2 di atas dibandingkan dengan proyeksi total penerimaan daerah sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel 7.1 di atas. Jika sama atau lebih kecil maka, penetapan pagu indikatif semua program dapat ditetapkan.

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam penyelenggaran pemerintah daerah, kinerja diukur melalui indikator kinerja pembangunan daerah. Dalam pengukuran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara berjenjang, jenjang indikator yang tertinggi adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), kemudian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang berada di bawahnya, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan hingga Indikator Kinerja Sub Kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan merupakan indikator capaian akhir atau tujuan pembangunan daerah. Dalam dokumen RPJMD ini, IKU sebagai indikator tujuan pembangunan Kota Batam, tertuang dalam Bab V dokumen ini. Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan indikator ketercapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Batam, sebagaimana telah tertuang dalam bab-bab sebelumnya. Sementara itu, Indikator Program dan Kegiatan (serta sub kegiatan) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kota Batam. Mengingat dokumen RPJMD merupakan rencana pembangunan keseluruhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka cakupan indikator kinerja yang dituangkan dalam Bab VIII RPJMD ini meliputi IKU dan IKD saja. Indikator Program yang tertuang di Bab VII serta indikator kinerja kegiatan (dan sub kegiatan) akan tertuang secara terperinci dalam dokumen Rencana Strategis setiap perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan daerah.

Penetapan IKU dan IKD serta target pencapaiannya menjadi sangat penting dalam rangka pengendalian dan evaluasi proses pembangunan apakah sudah berada di arah yang sesuai dan tepat seperti yang telah direncanakan. Evaluasi terhadap IKU dan IKD juga akan mengarahkan penyelenggara pemerintahan

untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja pembangunan di masa mendatang.

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam dalam pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Periode 2021-2026 tercermin dari capaian IKU dan IKD yang ditetapkan. Pencapaian IKU dan IKD juga menjadi jaminan aspek akuntabilitas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 8.1 dan Tabel 8.2 memperlihatkan IKU dan IKD serta nilai indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam periode 2021-2026. Mengingat dokumen ini adalah dokumen RPJMD 2021-2026 yang disusun tahun 2021, maka catatan tentang indikator kinerja Pemerintahan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama maupun indikator kinerja daerah yang disusun berdasarkan pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Batam terpilih untuk periode tahun 2021-2026.
2. Pada IKU (Tabel 8.1), Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan dan Indeks Infrastruktur Wilayah *Hinterland* ditetapkan sebagai Indikator baru yang diturunkan dari rumusan indikator indeks infrastruktur wilayah. Indikator Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan digunakan sebagai indikator untuk tujuan mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan. Indikator Indeks Infrastruktur Wilayah *Hinterland* untuk tujuan mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland pada wilayah Kota Batam.
3. Dalam upaya mewujudkan misi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, maka terdapat dua aspek yang dijadikan tujuan dalam RPJMD yakni pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pemerataan pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan indeks gini digunakan sebagai indikator tujuan dalam upaya pencapaian misi tersebut.

Indeks gini merupakan indikator ketimpangan pendapatan yang mana menunjukkan bahwa Wali Kota Batam *concern* dalam pemerataan pembangunan, selain terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, beberapa sasaran yang akan ditetapkan dalam RPJMD adalah Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah, Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah, Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya, dan Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah. Peningkatan ekonomi kreatif daerah akan menjadi sasaran Kota Batam di masa mendatang dengan perencanaan awal yaitu pembentukan dan pertumbuhan Kawasan/klaster kreatif, sehingga masih belum ada data terkait jumlah Kawasan/klaster kreatif tahun 2020. Namun, mulai tahun 2021 jumlah Kawasan/klaster kreatif akan terus menjadi perhatian. Dengan demikian dalam beberapa tahun ke depan Kota Batam dapat merencanakan perhitungan PDRB Ekonomi Kreatif sebagai upaya pemerataan pembangunan dengan penurunan tingkat ketimpangan masyarakat.
5. Dalam tujuan peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah digunakan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai IKU, sedangkan indikator sasaran pembangunan daerah (IKD) menggunakan Opini BPK, Nilai LPPD, Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD, dan Tingkat Maturitas SPIP.
6. Dalam Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Persentase penduduk miskin sebagai IKU. Sasaran yang diagendakan dalam perwujudan tujuan tersebut adalah Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat, aksebilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat, daya beli masyarakat, peran gender dan pemuda dalam pembangunan, dan Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat, sektor ketahan pangan daerah, menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya pelayanan sosial masyarakat. Maka, IKD

yang digunakan dalam merealisasikan sasaran tersebut dicantumkan pada Tabel 8.1.

7. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka digunakan sebagai IKD dalam upaya penurunan jumlah pengangguran yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Penurunan jumlah pengangguran merupakan representasi dari terbentuknya SDM yang produktif dan berdaya saing.
8. Data IKU dan IKD tahun 2020 merupakan realisasi/capaian indikator kinerja tahun yang sudah berlalu, yang dapat dijadikan dasar/pertimbangan dalam menetapkan target kinerja 2021-2026.
9. Nilai indikator kinerja tahun 2021 hingga 2026 adalah target capaian kinerja di periode RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Batam Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	-2,55%	3,25%	5,05%	5,91%	6,40%	6,92%	7,52%	7,52%
2	Indeks Gini	Indeks	0,323	0,330	0,330	0,325	0,320	0,310	0,300	0,300
3	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	57,24	57,87	65,11	69,40	73,40	78,65	84,46	84,46
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,11	81,15	81,46	81,74	81,89	82	82,1	82,1
5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,75%	4,79%	4,74%	4,69%	4,68%	4,66%	4,65%	4,65%
6	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	48,50	48,77	53,07	59,41	63,46	67,57	71,66	71,66
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	52 (CC)	57 (CC)	64 (B)	70 (B)	74 (BB)	79 (BB)	81 (A)	81 (A)

Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Indikator Sasaran Strategis RPJMD Pemerintahan Kota Batam Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pendidikan	Indeks	73,69	73,75	73,81	73,87	73,93	73,99	74,05	74,05
2	Indeks Kesehatan	Indeks	82,05	82,12	82,19	82,26	82,33	82,40	82,47	82,47
3	Indeks Pengeluaran	Indeks	88,26	88,68	90,06	91,11	91,87	92,62	93,38	93,38
4	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persen	48,40%	49,75%	56,00%	62,25%	68,50%	81,25%	95,00%	95,00%
5	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland	Persen	27,50%	27,86%	29,55%	31,38%	33,37%	35,51%	37,80%	37,80%
6	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Persen	0,84%	54,95%	76,92%	82,42%	87,91%	93,41%	100,00%	100,00%
7	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persen	60,00%	73,00%	78,00%	82,00%	86,00%	91,00%	95,00%	95,00%
8	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Wilayah Hinterland	Persen	60,00%	40,46%	41,67%	55,85%	63,01%	70,19%	77,19%	77,19%
9	Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	Persen	10,00%	11,10%%	12,50%	14,30%	16,70%	20,00%	25,00%	25,00%

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
10	Persentase Penurunan PPKS	Persen	1,65%	1,60%	1,55%	1,50%	1,45%	1,40%	1,35%	1,35%
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	11,79%	10,50%	10,00%	9,75%	9,65%	9,60%	9,55%	9,55%
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,42	94.43	94.44	94.46	94.48	94.50	94.52	94.52
13	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92,20	86,90	87,20	87,60	87,90	88,20	88,50	88,50
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam	Indeks	69	69	69,50	70	70,50	71	71,50	71,50
15	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	55,30%	55,50%	59,25%	61,75%	64,50%	67,25%	71,25%	71,25%
16	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	Persen	45,00%	45,00%	51,00%	58,00%	63,00%	68,00%	74,00%	74,00%
17	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Wilayah Hinterland	Persen	80%	78%	88%	91%	94%	97%	100%	100%
18	Indeks SPBE	Indeks	3,11	2,82	3,09	3,18	3,47	3,66	3,86	3,86
19	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro	Persen	17,39%	20,69%	23,34%	25,51%	28,21%	31,20%	34,34%	34,34%
20	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	Persen	6,64%	6,64%	7,64%	8,64%	9,64%	10,64%	11,64%	11,64%
21	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	7,00%	9,00%	12,00%	15,00%	20,00%	30,00%	35,00%	35,00%
22	Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD	Skor	53 (Cukup)	53 (Cukup)	55 (Cukup)	60 (Cukup)	65 (Baik)	67 (Baik)	70 (Baik)	70 (Baik)
23	Pertumbuhan sektor pendukung	Persen	-45,49%	0,12%	2,45%	3,70%	4,70%	6,84%	7,41%	7,41%

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)									
24	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	100,30	100,50	101,00	101,50	102,00	102,50	103,00	103,00
25	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)	Persen	-14,73%	1,50%	3,01%	4,53%	6,50%	6,98%	7,12%	7,12%
26	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah	Persen	6,05%	5,27%	5,72%	6,77%	7,76%	8,82%	12,16%	12,16%
27	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	-19,11% dan 2,34%	25,12% dan 38,09%	36,47% dan 44,44%	4,72% dan 4,72%	4,72% dan 4,72%	4,72% dan 4,72%	4,72% dan 4,72%	4,72% dan 4,72%
28	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	51,99	53, 99	55,49	60,00	62,00	64,00	66,00	66,00
29	Tingkat Maturitas SPIP	Peringkat	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
30	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	49,13%	-10,15%	9,56%	9,51%	10,16%	10,85%	11,61%	11,61%
31	Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah	Persen	72,07%	74,07%	76,07%	78,07%	80,07%	82,07%	84,07%	84,07%
32	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33	Nilai LPPD	Peringkat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
34	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,61	82	88,31	89	90	91	92	92

Tabel 8. 3. Indikator Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Kunci) Berdasarkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Batam Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**									
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,55%	3,25%	5,05%	5,91%	6,40%	6,92%	7,52%	7,52%
1.2	Indeks Gini	Indeks	0,323	0,330	0,330	0,325	0,320	0,310	0,300	0,300
1.3	Indeks Pengeluaran	Indeks	88,26	88,68	90,06	91,11	91,87	92,62	93,38	93,38
2	**Kesejahteraan Sosial**									
2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,11	81,15	81,46	81,74	81,89	82,00	82,10	82,10
2.2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,75%	4,79%	4,74%	4,69%	4,68%	4,66%	4,65%	4,65%
2.3	Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	Persen	10,00%	11,10%%	12,50%	14,30%	16,70%	20,00%	25,00%	25,00%
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	**Pelayanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**									
1.1	**Pendidikan**									
1.1.1	Indeks Pendidikan	Indeks	73,69	73,75	73,81	73,87	73,93	73,99	74,05	74,05

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.2	**Kesehatan**									
1.2.1	Indeks Kesehatan	Indeks	82,05	82,12	82,19	82,26	82,33	82,40	82,47	82,47
1.2.2	Prevelensi Stunting pada Balita	Persen	8,70%	6,02%	6,01%	6,00%	5,95%	5,90%	5,85%	5,85 %
1.3	**Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**									
1.3.1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persen	48,40%	49,75%	56,00%	62,25%	68,50%	81,25%	95,00%	95,00%
1.3.2	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland	Persen	27,50%	27,86%	29,55%	31,38%	33,37%	35,51%	37,80%	37,80%
1.3.3	Persentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Persen	0,84%	54,95%	76,92%	82,42%	87,91%	93,41%	100,00%	100,00%
1.4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**									
1.4.1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persen	60,00%	73,00%	78,00%	82,00%	86,00%	91,00%	95,00%	95,00%
1.4.2	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Wilayah Hinterland	Persen	60,00%	40,46%	41,67%	55,85%	63,01%	70,19%	77,19%	77,19%
1.5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.5.1	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	Persen	10,00%	11,10%%	12,50%	14,30%	16,70%	20,00%	25,00%	25,00%
1.6	**Sosial**									
1.6.1	Persentase Penurunan PPKS	Persen	1,65%	1,60%	1,55%	1,50%	1,45%	1,40%	1,35%	1,35%
2	**Pelayanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**									
2.1	**Tenaga Kerja**									
2.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	11,79%	10,50%	10,00%	9,75%	9,65%	9,60%	9,55%	9,55%
2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	58,35	58,40	58,45	58,50	58,55	58,60	58,65	58,65
2.3	**Pangan**									
2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92,20	86,90	87,20	87,60	87,90	88,20	88,50	88,50
2.4	**Lingkungan Hidup**									
2.4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam	Indeks	69	69	69,50	70	70,50	71	71,50	71,50
2.4.2	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	55,30%	55,50%	59,25%	61,75%	64,50%	67,25%	71,25%	71,25%
2.5	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
2.5.1	Rata-rata Kepemilikan Dokumen	Persen	85%	85%	89%	93%	97%	99%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan penca tatan sipil									
2.6	**Pengendalian Penduduk dan KB**									
2.6.1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57,22	57,22	57,24	57,26	57,28	57,3	57,32	57,32
2.7	**Perhubungan**									
2.7.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	Persen	55%	55,50%	60%	63,50%	68,50%	72%	75,50%	75,50%
2.7.2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Wilayah Hinterland	Persen	80%	78%	88%	91%	94%	97%	100%	100%
2.8	**Komunikasi dan Informatika**									
2.7.1	Indeks SPBE	Indeks	3,11	2,82	3,09	3,18	3,47	3,66	3,86	3,86
2.9	**Koperasi dan Usaha Mikro**									
2.9.1	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro	Persen	17,39%	20,69%	23,34%	25,51%	28,21%	31,20%	34,34%	34,34%
2.10	**Penanaman Modal**									
2.10.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat di Bidang Pelayanan Perizinan Satu Atap	Peringkat	A	A	A	A	A	A	A	A
2.11	**Kepemudaan dan Olah Raga**									

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.11.1	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dalam Pembangunan	Persen	6,64%	6,64%	7,64%	8,64%	9,64%	10,64%	11,64%	11,64%
2.12	**Kebudayaan**									
2.12.1	Persentase objek kebudayaan yang dilestarikan	Persen	28,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
2.13	**Perpustakaan**									
2.13.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	7,00%	9,00%	12,00%	15,00%	20,00%	30,00%	35,00%	35,00%
2.14	**Kearsipan**									
2.14.1	Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD	Skor	53 (Cukup)	53 (Cukup)	55 (Cukup)	60 (Cukup)	65 (Cukup)	67 (Cukup)	70 (Baik)	70 (Baik)
3	**Pelayanan Urusan Pilihan**									
3.1	**Pariwisata**									
3.1.1	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	Persen	-45,49%	0,12%	2,45%	3,70%	4,70%	6,84%	7,41%	7,41%
3.2	**Pertanian**									
3.2.1	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	Persen	3,00%	3,50%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
3.2.2	Persentase peningkatan produksi ternak sapi	Persen	8,00%	8,00%	16,00%	21,00%	18,00%	22,00%	20,00%	20,00%

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.3	**Perikanan**									
3.3.1	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	100,30	100,50	101,00	101,50	102,00	102,50	103,00	103,00
3.4	**Perdagangan**									
3.4.1	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)	Persen	-14,73%	1,50%	3,01%	4,53%	6,50%	6,98%	7,12%	7,12%
3.5	**Perindustrian**									
3.5.1	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah	Persen	6,05%	5,27%	5,72%	6,77%	7,76%	8,82%	12,16%	12,16%
4	**Pelayanan Fungsi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**									
4.1	**Sekretariat Daerah**									
4.1.1	Nilai SAKIP / Hasil LKJIP	Peringkat	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
4.2	**Sekretariat DPRD**									
4.2.1	Persentase perda yang disahkan	Persen	75,00%	80,00%	82,00%	84,00%	85,00%	87,00%	90,00%	90,00%
5	**Pelayanan Fungsi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
5.1	**Perencanaan**									
5.1.1	Nilai Komponen Perencanaan dalam SAKIP	Nilai	60	60	60	65	70	75	80	80

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.2	**Keuangan**									
5.2.1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.2.2	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	-19,11% dan 2,34%	25,12% dan 38,09%	36,47% dan 44,44%	4,72% dan 4,72%	4,72% dan 4,72%	4,72% dan 4,72%	4,72% dan 4,72%	4,72% dan 4,72%
5.3	**Kepegawaian**									
5.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	51,99	53, 99	55,49	60,00	62,00	64,00	66,00	66,00
5.4	**Pendidikan dan Pelatihan**									
5.4.1	Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi ASN	Persen	21,98%	23,93%	25,38%	29,84%	31,79%	33,74%	35,69%	35,69%
5.5	**Penelitian dan Pengembangan**									
5.5.1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	1552	1600	2500	2800	3100	3400	3700	3700
6	**Pelayanan Fungsi Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**									
6.1	**Inspektorat**									
6.1.1	Tingkat Maturitas SPIP	Peringkat	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
7	**Pelayanan Fungsi Unsur Kewilayahan**									
7.1	**Kecamatan**									

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Peringkat	B	B	B	B	B	B	B	B
8	**Pelayanan Fungsi Unsur Pemerintahan Umum**									
8.1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**									
8.1.1	Persentase Penurunan Konflik	Persen	25%	20%	16%	14%	12%	11%	10%	10%
	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	**Kemampuan Ekonomi**									
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,55%	3,25%	5,05%	5,91%	6,40%	6,92%	7,52%	7,52%
1.2	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	49,13%	-10,15%	9,56%	9,51%	10,16%	10,85%	11,61%	11,61%
1.3	Pertumbuhan Kawasan/ Klaster Kreatif Daerah	Persen	72,07%	74,07%	76,07%	78,07%	80,07%	82,07%	84,07%	84,07%
2	**Kondisi Infrastruktur**									
2.1	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	57,24	57,87	65,11	69,40	73,40	78,65	84,46	84,46
2.2	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	48,50	48,77	53,07	59,41	63,46	67,57	71,66	71,66
3	**Kondisi Sumber Daya Manusia**									
3.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,11	81,15	81,46	81,74	81,89	82,00	82,10	82,10
3.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,42	94.43	94.44	94.46	94.48	94.50	94.52	94.52

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	51,99	53, 99	55,49	60	62	64	66	66
4	**Kondisi Tata Kelola Pemerintahan**									
4.1	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.2	Nilai LPPD	Peringkat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,61	82	88,31	89	90	91	92	92

BAB IX
PENUTUP

BAB IX

PENUTUP

Sebagai upaya untuk menjembatani kekosongan hukum pada masa periode Kepala Daerah dengan periode akhir RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026, dan sekaligus sebagai acuan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pada sisa periode tahun 2024-2026, khususnya bagi Perangkat Daerah, maka diatur dalam pedoman Transisi dan Kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

9.1 Pedoman Transisi

Guna menjamin konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan dimasa transisi, maka dirumuskan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 akan berakhir pada tahun 2026, sedangkan periode Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan yang terbaru menetapkan bahwa pada tahun 2024 akan diadakan Pemilihan Kepala Daerah (serentak) dan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), maka diperlukan kepastian hukum dan acuan terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi tersebut sampai dengan adanya ketentuan terbaru yang menyatakan bahwa setelah tahun 2024 harus mengacu pada RPJMD yang baru.
2. Pada masa transisi setelah berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2021-2024, penyusunan RKPD dan APBD tetap mengacu/melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode berikutnya dan mendasarkan pada RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025 serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan secara teknis, tata cara penyusunan RKPD tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Batam serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemerintah Daerah menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
2. Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2022 akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD ini karena bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Baru kemudian, untuk penyusunan RKPD Tahun 2023 mengacu sepenuhnya pada RPJMD ini;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Batam agar segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan – Perencanaan akan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 bersama dengan Sekretariat Daerah Kota Batam;
5. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkup Pemerintah Kota Batam dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026;
6. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Batam dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya, agar dalam melaksanakan perencanaan pembangunan tetap mendukung pencapaian target kinerja dengan mempedomani dan melaksanakan

program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 sesuai tahapan dan berkelanjutan (*sustainable*).

7. Dalam keadaan luar biasa yang tidak ada dalam RPJMD maka tetap dilaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang menyangkut tentang program/kegiatan/subkegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan program-program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai masukan untuk penyelenggara pemerintahan daerah.

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM
Jl. Engku Putri No. 1, Lantai. VI. Batam Centre
Telp. (0778)463045 Fax. (0778)461701
Website : bapelitbangda.batam.go.id
Email. bappedabatam@gmail.com